



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 - 2029

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Maju Lebih Cepat, Bersama
Menyejahterakan Musi Banyuasin

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8); dan
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional.
15. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
18. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten adalah program dan kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD disusun berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan Bupati terpilih masa kerja 2025-2029.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan didalam melaksanaan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi yang saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pasal 3

RPJMD disusun dengan memperhatikan:

a. RPJM Nasional;
b. RPJP Daerah Kabupaten; dan
c. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
- 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA
- 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

(1) Pelaksanaan RPJMD dilakukan melalui penjabaran dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, dengan pendekatan kolaboratif antar sektor, penguatan tata kelola Pemerintahan, serta pengendalian dan evaluasi berbasis kinerja.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun, arah kebijakan diturunkan ke dalam program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan dalam rangka menjamin serta memastikan tercapainya visi dan misi Bupati dan wakil Bupati.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten, indikasi Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
(4) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) RPJMD menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Penjabaran RPJMD ke dalam dokumen perencanaan lainnya dilakukan dengan tetap memperhatikan perubahan kebijakan Daerah Kabupaten, dinamika pembangunan, dan aspirasi masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 12 Agustus 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 12 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN: 6-35/2025

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH MUSI BANYUASIN
NOMOR : 6
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perda tentang RPJMD.... I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya. I-9
1.4 Maksud dan Tujuan I-15
1.4.1 Maksud I-15
1.4.2 Tujuan I-16
1.5 Sistematika Penulisan I-16

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-55
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-125
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-236
2.2 Gambaran Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan II-267
2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu II-276
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II-289
2.2.3 Kerangka Pendanaan II-298
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-310
2.3.1 Permasalahan Pembangunan II-310
2.3.2 Isu Strategis Daerah II-334

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1

3.1.1 Visi dan Misi III-2
3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD III-12

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-29

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 ... III-29
3.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahan III-44
3.2.3 Program-program Prioritas Daerah Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD ... III-146
3.2.3.1 Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Kab. Muba dan Provinsi Sumatera Selatan III-266

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah IV-1

4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah IV-6
4.1.2 Indikator Program, Target & Pagu Indikatif Program PD Tahun 2025-2029 ..... IV-21

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-111

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-112
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-116
4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) IV-124

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan V-1

5.2 Pembiayaan V-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin menurut Kecamatan II-3

Tabel 2.2. Topografi Kabupaten Musi Banyuasin II-11

Tabel 2.3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Musi Banyuasin II-17

Tabel 2.4. Curah Hujan di Kabupaten Tahun 2024 II-20

Tabel 2.5. Potensi Bahaya Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin II-25

Tabel 2.6. Jumlah Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, 2019-2021, 2024 II-26

Tabel 2.7. Jumlah Bencana Gempa Bumi Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin,2019 – 2021, 2024 II-26

Tabel 2.8. Jumlah Bencana Tanah Longsor Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, 2019 – 2021, 2024 II-27

Tabel 2.9. Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024 II-39

Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 II-42

Tabel 2.11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin II-52

Tabel 2.12. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 II-57

Tabel 2.13. PDRB Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha II-60

Tabel 2.14. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 II-64

Tabel 2.15. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 II-65

Tabel 2.17. Laju Inflasi Implisit Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023
II-72

Tabel 2.18. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang II-18

Tabel 2.19. Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin (Rupiah) 2014-2024 II-81

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024 II-84

Tabel 2.21. IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan II-103

Tabel 2.22. Jumlah Bayi dan Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 II-114

Tabel 2.23. Anggaran Santunan II-119

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024 II-121

Tabel 2.25. Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 II-122

Tabel 2.26. Jumlah Tempat Peribadatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 II-125

Tabel 2.27. Proyeksi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2029 II-127

Tabel 2.28. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023 II-130

Tabel 2.29. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin II-132

Tabel 2.30. Pelayanan Umum Urusan Kesehatan II-134

Tabel 2.31. Persentase Pengeluaran Non-Makanan II-138

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024 II-141

Tabel 2.33. Kondisi Jalan di Kabupaten Musi Banyuasin 2019-2023 II-143

Tabel 2.34. Peningkatan cakupan Akses layanan Air limbah domestik 5 tahun terakhir II-143

Tabel 2.35. Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah II-145

Tabel 2.36. Peningkatan cakupan Akses layanan Sampah Perkotaan 5 tahun terakhir II-147

Tabel 2.37. Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin II-148

Tabel 2.38. Capaian Indikator Kinerja Utama Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-150

Tabel 2.39. Kawasan Kumuh di Kabupaten Musi Banyuasin II-151

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024 II-153

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten II-157

Tabel 2.42. Ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin II-161

Tabel 2.43. Jumlah Kasus Buruh dengan Pengusaha di Kabupaten Musi Banyuasin II-163

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024 II-166

Tabel 2.45. Neraca Ketersediaan Pangan yang Diproduksi dan Dikonsumsi II-167

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 II-169

Tabel 2.47. Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Musi Banyuasin II-170

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin II-172

Tabel 2.49. Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin II-174

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin II-175

Tabel 2.51. Indeks Desa Membangun Berdasarkan Kecamatan II-178

Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin II-180

Tabel 2.53. Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin II-182

Tabel 2.54. Data Jaringan Jalan dan Jumlah Desa serta Indeks Konektivitas Antarwilayah di Kabupaten Musi Banyuasin II-183

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin II-185

Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin II-188

Tabel 2.57. Koperasi/KUD dan Non KUD dalam Kabupaten Musi Banyuasin II-189

Tabel 2.58. Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin II-193

Tabel 2.59. Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Musi Banyuasin II-196

Tabel 2.60. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Musi Banyuasin II-198

Tabel 2.61. Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Musi Banyuasin II-199

Tabel 2.62. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Banyuasin II-200

Tabel 2.63. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin II-201

Tabel 2.64. Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten Musi Banyuasin II-208

Tabel 2.65. Objek Wisata di Kabupaten Musi Banyuasin II-209

Tabel 2.66. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024 II-212

Tabel 2.67. Luas Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin II-215

Tabel 2.68. Banyaknya Keluarga Bukan Pengguna Listrik Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin II-217

Tabel 2.69. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin II-218

Tabel 2.70. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin II-220

Tabel 2.71. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin II-221

Tabel 2.72. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin II-223

Tabel 2.73. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023 II-226

Tabel 2.74. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Musi Banyuasin II-229

Tabel 2.75. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023 II-232

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin II-233

Tabel 2.77. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Musi Banyuasin II-236

Tabel 2.78. NTP-Tanaman Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (2015=100) II-244

Tabel 2.79. NTP-Perkebunan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (2015=100) II-244

Tabel 2.80. Jumlah Hotel di Kabupaten Musi Banyuasin II-252

Tabel 2.81. Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Musi Banyuasin II-253

Tabel 2.82. Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024 II-254

Tabel 2.83. Indikator yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin II-260

Tabel 2.84. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Musi Banyuasin II-264

Tabel 2.85. Realisasi APBD Kabupaten Musi Banyuasin II-278

Tabel 2.86. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Musi Banyuasin selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 II-279

Tabel 2.87. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2019-2023 II-283

Tabel 2.88. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2019-2023 II-285

Tabel 2.89. Neraca Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2020-2024 II-288

Tabel 2.90. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama 2017 – 2020 II-292

Tabel 2.91. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2020 II-294

Tabel 2.92. Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama 2019-2023 II-296

Tabel 2.93. Analisis Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2030 II-302

Tabel 2.94. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025-2029 II-307

Tabel 2.95. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin II-316

Tabel 2.96. Integrasi Isu KLHS RPJMD II-369

Tabel 3.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Musi Banyuasin III-5

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2030 III-7

Tabel 3.3 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran III-13

Tabel 3.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2030 III-19

Tabel 3.5 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran III-29

Tabel 3.6 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2030 III-35

Tabel 3.7 Arahan Fungsi Kawasan III-53

Tabel 3.8 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Banyuasin II-63

Tabel 3.9 Identifikasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Selatan III-66

Tabel 3.10 Luas Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Musi Banyuasin III-68

Tabel 3.11 Rencana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 III-69

Tabel 3.13 Rencana Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 III-81

Tabel 3.14 Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Musi Banyuasin III-82

Tabel 3.15 Rencana Luas dan Sebaran Lahan Pertanian Tanaman Hortikultura Tanaman Sayur-Sayuran (Ha) Kabupaten Musi Banyuasin III-85

Tabel 3.16 Rencana Luas dan Sebaran Lahan Pertanian Tanaman Hortikultura Tanaman Buah-Buahan (Ha) Kabupaten Musi Banyuasin III-86

Tabel 3.17 Potensi Peternakan Kecil Kabupaten Musi Banyuasin III-91

Tabel 3.18 Potensi Peternakan Besar kabupaten Musi Banyuasin III-91

Tabel 3.19 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Musi Banyuasin III-94

Tabel 3.20 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Musi Banyuasin III-95

Tabel 3.21 Potensi Industi Kabupaten Musi Banyuasin III-110

Tabel 3.22 Potensi Pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin III-114

Tabel 3.23 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 III-116

Tabel 3.24 Rencana Zonasi Wilayah Pengembangan SPAM PDAM Kabupaten Musi Banyuasin III-118

Tabel 3.25 rencana Tingkat Pelayanan Masing-masing Zonasi SPAM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2034 III-142

Tabel 3.27 Program Prioritas untuk Mencapai Tujuan RPJMD III-148

Tabel 3.28 Program Unggulan Kepala Daerah untuk Mencapai Tujuan RPJMD III-193

Tabel 3.29 Tabel Sandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Astacita, 17 Program Prioritas RPJMD Kab. Muba III-197

Tabel 3.30 PDRB per kapita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023 III-269

Tabel 4.1. Tabel Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2030 IV-22

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2030 IV-115

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2030 IV-118

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2030 IV-124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Antar-Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah I-10

Gambar 1.2. Diagram Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dan Perencanaan Sektoral Lainnya I-13

Gambar 1.3. Gambar keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-15

Gambar 2.1. Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2023 II-5

Gambar 2.2. Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, 2023 II-5

Gambar 2.3 Peta Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin II-6

Gambar 2.4. Peta Topografi Kabupaten Musi Banyuasin II-12

Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Musi Banyuasin II-15

Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Musi Banyuasin II-19

Gambar 2.7. Suhu Udara Rata-Rata Bulan Tahun 2024 II-21

Gambar 2.8. Kelembapan Udara Rata-Rata Bulan Tahun 2024 II-22

Gambar 2.9. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Musi Banyuasin II-23

Gambar 2.10. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin II-24

Gambar 2.11. Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Musi Banyuasin II-24

Gambar 2.12. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin II-36

Gambar 2.13. Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 II-40

Gambar 2.14. Indikator Kependudukan Musi Banyuasin II-42

Gambar 2.15. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-to-y) (persen) II-67

Gambar 2.16. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen) II-70

Gambar 2.17. Gini Ratio Kabupaten Musi Banyuasin 2024 II-74

Gambar 2.18. Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin II-76

Gambar 2.19. Gambar Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin II-77

Gambar 2.20. Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin II-81

Gambar 2.21. SPM TBC di Kabupaten Musi Banyuasin 2022-2024 II-88

Gambar 2.22. Treatment Coverage TBC di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 – 2024 II-88

Gambar 2.23. Grafik Keberhasilan Pengobatan Kasus TBC (Success Rate Tuberculosis) di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2022 – 2024 II-89

Gambar 2.24. SPM Pelayanan Kesehatan pada orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS tahun 2022 s.d 2024 II-91

Gambar 2.25. Temuan Kasus baru HIV AIDS tahun 2022 s.d 2024 II-91

Gambar 2.26. Temuan Kasus Malaria di Kabupaten Musi Banyuasin II-93

Gambar 2.27. Capaian Indikator Prevalensi Stunting Pada Balita II-95

Gambar 2.28. Prevalensi Stunting Per Kecamatan Tahun 2022 – 2024 II-96

Gambar 2.29. Jumlah Balita Stunting Per Puskesmas Tahun 2024 II-97

Gambar 2.30. Pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan II-100

Gambar 2.31. IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 II-104

Gambar 2.32. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 II-108

Gambar 2.33. Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan II-109

Gambar 2.34. Angka Literasi dan Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Musi Banyuasin II-110

Gambar 2.35. Angka Kelahiran Bayi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024 II-113

Gambar 2.36. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Musi Banyuasin II-114

Gambar 2.37. Jumlah kematian Ibu di tahun 2024 II-117

Gambar 2.38. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2024 II-126

Gambar 2.39. Persentase Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024 II-136

Gambar 2.40. Angka Pengeluaran Per Kapita Kab. Musi Banyuasin Tahun 2018-2024 II-137

Gambar 2.41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Musi Banyuasin II-159

Gambar 2.42. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024 II-160

Gambar 2.43. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Musi Banyuasin II-165

Gambar 2.44. Indeks SPBE Kabupaten Musi Banyuasin II-187

Gambar 2.45. Nilai Realisasi Investasi PMDN II-191

Gambar 2.44. Nilai Realisasi Investasi PMA II-191

Gambar 2.45. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 II-259

Gambar 3.1 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Musi banyuasin, RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMN III-4

Gambar 3.2 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Musi Banyuasin III-60

Gambar 3.3 Peta Rencana Struktur Tata Ruang III-64

Gambar 3.4 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin III-117

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 5 (lima) tahun. RPJMD disusun sejak dilantiknya secara resmi **H.M.Toha** sebagai Bupati dan **Rohman,** sebagai Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut dituangkan pada Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yaitu sesuai tahapan; a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. Penetapan serta mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah disusun sebelumnya, dilanjutkan dengan penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Tahap selanjutnya dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan sebagai acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah berdasarkan urusan, tugas pokok dan fungsinya. Melalui tahapan ini diharapkan pemetaan program yang dilakukan di setiap Perangkat Daerah memiliki sumbangan yang kuat dan logis dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian dari Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 - 2045, khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu tahun 2025-2029. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah sistematis dan skematis dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin. . Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah **"MUBA SERASAN 2045 : Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan".** RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 memiliki Visi **"Muba Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin"** yang diselaraskan dengan target RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin di tahun berkenaan yang merupakan sasaran awal pada RPJPD. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan misi RPJPD sebagai berikut: 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera; 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Hijau; 3. Mewujudkan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Berkualitas dan Merata; 4. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan; 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berorientasi Pelayanan Prima.

Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 memiliki tantangan pembangunan yang cukup berat. Struktur perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin yang bertumpu pada sektor pertambangan, perkebunan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa menanggung dampak yang lebih berat jika dibandingkan dengan daerah lain yang struktur ekonominya bertumpu pada sektor primer seperti pertanian. Dengan demikian, selaras dengan prioritas nasional maka arah kebijakan pembangunan ke depan akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan sosial.

RPJMD memiliki keterkaitan sistemik dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah rumusan visi, misi dan program

strategis dimanivestasikan ke dalam dokumen RPJMD, maka rumusan Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Arah Kebijakan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhan pendanannya. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target dalam Renstra Perangkat Daerah, demikian pula target RKPD diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang cermat. RPJMD akan mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana, memastikan bahwa pengembangan ekonomi dilakukan dengan cara yang menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat. Tantangan global seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan dinamika ekonomi memerlukan respons yang cepat dan adaptif. RPJMD dirancang untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dengan

strategi yang inovatif dan adaptif, guna meningkatkan daya saing Kabupaten Musi Banyuasin di tingkat regional maupun nasional.

RPJMD juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan terdapat peningkatan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

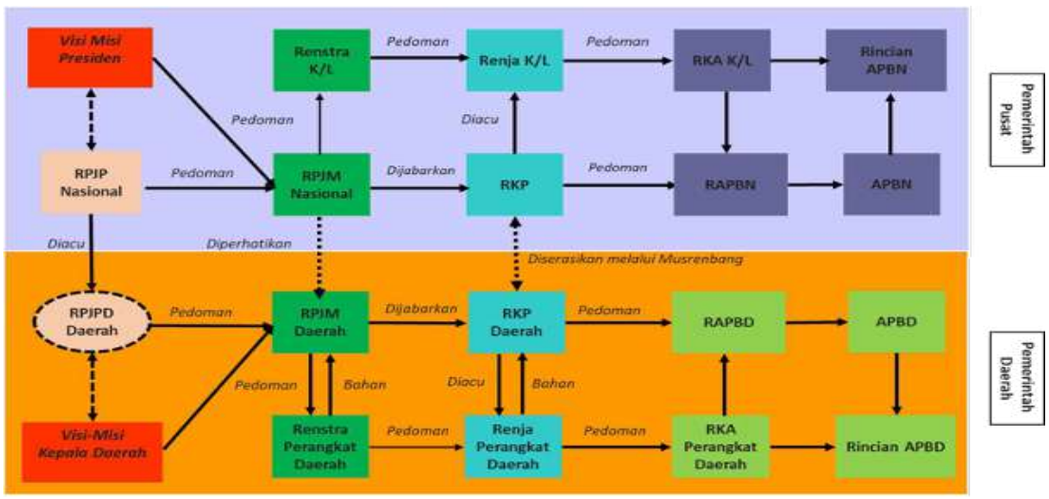
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 nomor 8).

1.3. HUBUNGAN ANTARA RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin mengacu, mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RTRW. Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Keterkaitan Antar-Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Sumber: UU No 25 Tahun 2004, diolah

Penjelasan keterkaitan antar dokumen perencanaan pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

1. Hubungan RPJM Nasional dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin

Keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan RPJM Nasional juga tetap melihat potensi karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin harus mencerminkan dan mendukung

arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Nasional. Ini berarti RPJMD harus sejalan dengan visi dan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Nasional dalam hal ini yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Upaya untuk menyelaraskan ini adalah dengan mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan masalah khusus yang ada di daerah tersebut. Dokumen Perencanaan Nasional memberikan panduan umum bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan perencanaan pembangunan jangka panjang mereka, memastikan keselarasan antara perencanaan nasional dan perencanaan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, Dokumen Perencanaan Nasional berperan sebagai pedoman strategis untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional, dan RPJMD Kabupaten/Kota mengambil alih untuk merinci bagaimana visi pembangunan nasional akan diimplementasikan di tingkat daerah. Hubungan yang erat antara kedua tingkatan perencanaan ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang konsisten, terkoordinasi, dan kolaboratif di seluruh Indonesia.

2. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin

RPJMD Kab. Musi Banyuasin harus selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Provinsi. Ini berarti bahwa RPJMD harus mengikuti panduan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam Dokumen Perencanaan Provinsi. RPJMD Kab. Musi Banyuasin

merinci lebih lanjut bagaimana visi dan misi provinsi akan diimplementasikan di tingkat kabupaten atau kota. Dokumen Perencanaan Provinsi memberikan panduan umum bagi semua pemerintah daerah dalam provinsi tersebut untuk mengarahkan perencanaan pembangunan jangka panjang mereka.

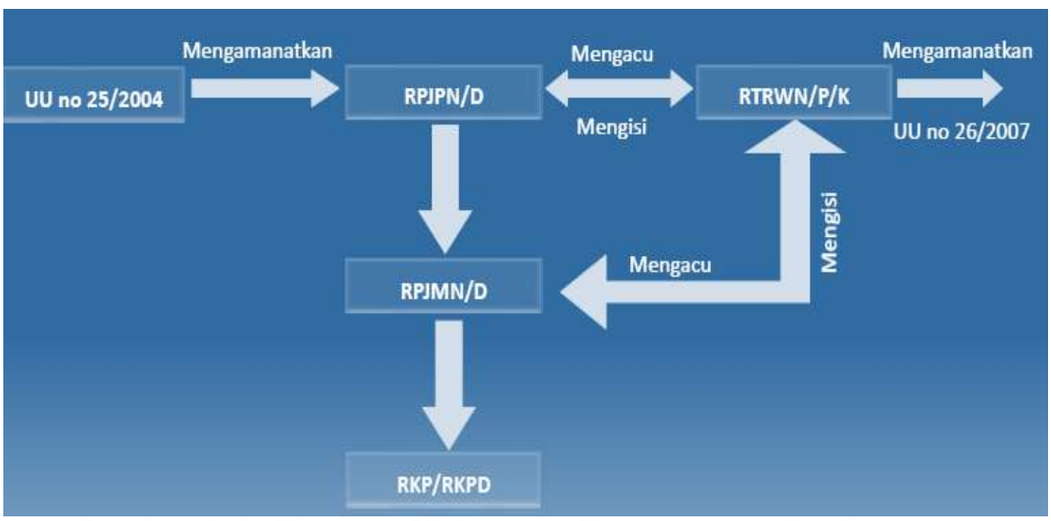
Dengan demikian, Dokumen Perencanaan Provinsi berperan sebagai pedoman strategis untuk perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota mengambil alih untuk merinci bagaimana visi pembangunan Provinsi akan diimplementasikan di tingkat daerah kabupaten atau kota. Hubungan yang erat antara kedua tingkatan perencanaan ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang konsisten dan terkoordinasi di seluruh Provinsi dan Kabupaten atau Kota dalam wilayah tersebut.

3. Hubungan RPJMD Kab. Musi Banyuasin dengan RTRW Kab. Musi Banyuasin

RPJMD dan RTRW adalah dua dokumen yang harus selaras dan bersinergi. RPJMD memberikan arah dan prioritas pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. RTRW, sementara itu, mengatur bagaimana lahan dan ruang di daerah tersebut akan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut secara berkelanjutan. RPJMD dan RTRW harus sejalan untuk memastikan bahwa pengembangan fisik dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut tidak bertentangan dengan visi dan tujuan pembangunan jangka panjang, serta tidak merusak lingkungan. RTRW harus merinci perencanaan tata ruang yang mendukung tujuan dan strategi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD. Ini mencakup penentuan lokasi pembangunan perkotaan,

pengembangan wilayah pedesaan, serta konservasi daerah-daerah yang memiliki nilai lingkungan atau budaya yang tinggi.

Dengan demikian, RPJMD dan RTRW saling melengkapi. RPJMD memberikan arah pembangunan dan prioritas yang harus dicapai, sementara RTRW mengatur cara penggunaan lahan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Hubungan yang erat antara kedua dokumen ini penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sejalan dengan visi dan tujuan pembangunan daerah kabupaten atau kota.



Gambar 1.2. Diagram Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Dan Perencanaan Sektoral Lainnya

Sumber: UU No 25 Tahun 2004, diolah

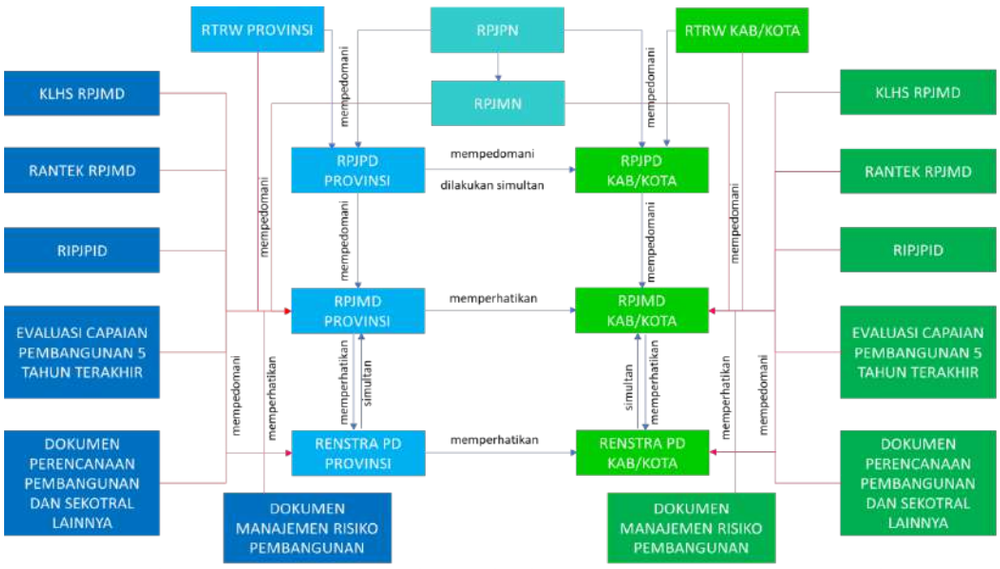
4. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dengan KLHS Kabupaten Musi Banyuasin

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun KLHS RPJMD dalam usaha merealisasikan RPJMD yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin adalah untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip Berkelanjutan sehingga KLHS dapat mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029. Sedangkan, penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin sendiri untuk mengintegrasikan hasil evaluasi dalam proses penyusunan KLHS serta sebagai bahan untuk perbaikan dalam perumusan kebijakan, rencana dan/atau program dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029 dengan melakukan analisis sistematik ditinjau berdasarkan: 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung; 2) Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; 3) Kinerja pelayanan dan jasa ekosistem; 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5) Tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 13.

Adapun keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 1.3. Gambar keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Sumber: UU No 25 Tahun 2004, diolah

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyajikan informasi mengenai data dan informasi pembangunan daerah. RPJMD merupakan rencana dokumen perencanaan lima tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik berdasarkan kajian akademis dan metodologi ilmiah terhadap kondisi, potensi, masalah dan isu- isu strategis lima tahun kedepan.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan panduan strategis yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional;
3. Sebagai pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah sehingga memudahkan dalam mengukur capaian dan keberhasilan program yang telah direncanakan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025- 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum yang melandasinya, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen secara

keseluruhan. Bagian ini memberikan gambaran awal yang menyeluruh mengenai alasan, konteks, dan kerangka penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Menyajikan kondisi aktual daerah dari berbagai aspek, yakni aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Subbab tambahan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, seperti gambaran standar pelayanan minimal, kerja sama daerah, rencana pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui APBN/APBD, serta keberadaan dan peran BUMD. Bab ini juga mencakup gambaran keuangan daerah, yaitu realisasi APBD tahun 2020–2024 serta proyeksi keuangan untuk periode 2025–2029. Di samping itu, turut diuraikan pula permasalahan pembangunan daerah beserta isu-isu strategis yang dihadapi.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan visi dan misi kepala daerah yang berlaku selama periode RPJMD, beserta tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai hingga tahun 2029. Selanjutnya dijelaskan pula strategi, arah kebijakan, serta program-program prioritas yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara terarah dan sistematis. Bab ini menjadi landasan konseptual dan operasional bagi arah pembangunan daerah ke depan.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menguraikan daftar program masing-masing perangkat daerah dalam kerangka pencapaian kinerja pembangunan daerah. Penjelasan meliputi indikator program, target, serta pagu indikatif program selama lima tahun ke depan. Selain itu, bab ini juga memuat target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), guna memastikan keterukuran dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah selama periode RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini, memuat kesimpulan penting secara substantif mengenai isi dokumen, serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten terluas ke-2 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah sebesar 1.467.938 Ha atau yang terdiri dari 15 Kecamatan, 229 Desa, dan 13 Kelurahan. Luas administrasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kab. Musi Rawas dengan Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kab. Musi Banyuasin dengan Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kab. Musi Banyuasin dengan Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dengan Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kab. Batanghari Prov. Jambi dengan Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 129 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kab. Sarolangun Prov. Jambi dengan Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, Permendagri Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah antara Kab. Musi Banyuasin dengan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Prov. Sumatera Selatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Batas

Daerah Kab. Musi Banyuasin dengan Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

Terdapat perbedaan luas administrasi pada dokumen KLHS RPJMD yang disebabkan oleh proses penyusunan dokumen KLHS dilaksanakan sebelum peninjauan kembali dokumen RTRW. Dalam dokumen Peninjauan kembali dan Ranperda RTRW, luas wilayah Kabupaten berdasarkan 7 Peraturan Menteri yang sudah diuraikan sebelumnya menjadi landasan luas wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga dokumen RPJMD mengadopsi luas administrasi yang bersumber dari peninjauan kembali dan Ranperda RTRW 2025-2045. Dengan letaknya yang strategis, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, data mengenai sebaran kecamatan, luas wilayah, dan pusat administrasi kecamatan (ibu kota) menjadi sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan spasial. Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 15 kecamatan yang tersebar dengan karakteristik geografis dan luas yang bervariasi, serta memiliki pusat pemerintahan (ibu kota kecamatan) masing-masing yang berperan sebagai simpul pelayanan pemerintahan dan penggerak pembangunan lokal.

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Bayung Lencir, dengan luas mencapai 450.741,33 hektare, dan ibu kotanya berada di Bayung Lencir. Disusul oleh Kecamatan Batanghari Leko seluas 239.332,32 hektare dengan pusat pemerintahan di Tanah Abang, serta Kecamatan Tungkal Jaya seluas 139.095,08 hektare yang beribukota di Peninggalan. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Babat Toman yang memiliki luas 35.061,94 hektare, dengan pusat administrasi di Babat.

Kecamatan Sekayu, yang juga merupakan pusat pemerintahan kabupaten, memiliki luas 72.709,38 hektare dan beribukota di Serasan Jaya. Beberapa kecamatan lain seperti Lalan (Bandar Agung), Sanga Desa (Ngulak), dan Sungai Keruh (Tebing Bulang) juga memiliki cakupan wilayah yang cukup besar, dengan luas masing-masing di atas 48.000 hektare.

Secara keseluruhan, total luas wilayah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 1.467.938 hektare. Sebaran geografis yang luas dan heterogen ini menjadi tantangan sekaligus potensi bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun strategi pembangunan yang berbasis kewilayahan, mengutamakan pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di setiap kecamatan. Perbedaan jumlah desa/kelurahan di setiap kecamatan ini menunjukkan variasi dalam aspek geografis, demografi, serta aktivitas ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan pemerataan pembangunan dan infrastruktur yang baik, diharapkan seluruh kecamatan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.

Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)
1	Sanga Desa	Ngulak	58.894,25
2	Babat Toman	Babat	35.061,94
3	Batanghari Leko	Tanah Abang	239.332,32
4	Plakat Tinggi	Sido Rahayu	48.657,09
5	Lawang Wetan	Ulak Paceh	42.193,75
6	Sungai Keruh	Tebing Bulang	48.958,90
7	Jirak Jaya	Jirak	42.238,58
8	Sekayu	Serasan Jaya	72.709,38
9	Lais	Lais	59.222,45
10	Sungai Lilin	Sungai Lilin	46.438,88

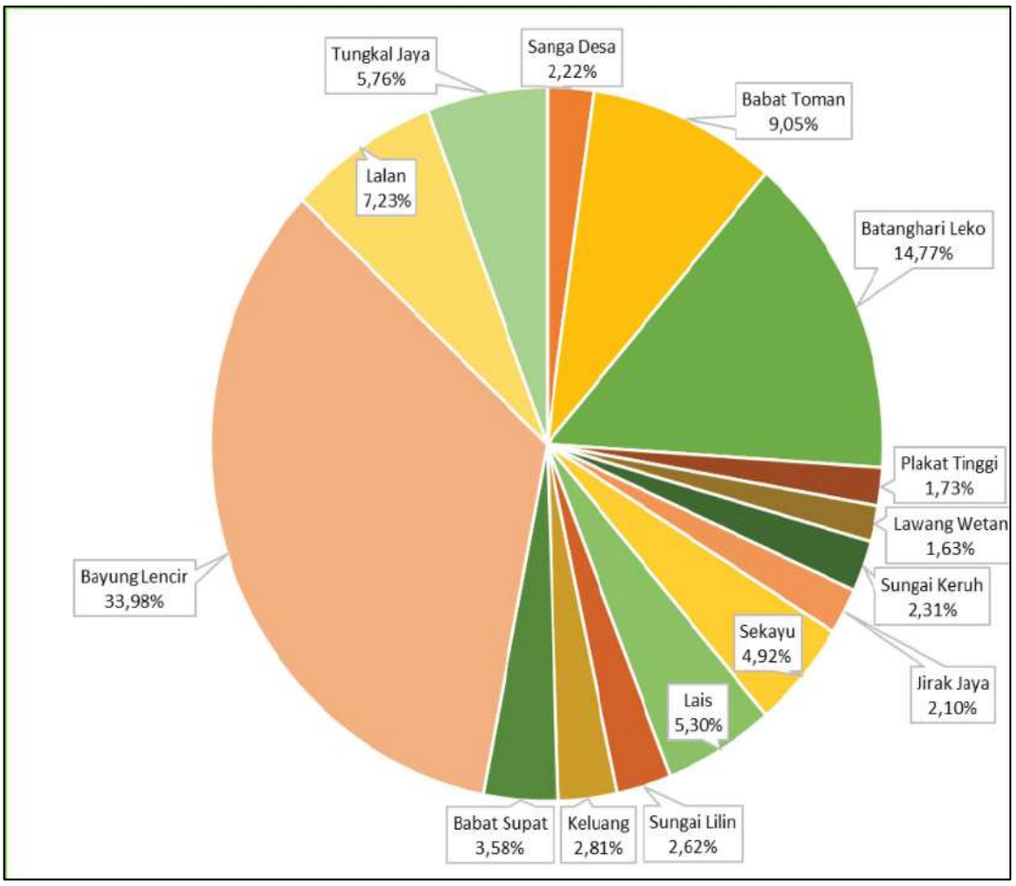
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)
11	Keluang	Keluang	44.234,85
12	Babat Supat	Babat Banyuasin	56.668,00
13	Bayung Lencir	Bayung Lencir	450.741,33
14	Lalan	Bandar Agung	83.489,25
15	Tungkal Jaya	Peninggalan	139.095,08

Sumber: Raperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044

Kabupaten Musi Banyuasin, jika dilihat berdasarkan posisi astronominya, maka terletak diantara garis 1,30° - 4,0° Lintang Selatan dan 104°00 - 105°35' Bujur Timur. Posisi ini menunjukkan bahwa kabupaten ini berada di wilayah bagian selatan Indonesia dengan iklim tropis yang cenderung panas dan lembab sepanjang tahun. Adapun secara administratif, letak wilayah Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu:

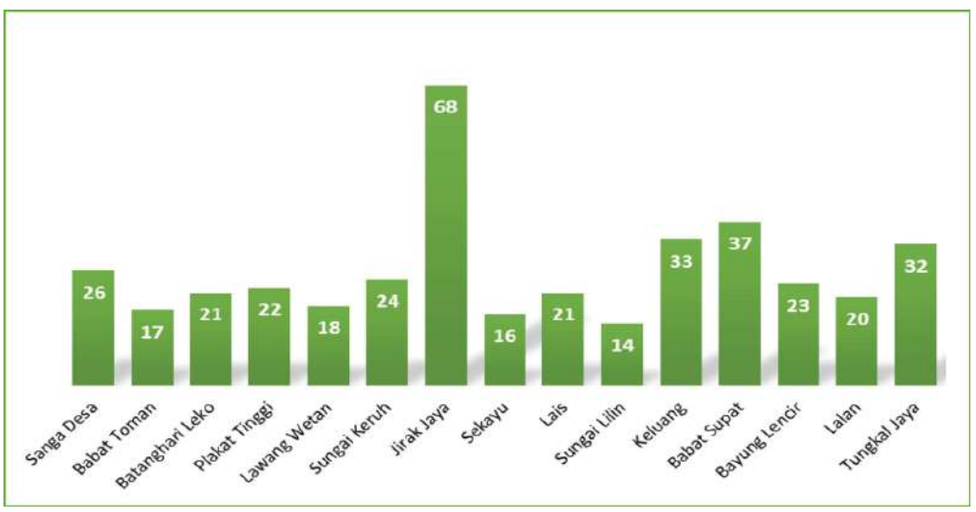
- Sebelah Utara. : Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan. : Kab. Penukal Abab Lematang ilir
- Sebelah Barat. : Kab. Musi Rawas dan Musi Rawas Utara
- Sebelah Timur. : Kab. Banyuasin

Dengan letak geografis yang sangat strategis, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peran penting dalam konektivitas antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, terutama dalam sektor ekonomi, transportasi, dan sumber daya alam.



Gambar 2.1. Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2023

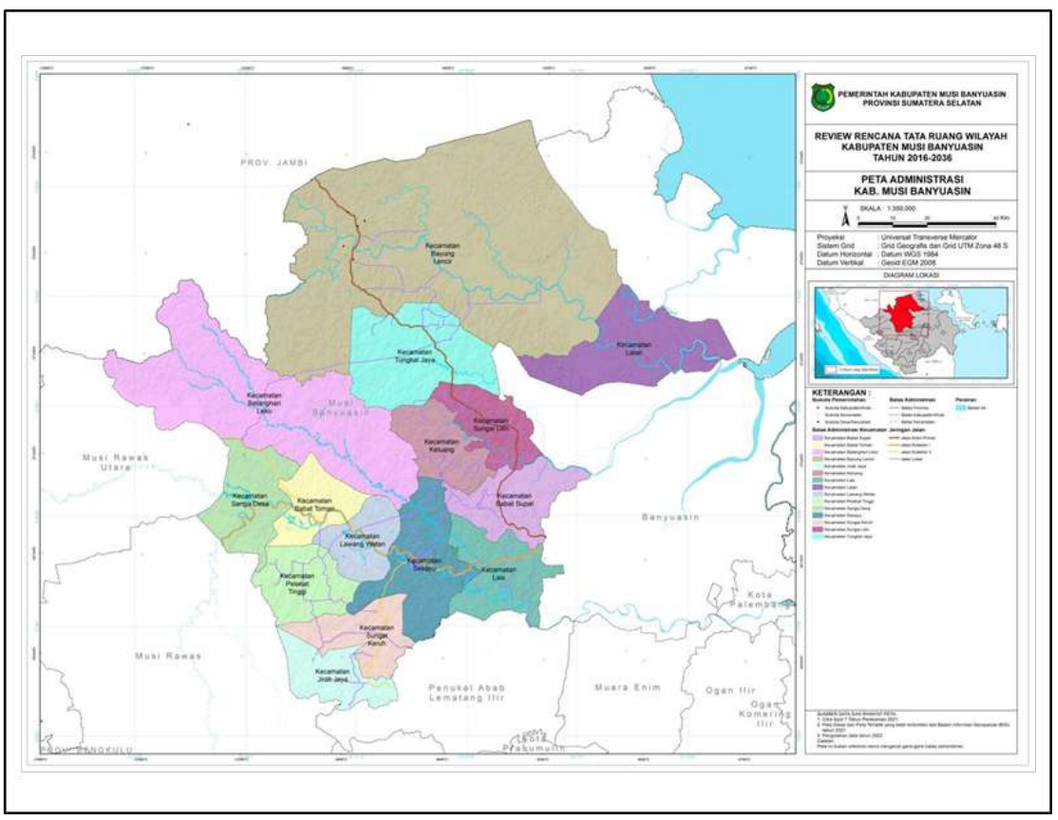
Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2024



Gambar 2.2. Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, 2023 (mdpl)

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2023, diolah 2024

Menurut data luas dan tinggi wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bayung Lencir memiliki luas wilayah terbesar, yakni 34% dari total luas kabupaten. Sementara itu, Kecamatan Plakat Tinggi memiliki luas wilayah terkecil sekitar 1,7%. Secara keseluruhan, luas total Kabupaten Musi Banyuasin adalah 1.467.936,04 Ha, dengan distribusi wilayah yang bervariasi antar kecamatan. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan pembangunan yang merata untuk memastikan setiap kecamatan dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Adapun peta wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin ditampilkan pada gambar 2.3 berikut:



Gambar 2.3 Peta Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2045

2. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan luas wilayah mencapai 1.467.938 Ha. Luas ini mencakup sekitar 15 persen dari total wilayah Provinsi Sumatera Selatan, menjadikannya salah satu daerah dengan cakupan geografis yang signifikan di provinsi ini. Secara administratif, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 15 kecamatan, 229 desa, dan 13 kelurahan. Hal ini mencerminkan luasnya cakupan wilayah serta jumlah penduduk yang cukup besar di kecamatan tersebut.

Sementara itu, Kecamatan Sungai Keruh menjadi kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan paling sedikit di Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun memiliki jumlah desa yang lebih sedikit dibanding kecamatan lain, wilayah ini tetap memiliki potensi dalam berbagai sektor, termasuk pertanian dan perkebunan, yang menjadi sektor utama perekonomian di daerah ini.

3. Topografi

Secara umum, kondisi topografi di daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu dataran rendah, daerah bergelombang, dan kawasan berbukit. Dataran rendah umumnya ditemukan di wilayah timur, terutama di sekitar Kecamatan Sungai Lilin, sedangkan daerah yang lebih bergelombang dan berbukit tersebar di bagian barat, seperti Kecamatan Bayung Lencir.

Selain itu, di sepanjang pinggiran aliran Sungai Musi hingga ke Kecamatan Babat Toman, tanah didominasi oleh rawa-rawa dan lahan payau yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian berkisar antara 14

hingga 37 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, daerah lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari dataran tinggi serta perbukitan yang lebih menonjol, dengan ketinggian yang dapat mencapai 37 meter di atas permukaan laut. Keberagaman topografi ini berkontribusi pada berbagai karakteristik ekologi dan pemanfaatan lahan di wilayah ini, termasuk pertanian, perkebunan, serta kawasan konservasi.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak rawa serta jaringan sungai yang tersebar di berbagai wilayah. Sungai-sungai di daerah ini terdiri dari aliran kecil hingga sungai besar yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat serta ekosistem setempat. Beberapa sungai utama yang mengalir di wilayah ini antara lain Sungai Musi, yang merupakan salah satu sungai terpanjang dan terpenting di Sumatra, Sungai Banyuasin yang bermuara ke perairan laut, serta Sungai Batanghari Leko yang menjadi jalur transportasi air bagi penduduk setempat.

Selain dari rawa dan sungai, Kabupaten Musi Banyuasin juga terdiri dari lebak dan danau-danau kecil. Kondisi ini berguna untuk kegiatan irigasi/pengairan sehingga pencetakan sawah baru dapat mempertimbangkan keberadaan sungai-sungai tersebut. Keberadaan sungai yang dimanfaatkan sebagai air baku PDAM juga dapat berguna sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk. Dengan keberadaan rawa dan sungai yang melimpah, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar dalam bidang perikanan, perkebunan, serta ekowisata berbasis perairan, yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin sangat beragam dan tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik yang

berbeda-beda. Berikut adalah beberapa jenis tanah yang dominan di daerah ini:

1) Tanah Organosol

   Tanah ini umumnya ditemukan di dataran rendah atau daerah rawa-rawa. Ciri khasnya adalah kandungan bahan organik yang tinggi, sehingga sering dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Di Kabupaten Musi Banyuasin, tanah organosol banyak terdapat di wilayah Bayung Lencir, Lais, dan Lalan.

2) Tanah Glei Humus

   Jenis tanah ini juga berada di dataran rendah dan kawasan rawa-rawa. Tanah glei humus sering digunakan untuk persawahan pasang surut dan persawahan rawa, karena mampu menahan air dalam jangka waktu lama. Wilayah yang memiliki jenis tanah ini meliputi Bayung Lencir, Lais, dan Lalan.

3) Tanah Aluvial

   Tanah ini tersebar di sepanjang sungai dan terbentuk dari endapan lumpur yang dibawa oleh aliran air sungai. Tanah aluvial dikenal subur dan sangat cocok untuk pertanian, terutama tanaman pangan dan perkebunan. Beberapa wilayah yang memiliki tanah aluvial di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain Sungai Lilin, Sekayu, Babat Supat, Lais, Batanghari Leko, Babat Toman, Keluang, dan Sanga Desa.

4) Tanah Podsolik

   Tanah ini biasanya terdapat di daerah berbukit-bukit dengan struktur yang relatif berpasir dan kurang subur dibandingkan jenis tanah lainnya. Namun, tanah podsolik masih bisa dimanfaatkan untuk pertanian tertentu dengan pengelolaan yang tepat. Di Kabupaten Musi Banyuasin, tanah podsolik banyak ditemukan di daerah Sungai Keruh,

Plakat Tinggi, Babat Toman, Batanghari Leko, Lais, dan Sungai Lilin.

Keberagaman jenis tanah ini berkontribusi terhadap potensi pertanian, perkebunan, serta pengembangan wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin, yang menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan sektor agraris yang cukup berkembang. Wilayah ini dapat dikatakan memiliki jenis tanah yang tidak peka terhadap erosi, dengan karakteristik tanah yang relatif stabil yang sangat berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.

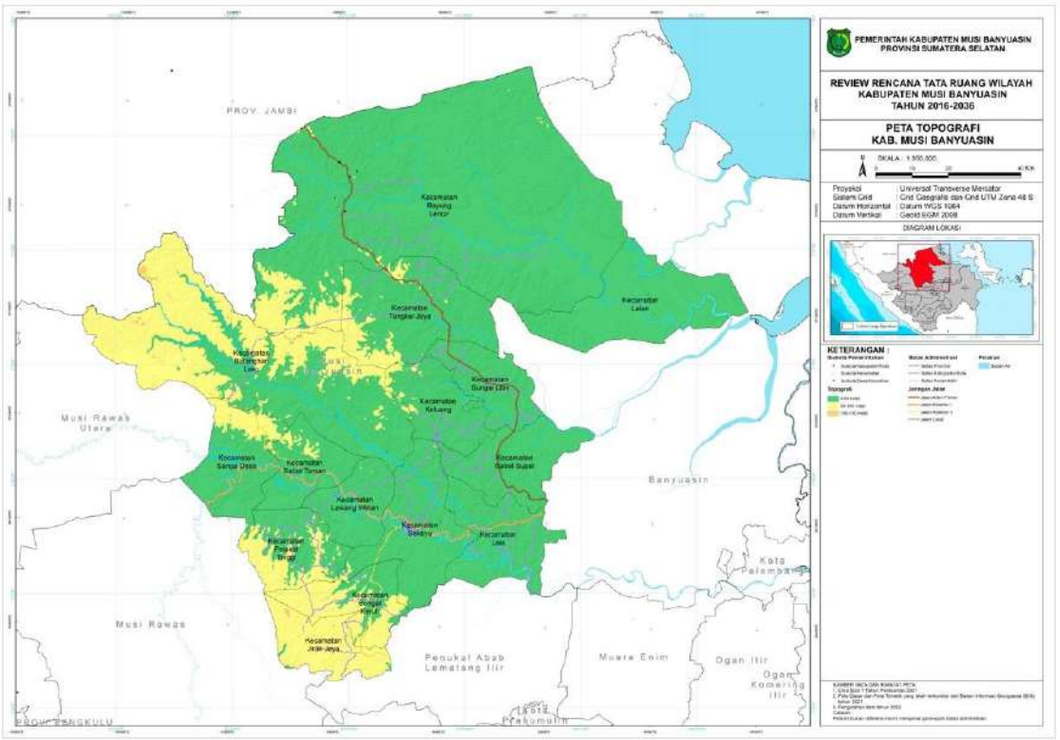
Secara umum, kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah lebih dari 90 cm. Keadaan ini tentu secara dini dapat memberikan indikasi bahwa lahan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat kondusif untuk pertumbuhan tanaman. Selain lahan-lahan dengan kedalaman efektif lebih dari 90 cm, juga ditemukan lahan yang kedalaman efektifnya 60-90 cm.

Tabel 2.2. Topografi Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Ketinggian			
	0-50 mdpl	50-100 mdpl	100-150 mdpl	Total
Sanga Desa	46.436,07	12.519,65		58.955,73
Babat Toman	37.976,99	2.695,58		40.672,56
Batang Hari Leko	100.589,67	127.026,65	1300,19	228916,51
Plakat Tinggi	29.249,96	20.497,96		49747,92
Lawang Wetan	38.906,73	116,68		39023,41
Sungai Keruh	17.299,38	29.216,78		46.516,16
Jirak Jaya	663,49	41.239,56	233,91	42136,95
Sekayu	76.330,68	1.468,13		77798,81
Lais		59.647,89	2,35	59650,24
Sungai Lilin	43.411,61	2,35		43443,96
Keluang	43.468,96	2.817,53		46286,5
Babat Supat	56.852,21			56852,21
Bayung Lencir	457.450,58	26348.85		483799.43
Lalan	95.516.04			95516.04
Tungkal Jaya	82.902.75		15716.85	98619.60
Total	**1.186.733,02**	**279.668,92**	**1.534,1**	**1.467.936,04**

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045

Topografi Kabupaten Musi Banyuasin didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 50 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dari total luas wilayah sekitar 1.467.936 hektare, lebih dari 1,3 juta hektare atau lebih dari 90% berada dalam rentang ketinggian ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Musi Banyuasin merupakan dataran rendah yang secara geografis cenderung datar, berawa, dan memiliki tingkat elevasi yang sangat kecil.



Gambar 2.4. Peta Topografi Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044

4. Kondisi Geologi

Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar dibentuk oleh batuan sedimen dan aluvium yang terdiri dari lumpur, lempung, pasir, dan kerikil. Endapan aluvium umumnya bersifat lunak dan berdaya dukung untuk pondasi rendah. Sedangkan batuan sedimen bersifat agak keras sampai dengan keras dan berdaya dukung sedang sampai dengan tinggi. Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara fisiografi termasuk daerah Cekungan Sumatera Selatan yang dibatasi oleh Dataran Sunda di sebelah timur laut, Tinggian Lampung di sebelah tenggara, Pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat daya, serta Pegunungan Duabelas dan Pegunungan Tigapuluh di sebelah barat laut.

Secara fisiografi, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk dalam wilayah Cekungan Sumatera Selatan, sebuah cekungan sedimen yang memiliki

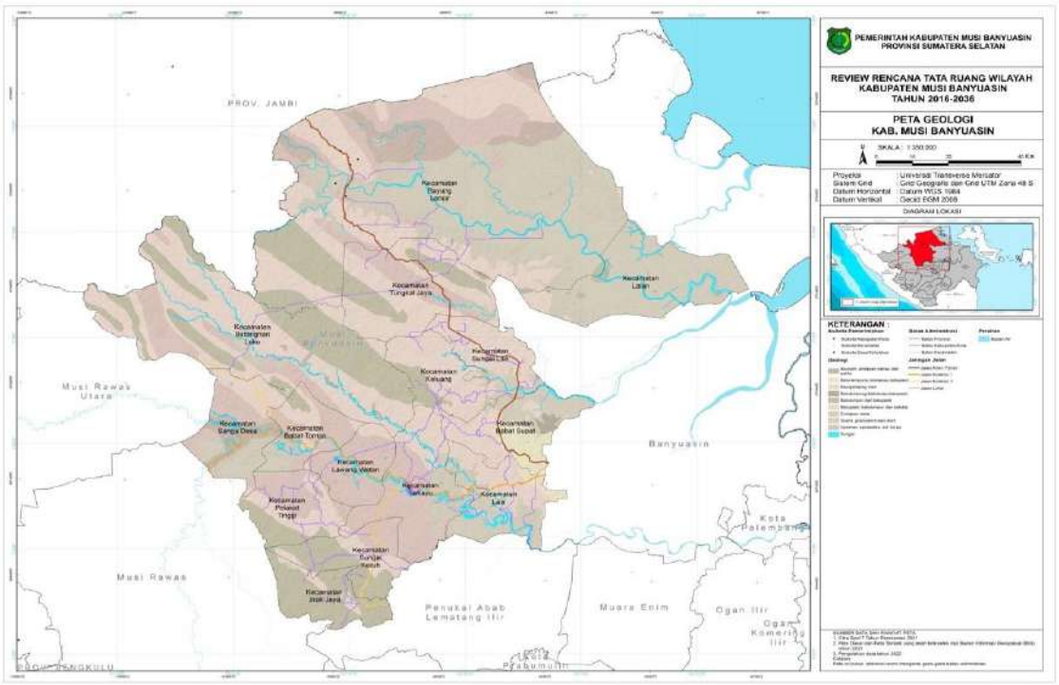
peran penting dalam pembentukan struktur geologi di kawasan ini. Cekungan ini dibatasi oleh beberapa formasi geografis utama, yaitu Dataran Sunda di sebelah timur laut, Tinggian Lampung di sebelah tenggara, Pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat daya, serta Pegunungan Duabelas dan Pegunungan Tigapuluh di sebelah barat laut.

Keberadaan cekungan ini menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi geologi yang signifikan, terutama dalam sektor sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, serta bahan galian lainnya. Selain itu, karakteristik geologi wilayah ini juga mempengaruhi pola penggunaan lahan, potensi pertanian, serta keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi geologi menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan peta Geologi Lembar Palembang (S. Gafoer, dkk., 1986), Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara geologi terbagi ke dalam dua bagian utama, yaitu sebagian termasuk dalam Sub Cekungan Palembang bagian utara dan sebagian lainnya berada dalam Sub Cekungan Jambi. Kedua sub cekungan ini merupakan bagian dari Cekungan Sumatera Selatan, yang terbentuk pada zaman Tersier dan memiliki peran penting dalam sejarah geologi kawasan ini. Pada awal pembentukan antara kedua sub cekungan tersebut terdapat Tinggian Tamiang dan Iliran serta Tinggian Melintang Bentayan. Struktur-struktur ini berperan sebagai batas alami yang membedakan karakteristik endapan sedimen di masing-masing sub cekungan.

Seiring waktunya, aktivitas dari tektonik dan proses sedimentasi yang terus berlangsung menyebabkan perubahan pada cekungan ini, menciptakan lapisan-lapisan batuan yang beragam serta membentuk

lingkungan geologi yang mendukung keberadaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kondisi geologi Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk pembagian sub cekungan serta struktur geologi yang membatasinya, sangat penting dalam eksplorasi sumber daya, pengelolaan lingkungan, serta perencanaan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Di daerah ini terdapat dua satuan stratigrafi batuan yang diendapkan selama zaman tersier, yakni Kelompok Telisa dan Kelompok Palembang. Runtunan litologinya menunjukkan bahwa Kelompok Telisa merupakan satuan batuan yang terbentuk dalam fase genangan laut, terdiri dari Formasi Talang Akar (tak tersingkap) dan Formasi Gumai. Sebaliknya, Kelompok Palembang terbentuk dalam fase susut laut, terdiri dari Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim, dan Formasi Kasai. Formasi Talang Akar (tak tersingkap) merupakan satuan batuan tertua yang mendasari batuan di daerah ini, yang terbentuk pada kala Oligosen – Miosen Awal. Formasi ini tertindih selaras oleh serpih Formasi Gumai yang berumur Miosen Awal – Miosen Tengah. Setelah pengendapan Formasi Gumai yang merupakan tahap puncak genang laut, diendapkan Formasi Air Benakat sebagai hasil dari awal fase susut laut. Formasi ini terdiri dari batu lanau berkarbon dengan sisipan lanau kuarsa, umurnya Miosen Tengah – Miosen Akhir. Paling atas adalah Formasi Kasai yang menindih selaras Formasi Muaraenim. Formasi ini terdiri dari tufa, batu lempung, dan batu pasir tufaan, diduga berumur Plio – Pleistosen.



Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045

5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk dalam kategori daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang datangnya bersifat musiman**,** di mana pada saat musim hujan tiba, tanah menjadi lebih subur, sehingga pertumbuhan tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan, dapat berkembang dengan baik.

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sumber daya air yang melimpah, yang dapat dikategorikan menjadi sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Sumber daya air permukaan meliputi berbagai badan air seperti sungai, danau, rawa-rawa, dan perairan laut, yang perannya sangat penting dalam menunjang berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pertanian, perkebunan, dan permukiman. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini berfungsi sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, sedangkan rawa dan danau

dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air untuk berbagai kebutuhan, termasuk perikanan dan ekowisata.

Selain itu, sumber daya air tanah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Dengan adanya cadangan air tanah yang cukup melimpah, daerah ini memiliki peluang besar dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang lebih baik. Secara keseluruhan, potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin memberikan peluang yang sangat besar bagi pembangunan di berbagai sektor, termasuk pemenuhan kebutuhan air minum, irigasi pertanian, industri, hingga pengembangan sektor pariwisata berbasis air. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang bijak dan berkelanjutan, Kabupaten Musi Banyuasin dapat terus berkembang sebagai daerah yang memiliki ketahanan air serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pola aliran sungai dan sifat tata airnya, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan menjadi wilayah dataran kering dan rawa. Sungai-sungai yang ada pada daerah rawa mempunyai pola aliran *rectangular* (cabang sungai tegak lurus), sedangkan di wilayah dataran kering pola aliran sungainya dendritik (menjari atau bercabang). Pada sungai-sungai besar aliran airnya ada sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh perubahan musim secara signifikan, sehingga pada sungai-sungai jenis ini dapat dipergunakan sebagai moda transportasi, sungai tersebut antara lain Sungai Musi dan Sungai Lalan.

Pada daerah dataran kering dengan pola aliran dendritik keberadaaan air permukaan umumnya ada pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau keberadaan air permukaan umumnya langka yang disebabkan

oleh menurunnya curah air hujan dan batuan penyusunnya yang umumnya kedap air sehingga kemunculan mata air langka di daerah ini.

Menurut debit airnya, sungai-sungai yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan DAS Musi memiliki debit rata-rata 763 m3/detik, sedangkan DAS Air Lalan memiliki debit rata-rata 196,8 m3/detik. Sungai Dawas memiliki rata-rata debit air 1,6 m3/detik yang merupakan debit terkecil dibandingkan dengan sungai-sungai yang lain di Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan sungai yang memiliki debit paling besar adalah sungai Lalan dengan debit 196,8 m3/detik.

Tabel 2.3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Musi Banyuasin

Nama DAS	Panjang Sungai (KM)	Luas DAS (Ha)	Debit (M^3/detik)
Sungai Ibul (Anak Sungai Musi)	35	14.500	3,3
Sungai A. Calik (Anak Sungai A.Banyuasin)	57	96.400	28
Sungai Dawas (Anak Sungai A. Calik)	50	6.500	1,6
Sungai Supat (Anak Sungai A. Calik)	32	22.600	5,1
Sungai Keluang (Anak Sungai A. Calik)	19	9.400	2,1
Sungai Tungkal (Anak Sungai A. Calik)	82	149.500	33,6
Sungai Lalan (Anak Sungai A.Banyuasin)	243	830.300	196,8
Sungai Merang (Anak Sungai Lalan)	66	83.900	24,4
Sungai Bohar (Anak Sungai Lalan)	20	10.000	2,2
Sungai Medak (Anak Sungai Lalan)	72	108.300	25,7
Sungai Tungkal (Anak Sungai Lalan)	25	5.900	1,9
Sungai Serdang (Anak Sungai Lalan)	34	8.300	2,4
Sungai Meranti (Anak Sungai Lalan)	28	15.100	4,4
Sungai Kepahiang (Anak Sungai Lalan)	16	13.300	3,9
Sungai Mangsang (Anak Sungai Lalan)	18	7.400	1,8
Sungai Mendis (Anak Sungai Lalan)	19	3.900	0,9
Sungai Batang Hari Leko (Anak Sungai Musi)	176	374.600	103,9
Sungai Kapas (Anak S. Batang Hari Leko)	63	71.300	16,9
Sungai Meranti (Anak S. Batang Hari Leko)	38	26.400	8,8
Sungai Putat (Anak S. Batang Hari Leko)	38	20.100	8,6
Sungai A. Aur (Anak S. Batang Hari Leko)	19	12.700	5,4

Nama DAS	Panjang Sungai (KM)	Luas DAS (Ha)	Debit (M^3/detik)
Sungai Rampasan (Anak S. Batang Hari Leko)	19	11.600	4,9
Sungai Angit (Anak S. Batang Hari Leko)	13	5.300	2,3
Sungai Kukui (Anak S. Batang Hari Leko)	15	10.200	4,3
Sungai Lalang (Anak S. Batang Hari Leko)	25	21.900	5,2

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

6. Penggunaan Lahan

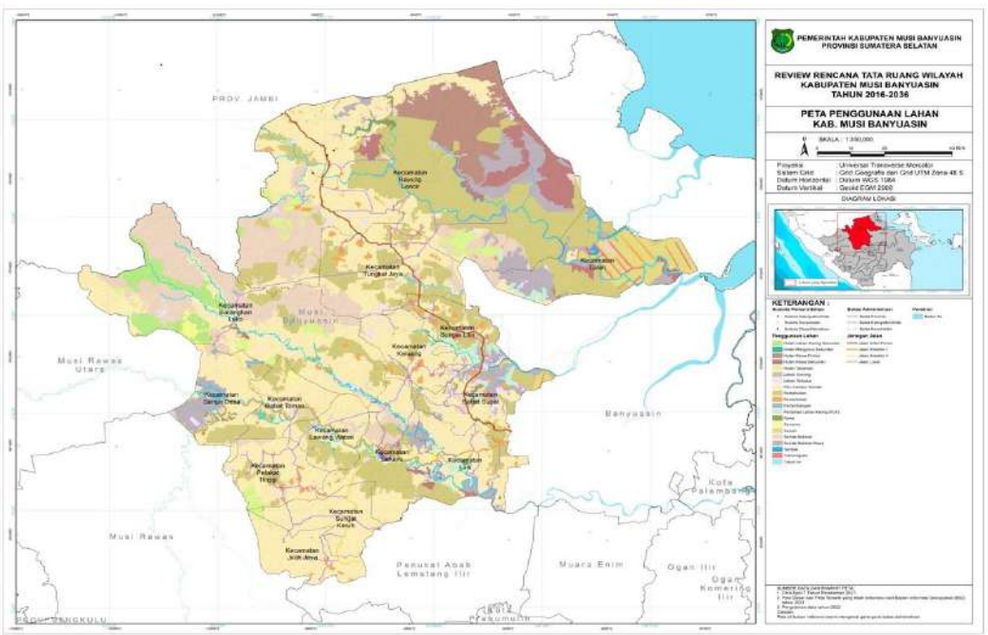
Kabupaten Musi Banyuasin memiliki beragam jenis penggunaan lahan, yang dikelompokkan ke dalam 20 jenis penggunaan tanah yang terdiri dari hutan lahan kering sekunder seluas 25.664,56 hektare, hutan mangrove sekunder seluas 249,68 ha, hutan rawa primer seluas 56.637,03 ha, hutan rawa sekunder seluas 39.409,56 ha, hutan tanaman seluas 21.913,21 ha, perkebunan seluas 643.529,54 ha, permukiman seluas 32.797,27 ha, pertambangan seluas 2.178,81 ha, pertanian lahan kering seluas 11.572,75 ha, PKL campur semak seluas 603.031,27 ha, rawa seluas 6.121,40 ha, savana seluas 4.902,41 ha, sawah seluas 31.581,7 ha, semak belukar seluas 189.888, 29 ha, semak belukar rawa seluas 85.860,59 ha, tambak seluas 572,28 ha, tubuh air seluas 11710,19 ha, lahan kosong seluas 52,18 ha, dan lahan terbuka seluas 15.432,45 ha.

Setiap jenis dari penggunaan lahan ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam mendukung kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah. Selanjutnya, perkebunan besar juga menjadi salah satu jenis penggunaan lahan yang signifikan di Kabupaten Musi Banyuasin, dengan luas mencapai 643.529,54 hektare atau 43,8 % dari total wilayah kabupaten.

Sementara itu, jenis penggunaan lahan lainnya memiliki penyebaran yang relatif lebih kecil dibandingkan keempat kategori utama di atas.

Namun, lahan-lahan ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan wilayah, baik dalam sektor pertanian, perumahan, infrastruktur, maupun industri. Beberapa di antaranya termasuk permukiman, lahan pertanian, lahan terbuka hijau, serta kawasan peruntukan lainnya yang menjadi bagian integral dari perencanaan tata ruang daerah.

Secara keseluruhan, dengan luasnya lahan yang didominasi oleh hutan primer dan kawasan budidaya perkebunan, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta pengembangan sektor industri dan pariwisata berbasis lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan, pemanfaatan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.



Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045

7. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki iklim tropis basah, yang ditandai dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Banyuasin, curah hujan di wilayah ini memiliki variasi jumlah yang berkisar antara 133,1 mm hingga 578,1 mm per bulan.

Curah hujan tertinggi biasanya terjadi pada bulan Oktober, di mana intensitas hujan meningkat secara signifikan, menyebabkan kelembapan udara yang lebih tinggi serta meningkatkan ketersediaan air bagi sektor pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni dan Juli, di mana intensitas hujan berkurang, yang dapat mempengaruhi sektor pertanian dan sumber daya air di wilayah ini.

Tabel 2.4. Curah Hujan di Kabupaten Tahun 2024

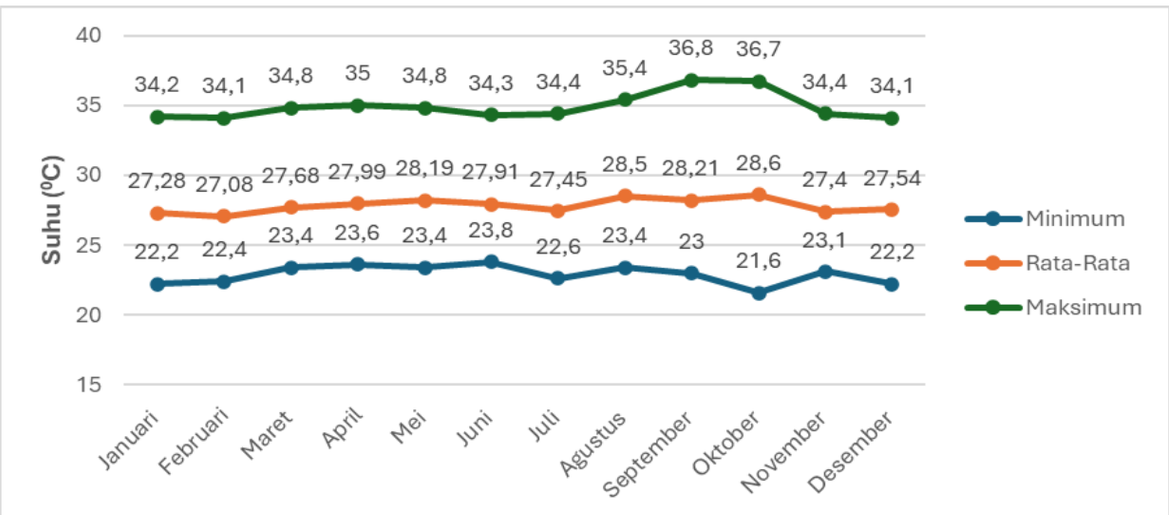
Bulan	Jumlah Curah Hujan
Januari	277,10
Februari	381,00
Maret	289,80
April	261,10
Mei	452,30
Juni	123,50
Juli	131,80
Agustus	16,60
September	196,20
Oktober	147,60
November	303,50
Desember	363,50

Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

Suhu udara merupakan ukuran tingkat panas atau dinginnya atmosfer di suatu daerah. Ini adalah salah satu parameter cuaca utama yang paling sering diukur dan diamati dalam meteorologi. Suhu udara dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti intensitas sinar matahari, ketinggian tempat, dan kondisi geografis suatu wilayah. Perubahan suhu udara juga berpengaruh terhadap pola cuaca dan iklim, serta dapat memengaruhi aktivitas manusia, pertumbuhan tanaman, dan keseimbangan ekosistem. Sementara itu, kelembaban udara mengacu pada jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Kelembaban udara dapat bervariasi tergantung pada kondisi suhu, tekanan udara, dan faktor lingkungan lainnya.

Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak dari pada kandungan uap air dalam udara dingin. Berdasarkan data dari BPS suhu udara tertinggi terjadi pada bulan November 2023 dengan suhu 37,4°C, sebaliknya suhu terendah berada di bulan Juli 2023 dengan suhu sebesar 22,4°C. Hal ini erat kaitannya dengan durasi dan sudut datangnya sinar matahari di wilayah tersebut. Durasi dan sudut datangnya sinar matahari di wilayah tersebut.



Gambar 2.7. Suhu Udara Rata-Rata Bulan Tahun 2024

Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024, diolah



Gambar 2.8. Kelembapan Udara Rata-Rata Bulan Tahun 2024

Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024, diolah

8. Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Secara umum, untuk menilai tingkat kerawanan bencana di suatu daerah Pemerintah Indonesia telah menetapkan sebuah indikator yakni Indeks Risiko Bencana. Indeks ini dihitung dengan mempertimbangkan kerentanan, bahaya, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi kebencanaan. Berdasarkan publikasi Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia, trend Risiko Bencana Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari 2018 sampai 2023, ~~namun~~ kemudian meningkat di tahun 2024 sebesar 3.66 indeks menjadi 115.65. Artinya terjadi peningkatan kerentanan atau ancaman bencana di Kabupaten Musi Banyuasin. Bencana

hidrometeorologi dominan seperti banjir dan kebakaran hutan sangat dipengaruhi oleh cuaca ekstrem dan kebakaran gambut sepanjang 2023-2024 mengakibatkan ancaman bencana meningkat.



Gambar 2.9. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Musi Banyuasin

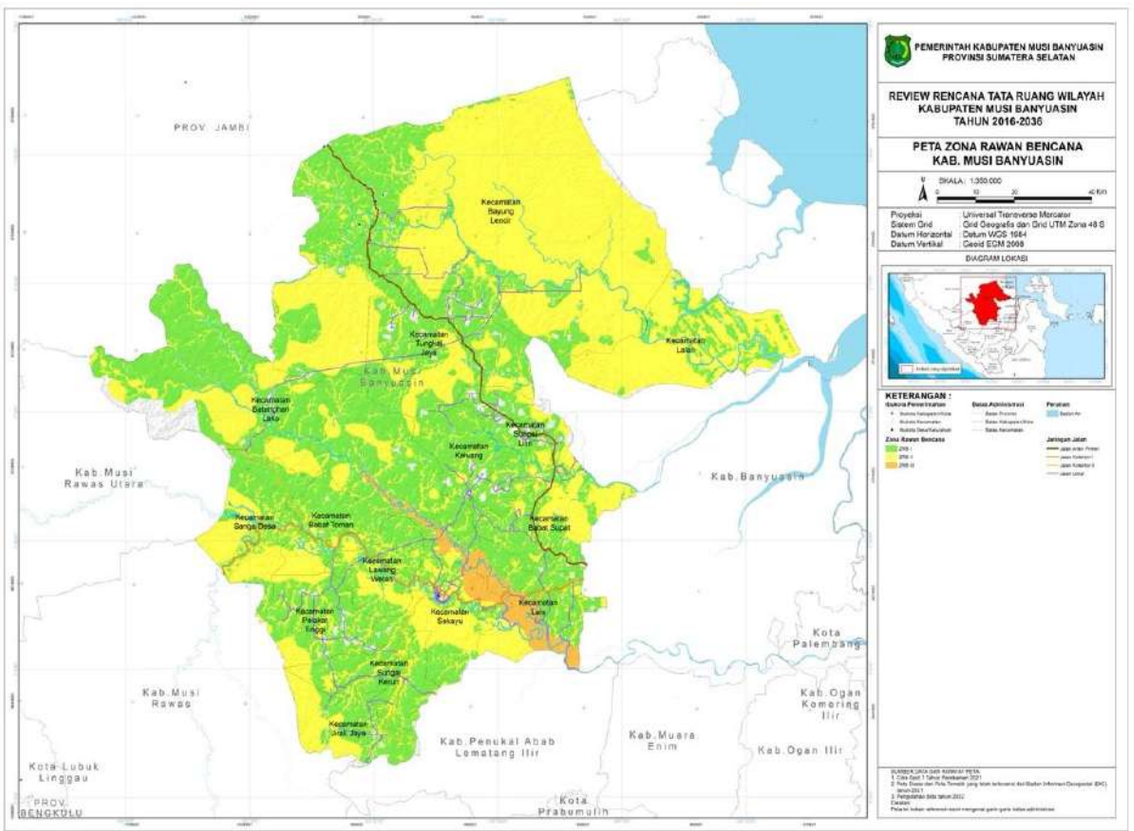
Sumber: Dokumen Indeks Risiko Bencana 2025, diolah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen kapasitas penanggulangan bencana dan termasuk dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung stagnan dengan kategori ketahanan daerah sedang, artinya diperlukan peningkatan terhadap fokus prioritas daerah sebagai upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana.



Gambar 2.10. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Publikasi BNPB, diolah



Gambar 2.11. Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045

Selanjutnya berdasarkan gambar 2.13, secara umum, terdapat variasi yang signifikan dalam distribusi luas banjir di seluruh kecamatan. Berdasarkan dokumen Rencana Kontijensi Banjir yang disusun oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdapat potensi bahaya banjir per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Potensi Bahaya Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Babat Supat	2.725	8.046	12.333	23.104	Tinggi
2	Babat Toman	1.742	4.778	8.841	15.360	Tinggi
3	Batang Hari Leko	4.449	13.170	20.516	38.134	Tinggi
4	Bayung Lencir	27.550	91.016	102.324	220.890	Tinggi
5	Jirak Jaya	1.263	2.007	4.019	7.289	Tinggi
6	Keluang	1.511	3.200	3.803	8.514	Tinggi
7	Lais	3.675	15.017	16.728	35.420	Tinggi
8	Lalan	5.482	23.523	34.207	63.212	Tinggi
9	Lawang Wetan	2.780	7.023	9.989	19.791	Tinggi
10	Plakat Tinggi	1.603	3.648	5.850	11.102	Tinggi
11	Sanga Desa	2.834	9.460	14.755	27.049	Tinggi
12	Sekayu	4.077	11.387	18.310	33.774	Tinggi
13	Sungai Keruh	1.266	3.365	6.027	10.658	Tinggi
14	Sungai Lilin	1.922	6.791	5.499	14.212	Tinggi
15	Tungkal Jaya	2.881	7.189	11.394	21.463	Tinggi
Kabupaten Musi Banyuasin		**65.757**	**209.621**	**274.594**	**549.972**	**Tinggi**

(Sumber: KRB Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2027)

Sementara itu, kecamatan seperti Bayung Lencir, Lalan, dan Batanghari Leko memiliki luas banjir tinggi yang dominan. Kecamatan dengan Luas Banjir Tertinggi antara lain, Kecamatan Bayung Lencir memiliki luas banjir tertinggi dengan 220.890 Ha, yang terdiri dari banjir rendah, sedang, dan tinggi. Kecamatan Lalan seluas 63.212 ha dan Kecamatan Batanghari Leko juga memiliki luas banjir sebesar 38.134 ha. Kecamatan dengan luas banjir terendah antara lain Kecamatan Jirak Jaya memiliki luas banjir terendah dengan total 7.289 Ha. Kecamatan Sungai Keruh dan Kecamatan Keluang juga termasuk kecamatan dengan luas banjir yang lebih rendah dibanding yang lain.

Tabel 2.6. Jumlah Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, 2019-2021, 2024

Kecamatan Subdistrict	Banjir/*Flood*			
	2019	2020	2021	2024
Sanga Desa	2	3	1	-
Sungai Keruh	1	1	1	2
Sekayu	–	–	1	-
Lalan	–	–	1	-
Lawang Wetan	4	3	3	1
Babat Supat	–	2	3	-
Lais	–	11	7	8
Babat Toman	–	2	–	-
Batanghari Leko	3	–	–	-
Plakat Tinggi	–	–	–	1
Jirak Jaya	–	–	–	1
Sungai Lilin	–	–	–	1
Keluang	–	–	–	-
Bayung Lencir	1	1	–	1
Tungkal Jaya	–	–	–	1
Musi Banyuasin	11	23	17	16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin 2025

Tabel 2.7. Jumlah Bencana Gempa Bumi Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin,2019 – 2021, 2024

Kecamatan Subdistrict	Gempa Bumi/*Earthquake*			
	2019	2020	2021	2024
Sanga Desa	-	-	-	-
Babat Toman	-	-	-	-
Batanghari Leko	-	-	-	-
Plakat Tinggi	-	-	-	-
Lawang Wetan	-	-	-	-
Sungai Keruh	-	-	-	-
Jirak Jaya	-	-	-	-
Sekayu	-	-	-	-
Lais	-	-	-	-
Sungai Lilin	-	-	-	-
Keluang	-	-	-	-
Babat Supat	-	-	-	-
Bayung Lencir	-	-	-	-
Lalan	-	-	-	-
Tungkal Jaya	-	-	-	-
Musi Banyuasin	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin 2025

Tabel 2.8. Jumlah Bencana Tanah Longsor Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, 2019 – 2021, 2024

Kecamatan	Tanah Longsor			
	2019	2020	2021	2024
Sanga Desa	3	1	–	–
Babat Toman	–	1	–	–
Batanghari Leko	–	–	–	–
Plakat Tinggi	–	–	–	–
Lawang Wetan	–	–	–	–
Sungai Keruh	–	–	–	–
Jirak Jaya	–	–	–	–
Sekayu	4	2	2	3
Lais	1	–	1	-
Sungai Lilin	–	–	–	–
Keluang	–	–	–	–
Babat Supat	–	–	–	–
Bayung Lencir	–	–	–	–
Lalan	–	–	–	–
Tungkal Jaya	–	–	–	–
Musi Banyuasin	8	4	3	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin 2025

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, banjir merupakan jenis bencana paling dominan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin dibandingkan tanah longsor maupun gempa bumi. Dalam periode tiga tahun (2020, 2021, 2024), tercatat 56 kasus banjir, jauh melampaui tanah longsor yang hanya terjadi sebanyak 10 kali, sementara gempa bumi tidak tercatat sama sekali. Puncak kasus banjir terjadi pada tahun 2020 dengan 23 kasus, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kecamatan Lais tercatat sebagai wilayah paling rentan, dengan 26 kasus banjir, termasuk 11 kasus yang terjadi pada tahun 2020. Selain itu, wilayah Lawang Wetan dan Babat Supat juga sering terdampak banjir.

Sementara itu, bencana tanah longsor menunjukkan tren penurunan. Pada 2020 terdapat 4 kasus, menurun menjadi 3 kasus pada 2021, dan 3 kasus pada 2024. Kecamatan Sekayu menjadi wilayah yang paling sering

mengalami longsor sebanyak 7 kasus, diikuti oleh Kecamatan Sanga Desa sebanyak 1 kasus, Kecamatan Babat Toman sebanyak 1 kasus. dan Kecamatan Lais sebanyak 1 kasus. Sebagian besar kecamatan lainnya tidak mengalami longsor, menandakan bahwa kejadian longsor cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Berbeda dengan kedua jenis bencana tersebut, tidak ada laporan mengenai gempa bumi di seluruh kecamatan, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin tergolong aman dari risiko gempa berdasarkan data tersebut.

9. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat luas dan mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan infrastruktur. Kabupaten ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi, gas alam, dan hasil hutan yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet, menjadi salah satu andalan dalam menopang perekonomian masyarakat. Potensi pariwisata juga cukup menjanjikan dengan adanya keindahan alam, sungai, dan budaya lokal yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan.

Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 km^2, memiliki tantangan dalam melakukan pengembangan wilayah karena memiliki beberapa kawasan hutan lindung. Potensi pengembangan wilayah dan kawasan hutan lindung akan bersifat saling terkait dan sering kali menjadi sumber konflik. Kawasan hutan lindung menyediakan potensi sumber daya alam yang penting untuk pembangunan berkelanjutan tetap pengembangannya dibatasi menjadi fungsi ekologis dan perlu dikelola dengan kehati-hatian.

1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung merupakan bagian penting dalam upaya konservasi alam yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain berperan sebagai habitat alami bagi berbagai flora dan fauna, kawasan ini juga memiliki fungsi ekologis yang vital, seperti penyerap karbon, penyedia oksigen, serta pelindung tanah dari erosi dan bencana alam. Dalam konteks pengembangan wilayah, kawasan hutan lindung dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk berbagai tujuan, seperti ekowisata, penelitian ilmiah, serta sebagai daerah tangkapan air yang berperan dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Dengan pendekatan yang tepat, pemanfaatan ini dapat mendukung perekonomian lokal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Saat ini, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kawasan hutan lindung seluas kurang 16.369,07 hektare. Kawasan ini mencakup Hutan Lindung Kademba dan Hutan Lindung Sungai Jernih, yang terletak di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Sanga Desa. Keberadaan kedua kawasan hutan ini menjadi aset berharga bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjaga kelangsungan ekosistem, mendukung keanekaragaman hayati, serta berpotensi menjadi destinasi ekowisata yang menarik. Dengan pengelolaan yang baik dan berbasis konservasi, kawasan hutan lindung ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

2) Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam merupakan area yang diatur dan dilindungi secara hukum untuk melestarikan keanekaragaman hayati, habitat, dan ekosistem tertentu (Castro et al., 2015). Tujuan utamanya adalah untuk

melindungi spesies-spesies langka, endemik, dan terancam punah, serta menjaga keseimbangan ekosistem yang penting bagi keberlangsungan kehidupan. Selain itu, kawasan ini juga berfungsi sebagai benteng alam dalam mitigasi perubahan iklim, penyediaan sumber daya air, serta perlindungan tanah dari degradasi.

Dalam konteks potensi pengembangan wilayah, kawasan suaka alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai pusat penelitian alam, edukasi lingkungan, dan destinasi wisata ekologi yang menarik bagi pengunjung. Pengelolaan yang tepat dapat membuka peluang bagi penelitian ilmiah, kegiatan konservasi berbasis masyarakat, serta peningkatan kesadaran publik akan pentingnya pelestarian alam. Adapun kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

a. Suaka Margasatwa

Suaka Margasatwa seluas 21.570,75 hektare yang terletak di Kecamatan Batanghari Leko, Bayung Lencir, Keluang, Lalan dan Tungkal Jaya.

b. Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Nasional

Taman nasional yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Lalan dengan luas kurang lebih 2.683,67 Ha.

3) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan area yang diarahkan dan diatur untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan akuakultur dengan tujuan meningkatkan produksi pangan, komoditas pertanian, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (Undang et al., 2022). Kawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Faktor seperti ketersediaan air, kualitas tanah, topografi, dan kondisi iklim menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kawasan budidaya. Sistem pengelolaan yang baik, termasuk penerapan teknologi pertanian modern, diversifikasi tanaman, dan praktik budidaya berkelanjutan, sangat diperlukan untuk menjaga produktivitas dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, kawasan budidaya juga berpotensi menjadi pusat inovasi dalam bidang agroindustri, ekowisata pertanian, serta pengembangan komoditas unggulan daerah yang dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Dengan kebijakan yang mendukung dan pengelolaan yang tepat, kawasan budidaya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Adapun kawasan ini dapat dikembangkan potensinya untuk meningkatkan produksi pangan lokal, diversifikasi produk pertanian, memperluas lapangan kerja di sektor pertanian, serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Secara umum, Kawasan Budidaya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang meliputi:

a) Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 94.099,17 hektare yang berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir.
b) Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas kurang lebih 421.185,89 hektare yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan,

Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, dan Kecamatan Tungkal Jaya.

c) Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luas kurang lebih 59.259,40 hektare yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lalan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Sekayu, dan Kecamatan Tungkal Jaya.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian yang meliputi:

a) Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 40.298,63 hektare yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Lawang Wetan, kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin, dan Kecamatan Tungkal Jaya.

b) Kawasan Budidaya Tanaman Hortikultura yang terdiri dari tanaman sayur-sayuran dengan luas kurang lebih 3.031 hektare yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan. Selain itu terdapat tanaman buah-buahan dengan luas kurang lebih 3.262 hektare yang tersebar di beberapa Kecamatan.

c. Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah pertanian tanaman tahunan yang mempunyai luas kurang lebih 643.529,54 hektar dan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

d. Kawasan Peruntukan Peternakan adalah peruntukan pengembangan peternakan besar yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan

Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai Lilin. Sedangkan peternakan kecil terletak di Kecamatan Bayung Lencir.

e. Kawasan Peruntukan Perikanan yang meliputi:

a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan umum yang meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Lalan.

b) Kawasan peruntukan perikanan budidaya yang meliputi perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

c) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan yang berada di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan energi adalah kawasan pertambangan batubara yang berada di wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 2.178,81 hektar.

g. Kawasan Peruntukan Industri adalah yang direncanakan dalam rencana tata ruang adalah kawasan peruntukan industri berupa pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. kawasan ini direncanakan berada di Kecamatan Sungai Lilin seluas 432,67 hektare

h. Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

a) Danau Ulak Lia di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu;
b) Danau Konger di Desa Sungai Dua, Kecamatan Sungai Keruh;
c) Pulau Pandang dan Pulau Panjang di Kecamatan Sanga Desa;
d) Sungai Kubu di Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan;
e) Agro Wisata Perkebunan Gambir di Desa Toman, Kecamatan Babat Toman;
f) Tambang Minyak Tradisional di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman;
g) Tambang Minyak Modern di Desa Bonot Kecamatan Lais;
h) Kebudayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Bayung Lencir;
i) Goa Jepang di Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa; dan
j) Candi Sereka di Desa Sereka, Kecamatan Babat Toman.

i. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa serta Pusat Pemerintahan yang meliputi:
a) Kecamatan Sekayu;
b) Kecamatan Sungai Lilin;
c) Kecamatan Bayung Lencir; dan
d) Kecamatan Babat Toman.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman yang meliputi:
a) Permukiman Perkotaan, memiliki luas kurang lebih 9.304,27 hektar dikembangkan di kawasan perkotaan Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Jirak Jaya, Keluang, Lais, Lalan, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Sanga Desa, Sekayu, Sungai Keruh, Sungai Lilin, dan Tungkal Jaya.
b) Permukiman Perdesaan di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 23.493 hektar terletak di Kecamatan Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Jirak Jaya, Keluang, Lais,

Lalan, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Sanga Desa, Sekayu, Sungai Keruh, Sungai Lilin, dan Tungkal Jaya.

4) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat merupakan area yang diperuntukkan untuk menjaga berbagai sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Kawasan ini memiliki peran penting dalam konservasi lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung keberlanjutan sumber daya bagi kehidupan masyarakat sekitar. Di Kabupaten Musi Banyuasin, kawasan perlindungan setempat mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai dan kawasan sekitar danau atau waduk dengan tujuan menjaga kelestarian fungsi waduk, embung dan sungai dari aktivitas manusia. Luas kawasan ini adalah 14.631,20 hektare.

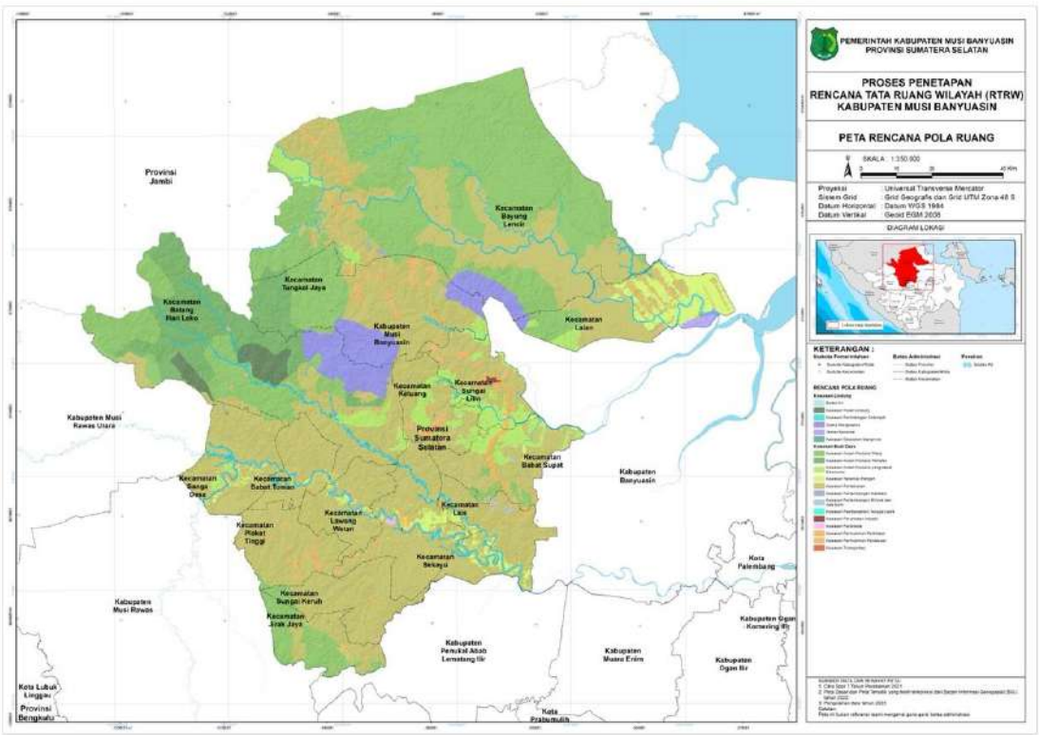
5) Kawasan Lindung Gambut

Kawasan lindung gambut merupakan ekosistem material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Kawasan lindung gambut dilakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara sistematis dan terpadu guna melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kawasan lindung gambut tersebar di 7 kecamatan dengan luas 74.358,23 ha yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, dan Kecamatan Sekayu.

6) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan di Bawahnya

Selain kawasan perlindungan setempat, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki kawasan perlindungan setempat yang meliputi:

a. Kawasan Sempadan Sungai di Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dengan luas kurang lebih 11.134 hektar.
b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas 30 persen dari luas perkotaan dengan luas RTH sebesar kurang lebih 9.755 hektar.



Gambar 2.12. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045

10. Demografi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2) yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa diartikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal atas daerah tersebut,

serta orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut (Bidarti, 2020). Berdasarkan pandangan ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang telah menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Penduduk dalam suatu daerah dapat bertumbuh negatif maupun positif. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah dari penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna dalam memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahui jumlah dari penduduk maka akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik (Bidarti, 2020).

Pertumbuhan penduduk juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya alam untuk memberikan daya dukung dan daya tampung. Berdasarkan data sistem informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, pada Tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin memiliki jumlah penduduk sebesar 651.950 jiwa. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif, namun masih dalam kategori jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk ini sangat dipengaruhi oleh orang terhadap

jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambah dan penduduk yang keluar bersifat mengurangi jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin bergerak secara fluktuatif dari tahun 2018-2024, namun laju pertumbuhan penduduknya cenderung menurun. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 1,59 persen di tahun 2018 menjadi 1,20 persen di tahun 2024. Kondisi ini berkorelasi dengan dicanangkannya program Keluarga Berencana Nasional sehingga pertumbuhan dapat ditekan. Di sisi lain, teknologi di bidang kesehatan yang semakin berkembang dan pemahaman masyarakat akan kesehatan yang semakin baik juga mampu menekan angka kematian bayi, dan berpengaruh pula terhadap pertumbuhan penduduk.

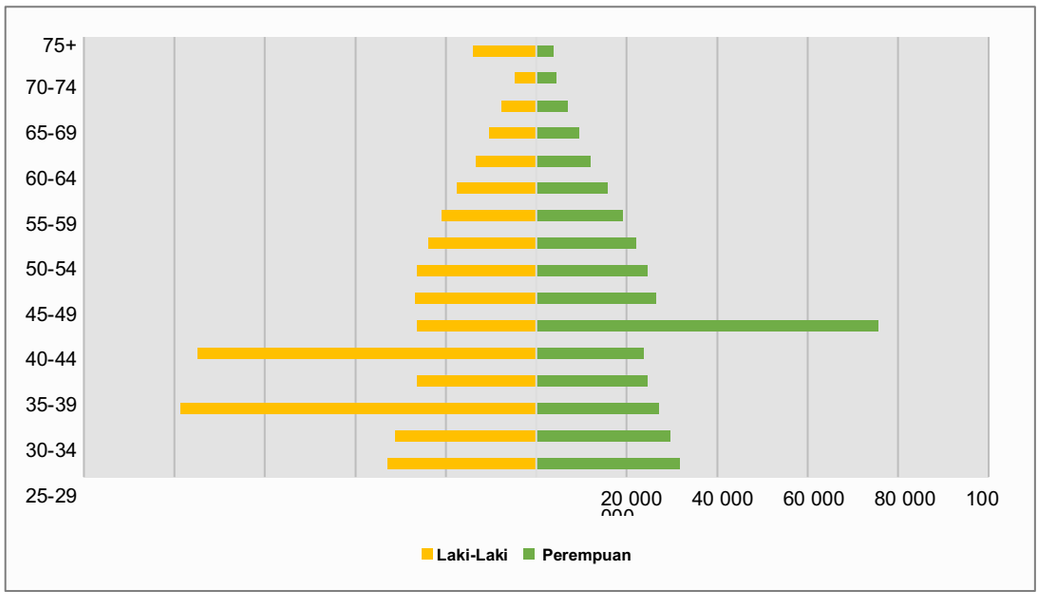
Dalam konteks kependudukan, karakteristik penduduk juga memiliki pengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk, rasio penduduk perempuan dan laki-laki Musi Banyuasin pada tahun 2024 sebesar 105,45 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Musi Banyuasin lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.9. Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Pertumbuhan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan			
2018	326 679	311 946	638 625	1,59	104,86
2019	331 004	316 068	647 072	1,59	104,72
2020	320 561	301 645	622 206	1,00	104,73
2021	322 876	304 194	627 070	1,00	106,27
2022	325 801	307 323	633 124	1,27	106,01
2023	331 057	313 329	644 386	1,22	105,66
2024	334 624	317 326	651 950	1,20	105,45

Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Sementara berdasarkan struktur umur, komposisi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perapihan umur dari data administratif dan proyeksi SP 2023, yang mana jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 28,12 persen dan penduduk usia 15 - 64 tahun sebesar 66,68 persen. Adapun jumlah penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun hanya sebesar 5,20 persen, yang mana persentasenya lebih kecil dari penduduk usia muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Musi Banyuasin lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif.



Gambar 2.13. Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024

Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka, 2025

Hal ini dapat dilihat dari hasil perapihan umur dari data administratif dan proyeksi SP 2020 (September), yang mana jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 28,63 persen dan penduduk usia 15- 64 tahun sebesar 66,36 persen. Adapun jumlah penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun hanya sebesar 5,01 persen, yang mana persentasenya lebih kecil dari penduduk usia muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Musi Banyuasin lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif.

Data persebaran penduduk berguna untuk melihat tingkat pemerataan/ ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah, potensi jumlah sumber daya manusia di suatu wilayah, dan potensi daya dukung sumber daya alam terhadap jumlah penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat

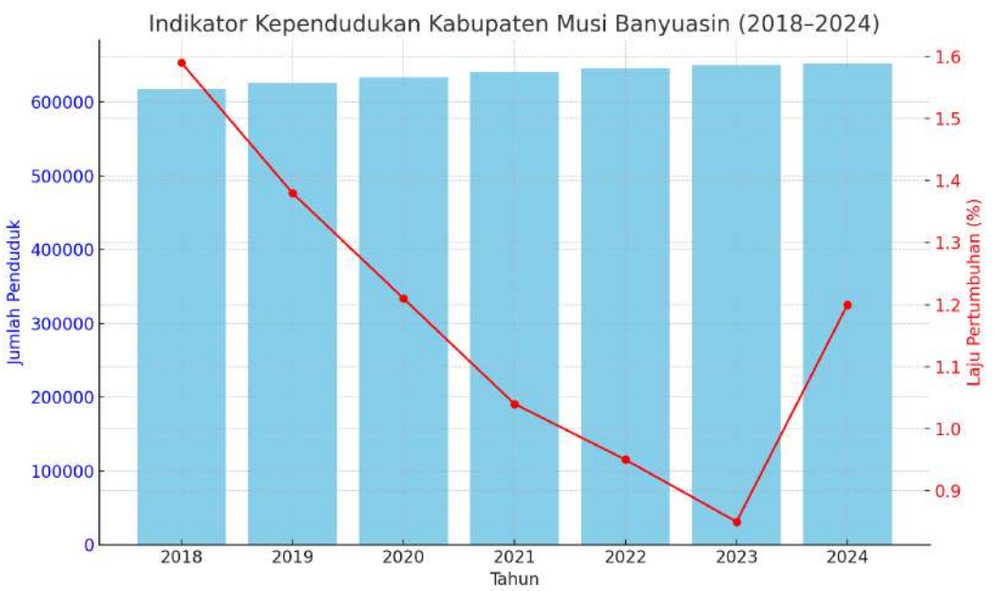
setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada tekanan sosial dan lingkungan, misalnya tidak seimbangnya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Namun demikian di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan terkait optimalisasi sumber daya alam dikarenakan kurangnya tenaga kerja.

Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menurut wilayah kecamatan belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sekayu (14,76%), Kecamatan Bayung Lencir (12,11%), Kecamatan Sungai Lilin (9,98%), Kecamatan Lais (8,45%) dan Kecamatan Tungkal Jaya (7,98%). Kelima kecamatan ini dihuni oleh sekitar 53,28 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sungai Keruh (3,71%), Kecamatan Batanghari Leko (3,12%) dan Kecamatan Jirak Jaya (3,03%). Tidak meratanya persebaran penduduk juga dapat dilihat dari angka kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2022 kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin sekitar 44 jiwa per km^2. Jika ditinjau menurut kecamatan, tingkat kepadatan tertinggi adalah di Kecamatan Sungai Lilin dengan 168 jiwa per km2, disusul Kecamatan Sekayu dengan 133 jiwa per km2, kemudian Kecamatan Plakat Tinggi dengan 112 jiwa per km2 dan Kecamatan Lawang Wetan dengan 110 jiwa per km2. Adapun kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Batanghari Leko dengan 9 jiwa per km^2, Kecamatan Bayung Lencir dengan 15 jiwa per km^2 dan Kecamatan Babat Toman dengan 28 jiwa per km^2.

Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Sanga Desa	37711	14	5,12	119	103,5
Babat Toman	43260	21,4	5,87	34	104,2
Batanghari Leko	25773	27,18	3,5	12	110,1
Plakat Tinggi	30588	13,89	4,15	124	103,7
Lawang Wetan	30176	16,72	4,1	130	104,9
Sungai Keruh	26811	14,27	3,64	81	104,8
Jirak Jaya	22538	18,85	3,06	75	107,3
Sekayu	103368	13,68	14,03	147	103,3
Lais	59088	10,82	8,02	78	105,5
Sungai Lilin	70479	12,78	9,56	188	104,2
Keluang	37866	15,14	5,14	95	103,5
Babat Supat	41332	17,89	5,61	81	103,6
Bayung Lencir	101134	37,81	13,72	21	109,6
Lalan	46229	18,08	6,27	45	107,4
Tungkal Jaya	60544	23,85	8,22	74	107,8
Musi Banyuasin	736897	18,81	100	52	105,6

Sumber: musibanyuasinkab.bps.go.id 2024 dan BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2025.



Gambar 2.14. Indikator Kependudukan Musi Banyuasin

Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka, 2025 (diolah)

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2018–2024 menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk yang relatif stabil. Jumlah penduduk meningkat dari 617.661 jiwa pada tahun 2018 menjadi 651.950 jiwa pada tahun 2024. Namun, laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi, bahkan cenderung menurun dari 1,59% pada 2018 menjadi hanya 0,85% pada 2023, sebelum kembali naik menjadi 1,20% pada 2024. Penurunan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2018–2023 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan angka kelahiran, migrasi keluar daerah, dan kebijakan pengendalian jumlah penduduk. Sementara itu, kenaikan kembali pada 2024 bisa jadi dipicu oleh peningkatan mobilitas penduduk, migrasi masuk, atau perubahan kondisi ekonomi yang mendorong pertumbuhan penduduk.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Musi Banyuasin memiliki tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan berkelanjutan. Laju pertumbuhan yang terkontrol akan mempermudah pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.

11. Posisi dan Peran Strategis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin) memiliki posisi geografis yang sangat strategis di Provinsi Sumatera Selatan. Berada di jalur lintas timur Sumatera, Muba menjadi penghubung penting antara pusat-pusat ekonomi di Sumatera, seperti Jambi dan Lampung. Posisi ini memungkinkan Muba berperan vital dalam distribusi barang dan jasa, serta mempermudah akses ke pasar-pasar regional dan nasional. Muba berbatasan langsung dengan berbagai wilayah penting: Jambi di utara, Kab. Banyuasin di timur, Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau di selatan, serta Musi Rawas Utara di barat.

Ibu kotanya berada di Sekayu, yang menjadi pusat administratif dan penghubung koneksi antar wilayah. Muba dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi dan gas alam yang besar, serta memiliki cadangan batubara di sejumlah kecamatan seperti Babat Toman dan Bayung Lencir. Perkebunan dan Pertanian: Banyak lahan kelapa sawit dan karet. Kelapa sawit seluas puluhan ribu hektar menjadi pilar ekonomi lokal. Terdapat pula potensi dalam tanaman pangan dan peternakan. Pada Industri dan Hilirisasi, Pemerintah telah mendorong proyek kawasan industri hijau yang memadukan sektor migas, perkebunan, dan agroindustri (Golden Triangle Muba).

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi. Pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Muba juga dikenal dengan berbagai inovasi kebijakan yang progresif, seperti program pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada Infrastruktur baru seperti jalan tol terus dikembangkan, agar lebih mempermudah akses masyarakat.

12. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Musi Banyuasin

Potensi sumber daya alam mengacu pada kemampuan atau nilai-nilai yang terkandung dalam alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum, potensi ini mencakup segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk kesejahteraan hidup. Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, menjadikannya salah satu kabupaten

terkaya di Indonesia. Potensi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sektor utama:

d. Sumber Daya Energi dan Pertambangan:

- Minyak Bumi dan Gas Alam**:** Musi Banyuasin adalah penghasil minyak bumi dan gas alam yang signifikan. Potensi ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Beberapa wilayah bahkan memiliki penambangan minyak tradisional.
- Batu Bara: Kabupaten ini juga memiliki cadangan batu bara yang cukup besar. Meskipun mutu cadangannya cenderung berjenis lignit, potensi ini belum sepenuhnya dikelola dan menjadi salah satu aset berharga di sektor pertambangan.

e. Sumber Daya Perkebunan:

- Kelapa Sawit: Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu komoditas andalan dengan luas lahan yang sangat besar. Produksi kelapa sawit dari Musi Banyuasin berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.
- Karet: Selain sawit, perkebunan karet juga merupakan sektor utama. Luas lahan kebun karet yang dikelola baik oleh swadaya masyarakat maupun perusahaan menunjukkan besarnya potensi komoditas ini.

f. Sumber Daya Pertanian:

- Lahan Sawah: Kabupaten ini memiliki potensi untuk pengembangan lahan sawah, terutama dengan adanya dukungan kegiatan rehabilitasi irigasi/drainase. Luas lahan yang bisa dikembangkan menjadi dua kali tanam (IP 200) sangat besar, menunjukkan potensi untuk meningkatkan produksi pangan.
- Tanaman Buah-buahan dan penghasil madu hutan: potensi Tanaman Buah-buahan dan penghasil madu hutan ini tetap ada dan bisa

dikembangkan melalui teknologi budidaya dan penanganan pascapanen yang lebih baik.

g. Sumber Daya Kehutanan dan Ekologi:

- Keanekaragaman Hayati: Musi Banyuasin memiliki kawasan hutan terluas di Sumatera Selatan dan merupakan habitat penting bagi satwa dilindungi seperti Harimau Sumatera dan Buaya Senyulong.
- Kawasan Gambut: Terdapat kawasan ekosistem gambut yang luas, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mengendalikan perubahan iklim.
- Ekowisata: Potensi alamnya yang lestari mendukung pengembangan ekowisata dan pariwisata berbasis masyarakat, seperti Danau Ulak Lia dan Bukit Pendape.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam ini juga diiringi dengan upaya-upaya keberlanjutan. Pemerintah daerah, melalui berbagai program seperti "Muba Hijau," berupaya untuk mengelola sumber daya alam secara lestari, mencegah deforestasi, dan mengembangkan ekonomi hijau.

13. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki bentang alam yang sangat beragam mulai dari kawasan gambut, rawa-rawa, hutan produksi, dan perairan sungai. Luas wilayah ±14.266 km² ini menjadikannya salah satu kabupaten dengan cadangan sumber daya alam besar di Sumatera Selatan, terutama di sektor minyak bumi, gas, batubara, kelapa sawit, dan karet. Keanekaragaman ekosistem ini memberikan potensi daya dukung yang tinggi untuk menopang kehidupan manusia dan spesies lain, namun juga menciptakan tantangan serius terkait daya tampung, khususnya ketika aktivitas ekonomi berjalan tanpa memperhitungkan batas ekologi. Kawasan

gambut seluas 366 ribu hektare menjadi penyokong ekosistem penting karena menyimpan karbon dalam jumlah besar dan mengatur tata air, tetapi juga rentan terhadap kebakaran dan degradasi jika daya dukungnya dilampaui.

Pertumbuhan ekonomi Muba yang didorong oleh sumber daya alam telah menimbulkan tekanan besar terhadap kapasitas lingkungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan konversi hutan gambut menjadi lahan produksi mengurangi kemampuan tanah dan vegetasi untuk menyerap air, menyaring polutan, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Sementara itu, aktivitas industri migas dan batubara, jika tidak dikelola secara berkelanjutan, berpotensi menghasilkan limbah cair dan gas yang melampaui daya tampung air dan udara di wilayah tersebut. Selain itu, degradasi kawasan perairan akibat overfishing dan pencemaran dari limbah domestik maupun pertanian telah menurunkan kualitas ekosistem sungai dan danau, yang selama ini menjadi sumber pangan, air bersih, dan mata pencaharian masyarakat.

Pemerintah daerah mulai memasukkan prinsip perhitungan daya dukung dan daya tampung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RPJPD. Program seperti Muba Hijau dan Desa Mandiri Peduli Gambut menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan antara pembangunan dan konservasi. Kolaborasi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mendorong implementasi *rewetting* (pembasahan kembali gambut), *revegetation* (penanaman ulang vegetasi), dan *revitalization* (penguatan ekonomi ramah lingkungan) di tingkat desa. Pemerintah juga mulai mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk energi terbarukan (biogas), pengembangan IPAL komunal untuk pengolahan limbah cair, serta

inisiatif bank sampah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lingkungan.

Perubahan iklim global memperburuk risiko kebakaran hutan dan lahan, mengancam kawasan gambut yang memiliki fungsi vital dalam penyimpanan karbon. Selain itu, data pemantauan daya dukung dan daya tampung masih terbatas, sehingga pengambilan kebijakan seringkali bergantung pada data historis yang belum tentu merefleksikan kondisi terkini. Faktor sosial-budaya juga berperan, di mana sebagian masyarakat masih memandang pemanfaatan sumber daya alam dalam skala besar sebagai prioritas utama tanpa mempertimbangkan daya dukung jangka panjang.

Daya dukung lingkungan hidup di Musi Banyuasin mengacu pada kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Ini mencakup ketersediaan sumber daya esensial seperti air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Muba memiliki daya dukung yang signifikan. Namun, aktivitas ekonomi yang intensif, seperti pertambangan dan perkebunan, memberikan tekanan besar pada lingkungan.

- Daya dukung pangan: Berdasarkan studi regional, Musi Banyuasin terindikasi memiliki surplus daya dukung pangan, yang berarti ketersediaan pangan di kabupaten ini mencukupi kebutuhan penduduknya. Hal ini menjadikannya salah satu penopang ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan.
- Daya dukung air: Kondisi daya dukung air di Muba perlu terus dipantau, terutama di tengah maraknya kegiatan industri dan pemukiman. Ketersediaan air bersih dan kualitasnya menjadi kunci

untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat.

- Keanekaragaman hayati: Kawasan hutan dan rawa di Musi Banyuasin, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Perlindungan kawasan ini sangat penting untuk menjaga fungsi ekologis dan mencegah hilangnya spesies endemik.

Daya tampung lingkungan hidup di Musi Banyuasin merujuk pada kapasitas lingkungan untuk menyerap limbah, polusi, dan dampak negatif dari aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan yang permanen.

- Sektor industri: Kegiatan pertambangan, minyak, dan gas menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang memerlukan penanganan khusus. Daya tampung Muba untuk menyerap limbah-limbah ini menjadi tantangan serius. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah ilegal sangat krusial untuk mencegah pencemaran.
- Pengelolaan sampah: Pengelolaan sampah rumah tangga dan industri juga menjadi faktor penentu daya tampung lingkungan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan kebijakan dan strategi, seperti Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah, untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan proses daur ulang.
- Perlindungan ekosistem gambut: Muba memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan gambut (Karhutla) tidak hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga melepaskan emisi karbon yang besar, mengurangi

kemampuan lingkungan untuk menampung polusi udara. Upaya mitigasi dan pencegahan Karhutla menjadi prioritas utama.

Secara keseluruhan, menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan merupakan tantangan utama bagi Musi Banyuasin. Pemerintah daerah telah menyusun berbagai kebijakan, termasuk Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai landasan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

13. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan di musi banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin yang menunjukkan upaya signifikan untuk mencapai ketahanan di sektor energi, air, dan kemandirian pangan. Inisiatif ini didorong oleh kekayaan sumber daya alamnya. Kabupaten Musi Banyuasin tengah mengembangkan hilirisasi kelapa sawit: meningkatkan produktivitas sawit lewat peremajaan bibit dan pupuk berkualitas, serta merencanakan pabrik biodiesel (*biofuel*) untuk memanfaatkan CPO lokal secara nilai tambah. Proyek ini menjadi contoh integrasi hulu ke hilir di sektor energi terbarukan. Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut. Selain itu, ada rencana memanfaatkan gas alam lokal (cadangan Bayung Lencir) yang akan ditargetkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap LP gas impor dan membangun industri gas rumah tangga lokal, bekerja sama dengan Pertamina.

Kemandirian pangan adalah kemampuan daerah dan masyarakat, khususnya petani, untuk memenuhi kebutuhan pangan secara

berkelanjutan dari produksi lokal dengan memanfaatkan sumber daya sendiri, teknologi, kelembagaan, dan jaringan pemasaran yang kuat, sehingga tidak bergantung berlebihan pada pasokan luar daerah maupun impor. Dalam Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2024 istilah *kemandirian pangan* muncul di bagian Penjelasan Umum yang menegaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, yang artinya kemandirian pangan di sini diposisikan sebagai tujuan strategis, yang berarti kemampuan daerah (dan petani) untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar, dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Hal ini didukung pada salah satu aspek ketahanan air banyak melibatkan keamanan ekosistem untuk mendukung budidaya ikan dan pertanian. Penebaran bibit ikan dan pengecekan kualitas air (pH) menunjukkan peran penting air bersih dalam menjaga suplai pangan laut dan air tawar.

14. Lingkungan Hidup Berkualitas

Berikut adalah data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Musi Banyuasin yang dipublikasikan melalui Portal Satu Data Muba, yaitu sumber resmi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin:

Tabel 2.11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Tahun	Indeks Kualita Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1	2020	55,56	85,52	78,82	72,780
2	2021	55,65	86,24	78,82	73,113
3	2022	62,73	87,54	43,21	68,50
4	2023	50,09	87,95	42,67	66,05
5	2024	58,42	91,49	41,80	68,17

Sumber: satudata.mubakab 2024

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2020–2024, terdapat beberapa tren yang menarik untuk dianalisis. Secara umum, IKLH dihitung sebagai gabungan dari tiga indikator utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Nilai IKLH Muba selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika kualitas air, udara, dan tutupan lahan di wilayah tersebut.

Pada indikator kualitas air**,** tren memperlihatkan peningkatan signifikan dari 55,56 di tahun 2020 menjadi 62,73 di tahun 2022, yang mengindikasikan adanya perbaikan pengelolaan sumber daya air, kemungkinan melalui pengendalian pencemaran atau rehabilitasi ekosistem perairan. Namun, terjadi penurunan cukup tajam di 2023 (50,09) yang dapat mencerminkan gangguan ekosistem akibat pencemaran, perubahan debit air, atau faktor iklim ekstrim. Tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang cukup baik dengan nilai 58,42, meski belum kembali ke puncak 2022.

Kualitas udara relatif stabil pada level tinggi sepanjang periode pengamatan, berkisar antara 85,52 hingga 91,49. Peningkatan di 2024

menjadi 91,49 menjadi indikator positif bahwa pengendalian emisi, pengelolaan transportasi, dan penanganan kebakaran hutan/lahan berjalan efektif. Stabilitas ini juga bisa menjadi modal penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan terkait polusi udara.

Sementara itu, tutupan lahan mengalami tren penurunan sejak 2020 (78,82) menjadi hanya 41,80 pada 2024. Penurunan drastis setelah 2021 menjadi sinyal kuat adanya deforestasi atau alih fungsi lahan yang masif, baik untuk perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur. Penurunan tutupan lahan ini berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan, mengganggu siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, dan mengurangi kapasitas penyerapan karbon.

Nilai IKLH keseluruhan berada pada kisaran 66,05–73,113 selama lima tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada 2021 (73,113), namun menurun pada 2023 (66,05) dan sedikit pulih pada 2024 (68,17). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meski kualitas udara tetap tinggi, penurunan tutupan lahan menjadi faktor penekan utama, diikuti oleh dinamika kualitas air yang cukup sensitif terhadap gangguan lingkungan. Upaya peningkatan IKLH ke depan memerlukan fokus pada pemulihan tutupan lahan, pengendalian alih fungsi, serta perbaikan kualitas air melalui pengelolaan limbah dan konservasi daerah aliran sungai.

15. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir musiman, serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan. Untuk

menghadapinya, pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan telah mengembangkan strategi resiliensi yang bersifat komprehensif. Salah satu fokus utamanya adalah penanggulangan karhutla melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, TNI/Polri, KLHK, BMKG, serta perusahaan perkebunan dan kehutanan. Upaya ini diperkuat dengan pemetaan wilayah rawan bencana, sosialisasi kepada masyarakat, dan pemanfaatan sistem peringatan dini berbasis data iklim dari BMKG.

Di sektor pertanian, adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui program Sekolah Lapang Iklim Tematik yang memberikan edukasi langsung kepada petani tentang pola cuaca ekstrem, teknik tanam yang adaptif, dan penggunaan varietas unggul tahan kekeringan maupun genangan. Selain itu, upaya revitalisasi irigasi, penerapan pola tanam bergilir, serta reboisasi di wilayah tadah hujan juga menjadi bagian dari strategi adaptasi yang telah diidentifikasi dalam kajian risiko iklim Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini bertujuan menjaga produktivitas pertanian dan mengurangi resiko gagal panen yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan lokal.

Di sisi mitigasi, Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan proyek LAMA-I (*Locally Appropriate Mitigation Action- in Indonesian*) yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor lahan, termasuk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Program ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk membangun ekonomi rendah karbon. Dukungan teknologi juga hadir melalui pengembangan aplikasi berbasis mobile yang mampu menyebarkan informasi lokasi rawan banjir atau longsor secara cepat, sehingga mempercepat respon darurat dan koordinasi penanganan di lapangan.

Keseluruhan langkah ini menunjukkan bahwa resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Musi Banyuasin dibangun di atas empat pilar utama: pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, adaptasi sektor pertanian, mitigasi emisi, serta partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekosistem dan sosial, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan iklim global.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama yang mencakup berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial sehingga menjadikan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan inklusivitas masyarakat sebagai fondasi pembangunan daerah. Melalui indikator yang jelas dan strategi pengarusutamaan gender, pemerintah daerah dipandu merancang kebijakan yang menjamin hak dan peluang setara bagi semua warga, memperkuat keluarga dari akar, dan membangun masyarakat yang inklusif serta berdaya saing tinggi. yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat, sehingga mendukung terciptanya pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Struktur Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih bertumpu sektor primer. Pada tahun 2024, PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB masih dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 49,79 persen, dilanjutkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,09 persen, dan menempati urutan ketiga dengan kontribusi terbesar adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 11,92 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,20 persen dan lapangan usaha Perdagangan

Besar dan Eceran sebesar 5,90 persen.

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,02 persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,04 persen dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05 persen.

Tabel 2.12. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024

Kategori	**Lapangan Usaha/ *Industry***	**2020**	**2021**	**2022**	**2023***	**2024****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry & Fishing*	7.910,17	8.496,72	9.280,78	10.358,31	11.207,22
B	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining & Quarrying*	34.606,16	39.109,19	45.284,55	43.831,46	46.139,57
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	7.221,34	7.767,15	8.848,93	10.014,05	11.048,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity & Gas*	33,15	36,24	40,04	43,59	49,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ *Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities*	13,26	13,79	14,34	15,11	15,17
F	Konstruksi/ *Construction*	5.336,63	5.704,89	6.157,59	6.921,79	7.598,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ *Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles*	3.318,61	3.613,09	4.119,79	4.832,53	5.466,17
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation & Storage*	201,61	200,95	220,77	237,66	237,74
I	Penyediaan Akomodasi dan	122,68	131,37	151,10	177,38	215,89

Kategori	Lapangan Usaha/ *Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Makan Minum/ *Accomodation & food Service Activities*					
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information &Communication*	202,29	221,44	253,24	294,00	318,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial & Insurance Activities*	1.284,94	1.335,06	1.395,25	1.468,33	1.587,98
L	Real Estat/ *Real Estate Activities*	1.432,02	1.474,72	1.711,19	2.054,69	2.321,39
M,N	Jasa Perusahaan/ *Bussiness Activities*	28,55	28,87	30,54	33,00	40,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ *Public Administration & Defence; Compulsory Social Security*	2.264,15	2.409,79	2.600,43	2.860,93	3.722,97
P	Jasa Pendidikan/ *Education*	1.290,31	1.384,73	1.527,43	1.675,84	1.816,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	259,73	283,13	316,12	326,45	354,80
R,S,T,U	Jasa lainnya/ *Other Service Activities*	418,28	432,58	479,44	525,95	526,20
Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product*		**65.943,88**	**72.643,72**	**82.431,54**	**85.671,07**	**92.666,87**

*Angka Sementara/Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dari Rp65,9 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp92,6 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya dinamika ekonomi yang terus berkembang, meskipun masih terdapat sektor yang mengalami fluktuasi.

Kontribusi terbesar terhadap PDRB berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian. Nilai tambah sektor ini meningkat dari Rp34,6 triliun di tahun 2020 menjadi Rp46,1 triliun di tahun 2024, meskipun pada 2023 sempat mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan ketergantungan ekonomi daerah pada sumber daya migas dan tambang masih sangat tinggi. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga memberikan kontribusi signifikan dengan tren yang stabil meningkat, dari Rp7,9 triliun (2020) menjadi Rp11,2 triliun (2024). Sektor ini memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan serta menopang perekonomian masyarakat pedesaan, terutama didorong oleh potensi perkebunan karet dan kelapa sawit, serta perikanan. Sektor ini juga vital dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Dengan adanya upaya hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet, sektor ini diharapkan dapat terus berkembang dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian Musi Banyuasin.

Sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi juga menunjukkan kinerja yang baik. Industri pengolahan tumbuh dari Rp7,2 triliun pada 2020 menjadi Rp11,0 triliun pada 2024, mencerminkan adanya peningkatan nilai tambah dari hasil pertanian dan pertambangan. Demikian pula sektor konstruksi yang meningkat dari Rp5,3 triliun menjadi Rp7,6 triliun dalam periode yang sama, menandakan geliat pembangunan infrastruktur yang semakin intensif, baik oleh pemerintah maupun swasta. Sektor ini merupakan indikator vital investasi dan pembangunan infrastruktur, termasuk gedung, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Peningkatan nilai PDRB dari sektor konstruksi mengindikasikan adanya peningkatan investasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas

ekonomi di sektor terkait lainnya. Tren positif di sektor konstruksi ini menunjukkan komitmen terhadap pembangunan daerah dan upaya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di Musi Banyuasin. Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan kenaikan dari Rp 3,3 triliun (2020) menjadi Rp5,5 triliun (2024). Peningkatan ini mengindikasikan semakin membaiknya daya beli masyarakat serta meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi pasca pandemi. Selama periode 2020-2024, sektor ini berfungsi sebagai jembatan penting antara produsen dan konsumen, memfasilitasi distribusi barang dari berbagai sektor seperti pertanian, industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian ke pasar lokal maupun regional. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Musi Banyuasin pada periode 2020-2024 tidak hanya menjadi salah satu penopang utama PDRB, tetapi juga menjadi cerminan vitalitas ekonomi daerah dalam memenuhi kebutuhan pasar dan menciptakan lapangan kerja.

Tabel 2.13. PDRB Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha

Kategori/ *Category*	**Lapangan Usaha/*Industry***	**2020**	**2021**	**2022**	**2023***	**2024****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry & Fishing*	12,00	11,70	11,26	12,09	12,09
B	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining & Quarrying*	52,48	53,84	54,94	51,16	49,79
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	10,95	10,69	10,73	11,69	11,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity & Gas*	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kategori/ *Category*	Lapangan Usaha/ *Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities					
F	Konstruksi/ *Construction*	8,09	7,85	7,47	8,08	8,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ *Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles*	5,03	4,97	5,00	5,64	5,90
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation & Storage*	0,31	0,28	0,27	0,28	0,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accomodation & food Service Activities*	0,19	0,18	0,18	0,21	0,23
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information &Communication*	0,31	0,30	0,31	0,34	0,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial & Insurance Activities*	1,95	1,84	1,69	1,71	1,71
L	Real Estat/ *Real Estate Activities*	2,17	2,03	2,08	2,40	2,51
M,N	Jasa Perusahaan/ *Bussiness Activities*	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ *Public Administration & Defence; Compulsory Social Security*	3,43	3,32	3,15	3,34	4,02
P	Jasa Pendidikan/ *Education*	1,96	1,91	1,85	1,96	1,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38
R,S,T,U	Jasa lainnya/ *Other Service Activities*	0,63	0,60	0,58	0,61	0,57
Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product*		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Angka Sementara/Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Struktur perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian. Namun demikian, kontribusinya mengalami tren penurunan dari 52,48 persen pada 2020 menjadi 49,79 persen pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi daerah yang mulai berangsur mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan relatif stabil dengan kontribusi sekitar 11–12 persen, bahkan pada 2023–2024 kembali meningkat ke angka 12,09 persen. Hal ini menegaskan bahwa sektor primer tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sejalan dengan karakter wilayah yang kuat pada aktivitas perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Selain itu, sektor Industri Pengolahan menunjukkan tren positif. Kontribusinya meningkat dari 10,95 persen pada 2020 menjadi 11,92 persen pada 2024, yang mengindikasikan adanya penguatan nilai tambah hasil sektor primer melalui aktivitas hilirisasi. Sementara sektor Konstruksi mengalami fluktuasi, sempat menurun hingga 7,47 persen pada 2022, namun kembali meningkat ke 8,20 persen pada 2024. Perkembangan ini mencerminkan adanya dinamika pembangunan infrastruktur dan investasi yang terus berjalan di daerah.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga memperlihatkan pertumbuhan yang cukup konsisten. Dari kontribusi 5,03 persen pada 2020, sektor ini meningkat menjadi 5,90 persen pada 2024, yang menandakan adanya pemulihan mobilitas dan peningkatan daya beli masyarakat pasca pandemi, serta semakin kuatnya aktivitas distribusi barang. Sementara itu, sektor-sektor jasa lainnya seperti Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi memberikan kontribusi relatif kecil namun

cenderung stabil, menggambarkan bahwa struktur ekonomi daerah masih lebih berfokus pada sektor primer dan sekunder dibanding sektor jasa modern.

Di sisi lain, peran Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib meningkat dari 3,43 persen pada 2020 menjadi 4,02 persen pada 2024, yang menunjukkan semakin besar peranan belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Adapun sektor Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan relatif konstan di kisaran 2 persen dan 0,38 persen, mencerminkan perannya yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia meskipun kontribusi ekonominya masih terbatas. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Musi Banyuasin sedang bergerak menuju diversifikasi. Meskipun sektor pertambangan masih dominan, tren penurunannya dibarengi dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa perekonomian daerah mulai bertransformasi dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju struktur yang lebih berimbang dengan dukungan sektor sekunder dan jasa.

Beberapa penyebab menurunnya peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2023 adalah menurunnya jumlah produksi dan harga produk pertambangan dan penggalian di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini berkebalikan dengan kondisi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang dimana peranannya cenderung sedikit meningkat dalam lima tahun terakhir. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Musi Banyuasin digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin (ADHB) selama periode 2019- 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 2.14. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	46.515,45	48.869,84	54.185,53	60.759,6	65.517,6
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.232,91	1.298,02	1.444,4	1.636,8	1.936,4
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.997,61	4.274,42	4.185,2	4.502,2	4.974,2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	20.523,03	20.456,63	21.796,6	23.104,3	25.451,7
Perubahan Inventori	-587,56	35,30	-13,1	16,0	4,9
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.737,56	-2.290,48	205,9	-4,447,9	-5,217,9
PDRB	**65.943,88**	**72.643,72**	**82.431,5**	**85.671,1**	**92.666,9**

*Angka Sementara/Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Tabel 2.15. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (%)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,54	67,27	66,49	70,92	70,70
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,87	1,79	1,75	1,91	2,09
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,06	5,88	5,08	5,37	5,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,12	28,16	26,44	26,97	27,47
Perubahan Inventori	-0,89	0,05	-0,02	0,02	0,01
Net Ekspor Barang dan Jasa	-8,70	-3,15	0,25	-5,19	-5,63
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Angka Sementara/Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Dapat dilihat bahwa selama periode 2020-2024 PDRB Musi Banyuasin sebagian besar masih bersumber dari konsumsi akhir rumah tangga (rata-rata di atas 65 persen). Net ekspor barang dan jasa selalu bernilai negatif yang artinya peranan impor relatif lebih besar dibanding ekspor, karena sekitar 40 sampai dengan 60 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik luar negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten. Namun di tahun 2023, net ekspor barang dan jasa berbalik arah menjadi negatif, artinya mulai ada pergeseran kebutuhan yang di tahun 2023 pemenuhan kebutuhan dari ekspor lebih besar dari pada impor, sejalan dengan tingginya ekspor kategori pertambangan dan penggalian dari Kabupaten Musi Banyuasin ke luar wilayah.

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 26 sampai dengan 32 persen. Artinya kabupaten ini memiliki peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dari tingginya investasi yang ada. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentan 5 hingga 6 persen yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian tidak terlalu besar. Peran pengeluaran pemerintah yang relatif kecil sesungguhnya bukan menjadi masalah, ketika pengeluaran itu diarahkan pada pengeluaran yang akan menciptakan nilai tambah besar bagi perekonomian.

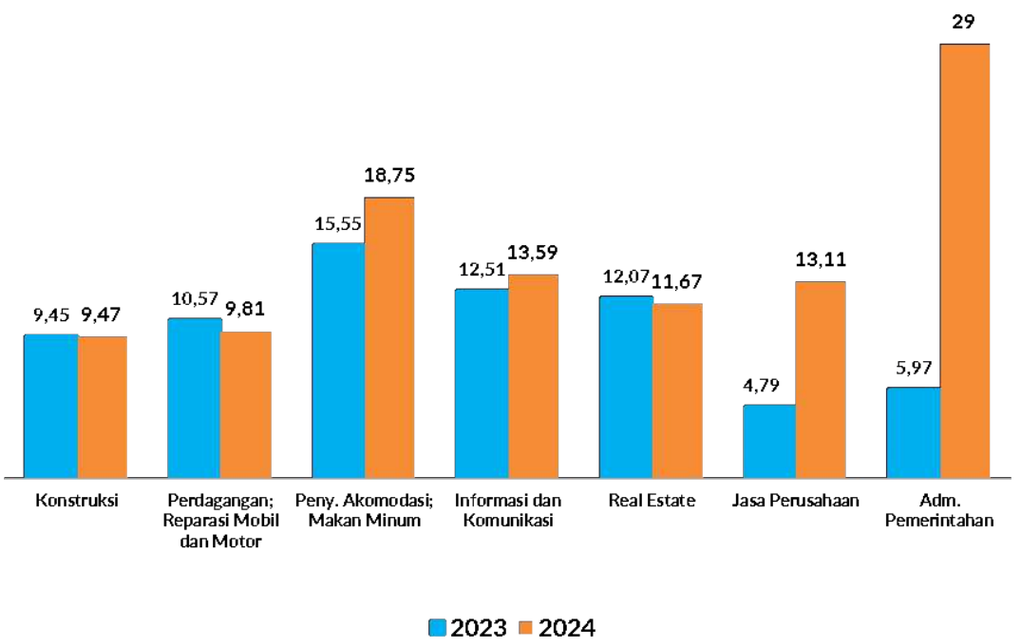
2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun untuk menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas atas dasar harga berlaku (ADHB) Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 92,67 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 52,75 triliun.

Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 29,00 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yaitu sebesar 15,57 persen. Struktur perekonomian Musi Banyuasin pada tahun 2024 tidak banyak berubah. Kontribusi PDRB terbesar berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian,

sedangkan berdasarkan komponen pengeluaran, pengeluaran terbesar adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 Terhadap Tahun 2023 (y-on-y), dimana Ekonomi Musi Banyuasin tahun 2024 dibanding tahun 2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 29,00 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 18,75 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 13,59 persen, dan Jasa Perusahaan sebesar 13,11 persen. Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan juga tumbuh sebesar 2,81 persen, sedangkan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 4,58 persen. Sementara itu, satu Lapangan Usaha mengalami kontraksi yaitu Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 2,00 persen.



Gambar 2.15. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-to-y) (persen)

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 Terhadap Tahun 2023 (y-on-y), dimana ekonomi Musi Banyuasin tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen (y-on-y). Seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif, masing-masing yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 15,57 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK- RT) sebesar 5,33 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 7,38 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,55 persen.

Perekonomian Musi Banyuasin masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Musi Banyuasin yaitu sebesar 70,70 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 27,47 persen; Komponen PK-P sebesar 5,37 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 2,09 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,01 persen. Sementara itu, Komponen Net Ekspor bernilai negatif, yang artinya pada tahun 2024 nilai impor lebih besar dari pada nilai ekspor, dimana pada PDRB Musi Banyuasin Net Ekspor memiliki peran sebesar 5,63 persen.

Sedangkan Data dari Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2024 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduk mencapai Rp 62,79 juta per tahun dengan pertumbuhan sebesar 2,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini memberikan gambaran bahwa kemampuan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, meskipun laju pertumbuhan masih tergolong moderat. Pertumbuhan ini menjadi modal penting dalam mendorong daya beli dan kualitas hidup masyarakat, namun tetap memerlukan strategi percepatan agar kesenjangan dengan daerah berpendapatan tinggi dapat dikurangi.

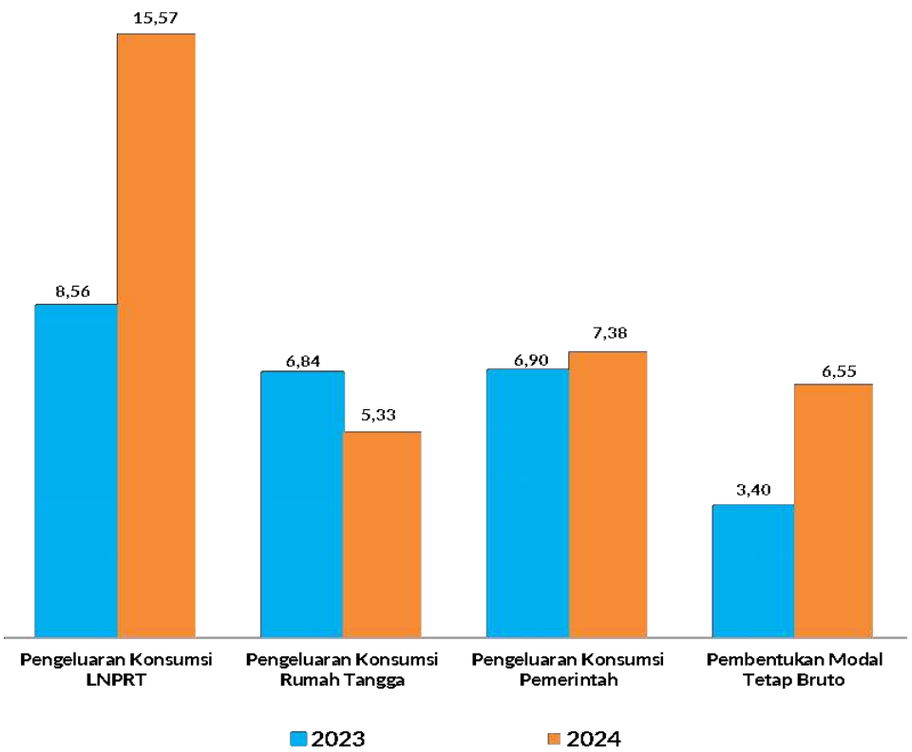
Dari sisi pemerataan, tingkat ketimpangan pendapatan di Musi Banyuasin relatif rendah dengan Gini Ratio 0,303. Nilai ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan cukup merata, meskipun masih terdapat kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,14% atau sekitar 63 ribu jiwa. Angka ini menandakan adanya tantangan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana peningkatan pendapatan harus diikuti dengan penurunan kemiskinan secara signifikan.

Sementara itu, pasar tenaga kerja menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,94%. Angka ini menandakan sebagian besar penduduk usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada level 4,02%, yang tergolong moderat dan masih memungkinkan untuk ditekan melalui peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja. Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 3,42 juta per bulan juga memberikan gambaran standar penghasilan minimum yang dapat menjadi tolok ukur kesejahteraan pekerja formal, walaupun masih diperlukan peningkatan agar sejalan dengan kenaikan biaya hidup dan inflasi tahunan.

Jika melihat keseluruhan indikator, kondisi kesejahteraan ekonomi Musi Banyuasin 2024 menunjukkan perkembangan yang positif dengan ketimpangan rendah dan partisipasi tenaga kerja yang tinggi. Namun, fokus ke depan perlu diarahkan pada akselerasi pertumbuhan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan strategi yang tepat, terutama melalui pemberdayaan sektor pertanian dan industri pengolahan lokal, Musi Banyuasin berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

3) Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk, dengan demikian angka ini merupakan indikator makro yang menunjukkan rata rata tingkat kesejahteraan per penduduk. Tabel berikut menyajikan PDRB per kapita Musi Banyuasin. Dari tabel dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita harga konstan sekitar 30 persen di bawah harga berlaku.



Gambar 2.16. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Tabel 2.16.

PDRB Per kapita Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2018-2023

PDRB Per Kapita	Tahun					
	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024
Kabupaten Musi Banyuasin (ADHB) (ribu rupiah)	101.390,41	106.213,95	116.007,34	103.679,83	112.077,90	142.138,01
Kabupaten Musi Banyuasin (ADHK 2010) (ribu rupiah)	68.743,54	71.843,46	73.563,22	75.968,78	78.399,8	80.917,39

*Angka Sementara/Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2018-2023

Tabel 2.16 merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan data tersebut, pendapatan per kapita Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Hal ini sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan di daerah yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bahwa pembangunan konektivitas antar wilayah menjadi kunci penting dalam memutus rantai kemiskinan.

4) Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dalam pembangunan daerah, inflasi memberikan dampak yang bervariasi bagi

perekonomian lokal. Dampak tersebut bisa positif, seperti ketika inflasi yang terkendali mendorong investasi dan konsumsi, atau negatif, seperti ketika inflasi yang tinggi dan tidak stabil mengganggu stabilitas ekonomi, menyulitkan perencanaan, dan menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga analisis terhadap inflasi menjadi penting untuk memahami dinamika ekonomi, merumuskan kebijakan moneter, dan mengambil keputusan investasi yang tepat. Namun hingga saat ini, tidak terdapatnya data inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu, maka data inflasi daerah ini di *proxy* dengan menggunakan perhitungan angka deflator GDP. Berdasar angka deflator GDP maka perkiraan tingkat inflasi Musi Banyuasin dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.17. Laju Inflasi Implisit Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

Tahun	Inflasi Musi Banyuasin*)
2018	5,18
2019	3,52
2020	0,01
2021	6,8
2022	9,55
2023	7,69

*) Pendekatan Deflator GDP

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka, 2024

Jika dilihat dari tabel di atas, laju inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung fluktuatif. Bahkan pada tahun 2023 angka ini naik menjadi 7,69. Inflasi yang tinggi menggambarkan adanya permasalahan ekonomi di daerah tersebut. Peningkatan harga barang dan jasa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan inflasi tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan daya beli masyarakat.

Berdasarkan Inflasi di Kota Palembang dapat diidentifikasi barang apa yang memiliki peran paling besar dalam pembentukan inflasi tersebut (lihat Tabel 2.16). Dari tabel dapat diamati bahwa secara umum, makanan minuman adalah penyumbang inflasi tertinggi, diikuti oleh rekreasi. Namun demikian, di tahun 2023 terdapat fenomena yang cukup berbeda dimana transportasi adalah penyumbang inflasi yang sangat tinggi.

Tabel 2.18. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang

Kelompok Pengeluaran	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,34	2,84	7,04	6,63
Pakaian dan Alas Kaki	1,16	1,21	3,27	3,37
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar	0,49	2,14	2,45	1,47
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,02	1,75	5,23	4,78
Kesehatan	1,10	1,10	2,46	2,50
Transportasi	-1,09	0,72	17,22	14,94
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,90	-0,02	-0,03	-0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,74	2,60	7,01	5,22
Pendidikan	1,01	2,01	3,98	3,77
Penyediaan Makanan dan Minuman	2,43	1,12	4,13	3,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,03	1,38	5,35	6,33
Umum	1,50	1,84	5,95	5,34

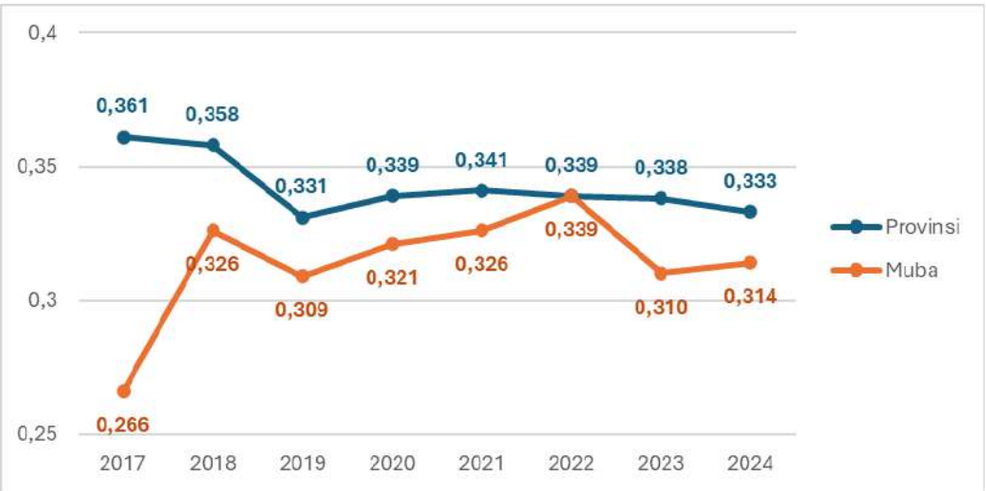
Sumber: BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka, 2024

Laju inflasi Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2022, dengan puncaknya pada 2022 sebesar 5,95%, sebelum menurun sedikit menjadi 5,34% pada 2023. Kenaikan inflasi ini terutama disumbang oleh kelompok transportasi dan makanan, minuman, serta tembakau. Kelompok transportasi mengalami lonjakan signifikan, dari deflasi -1,09% pada 2020 menjadi inflasi 14,94% pada 2023, kemungkinan

besar akibat kenaikan harga BBM dan tarif transportasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga konsisten naik, mencerminkan tekanan harga pada kebutuhan pokok. Sementara itu, kelompok seperti kesehatan dan informasi-komunikasi relatif stabil, bahkan sempat mengalami deflasi. Pola ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi terutama berasal dari sektor konsumsi utama, dan perlu direspons dengan kebijakan pengendalian harga serta stabilisasi distribusi barang pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

5) Indeks Gini

Indeks Gini (Gini *Ratio*) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi.



Gambar 2.17. Gini Ratio Kabupaten Musi Banyuasin 2024

Sumber: BPS (diolah)

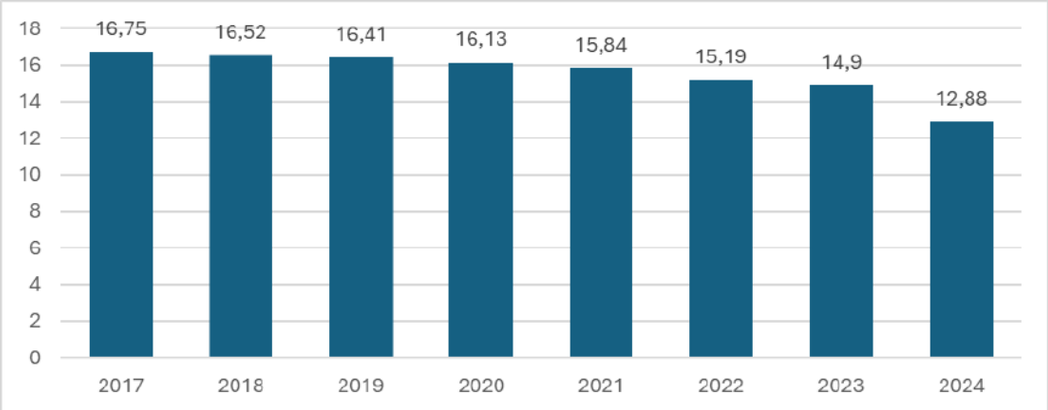
Indeks Gini di Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2017-2024 cenderung fluktuatif. Pada periode 2022 cenderung meningkat yang berarti semakin besar pula ketimpangan yang ditunjukkan. Ini artinya, penduduk dengan pendapatan tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi dari total pendapatan seluruh penduduk.

Beberapa penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain distribusi pengeluaran penduduk kaya semakin meningkat dibandingkan penduduk miskin sedangkan pengeluaran penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, perbedaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan pekerja informal yang sangat rendah dibandingkan pekerja formal, harga komoditas yang fluktuatif seperti karet dan sawit, perbedaan kesempatan mengakses pendidikan dan kesehatan serta krisis global.

7) Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui tingkat kemiskinan, yang dihitung melalui persentase penduduk miskin dalam suatu wilayah. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi dari pada provinsi dan nasional, akan tetapi angka kemiskinan di kabupaten setiap tahun mengalami penurunan.

Pada tahun 2020 ketika persentase penduduk miskin nasional meningkat akibat pandemi COVID-19, persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin justru mengalami penurunan. Pada tahun tersebut, meskipun terjadi pandemi dan umumnya terjadi penurunan kondisi perekonomian, Kabupaten Musi Banyuasin dapat bertahan dengan lebih baik, terutama karena memiliki basis ekonomi yang didominasi sektor pertanian di wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan fokus pada pertanian cenderung lebih kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang mengandalkan sektor perdagangan atau industri.



Gambar 2.18. Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2024

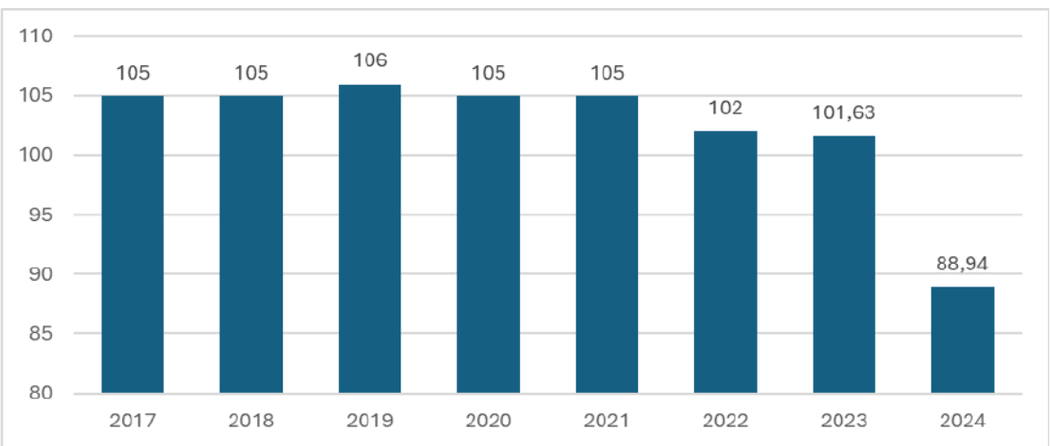
Dalam menganalisis capaian kinerja kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin, digunakan teori *deprivation trap* yang mengungkapkan bahwa fenomena kemiskinan memiliki lima dimensi utama yang saling mempengaruhi. Lima dimensi tersebut adalah *poverty, powerlessness, vulnerability, physical weakness* dan *isolation* (Chamber, 2015). Dalam analisis capaian kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin, akan digunakan kelima dimensi dari Chamber Trap untuk melihat kondisi kemiskinannya.

Dimensi pertama mencakup sifat atau karakteristik dari kemiskinan itu sendiri. Berdasarkan data BPS, selama tahun 2017-2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami perubahan relatif stabil pada awal periode, diikuti oleh tren penurunan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada rentang waktu 2017 hingga 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung stagnan, berkisar antara 105 ribu hingga 106 ribu jiwa. Tahun 2022 menunjukkan awal dari perbaikan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin, disusul penurunan lagi pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 mencatat penurunan yang paling tajam dengan jumlah penduduk miskin menurun

drastis menjadi 88,94 ribu jiwa atau berkurang sekitar 12,69 ribu jiwa (sekitar 12,5%) dibandingkan tahun sebelumnya meskipun angkanya masih tinggi.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran (KP) Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan sebesar 2,91 persen dari tahun 2024 menjadi 9,97% atau dibawah satu digit. Dengan jumlah penduduk miskin sebesar 69,61 ribu jiwa dan garis kemiskinan Rp. 627.094/kapita/bulan.

Fenomena kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi unik karena meskipun daerah tersebut memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita yang tinggi, namun tingkat kemiskinan tetap tinggi. Meskipun demikian, Indeks Gini di Kabupaten Musi Banyuasin juga tidak menunjukkan ketidaksetaraan pendapatan yang signifikan. Dengan demikian, kondisi kemiskinan yang unik ini perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi dan perencanaan pada periode selanjutnya.



Gambar 2.19. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin juga terkait dengan ketergantungan daerah ini pada sektor primer. Sektor primer yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat dengan cepat bergeser dan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah. Namun demikian, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sektor primer tambahan selain kehutanan dan perikanan, yaitu pertanian. Kehadiran sektor pertanian memberikan ketahanan lebih bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam menghadapi gejolak ekonomi, bahkan selama pandemi COVID-19. Dimensi kedua menurut Chamber adalah ketidakberdayaan. Dalam konteks ini, ketidakberdayaan diartikan sebagai kemampuan daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan sehari-hari dan ketidakmampuan mereka untuk berkontribusi pada kebijakan pengentasan kemiskinan.

Jarak antara Sekayu dan Bayung Lencir yang menjadi salah satu faktor penting yang mencerminkan kelemahan fisik dan keterisolasian wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun secara administratif kedua wilayah ini berada dalam satu kabupaten, kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang terbatas menjadikan hubungan antarwilayah ini tidak efisien. Jalan penghubung yang belum seluruhnya beraspal, ditambah dengan kerusakan akibat musim hujan, mengakibatkan waktu tempuh yang lama dan risiko kecelakaan yang tinggi. Hal ini berimplikasi langsung pada aksesibilitas masyarakat terhadap pusat pemerintahan, layanan publik, dan pasar ekonomi.

Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan salah satu wilayah dengan luas geografis yang besar di Sumatera Selatan. Namun, luasnya wilayah ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Ketimpangan antara wilayah pusat, seperti Sekayu, dengan

daerah pinggiran seperti Bayung Lencir masih sangat terasa. Wilayah-wilayah di bagian barat dan utara kabupaten ini cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ekonomi. Ketimpangan kewilayahan inilah yang menjadi salah satu akar kemiskinan struktural di Musi Banyuasin, di mana masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan publik mengalami hambatan serius dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Keterbatasan pelayanan publik di wilayah tertinggal, akses terhadap pelayanan publik menjadi isu utama dalam konteks kemiskinan wilayah. Banyak desa di Kecamatan Bayung Lencir dan sekitarnya menghadapi kesulitan dalam menjangkau fasilitas pendidikan menengah, layanan kesehatan yang memadai, serta transportasi umum. Ketidakterjangkauan ini menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan, tingginya angka putus sekolah, keterlambatan penanganan kesehatan, serta minimnya peluang kerja yang layak. Tanpa akses terhadap layanan publik dasar, masyarakat di wilayah ini cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

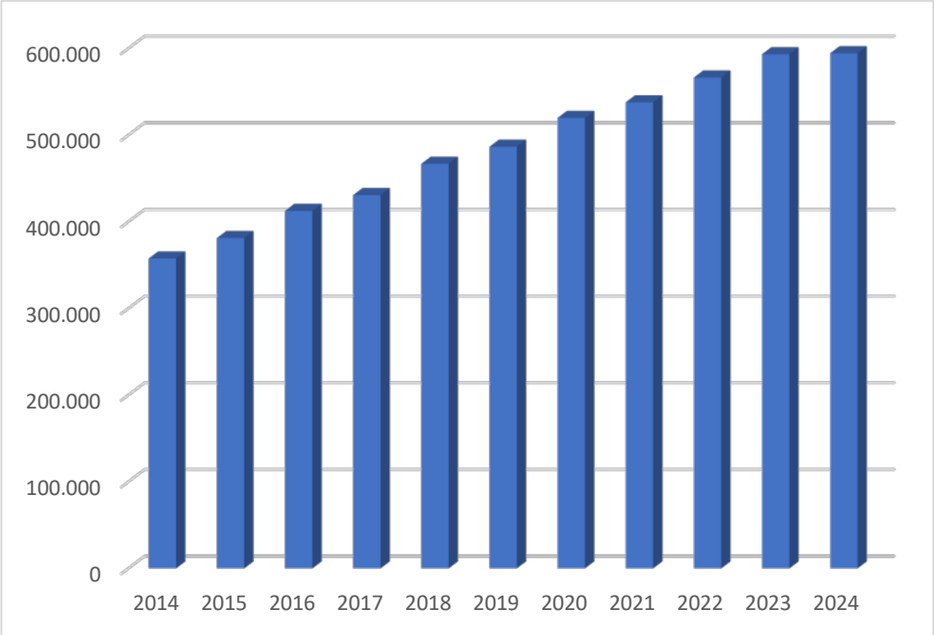
Maka dengan itu konektivitas sebagai solusi: jalan bayung lencir – sekayu, merupakan pembangunan konektivitas antar wilayah menjadi kunci penting dalam memutus rantai kemiskinan. Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah pembangunan jalan yang menghubungkan Bayung Lencir dengan Sekayu, sehingga waktu tempuhnya hanya sekitar satu jam. Infrastruktur ini bukan hanya sekadar sarana transportasi, tetapi juga menjadi jalur distribusi pelayanan publik dan ekonomi. Akses yang lebih cepat ke pusat kabupaten akan memungkinkan distribusi logistik, mobilitas tenaga kerja, dan perluasan layanan pemerintahan. Kehadiran jalan ini diharapkan dapat menjadi

faktor yang mempercepat pengurangan kemiskinan di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan.

Dengan tujuan menuju pemerataan dan keadilan spasial, pembangunan jalan Bayung Lencir – Sekayu merupakan simbol penting dari upaya pemerintah daerah dalam mengejar keadilan spasial. Dengan terbangunnya konektivitas ini, diharapkan dapat melakukan pelayanan publik dapat lebih merata. Upaya ini harus dibarengi dengan intervensi sosial lainnya seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, dan penguatan kelembagaan desa. Jika dijalankan secara simultan, pendekatan kewilayahan berbasis konektivitas ini berpotensi besar dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Musi Banyuasin.

6) Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin

Garis kemiskinan merupakan ukuran penting yang digunakan untuk menentukan batas minimum pendapatan atau pengeluaran yang dibutuhkan seseorang atau rumah tangga agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator statistik, tetapi juga menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan sosial dan ekonomi yang berpihak pada kelompok rentan. Dengan menetapkan garis kemiskinan, pemerintah dapat memetakan seberapa besar jumlah penduduk miskin, mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Pemahaman yang komprehensif mengenai garis kemiskinan sangat krusial karena mencerminkan kondisi riil masyarakat, sekaligus menjadi instrumen penting untuk merancang strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan



Gambar 2.20. Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2.19. Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin (Rupiah) 2014-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)
2014	357.567
2015	381.154
2016	412.591
2017	430.771
2018	466.822
2019	486.476
2020	519.797
2021	537.774
2022	566.393
2023	593.258
2024	594.355

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data di atas yang membandingkan daya beli masyarakat dari segi pendapatan per kapita, seharusnya Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil mengatasi kemiskinan dengan baik. Namun, peningkatan terus-menerus dalam angka garis kemiskinan di Kabupaten Musi

Banyuasin setiap tahunnya telah mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat miskin, yang berimplikasi pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak selarasnya jumlah pendapatan per kapita dengan garis kemiskinan secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu merancang strategi yang optimal untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut.

Ketidak berdayaan kedua berkaitan dengan partisipasi pengambilan kebijakan. Seringkali kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak melibatkan partisipasi dari orang miskin sebagai objek kebijakan. Kurangnya partisipasi ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam perumusan kebijakan, dimana kebutuhan yang seharusnya dipenuhi tidak selaras dengan apa yang diberikan. Hal ini mengakibatkan ketidakberhasilan kebijakan meskipun telah dialokasikan anggaran yang besar. Oleh karena itu, penyesuaian antara kebutuhan dan implementasi kebijakan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemiskinan dengan melibatkan partisipasi dari objek kebijakan.

Dimensi ketiga menurut Chamber adalah kerentanan atau *vulnerability* terhadap kemiskinan. Kerentanan dalam analisis ini berhubungan dengan kelompok masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan, namun sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat pergeseran yang terjadi, atau dikenal sebagai kelompok *near poor*. Meskipun data mengenai kelompok *near poor* ini tidak tersedia, namun kerentanan didekati melalui dua mekanisme, yaitu angka kedalaman kemiskinan dan angka keparahan kemiskinan. Semakin dalam angka

kemiskinan dan keparahan kemiskinan, semakin banyak orang yang berada dalam kondisi kerentanan terhadap kemiskinan.

Permasalahan Utama Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Kemiskinan turun, namun dalam laju yang melambat, hanya 2023 ke 2024 yang penurunan kemiskinannya besar.
2. Besarnya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin, dan melambat penurunannya.
3. Fluktuatifnya perbaikan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).
4. Masih tingginya rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin
5. Masih tingginya jumlah individu lanjut usia dari rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin

Berdasarkan pengelompokan kecamatan, jumlah kepala keluarga perempuan diatas 45 tahun miskin dan jumlah lansia miskin terbanyak berada di Kecamatan Sekayu, Lais dan Bayung Lencir. Berdasarkan dimensi pendidikan, persentase ruang kelas belajar rusak berat SD terbanyak di Kecamatan Sekayu, Lais, Bayung Lencir dan Sungai Lilin. persentase ruang kelas belajar rusak berat SMP Lawang Wetan, Sekayu, Sanga Desa dan Lais. Berdasarkan dimensi kesehatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak di Kecamatan Lais, Sekayu, dan Bayung Lencir, jumlah balita stunting terbanyak di Kecamatan Bayung Lencir, Sekayu, dan Lais. Berdasarkan dimensi sarana prasarana dasar, kecamatan dengan bedah rumah terbanyak berada di Kecamatan Bayung Lencir dan Lais, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan terendah berada di Kecamatan Lalan. jumlah kecamatan dengan penerangan bukan listrik terbanyak berada di

Kecamatan Bayung Lencir dan Sekayu. berdasarkan dimensi ketenagakerjaan, kecamatan dengan jumlah penduduk usia 15-49 tidak bekerja terbanyak berada di Kecamatan Sekayu, Bayung Lencir, Lais, dan Tungkal Jaya. jumlah penduduk desil 1-4 yang bekerja sebagai petani terbanyak berada di Kecamatan Lais, Bayung Lencir dan Sekayu

7) Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Salah satu kewajiban pemerintah yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayahnya. Pemenuhan rasa aman bagi masyarakat dapat dipahami sebagai kebutuhan masyarakat untuk terhindar dari segala bentuk kerawanan dan masalah sosial seperti penyakit sosial dan bencana alam. Urusan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 Ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwasanya bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dikategorikan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat, dibutuhkan kerja sama yang harmonis dari Satpol PP, Kesbangpol, Kepolisian Daerah, dan perangkat daerah lainnya. Tabel berikut menyajikan informasi capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017 hingga 2024.

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kriminalitas	1054	1045	803	716	754	875	919	NA

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang telah diselesaikan	82	57	48	84	951	41	54	NA
3.	Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	4	1	1	3	15	17	3
5.	Tingkat Penyelesaian konflik sosial masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase/ angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada (%)	60,12	63,67	82	75	82	82	84	80,03
7.	Angka Penurunan Kasus Konflik Sosial	52,85	100	100	100	100	100	100	100
8.	Indeks Risiko Bencana	-	-	-	132,4	125,53	117,86	111,99	NA
9.	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	-	0,39	0,43	0,43	0,43	NA

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , BPBD Kabupaten Musi Banyuasin, 2024.

8) Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2024, konsep "Kesehatan untuk Semua" di Musi Banyuasin dapat dilihat dari capaian indikator kesehatan yang mencerminkan akses, mutu, dan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki jaringan fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, dan posyandu yang tersebar di wilayah kecamatan. Pemerataan fasilitas ini penting agar layanan kesehatan dasar dapat diakses oleh masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Cakupan kunjungan ke fasilitas kesehatan menjadi indikator utama keterjangkauan layanan, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjamin pembiayaan kesehatan bagi warga.

Beberapa indikator kesehatan menunjukkan perkembangan positif, seperti meningkatnya angka harapan hidup yang menggambarkan kualitas layanan kesehatan dan keberhasilan program promotif-preventif. Penurunan angka kematian ibu dan bayi juga menjadi fokus, melalui program pemeriksaan kehamilan rutin dan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Upaya pencegahan penyakit menular maupun tidak menular terus dilakukan melalui imunisasi lengkap, penyuluhan gizi, dan skrining kesehatan.

Program penanggulangan stunting menjadi prioritas, mengingat gizi buruk dan stunting dapat menghambat kualitas sumber daya manusia di masa depan. Melalui intervensi gizi spesifik (pemberian makanan tambahan, vitamin, dan edukasi ibu hamil) serta gizi sensitif (penyediaan air bersih, sanitasi, dan pendidikan kesehatan), Musi Banyuasin berupaya menurunkan prevalensi stunting sesuai target nasional.

Fokus kesejahteraan sosial dimaksud untuk menjelaskan karakteristik

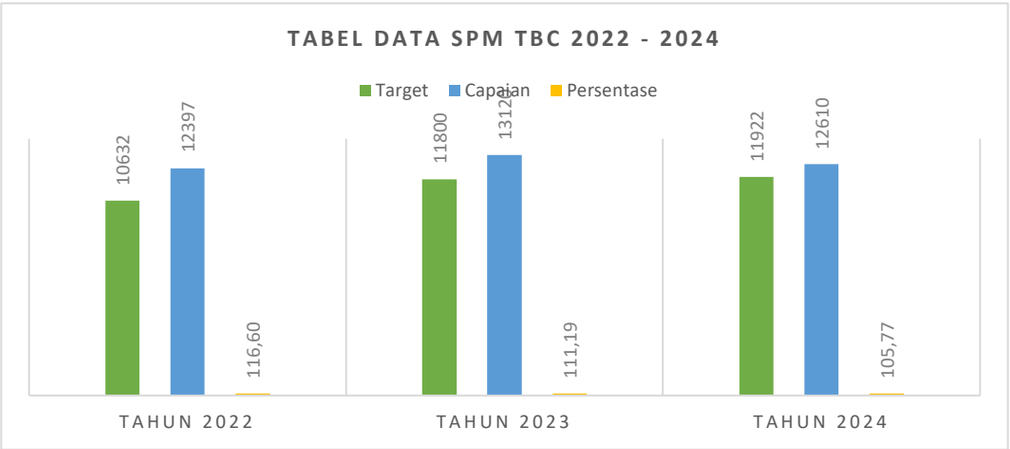
masyarakat dari perspektif sosial. Oleh karena itu, untuk membedakan dengan fokus kesejahteraan ekonomi, maka pada bagian ini akan dijelaskan indikator- indikator yang kemudian akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

c. Tuberkulosis

Berdasarkan Global TB Report 2023, estimasi kasus TBC meningkat menjadi 1.090.000 kasus dan angka kematian mencapai 125.000 per tahun. Indonesia merupakan negara dengan estimasi kasus tertinggi ke-2 di dunia setelah India. Di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri, pada tahun 2024 terdapat 1.535 (69,52%) kasus TBC yang tercatat dan terlaporkan dari target 2.208 kasus yang telah ditetapkan (Data ditarik dari SITB per tanggal 16 Januari 2025). Data ini masih akan bertambah karena penarikan data kasus Tuberkulosis terakhir dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2025.

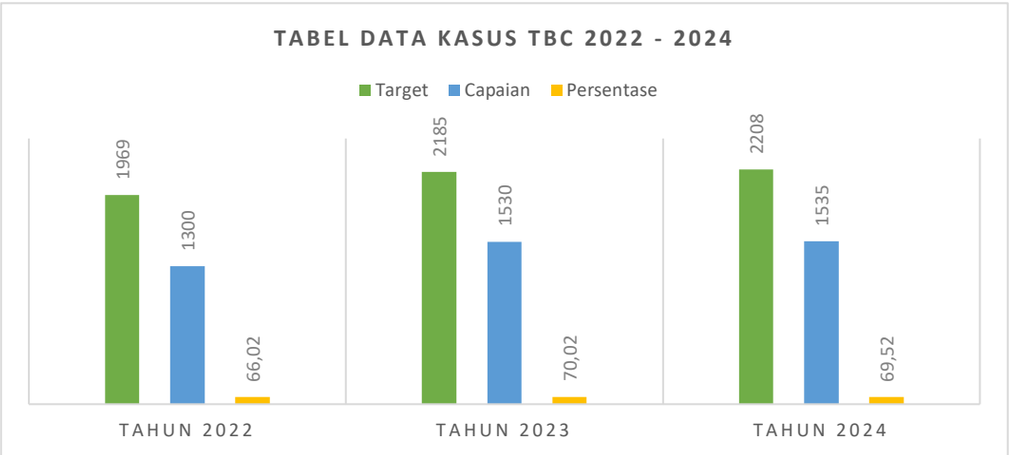
Terjadi trend naik untuk temuan kasus seiring dengan semakin masifnya upaya penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) secara aktif melalui investigasi kontak dan skrining maksimal pada populasi berisiko seperti Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Penderita DM, Penderita HIV, Posyandu Balita dan lansia, Posbindu, dan lain - lain dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor di masyarakat yang tergambar lewat grafik Standar Pelayanan Minimal Orang Terduga Tuberkulosis yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Selain itu adanya kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak yang difokuskan di daerah terpencil dan sulit dijangkau yaitu di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Bintialo (Desa Sako Suban dan Desa Lubuk Bintialo) Kecamatan Batanghari Leko di Tahun

2024, berhasil menemukan kasus TBC melalui kegiatan skrining aktif berupa kunjungan rumah ke rumah.



Gambar 2.21. SPM TBC di Kabupaten Musi Banyuasin 2022-2024

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

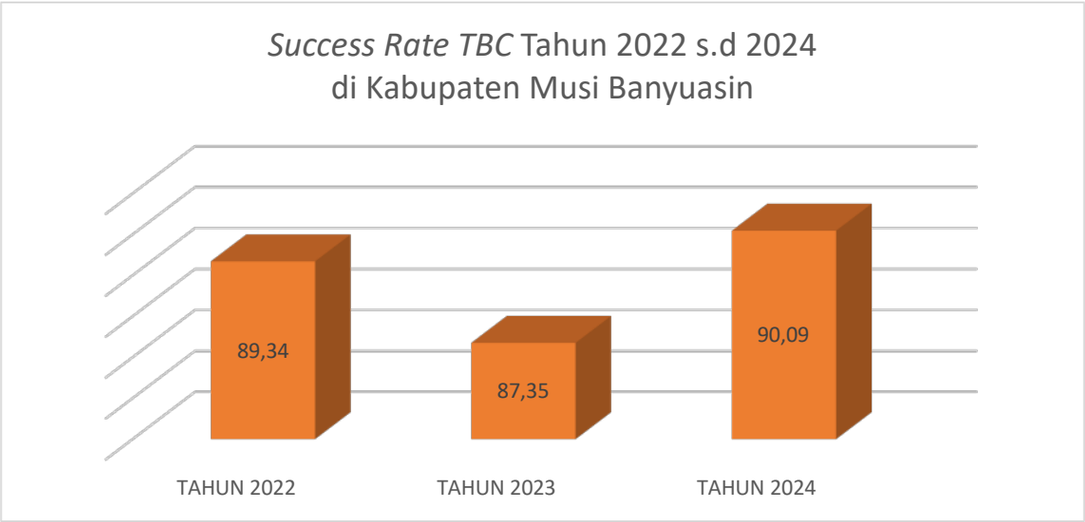


Gambar 2.22. *Treatment Coverage* TBC di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 – 2024

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Kasus TBC yang ditemukan baru mencapai 69,52% dari target penemuan kasus 90%, sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah, dukungan dari lintas program dan lintas sektor serta kesadaran masyarakat tentang kesehatan yang semakin meningkat maka penemuan kasus akan bisa mencapai target yang ditetapkan. Diharapkan semakin tinggi penemuan kasus, penularan TBC di masyarakat dapat dicegah, tentunya setelah ditemukan agar dapat segera dilakukan

pengobatan sesuai standar seiring dengan upaya pemberian obat pencegahan TBC pada kontak yang memenuhi syarat. Dalam penegakan diagnosis TBC telah didukung oleh 8 (delapan) layanan Tes Cepat Monokuler (TCM) sebagai sarana penegakan diagnosis utama. Data mengenai keberhasilan pengobatan adalah seperti yang terdapat dalam grafik di bawah ini, yaitu rata-rata sudah hampir mencapai 90% sesuai dengan yang ditargetkan.



Gambar 2.23. Grafik Keberhasilan Pengobatan Kasus TBC (*Success Rate Tuberculosis*) di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2022 – 2024

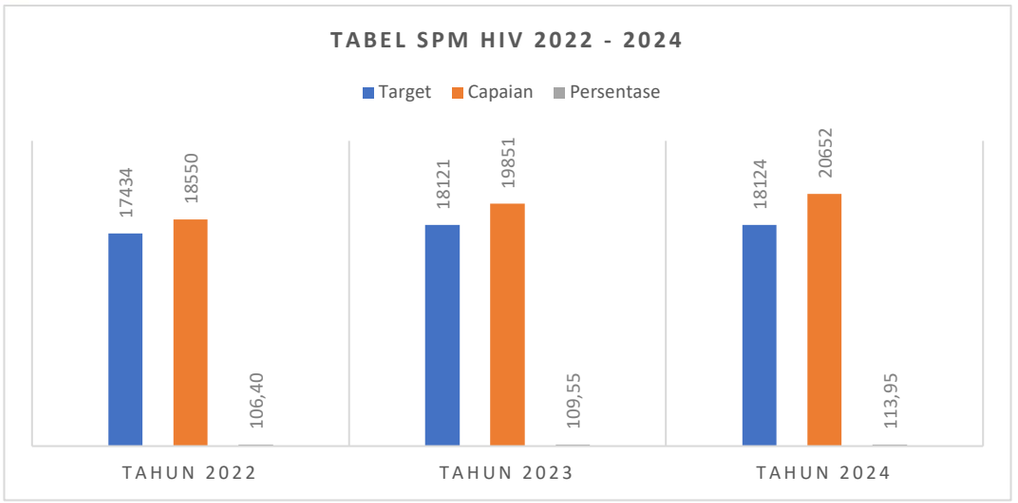
Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fluktuasi dari 2022 hingga 2024. Pada 2022 mencapai 89,34%, menurun menjadi 87,35% di 2023, lalu meningkat signifikan menjadi 90,09% pada 2024. Penurunan 2023 mencerminkan tantangan program, sementara peningkatan 2024 menunjukkan keberhasilan intervensi dan perbaikan layanan. Tren ini perlu dijadikan bahan evaluasi dan dasar penguatan kebijakan eliminasi TBC di masa depan.

d. HIV AIDS

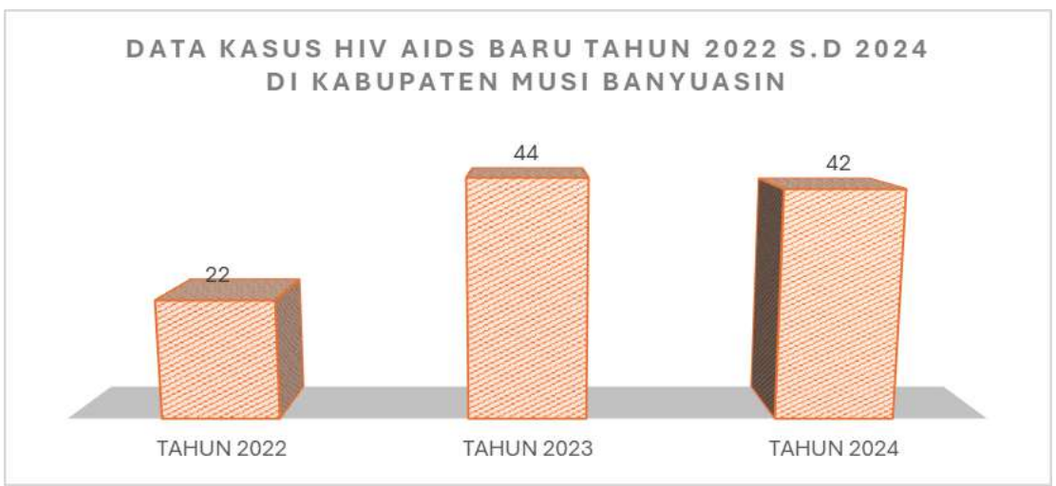
HIV masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia dan Indonesia dengan stigma negatif di masyarakat. Tercatat sampai dengan tahun 2024 sebanyak 206 Kasus ODHA di Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan untuk temuan kasus baru Tahun 2022 yaitu 22 ODHA, sebanyak 2 ODHA meninggal dunia dan hanya 20 ODHA Masuk Perawatan dan mendapatkan Pengobatan (91%). Sedangkan di tahun 2023, ditemukan 44 kasus baru HIV AIDS. Untuk tahun 2024 tercatat 42 kasus HIV AIDS baru.

Penemuan kasus dilakukan secara aktif dan pasif melalui kegiatan skrining pada populasi berisiko, Mobile VCT HIV AIDS, penyisiran kasus pada Klinik Swasta/Dokter Praktik Mandiri terutama di daerah persinggahan dan kunjungan pasien ke layanan. Telah dilakukan berbagai upaya dengan bekerja sama lintas program, lintas sektor untuk menghapus stigma HIV di masyarakat dan memaksimalkan skrining aktif pada populasi kunci (Pekerja Seks, Pengguna Napza Suntik/Penasun, Waria dan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki/LSL), Populasi Khusus (Pasien Tuberkulosis, pasien IMS, Ibu Hamil, Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan) serta Populasi Rentan (Anak jalanan, remaja, pelanggan pekerja seks, pekerja migran dan pasangan populasi kunci/ODHIV/Pasien IMS). Hal ini seperti tergambar dalam grafik SPM Pelayanan Kesehatan pada orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS.



Gambar 2.24. SPM Pelayanan Kesehatan pada orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS tahun 2022 s.d 2024

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)



Gambar 2.25. Temuan Kasus baru HIV AIDS tahun 2022 s.d 2024

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Capaian pelayanan kesehatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren positif dari tahun 2022 hingga 2024. Meskipun jumlah target menurun setiap tahun, persentase cakupan pelayanan meningkat, dari 86,70% di 2022 menjadi 89,87% di 2024. Hal ini menunjukkan perbaikan efektivitas program pelayanan. Namun, jumlah kasus baru HIV/AIDS justru mengalami peningkatan. Dari 27 kasus pada 2022, naik drastis menjadi 44 kasus di 2023, lalu sedikit

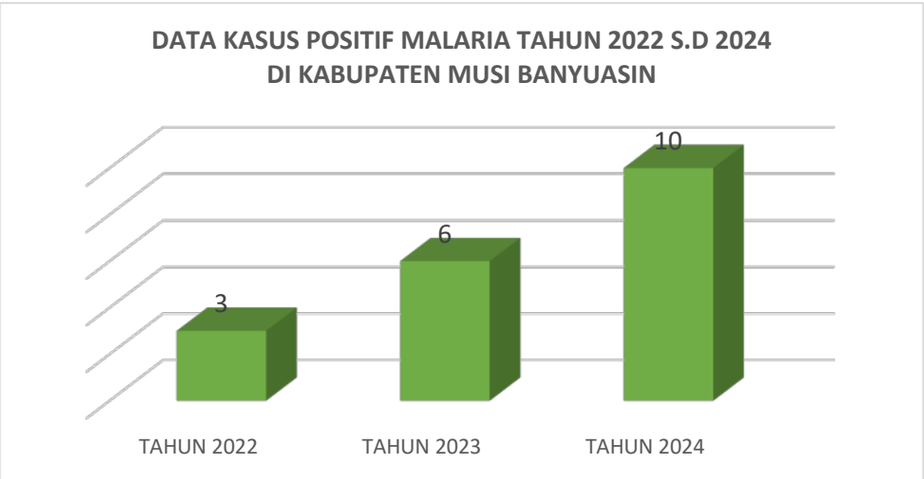
turun menjadi 42 kasus di 2024. Tren ini menunjukkan bahwa penularan HIV masih terjadi dan perlu penanganan serius. Peningkatan pelayanan belum sepenuhnya diiringi oleh penurunan angka kasus baru. Ini menandakan perlunya penguatan upaya pencegahan dan edukasi, termasuk deteksi dini, promosi kesehatan, dan pengurangan stigma terhadap ODHA.

e. Malaria

Sebagai upaya pemeliharaan Eliminasi Malaria yang telah diperoleh Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2021, perlu dilaksanakan upaya berkelanjutan untuk mencegah terjadinya penularan setempat/kasus *indigenous*. Kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan mikroskopis pada pasien dengan gejala Malaria, MBS (*mass blood survey*), Surveilans migrasi serta pengendalian vektor Malaria.

Pada tahun 2022 terdapat 3 kasus positif Malaria, sedangkan di Tahun 2023 tercatat 6 kasus positif Malaria. Untuk tahun 2024 ditemukan 10 (sepuluh) kasus positif Malaria di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari 1 orang dari wilayah kerja Puskesmas Teluk Kijing, 6 orang dari wilayah kerja Puskesmas Balai Agung, 1 orang dari wilayah kerja Puskesmas Lumpatan, 1 orang dari wilayah kerja Puskesmas Karya Maju dan 1 orang dari wilayah kerja Puskesmas Sukajaya. Seluruh pasien positif malaria telah dilakukan penyelidikan epidemiologi dengan mengambil 25 sampel dari masing-masing keluarga, tetangga sekitar penderita. Hasilnya tidak ditemukan kasus positif dan dari hasil penyelidikan epidemiologi tidak terjadi penularan setempat, sehingga termasuk kategori Kasus Malaria Impor. Pasien ada yang relaps (kambuh) dan ada juga yang memiliki riwayat kembali dari daerah endemis Malaria.

Salah satu indikator kinerja Program Malaria adalah *Positivity Rate* (PR) dengan target <5%. Sampai dengan Desember 2024, telah dilakukan pemeriksaan mikroskopis maupun RDT pada masyarakat yang bergejala Malaria baik yang datang langsung ke fasyankes maupun pada warga setempat di sekitar kasus positif Malaria sehingga hasil yang didapat 0,26%.



Gambar 2.26. Temuan Kasus Malaria di Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

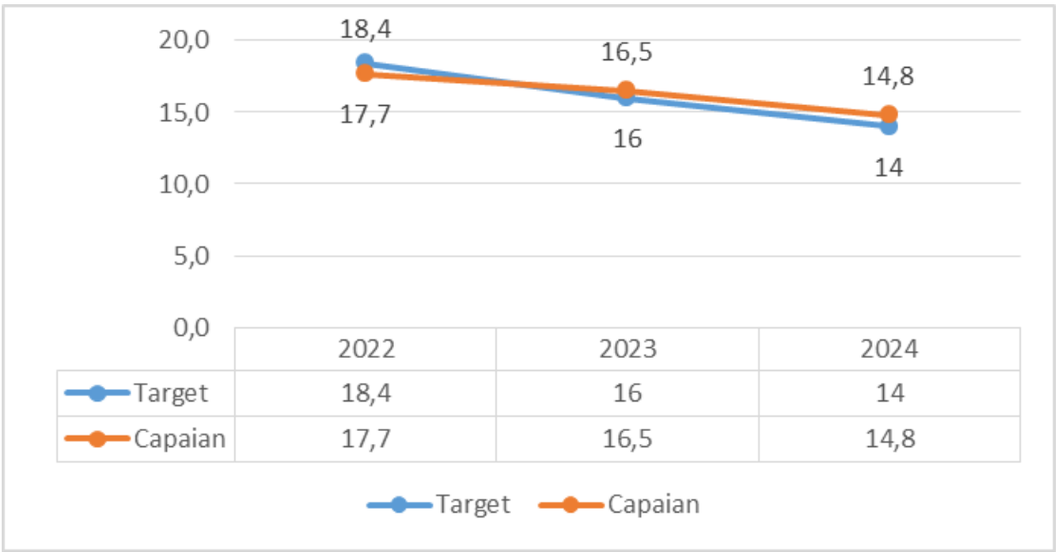
Jumlah kasus malaria di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Dari hanya 3 kasus pada tahun 2022, angka ini meningkat menjadi 6 kasus pada 2023, dan kembali melonjak menjadi 10 kasus di tahun 2024. Ini berarti terjadi lebih dari tiga kali lipat peningkatan dalam kurun waktu dua tahun. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya perhatian serius terhadap pengendalian dan pencegahan malaria. Kemungkinan penyebabnya bisa mencakup perubahan iklim mikro, peningkatan aktivitas manusia di daerah endemis, atau menurunnya upaya penyemprotan dan pembagian kelambu berinsektisida.

Faktor mobilitas penduduk dan urbanisasi juga dapat berkontribusi terhadap penularan. Meski angka kasus belum tergolong tinggi secara absolut, tren peningkatan patut diwaspadai. Hal ini karena malaria termasuk penyakit menular berpotensi fatal yang dapat menyebar cepat jika tidak ditangani sejak dini. Diperlukan intervensi berbasis komunitas, surveilans aktif, dan penguatan program deteksi dini serta respons cepat untuk mencegah kasus lebih lanjut.

a. Stunting

Angka stunting yang besar di Indonesia merupakan masalah serius. Artinya, negara memiliki jutaan anak kurang gizi yang kesulitan berprestasi di sekolah serta kurang mampu mendapatkan cukup penghasilan saat dewasa sehingga sulit berkontribusi untuk membangun ekonomi bangsa. Hal ini menjadikan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup sehingga terus berada dalam kemiskinan. Selain itu stunting berhubungan dengan gangguan fungsi kekebalan dan meningkatkan risiko kematian. Ada bukti jelas bahwa individu yang stunting memiliki tingkat kematian lebih tinggi dari berbagai penyebab dan terjadinya peningkatan penyakit. Secara global, stunting berkontribusi sebesar 15-17 persen pada kasus kematian anak. Oleh karena itu, stunting menjadi salah satu ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

Di Kabupaten Musi Banyuasin prevalensi stunting pada balita berdasarkan hasil SSGI Tahun 2022 sebesar 17,7%. Prevalensi stunting di Kabupaten Musi Banyuasin juga mengalami penurunan pada tahun 2023 yang terlihat dari hasil SKI yaitu menjadi 16,5%. Pada tahun 2024 hasil SSGI menunjukkan prevalensi stunting kembali mengalami penurunan menjadi 14,8%. Bila dibandingkan dengan hasil penilaian status gizi balita yang diambil dari aplikasi e-PPGBM pada tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 1,56% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 1,01%. Prevalensi stunting kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,79% pada tahun 2024.



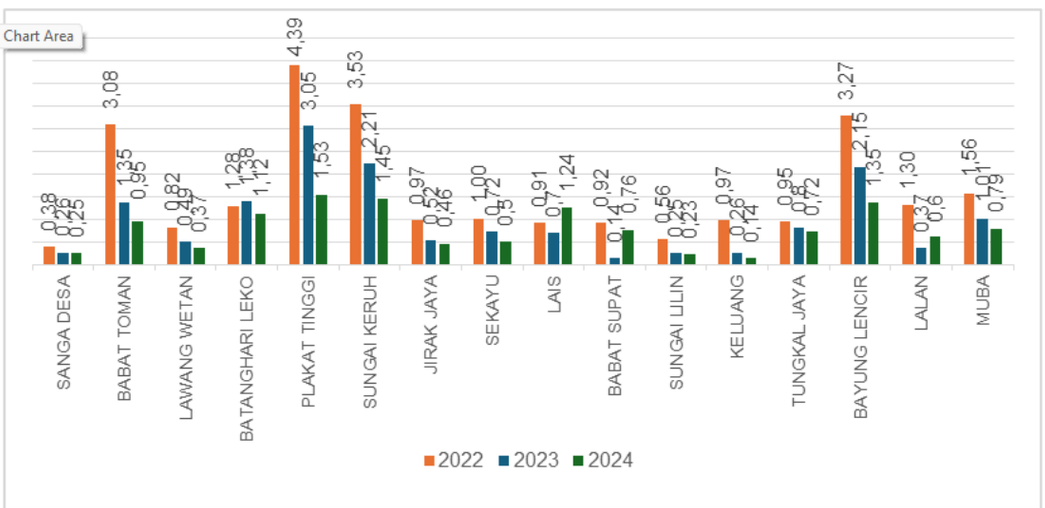
Gambar 2.27. Capaian Indikator Prevalensi Stunting Pada Balita

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Data e-PPGBM diperoleh dari data pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan yang di lakukan di 514 posyandu yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin baik data dari kunjungan balita ke posyandu maupun kunjungan rumah. Data ini kemudian di entry oleh Kader Posyandu dan Bidan Desa ke aplikasi e-PPGBM. Data yang sudah di entry ke aplikasi maka selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi data

terutama data outlier untuk memastikan balita yang tercatat stunting di aplikasi e-PPGBM benar balita stunting melalui kegiatan kunjungan rumah dan pengukuran ulang.

Namun dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin masih terlihat sebaran prevalensi stunting di Kecamatan yang masih tinggi di atas angka Kabupaten meskipun prevalensi kejadian stunting di wilayah tersebut mengalami penurunan, yaitu kecamatan Babat Toman (0,95%), Batanghari Leko (1,12%), Lais (1,24%), Bayung Lencir (1,35%), Sungai Keruh (1,45%), dan Plakat Tinggi (1,53%). dan. Hal ini menunjukan belum tuntasnya permasalahan gizi di wilayah tersebut diatasi khususnya akar masalah penyebab stunting. Adapun prevalensi stunting per Kecamatan tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:



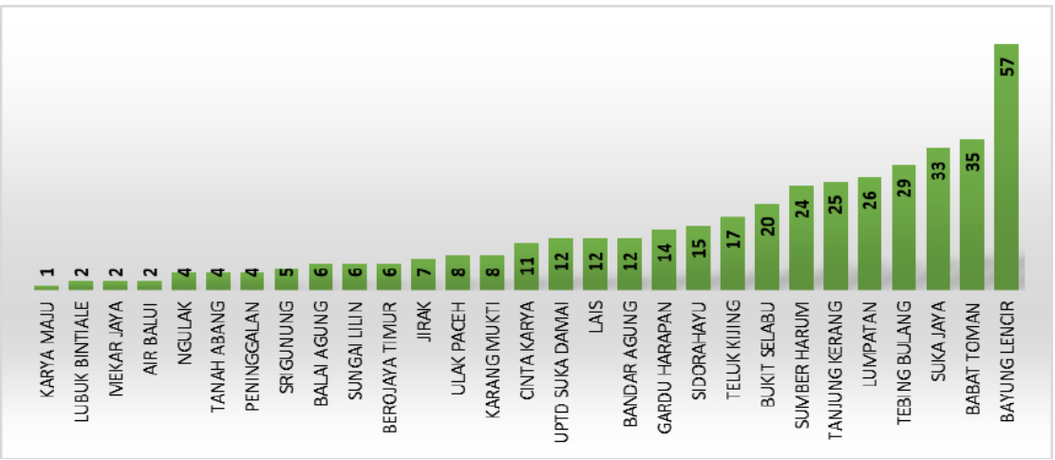
Gambar 2.28. Prevalensi Stunting Per Kecamatan Tahun 2022 – 2024

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Tren penurunan angka stunting yang signifikan di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan adanya keberhasilan beberapa intervensi yang dilakukan dan terjalinnya konvergensi program dalam upaya percepatan penurunan stunting. Intervensi untuk menanggulangi permasalahan gizi

terbagi menjadi gizi spesifik (langsung) yang kebanyakan dilaksanakan oleh sektor kesehatan dan gizi sensitif (tidak langsung) yang dilaksanakan melalui berbagai sektor seperti misalnya pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan industri, pekerjaan umum, dan kesejahteraan sosial. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Berdasarkan hasil pengukuran bulan Juni 2024 dalam kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting, didapatkan hasil balita dengan status gizi pendek sebanyak 226 balita dan sangat pendek 181 balita, balita dengan tinggi atau panjang badan normal sebanyak 48.337 dan tinggi 1.148 balita. Balita stunting merupakan penjumlahan antara balita pendek ditambah balita sangat pendek yang berjumlah 407 balita.



Gambar 2.29. Jumlah Balita Stunting Per Puskesmas Tahun 2024

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Pemerintah Daerah memiliki peran krusial dalam mengkoordinasikan upaya-upaya lintas sektor untuk mencapai penurunan stunting yang signifikan. Tujuan utama dari aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di tingkat Pemerintah Daerah adalah menurunkan angka

prevalensi stunting dengan cara meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, gizi, serta intervensi yang mendukung kesehatan lingkungan. Secara khusus, inisiatif ini menargetkan ibu hamil, bayi, balita, dan keluarga rentan agar mereka dapat menerima perhatian lebih dalam hal pemenuhan gizi dan kesehatan.

Sejak ditetapkan menjadi salah satu wilayah lokus stunting pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten / Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen mensukseskan upaya ini melalui aksi konvergensi/aksi integrasi. Hal ini sejalan dengan program unggulan dalam rangka mencapai visi misi Bupati Musi Banyuasin yaitu BASANAK (Bantuan Sayang Anak), Salah satu kegiatan pada program ini yaitu pemberian makanan tambahan berupa susu formula khusus (PKMK) bagi ibu hamil KEK dan balita stunting di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Melalui program ini diharapkan pada tahun 2029 prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai angka 9% dan pada akhir periode (tahun 2030) berada pada angka 8,5%.

b. Kabupaten Kota Sehat

KKS (Kabupaten Kota Sehat) adalah suatu kondisi daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Prinsip Kabupaten/Kota Sehat ini perlu dijadikan acuan oleh seluruh sektor pembangunan, sehingga mendukung untuk terlaksananya upaya

kesehatan yang optimal terutama dari sisi promotif dan preventif. Kabupaten/Kota Sehat diselenggarakan melalui Kelembagaan Tim Pembina dan Forum Kabupaten/Kota Sehat.

Kabupaten/Kota Sehat setiap 2 (dua) tahun diadakan penilaian dan diberikan penghargaan "SWASTI SABA" dari Presiden Republik Indonesia yang diklasifikasikan menjadi 4 katagori yaitu Swastisaba Padapa, Swastisaba Wiwerda, Swastisaba Wistara, dan Swastisaba Wistara Paripurna.

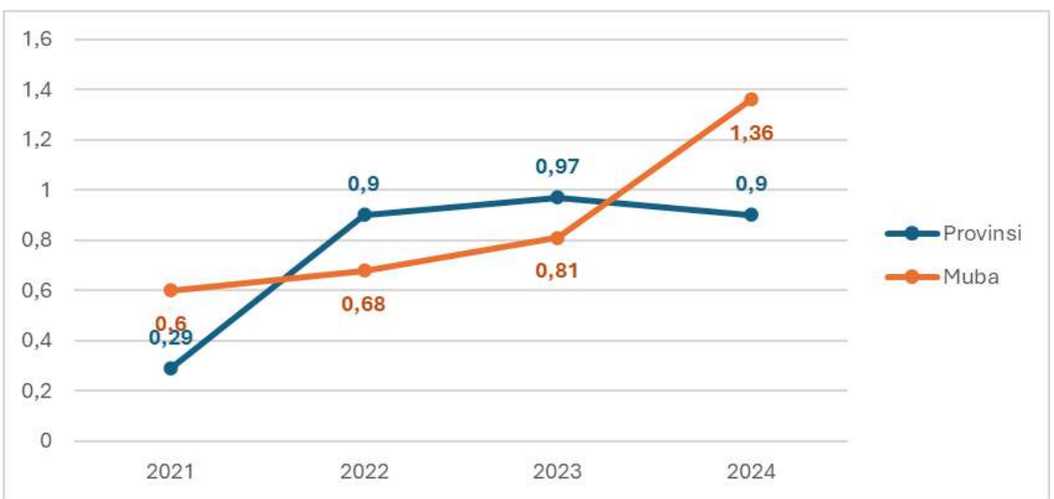
Manfaat dari penyelenggaraan KKS adalah Meningkatnya kinerja pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan kab/kota yang berwawasan kesehatan berkelanjutan antara lain meningkatnya masyarakat hidup sehat, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, penurunan kejadian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan peran masyarakat dan swasta peduli kesehatan, layanan fasilitas 9 tatanan kab/kota yang terstandar.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Musi Banyuasin sudah dilaksanakan melalui Forum Kabupaten Musi Banyuasin Sehat, Forum Kecamatan Sehat, dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten. Kabupaten Musi Banyuasin mulai mengikuti penghargaan kabupaten sehat tahun 2019 dan mendapatkan penghargaan swastisaba Padapa, kemudian tahun 2023 mendapatkan penghargaan kabupaten sehat setingkat lebih tinggi yakni swastisaba wiwerda. Pada tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin mengusulkan kembali dengan tingkatan swastisaba wistara.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM Sebagai ukuran, IPM dihitung melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup dimensi kesehatan yaitu usia lama hidup dengan menggunakan harapan hidup saat lahir yang mencerminkan tingkat kesehatan dan umur panjang penduduk, dimensi pendidikan yang mencakup harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan dimensi standar hidup layak yang diukur dengan menggunakan pengeluaran perkapita yang disesuaikan

Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan relatif baik. Pada tahun 2024 perbedaan pencapaian antara IPM tertinggi yakni Kota Palembang (82,29) dan terendah yakni Kabupaten Empat Lawang (69,63) dan Kabupaten PALI (69,63) sebesar 12,66. Hasil ini mengalami penurunan dibanding kondisi tahun 2023 dimana hasil perbedaan sebesar 12,94.



Gambar 2.30. Pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Pencapaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2020-2024 terus menunjukkan peningkatan. Namun, nilainya berada di bawah nilai IPM Sumatera Selatan. Pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat. Pencapaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan kategori dari kategori sedang menjadi kategori tinggi pada tahun 2021. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kabupaten Musi Banyuasin yang dilihat semakin membaik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pergerakan perubahan IPM dari tahun ke tahun juga dinilai sebagai indikator yang menggambarkan perubahan pembangunan manusia di suatu wilayah. Hal ini digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu periode waktu. Pertumbuhan IPM tersebut perlu dikaji karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM pada satu waktu, akan tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM-nya maka semakin cepat nilai IPM yang ideal akan tercapai.

Gambar 2.32 menampilkan pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Banyuasin tiap tahunnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 pertumbuhan IPM tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan yang. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kinerja yang relatif baik dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada awal periode. Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Banyuasin mengalami sedikit perlambatan. Tahun

2024 menjadi momentum penting, di mana pertumbuhan IPM Kabupaten Musi Banyuasin meningkat signifikan mencapai 1,36 persen, jauh melampaui pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 0,90 persen. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pembangunan manusia secara lebih terintegrasi, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi masyarakat.

Secara umum, kualitas pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota yang diukur melalui IPM terlihat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sama halnya dengan agregat menurut Provinsi Sumatera Selatan. Daerah-daerah dengan IPM yang relatif tinggi mampu mempertahankan prestasinya (meskipun terdapat perubahan peringkat), sementara daerah yang masih lebih rendah semakin terpacu untuk meningkatkan kapabilitas manusia di masing- masing komponen pembentuknya.

Perubahan peringkat IPM yang terjadi bergantung pada pembangunan unsur-unsur penunjang IPM di masing-masing kabupaten/kota, yang tentu saja memiliki berbagai tingkat perubahan pembangunan yang berbeda-beda. Secara umum, pembangunan fasilitas penunjang biasanya lebih dahulu terjadi di perkotaan, sehingga pelayanan di non-perkotaan menjadi cenderung lebih lambat. Namun tidak jarang kabupaten dengan wilayah dominan non-perkotaan tetap dapat berhasil mempertahankan peringkatnya secara berkesinambungan.

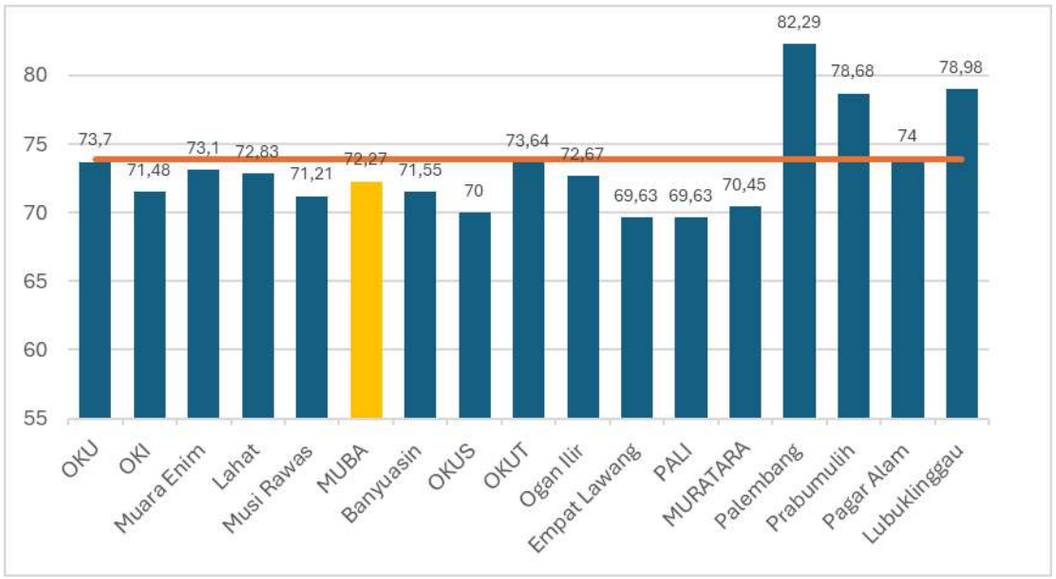
Selanjutnya jika dibandingkan dengan 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024, Kabupaten Musi Banyuasin menempati posisi ke-10 di bawah Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten

Lahat, dan Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 2.21. IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Capaian IPM			Selisih (2022-2023)
		2021	2022	2023	
1	Ogan Komering Ulu	71.79	72.41	73.17	0.76
2	Ogan Komering Ilir	69.33	70.17	70.8	0.63
3	Muara Enim	70.95	71.52	72.33	0.81
4	Lahat	70.62	71.45	72.15	0.7
5	Musi Rawas	69.26	70.04	70.52	0.48
6	**Musi Banyuasin**	**70.25**	**70.73**	**71.3**	**0.57**
7	Banyu Asin	69.15	69.95	70.67	0.72
8	Ogan Komering Ulu Selatan	67.85	68.33	69.05	0.72
9	Ogan Komering Ulu Timur	71.68	72.33	73.05	0.72
10	Ogan Ilir	70.4	71.2	72.01	0.81
11	Empat Lawang	67.77	68.39	69.07	0.68
12	Penukal Abab Lematang Ilir	67.03	67.89	68.78	0.89
13	Musi Rawas Utara	67.94	68.76	69.63	0.87
14	Kota Palembang	80.46	81.19	81.72	0.53
15	Kota Prabumulih	76.3	77.14	78.07	0.93
16	Kota Pagar Alam	71.47	72.4	73.25	0.85
17	Kota Lubuk Linggau	77.09	77.71	78.36	0.65
Provinsi Sumatera Selatan		**71.83**	**71.83**	**73.18**	**1.35**

Sumber: BPS sumatera Selatan 2024 (diolah)



Gambar 2.31. IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2025 (diolah)

Berdasarkan Indeks pembangunan manusia Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2024 dan kerangka indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, terdapat keterkaitan yang cukup kuat antara data kuantitatif BPS dengan arah kebijakan sosial daerah.

Kedua, kesetaraan gender tercermin dari capaian pendidikan dan partisipasi perempuan. Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan untuk SD (99,15%) dan SMA/SMK (68,15%) sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki, mengindikasikan akses pendidikan relatif setara. Namun, rata-rata lama sekolah keseluruhan masih 7,68 tahun, setara tamat SMP kelas 1–2, sehingga perlu peningkatan untuk mengakselerasi pemberdayaan perempuan di pasar kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 72,63% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,58% juga mencerminkan pasar kerja yang relatif terbuka, namun proporsi sektor tersier (32,73%) masih perlu diperkuat untuk membuka lapangan kerja layak bagi perempuan.

Ketiga, masyarakat inklusif dapat dilihat dari ketersediaan layanan dasar. Akses listrik hampir universal (99,45%), akses air minum layak meningkat menjadi 71,11%, dan kepemilikan jamban sehat 86,98%. Indikator ini mendukung pemenuhan hak dasar seluruh penduduk, termasuk kelompok rentan. Sebaran penduduk yang tidak merata, dengan kepadatan tinggi di Sungai Lilin (172 jiwa/km²) dan rendah di Batanghari Leko (9 jiwa/km²), menuntut distribusi layanan publik yang adaptif agar inklusivitas terjaga.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan Musi Banyuasin berada pada jalur perbaikan kualitas keluarga, penguatan kesetaraan gender, dan peningkatan inklusivitas sosial. Tantangan yang tersisa meliputi peningkatan rata-rata lama sekolah, penguatan lapangan kerja bagi perempuan, pemerataan layanan dasar di wilayah kepadatan rendah, serta penguatan indikator gizi dan kesehatan anak. Integrasi ketiga pilar ini ke dalam perencanaan lintas-OPD akan memastikan pembangunan sosial di Muba lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Secara lebih rinci, masing-masing dimensi pembentuk IPM di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendidikan

Konsep pendidikan berkualitas yang merata di Kabupaten Musi Banyuasin mencakup upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh penduduk, baik di perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan yang layak, relevan, dan berstandar nasional. Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2024, kualitas pendidikan tercermin dari angka partisipasi sekolah, tingkat melek huruf, dan capaian rata-rata lama sekolah yang terus meningkat.

Akses pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin ditunjang oleh keberadaan sekolah dasar hingga menengah yang tersebar di hampir seluruh kecamatan, serta program beasiswa bagi siswa kurang mampu. Cakupan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD dan SMP relatif tinggi dan mendekati target nasional, menunjukkan keberhasilan pemerataan akses pendidikan dasar. Namun, tantangan masih ada pada pemerataan kualitas guru, terutama di wilayah terpencil, serta keterbatasan fasilitas pembelajaran seperti laboratorium dan akses teknologi informasi.

Dari sisi mutu, upaya peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kurikulum berbasis kompetensi, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital. Pemerintah daerah juga mendorong program literasi dan numerasi untuk meningkatkan kemampuan dasar siswa, sejalan dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, Musi Banyuasin telah menunjukkan kemajuan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata, namun peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini masih memerlukan strategi untuk mengurangi kesenjangan mutu antara sekolah di pusat kota dan wilayah pedesaan, memperluas akses pendidikan tinggi, serta memperkuat keterampilan abad ke-21 bagi siswa.

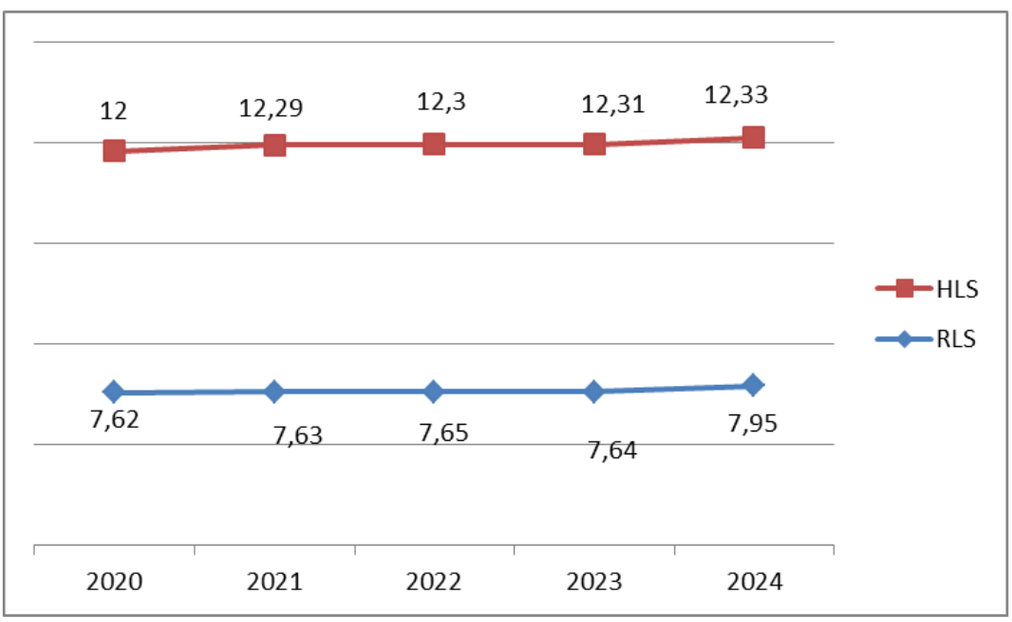
Dalam dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2024, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi adalah 41,52 persen. Berdasarkan dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2024, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca adalah 46,69 persen. Artinya, hampir separuh satuan pendidikan di Musi Banyuasin sudah memenuhi target

nasional untuk kemampuan literasi membaca, namun peningkatan mutu pembelajaran bahasa dan pemahaman teks masih diperlukan agar capaian ini mendekati atau melampaui angka 100 persen.

Dalam rangka menciptakan SDM berkualitas, salah satu faktor penting yaitu meningkatkan derajat pendidikan. Tingkat Pendidikan yang tinggi sangat penting bagi suatu negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada tingkat makro, ukuran mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk. Secara minimal penduduk harus mempunyai kemampuan membaca dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara wajar, sehingga dapat dikatakan kemampuan baca tulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk hidup sejahtera. Dengan demikian komponen yang termasuk dalam bidang pendidikan yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menjelaskan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia di atas 15 tahun dalam menempuh pendidikan formal. Selanjutnya komponen kedua dalam bidang pendidikan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menjelaskan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan penduduk pada usia tertentu di masa mendatang. Angka HLS menjelaskan mengenai adanya peluang bagi anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas untuk merasakan seluruh jenis pendidikan dengan kurun waktu tertentu. Selain itu, angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di

berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

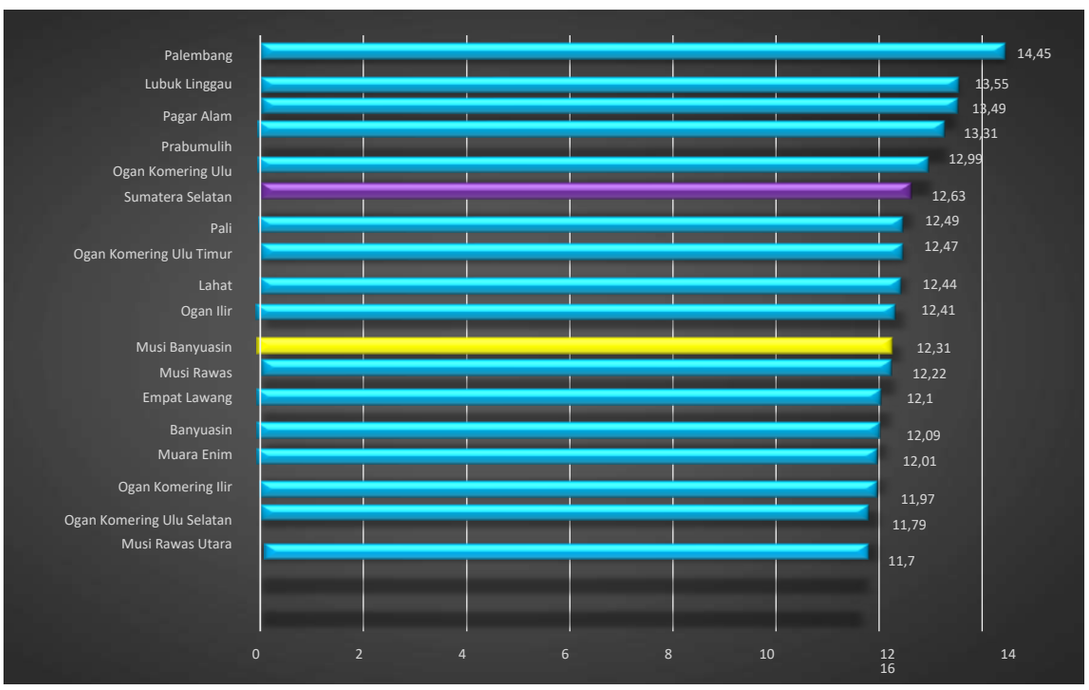
Pada tahun 2024, angka harapan lama sekolah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 12,33, yaitu anak-anak yaitu anak-anak yang berumur 7 tahun pada tahun 2024 akan mempunyai harapan untuk bersekolah selama 12 tahun atau setara dengan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat kelas XII. Perkembangan angka harapan lama sekolah cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan juga dengan rata-rata lama sekolah yang semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa dengan semakin membaiknya sistem pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, diharapkan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin dapat memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di masa yang akan datang.



Gambar 2.32. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Selama 2020–2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Musi Banyuasin meningkat dari 12,00 tahun menjadi 12,33 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 7,62 tahun menjadi 7,95 tahun. Keduanya menunjukkan tren positif, meskipun kenaikan RLS berjalan lebih lambat dibanding HLS. Kesenjangan keduanya yang masih lebih dari 4 tahun menandakan bahwa meski anak-anak generasi baru diproyeksikan menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas, rata-rata pendidikan penduduk dewasa masih rendah. Sesuai rekomendasi Inmendagri No. 2 Tahun 2025, penyajian tren ini penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan manusia, dan hasilnya mengindikasikan perlunya kebijakan akselerasi peningkatan RLS melalui pemerataan akses pendidikan, program kesetaraan, dan pencegahan putus sekolah.

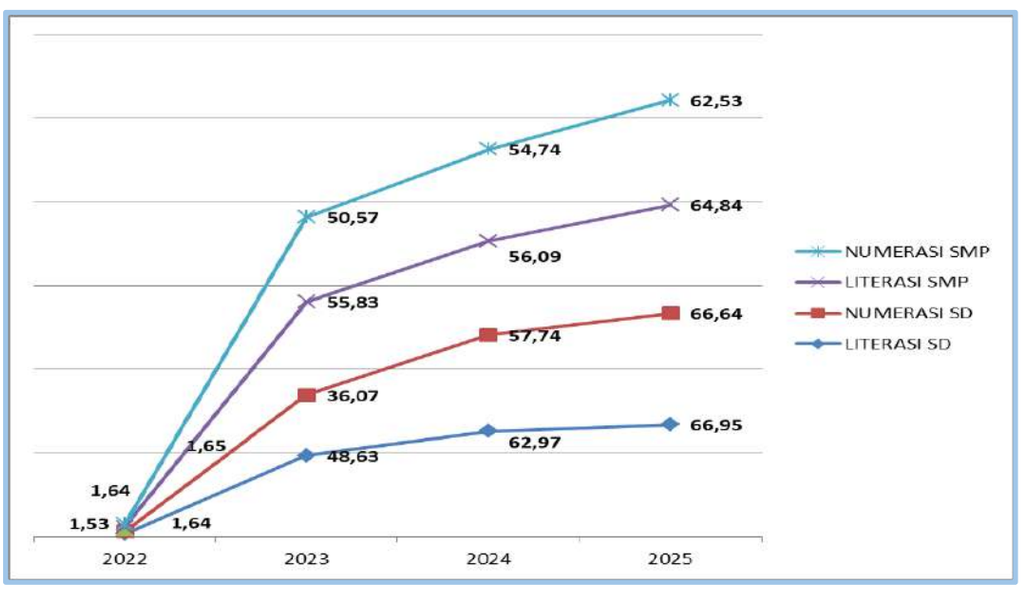


Gambar 2.33. Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan
Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Pada Tahun 2023 HLS tertinggi dicapai oleh Kota Palembang dengan capaian hingga 14,45 tahun. Artinya, anak-anak usia 7 tahun di Kota Palembang pada tahun 2023 dapat mengenyam pendidikan selama 14

tahun atau setara dengan tingkat pendidikan diploma tiga (D3). HLS terendah di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu senilai 11,7 tahun. Artinya, anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2023 dapat mengenyam pendidikan selama 11 tahun atau setara SMA. Ketimpangan HLS antara Kota Palembang dan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah hampir 3 tahun, tepatnya 2,75 tahun.

Kabupaten Musi Banyuasin sendiri memiliki angka harapan lama sekolah sebesar 12,33 yaitu peringkat 11 apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Nilai Kabupaten Musi Banyuasin ini sendiri terbilang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata provinsi yaitu dengan nilai sebesar 12,63. Sehingga perlu disimpulkan bahwa saat ini angka harapan lama sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin masih perlu untuk ditingkatkan lagi kedepannya.



Gambar 2.34. Angka Literasi dan Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: BPS Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Grafik di atas terlihat bahwa angka literasi SD Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 sebesar 1,64 persen meningkat sangat signifikan setiap tahun masing-masing sebesar 48,63 persen di tahun 2023,

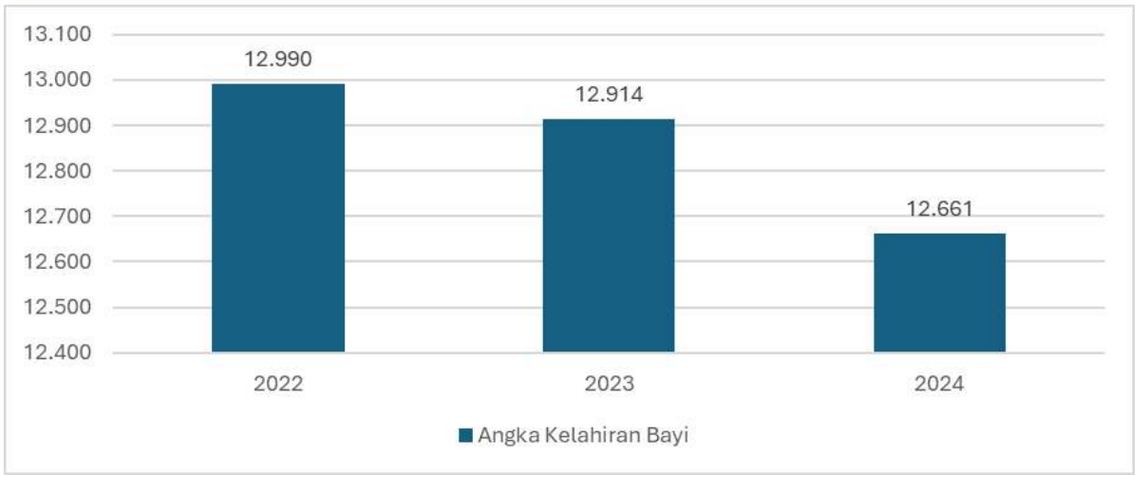
kemudian 62,97 persen di tahun 2024 dan 66,95 persen tahun 2025, ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya angka numerasi SD dari tahun ke tahun juga semakin meningkat yaitu tahun 2022 sebesar 1,53 persen kemudian meningkat kembali menjadi 36,07 persen di tahun 2023 dan 57,74 persen di tahun 2024 selanjutnya meningkat menjadi 66,64 di tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan logis, serta kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan angka literasi SMP di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 sebesar 1,65 persen meningkat sangat signifikan setiap tahun masing-masing sebesar 55,83 persen di tahun 2023, kemudian 56,09 persen di tahun 2024 dan 64,84 persen tahun 2025, ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin semakin meningkat dari tahun ketahun. Selanjutnya angka numerasi SMP dari tahun ke tahun juga semakin meningkat yaitu tahun 2022 sebesar 1,64 persen kemudian meningkat kembali menjadi 50,57 persen di tahun 2023 dan 54,74 persen di tahun 2024 selanjutnya meningkat menjadi 62,53 di tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya kemampuan peserta didik.

Program wajib belajar di Indonesia selama ini hanya mencakup pendidikan dasar dan menengah, yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA/SMK sederajat. Pendidikan anak usia dini (PAUD)termasuk TK, kelompok bermain, dan sejenisnya sering kali dianggap sebagai "opsional" oleh sebagian masyarakat, terutama dari kalangan prasejahtera. Padahal, penelitian internasional menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti PAUD berkualitas memiliki peluang lebih tinggi untuk sukses secara akademik dan sosial di jenjang pendidikan berikutnya. Langkah pemerintah

ini sekaligus menjawab kesenjangan akses dan kualitas yang selama ini terjadi.Dengan menjadikan PAUD sebagai bagian dari wajib belajar, negara berkewajiban memastikan semua anak Indonesia tanpa terkecuali mendapat pendidikan sejak usia dini, tanpa terkendala biaya maupun keterbatasan fasilitas. Dengan adanya penetapan wajib belajar 13 tahun oleh pemerintah yang mulai diberlakukan tahun ajaran 2025/2026, menandakan bahwa PAUD bukan sekedar formalitas/pilihan melainkan fondasi awal bagi pendidikan anak-anak Indonesia.

b) Kesehatan

Angka kelahiran bayi merupakan keseluruhan jumlah bayi atau anak yang dilahirkan atau yang diperkirakan oleh wanita usia produktif. Indikator yang digunakan untuk menilai angka kelahiran bayi yaitu TFR. Indikator tersebut menunjukkan nilai rata-rata ibu melahirkan usia 3-4 anak pada masa produktif. Selain itu, TFR juga digunakan untuk melihat keberhasilan arah pembangunan sosial ekonomi di suatu daerah atau wilayah yang berhasil menerapkan program KIA maupun KB dalam membantu meningkatkan rata- rata usia menikah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, angka kelahiran bayi di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung Fluktuatif, namun berada di atas angka 10.000. Penurunan angka kelahiran selama periode 2022–2024 menunjukkan tren demografis yang mengarah pada perlambatan pertumbuhan penduduk alami di Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah kelahiran menurun sekitar 2,5% dalam tiga tahun terakhir, atau sekitar 329 kelahiran lebih sedikit dari 2022 ke 2024.



Gambar 2.35. Angka Kelahiran Bayi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024

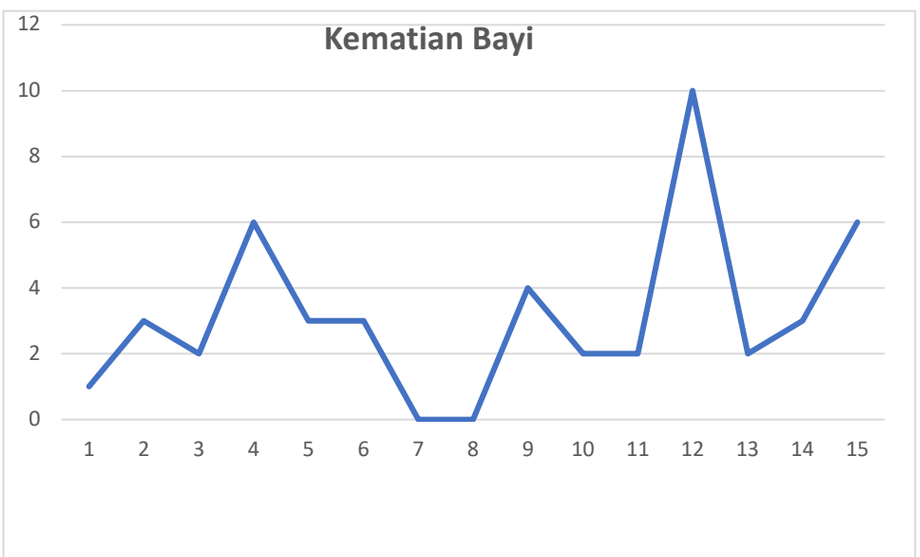
Sumber: Satudata Muba, (diolah)

Selain itu, diketahui bahwa terdapat beberapa indikator untuk menunjukkan kesejahteraan di suatu negara maupun wilayah, yakni Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). AKB merupakan rasio jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan per 1.000 kelahiran bayi yang hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB dapat menunjukkan tingkat permasalahan kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dimana kasus kematian bayi dapat dimungkinkan karena adanya beberapa faktor seperti status gizi ibu pada saat mengandung, tingkat keberhasilan ibu pada program KB dan KIA, faktor lingkungan baik ekonomi maupun sosial, serta tingkat pelayanan antenatal. Apabila nilai AKB dalam suatu wilayah cukup tinggi, maka dapat diartikan bahwa status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

Tabel 2.22. Jumlah Bayi dan Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024

No	Kecamatan	Bayi lahir	Kematian bayi	Kematian balita
1	Babat Supat	419	1	0
2	Babat Toman	782	3	0
3	Batanghari Leko	466	2	0
4	Bayung Lencir	1782	6	0
5	Jirak Jaya	483	3	0
6	Keluang	658	3	0
7	Lais	1015	0	0
8	Lalan	814	0	0
9	Lawang Wetan	468	4	0
10	Plakat Tinggi	638	2	0
11	Sanga Desa	708	2	0
12	Sekayu	1529	10	0
13	Sungai Keruh	371	2	0
14	Sungai Lilin	1416	3	0
15	Tungkal Jaya	1112	6	0

Sumber: Satu data Kabupaten Muba 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin



Gambar 2.36. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Satu data Muba 2024, Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin (diolah)

Data menunjukkan total 12.661 bayi yang lahir di 15 kecamatan. Bayung Lencir dan Sekayu menjadi kecamatan dengan angka kelahiran tertinggi, masing-masing mencapai 1.782 dan 1.529 bayi, menyumbang sekitar 28,2% dari total kelahiran. Tingginya angka kelahiran di kedua kecamatan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor demografis seperti kepadatan penduduk, tingkat fertilitas, atau migrasi. Di sisi lain, Sungai Keruh mencatat kelahiran terendah (371 bayi), yang bisa disebabkan oleh populasi yang lebih kecil atau urbanisasi. Perbedaan signifikan dalam angka kelahiran antar kecamatan menunjukkan ketidakseimbangan distribusi penduduk. Kecamatan seperti Lais dan Lalan juga memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi (masing-masing 1.015 dan 814 bayi), namun menariknya, keduanya tidak mencatat kematian bayi sama sekali. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah faktor layanan kesehatan, sanitasi, atau kesadaran masyarakat di dua kecamatan ini lebih baik dibandingkan daerah lain.

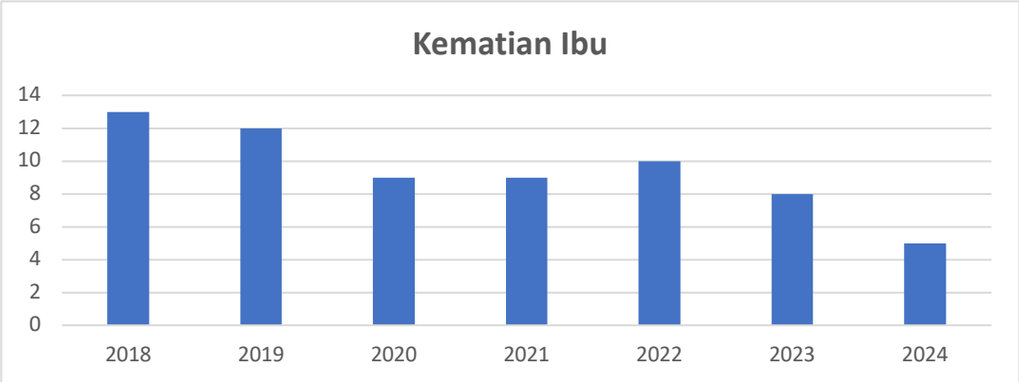
Secara keseluruhan, terdapat 47 kematian bayi dari 11.761 kelahiran, dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,4%. Angka ini relatif rendah, tetapi beberapa kecamatan menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Sekayu menjadi wilayah dengan kematian bayi tertinggi (10 kasus), disusul oleh Bayung Lencir dan Tungkal Jaya (masing-masing 6 kasus). Jika dilihat dari persentase, Lawang Wetan justru memiliki CFR tertinggi (0,85%) meski jumlah absolut kematiannya lebih kecil (4 dari 468 kelahiran). Fakta bahwa Lais dan Lalan tidak memiliki kasus kematian bayi sama sekali patut diapresiasi, dari tingginya kematian bayi di Sekayu dan Bayung Lencir bisa mengindikasikan masalah seperti kurangnya akses ke layanan kesehatan neonatal, gizi buruk, atau infeksi pada bayi baru lahir. Kematian balita dan implikasi kebijakan yang menarik, tidak ada kasus

kematian balita di beberapa kecamatan. Ini bisa menjadi indikator keberhasilan program imunisasi, pemberian makanan tambahan, atau sanitasi lingkungan untuk anak usia di bawah lima tahun.

Menurut *World Health Organization* (WHO), *maternal death* atau kematian ibu merujuk pada kematian ibu yang terjadi pada masa kehamilan atau 42 hari setelah kehamilan. Kematian ibu ini dapat disebabkan karena adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu memburuknya kondisi kesehatan ibu pada saat masa kehamilan. Pada konteks ini, kematian ibu bukan disebabkan karena kecelakaan maupun suatu kebetulan. Diperjelas oleh BPS yang menyatakan bahwa AKI merupakan data yang menunjukkan jumlah banyaknya kematian perempuan pada saat mengandung atau 42 hari dari terminasi kehamilan tanpa melihat lama persalinan, tetapi disebabkan karena pengendalian kehamilannya per 100.000 kelahiran hidup.

AKI merupakan salah satu indikator terpenting dalam aspek pembangunan kesehatan, bahkan menjadi salah satu isu global. Dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), fokus tersebut tercantum pada poin ketiga yaitu upaya dalam penurunan AKI. SDGs menyatakan bahwa komitmen global untuk menurunkan rasio AKI sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 terdata 13 kasus, kemudian pada tahun 2019 berkurang menjadi 12 kasus kematian ibu, dan tahun 2020 menurun kembali menjadi 9 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 kasus kematian ibu tetap berjumlah 9 kasus. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Banyuasin memang dapat dikatakan menurun, namun masih tergolong banyak dengan masih adanya 9 kasus kematian dari tahun 2020

sampai 2022. Sedangkan di tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan yang berjumlah 8 dan 5 kasus.



Gambar 2.37. Jumlah kematian Ibu di tahun 2024

Sumber: Satu data Muba 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2024 (diolah)

Kematian ibu disebabkan oleh multifaktor yang merupakan hasil interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non-kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan klinis dan terselenggaranya sistem pelayanan kesehatan secara optimal. Masih banyaknya kasus kematian ibu di Kabupaten Musi Banyuasin, salah satunya berkaitan dengan tingginya kehamilan usia dini. Hal ini dapat diketahui melalui jumlah persalinan usia dini di Kabupaten Musi Banyuasin yang meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Disini dapat angka kematian ibu telah mengalami penurunan dari tahun 2023 sampai tahun 2024.

c). Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif di Kabupaten Musi Banyuasin mencakup upaya pemerintah daerah untuk menyediakan jaring pengaman sosial yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi

Banyuasin 2024, program-program perlindungan sosial di daerah ini berorientasi pada pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta mitigasi dampak bencana atau krisis. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin yang perlu memasukkan program perlindungan sosial yang adaptif. Ini berarti program-program tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Muba. Perlindungan sosial yang adaptif mencakup berbagai aspek, termasuk jaminan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan.

Pendekatan adaptif terlihat dari penyaluran bantuan yang terintegrasi dengan data kemiskinan dan kerentanan sosial terkini, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, program seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial tunai dapat diarahkan tepat sasaran kepada rumah tangga yang membutuhkan, termasuk yang baru masuk kategori rentan akibat guncangan ekonomi atau bencana alam.

Di sektor kesehatan, perlindungan sosial adaptif juga diwujudkan melalui jaminan pembiayaan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin dan rentan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini memastikan bahwa krisis kesehatan tidak langsung berubah menjadi krisis ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Aspek adaptif lainnya adalah penguatan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan program padat karya yang mampu mengurangi dampak pengangguran. Kabupaten Musi Banyuasin juga memanfaatkan teknologi informasi untuk

mempercepat validasi penerima bantuan, meminimalkan kebocoran, dan meningkatkan transparansi.

Secara keseluruhan, perlindungan sosial yang adaptif di Musi Banyuasin berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mengurangi kerentanan masyarakat. Ke depan, tantangan terbesarnya adalah memperluas cakupan program bagi kelompok rentan baru, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan fleksibilitas pendanaan sehingga respons dapat diberikan cepat ketika terjadi guncangan atau krisis.

Di Musi Banyuasin, program jaminan sosial ketenagakerjaan mulai diterapkan untuk melindungi pekerja rentan. Dengan inisiatif ini, sebanyak 45.000 jiwa akan mendapatkan perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program ini merupakan bagian dari PAKE KELAMBU (Perlindungan Ketenagakerjaan, Keluarga Aman Terbantu), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama pekerja rentan.

Informasi ini diumumkan setelah Pemkab Muba dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan penandatanganan adendum perjanjian kerjasama dan rapat koordinasi dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 54 Tahun 2023. Manfaat yang akan diterima oleh peserta program meliputi:

Tabel 2.23. Anggaran Santunan

No.	Jenis santunan	Anggaran
1	Santunan kematian akibat kecelakaan kerja	Rp 244 juta
2	Santunan kematian normal	Rp 40 juta
3	Biaya pemakaman	Rp 10 juta

No.	Jenis santunan	Anggaran
4	Beasiswa untuk 2 anak (TK hingga perguruan tinggi)	Maksimal Rp 174 juta
5	Santunan cacat tetap	Rp 56 juta
6	Perawatan medis	Tanpa batas biaya

Sumber: mubakab.go.id 2025

Data Penerima Manfaat dari hasil verifikasi, penerima manfaat dipilih dari kategori P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim):

* Desil 1: 12.451 jiwa

* Desil 2: 24.119 jiwa

* Desil 3: 8.430 jiwa

10) Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki beragam warisan seni, adat, tradisi dan budaya yang mencerminkan identitas, kekayaan, dan keunikan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu warisan yang dimiliki oleh daerah ini yaitu warisan budaya tak benda dalam bentuk kesenian tari dan puisi. Di antara kesenian tersebut yang terkenal di Kabupaten Musi Banyuasin yakni *senjang*, pantun, *ungak-ungak*, *serambah* dan *jampi* (mantera). Selain itu, terdapat beragam seni tari tradisional yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin seperti Tari Stabek, Senandung Sukma, Mare-mare, Mantang parah, Begamboh, Burung Putih, Ribu-Ribu, Nasib, Besalek, Tri Sabung Ayam, Tari Ulang-Ulang, Tari Nyemat Atap, dan Jambu Merah. Potensi tersebut semakin lengkap dengan dukungan masyarakat yang terus mengembangkan budaya seni tari kreasi Andun Bajejak, Ginde Manindai, Beranjak Busik, Permata Muba, Tari Kipas, dan Serasan Sekate. Dari

sejumlah kesenian dan tradisi lisan yang dimiliki Musi Banyuasin, senjang menjadi salah satu kesenian tradisi lisan yang masih eksis hingga saat ini. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen mengembangkan seni dan budaya, salah satunya melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana seni dan budaya.

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
1.	Jumlah sanggar seni budaya yang aktif	8	8	8	8	106	106	39	162
2.	Penyelenggaraan festival seni budaya (kali) sesuai kalender budaya	4	4	4	4	1	4	3	3
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Persentase Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	20,94	27,54	28,22	29,00	30,67	39,00	35	38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin 2025 (diolah)

Selanjutnya, indikator bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Dari sisi kepemudaan, jumlah organisasi pemuda yang aktif cenderung stabil dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 39 organisasi Peningkatan ini mengindikasikan tumbuhnya semangat partisipasi dan pembinaan generasi muda di daerah sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 23 organisasi dikarenakan

katagori susunan kepengurusan bukan lagi OKP usia 16-30 tetapi sudah ke ormas, kepengurusan di tingkat pusat sudah tidak aktif lagi, dan pengurus OKP yang sudah di atas umur 16-30 tahun.

Sementara itu, kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan sesuai kalender juga menunjukkan tren yang cukup konsisten. Jumlahnya meningkat dari 5 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 6 kegiatan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas kepemudaan tetap berlangsung secara aktif dan terstruktur. Namun, di sisi lain, bidang olahraga jumlah organisasi olahraga yang aktif ada 2 organisasi dari tahun 2020 sampai tahun 2022 kemudian bertambah menjadi 3 organisasi aktif pada tahun 2023 sampai 2024. Kondisi ini diperparah oleh menurunnya jumlah kegiatan olahraga yang dilaksanakan sesuai kalender kegiatan, dari 30 kegiatan pada tahun 2021 menjadi hanya 6 dan 5 kegiatan pada tahun 2022 dan 2023 dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 8 kegiatan. Meskipun demikian, capaian prestasi generasi muda menunjukkan peningkatan luar biasa. Persentase penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal di tingkat provinsi meningkat menjadi 97,44 persen. Angka ini mencerminkan keberhasilan pembinaan dan motivasi generasi muda untuk berprestasi.

Tabel 2.25. Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024

Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	35 organisasi	35 organisasi	34 organisasi	39 organisasi	23 organisasi

Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi olahraga yang aktif	~~43~~ 2 organisasi	~~45~~ 2 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi
Jumlah kegiatan kepemudaan sesuai kalender kegiatan	5 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan
Jumlah kegiatan olahraga sesuai kalender kegiatan	10 kegiatan	30 kegiatan	6 kegiatan	5 kegiatan	8 kegiatan
Persentase penghargaan yang dicapai oleh Generasi Muda minimal di Tingkat Provinsi terhadap Generasi muda yang dibina	41,98	91,48	98,98	120,55	97,44

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, 2025

Konsep dari beragama maslahat di Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada kehidupan beragama yang tidak hanya menekankan pada kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan, tetapi juga membawa manfaat nyata (*maslahat*) bagi individu dan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui program pembinaan umat beragama, penguatan kerukunan antar umat, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan di semua agama yang diakui negara. Pemerintah daerah memberikan fasilitasi pembangunan rumah ibadah, penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, dan dukungan terhadap lembaga keagamaan yang berperan dalam pendidikan moral dan etika sosial.

Sementara itu, berkebudayaan maju di Musi Banyuasin mencerminkan upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal sambil

mendorong inovasi budaya agar relevan dengan perkembangan zaman. Kebijakan ini terlihat pada program pelestarian warisan budaya daerah, seperti seni tradisi, upacara adat, dan bahasa lokal, sekaligus mengembangkan kreativitas seni modern yang dapat menjadi identitas daerah di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah daerah juga memfasilitasi festival budaya, pameran seni, dan kegiatan kreatif yang melibatkan generasi muda, sehingga kebudayaan menjadi sumber kebanggaan dan penggerak ekonomi kreatif.

Kedua aspek ini beragama maslahat dan berkebudayaan maju saling menguatkan dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan berdaya saing. Kehidupan beragama yang maslahat mendorong tumbuhnya etika sosial dan solidaritas, sementara kebudayaan yang maju memupuk identitas daerah dan memperluas ruang ekspresi kreatif masyarakat. Sinergi ini menjadi modal sosial yang penting untuk menjaga stabilitas sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat daya tarik Musi Banyuasin di kancah nasional maupun global.

Tabel 2.26. Jumlah Tempat Peribadatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

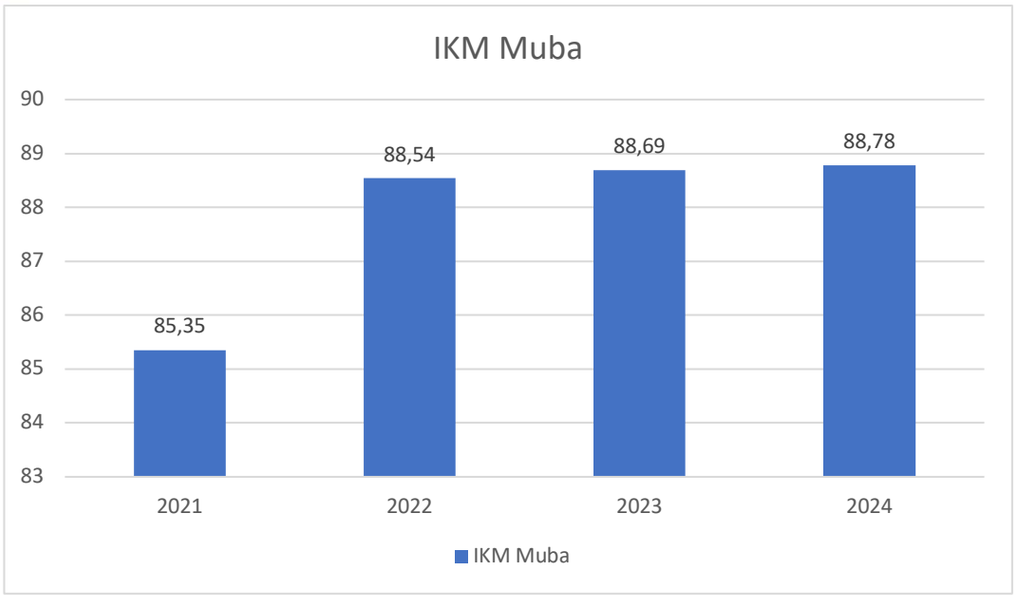
Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Kelenteng
Sekayu	76	54	0	0	0	0	0
Lais	102	20	0	0	0	0	0
Sungai Keruh	76	45	0	0	0	0	0
Batang Hari Leko	38	43	0	0	1	0	0
Sanga Desa	41	18	0	0	0	0	0
Babat Toman	58	40	0	0	0	0	0
Sungai Lilin	78	224	0	0	0	0	0
Keluang	33	113	0	0	0	0	0

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Kelenteng
Bayung Lencir	112	73	0	0	2	0	0
Plakat Tinggi	70	100	0	0	0	0	1
Lalan	144	212	0	0	10	0	0
Tungkal Jaya	38	8	0	0	1	0	0
Lawang Wetan	42	7	0	0	0	0	0
Babat Supat	71	53	0	0	0	0	0

Sumber: satudata.mubakab.go.id 2024

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan suatu jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa. Pelayanan publik memiliki indikator dalam pemenuhan pelayanannya, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pengukuran dalam indeks tersebut berupa data kuantitatif maupun data kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh fasilitas pelayanan yang diberikan dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya.



Gambar 2.38. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2024

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data pada Gambar 2.39, terlihat bahwa sepanjang tahun 2021 hingga 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan. Secara khusus pada pelayanan perizinan, terlihat peningkatan yang sangat signifikan khususnya dari tahun 2021 dengan nilai 85,35 ke 88,78 di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh adopsi sistem yang lebih baik dan langkah-langkah inovatif yang diambil oleh pemerintah Musi Banyuasin dalam meningkatkan pelayanan perizinan.

Sementara itu hal ini beriringan dengan peningkatan indeks birokrasi reformasi Selama periode 2022 hingga 2025, Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan peningkatan signifikan dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022, nilai indeks berada di angka 55 dengan predikat BB (sangat baik), mencerminkan kondisi birokrasi yang masih

dalam tahap pembenahan awal, dengan fokus pada penataan kelembagaan dan pelayanan dasar.

Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan di angka 65, tetap dalam kategori BB (sangat baik), menandakan adanya kemajuan, namun, lompatan signifikan mulai terjadi pada tahun 2024, di mana nilai indeks mencapai 75 dengan predikat CC (Cukup). Tahun 2025 menjadi tonggak penting dengan capaian indeks nilai 85 dan predikat A (memuaskan). Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemkab Muba dalam membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Kinerja ini tidak lepas dari reformasi struktural, digitalisasi layanan, penguatan pengawasan internal, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Tabel 2.27. Proyeksi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2029

Tahun	Skor Angka	Skor Huruf
2022	55	BB
2023	65	BB
2024	75	CC
2025	85	A
2026	95	AA
2027	105	AA
2028	115	AA
2029	125	AA

Sumber: Diolah dari 1data.menpan.id 2025

Perjalanan reformasi birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan nilai positif yang mengesankan. Pada tahun 2022, nilai indeks berada di angka 55 dengan predikat BB, menandakan bahwa upaya reformasi birokrasi masih berada pada tahap perbaikan sistem dasar dan penataan kelembagaan. Nilai ini terus meningkat secara konsisten setiap

tahun, hingga mencapai 85 (A) pada tahun 2025, yang mengindikasikan terbentuknya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap pelayanan publik. Memasuki periode 2026–2029, reformasi birokrasi Muba diprediksi dengan predikat AA secara konsisten sejak tahun 2026.

Predikat ini menandakan bahwa birokrasi daerah telah melampaui standar kinerja nasional dan berada dalam kategori *sangat adaptif dan inovatif*. Kinerja luar biasa ini diasumsikan didorong oleh transformasi digital yang menyeluruh, peningkatan kualitas SDM ASN berbasis kompetensi, dan penyederhanaan prosedur birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan Predikat AA, Muba diposisikan sebagai daerah yang tidak hanya efisien, tetapi juga cakap dalam merespons tantangan perubahan zaman secara progresif.

1. Fokus Layanan Urusan Wajib dengan Layanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Pemenuhan atas hak pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi salah satu indikator keadilan dalam keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga sebuah investasi sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan pembangunan daerah. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) akan memperoleh keahlian dalam pembangunan SDM, baik berupa akses, pemerataan maupun peningkatan mutu pendidikan (Indikator Kesejahteraan, 2015). Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Pasal 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pendidikan (usia dini serta non-formal), pendidikan dasar (SD, SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adapun urusan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pendidikan berkualitas dalam pandangan Permendagri 2/2025 bukan sekadar capaian angka, tetapi menyangkut perubahan sosial yang memungkinkan setiap masyarakat Musi Banyuasin dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dalam pemenuhannya pendidikan berdasarkan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kotor (APK). APS sebagai ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan penduduk usia muda. Data APS menunjukkan jumlah dari siswa berdasarkan kluster usia sekolah yakni usia 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SMP), dan 15-18 tahun (SMA). Namun demikian tidak dapat dipungkiri adanya siswa berusia 12 tahun duduk di bangku SMP, serta siswa berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Oleh karenanya, APS memberikan informasi terkait seberapa besar penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana diketahui APS menjadi data penting dalam mendukung Program Wajib Belajar 9 tahun.

Kemudian APM menjadi salah satu indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap kelompok pendidikan berdasarkan usia standar pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK merupakan harapan penduduk dalam melanjutkan jenjang pendidikan. APK juga digunakan untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan yang dapat dilihat melalui partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi nilai APK suatu daerah dapat diartikan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang mengemban pendidikan tertentu (Kemendikbud, 2022). Nilai APK, APM, dan APS Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 2.28. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

Indikator	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APK	SD/MI/ Paket A	116,71	112,44	112,83	111,03	111,39	110,33	107,29
	SMP/MTs/ Paket B	89,76	91,73	93,28	95,13	87,81	90,32	88,71
	SMA/SMK/ MA/Paket C	62,81	78,48	79,94	70,83	68,96	83,21	92,17
APM	SD/MI/ Paket A	99,08	98,38	99,67	99,43	97,58	98,06	96,96
	SMP/MTs/ Paket B	83,58	82,76	85,06	84,28	76,04	80,84	81,37
	SMA/SMK/ MA/Paket C	59,89	59,09	60,03	59,32	59,82	66,18	61,08
APS	SD/MI/ Paket A	99,85	99,80	99,67	99,43	99,55	99,81	96,96
	SMP/MTs/ Paket B	96,38	97,44	96,43	96,09	96,13	95,04	96,74
	SMA/SMK/ MA/Paket C	67,66	66,81	67,41	67,22	74,84	75,16	69,82

Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai APK baik tingkat SD, SMP, maupun SMA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI/Paket A mengalami penurunan dari 112,83 persen (2020) menjadi 107,29 persen (2024), meskipun masih berada di atas 100 persen yang menunjukkan bahwa terdapat murid di luar kelompok usia ideal yang mengikuti pendidikan dasar. Pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APK sempat mengalami peningkatan dari 93,28 persen (2020) menjadi 95,13 persen (2021), namun kembali menurun menjadi 88,71 persen (2024). Hal serupa terjadi pada SMA/SMK/MA/Paket C, di mana APK menurun dari 79,94 persen (2020) menjadi 82,17 persen (2024), setelah mengalami fluktuasi. Penurunan APK di semua jenjang menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan, terutama di tingkat

menengah, perlu diperkuat agar dapat menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk kelompok usia non-ideal.

Selanjutnya APM yang merupakan salah satu indikator pendorong pada aspek pendidikan juga mengalami fluktuasi. APM untuk jenjang SD/MI/Paket A relatif stabil dan tinggi, dengan angka di atas 96 persen selama lima tahun terakhir, mencerminkan ketercapaian yang baik dalam memastikan anak usia sekolah dasar mendapatkan akses pendidikan sesuai usianya. Namun, APM untuk jenjang SMP/MTs/Paket B terus menurun dari 85,06 persen (2020) menjadi 81,37 persen (2024). Penurunan yang lebih tajam terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C, dari 60,03 persen (2020) menjadi hanya 61,08 persen (2024) meskipun sempat meningkat pada tahun 2023 (66,18 persen). Partisipasi murni di tingkat pendidikan menengah masih menjadi tantangan, terutama karena masih rendahnya angka untuk kelompok usia ideal, yang dapat disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, geografis, atau motivasi belajar.

Selain APK dan APM, indikator selanjutnya yakni APS. Semakin tinggi APS suatu darah maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di daerah tersebut. APS untuk jenjang SD/MI/Paket A stabil di atas 96 persen, mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia 7–12 tahun masih mengenyam pendidikan. Untuk jenjang SMP/MTs/Paket B, APS sedikit meningkat dari 96,43 persen (2020) menjadi 96,74 persen (2024), menunjukkan partisipasi yang cukup baik. Namun, APS untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkan peningkatan yang tidak konsisten, dengan angka tertinggi pada 2023 (75,16 persen), lalu kembali menurun menjadi 69,82 persen pada 2024. Walaupun partisipasi di tingkat pendidikan dasar cukup baik, partisipasi di tingkat pendidikan menengah atas masih perlu ditingkatkan, mengingat pentingnya jenjang ini sebagai

fondasi untuk memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi. Kondisi fluktuatif dikarenakan masih terdapat beberapa penduduk usia sekolah jenjang SD, SMP dan SMA yang bersekolah di sekolah keagamaan atau pesantren, sehingga hal ini memengaruhi kondisi APS jenjang SD, SMP dan SMA di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.29. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin

Jenjang Pendidikan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	18,24	18,42	16,02	16,29	15,87	15,87	15,31
SMP/MTs	16,53	15,07	14,47	14,76	13,24	13,66	14,64
SMA/MA	17,17	17,51	16,51	16,69	13,44	13,03	14,18

Sumber: Kemendikbud, Neraca Pendidikan 2018-2024 (diolah)

Secara umum, data menunjukkan tren penurunan rasio murid per guru di semua jenjang pendidikan selama periode 2018–2024. Penurunan ini merupakan indikator positif karena mengarah pada peningkatan kapasitas pelayanan pendidikan, di mana jumlah guru per siswa semakin ideal. Misalnya, di jenjang SD/MI, rasio menurun dari 18,42 pada 2019 menjadi 15,87 pada 2023. Artinya, setiap guru kini mengajar lebih sedikit murid dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang secara teoritis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Jika dibandingkan antarjenjang, SMP/MTs mencatat penurunan rasio paling signifikan, dari 16,53 di tahun 2018 menjadi 13,24 di 2022 dan naik ke 14,64 pada 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah atau lembaga terkait kemungkinan telah menambah tenaga pengajar secara konsisten di tingkat menengah pertama. Namun, kenaikan

pada tahun 2024 bisa menjadi peringatan bahwa pertumbuhan jumlah murid perlu diimbangi kembali dengan rekrutmen guru baru.

Jenjang SMA/MA menunjukkan pola yang relatif stabil dari 2018 hingga 2021 (sekitar 16–17 murid per guru), namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 dan 2023, yaitu ke 13,44 dan 13,03. Penurunan tajam ini bisa mengindikasikan peningkatan jumlah guru yang cukup besar atau pengurangan jumlah siswa, misalnya akibat lulusan SMP yang tidak melanjutkan atau migrasi penduduk. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut apakah penyebab utamanya adalah kebijakan pengangkatan guru baru atau faktor demografis.

Rasio murid per guru yang lebih rendah pada umumnya dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas interaksi belajar-mengajar. Dengan lebih sedikit siswa per guru, proses pembelajaran menjadi lebih personal, dan guru dapat memberikan perhatian lebih kepada setiap murid. Penurunan rasio ini juga bisa menunjukkan keberhasilan program rekrutmen guru atau perencanaan distribusi guru yang lebih merata antarwilayah.

2) Urusan Kesehatan

Kesehatan sebagai salah satu aspek kesejahteraan diakui oleh Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) sebagai hak setiap orang untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan mencakup keadaan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan kehidupan yang produktif dan ekonomis. Kesehatan sangat terkait dengan aktivitas manusia, dimana kualitas kegiatan dapat ditingkatkan melalui kondisi kesehatan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan target pembangunan nasional bidang

kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2025**,** Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen memperkuat pembinaan dan pengawasan teknis terhadap urusan wajib pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan. Arah kebijakan ini selaras dengan agenda nasional untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator urusan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung membaik. Data capaian tahun 2019–2023 serta penambahan capaian tahun 2024 memberikan gambaran yang lebih komprehensif untuk melihat efektivitas program dan intervensi yang telah dijalankan.

Tabel 2.30. Pelayanan Umum Urusan Kesehatan

Tahun	AHH (tahun)	Imunisasi Dasar (%)	Persalinan oleh Nakes (%)	Stunting (%)	Kepesertaan JKN (%)
2019	69,8	82,4	88,1	23,04	75,2
2020	70,1	84,2	89,3	23,00	77,8
2021	70,4	85,0	90,2	NA	80,5
2022	70,7	86,7	91,0	17,7	82,9
2023	71,0	88,5	92,5	16,5	85,4
2024	**71,3**	**89,8**	**93,4**	**14,8**	**87,1**

Sumber: Badan Pusat Statistik Musi Banyuasin 2024

Data 2019–2024 menunjukkan tren perbaikan yang konsisten di berbagai indikator kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 69,8 tahun menjadi 71,3 tahun, mencerminkan membaiknya kualitas layanan kesehatan dan penurunan angka kematian. Cakupan imunisasi dasar juga naik dari 82,4% ke 89,8%, menandakan semakin luasnya jangkauan program kesehatan sedangkan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat dari 88,1% ke 93,4%, memperlihatkan akses yang lebih baik

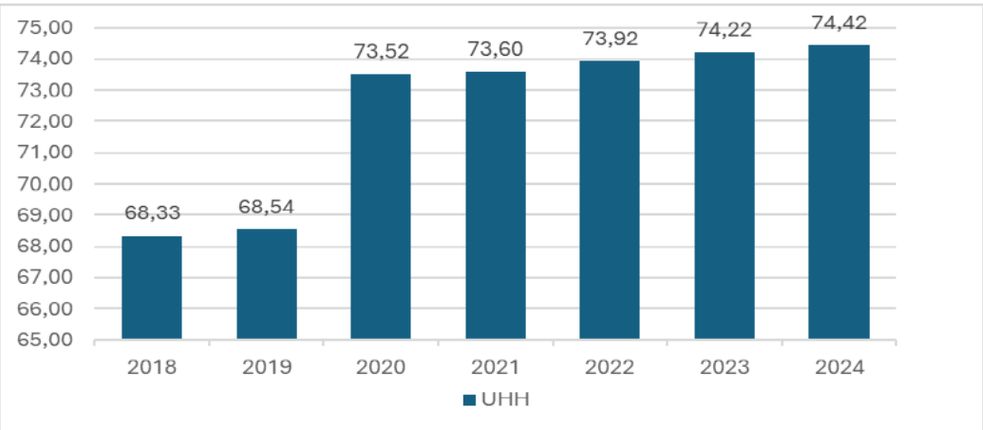
terhadap layanan persalinan aman. Indikator stunting menunjukkan penurunan signifikan dari 27,5% menjadi 20,7%, bukti efektivitas program gizi dan kesehatan ibu-anak meskipun target nasional belum sepenuhnya tercapai. Sementara itu, kepesertaan JKN terus naik hingga 87,1%, menandakan perlindungan kesehatan masyarakat semakin meluas. Dari tren lima tahun terakhir memperlihatkan perbaikan yang positif di semua aspek, meski masih diperlukan penguatan program untuk mempercepat pencapaian target nasional, khususnya penurunan stunting dan perluasan kepesertaan JKN menuju cakupan semesta. Dimana menurut beberapa indikator nasional dalam Permendagri No. 2 Tahun 2025 seperti sanitasi aman sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pengurangan buang air besar sembarangan (BABS), dan pengolahan sampah, masih menjadi pekerjaan rumah di banyak desa di Muba. Akses sanitasi masih minim, terutama di wilayah pedalaman dan kawasan transmigrasi lama. Perilaku BABS masih terjadi karena kurangnya fasilitas dan edukasi, untuk mencapai target nasional 3% BABS, perlu sinergi antara program sanitasi berbasis masyarakat.

Sehingga diperlukan intervensi langsung dalam bentuk pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis komunitas serta program edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dengan target nasional 12,5% rumah tangga dengan sanitasi aman masih jauh dari capaian di banyak wilayah Muba. Sementara itu, sistem pengelolaan sampah belum menyentuh akar permasalahan di tingkat rumah tangga, dengan target nasional 24% sampah terolah menuntut Muba untuk berinvestasi dalam infrastruktur pengolahan sampah.

Indeks komposit dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya terkait dengan derajat kesehatan masyarakat, yakni Umur

Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata tahun yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang selama hidupnya, semakin tinggi UHH, semakin rendah angka kematian. UHH juga menjadi indikator derajat kesehatan penduduk serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan, memenuhi kecukupan gizi, kalori, dan menjaga kesehatan lingkungan. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi capaian UHH, maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.

Sepanjang tahun 2018 hingga 2024, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin semakin baik. UHH Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 mencapai 68,33 tahun dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2024 mencapai 74,42.



Gambar 2.39. Persentase Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024

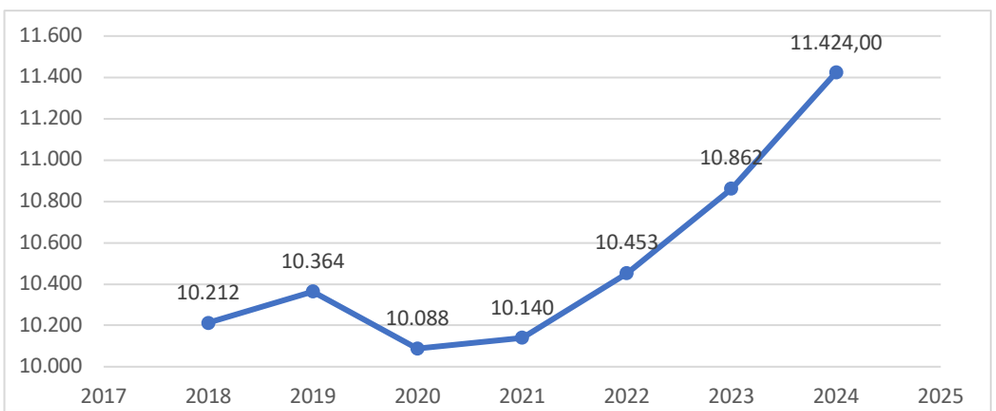
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumsel 2024. BPS

Faktor dominan yang mempengaruhi Usia Harapan Hidup adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama, diantaranya pola makan, penyakit bawaan dari lahir/penyakit degeneratif, lingkungan tempat tinggal, dan stress atau tekanan. Sementara, faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi dan berhubungan dengan Usia Harapan Hidup, antara lain kebiasaan merokok, status gizi, menopause, dan osteoporosis.

a. Dimensi Hidup yang Layak

Salah satu faktor penentu dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah kapasitas daya beli yang dimiliki oleh penduduk. Kenaikan dalam kapasitas daya beli dapat meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan hal ini umumnya dipicu oleh peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, besarnya konsumsi atau pengeluaran penduduk menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan mereka.

Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh semua anggota rumah tangga dalam suatu bulan, termasuk pembelian, pemberian, dan produksi sendiri, dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga.



Gambar 2.40. Angka Pengeluaran Per Kapita Kab. Musi Banyuasin Tahun 2018-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Pada periode awal, dari 2018 ke 2019, terjadi peningkatan nilai. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, mencapai titik terendah sepanjang periode pengamatan. Tahun 2021 menunjukkan sedikit peningkatan, menandai awal pemulihan. Selanjutnya, grafik menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan cukup tajam dari tahun 2022 hingga mencapai puncaknya di tahun 2024. Nilai pada 2024 berada di atas 11.400, menunjukkan pertumbuhan yang pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis ini menunjukkan bahwa setelah mengalami penurunan sekitar tahun 2020 kemungkinan akibat dampak pandemi atau faktor eksternal lainnya indikator yang diwakili oleh grafik menunjukkan pemulihan dan bahkan pertumbuhan pesat. Jika ini adalah grafik terkait ekonomi, seperti pengeluaran per kapita atau pendapatan regional, maka data tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat dan optimis dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.31. Persentase Pengeluaran Non-Makanan

Pengeluaran (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	52,63	55,12	50,52	52,25	54,76	54,21	53,80
Non-makanan	47,37	44,88	49,48	47,75	45,24	45,79	46,20

Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Data dari pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018–2024 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi antara pengeluaran makanan dan non-makanan. Secara umum, pengeluaran makanan masih mendominasi, dengan proporsi di atas 50% setiap tahunnya. Pada tahun 2024, proporsi pengeluaran makanan tercatat

53,80%, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, pengeluaran non-makanan yang sempat menurun pada 2019 dan 2022 menunjukkan tren naik kembali pada 2024 menjadi 46,20%. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan rumah tangga untuk pos non-makanan, seperti pendidikan, transportasi, perumahan, dan layanan kesehatan, yang semakin penting dalam menopang kualitas hidup.

Dengan pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebutuhan pangan tetap menjadi prioritas utama, terdapat pergeseran kecil ke arah peningkatan pengeluaran non-makanan. Pergeseran ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan, karena rumah tangga mulai mampu mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan di luar pangan yang sifatnya mendukung peningkatan kualitas hidup jangka panjang.

Selain itu, pemenuhan kehidupan yang layak juga perlu dilengkapi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan di suatu wilayah yang pada konteks ini adalah dokter. Terpenuhinya jumlah dokter untuk melayani masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan dampak yang baik bagi pembangunan kesehatan daerah terutama pada tingkat kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2024, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 3.114 orang yang terdiri dari 22 dokter gigi, 182 dokter umum/spesialis, 978 perawat, 873 bidan, 130 tenaga keafirmasian, 48 tenaga kesehatan masyarakat, 69 tenaga kesehatan lingkungan, 70 tenaga gizi, dan 93 ahli teknologi laboratorium medik. Menurut *World Health Organization,* rasio ideal tenaga kesehatan dokter dalam melayani yakni

1:2500 penduduk. artinya, setiap satu tenaga kesehatan dapat melayani sebanyak 2.500 penduduk. berdasarkan target rasio tenaga kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022, rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk adalah 1:1000. Adapun Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 mempunyai rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk 1:4.049. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 736.897 orang, maka idealnya Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 737 dokter.

Dengan demikian, peningkatan kualitas mutu dan akses pelayanan kesehatan anak, ibu, anak usia produktif dan lansia menjadi aspek penting. Pembangunan pada sektor kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin terkhusus pada akses pelayanan sudah cukup baik, namun demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan sehingga berdampak pada membaiknya pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan tren demografi yang berjalan maksimal.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin saat ini sedang meningkatkan beberapa ruas jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur daerah. Peningkatan infrastruktur ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menargetkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap, aman, dan nyaman guna mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan di seluruh bidang kebinamargaan secara terencana, berkesinambungan, dan berbasis kinerja.

Selain fokus pada pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten, pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, termasuk rehabilitasi jalan antar desa dalam satu kecamatan.

Selain itu, peningkatan jalan juga difokuskan sebagai pendukung kawasan industri, guna memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan ini, diharapkan dapat tercipta konektivitas dan hubungan yang lebih baik antarwilayah, meningkatkan efisiensi transportasi, serta membuka peluang investasi yang lebih luas bagi Kabupaten Musi Banyuasin Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik (%)	54,33	49,88	56,72	57,88	72,29	66,64	59,37	63,25
2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	70,00	78,30	81,23	80	81,26	81,83	82,45	83,10

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa secara umum kualitas infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah. Hal ini terlihat dari proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Musi

Banyuasin tahun 2017-2024 masih rendah dan mengalami tren naik-turun. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Musi Banyuasin fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2024 ini dipengaruhi berbagai oleh faktor geografis yang mana terdapat beberapa kawasan yang memang rawan banjir dan bencana lainnya yang menyebabkan rusaknya jalan. Selain itu juga proporsi jalan dalam kondisi baik yang belum 100 persen tersebut juga disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi berupa lalu lintas hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan sehingga sering menimbulkan kemacetan dan kabut asap tebal. Sementara, dalam periode tersebut memang terdapat beberapa persen peningkatan kualitas jalan pada tahun 2021 yang didorong oleh adanya program pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang secara langsung meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik.

Kemudian, rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin juga disebabkan oleh rendahnya kinerja urusan pekerjaan umum dalam menjamin sanitasi di masyarakat. Meski demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2024 mengalami trend meningkat, dengan nilai sebesar 1,97 persen per tahun. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan kuantitas masyarakat yang terpenuhi sanitasinya namun jumlah ini masih tergolong belum tinggi karena capaiannya masih di bawah 100 persen sesuai standar dari WHO. Selain itu, rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin juga terlihat dari jumlah panjang jalan yang ada belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang sangat mumpuni untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lancar. Kondisi jalan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.33. Kondisi Jalan di Kabupaten Musi Banyuasin 2019-2024

Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	387,83	495,39	483,02	521,20	570,60	659,23
Sedang	177,73	126,12	338,19	175,49	175,49	109,44
Rusak	264,20	115,80	221,64	224,13	244,13	41,34
Rusak Berat	244,01	339,37	75,92	266,56	266,56	446,77
Total Jalan	1.073,77	1.076,68	1.073,77	1.260,68	1.256,78	1,246,78

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa kualitas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin belum baik dan merata. Hal ini terlihat dari penurunan kualitas yang terjadi meski panjang jalan terus meningkat. Dari hal ini dapat disimpulkan juga bahwa pihak terkait belum melakukan pengelolaan dan pemeliharaan jalan secara optimal. Padahal, kualitas jalan yang buruk dapat mempengaruhi keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi pengguna jalan serta memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun capaian akses sanitasi selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34. Peningkatan cakupan Akses layanan Air limbah domestik 5 tahun terakhir

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting tahun 2019 (%)	Cakupan layanan eksisting tahun 2024 (%)
Wilayah Perkotaan			
1	**Akses Aman**	**0,34%**	**0,17%**
2	**Akses Layak**		**15,56%**
a	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	4,40%	15,26%

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting tahun 2019 (%)	Cakupan layanan eksisting tahun 2024 (%)
b	Akses Layak Bersama	0,10%	0,13%
3	Akses Belum Layak*	3,20%	0,52%
4	BABS Tertutup		
5	BABS di Tempat Terbuka	7,90%	0,00%
Wilayah Perdesaan			
1	**Akses Aman**	**0,72%**	**0,56%**
2	**Akses Layak**		**83,80%**
a	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	38,90%	72,24%
b	Akses Layak Bersama	0,84%	3,46%
c	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	24,00%	7,55%
3	**Akses Belum Layak***	**1,60%**	**0,11%**
4	**BABS Tertutup**		
5	**BABS di Tempat Terbuka**	**18,00%**	**0,00%**
Total		**100,00%**	**100,00%**

Sumber: Ranperbup RISPAM Kab Muba Tahun 2025-2045

Dari tabel diatas dapat dilihat cakupan akses aman air limbah domestic masih sangat rendah baru mencapai 0,73% (0,17% diperkotaan dan 0,56 diperdesaan) masih sangat jauh terhadap target Target RPJMN 2020-2024 akses aman yaitu 15%, Akses Layak 99,36% (15,56% diperkotaan dan 83,80 diperdesaan), Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 87,50% akses Layak Bersama 3,59 (0,13% diperkotaan dan 3,46 diperdesaan), Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk) sebesar 7,55%, Akses Belum Layak sebesar 0,64% (0,52% diperkotaan dan 0,11 diperdesaan), BABS Tertutup sudah 0% dan BABS di Tempat Terbuka sudah 0%.

Tabel 2.35. Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah

No.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk Lembaga	Bidang yang dikelola	Cakupan Wilayah (Desa)	Kecamatan	Sumber dana Operasional	Status/ Keterangan
1	Bidang Sanitasi	Sarana Bersama	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Air Putih Ulu	Plakat Tinggi	Iuran Warga	Aktif
2	Bidang Sanitasi	Mergo Rekoso	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Bukit Indah	Plakat Tinggi	Iuran Warga	Aktif
3	Bidang Sanitasi	Sarana Abadi II	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Dawas	Keluang	Iuran Warga	Aktif
4	Bidang Sanitasi	Redigas	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Karang Sari	Lalan	Iuran Warga	Aktif
5	Bidang Sanitasi	Kasmaran Bangkit	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Kasmaran	Babat Toman	Iuran Warga	Aktif
6	Bidang Sanitasi	Lais Berjaya	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Lais	Lais	Iuran Warga	Aktif
7	Bidang Sanitasi	Bina Mitra	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Mekar Jaya	Bayung Lencir	Iuran Warga	Aktif
8	Bidang Sanitasi	Sari Mulya	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Mulya Agung	Lalan	Iuran Warga	Aktif
9	Bidang Sanitasi	Maju Bersama	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Pinang Banjar	Sungai Lilin	Iuran Warga	Aktif
10	Bidang Sanitasi	Maju Bersama	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Sari Agung	Lalan	Iuran Warga	Aktif
11	Bidang Sanitasi	Tirta Rahayu	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Sido Rahayu	Plakat Tinggi	Iuran Warga	Aktif
12	Bidang Sanitasi	Bersama Bangun Desa	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Sinar Tungkal	Tungkal Jaya	Iuran Warga	Aktif
13	Bidang Sanitasi	Loka Karya	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Suka Damai Baru	Sungai Lilin	Iuran Warga	Aktif
14	Bidang Sanitasi	Sarana Bersih	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Supat Barat	Babat Supat	Iuran Warga	Aktif
15	Bidang Sanitasi	Sehat Sejahtera	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Warga Mulya	Plakat Tinggi	Iuran Warga	Aktif
16	Bidang Sanitasi	Maju Berjaya	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Agung Jaya	Lalan	Iuran Warga	Aktif

No.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk Lembaga	Bidang yang dikelola	Cakupan Wilayah (Desa)	Kecamatan	Sumber dana Operasional	Status/ Keterangan
17	Bidang Sanitasi	Kamila	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Bailangu Timur	Sekayu	Iuran Warga	Aktif
18	Bidang Sanitasi	Harapan Baru	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Bangun Harja	Plakat Tinggi	Iuran Warga	Aktif
19	Bidang Sanitasi	Sehat Bersama	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Bukit Pangkuasan	Batang Hari Leko	Iuran Warga	Aktif
20	Bidang Sanitasi	Sarana Abadi	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Dawas	Keluang	Iuran Warga	Aktif
21	Bidang Sanitasi	Elbar	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Epil Barat	Lais	Iuran Warga	Aktif
22	Bidang Sanitasi	Naga Saung	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Epil	Lais	Iuran Warga	Aktif
23	Bidang Sanitasi	Harapan Sejahtera	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Jud II	Sanga Desa	Iuran Warga	Aktif
24	Bidang Sanitasi	Karang Anyar Maju	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Karang Anyar	Lawang Wetan	Iuran Warga	Aktif
25	Bidang Sanitasi	Mandala Jaya	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Mandala Sari	Lalan	Iuran Warga	Aktif
26	Bidang Sanitasi	Mandiri Jaya	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Mendis Jaya	Bayung Lencir	Iuran Warga	Aktif
27	Bidang Sanitasi	Karya Mandiri	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Mendis	Bayung Lencir	Iuran Warga	Aktif
28	Bidang Sanitasi	Anugrah Rawa	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Muara Teladan	Sekayu	Iuran Warga	Aktif
29	Bidang Sanitasi	Pinggap Jaya	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Pinggap	Batang Hari Leko	Iuran Warga	Aktif
30	Bidang Sanitasi	Wijaya Kesuma	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Rantau Panjang	Lawang Wetan	Iuran Warga	Aktif
31	Bidang Sanitasi	Sukses Abadi	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Sindang Marga	Bayung Lencir	Iuran Warga	Aktif
32	Bidang Sanitasi	Maju Bersama	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Sri Gading	Lalan	Iuran Warga	Aktif
33	Bidang Sanitasi	Berkah	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Sugi Raya	Babat Toman	Iuran Warga	Aktif
34	Bidang Sanitasi	Harapan Mandiri	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Suka Jadi	Lalan	Iuran Warga	Aktif

No.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk Lembaga	Bidang yang dikelola	Cakupan Wilayah (Desa)	Kecamatan	Sumber dana Operasional	Status/ Keterangan
35	Bidang Sanitasi	Tanjung Bali Smart	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Tanjung Bali	Batang Hari Leko	Iuran Warga	Aktif
36	Bidang Sanitasi	Tanjung Durian Sejahtera	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Tanjung Durian	Lawang Wetan	Iuran Warga	Aktif
37	Bidang Sanitasi	Maju Bersama	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Tanjung Keputran	Plakat Tinggi	Iuran Warga	Aktif
38	Bidang Sanitasi	Cendana Grub	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Telang	Bayung Lencir	Iuran Warga	Aktif
39	Bidang Sanitasi	Tanampo Sakti Sehat	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Teluk Kijing II	Lais	Iuran Warga	Aktif
40	Bidang Sanitasi	Teluk Kijing I Jaya	KSM	Perawatan dan Pemeliharaan	Teluk Kijing 1	Lais	Iuran Warga	Aktif

Sumber: Ranperbup RISPAM Kab Muba Tahun 2025-2045

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah tinja, pemerintah melalui program SANIMAS melakukan pendampingan terhadap masyarakat di wilayah padat, kumuh dan miskin, dalam pembangunan instalasi pengelolaan air limbah yang paling dimungkinkan adalah pembangunan SPALD skala Individu, hal ini dikarenakan topografi wilayah permukiman di Musi Banyuasin sebagian besar elevasinya permukimannya rendah dan cenderung datar

Tabel 2.36. Peningkatan cakupan Akses layanan Sampah Perkotaan 5 tahun terakhir

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%) tahun 2019	Cakupan layanan eksisting (%) tahun 2024
Wilayah Perkotaan			
1	Pengurangan Sampah	0,50%	0,56%
2	Penanganan Sampah	41,40%	30,19%
3	Sampah Tidak Terkelola	58,10%	69,25%
Total		100,00%	100,00%

Sumber: Ranperbup RISPAM Kab Muba Tahun 2025-2045

b. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang harus berdasarkan pada karakteristik, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai. Penataan ruang juga harus mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara umum, Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun sebuah dokumen Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah yang ditetapkan. Sehingga diketahui bahwa pada tahun 2021, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 1.320.332 Ha. Sedangkan luas wilayah perkotaan adalah sebesar 32.517,39 Ha dari keseluruhan kawasan. Selain itu, capaian pada urusan penataan ruang ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.37. Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keberadaan Perda RTRW	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	6	1	5	6
3.	Luas Wilayah Produktif	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68%	68%	68%
4.	Luas Wilayah Perkotaan	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3%	1,3%	1,3%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin

Analisis permasalahan penataan ruang di Kabupaten Musi Banyuasin mengindikasikan beberapa masalah utama. Salah satunya adalah rendahnya penataan ruang yang disebabkan oleh luas lahan produktif yang

belum dikelola secara optimal. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 68 persen dari luas wilayah produktif yang telah dikelola, sementara sisanya belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya ruang untuk pengembangan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Masalah lain yang menyebabkan rendahnya penataan ruang adalah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Meskipun terdapat peraturan dan dokumen RTRW yang ada, namun di lapangan masih sering terjadi konflik pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan. Sebagai contoh, pada bulan November 2023 dilaporkan terjadi konflik lahan dan alih fungsi lahan di Kecamatan Bayung Lencir dengan luas mencapai 7.250 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan RTRW masih belum optimal.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk hidup masyarakat. Sehingga kinerja dari urusan ini dijabarkan melalui beberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi, rumah layak huni dan rumah tangga pengguna listrik. Selain itu, urusan ini juga memiliki tugas untuk menciptakan kawasan permukiman yang mumpuni sesuai standar yang ditetapkan WHO.

Secara umum, kualitas perumahan rakyat dan permukiman di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah. Hal ini tercermin dari data pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa masih terdapat 389,94 Ha permukiman kumuh di Kabupaten Musi Banyuasin dan kawasan-kawasan

kumuh tersebut juga berada pada lokasi rawan longsor. Data dari urusan perumahan dan permukiman dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.38. Capaian Indikator Kinerja Utama Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah tangga pengguna air bersih	63,46	65,47	59,91	67,93	87,51	90,33	92,337	94,95
2	Rumah tinggal bersanitasi	57,65	58,75	73,14	83,83	81,26	81,83	82,45	83,67
3.	Rumah layak huni	84	84,32	84,39	84,45	84,37	88,16	8,52	13,52
4.	Rumah tangga pengguna listrik	95,78	98,3	98,9	98,55	98,55	N/A	164,753	99,92

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Muba, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa rendahnya kualitas permukiman di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh beberapa hal. Pertama yakni belum berhasilnya pemerintah dalam menjamin air bersih masyarakat. Hal ini terlihat dari indikator rumah tangga pengguna air bersih hanya mencapai 94,96 persen pada tahun 2024, padahal standar nasional adalah 100 persen. Selain itu, nilai indikator persentase rumah tinggal bersanitasi hanya mencapai 83,67 persen pada tahun 2024, padahal standar nasional juga adalah 100 persen.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kualitas pengelolaan air dan air limbah di Kabupaten Musi Banyuasin juga belum berjalan dengan baik selama periode tersebut.. Masih banyak air limbah yang mencemari lingkungan, seperti sungai, tanah, dan udara. Hal ini juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, karena meningkatkan risiko penularan penyakit dan menurunkan kualitas hidup.

Kemudian, rendahnya kualitas permukiman rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin juga disebabkan oleh cakupan listrik yang belum mencapai 100 persen. Hal ini dapat mengganggu aktivitas dan kebutuhan masyarakat, seperti penerangan, komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam melihat kualitas permukiman yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin secara lebih jelas dapat diukur melalui bagaimana kinerja pemerintah dalam mengurangi kawasan kumuh yang ada di daerah. Secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengurangi kawasan kumuh dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.39. Kawasan Kumuh di Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh Menurut SK	Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh	Sisa Luas Kawasan Kumuh
Babat Toman	Kelurahan Babat	7,31	0,2424	7,0676
	Kelurahan Mangun Jaya	7,56	3,7556	3,8044
Sekayu	Desa Bailangu Timur	5,99	0,0252	5,9648
	Kelurahan Balai Agung	8,08	0,6208	7,4592
	Kelurahan Kayuara	9,27	0,1312	9,1388
	Kelurahan Serasan Jaya	9,25	0,0216	9,2284
Bayung Lencir	Kelurahan Bayung Lencir Indah	5,29	0,0516	5,2384
Batang Hari Leko	Desa Talang Leban	5,40	0,0252	5,3748
	Desa Saud	3,28	0,1507	3,1293
Keluang	Desa Tanjung Dalam	7,84	0,024	7,816

Sumber: Satu Data Musi Banyuasin, 2024

Berdasarkan data tersebut maka dapat dipahami rendahnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin juga dipengaruhi oleh masih berkembangnya beberapa kawasan kumuh di 10 desa. Sehingga, diperlukan adanya perubahan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu kewajiban pemerintah yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayahnya. Pemenuhan rasa aman bagi masyarakat dapat dipahami sebagai kebutuhan masyarakat untuk terhindar dari segala bentuk kerawanan dan masalah sosial seperti penyakit sosial dan bencana alam. Urusan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 Ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwasanya bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dikategorikan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat, dibutuhkan kerja sama yang harmonis dari Satpol PP, Kesbangpol, Kepolisian Daerah, dan perangkat daerah lainnya. Tabel berikut menyajikan informasi capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017 hingga 2024.

.

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kriminalitas	1054	1045	803	716	754	875	919	NA
2.	Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang telah diselesaikan	82	57	48	84	951	41	NA	NA
3.	Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	4	1	1	3	15	15	3
5.	Tingkat Penyelesaian konflik sosial masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase/angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada (%)	60,12	63,67	82	75	82	82	82	80,03
7.	Angka Penurunan Kasus Konflik Sosial	52,85	100	100	100	100	100	12	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa keamanan dan ketertiban di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah meskipun capaian penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelesaian konflik telah mencapai 100%. Salah satu masalah utamanya adalah tingginya angka kriminalitas. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan keamanan masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat capaian dalam penegakan hukum, tetapi masih terdapat tantangan yang signifikan dalam menjaga keamanan publik, yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

Masalah lainnya adalah tingginya jumlah kasus pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang masih terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022, namun angka kasus pelanggaran K3 yang mencapai 951 kasus pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang perlu ditangani. Dampak dari hal ini adalah menurunnya kualitas lingkungan kerja, meningkatnya risiko kecelakaan kerja, dan berpotensi merugikan kesejahteraan pekerja serta produktivitas usaha.

Selain itu, meskipun terdapat penegakan Perda yang telah mencapai 100%, namun masih terjadi kasus pelanggaran K3 yang menunjukkan bahwa penegakan hukum dan penertiban masih belum optimal. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya jumlah kegiatan pembinaan politik daerah yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur tata kelola dan tata tertib, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum dan penertiban serta upaya pencegahan pelanggaran agar dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6) Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif

Dengan regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif di Kabupaten Musi Banyuasin melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dinamis, dan profesional**.** Regulasi ini lahir sebagai bagian dari agenda penyederhanaan birokrasi **y**ang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi,

penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dinamika global.

Merupakan salah satu wujud integritas dalam tata kelola yang terwujud pada prinsip mekanisme kerja yang diatur dalam Peraturan bupati ini, yaitu orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas**.** Pada prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa tata kelola daerah diarahkan tidak hanya pada pemenuhan prosedur administratif, melainkan juga pencapaian kinerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Penerapan regulasi ini juga tampak melalui penekanan pada penggunaan sistem kerja berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan efisien. Dengan digitalisasi layanan publik, akses masyarakat terhadap informasi semakin luas, sementara pengawasan terhadap kinerja ASN dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Dengan regulasi ini, Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan adaptif. Ke depan, implementasi ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas birokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi modal penting dalam menarik investasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

7) Urusan Sosial

Berkaitan dengan urusan sosial, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menekankan pada pemenuhan pelayanan sosial yang baik dan merata pada setiap warga di suatu daerah,

yang didukung arahan Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 memberikan kerangka strategis yang memandu Musi Banyuasin untuk menyusun dan mengawasi program perlindungan sosial. Hal ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga supaya terjamin dalam segala aspek, baik jaminan sosial, inisiatif dalam meningkatkan kualitas SDM, perlindungan sosial dengan menerapkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta rehabilitasi sosial sebagai tindakan individu yang mengalami disfungsi sosial. Upaya menunjang pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan serta peningkatan profesionalitas lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan yang familiar dengan sebutan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk menangani permasalahan pada konteks kesejahteraan sosial.

Selain PPKS, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga perlu mengkaji dan menggali sumber kesejahteraan sosial guna mendukung pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui sinergi, advokasi, dan memaksimalkan program-program sosial. Hal ini didukung dengan data persentase PMKS Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 sebesar 32 persen, dan mengalami fluktuasi hingga tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus terus meningkatkan segala aspek yang menunjang kesejahteraan sosial, baik dari jaminan sosial maupun rehabilitasi sosial tanpa mengesampingkan intervensi dari PMKS/PPKS.

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PMKS	232.998	130.161	340.178	199.435	167.127	157,606	48,716
2.	Jumlah PSKS	201	201	4369	4369	1304	1581	19.175
3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	32	48,62	71,41	72,34	69,03	99,60	78,00
4.	Persentase PMKS yang tertangani	32	48,62	71,41	72,34	69,03	99,60	78,00
5.	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	50	50	58	58	64	NA	NA
6.	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	14	18	18	18	20	NA	NA

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin

2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar

1) Tenaga Kerja

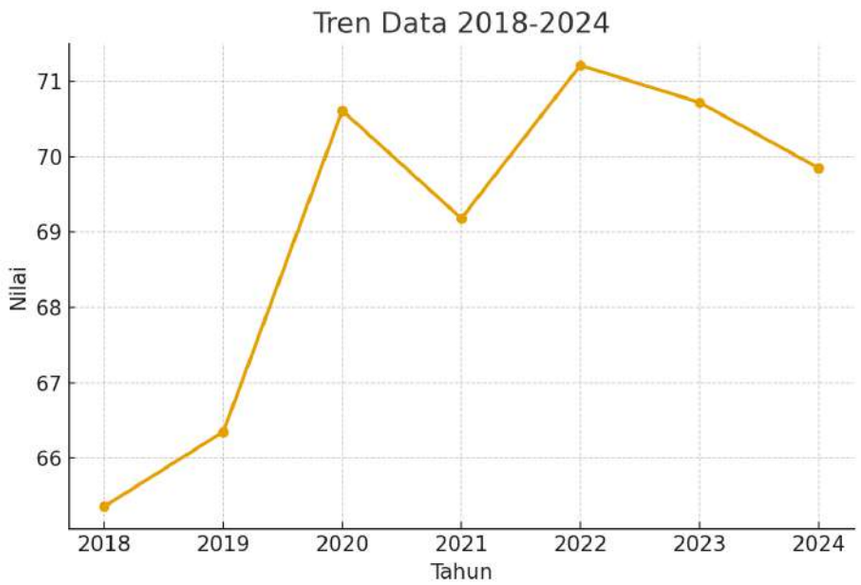
Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan yang baik akan mendukung keberhasilan perekonomian di setiap daerah sehingga berdampak lanjut bagi pembangunan daerah di berbagai aspek. Tenaga kerja yang berkualitas dapat memberikan dampak yang besar pada output yang dihasilkan. Pembangunan ketenagakerjaan menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkaitan erat dengan penciptaan kualitas SDM, terkhusus pada

aspek human capital. Dengan demikian, keberhasilan pada aspek ini akan mendukung pencapaian kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Oleh karena itu, data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Terdapat beberapa indikator dalam aspek ketenagakerjaan salah satunya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Partisipasi kerja menunjukkan jumlah angkatan kerja yang bekerja, dimana apabila data menunjukkan nilai yang rendah maka dapat diartikan bahwa lebih sedikit kesempatan kerja penduduk usia kerja di suatu daerah, begitupun sebaliknya. Indikator tersebut menekankan pada poin perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja di suatu daerah dengan penduduk usia kerja. Selain itu, indikator ini juga menunjukkan labor supply untuk menghasilkan atau memproduksi barang maupun jasa dalam perputaran perekonomian daerah, sehingga semakin tinggi nilai TPAK di suatu daerah, semakin besar daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa.

Sepanjang tahun 2018 hingga 2024, jumlah angkatan kerja di Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja mencapai 337.191 penduduk, mengalami peningkatan sebanyak 14.952 jiwa dibandingkan tahun 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Musi Banyuasin pada tahun 2024 mencapai 69,85 persen, yang menunjukkan bahwa sebanyak 69,85 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang berusia 15 tahun ke atas memilih untuk terlibat aktif di pasar kerja. Sementara itu, sisanya sebesar 30,15 persen memilih untuk fokus pada pendidikan, mengurus rumah tangga, atau terlibat dalam kegiatan di luar sektor ekonomi, seperti kaum lanjut usia.

Peningkatan Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ini disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2022. Sebagian besar masyarakat kini lebih berani mencari pekerjaan formal atau nonformal, serta memulai usaha baru. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana masyarakat masih memiliki ketakutan untuk keluar dan mencari pekerjaan akibat pandemi COVID-19.



Gambar 2.41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2018-2024

Selanjutnya, angka TPAK juga berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah. Pengangguran terbuka menunjukkan jumlah usia produktif yang tidak terserap di lapangan pekerjaan. Dengan demikian, data besaran jumlah pengangguran terbuka di suatu daerah dapat digunakan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan. Aspek dasar dalam poin ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran dari tenaga kerja. Besaran jumlah angkatan kerja yang tidak terserap disebabkan karena adanya gap antara kompetensi

dari pencari kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan atau pasar, sehingga hal ini menyebabkan pengangguran terbuka. Di sisi lain, keadaan menunggu bagi para pencari kerja yang baru dan mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja juga dapat dinyatakan pengangguran terbuka.



Gambar 2.42. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024

Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2024

Berdasarkan data, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 hingga 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 TPT berada di angka 3,29 persen, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4,40 persen, selanjutnya pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,58 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin masih tergolong cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang ada di daerah Kabupaten Musi Banyuasin belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyediaan jumlah lapangan kerja. Secara rinci, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.42. Ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tenaga Kerja yang Ditempatkan	320	146	191	805	928	967	679
2.	Tenaga Kerja Terdaftar Melalui Kartu Pencari Kerja	990	885	494	1980	708	462	462
3.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	32,23%	16,50%	38,66%	40,66%	76,29%	47,77%	68,04%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja, 2025

Permasalahan ketenagakerjaan tentu berdampak pada berbagai aspek lainnya, salah satunya kasus perselisihan antara buruh dengan pengusaha. Di Kabupaten Musi Banyuasin, masih terdapat beberapa kasus perselisihan antara buruh dengan perusahaan di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya laporan kasus perselisihan buruh dengan pengusaha setiap tahunnya. Terakhir di tahun 2024, terdapat 33 kasus perselisihan, 5 diantaranya diselesaikan melalui perjanjian bersama. Sisanya diselesaikan melalui surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, selama periode 2020 hingga 2024 dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, pandemi COVID-19, serta efektivitas kebijakan penempatan tenaga kerja daerah. Jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan meningkat secara signifikan menjadi 805 orang pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan sektor

ketenagakerjaan pasca pandemi, yang kemudian berlanjut dengan peningkatan penempatan menjadi 928 orang (2022) dan mencapai puncaknya di angka 967 orang (2023). Namun demikian, pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan menurun menjadi 679 orang, yang dapat mengindikasikan penurunan kesempatan kerja atau terbatasnya kanal penempatan.

Data menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja yang mendaftar melalui kartu pencari kerja mengalami lonjakan tajam pada tahun 2021 sebanyak 1.980 orang, meningkat hampir empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sangat mungkin dipicu oleh dampak pandemi terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga mendorong lebih banyak masyarakat untuk mendaftar secara resmi sebagai pencari kerja. Setelah itu, terjadi penurunan drastis dan stabilisasi pada angka 462 orang pada tahun 2023 dan 2024.

Efektivitas penempatan tenaga kerja dapat dilihat dari persentase tenaga kerja yang ditempatkan dibanding jumlah pencari kerja. Angka ini menunjukkan tren yang beragam. Persentase terendah terjadi pada tahun 2019 dengan 16,05, meningkat menjadi 38,66 persen pada 2020, 40,66 persen (2021), dan melonjak signifikan menjadi 76,29 persen pada 2022. Persentase ini sempat menurun ke 47,77 persen (2023), namun kembali meningkat menjadi 68,04 persen pada 2024. Kenaikan persentase ini mencerminkan peningkatan efisiensi penyaluran tenaga kerja yang terdaftar ke lapangan kerja, meskipun penurunan di tahun 2023 menunjukkan bahwa tantangan dalam mencocokkan *supply* dan *demand* tenaga kerja masih terjadi.

Tabel 2.43. Jumlah Kasus Buruh dengan Pengusaha di Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
2018	28 Kasus	2 Kasus
2019	24 Kasus	8 Kasus
2020	50 Kasus	10 Kasus
2021	38 Kasus	4 Kasus
2022	24 Kasus	6 Kasus
2023	26 Kasus	8 Kasus
2024	33 Kasus	5 Kasus

Sumber: Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, 2025

Berdasarkan data yang di dalam tabel, jumlah kasus mengalami fluktuasi pada tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, terdapat 28 kasus yang dilaporkan, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2019 dengan 24 kasus. Namun, pada 2020 terjadi lonjakan signifikan dengan 50 kasus, yang merupakan jumlah tertinggi dalam tahun tersebut. Setelah itu, jumlah kasus mulai menurun pada 2021 menjadi 38 kasus, dan terus menurun pada 2022 serta 2023 dengan masing-masing 24 dan 26 kasus. Namun pada tahun 2024, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 33 kasus.

Sementara itu, jumlah kasus yang dapat diselesaikan melalui perjanjian bersama juga mengalami variasi. Pada tahun 2018, hanya 2 kasus yang berhasil diselesaikan dengan cara ini. Angka ini meningkat pada 2019 menjadi 8 kasus, dan pada 2020 bertambah menjadi 10 kasus, sejalan dengan peningkatan jumlah kasus secara keseluruhan. Namun, pada 2021 jumlah penyelesaian menurun drastis menjadi 4 kasus, meskipun jumlah kasus yang dilaporkan masih cukup tinggi. Pada tahun 2022 dan 2023,

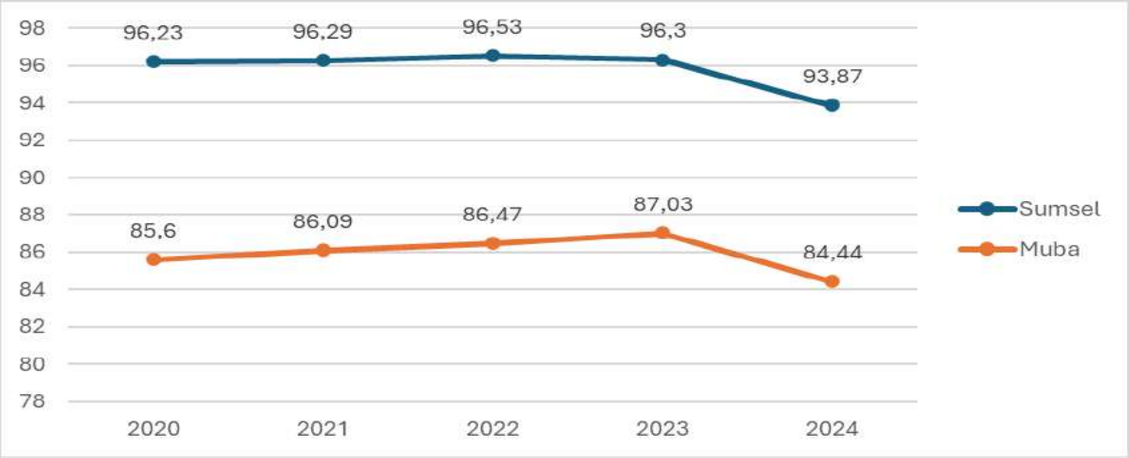
jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama kembali mengalami kenaikan dengan masing-masing 6 dan 8 kasus. Namun demikian, pada tahun 2024 meskipun jumlah kasus meningkat menjadi 33, hanya 5 kasus (15,15%) yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mencapai keadilan gender, meningkatkan peran perempuan di segala bidang kehidupan, meningkatkan status dari penduduk perempuan, dan memperkuat peran perempuan dalam mengambil keputusan. Adapun perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan dalam melindungi dan menjamin hak-hak anak untuk bertahan hidup, berkembang, tumbuh, dan dapat berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan perannya. Oleh sebab itu untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di suatu daerah telah terpenuhi, perlu mengukur ketercapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan dan menghitung perbedaan pencapaian laki-laki dan perempuan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPG dapat mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu daerah melalui berbagai indikator penunjang di dalamnya, seperti angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, serta perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, selama lima tahun terakhir capaian IPG Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fluktuasi dan masih berada di bawah angka IPG Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2020, IPG Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar 85,60, jauh di bawah IPG Provinsi Sumatera Selatan sebesar 96,23. Meskipun demikian,

Kabupaten Musi Banyuasin mencatat tren peningkatan selama tiga tahun berturut-turut : 86,09 (2021), 86,47 (2022), dan 87,03 (2023). Namun pada tahun 2024, IPG Kabupaten Musi Banyuasin justru mengalami penurunan cukup tajam menjadi 84,44.



Gambar 2.43. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: BPS, 2025

Masih rendahnya IPG di Kabupaten Musi Banyuasin dibandingkan capaian provinsi dan nasional disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, di antaranya faktor lingkungan sosial budaya yakni masih adanya kebiasaan masyarakat yang melekat dan sulit untuk dihilangkan. Selain itu, penyebab masih rendahnya IPG Musi Banyuasin juga dikarenakan masih adanya kasus kekerasan di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya aduan masyarakat terkait dengan perlindungan anak dari tindakan kekerasan serta terdapat kasus KDRT yang menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat menekan kasus KDRT dan aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan tindakan kekerasan.

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	20	30	32	35	36	47	47
2.	Rasio KDRT perempuan	0,076	0,007	0,0041	0,006	0,0067	0,010	0,017
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,11	73,01	60,06	59,84	60,35	61,78	65,65
4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	20	27	26	29	23	27	79
5.	Persentase kecamatan layak anak	26	33.33	40	54,34	60	66,66	73,33

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin, 2025

Aspek pemberdayaan perempuan dapat dipantau oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan. Diketahui bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun apabila dilihat berdasarkan gender, penduduk perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki. Indeks pembangunan gender (IPG) di Musi Banyuasin pada tahun 2024 tercatat sebesar 84,44, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut, meskipun datanya tidak memberikan angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara langsung. Angka ini diukur berdasarkan dimensi pembangunan manusia (IPM) namun

difokuskan pada perbandingan gender, dengan data terbaru dapat diakses melalui Situs Satu Data Musi Banyuasin.

3) Pangan

Pangan merupakan segala sesuatu yang bisa dimakan dan memberikan energi, nutrisi, serta zat gizi penting bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia, termasuk tumbuhan, hewan, dan hasil olahan. Sehingga, aspek pangan dianggap sebagai suatu kebutuhan pokok manusia. Pengadaan mencakup seluruh tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan suatu wilayah atau negara. Oleh sebab itu, pengukuran tingkat ketahanan pangan umumnya dilakukan melalui skor PPH yang mencerminkan kualitas gizi dan variasi pola konsumsi penduduk juga ketersediaan bahan pangan.

Ketersediaan pangan merupakan kondisi ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan. Dalam urusan pangan, Kabupaten Musi Banyuasin turut serta mendukung program Sumsel Lumbung Pangan. Dilihat dari produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat langsung pangan masyarakat, secara umum Kabupaten Musi Banyuasin sudah dapat memenuhi beberapa kebutuhan pangan sendiri. hal ini dapat dilihat dari neraca pangan berikut.

Tabel 2.45. Neraca Ketersediaan Pangan yang Diproduksi dan Dikonsumsi

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (gram/kap/hari)	Perhitungan Skor PPH							
			Energi (kkal/kap/hari)	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	295,9	1.160	54,2	55,2	0,5	27,1	27,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	49,1	59	2,8	2,8	0,5	1,4	1,4	2,5	1,4
3	Pangan hewani	163,1	317	14,8	15,1	2,0	29,6	30,2	24,0	24,0
4	Minyak & lemak	30,8	277	13,0	13,2	0,5	6,5	6,6	5,0	5,0

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (gram/kap/hari)	Perhitungan Skor PPH							
			Energi (kkal/kap/hari)	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
5	Buah/biji berminyak	1,6	9	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	1,0	0,2
6	Kacang-kacangan	19,5	55	2,6	2,6	2,0	5,1	5,2	10,0	5,2
7	Gula	22,8	83	3,9	4,0	0,5	1,9	2,0	2,5	2,0
8	Sayur & buah	310,5	137	6,4	6,5	5,0	32,1	32,7	30,0	30,0
9	Lain-lain	62,8	43	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			2.140,0	100,0	101,9	11,5	104,0	105,9	100,0	92,84

Sumber: Satudata.mubakab 2025

Skor PPH sebagai indikator terlengkap ketahanan pangan menunjukkan data yang cukup menarik. Pada skor PPH ketersediaan cenderung mengalami penurunan, namun untuk skor PPH konsumsi menunjukkan kecenderungan peningkatan. Turunnya skor PPH produksi berkaitan secara langsung dengan tingkat ketersediaan pangan yang semakin hari semakin berkurang (turun). namun demikian tingkat keamanan pangan yang ditunjukkan dengan tingkat desa mandiri pangan, masih menunjukkan peningkatan. Persentase desa mandiri pangan di Kabupaten Musi Banyuasin relatif rendah, berkebalikan dengan angka ketersediaan bahan pangan. Angka ini mengirimkan pesan bahwa secara makro Kabupaten Musi Banyuasin memang memiliki ketahanan pangan yang tinggi. Namun demikian, tingkat ketahanan pangan itu tidak merata di seluruh desa.

Meningkatnya skor PPH konsumsi menunjukkan kemampuan penduduk Musi Banyuasin yang lebih baik dalam mengelola diversifikasi makanan yang dikonsumsi. Hal ini berkaitan erat dengan semakin terbukanya wilayah, sehingga meningkatkan pengetahuan penduduk. Relatif bervariasinya konsumsi didukung oleh data pengeluaran per kapita yang semakin lama semakin meningkat.

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan	89,1	96,8	96,9	98,1	88,6	88,8	89,01	89,81
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan	83,5	85,4	86,9	88,0	88,5	90,7	92,9	92,8
3.	Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk (Ton/1000 Penduduk/Tahun)	234,22	371,28	209,5	312,2	281,9	198,35	-	-
4.	Angka konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/orang)	2004	2004,9	2011,6	2059,8	2086,2	2150	2154	2127
5.	Persentase desa mandiri pangan	31,36	33,47	15,86	23,45	23,45	24	4,35	0,41
6.	Persentase Pangan Aman diKonsumsi	80	85	76,8	84,23	96,7	98	90,84	94,57
7.	Jumlah pangan segar asal tumbuhan PSAT yang aman dikonsumsi	3	3	3	5	5	5	-	-
8.	Jumlah lumbung dan sarana prasarana yang dibangun (unit)	2	2	1	4	4	6	3	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

Skor PPH Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 untuk Tingkat Ketersediaan Pangan sebesar 89,81 meningkat dibandingkan skor PPH di tahun sebelumnya, dengan kontribusi energi total sebesar 2.205,04 kilokalori, atau 91,88% dari Angka Kecukupan Energi (AKE).

Tabel 2.47. Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Musi Banyuasin

Kelompok Bahan Pangan	Tahun 2024		
	Gram/Kap/Hari	Energi (kalori)	Skor PPH
Padi-padian	1249,89	52,08	25
Umbi-umbian	55,2	2,3	1,15
Pangan Hewani	392,74	16,36	24
Minyak dan Lemak	186,18	7,76	3,88
Buah/biji berminyak	21,71	0,9	0,45
Kacang-kacangan	64,2	2,68	5,35
Gula	101,35	4,22	2,11
Sayuran dan Buah	133,76	5,57	27,87
Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**2205,04**	**91,88**	**89,81**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan data konsumsi pangan tahun 2024, kontribusi energi terbesar berasal dari kelompok padi-padian, yaitu 1.249,89 kkal (52,08% AKE) dengan skor PPH 25. Ini menunjukkan pola konsumsi masyarakat masih sangat bertumpu pada beras sebagai pangan pokok. Meskipun mencukupi dari sisi energi, dominasi ini menandakan ketidakseimbangan dalam keragaman pangan. Untuk pangan hewani menyumbang 392,74 kkal (16,36% AKE) dengan skor PPH 24, mendekati nilai ideal. Ini merupakan capaian positif karena pangan hewani merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan.

Kebijakan pusat yang mendorong percepatan ketahanan energi perlu diimplementasikan secara responsif melalui peningkatan investasi, penguatan kapasitas teknis daerah, dan skema kemitraan publik-swasta yang adil. Sementara itu, ketahanan air dan irigasi menjadi persoalan krusial di wilayah Muba yang didominasi oleh lahan basah dan pasang surut. Meskipun memiliki cadangan air melimpah, belum seluruh masyarakat memiliki akses terhadap air minum aman maupun jaringan perpipaan yang memadai. Hal ini tercermin dari target nasional dalam Permendagri No. 2 Tahun 2025, yaitu minimal 28% akses air perpipaan dan 33% air minum aman. Di wilayah perdesaan Muba belum terpenuhi, irigasi untuk pertanian juga belum sepenuhnya modern dan berkelanjutan, terutama di wilayah transmigrasi lama yang bergantung pada pompa dan sistem irigasi pasang surut.

Di sektor pangan, Muba memiliki potensi menjadi pusat produksi pertanian untuk Sumatera Selatan, khususnya komoditas padi, jagung, dan hortikultura lahan rawa. Namun demikian, ketergantungan pada kondisi iklim, terbatasnya infrastruktur pertanian, serta lemahnya kelembagaan petani menjadi tantangan tersendiri. Kebijakan nasional yang menargetkan rehabilitasi 350.000 hektare irigasi dan pembangunan 50.000 hektare irigasi multikomoditas memberikan ruang bagi Muba untuk menyelaraskan RPJMD-nya dengan skema tersebut. Diperlukan perencanaan tata ruang dan tata air yang adaptif terhadap dinamika iklim dan pasang surut, serta penguatan akses petani terhadap teknologi, modal, dan pasar.

4) Pertanahan

Urusan pertanahan memiliki peran penting dalam mengelola tanah yang berada dalam kewenangan daerah. Pengelolaan ini mencakup tata kelola yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perizinan, serta

legalitas tanah di wilayah tersebut. Dengan adanya sistem pengelolaan pertanahan yang baik, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, mencegah konflik lahan, serta mendukung perencanaan tata ruang yang lebih efektif.

Capaian kinerja layanan umum dalam urusan pertanahan diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu persentase luas lahan yang telah bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, serta penyelesaian izin lokasi bagi kegiatan pembangunan dan investasi. Indikator-indikator ini menjadi tolak ukur efektivitas kebijakan pertanahan yang diterapkan di daerah. Namun, secara umum, pengelolaan pertanahan di Kabupaten Musi Banyuasin masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data berikut

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	9,2	9,63	9,53	9,87	15,44	25,15	100	100
2.	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	16,00	33,33	100	6,25	81,25	96,62	100	100
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin

disebabkan oleh rendahnya luas lahan yang bersertifikat. Data menunjukkan bahwa persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 9,2 persen menjadi 100 persen pada tahun 2024. Jika tanah tidak memiliki legalitas, hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian dalam kepemilikan dan penggunaan lahan, yang dapat menghambat pengembangan wilayah dan investasi di daerah tersebut.

Kemudian, permasalahan kedua yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan adalah masih adanya kasus tanah negara yang dalam konflik. Data pada Tabel 2.38 di atas menggambarkan bahwa memang secara umum capaian penyelesaian kasus telah meningkat, namun peningkatan ini pun belum mencapai nilai 100 persen. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat beberapa kasus tanah negara yang dalam konflik, yang dapat menghambat proses penggunaan lahan secara optimal. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan.

5) Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dalam urusan pemerintahan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kualitas lingkungan agar tetap nyaman, sehat, dan aman bagi masyarakat di suatu daerah. Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan keseimbangan ekosistem, mendukung keberlanjutan sumber daya alam, serta mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan.

Dalam aspek ini, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan secara makro. Indikator utama yang

digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) beserta komponen pendukungnya, yang mencakup kualitas dari udara, air, dan tutupan lahan. Selain itu, kondisi Indeks Kerentanan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan bahwa perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memperhatikan aspek resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam lampiran peraturan tersebut, aspek ini masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar, khususnya pada sub urusan kebencanaan, perlindungan sosial, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah diharapkan untuk melaksanakan pendampingan tanggap darurat dan pasca bencana.

Aspek lingkungan hidup juga mencakup pengelolaan sampah yang efektif dan pengendalian dampak industri terhadap lingkungan. Keberadaan industri yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan tekanan terhadap kualitas udara, air, dan tanah, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya. Secara umum, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat melalui data berikut.

Tabel 2.49. Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	54,56	72,93	73,03	72,78	73,11	68,50	66,05	68,17
2.	Indeks Kualitas Air (%)	61,11	87,2	87	55,56	56,45	62,73	56,09	58,65
3.	Indeks Kualitas Udara (%)	71,2	87,29	83,02	85,52	89,34	87,54	87,95	41,49

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Indeks Kualitas Lahan (%)	-	79,02	78,82	78,82	42,41	42,41	42,67	41,80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2025

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data administrasi kependudukan memiliki peran yang penting dalam penyusunan kebijakan di berbagai bidang, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Data ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai rujukan utama dalam penyediaan layanan publik yang efektif dan inklusif bagi masyarakat.

Administrasi kependudukan mencakup serangkaian proses penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan yang dilakukan melalui mekanisme, seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan**,** hingga pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik dan pengembangan sektor lainnya. Keakuratan dan keterpaduan data kependudukan sangat krusial dalam berbagai aspek, mulai dari penyusunan program bantuan sosial, perencanaan infrastruktur, pemetaan demografi, hingga kebijakan terkait pemilu dan tata kelola pemerintahan.

Dengan sistem administrasi kependudukan yang tertata dengan baik, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akurat, dan efisien dalam melayani masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data kependudukan juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi serta mencegah berbagai

permasalahan, seperti tumpang tindih data atau administrasi kependudukan yang tidak akurat.

Capaian kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur salah satunya melalui peningkatan kecepatan lama pengurusan KTP. Pada tahun 2017, waktu pengurusan KTP membutuhkan waktu 5 (lima) hari kerja. Namun demikian sejak tahun 2019 hingga 2022, waktu pengurusan KTP menjadi lebih cepat yakni 1 (satu) hari kerja. Peningkatan kecepatan pelayanan KTP tersebut kemudian berdampak pada capaian kinerja pelayanan kependudukan lainnya yaitu rasio jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki KTP telah mencapai 99,95 persen di tahun 2022.

Lebih lanjut, berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara *offline* dengan mendatangi dinas terkait ataupun kecamatan, maupun secara *online* melalui Sistem Informasi Pelayanan *Online* Kependudukan Musi Banyuasin (SIPOK MUBA). Pelayanan kependudukan yang dilakukan secara cepat dan terpadu tersebut menjadikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semakin meningkat meskipun tidak signiRikan. Nilai IKM Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun 2017 dengan nilai 82,2 menjadi 89,92 di tahun 2022 dan 88,69 pada tahun 2023. Secara lebih rinci, capaian kinerja administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Musi Banyuasin terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Jumlah Penduduk ber-KTP (%)	76,71	97,12	99,91	99,99	99,45	99,95	99,55
2.	Lama Pengurusan KTP (hari)	5	5	1	1	1	1	1
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,2	83,66	85,21	85,35	87,05	89,92	88,69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu proses dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan perencanaan wilayah. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat desa mampu mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini mencerminkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan tiga aspek utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi atau lingkungan. IDM menjadi

alat ukur yang penting dalam mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang telah dijalankan serta menentukan intervensi kebijakan yang lebih tepat guna dalam mendukung pengembangan desa.

Selain IDM, faktor lain seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa, akses terhadap layanan dasar, serta keberlanjutan program pembangunan juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemberdayaan. Dengan pendekatan yang berbasis komunitas dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta, pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diwujudkan secara lebih optimal, sehingga mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.51. Indeks Desa Membangun Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekologi	Nilai IDM	Status
Babat Supat	0,83	0,65	0,85	0,77	Maju
Babat Toman	0,77	0,67	0,66	0,70	Berkembang
Batang Hari Leko	0,74	0,55	0,75	0,68	Berkembang
Bayung Lencir	0,83	0,68	0,79	0,77	Maju
Jirak Jaya	0,73	0,69	0,87	0,78	Maju
Keluang	0,85	0,70	0,88	0,81	Mandiri
Lais	0,78	0,64	0,76	0,73	Maju
Lalan	0,75	0,51	0,73	0,67	Berkembang
Lawang Wetan	0,74	0,59	0,82	0,72	Maju
Plakat Tinggi	0,84	0,67	0,83	0,78	Maju
Sekayu	0,87	0,72	0,74	0,78	Maju
Sungai Desa	0,79	0,75	0,85	0,80	Maju

Kecamatan	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekologi	Nilai IDM	Status
Sungai Keruh	0,80	0,69	0,84	0,78	Maju
Sungai Lilin	0,88	0,71	0,89	0,83	Mandiri
Tungkal Jaya	0,85	0,72	0,75	0,77	Maju

Sumber: satudata.mubakab.go.id 2024

Dari 15 kecamatan yang ada, baru dua kecamatan dengan status IDM mandiri lainnya dalam status berkembang dan maju. Dilihat dari nilainya bahkan desa mandiri baru mencapai angka 83 dan 81 sangat tipis sekali dari garis mandiri yakni angka 80. Dilihat dari komponen pembentuknya, maka Indeks ketahanan ekonomi memiliki nilai yang paling rendah. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi dengan indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa indeks ketahanan ekonomi erat sekali berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana akses. Ketika akses ke daerah tersebut rendah maka dapat dipastikan bahwa nilai indeks ketahanan ekonomi menjadi rendah. Sementara indeks ketahanan sosial lebih berkaitan dengan perspektif sosial, pendidikan juga kesehatan masyarakat.

Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	68	3	11	12	25	227	227	227
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	76	5	15	10	-	227	227	227
3.	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	227	227	227	227

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi yaitu persoalan terbatasnya modal. Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. Berdasarkan data Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024, rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) mengalami penurunan sejak tahun 2017 dan cenderung fluktuatif hingga tahun 2021. Namun, jumlah kelompok

binaan LPM tersebut kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022-2024 yaitu sebanyak 227 kelompok.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam proses pembangunan, penduduk memainkan peran ganda sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. Oleh karena itu, keterkaitan antara dinamika kependudukan dan pembangunan bersifat saling memengaruhi. Perubahan dalam variabel kependudukan, seperti tingkat kelahiran dan pola usia perkawinan, sering kali dipicu oleh kemajuan dalam aspek sosial dan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan juga dipengaruhi oleh perubahan struktur dan dinamika penduduk, yang pada akhirnya berdampak pada perencanaan kebijakan di berbagai sektor.

Dalam rangka mengontrol pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Musi Banyuasin terus mengintensifkan program pengendalian penduduk. Salah satu fokus utama adalah pasangan usia subur (PUS) dan tingkat penggunaan alat kontrasepsi yang diukur melalui Contraceptive Prevalence Rate (CPR). CPR merupakan indikator yang menunjukkan persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi pada saat survei dilakukan.

Pada tahun 2021, pencapaian indikator ini mencapai 84,96 persen, menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Namun, pada tahun 2022, angka ini mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan jumlah pasangan yang memasuki masa menopause serta adanya pasangan yang mengalami kehamilan di luar program KB yang telah direncanakan.

Cara untuk mengatasi tantangan ini, berbagai strategi terus dikembangkan, seperti peningkatan edukasi tentang kesehatan reproduksi, akses lebih luas terhadap alat kontrasepsi, serta penguatan peran penyuluh KB dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan program pengendalian penduduk dapat berjalan lebih optimal, mendukung kesejahteraan keluarga, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang lebih seimbang dan berkualitas.

Tabel 2.53. Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Prevalensi peserta KB aktif (CPR)	84,25%	82,08%	84,72%	84,96%	82,94%	62,22%	70,20%	72,47%
2.	Rasio petugas KB/desa	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,11%	0,16%	1 PLKB : 6 Desa	1 PLKB : 4 Desa
3.	Prevalensi peserta KB Pria	487	454	422	388	956	0,60%	1,30%	1,63%
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,52	2,01	2,1	2,1	2,1	2,1	3,7	2,27
5	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera	12,11%	11,03%	10,60%	8,75%	9%	25,61%	21,04%	13,55%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025

9) Perhubungan

Urusan perhubungan memiliki peran strategis dalam menjamin konektivitas baik dalam satu daerah maupun antar wilayah. Konektivitas yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat distribusi

barang dan jasa, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Agar dapat menilai kinerja sektor perhubungan, salah satu indikator makro yang dapat digunakan adalah Indeks Konektivitas. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan antar wilayah dalam suatu daerah. Pengukuran indeks konektivitas dilakukan dengan cara membandingkan jumlah jaringan jalan yang tersedia dengan jumlah desa yang ada dalam suatu daerah. Dari analisis ini, dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat keterhubungan antardesa, antarkecamatan, dan antarwilayah, yang pada akhirnya mencerminkan efektivitas pembangunan infrastruktur transportasi di daerah tersebut.

Indeks dari konektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga mobilitas masyarakat lebih mudah dan efisien. Sebaliknya, indeks yang rendah mengindikasikan adanya keterbatasan akses transportasi, yang dapat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan indeks konektivitas di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berikut disajikan data mengenai ketersediaan jaringan jalan serta jumlah desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai dasar dalam menganalisis tingkat konektivitas wilayah.

Tabel 2.54. Data Jaringan Jalan dan Jumlah Desa serta Indeks Konektivitas Antarwilayah di Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Kecamatan	Jumlah Jaringan Jalan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa yang Belum Terhubung
1	Sekayu	10	14	4

No.	Kecamatan	Jumlah Jaringan Jalan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa yang Belum Terhubung
2	Babat Toman	7	14	7
3	Sungai Lilin	7	15	8
4	Keluang	7	14	7
5	Lais	6	16	10
6	Sanga Desa	5	19	14
7	Babat Supat	5	16	11
8	Bayung Lencir	5	23	18
9	Plakat Tinggi	5	15	10
10	Lawang Wetan	4	15	11
11	Sungai Keruh	4	10	6
12	Jirak Jaya	4	12	8
13	Batang Hari Leko	4	16	12
14	Tungkal Jaya	3	16	13
15	Lalan	3	27	24
Jumlah		**79**	**242**	**163**
Indeks Konektivitas		**0,326**		

Sumber: Satu Data Musi Banyuasin, 2024 (diolah)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa indeks konektivitas di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah, pada tahun 2022 hanya memiliki nilai 0,326. Serta dari jumlah desa yang ada, sejumlah 163 desa (67,3 persen) belum memiliki jaringan jalan yang mumpuni untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial. Sehingga dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, aksesibilitas dan mobilitas penduduknya, khususnya di daerah pedesaan.

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api	51	52	52	52	52	52	131	617
2.	Persentase Fasilitas LLAJ yang direhab	30%	30%	35%	38%	43%	43%	43%	11%
3.	Jumlah Rute Pelayanan	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	3,3	4,2%	3%	3%	31,7 %	3%	31	48%
5.	Persentase transportasi yang nyaman dan layak jalan	71,52 %	60,2 %	60%	61%	53%	60%	85%	77%
6.	Persentase Prasarana Penunjang Fasilitas Perhubungan	30%	30%	35%	30%	35%	30%	30%	NA
7.	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan	30%	30%	33%	30%	33%	30%	30%	6,67 %

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin, 2025

10) Komunikasi dan Informatika

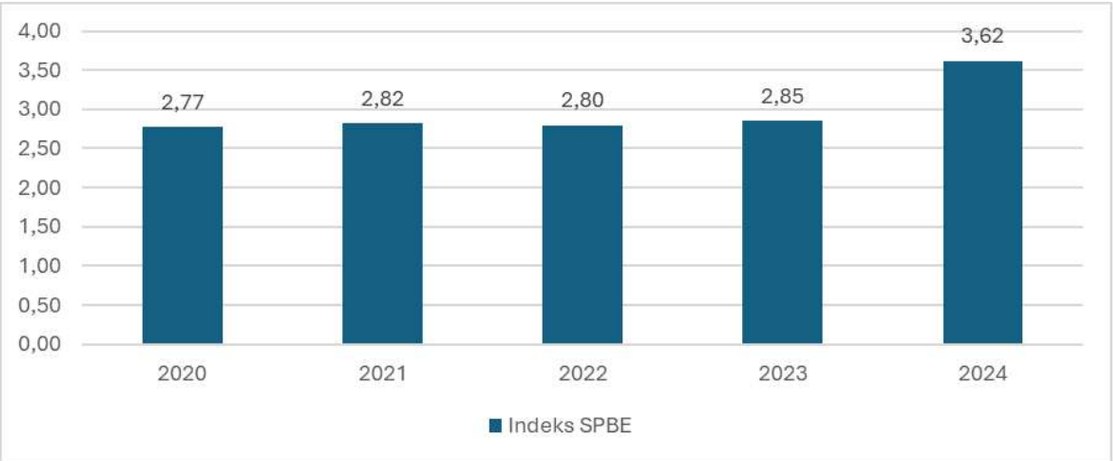
Dalam kegiatan komunikasi dan informatika memiliki peran krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan sektor ini semakin berorientasi pada digitalisasi layanan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin.

Ruang lingkup urusan komunikasi dan informatika mencakup pengembangan, implementasi, dan pengawasan infrastruktur telekomunikasi digital, serta strategi komunikasi publik dan digital yang mendukung penyebaran informasi yang cepat dan akurat. Pembangunan infrastruktur TIK yang optimal akan mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga ekonomi digital.

Dalam mengukur capaian kinerja dalam urusan ini, digunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai indikator utama. Indeks ini menunjukkan sejauh mana penerapan teknologi digital dalam sistem pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta keterbukaan layanan publik. Di Kabupaten Musi Banyuasin, nilai Indeks SPBE masih tergolong belum optimal, dengan skor yang bahkan belum mencapai nilai 3 dari skala total 5**.** Pada tahun 2019, nilai SPBE Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar 2,11**,** kemudian mengalami peningkatan menjadi 2,77 pada tahun 2020. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan perolehan nilai 2,82**.** Namun, pada tahun 2022, indeks ini mengalami sedikit penurunan menjadi 2,8**.** Peningkatan lebih nyata terlihat pada tahun 2023, di mana nilai indeks naik menjadi 2,85, dan melonjak tajam pada tahun 2024 mencapai 3,62. Peningkatan signifikan pada tahun 2024 ini mencerminkan adanya perbaikan besar dalam kualitas tata kelola digital pemerintahan, yang bisa berasal dari peningkatan layanan digital publik, integrasi sistem, maupun peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi informasi.

Kinerja SPBE Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan arah yang positif, terutama dengan lonjakan capaian pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi digital pemerintahan semakin efektif

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, diperlukan konsistensi peningkatan kualitas layanan berbasis digital, penguatan keamanan siber, serta peningkatan literasi digital di kalangan aparatur dan masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja SPBE yang berkelanjutan.



Gambar 2.44. Indeks SPBE Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Kementerian PANRB, 2025

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya meningkatkan kinerja urusan komunikasi dan informatika secara berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya meningkatkan cakupan layanan telekomunikasinya, dari hanya 60 persen di tahun 2017 menjadi 99,5 persen di tahun 2020. Selain itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga berupaya mengurangi titik *blank spot*, dari yang semula 91 titik (tersebar di 14 kecamatan dan 91 desa) di tahun 2021 menjadi 56 titik (tersebar di 12 kecamatan dan 54 desa) di tahun 2023. Capaian tersebut terjadi karena pemerintah telah berupaya membangun 37 menara telekomunikasi dan meningkatkan kualitas jaringan 3G menjadi jaringan 4G.

Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah (website, media cetak, radio, televisi, media sosial)	43	51	104	104	106	102	64	79
2.	Rasio cakupan layanan telekomunikasi (persen)	60	66,15	99,5	99,5	99,6	99,6	99,6	76.86
3.	Jumlah wilayah blank spot	NA	NA	NA	NA	91	81	56	72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat ekonomi lokal di suatu daerah. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Di Kabupaten Musi Banyuasin, koperasi dan UKM menjadi pilar utama dalam menggerakkan sektor ekonomi produktif, terutama di bidang perdagangan, pertanian, industri kreatif, dan jasa**.** Untuk mengukur perkembangan dan kontribusi sektor ini, dilakukan berbagai pemetaan dan evaluasi terkait jumlah koperasi aktif, jumlah pelaku UKM, akses terhadap pembiayaan, serta program pemberdayaan yang telah dijalankan.

Berikut disajikan data mengenai perkembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencerminkan kondisi dan capaian sektor ini dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.57. Koperasi/KUD dan Non KUD dalam Kabupaten Musi Banyuasin

No	Jenis	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi/KUD	96	98	99	104	104	104	104	104
2	Non KUD	203	216	226	239	258	294	303	316
3	Koperasi aktif	287	302	313	331	350	386	203	216
Jumlah		**299**	**314**	**325**	**343**	**362**	**398**	**407**	**636**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2017-2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2022 koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah sebanyak 398 unit yang terdiri dari 104 unit KUD, 22 unit KPN, 22 unit KOPKAR, 2 unit KOPPAS dan lainnya berjumlah 248 unit. Jumlah ini meningkat pada tahun 2024 yang mana jumlah koperasi di kabupaten Musi Banyuasin menjadi 636 koperasi.

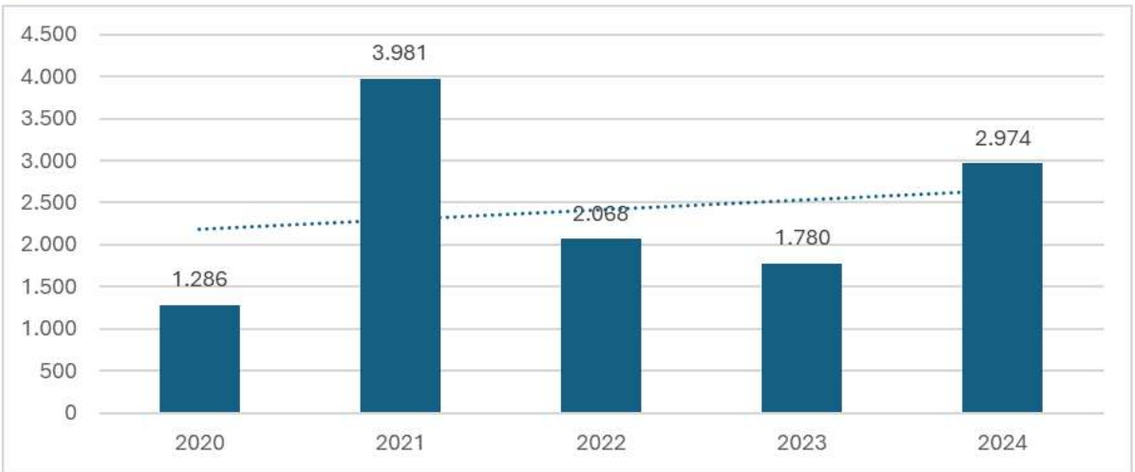
12) Penanaman Modal

Dalam kegiatan penanaman modal atau investasi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun dan menumbuhkan perekonomian suatu daerah. Investasi yang masuk ke suatu wilayah tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong inovasi dan daya saing daerah. Tersedianya investor sangat diperlukan dalam

membentuk modal daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam konteks penanaman modal, terdapat dua jenis investasi berdasarkan asal modal, yaitu:

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) – merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri menggunakan modal dari sumber dalam negeri untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia.
b. Penanaman Modal Asing (PMA) – merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal asing. Investasi ini dapat menggunakan modal asing secara penuh atau dalam bentuk kerja sama antara modal dalam negeri dengan modal asing untuk mendirikan dan mengembangkan usaha di Indonesia.

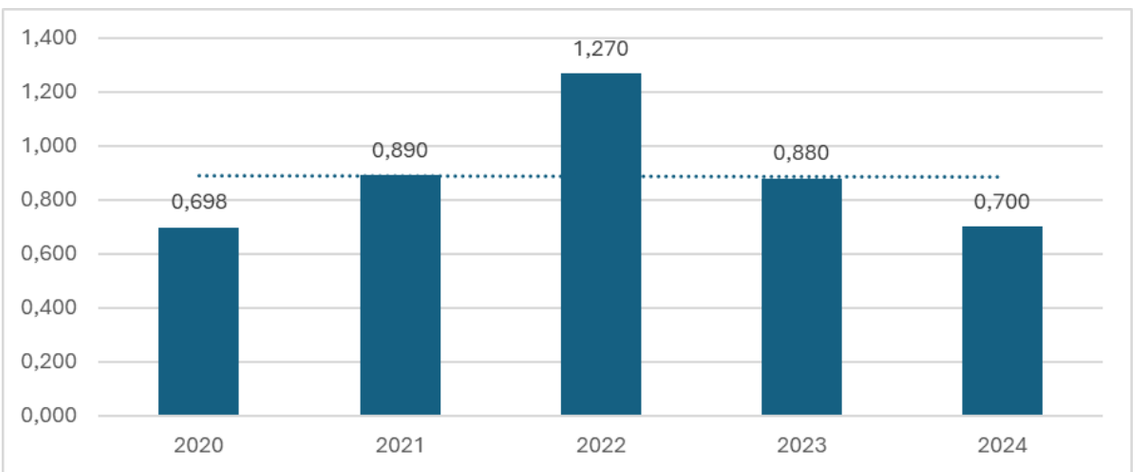
Untuk menilai kinerja sektor investasi di Kabupaten Musi Banyuasin, dilakukan analisis terhadap nilai realisasi investasi dari PMDN dan PMA dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ini mencerminkan daya tarik daerah bagi investor serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mendorong pertumbuhan investasi. Berikut disajikan data mengenai nilai realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Musi Banyuasin, yang menggambarkan tren perkembangan investasi di daerah ini



Gambar 2.45. Nilai Realisasi Investasi PMDN

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai realisasi investasi PMDN Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pergerakan fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2021 menjadi nilai realisasi investasi PMDN Kabupaten Musi Banyuasin tertinggi dibandingkan tahun lainnya, yakni sejumlah Rp 3.981 triliun.



Gambar 2.44. Nilai Realisasi Investasi PMA

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin

Selanjutnya berkaitan dengan nilai investasi PMA Kabupaten Musi Banyuasin, data di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi PMA sepanjang tahun 2020 hingga 2024 tidak sebesar PMDN. Nilai realisasi investasi PMA Kabupaten Musi Banyuasin terendah terjadi di tahun 2020 yakni sebesar

Rp 0,698 triliun, sedangkan nilai investasi PMA tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp1,270 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi asing di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat sedikit. Capaian kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Musi Banyuasin pun dapat dikatakan masih didominasi oleh PMDN sehingga potensi daerah untuk meningkatkan investasi dari pihak asing perlu dikembangkan.

Capaian kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Musi Banyuasin pun dapat dikatakan masih didominasi oleh PMDN sehingga potensi daerah untuk meningkatkan investasi dari pihak asing perlu dikembangkan.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengidentifikasi dan mendefinisikan pemuda sebagai kelompok masyarakat yang terdiri dari individu berusia antara 16 hingga 30 tahun. Rentang usia ini dianggap sebagai fase kritis dalam kehidupan seseorang, di mana terjadi perkembangan fisik, intelektual, emosional, serta sosial yang signifikan. Pengakuan terhadap kelompok pemuda dalam undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan, aspirasi, serta potensi kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan**.** Pemuda diharapkan berperan aktif dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan, serta menjadi agen perubahan dalam pembangunan bangsa.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah memiliki dasar hukum untuk menyusun kebijakan dan program-program strategis yang mendukung pengembangan kapasitas pemuda, meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan, serta menciptakan ekosistem yang kondusif bagi

pertumbuhan dan inovasi pemuda. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemuda memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, lapangan kerja, serta ruang partisipasi yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 2.58. Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin

Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	35 organisasi	35 organisasi	34 organisasi	39 organisasi	23 organisasi
Jumlah organisasi olahraga yang aktif	43 organisasi	45 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi
Jumlah kegiatan kepemudaan sesuai kalender kegiatan	5 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan
Jumlah kegiatan olahraga sesuai kalender kegiatan	10 kegiatan	30 kegiatan	6 kegiatan	5 kegiatan	8 kegiatan
Persentase penghargaan yang dicapai oleh Generasi Muda minimal di Tingkat Provinsi terhadap Generasi muda yang dibina	16,49	91,48	98,98	120,55	97,44

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Berdasarkan data organisasi pemuda dan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2020–2024, Capaian indikator bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Dari sisi kepemudaan, jumlah organisasi pemuda yang aktif cenderung stabil dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 39 organisasi Peningkatan ini mengindikasikan tumbuhnya semangat partisipasi dan pembinaan generasi muda di daerah sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 23 organisasi dikarenakan katagori susunan kepengurusan bukan lagi OKP usia 16-30 tetapi sudah ke ormas, kepengurusan di tingkat pusat sudah tidak aktif lagi, dan pengurus OKP yang sudah di atas umur 16-30 tahun.

Jumlah organisasi olahraga yang aktif pada tahun 2020 sampai 2023 masih tercatat masing-masing sebanyak 2 organisasi aktif, namun pada tahun 2023 dan 2024 jumlahnya bertambah menjadi 3 organisasi. untuk organisasi cabang olahraga yang dibina mengalami peningkatan setiap tahunnya namun organisasi olahraga yang dibina hanya 3 yakni KONI, NPCI dan KORMI.

Dari segi kegiatan, jumlah kegiatan kepemudaan sesuai kalender kegiatan mengalami peningkatan dari 5 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 8 kegiatan pada tahun 2021 dan 2022, namun sedikit menurun menjadi 6 kegiatan pada tahun 2023 dan 2024. Hal serupa juga terjadi pada kegiatan olahraga yang sempat mengalami peningkatan dari 10 kegiatan pada tahun 2020 meningkat mencapai 30 kegiatan pada tahun 2021, namun kemudian menurun menjadi 6 kegiatan pada 2022 dan hanya 5 kegiatan pada tahun 2023 sedangkan patahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 8 kegiatan. Sementara itu, persentase penghargaan yang dicapai oleh

generasi muda minimal di tingkat provinsi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 41,98 persen pada tahun 2020 menjadi 91,48 persen di tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 98,98 persen dan 120,55 persen pada tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada tahun 2024 persentase penghargaan yang dicapai oleh generasi muda di tingkat provinsi menurun menjadi 97,44, namun pencapaian sebelumnya mencerminkan efektivitas pembinaan generasi muda dalam meraih prestasi.

14) Statistik

Statistik merupakan salah satu elemen vital dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, karena berperan dalam pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang akurat dan sistematis. Data statistik memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Sebagai alat yang menyajikan informasi numerik secara terstruktur, statistik memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi tren, mengukur dampak kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas program-program pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan statistik yang baik sangat penting dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur**.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota, urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral. Statistik sektoral ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelola data yang relevan dengan kebutuhan daerah, guna mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif.

Tabel 2.59. Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Buku Statistik Daerah	3	3	3	3	3	N/A	1	1
2.	Jumlah Buku PDRB Kabupaten	2	2	2	2	-	-	1	1
3.	Jumlah Buku Kabupaten dalam Angka	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	-	-	1	1	1	1
5.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	-	-	-	97	97,2	97,2	97,2
6.	Tersedianya Data Statistik Umum dan Dasar Skala Kabupaten	-	-	-	-	1	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah buku statistik daerah yang diterbitkan setiap tahunnya berjumlah 3 buku dan di tahun 2024 sebanyak 1 buku. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga menerbitkan buku Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka berjumlah 1 buku setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga 2024. terdapat 1 buku PDRB Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan demikian, buku tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi yang akurat dan menjadi acuan dalam perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin. Lebih lanjut, Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin juga telah memiliki portal Satu Data sejak tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja urusan statistik. Ketersediaan data statistik sektoral yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin juga sudah mencapai angka 97 persen di tahun 2021 dan mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen di tahun 2022-2024. Besarnya persentase tersebut menunjukkan kesiapan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menghadapi kecenderungan (tren) yang akan terjadi pada masa yang akan datang sehingga mampu menentukan prioritas pembangunan daerah melalui pengelolaan data statistik sektoral.

15) Persandian

Urusan persandian telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa persandian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini menegaskan bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan menjaga keamanan informasi yang bersifat sensitif atau strategis. Persandian merupakan suatu sistem pengelolaan dan pertukaran informasi yang dirancang untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan integritas data yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam era digital saat ini, peran persandian menjadi semakin krusial, mengingat ancaman siber dan kebocoran data dapat berdampak serius terhadap stabilitas pemerintahan serta kepentingan nasional

Tabel 2.60. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	7	14	18	32,26	NA	NA	NA	NA
2.	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	2	2	2	100	100	100	100	NA
3.	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	4	6	0	97,80	97,80	97,80	97,80	NA
4.	Persentase Persandian Informasi pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	-	-	-	-	58,33	100	100	NA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

16) Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menjadi landasan hukum bagi tata kelola pengembangan kebudayaan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan berbagai langkah yang bertujuan meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia dalam konteks peradaban global, menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 aspek keagamaan, tetapi juga memberikan kerangka penting untuk memastikan kebudayaan maju sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan berbasis indikator. Untuk mewujudkan sinergi antara agama dan kebudayaan maju, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam perencanaan pembangunan budaya dan menyusun program yang memperkuat pendidikan karakter serta pelestarian identitas budaya lokal.

Upaya tersebut mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap warisan budaya, pengembangan potensi budaya, pemanfaatan keberagaman budaya, dan pembinaan kegiatan kebudayaan. Setiap daerah memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda dan dipengaruhi oleh lingkungan sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Perubahan sosial di sebuah wilayah akan menghasilkan kesenian yang khas sesuai dengan bentuk masyarakat pada waktu itu, seperti halnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki kesenian yang khas.

Tabel 2.61. Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sanggar seni budaya yang aktif	1	5	5	3	3	39	162

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu	1	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	6	25	25	32	32	1	4
4	Persentase Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diLestarikan (%)	0,17	0,29	29	33	35	35	38

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, 2025

17) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, dan rekreasi intelektual bagi masyarakat. Sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan koleksi buku, sumber bacaan, serta pustaka lainnya, perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan literasi dan budaya membaca di tengah masyarakat. Pengelolaan perpustakaan yang baik bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar lebih aktif mengakses berbagai sumber pengetahuan yang tersedia. Secara garis besar kegiatan urusan perpustakaan terdiri dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan sumber bacaan.

Tabel 2.62. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase peningkatan bahan pustaka (%)	20	23,53	7,67	7,37	18,19	16,58	33,66
2.	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%)	9,13	10,58	11,60	2,65	0,21	2,58	5,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin 2024

18) Kearsipan

Urusan kearsipan memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Arsip merupakan sumber informasi yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administrasi, tetapi juga sebagai bukti autentik kinerja pemerintah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan. Dengan pengelolaan arsip yang sistematis, pemerintah dapat menjaga kontinuitas kebijakan, mempercepat proses pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari urusan kearsipan adalah memastikan bahwa dokumen atau data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dapat tersimpan dengan baik, mudah ditemukan, dan tetap aman dalam jangka panjang.

Tabel 2.63. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pengelolaan Arsip	NA	NA	NA	91,87	68,92	63,38	NA
2.	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan kearsipan secara baku	100	100	100	100	100	100	100
3.	Peningkatan SDM pengelola Kearsipan (kegiatan)	-	-	-	-	4	5	5
4.	Persentase arsip statis dan inaktif yang terdata dan tertata dengan baik	25	40,19	53,84	53,84	54	54	56

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Persentase layanan arsip yang berbasis teknologi dan informasi	1	2	3	3	4	4	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Musi Banyuasin belum maksimal. Indeks pengelolaan arsip dari tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2022. Di tahun 2020, indeks pengelolaan arsip mencapai angka 91,87, namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 68,92 dan terus menurun di tahun 2022 menjadi 63,38. Indeks pengelolaan arsip yang belum maksimal juga sejalan dengan persentase arsip statis dan inaktif yang terdata serta tertata dengan baik di Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai 53,84 persen di tahun 2020. Walaupun persentase layanan arsip berbasis teknologi dan informasi meningkat dari 1 persen di tahun 2017 menjadi 3 persen di tahun 2020, namun hal tersebut belum menunjukkan layanan kearsipan yang maksimal.

19) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi

Penerapan hukum yang berkeadilan di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hukum di sini bukan hanya sekedar perangkat aturan, tetapi juga instrumen untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Akses terhadap keadilan perlu diperluas, dengan menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, serta memastikan penyelesaian sengketa tanah dan konflik agraria dilakukan secara transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Integrasi antara

hukum negara dan nilai hukum adat juga dapat memperkuat legitimasi serta memperdalam rasa keadilan di tengah masyarakat Musi Banyuasin yang masih memegang teguh tradisi lokal.

Konsep keamanan nasional yang tangguh di Musi Banyuasin mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam seperti minyak, gas, dan perkebunan, potensi konflik sosial akibat distribusi hasil ekonomi harus diantisipasi melalui kebijakan yang adil dan transparan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kerap melanda wilayah gambut di Musi Banyuasin juga menjadi isu penting dalam keamanan daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem keamanan berbasis komunitas yang inklusif serta tanggap terhadap potensi ancaman, baik sosial maupun ekologis.

Demokrasi substansial di Musi Banyuasin menuntut lebih dari sekadar pelaksanaan pemilu lima tahunan. Demokrasi yang berkualitas harus tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik, keterbukaan pemerintah, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Forum musyawarah desa, dialog publik, dan ruang partisipasi masyarakat sipil perlu terus diperkuat agar suara rakyat benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan. Di sisi lain, inklusivitas juga harus menjadi prioritas, dengan melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, demokrasi di Musi Banyuasin bukan hanya prosedural, melainkan substansial yang menyejahterakan masyarakat.

20) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Diplomasi sering dikaitkan dengan ranah nasional, dalam konteks otonomi daerah Musi Banyuasin juga memiliki peran penting dalam membangun ketangguhan diplomasi di tingkat lokal dan regional. Diplomasi daerah dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan, bahkan dengan provinsi atau negara tetangga, khususnya dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan kebudayaan. Misalnya, kerja sama dalam pengelolaan ekosistem gambut lintas wilayah atau promosi komoditas unggulan perkebunan dan energi. Diplomasi ini juga bisa memperkuat branding Musi Banyuasin sebagai daerah yang terbuka bagi investasi berkelanjutan, serta sebagai mitra strategis dalam isu-isu transnasional seperti mitigasi perubahan iklim dan pengendalian kebakaran hutan/lahan.

Pertahanan berdaya gentar di Musi Banyuasin tidak hanya kekuatan militer atau aparat keamanan, melainkan mencakup ketahanan wilayah dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Ancaman ekologis seperti degradasi lingkungan, kebakaran hutan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan merupakan tantangan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Pertahanan kawasan yang tangguh dibangun melalui sinergi pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat dalam mengantisipasi serta merespons berbagai potensi kerawanan. Dengan pendekatan ini, Musi Banyuasin dapat menciptakan daya gentar terhadap ancaman eksternal sekaligus menjaga stabilitas internal melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan di Musi Banyuasin saling berkaitan dan memperkuat. Diplomasi daerah yang aktif mampu

memperluas jejaring kerja sama, meningkatkan daya tawar, serta menarik dukungan untuk pembangunan daerah. Sementara itu, pertahanan berdaya gentar memberikan jaminan keamanan dan stabilitas bagi keberlangsungan investasi serta kehidupan sosial masyarakat. Keduanya menjadi fondasipenting bagi Musi Banyuasin dalam membangun kemandirian daerah, memperkokoh ketahanan nasional dari tingkat lokal, serta menunjukkan posisi strategis sebagai salah satu daerah penghasil energi dan pangan di Indonesia.

21) Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Di Musi Banyuasin

Kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada urusan wajib pelayanan dasar, pemerintah daerah menunjukkan kemajuan di bidang pendidikan dengan program sekolah gratis dan peningkatan akses pendidikan dasar hingga menengah. Namun, kualitas pembelajaran, ketersediaan guru berkualitas, serta kesenjangan sarana prasarana di pedesaan masih menjadi tantangan. Di sektor kesehatan, layanan puskesmas, rumah sakit, dan program kesehatan gratis terus diperluas, meskipun distribusi tenaga medis belum merata dan ancaman penyakit akibat lingkungan, seperti ISPA saat kabut asap, masih perlu perhatian.

Dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik berhasil meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, pengendalian tata ruang menghadapi kendala berupa alih fungsi lahan gambut yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologi. Urusan perumahan rakyat dan kawasan

permukiman juga berjalan melalui program rumah layak huni, meskipun *backlog* perumahan serta kawasan kumuh di sekitar perkotaan tetap perlu diselesaikan. Sementara itu, pada aspek ketenteraman dan ketertiban umum, peran Satpol PP dan linmas terus diperkuat untuk menjaga keamanan, namun penanganan konflik agraria dan penertiban kawasan ilegal masih menuntut kerja ekstra.

Pada urusan wajib non-pelayanan dasar, pemerintah daerah berupaya meningkatkan lapangan kerja melalui pelatihan vokasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor migas serta perkebunan. Meski demikian, tingkat pengangguran dan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar tetap menjadi masalah. Di sisi lain, program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan KB berjalan dengan cukup baik, tetapi angka perkawinan anak di pedesaan masih relatif tinggi. Bidang lingkungan hidup menjadi perhatian utama dengan upaya restorasi lahan gambut dan penanggulangan kebakaran hutan, walaupun pengawasan terhadap industri ekstraktif masih perlu diperkuat.

Untuk urusan pilihan, Musi Banyuasin memiliki keunggulan di sektor pertanian, perkebunan, energi, dan perikanan. Komoditas seperti kelapa sawit, karet, serta hasil perikanan darat menjadi basis perekonomian lokal. Namun, fluktuasi harga global dan ketergantungan pada bahan mentah masih menjadi hambatan, sehingga perlu penguatan hilirisasi industri. Potensi pariwisata alam rawa, sungai, dan budaya lokal juga belum dimanfaatkan optimal karena keterbatasan promosi dan infrastruktur pendukung. Dari sisi perdagangan dan perindustrian, langkah hilirisasi mulai dilakukan, tetapi keterkaitan antara industri lokal dan pasar global harus terus diperkuat agar memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Secara umum, kinerja pemerintahan daerah Musi Banyuasin memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti terutama dalam pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Akan tetapi, tantangan besar tetap ada pada isu lingkungan hidup, konflik agraria, kesenjangan pembangunan desa-kota, serta peningkatan daya saing ekonomi. Dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, inovasi dalam pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan, Musi Banyuasin berpeluang menjadi daerah yang lebih tangguh, adil, dan sejahtera.

3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan yang tidak bersifat wajib, tetapi menjadi kewenangan daerah dalam mengatur dan mengelola aspek-aspek tertentu sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Fokus layanan pada urusan pemerintahan pilihan biasanya berkaitan dengan bidang-bidang yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa fokus utama dalam layanan urusan pemerintahan pilihan meliputi:

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam pemerintahan daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki potensi perairan, baik laut maupun perairan darat seperti sungai, danau, atau rawa. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

Tabel 2.64. Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten Musi Banyuasin

Urusan dan Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Ikan Tangkap (ribu ton)	23.607,17	22.863	25.101,89	23.023,59	23.772,81	24.032,55	24.511,28
Produksi Ikan Budidaya (ribu ton)	19.276,07	21.886,25	23.996,02	25.466,42	26.393,89	27.321,04	12.094,86
Produk Olahan Perikanan (ribu ton)	206	207,72	207,24	95,04	177	192,8	226,23
Konsumsi Ikan (kg/kapita/ tahun)	35,24	40,99	40,52	40,73	47,50	47,64	49,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

2) Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor ekonomi dan aktivitas sosial yang melibatkan perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, liburan, berwisata, dan mengenal budaya serta alam suatu daerah. Sehingga, dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat lestari dan berkelanjutan.

Tabel 2.65. Objek Wisata di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak dari Pusat Kota	Jenis ODTW
1	Danau Ulak Lia	Sekayu	± 7,33 KM	Alam
2	Sungai Musi	Sekayu	0	Alam
3	Rumah Limas	Sekayu	0	Buatan
4	Danau Sidoati	Ds. Bailangu, Sekayu	± 28 KM	Alam
5	Taman Permata Muba	Sekayu	± 2,75 KM	Buatan
6	Waterfront Sekayu	Sekayu	± 3,94 KM	Buatan
7	Gelanggang Remaja Sekayu	Sekayu	0	Buatan
8	Stabel Berkuda Sekayu	Sekayu	± 2 KM	Buatan
9	Kolam Renang Tina Randik Sekayu	Sekayu	± 2 KM	Buatan
10	Water Fun Sekayu	Sekayu	± 3 KM	Buatan
11	Taman Selarai Indah	Sekayu	±7,43 KM	Buatan
12	Tugu Bintang Sekayu	Sekayu	0	Buatan
13	Taman Terbuka Hjau	Sekayu	± 2,75 KM	Buatan
14	Taman Pertanian Terpadu	Jln. Praja Mukti Kel. Soak Baru	± 3,61 KM	Buatan
15	Sircuit Sky Land	Jln. Sekayu - Pendopo, Kel. Soak Baru	± 15.03 KM	Buatan
16	Taman Agro Inovasi	Jln. Sekayu - Pendopo, Kel. Soak Baru	± 17,96 KM	Buatan
17	Masjid Raya Baitul Makmur	Jln. Lingkar Randik, Kel Kayuara	± 2,74 KM	Buatan
18	Pantai Bongen Tahunan	Jln. Merdeka, Kel. Balai Agung	± 3,94 KM	Alam
19	Taman Adipura	Jln. Sekayu — Betung Kel. Kayuara	± 2,52 KM	Buatan

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak dari Pusat Kota	Jenis ODTW
20	Makam Dindi Muro Bayo	Sekayu	± 28 KM	Budaya
21	Puyang Keramat Burung Jauh Sedekah Bumi	Kec. Sungai Keuh	± 37 KM	Budaya
22	Danau Konger	Desa Sungai Dua Kec. Sungai Keruh	± 42 KM	Alam
23	Goa Bukit Benape	Dusun 4 Sungai Dua Kec. Sungai Keruh	± 45 KM	Alam
24	Bukit Pendape	Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh	± 70 KM	Alam
25	Tebat Indah Kertajaya	Desa KertaJaya Kec. Sungai Keruh	± 42 KM	Buatan
26	Makam Puyang Pekik Nyaring	Desa Sumber Rejeki Kec. Plakat Tinggi	± 49 KM	Budaya
27	Danau Cala	Desa Danau Salak Kec. Lais	± 50 KM	A!am
28	Tanampo	Desa Teluk Kijing Kec. Lais	± 32,9 KM	A!am
29	Danau Kajang	Desa Teluk Kec. Lais	± 32,9 KM	Alam
30	Masjid Raya Abdul Kadim	Desa Epil Kec. Lais	± 28 KM	Buatan
31	Makam Bujang Ranggonang	Sekayu	± 19 KM	Budaya
32	Industri Pembuatan Getah Gambir	Kec. Babat Toman	± 37 KM	Minat Khusus
33	Taman Toga Mangun Jaya	Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman	± 50 KM	Buatan
34	Perkebunan Gambir	Kec. Babat Toman	± 38 KM	Agro
35	Embung Senja	Desa Gaja Mati Kec. Babat Supat	± 15 KM	Buatan
36	Danau Ujan Mas	Ds. Kemang Kec. Sanga Desa	± 47 KM	Buatan
37	Danau Ulak Libok	Ds. Kemang Kec. Sanga Desa	± 47 KM	Alam

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak dari Pusat Kota	Jenis ODTW
38	Kolam Renang Az-Zahra	Desa Biji Mulyo Kec. Tungkal Jaya	± 90 KM	Buatan
39	Danau Putih Ex Batu Bara	Kec. Tungkal Jaya	± 95 KM	Alama
40	Pemancingan Rawa Kuning	Dusun 2 Rukun Rahayu Kec. Jirak Jaya	± 51,4 KM	Buatan
41	Manau Kuning	Kec. Jirak Jaya	± 53,4 KM	Buatan
42	Keramat Puyang Dukun	Dusun II Ds.Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko	± 29 KM	Budaya
43	Danau Siarak	Dusun I Ds. Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko	± 29 KM	Alam
44	Puyang Janggut	Dusun I Desa Saud Kec. Batang Hari Leko	± 39 KM	Budaya
45	Danau Panjang	Dusun I Desa Pinggap Kec. Batang Hari Leko	± 39 KM	Alam
46	Keramat Puyang Apul	Dusun I Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko	± 39 KM	Budaya
47	Situs Ran Putri	Dusun I Desa Lubuk Buah Kec. Batang Hari Leko	± 49 KM	Budaya
48	Keramat Selerang	Dusun I Desa Sungai Napal Kec. Batang Hari Leko	± 60 KM	Budaya
49	Assalam Water Fun & Family Park	Sri Gunung Kec. Sungai Lilin	± 75 KM	Buatan
50	Waterboom Gunung Sari Jos	Kec. Sungai Lilin	± 80 KM	Buatan
51	Sungai BB	Desa Cinta Damai Kec. Sungai Lilin	± 83 KM	Alam

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak dari Pusat Kota	Jenis ODTW
52	Objek Wisata Alam Rawa Hijau	Kec. Sungai Lilin	± 78 KM	Buatan
53	Guci Purbakala Bayung Lencir	Kes. Bayung Lencir	± 160 KM	Budaya
54	Perkampungan Suku Anak Dalam	Bayung Lencir	± 200 KM	Budaya
55	Rumah Rakit Bayung Lencir	Kes. Bayung Lencir	± 312 KM	Budaya
56	Embung Desa Cinta Bumi	Desa Mendis Kec. Bayung Lencir	± 312 KM	Buatan
57	Danau Kodok	Desa Sari Agung Kec. Lalan	± 143,8 KM	A!am
58	Water Boom Lalan	Desa Sari Agung Kec. Lalan	± 143,8 KM	Buatan
59	Raın Bow Garden	Karang Tırta Kec. Lalan	± 143,4 KM	Buatan
60	Embung Tegal Mulyo	Kec. Keluang	± 43 KM	Buatan

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.66. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2024

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	42.806	43.406	44.162	34.187	35.056	49.335	53.198	54.745
2.	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	N/A	1,04	1,74	22,59	2,54	40,73	7,88	1,03
3.	Peningkatan Jumlah Objek Wisata	25	30	57	62	62	62	62	67

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami tren peningkatan sejak tahun 2017. Akan tetapi, apabila dilihat lebih detail, jumlah kunjungan wisata yang dicapai tidak sampai 1000 orang per pekan. Sebuah angka jumlah kunjungan wisata yang sangat rendah untuk sebuah kabupaten. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan strategi pemasaran yang lebih agresif, peningkatan fasilitas wisata, serta pengembangan atraksi wisata baru yang lebih menarik. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha, juga sangat penting untuk membangun sektor pariwisata yang lebih berkembang dan berdaya saing.

3) Urusan Pertanian

Secara keseluruhan, kinerja sektor pertanian dapat dievaluasi melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Dalam kurun waktu 2017 hingga 2024, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan kontribusi sektor ini yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain semakin menyempitnya kepemilikan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, berkurangnya ketersediaan sumber air irigasi yang berdampak pada produktivitas tanaman, serta perubahan cuaca dan kondisi iklim yang tidak menentu, sehingga mempengaruhi hasil panen. Selain itu, keterbatasan akses petani terhadap sumber permodalan juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Fluktuasi harga jual hasil pertanian yang tidak stabil turut memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani, sementara industri pengolahan hasil pertanian di daerah ini masih belum berkembang secara optimal. Semua faktor ini

secara bersama-sama berkontribusi terhadap penurunan peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah, sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut serta meningkatkan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di masa mendatang.

4) Urusan Kehutanan

Kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kehutanan juga merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Salah satu daerah yang memiliki potensi kehutanan yang cukup besar adalah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.477 km^2, dengan luas kawasan hutan mencapai 9.378 km^2 atau 64,76 persen dari luas wilayah. Kawasan hutan di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari hutan rakyat dan hutan negara, yang masing-masing memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda.

Hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kayu bakar, kayu bahan, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Hutan negara adalah hutan yang dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan, seperti perlindungan, konservasi, produksi, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Hutan negara di Kabupaten Musi Banyuasin terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas,

hutan konservasi, dan hutan adat.

Data lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa luas hutan rakyat mengalami penurunan, sedangkan luas hutan negara mengalami kenaikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, perubahan iklim, konversi lahan, kebakaran hutan, *illegal logging*, dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi dan dinamika lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat dalam data berikut.

Tabel 2.67. Luas Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun	Luas Hutan		Jumlah Hutan
	Hutan Rakyat	Hutan Negara	
2017	154.854	236.950	391.804
2018	100.475	410.815	511.290
2019	100.376	410.815	511.191
2020	100.797	410.815	511.612
2021	100.797	409.836	510.633
2022	91.952	409.836	501.788
2023	571.107	16.300	587.407

Sumber: Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin 2024

Dari tabel tersebut, dapat dianalisis bahwa terjadi perubahan luas hutan rakyat dan hutan negara selama periode tersebut. Luas hutan rakyat mengalami penurunan dari 100.475 hektar pada tahun 2018 menjadi 91.952 hektar pada tahun 2022. Sementara itu, luas hutan negara mengalami penurunan juga dari 410.815 hektar pada tahun 2018 menjadi 409.836 hektar pada tahun 2022.

Penurunan luas hutan rakyat dan kenaikan luas hutan negara di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik

internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan pemerintah yang mengalokasikan lahan hutan rakyat untuk menjadi hutan negara, misalnya untuk program konservasi, atau bahkan menjadi aktivitas perekonomian lainnya. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas hutan rakyat, konversi lahan hutan rakyat menjadi lahan non-hutan, misalnya untuk perkebunan, pertanian, atau pemukiman, kebakaran hutan yang merusak hutan rakyat, *illegal logging* yang mengurangi stok hutan rakyat, dan sebagainya. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan deforestasi, yaitu pengurangan luas dan kualitas hutan secara permanen atau semi permanen. Sehingga, deforestasi hutan rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah ketika terjadi deforestasi pada hulu sungai yang akhirnya akan menyebabkan kualitas air di Kabupaten Musi Banyuasin menurun. Sehingga diperlukan kebijakan yang lebih baik untuk 20 tahun ke depan dalam menjaga kualitas air dan tutupan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin.

5) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral di tingkat pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan energi yang optimal guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek utama dalam urusan ini adalah pemanfaatan energi listrik yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Oleh karena itu, analisis dalam sektor ini berfokus pada capaian dalam penggunaan listrik di daerah, termasuk tingkat akses masyarakat terhadap listrik di setiap kecamatan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam hal ini Sebagai bagian dari agenda strategis nasional dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan untuk

memperkuat ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 pada bagian pembinaan teknis urusan pekerjaan umum. Dimana dapat mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya untuk meningkatkan akses listrik dan memperbaiki infrastruktur listrik di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap sumber energi yang penting ini.

Tabel 2.68. Banyaknya Keluarga Bukan Pengguna Listrik Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Jumlah
Sekayu	822
Lais	847
Sanga Desa	165
Tungkal Jaya	10
Sungai Lilin	0
Jirak Raya	16
Babat Supat	199
Banyu Lencir	1.035
Lalan	1.442
Lawang Wetan	0
Keluang	60
Plakat TInggi	1
Batang Hari Hari	688
Sungai Keruh	224
Babat Toman	162
Total	**5.671**

Sumber: Satu Data Musi Banyuasin 2024

6) Urusan Perdagangan

Capaian kinerja perangkat daerah dalam urusan perdagangan di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan hasil yang positif dan terus mengalami peningkatan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun 2018 hingga 2022. Selama lima tahun terakhir, sektor ini memberikan kontribusi lebih dari 4 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin, menjadikannya sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan sektor perdagangan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya aktivitas perdagangan barang dan jasa, perkembangan infrastruktur pasar, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung iklim usaha yang kondusif.

Tabel 2.69. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,57	4,68	4,81	5,03	4,97	5	5,64	5,90
2.	Ekspor Bersih Perdagangan (Rp)	-	31,4 T	33,68 T	(5737,56) Milyar	(2290,48) Milyar	(4447,92) Milyar	(4447,92) Milyar	(5217,83) Milyar

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin 2024

Berdasarkan data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang ada didata. Pada tahun 2017, kontribusi sektor ini sebesar 4,57%, dan terus meningkat hingga mencapai 5,90% pada tahun

2024. Pada tahun 2018 hingga 2019, nilainya cukup stabil di kisaran 31,4 hingga 33,7 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif menjadi -5737,56 Milyar. Begitupun pada tahun 2021 sebesar -2290,48 Milyar. Sedangkan Pada tahun 2022 dan 2023, ekspor bersih masih mengalami penurunan menjadi -4447,92 Milyar dan -5217,8 Milyar pada tahun 2024.

7) Urusan Perindustrian

Perindustrian memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin, menjadikannya sebagai salah satu sektor utama dalam diversifikasi ekonomi lokal. Sektor ini tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya. Keberadaan industri pengolahan turut memberikan nilai tambah bagi produk lokal serta memperluas peluang ekspor ke pasar nasional maupun internasional.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendorong pengembangan sektor industri melalui berbagai kebijakan strategis, seperti penyediaan infrastruktur pendukung, kemudahan perizinan usaha, serta fasilitasi akses terhadap permodalan bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Selain itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga terus diperkuat guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri.

Tabel 2.70. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	% Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	9,19	9,93	10,17	10,95	10,69	10,73	11,69	11,92
2.	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)	2,93	2,5	2,5	0,71	0,89	3,09	2,6	3,04

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

8) Urusan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu strategi dalam pengembangan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan penduduk. Pola transmigrasi saat ini tidak lagi bersifat sentralistik atau top-down dari pemerintah pusat, melainkan lebih berbasis kerja sama antara daerah asal dengan daerah tujuan transmigrasi. Di Kabupaten Musi Banyuasin, program transmigrasi telah memberikan dampak terhadap perkembangan sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah tujuan transmigrasi. Berdasarkan data dari Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin (2023), jumlah penduduk yang tergolong sebagai transmigran tercatat sebanyak 185 keluarga atau 605 jiwa**,** yang seluruhnya menetap di Kecamatan Sanga Desa.

Jumlah transmigran ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang berkontribusi dalam peningkatan populasi dan dinamika sosial di Kecamatan Sanga Desa. Para transmigran umumnya berperan dalam sektor pertanian, perkebunan, serta usaha kecil dan menengah, yang turut membantu mengembangkan perekonomian daerah.

Tabel 2.71. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Transmigrasi Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pembinaan Warga Transmigran (%)	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Berdasarkan data capaian kinerja urusan transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2024, terdapat dua indikator utama yang diukur, yaitu Persentase Transmigrasi Umum dan Persentase Pembinaan Warga Transmigran. Indikator Persentase Transmigrasi Umum menunjukkan capaian 100% setiap tahunnya dari 2017 hingga 2024. Hal ini mencerminkan bahwa program transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin berjalan secara konsisten sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sementara itu, indikator Persentase Pembinaan Warga Transmigran juga menunjukkan capaian 100% dari tahun 2017 hingga 2024. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, data tidak tersedia atau N/A, yang bisa jadi menunjukkan adanya perubahan kebijakan, keterbatasan data, atau kendala dalam pelaksanaan program pembinaan transmigran pada periode tersebut.

4. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintahan yang baik harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik pula. Kinerja yang dimaksud berkaitan dengan

seberapa baik hasil dari program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah mampu memberikan dampak bagi masyarakat sehingga kepercayaan publik semakin meningkat. Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut, upaya reformasi birokrasi menjadi penting untuk dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup perbaikan pada berbagai aspek, mulai dari aspek manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), akuntabilitas, pengawasan, hingga pelayanan publik.

1) Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh kualitas perencanaan yang matang, komprehensif, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Langkah awal dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas adalah memastikan bahwa perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan yang terintegrasi, sinergis, dan partisipatif. Artinya, setiap program yang dirancang harus mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, perencanaan pembangunan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang berperan sebagai koordinator dalam menyusun kebijakan pembangunan. Bappeda tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan memiliki dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan, Bappeda juga menerapkan prinsip monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap berbagai program yang dijalankan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang berkualitas dan berbasis partisipasi masyarakat, diharapkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.72. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kelarasan program RKPD dalam RPJMD	76%	84,97%	95,71%	92,78%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	80%	80%	86%	91,56%	95%	100%	100%	100%
3.	Program usulan Renja PD yang terakomodir di RKPD	91%	95,45%	96,3%	97%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase keselarasan program prioritas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	tahunan dengan program prioritas 5 tahunan								
5.	Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD	75%	75%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang mendukung program prioritas dan terakomodir di RKPD	70%	75%	80%	83,42%	100%	100%	100%	100%
7.	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja	20,24	20,79	21,12	21,53	21,68	22,28	22,81	NA

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja urusan perencanaan khususnya dalam aspek keselarasan secara keseluruhan telah mencapai 100 persen. Hal tersebut mencakup keselarasan antara program dalam RKPD dengan RPJMD, keselarasan antara program kabupaten dengan program nasional, keselarasan antara program perangkat daerah dengan RKPD, keselarasan antara program prioritas tahunan dengan program lima tahunan, keselarasan antara program pada rencana strategis OPD dengan rencana kerja OPD, serta keselarasan antara usulan masyarakat dalam Musrenbang dengan program prioritas RKPD.

2) Keuangan

Kinerja keuangan menunjukkan seberapa baik pengelolaan keuangan suatu daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kinerja keuangan ini tergambar dalam beberapa indikator utama, diantaranya indeks kemandirian Fiskal, persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks kemandirian Fiskal menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Indeks ini terbagi menjadi empat kategori, yakni kategori belum mandiri (0,00-0,24), menuju mandiri (0,25-0,49), mandiri (0,50-0,74), serta sangat mandiri (0,75-1,00). Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, indeks kemandirian Fiskal Kabupaten Musi Banyuasin terus meningkat, berturut-turut pada angka 0,079, 0,155, dan 0,122 dengan kategori belum mandiri. Adapun pada tahun 2022, indeks tersebut mengalami penurunan menjadi 0,113, masih pada kategori belum mandiri. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh rasio PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang relatif masih kecil. Pada tahun 2021, rasio PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai 10,75 persen.

Selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja keuangan pula yang masih perlu ditingkatkan khususnya dalam mencapai Kabupaten Musi Banyuasin yang mandiri. Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Indeks Tata Kelola Pengadaan) Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari 79,75 di tahun 2021 menjadi 76,61 di tahun 2023 pada kategori baik. Selain itu dalam hal pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) yang tersertifikasi telah terlaksana 100 persen. Secara lebih rinci, capaian kinerja keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.73. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kemandirian Fiskal	NA	NA	0,079	0,115	0,122	0,113	0,097
2.	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	NA	NA	7,58%	9,99%	10,75%	NA	9,70%
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	NA	50,15	51.68	62.07	65.528	NA	68,78
4.	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Pencairan dana *on schedule*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kualitas Pengelolaan Barang dan	NA	NA	NA	70	79,75	71,9	76,61

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Jasa (Indeks Tata Kelola Pengadaan)							
8.	Persentase BMD yang Tersertifikasi	13	3,3	0,73	0,27	4,85	13,46	100%

Sumber: BPKAD dan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin 2024

Dari tabel yang disajikan, terdapat beberapa indikator utama terkait pengelolaan keuangan daerah dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dari tahun 2017 hingga 2023. Secara umum, beberapa indikator menunjukkan tren positif, sementara yang lain mengalami fluktuasi atau tidak tersedia di beberapa tahun tertentu. Indeks Kemandirian Fiskal mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021, tetapi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah juga menunjukkan pertumbuhan hingga 2021, meskipun data untuk tahun 2022 tidak tersedia. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) mengalami kenaikan signifikan dari 50,15 pada tahun 2018 menjadi 68,78 pada tahun 2023.

3) Inspektorat

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Adapun hasil penilaian atas tingkat kematangan

atau kualitas penyelenggaraan SPIP itu sendiri tercermin dari nilai maturitas SPIP-nya.

Sepanjang tahun 2017-2020, maturitas SPIP di Kabupaten Musi Banyuasin berada pada level 3 (tiga) atau terdefinisi yang berarti instansi pemerintah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai, dan beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga tahun 2023, maturitas SPIP menurun menjadi level 2 atau berkembang yang berarti instansi pemerintah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Selain itu, tindakan pimpinan dalam menangani kelemahan belum konsisten.

Selaras dengan maturitas SPIP, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Musi Banyuasin juga berada pada level 2. Kapabilitas APIP itu sendiri menggambarkan kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi dalam mewujudkan peran APIP secara efektif. Secara khusus pada level 2 (dua) atau *infrastructure* menunjukkan bahwa praktik dan prosedur APIP di Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan berulang, meskipun belum *integrated* (level 3), *managed* (level 4), dan *optimizing* (level 5).

Dengan demikian secara keseluruhan, kinerja keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin memang belum optimal. Namun demikian, upaya dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan terus dilakukan. Hal ini misalnya ditandai dengan sebagian besar OPD telah menerapkan SPIP dan upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah dilakukan dengan persentase sebesar 90,73 persen pada tahun 2023. Secara lebih rinci, capaian kinerja pengawasan di Kabupaten Musi Banyuasin terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.74. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Maturitas SPIP	3,0159	3,0602	3,0602	3,0602	2,910	2,961	2,00
2.	Kapabilitas APIP	1	2+	2+	2+	2+	2+	2+
3.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	39,64%	81,86%	54,82%	77,37 %	78%	90,02 %	90,73 %
4.	Persentase PD yang telah menerapkan SPIP	18,65%	20,83%	85,13%	87,24 %	88 %	70 %	48

Sumber: Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin 2024

Berdasarkan tabel yang disajikan, terdapat beberapa indikator utama terkait pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari tahun 2017 hingga 2023. Berdasarkan tabel yang disajikan, terdapat beberapa indikator

utama terkait pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari tahun 2017 hingga 2023. Maturitas SPIP menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2017 hingga 2020, dengan angka sekitar 3,06. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 (2,910), sedikit meningkat pada 2022 (2,961), tetapi kembali turun signifikan pada 2023 menjadi 2,00. Ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas pengendalian intern pemerintah.

Kapabilitas APIP mengalami peningkatan dari level 1 pada tahun 2017 menjadi 2+ sejak tahun 2018 dan tetap bertahan di level tersebut hingga 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dalam pengawasan internal pemerintah yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti mengalami fluktuasi. Pada 2018 sempat mencapai 81,86%, namun turun ke 54,82% pada 2019. Setelah itu, angka ini kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 90,73% pada 2023, yang mencerminkan peningkatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menerapkan SPIP menunjukkan lonjakan signifikan pada 2019 (85,13%) dan 2020 (87,24%). Namun, data untuk 2021 dan 2022 tidak tersedia, dan pada 2023 angka ini turun menjadi 48.

4) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan merupakan salah satu urusan penting untuk mendorong SDM Aparatur yang berkualitas. SDM Aparatur yang berkualitas itu sendiri menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Salah satu indikator utama untuk

menggambarkan capaian kinerja pada urusan ini yaitu indeks profesionalitas ASN. Indeks ini menggambarkan kualitas ASN pada suatu instansi pemerintah berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasil penilaian dari indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 5 (lima) kategori, dimulai dari 91-100 (sangat tinggi), 81- 90 (tinggi), 71-80 (sedang), 61-70 (rendah), dan kurang dari 60 (sangat rendah).

Tabel 2.75. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	NA	NA	49,76	50,8	60,93
2.	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	72,50%	71,46%	72,05%	72,05%	76%	76%	78%
3.	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	0,55%	1,19%	0,3%	0,2%	0,4 %	0,4 %	0%
4.	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan standar Jabatan	95%	97%	99,99%	98,02%	98,12%	98,39%	98,69%
5.	Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	75%	76,25%	78,26%	78,79%	84,85%	84,85%	90,91%
6.	Persentase Capaian	99,17%	99,23%	99,25%	99,81%	99,80%	99,16%	90,69%

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik							
7.	Persentase Kasus-Kasus pelanggaran disiplin ASN	0,63%	0,74%	0,75%	1,07%	1,52%	0,91%	0,59%
8.	Survei Kepuasan ASN	83,45%	85,21%	85,56%	85,82%	87,00%	87,38%	87,52%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin 2024

5) Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Litbang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) guna meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian yang sistematis, pemerintah daerah dapat memahami isu-isu yang berkembang, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun program-program yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, fungsi pengembangan berperan dalam inovasi tata kelola pemerintahan dengan memperkenalkan pendekatan baru, teknologi, dan model kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan. Misalnya, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi publik atau pengembangan model ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Di tingkat daerah, hasil penelitian dan pengembangan ini dapat diterapkan dalam

berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Dengan pendekatan yang berbasis penelitian, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan mengurangi risiko kebijakan yang tidak efektif.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan kapasitas penelitian dan pengembangan, baik melalui kolaborasi dengan akademisi, lembaga riset, maupun sektor swasta. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga proaktif dalam merancang solusi jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan	44%	59%	90,38%	90 %	90,3%	90,2 %	92 %
2.	Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	NA	NA	NA	90%	90%	90%	90%
3.	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	75%	90%	90%	90,73%
4.	Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi	NA	NA	NA	NA	NA	0,47	1,40

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin 2024

6) Pelayanan Perizinan Terpadu

Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan sistem yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus berbagai jenis izin yang diperlukan dalam kegiatan usaha maupun kepentingan lainnya. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses perizinan di daerah. Di Kabupaten Musi Banyuasin, pelayanan perizinan terpadu dikelola oleh instansi yang bertanggung jawab dalam pengurusan perizinan, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pelayanan ini mencakup berbagai sektor, termasuk perizinan usaha, lingkungan, bangunan, serta izin lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah.

7) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas nasional serta memperkuat kehidupan demokrasi di daerah. Urusan ini mencakup berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif dan harmonis. Di Kabupaten Musi Banyuasin, tugas dan fungsi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam 12 negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;

6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan target dan capaian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah.

Tabel 2.77. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Musi Banyuasin

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Dokren Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	-	90%	80%	70%	60	75%	69%	N/A	N/A	120%	116%	N/A	N/A

Sumber : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2025

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan Peningkatan Daya Saing Daerah sebagai salah satu sasaran dari utama pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daya saing ini merujuk pada kemampuan daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, inovasi, dan efisiensi pelayanan publik, serta

memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan suatu wilayah dalam menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya meningkatkan daya saing daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta kemudahan berusaha. Pada tahun 2024 indeks daya saing daerah 3,37 persen, dan angka ini meningkat dari tahun 2022, dan 2023 yang masing-masing ada pada angka 3,15 persen dan 3,26 persen.

Pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, inovasi, serta produktivitas ekonomi sebagai pilar atau penunjang strategis dalam memperkuat daya saing daerah. Melalui indikator yang jelas dan penekanan pada implementasi inovasi berbasis teknologi, Pemerintah Daerah dipandu Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 menempatkan menyusun kebijakan dan program yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Peningkatan daya saing menjadi bagian integral dari strategi pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dalam Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID). Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi pasar, keunggulan lokal tidak cukup hanya bersandar pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan daerah menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang

mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berperan penting dalam memberikan nilai tambah bagi produk lokal.

Dukungan iptek meliputi berbagai aspek, mulai dari perbaikan proses produksi, inovasi pengolahan, hingga peningkatan kualitas dan efisiensi. Inovasi sederhana seperti penggunaan alat pengering tenaga surya, pengemas vakum, atau sistem irigasi tetes dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan biaya produksi. Salah satu elemen penting dalam strategi peningkatan daya saing adalah standarisasi mutu. Produk-produk unggulan Banyuasin seperti beras, ikan olahan, atau kerajinan khas daerah perlu memenuhi standar kualitas tertentu agar diterima oleh pasar modern. Standar tersebut mencakup aspek keamanan pangan, estetika produk, serta konsistensi mutu dari waktu ke waktu.

Teknologi informasi menjadi pengungkit utama daya saing di era digital. Digitalisasi pemasaran melalui media sosial, katalog daring, dan platform e-commerce memberikan akses yang lebih luas bagi produk lokal ke pasar regional dan nasional. Pelaku UMKM di Banyuasin perlu didorong untuk memanfaatkan platform seperti Tokopedia, Shopee, atau bahkan marketplace tematik lokal yang mendukung produk khas daerah.

Peningkatan daya saing juga memerlukan penguatan akses pasar. Pemerintah daerah berperan dalam membuka jalur distribusi yang lebih efisien melalui kerja sama dengan retail modern, koperasi konsumen, dan jaringan distribusi antarwilayah. Selain itu, partisipasi dalam pameran dagang, promosi daerah, dan forum bisnis juga menjadi bagian dari strategi promosi yang sistematis. peningkatan daya saing produk unggulan daerah memerlukan sinergi lintas sektor dan lintas aktor. Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta komunitas sipil harus berkolaborasi dalam satu ekosistem yang mendukung pertumbuhan PUD berbasis inovasi dan

orientasi pasar. Dengan strategi yang tepat, produk-produk lokal Banyuasin berpeluang memperluas jangkauan hingga ke pasar internasional.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi ekonomi yang kuat, didukung oleh berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, serta energi dan sumber daya mineral.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan sebagai salah satu daerah yang berkomitmen kuat dalam menerapkan prinsip ekonomi hijau dan biru sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Upaya ini didukung oleh regulasi dan kolaborasi multipihak. Dimana Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu percontohan untuk program ekonomi hijau di Indonesia. Inisiatif utamanya adalah "Muba Hijau" yang bahkan telah dilegalkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2021. Muba Hijau dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Berikut adalah penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Musi Banyuasin:

1) Penerapan Ekonomi Hijau (Green Economy)

Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu percontohan untuk program ekonomi hijau di Indonesia. Inisiatif utamanya adalah "Muba Hijau" yang bahkan telah dilegalkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2021. Muba Hijau dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Beberapa wujud implementasi ekonomi hijau di Muba meliputi:

- Pengembangan Industri Hijau: Pemerintah Kabupaten Muba merancang kawasan industri terpadu dengan konsep *green industry*. Tujuannya adalah mengelompokkan aktivitas industri dalam satu kawasan yang berfokus pada konservasi energi, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan manajemen limbah yang baik.
- Pengelolaan Lahan Berkelanjutan: Program ini mencakup restorasi dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengurangan laju deforestasi. Selain itu, ada juga upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian.

- Pertanian Berkelanjutan: Pemerintah Muba memberikan pelatihan praktik perkebunan yang baik dan asistensi sertifikasi bagi pekebun karet dan sawit. Inisiatif ini didukung oleh mitra dan pihak swasta untuk memastikan komoditas yang dihasilkan berkelanjutan dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Muba juga mengembangkan Pusat Unggulan Komoditas Lestari (PUKL) untuk memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, swasta, dan LSM dalam pengembangan komoditas yang berkelanjutan.
- Pengelolaan Limbah: Implementasi ekonomi hijau di Muba juga mencakup pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah industri. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
- Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Inisiatif Muba Hijau secara spesifik menargetkan tata kelola lahan berkelanjutan di daerah rawan karhutla seperti Kecamatan Bayung Lencir, Tungkal Jaya, dan Sungai Lilin.
- Pengembangan Ekowisata: Potensi lahan yang luas dengan komitmen pembangunan hijau dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata dan *agro-tourism*.

2) Penerapan Ekonomi Biru (Blue Economy)

Meskipun fokus utama Muba dikenal dengan ekonomi hijau, penerapan ekonomi biru juga terlihat dari berbagai inisiatif yang berkaitan dengan sumber daya air, terutama sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Konsep ekonomi biru di sini diwujudkan melalui:

- Pemberdayaan Nelayan: Pemerintah Muba melalui Dinas Perikanan memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program ini mencakup himbauan untuk tidak menggunakan metode penangkapan ikan yang merusak seperti setrum atau racun. Tujuannya adalah menjaga ekosistem sungai dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan untuk generasi mendatang.

- Pengelolaan Sumber Daya Air: Peraturan Daerah Muba Hijau juga memuat kebijakan perlindungan kerentanan pesisir, sungai, dan laut. Hal ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadaran masyarakat, dan peningkatan pasokan air baku.

- Wisata Berbasis Masyarakat: Pemanfaatan sumber daya air juga diwujudkan melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat, salah satunya di Danau Ulak Lia. Hal ini menunjukkan upaya untuk menciptakan peluang ekonomi dari sumber daya alam perairan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Perpaduan antara ekonomi hijau yang berfokus pada tata kelola lahan dan industri yang ramah lingkungan, dengan ekonomi biru yang memperhatikan pengelolaan sumber daya perairan, menjadi landasan bagi Muba untuk mencapai.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi hambatan dari sisi pembiayaan. Struktur APBD menunjukkan

ketergantungan yang cukup besar pada dana transfer pemerintah pusat. Ketika penyaluran transfer terlambat atau tidak sesuai kebutuhan, pelaksanaan program pembangunan ikut terhambat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih terbatas dan belum mampu menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan. Potensi pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya tergali, sehingga ruang fiskal untuk belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi sempit. Selain itu, kapasitas dalam menyiapkan proyek yang layak secara finansial masih rendah. Hal ini membuat pemerintah daerah sulit memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif, seperti kemitraan dengan swasta atau instrumen kreatif lainnya.

3) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita. Pada tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022 dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 sebesar Rp1.127.575 yang terdiri dari Rp617.514 pengeluaran konsumsi makanan dan Rp510.061 pengeluaran non-makanan.

4) Nilai Tukar Petani

Data nilai tukar petani dan nelayan memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi mereka. Kenaikan nilai tukar dapat mengindikasikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, sementara penurunan nilai tukar bisa menunjukkan adanya tekanan ekonomi atau masalah dalam sektor pertanian dan perikanan. Data ini memungkinkan

pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana ada kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program-program pengembangan ekonomi yang tepat. Dengan melihat perubahan nilai tukar seiring waktu, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan yang diterapkan telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan mereka atau tidak, dan jika tidak, langkah apa yang perlu diambil untuk perbaikan.

Tabel 2.78. NTP-Tanaman Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (2015=100)

Bulan	It	Ib	NTP-TP
Januari	99,78	100,97	98,83
Februari	103,01	99,73	103,29
Maret	98,4	99,64	98,75
April	99,34	100,42	98,93
Mei	100,09	100,46	99,63
Juni	99,78	103,15	96,74
Juli	96,2	99,94	96,25
Agustus	103,1	96,84	106,47
September	100,18	100,1	100,08
Oktober	100,32	99,33	100,99
November	100	99,58	100,42
Desember	100,11	100,63	99,48
Rata-rata	**100,03**	**100,07**	**99,99**

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.79. NTP-Perkebunan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (2015=100)

Bulan	It	Ib	NTPR
Januari	125,63	100,74	124,7
Februari	123,42	99,25	124,35
Maret	126,34	101,08	124,99
April	127,03	101,57	125,07
Mei	116,78	100,5	116,2

Bulan	It	Ib	NTPR
Juni	120,42	102,73	117,23
Juli	113,01	100,34	112,63
Agustus	111,22	97,35	114,24
September	104,38	100,66	103,69
Oktober	103,53	99,34	104,22
November	101,77	99,63	102,15
Desember	106,3	100,73	105,52
Rata-rata	**114,99**	**100,33**	**114,58**

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara harga yang diterima petani untuk produk pertanian yang dihasilkan dengan harga yang dibayarkan petani untuk input-input produksi pertanian. Kegunaannya dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai indikator penting untuk mengukur kesejahteraan petani, mengevaluasi efisiensi produksi pertanian, serta merencanakan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Berdasarkan tabel di atas, tingkat kesejahteraan petani Tanaman Pangan dan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 berada dalam kondisi yang baik dengan rata-rata nilai 99,9 untuk NTP Tanaman Pangan dan 114,58 untuk NTP Perkebunan Rakyat.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur akan membahas mengenai bagaimana gambaran kondisi fasilitas dalam wilayah atau kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melihat kinerja dalam fokus ini, pada bagian-bagian sebelumnya telah dijabarkan mengenai data-data secara spesifik dari masing-masing capaian kinerja per urusan yang relevan dengan pembahasan fokus ini. Sehingga dalam analisis

hanya akan disampaikan mengenai hasil temuan dan bagaimana dampak kondisi ini bagi daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1) Infrastruktur

Penjelasan detail mengenai kondisi infrastruktur secara riil di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari masing-masing indikator yang berkaitan dengan kinerja umum, perhubungan, dan penataan ruang sebelumnya. Sehingga pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi secara umum mengenai kondisi infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin yang mana hal ini merupakan modal yang sangat penting bagi pergerakan ekonomi, kehidupan masyarakat sosial, dan penyelenggaraan berbagai hal di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pertama, jika dilihat dari kondisi infrastruktur jalan, dalam data sebelumnya dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi jalan baik di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2017-2023 adalah sebesar 80,55 persen, yang berarti kurang dari separuh dari total panjang jalan di daerah ini dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum optimal dan merata, sehingga dapat menghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

Kedua, dilihat dari ketersediaan infrastruktur penunjang pengembangan potensi wilayah. Sebagai daerah tujuan transmigrasi, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Untuk mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin membutuhkan infrastruktur penunjang moda pergerakan masyarakat yang memadai dan berkualitas,

baik untuk mengangkut orang maupun barang, baik antarwilayah maupun antar daerah.

Jumlah pelabuhan, bandara, terminal, dan dermaga yang terbatas dan tidak seimbang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2020, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah 14.477 km2 dan jumlah penduduk 688.970 jiwa, namun hanya memiliki 2 pelabuhan laut, 1 bandara udara, dan 1 terminal bus. Selain itu, Kabupaten Musi Banyuasin hanya memiliki beberapa dermaga yang tersebar di beberapa kecamatan, yang mungkin tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur penunjang moda pergerakan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum mencukupi dan merata, sehingga dapat menghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

Kemudian, kualitas pelabuhan, bandara, terminal, dan dermaga yang kurang memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan infrastruktur di Musi Banyuasin. Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2020, jumlah orang/barang melalui pelabuhan laut, bandara udara, dan terminal bus di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 62.265, yang berarti relatif rendah dibandingkan dengan potensi dan kebutuhan daerah ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fasilitas, layanan, dan keamanan yang kurang memadai, tarif yang tidak kompetitif, dan jadwal yang tidak teratur. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur penunjang moda pergerakan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum berkualitas dan memuaskan, sehingga dapat menghambat distribusi dan perdagangan barang dan jasa.

Salah satu indikator lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah infrastruktur, khususnya irigasi, jembatan, dan jalan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 56 daerah irigasi (DIR) yang tersebar di seluruh wilayahnya. Daerah irigasi ini berfungsi untuk mengairi lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Selain itu, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki 3.227 km panjang jembatan yang menghubungkan berbagai desa dan kecamatan. Jembatan ini memudahkan akses transportasi dan mobilitas masyarakat, serta membuka peluang ekonomi dan sosial. Jembatan ini juga berperan penting dalam mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di daerah aliran sungai.

Ketiga, dari infrastruktur sosial, jumlah sekolah, rumah sakit, dan sarana kebudayaan yang terbatas dan belum seimbang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2020, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah 14.477 km2 dan jumlah penduduk 688.970 jiwa, namun hanya memiliki 1.057 unit sekolah, 51 unit rumah sakit, dan 1.571 unit sarana kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur sosial di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum mencukupi dan merata, sehingga dapat menghambat akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kualitas sekolah, rumah sakit, dan sarana kebudayaan yang kurang memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat. Rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 1,63, yang berarti lebih rendah dari rasio ideal yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 2,54. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di

Kabupaten Musi Banyuasin masih belum optimal, sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat.

Terakhir, pada tahun 2020, hanya sekitar 2,57 persen rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin yang mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah, yang berarti masih banyak rumah tangga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Selain itu, hanya sekitar 57,57 persen rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak, seperti jamban sendiri, jamban bersama, atau jamban umum, yang berarti masih banyak rumah tangga yang menggunakan jamban sembarangan, seperti sungai, sawah, atau ladang. Selanjutnya, hanya sekitar 52,57 persen rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak, seperti air PDAM, air kemasan, atau air ledeng, yang berarti masih banyak rumah tangga yang menggunakan air yang tidak bersih, seperti sumur, sungai, atau hujan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur sosial di bidang perumahan, sanitasi, dan air bersih di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat menghambat kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

2) Potensi wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin menawarkan beragam potensi wilayah yang terkait dengan fasilitas wilayah dan infrastruktur, menciptakan peluang ekonomi yang beragam. Pertama, sektor perkebunan menjadi potensi utama dengan fokus pada komoditas kelapa sawit dan karet. Musi Banyuasin terus mengembangkan sektor ini, tidak hanya untuk minyak goreng tetapi juga untuk *industrial vegetable oil* (IVO), menciptakan nilai tambah dan diversifikasi produk. Pada potensi sektor perkebunan ini, potensi infrastruktur yang dapat dikembangkan dalam hal pembangunan pabrik pengolahan *industrial vegetable oil* (IVO) dengan teknologi modern

dan peningkatan serta perbaikan jaringan jalan dan transportasi untuk memudahkan distribusi hasil perkebunan.

Kedua, sektor pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar dengan lahan pertanian pangan seluas 81.059 hektar. Komoditas seperti padi, jagung, dan palawija lainnya menjadi andalan. Dengan program pengembangan lahan pertanian hingga tahun 2036, Musi Banyuasin menargetkan peningkatan lahan pertanian menjadi 125.062 hektar, menciptakan peluang untuk diversifikasi dan peningkatan produksi pangan. potensi infrastruktur yang dapat dikembangkan melalui pengembangan sistem irigasi modern untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Serta mendirikan pusat Penelitian Pertanian guna mendukung pembangunan penelitian pertanian untuk inovasi dan pengembangan teknologi pertanian

Ketiga, sektor peternakan di Musi Banyuasin didukung oleh keberadaan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas peternak lokal dan daya saing hasil ternak. Peningkatan SDM di sektor ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi peternakan. Melalui potensi wilayah ini dapat dikembangkan infrastruktur dalam pembangunan fasilitas pemrosesan ternak yang modern dan higienis. serta pusat pelatihan dengan upaya peningkatan fasilitas di Sekolah Peternakan Rakyat dan pembangunan pusat pelatihan peternakan.

Keempat, sektor perikanan di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar dengan tujuh sungai besar dan enam danau yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Peningkatan teknologi dan pendidikan SDM di bidang perikanan dapat membuka peluang baru dan meningkatkan produksi perikanan di wilayah ini. Potensi infrastruktur wilayah yang dapat

dikembangkan melalui pembangunan fasilitas pembenihan dan pusat penelitian ikan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan. Serta, pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Kelima, ekonomi kreatif menjadi pendekatan inovatif untuk memperkenalkan Musi Banyuasin ke pasar luar. Produk unggulan seperti Gambo Muba dalam kategori eco-fashion menunjukkan potensi besar dalam menarik perhatian pasar. Penggunaan pewarna alami dari limbah getah gambir juga menciptakan keunikan dan nilai tambah pada produk. Potensi ini dapat dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur di bidang pembangunan pusat desain dan produksi eco-fashion dengan fasilitas manufaktur yang ramah lingkungan, dan pengembangan pusat kreativitas untuk mendukung inovasi dan kolaborasi dalam industri eco-fashion.

Keenam, sektor pariwisata di Musi Banyuasin memiliki potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Meskipun tidak memiliki pantai atau gunung, keberadaan tujuh sungai besar dan enam danau menciptakan potensi wisata alam yang menarik. Dengan pengelolaan yang baik, potensi pariwisata di Kabupaten ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat meningkatkan perbaikan dan pengembangan jaringan jalan menuju destinasi wisata, serta pembangunan jalur setapak dan transportasi umum, serta pembangunan fasilitas akomodasi, restoran, dan tempat wisata. Secara keseluruhan, potensi wilayah ini menciptakan peluang besar bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk berkembang secara berkelanjutan, memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Perkembangan di berbagai sektor ini dapat memberikan

dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

3) Jasa Pendukung

Jasa pendukung merujuk pada sektor layanan yang memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi utama. Ini mencakup sektor seperti hotel, restoran, perbankan, dan sejenisnya. Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah dan kualitas layanan dalam sektor ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian daerah. Jumlah hotel mencerminkan potensi pariwisata dan investasi di bidang akomodasi, sementara restoran menunjukkan permintaan akan layanan makanan dan minuman. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan seperti perbankan menandakan kesehatan sektor keuangan dan tingkat investasi di daerah tersebut. Dengan memantau dan memperbaiki kualitas layanan dalam sektor ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah untuk pertumbuhan jangka panjang. Berikut tersaji data terkait jumlah hotel, rumah makan, dan perbankan yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.80. Jumlah Hotel di Kabupaten Musi Banyuasin

Jumlah Penyedia Akomodasi Tahun 2024			
Akomodasi	**Jumlah**	**Kamar**	**Tempat Tidur**
Hotel	18	559	745
Wisma	4	96	98
Home Stay	4	44	44
Penginapan	20	266	286
Losmen	-	-	-
Lainnya	2	30	30

Jumlah Penyedia Akomodasi Tahun 2024			
Akomodasi	**Jumlah**	**Kamar**	**Tempat Tidur**
Total	**48**	**995**	**1.203**
Jumlah Hotel Tahun 2020-2023			
2024	48		
2023	52		
2022	48		
2021	41		
2020	41		

Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka 2025 (diolah)

Tabel 2.81. Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Musi Banyuasin

	Tahun					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jumlah Rumah Makan/ Restoran	234	236	235	236	238	238

Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka 2024 (diolah)

Pentingnya jasa pendukung seperti jumlah hotel, restoran, dan perbankan dalam menggambarkan kondisi perekonomian di Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada indikasi aktivitas ekonomi sektor layanan. Pertumbuhan jumlah hotel dan restoran mencerminkan meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat. Berdasarkan tabel di atas, jumlah akomodasi di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 52 hotel dan penginapan dengan total kamar mencapai 1053 buah. Akan tetapi, jumlah akomodasi yang ada masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan luas daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan jumlah restoran mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tinggi yaitu 236 buah pada tahun 2022 menjadi 238 buah pada tahun 2023.

Tabel 2.82. Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2024

Kelompok Bank	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PERSERO	38	37	37	-	23	21	21
BPD	16	16	-	-	16	16	11
Bank Swasta	7	4	5	-	3	2	2
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-
Bank Umum Syariah	4	4	4	-	2	2	2
BUS-BPD	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**65**	**61**	**46**	**-**	**44**	**41**	**36**

Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka 2025 (diolah)

Sementara itu, keberadaan institusi keuangan yang solid menunjukkan basis finansial yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, berdasarkan data di atas, jumlah kantor perbankan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin masih cukup terbatas bahkan mengalami tren penurunan dari tahun 2018 sampai 2024. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap perekonomian lokal daerah ini. Jumlah dan kualitas layanan di sektor-sektor ini juga dapat mencerminkan daya tarik investasi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemantauan terus-menerus terhadap sektor-sektor ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan untuk merancang kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten Musi Banyuasin

4) Potensi Permintaan

Potensi permintaan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dianalisis melalui berbagai faktor ekonomi yang mencakup pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

berdasarkan pengeluaran khususnya pada poin pengeluaran konsumsi, pertumbuhan jumlah penduduk, dan indikator lainnya. Data yang tersedia menunjukkan tren positif dalam faktor-faktor ini, memberikan gambaran yang optimis tentang potensi permintaan di wilayah tersebut.

Pertama, pendapatan per kapita di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan, mencerminkan kemajuan ekonomi dan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Misalnya, berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita Kabupaten Musi Banyuasin meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2024 menjadi Rp142,14 juta. Selanjutnya, pengeluaran per kapita juga menunjukkan tren yang sama dengan pendapatan per kapita. Dengan meningkatnya pengeluaran per individu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi. Data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita pada tahun 2024 mencapai Rp 1.402.382 per kapita/bulan, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

PDRB berdasarkan pengeluaran, khususnya pada poin pengeluaran konsumsi, adalah indikator penting lainnya yang mencerminkan potensi permintaan di Kabupaten Musi Banyuasin. Peningkatan PDRB konsumsi menunjukkan adanya pertumbuhan dalam pengeluaran untuk barang dan jasa konsumsi. Data terbaru menunjukkan bahwa PDRB konsumsi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 mencapai nilai 92.666,87 juta rupiah, naik dari tahun sebelumnya.

Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat di Kabupaten Musi Banyuasin juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan potensi permintaan. Dengan populasi yang terus bertambah, terdapat peluang untuk pertumbuhan pasar yang lebih besar. Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun

2024 menjadi 736,9 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 18,81 persen (BPS, 2024) sehingga dapat menciptakan peluang permintaan baru untuk barang dan jasa. Dengan demikian, melalui analisis faktor-faktor ekonomi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi permintaan yang besar, menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peluang investasi yang menarik di berbagai sektor industri dan bisnis.

5) Transformasi Digital

Transformasi digital di Kabupaten Musi Banyuasin sedang digencarkan melalui berbagai inovasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Beberapa langkah konkret ini diambil meliputi peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transparansi dan efisiensi keuangan, aplikasi Srikandi versi 3 untuk tingkat desa/kelurahan, dan aplikasi SI PRAJA untuk mempermudah layanan administrasi. Dalam upaya mempercepat transformasi digital di sektor kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Musi Banyuasin berkoordinasi yang melibatkan Dinkes, RSUD Sekayu, RSUD Bayung Lencir, dan RSUD Sungai Lilin. Pertemuan ini bertujuan untuk memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan kesehatan.

Momentum Penting untuk Digitalisasi Rapat ini menjadi momentum strategis untuk memetakan kondisi eksisting aplikasi dan sistem di ketiga rumah sakit. Masing-masing RSUD mempresentasikan sistem dan alur kerja yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam aspek teknis, keamanan, dan regulasi. Diskusi yang intensif bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan integrasi TTE dan langkah-langkah penerapannya. Transformasi digital ini diharapkan menjadi

langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di Musi Banyuasin. Mari bersama-sama kita dukung perubahan ini untuk masa depan yang lebih baik menuju muba maju lebih cepat.

6) Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari berbagai indikator utama yang mencerminkan kekuatan dan kelemahan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,94% (y-on-y), yang menunjukkan tren pemulihan dan perkembangan positif setelah perlambatan akibat pandemi. Pertumbuhan ini masih sangat ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian, khususnya migas dan batubara, yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dari sisi inflasi, kondisi harga di Musi Banyuasin relatif terkendali berkat ketersediaan bahan pangan dari sektor pertanian lokal. Literasi digital agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di pasar kerja yang lebih luas. Di sisi lain, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur desa, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi strategi penting untuk menekan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, juga perlu terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Investasi di Musi Banyuasin sejauh ini masih didominasi oleh sektor migas, batubara, dan perkebunan kelapa sawit. Namun, dengan potensi investasi baru mulai terbuka di bidang energi terbarukan, industri pengolahan hasil perkebunan, hingga pengembangan produk unggulan

lokal seperti Kain Gambo Muba. Dengan posisi geografis yang strategis sebagai penghubung antar provinsi di Sumatera, Musi Banyuasin memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan regional. Faktor penentu daya tarik investasi ke depan akan bergantung pada stabilitas regulasi, pembangunan infrastruktur, serta komitmen terhadap praktik ekonomi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Musi Banyuasin berada dalam kondisi relatif baik, ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi positif, dengan strategi pembangunan yang menekankan pada diversifikasi sektor, investasi pada SDM, dan pengembangan infrastruktur, Musi Banyuasin berpeluang memperkuat stabilitas makro sekaligus meningkatkan daya saing dalam konteks domestik maupun global.

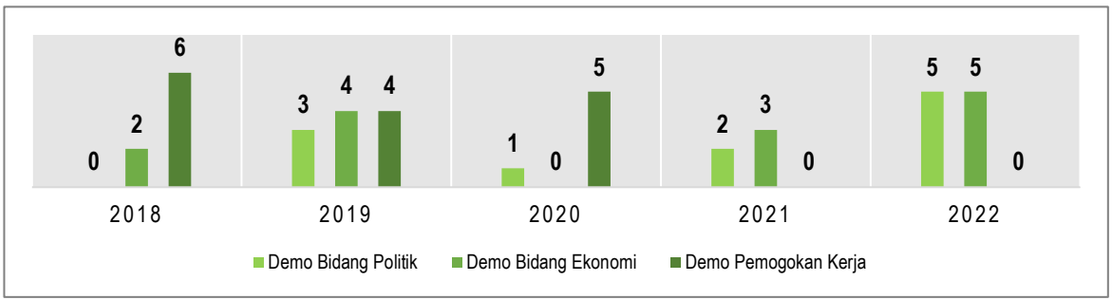
3. Fokus Iklim Investasi

Pada bagian ini dipaparkan analisis kinerja atas iklim berinvestasi di Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencakup jumlah demonstrasi, serta rata- rata lama perizinan dan jumlah peraturan daerah pendukung usaha

1) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi merupakan bentuk kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap suatu kebijakan atau hasil keputusan yang ada cenderung tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pada grafik di bawah terlihat bahwa jumlah demonstrasi di Kabupaten Musi Banyuasin rata-rata terjadi lebih dari 5 (lima) kali setiap tahunnya. Jumlah demonstrasi tertinggi yang pernah terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin ialah tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) demonstrasi, dengan 3 (tiga) kali demo di bidang politik dan masing-masing 4 (empat) kali demo terkait ekonomi dan

pemogokan kerja. Dari ketiga bidang tersebut yang paling banyak terjadi ialah demo terkait pemogokan kerja di tahun 2018 yakni sebanyak 6 (enam) kali.



Gambar 2.45. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

2) Rata-Rata Lama Perizinan dan Perda Pendukung Iklim Usaha

Analisis kinerja pada fokus iklim berinvestasi di Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat juga dilihat dari indikator rata-rata lama proses perizinan dan jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Pemberian izin terhadap suatu proses kegiatan atau proyek tertentu di suatu wilayah menjadi kegiatan administrasi yang mendukung tercapainya pelaksanaan investasi di suatu daerah. Kecepatan dan kemudahan dalam pemberian izin dapat mendukung iklim usaha dan investasi semakin meningkat. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa lama proses perizinan usaha atau investasi di Kabupaten Musi Banyuasin semakin cepat dari tahun 2017 ke tahun 2023. Di tahun 2017, lama waktu proses perizinan mencapai 4 hari, sedangkan di tahun 2023 semakin cepat menjadi 3 hari.

Iklim usaha dan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin juga didorong oleh adanya peraturan daerah (Perda) yang dibuat untuk mendukung kegiatan usaha. Sayangnya, jumlah perda yang mendukung iklim usaha dari tahun 2017 hingga 2023 mengalami penurunan. Pada

tahun 2017 dan 2018, jumlah Perda yang mendukung kegiatan usaha atau investasi sebanyak 3 Perda, sedangkan di tahun 2023 hanya ada 1 Perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.83. Indikator yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lama Proses Perizinan	4 Hari	4 Hari	-	-	-	3 Hari	3 Hari	3 Hari
2.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3 Perda	3 Perda	-	-	-	1 Perda	1 Perda	1 Perda

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

3) Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global Kabupaten Musi Banyuasin mencerminkan bagaimana dinamika ekonomi lokal yang ditopang oleh sektor unggulan, konsumsi rumah tangga, dan peran pemerintah berinteraksi dengan peluang pasar internasional melalui produk unggulan daerah, posisi strategis wilayah, serta konektivitas perdagangan.

a. Integrasi Ekonomi Domestik

- Struktur PDRB dan Sektor Unggulan**.** Didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB Muba menunjukkan peran besar sumber daya alam sebagai motor utama ekonomi. Kondisi ini sekaligus mencerminkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global, khususnya batubara dan migas. Untuk menjaga keberlanjutan, pemerintah daerah perlu mendorong hilirisasi industri pertambangan agar nilai tambah tetap berada di daerah, serta

membuka ruang bagi pengembangan sektor agribisnis (sawit, karet, perikanan) yang lebih stabil.

- Konsumsi Rumah Tangga sebagai Penopang Ekonomi. Didominasi oleh konsumsi rumah tangga dalam struktur PDRB menandakan bahwa aktivitas ekonomi lokal masih bertumpu pada daya beli masyarakat. Hal ini positif karena mencerminkan adanya pasar domestik yang kuat.
- Peran Pemerintah dalam Perekonomian. Pertumbuhan signifikan pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memperlihatkan bahwa pemerintah masih menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai basis untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, dan kebijakan.

b. Integrasi Ekonomi Global

- Produk Unggulan Daerah: Kain Gambo Muba. Kain Gambo memiliki potensi besar untuk masuk pasar global, terutama dalam niche market produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tren global yang semakin mengutamakan *green economy* dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Kain Gambo sebagai produk etis, ekologis, dan berbasis kearifan lokal. Jika dikombinasikan dengan strategi digital marketing produk ini dapat meningkatkan citra Musi Banyuasin di pasar global.
- Lokasi Strategis sebagai Hub Regional**.** Muba berada di jalur strategis yang menghubungkan provinsi-provinsi di Sumatera. Posisi ini dapat dimaksimalkan melalui pembangunan infrastruktur konektivitas darat, sungai, dan pelabuhan. Dengan demikian, Muba tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pusat distribusi barang dan jasa yang memiliki nilai tambah.

- Peluang Perdagangan dan Investasi. Musi Banyuasin dapat memanfaatkan integrasi regional ASEAN dan kerja sama internasional lain untuk menarik investasi, khususnya di sektor industri pengolahan, energi terbarukan, dan pariwisata berbasis budaya dan alam. Dengan adanya potensi besar energi baru terbarukan, seperti bioenergi dari kelapa sawit, Muba juga berpeluang masuk ke dalam rantai pasok global energi hijau.

c. Tantangan dan Peluang Strategis

- Infrastruktur sebagai Fondasi Integrasi. Akses jalan, pelabuhan sungai, dan jaringan logistik mulai ditingkatkan dengan percepatan mobilisasi dengan adanya pembangunan jalan tol.

- Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan. Integrasi global menuntut kepatuhan terhadap standar lingkungan. Muba perlu memperhatikan praktik berkelanjutan, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan. Penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru dapat menjadi daya tarik bagi investasi berstandar internasional.

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Perkotaan, terutama Sekayu sebagai ibu kota, berperan sebagai pusat pelayanan dan administrasi, serta pusat pertumbuhan ekonomi dengan berbagai fasilitas dan kegiatan. Sementara itu, wilayah perdesaan, yang kaya akan sumber daya alam seperti perkebunan karet dan potensi pertambangan, menjadi basis ekonomi yang penting dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat pertumbuhan.

Integrasi antara perkotaan dan perdesaan di Musi Banyuasin menciptakan pola pertumbuhan yang berimbang. Perkotaan menjadi pusat distribusi, pelayanan, dan pasar, sedangkan perdesaan menjadi pusat produksi dan konservasi. Sinergi ini berpotensi memperkuat daya saing daerah, mengurangi ketimpangan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang merata di seluruh wilayah kabupaten.

Hal ini harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan langkah penting untuk memahami kualitas tenaga kerja dan potensi pembangunan di suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, analisis ini dapat dilakukan dengan melihat dua indikator utama: rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio ketergantungan**.**

1) Rasio Lulusan S1/S2/S3 (Kualitas Tenaga Kerja)

Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peran signifikan dalam mengurangi disparitas kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Arsitektur persebaran jumlah pekerja di suatu daerah menjadi indikator utama terkait lapangan pekerjaan yang menjadi fokus pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Secara umum, status pekerjaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal mencakup berbagai status, seperti pekerja berusaha dengan dukungan buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sementara pekerjaan informal mencakup aspek lain. Namun, Kabupaten Musi Banyuasin tidak memiliki data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 dari tahun 2018 hingga 2022, sehingga bagian ini tidak memiliki penjelasan khusus.

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau yang dikenal sebagai rasio beban tanggungan adalah angka yang menggambarkan perbandingan antara

jumlah penduduk usia non-produktif (yang terdiri dari penduduk dibawah 15 tahun atau yang disebut penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun ke atas yang merupakan penduduk tua) dengan jumlah penduduk usia produktif (dikisaran usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan berfungsi sebagai indikator kasar yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi suatu wilayah, baik itu kabupaten, provinsi, atau negara.

Pada tahun 2018, rasio ketergantungan Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 50,79 persen, artinya dari setiap 100 orang penduduk usia produktif, terdapat tanggungan untuk 50 orang penduduk usia non-produktif. Di Kabupaten Musi Banyuasin, rasio ketergantungan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 dengan nilai berturut-turut sebesar 50,71 persen, 50,39 persen. Namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 50,52 persen dan 50,69 persen. Pada tahun 2023 kembali turun sebesar 50,34 persen.

Tabel 2.84. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia <15 Thn	56.451	57.022	51.379	51.059	50.834	198.918
2	Jumlah Penduduk Usia >64 Thn	18.421	19.471	18.439	19.070	19.851	37.920
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1&2)	74.872	76.493	69.818	70.129	70.685	236.838
4	Jumlah Penduduk Usia 15 S/D 64	422.224	428.421	413.989	416.603	420.158	470.452

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Rasio Ketergantungan (%)	50,79	50,71	50,39	50,52	50,69	50,34

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2024

Sedangkan menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 mencatat prestasi luar biasa dengan penurunan signifikan dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, TPT di Musi Banyuasin turun dari 2,58% pada tahun 2023 menjadi 2,13% pada tahun 2024. Capaian ini menjadikan Musi Banyuasin sebagai salah satu daerah dengan angka pengangguran terendah dan penurunan TPT tertinggi di Sumatera Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun kontribusinya besar terhadap PDRB, sektor ini bersifat padat modal sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Di sisi lain, sebagian besar tenaga kerja masih bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan kegiatan informal. Pekerjaan di sektor ini cenderung berproduktivitas rendah, berupah minim, dan tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai. Walaupun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Muba relatif rendah, persoalan *underemployment* dan informalitas masih cukup besar, sehingga kualitas lapangan kerja menjadi tantangan utama. Kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian

keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Lulusan pendidikan formal maupun vokasi belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri lokal, khususnya dalam bidang pengolahan hasil pertanian, energi terbarukan, maupun jasa logistik. Hal ini membuat banyak kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa optimal diisi oleh tenaga kerja lokal, sementara investor membutuhkan pekerja dengan kompetensi spesifik. Secara keseluruhan, kendala ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada dominasi sektor padat modal, rendahnya produktivitas pekerja, *mismatch* keterampilan, dan keterbatasan sektor alternatif pencipta kerja. Jika tidak diatasi, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi ekonomi, penguatan pendidikan vokasi, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses infrastruktur dan pembiayaan agar pertumbuhan ekonomi Muba dapat lebih menyerap tenaga kerja dan merata manfaatnya. Adapun faktor Pendukung Penurunan TPT yang menjadi beberapa faktor kunci yang mendukung penurunan TPT di Musi Banyuasin antara lain:

1) Program Pelatihan oleh *Muba Vocational Center* (MVC). Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui MVC terus berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dengan berbagai program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri. Bidang pelatihan mencakup teknologi, teknik, dan kewirausahaan, yang semuanya membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar.
2) Kenaikan Harga Kelapa Sawit. Kenaikan harga komoditas kelapa sawit telah mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perkebunan dan perdagangan, yang berdampak langsung pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Musi Banyuasin, sebagai salah satu

penghasil kelapa sawit utama, merasakan dampak positif dari pertumbuhan ini.

3) *Event Muba Expo* dan UMKM. Acara seperti *Muba Expo* dan *event* UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan perdagangan lokal.

2.2. Gambaran Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin diatur oleh berbagai peraturan dan regulasi yang bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana publik. Pengertian pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup berbagai aspek, antara lain perencanaan keuangan yang meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup estimasi pendapatan, perencanaan belanja, dan pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan daerah. Pelaksanaan keuangan yang meliputi pelaksanaan anggaran sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk pengelolaan kas daerah, pengeluaran anggaran, dan pencatatan transaksi keuangan. Penatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan anggaran dan penggunaan keuangan daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban keuangan yang meliputi penyusunan laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, dan neraca daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa aturan dan regulasi yang menjadi pedoman utama, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah secara mandiri, namun tetap harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga menjadi acuan penting. Undang-undang ini mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) diatur dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Selain

itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juga menjadi pedoman penting. Peraturan ini mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah dengan kebijakan nasional, serta membantu untuk mendiagnosis kendala pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi hambatan dari sisi pembiayaan. Struktur APBD menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada dana transfer pemerintah pusat. Ketika penyaluran transfer terlambat atau tidak sesuai kebutuhan, pelaksanaan program pembangunan ikut terhambat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih terbatas dan belum mampu menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan. Potensi pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya tergali, sehingga ruang fiskal untuk belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi sempit.

Selain itu, kapasitas dalam menyiapkan proyek yang layak secara finansial masih rendah. Hal ini membuat pemerintah daerah sulit memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif, seperti kemitraan dengan swasta atau instrumen kreatif lainnya.

2. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun kontribusinya besar terhadap PDRB, sektor ini bersifat padat modal sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan tenaga kerja lokal.

Di sisi lain, sebagian besar tenaga kerja masih bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan kegiatan informal. Pekerjaan di sektor ini cenderung berproduktivitas rendah, berupah minim, dan tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai. Walaupun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Muba relatif rendah, persoalan *underemployment* dan informalitas masih cukup besar, sehingga kualitas lapangan kerja menjadi tantangan utama.

Kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Lulusan pendidikan formal maupun vokasi belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri lokal, khususnya dalam bidang pengolahan hasil pertanian, energi terbarukan, maupun jasa logistik. Hal ini membuat banyak kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa optimal diisi oleh tenaga kerja lokal, sementara investor membutuhkan pekerja dengan kompetensi spesifik.

Secara keseluruhan, kendala ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada dominasi sektor padat modal, rendahnya produktivitas pekerja, *mismatch* keterampilan, dan keterbatasan sektor alternatif pencipta kerja. Jika tidak diatasi, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan strategi

diversifikasi ekonomi, penguatan pendidikan vokasi, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses infrastruktur dan pembiayaan agar pertumbuhan ekonomi Muba dapat lebih menyerap tenaga kerja dan merata manfaatnya.

3. Pendidikan

Aspek kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama yang mencakup berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial. Dengan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 menjadikan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan inklusivitas masyarakat sebagai fondasi pembangunan daerah.

Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin menghadapi sejumlah tantangan utama, terutama terkait pemerataan akses, kualitas guru, dan sarana-prasarana. Beberapa kecamatan memiliki jumlah sekolah terbatas dibandingkan luas wilayahnya, sehingga anak-anak di daerah terpencil sering kesulitan menjangkau fasilitas pendidikan. Selain itu, penyebaran guru masih belum merata, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sementara fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet di banyak sekolah masih terbatas.

Meski demikian, terdapat peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cukup aktif mendorong peningkatan mutu pendidikan dengan program pelatihan guru, beasiswa untuk mahasiswa asli daerah, dan pengembangan budaya literasi. Ketersediaan data pendidikan dalam sistem *Satu Data Musi Banyuasin* juga membuka ruang untuk perencanaan yang lebih berbasis bukti. Dengan memanfaatkan kekuatan ini, Musi Banyuasin berpeluang memperbaiki kualitas pendidikan sekaligus mempersempit kesenjangan antarwilayah.

4. Kesehatan

Dari diagnosis kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari kondisi pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta capaian indikator kesehatan masyarakat. Dengan jumlah penduduk sekitar 622 ribu jiwa yang tersebar di 15 kecamatan, daerah ini memiliki 29 puskesmas dan beberapa rumah sakit umum daerah, meski kapasitas layanan spesialis masih terbatas. Jumlah tenaga kesehatan relatif cukup, terutama perawat dan bidan, namun distribusi dokter umum dan gigi belum merata di seluruh wilayah.

Meski demikian, masih terdapat tantangan signifikan. Beberapa kecamatan mengalami kekurangan tenaga dokter, sementara kapasitas rumah sakit dalam layanan spesialis perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada rujukan ke luar daerah. Selain itu, kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes semakin meningkat, membutuhkan perhatian khusus, untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

2. Infrastruktur

Jarak antara Sekayu dan Bayung Lencir yang menjadi salah satu faktor penting yang mencerminkan kelemahan fisik dan keterisolasian wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun secara administratif kedua wilayah ini berada dalam satu kabupaten, kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang terbatas menjadikan hubungan antarwilayah ini tidak efisien. Jalan penghubung yang belum seluruhnya beraspal, ditambah dengan kerusakan akibat musim hujan, mengakibatkan waktu tempuh yang lama dan risiko kecelakaan yang tinggi. Hal ini berimplikasi langsung pada aksesibilitas masyarakat terhadap pusat pemerintahan, layanan publik, dan pasar ekonomi.

Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan salah satu wilayah dengan luas geografis yang besar di Sumatera Selatan. Namun, luasnya wilayah ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Ketimpangan antara wilayah pusat, seperti Sekayu, dengan daerah pinggiran seperti Bayung Lencir masih sangat terasa. Wilayah-wilayah di bagian barat dan utara kabupaten ini cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ekonomi. Ketimpangan kewilayahan inilah yang menjadi salah satu akar kemiskinan struktural di Musi Banyuasin, dimana masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan publik mengalami hambatan serius dalam meningkatkan taraf hidupnya.

3. Regulasi dan Institusi

Dengan percepatan birokrasi maka diperlukan transformasi digital di Kabupaten Musi Banyuasin sedang digencarkan melalui berbagai inovasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Beberapa langkah konkret ini diambil meliputi peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transparansi dan efisiensi keuangan, aplikasi Srikandi versi 3 untuk tingkat desa/kelurahan, dan aplikasi SI PRAJA untuk mempermudah layanan administrasi.

4. Fiskal Daerah

Fiskal daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat bergantung pada dana pusat, khususnya Dana Bagi Hasil Migas. Posisi Muba sebagai daerah penghasil minyak memang memberi kontribusi signifikan, namun ketergantungan ini membuat APBD rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Dari sisi belanja, struktur anggaran masih didominasi belanja operasional, terutama untuk pegawai dan kebutuhan rutin. Kondisi ini membatasi ruang fiskal untuk belanja modal dan pembangunan

strategis jangka panjang. Padahal, investasi pada infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Tantangan utama fiskal Muba adalah bagaimana memperkuat basis PAD melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan efisiensi belanja, serta pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel. Dengan mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan memperluas sumber pendapatan daerah, Muba dapat membangun ketahanan fiskal yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

5. Geografis

Pada sektor kelautan dan perikanan, masih banyak ditemukan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan alat tangkap ilegal yang mengancam keseimbangan ekosistem sungai dan perairan. Selain itu, kebijakan yang diterapkan di sektor ini belum merata, yang menyebabkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di wilayah sungai. Pengelolaan yang kurang optimal juga dipengaruhi oleh tantangan lingkungan dan kondisi geografis perairan yang luas, yang menyulitkan pengawasan dan pemantauan. Masalah lainnya adalah pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan, serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam sektor ini.

6. Daya saing ekonomi

Daya saing ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin ditopang oleh potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama perkebunan kelapa sawit, karet, hasil hutan, serta cadangan energi. Pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen pada tata kelola dan inovasi pembangunan berkelanjutan, terbukti dari capaian indeks daya saing daerah yang cukup

tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka terus menurun, menandakan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan kesempatan ekonomi.

Namun, masih terdapat sejumlah kelemahan yang menghambat daya saing. Muba masih bergantung pada komoditas mentah tanpa hilirisasi yang memadai, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global. Keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah membuat akses distribusi, pasar, dan investasi belum optimal. Selain itu, kesenjangan pembangunan antarwilayah serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata juga menjadi tantangan. Di masa depan, peluang besar terbuka bagi Muba untuk memperkuat hilirisasi industri, mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif, serta menarik investasi berbasis keberlanjutan. Penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan promosi produk unggulan lokal akan menjadi kunci memperluas pasar. Meski demikian, ancaman berupa ketidakpastian harga komoditas, kerusakan lingkungan, serta persaingan antar daerah harus diantisipasi dengan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk itu maka pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah melalui realisasi program-program yang dicanangkan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber penerimaan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin maka akan dilakukan analisis terhadap kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan

masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Analisis ini diperlukan dalam rangka menerjemahkan Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Kepala Daerah ke dalam perencanaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya alokasi anggaran tersebut akan diturunkan ke dalam dokumen Renja Perangkat Daerah untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan skala prioritas dan target capaiannya.

2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Keuangan Daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang berkaitan dengan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ini melibatkan semua bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, mencakup aktivitas yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. APBD, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk merinci secara kuantitatif tujuan dan sasaran pembangunan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Struktur APBD disusun untuk mencerminkan besarnya pendanaan yang diperlukan guna mencapai berbagai tujuan, tugas, dan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat dalam satu tahun anggaran. Analisis terhadap APBD dilakukan untuk menilai kapasitas keuangan daerah dalam mendanai program pembangunan. APBD juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komponen utama APBD meliputi Penerimaan Daerah, yang terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selain itu, APBD mencakup Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Komponen lainnya adalah Pembiayaan Daerah, yang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu dianalisis berdasarkan penerimaan daerah, yang mencakup Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, serta pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran penting mengenai pencapaian target pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran tahunan. APBD yang disusun bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah, yang meliputi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Proses realisasi APBD menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dan menggunakan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan. Jika realisasi pendapatan lebih tinggi dari target, ini menunjukkan keberhasilan dalam memaksimalkan potensi sumber daya daerah, sementara bila belanja tidak terealisasi sepenuhnya, bisa mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran atau keterbatasan dalam pelaksanaan program-program yang direncanakan. Sebaliknya, jika terjadi defisit atau ketidakmampuan dalam merealisasikan belanja, ini dapat menjadi sinyal untuk evaluasi kebijakan serta perbaikan

pengelolaan anggaran di tahun-tahun berikutnya. Adapun realisasi APBD Kab. Muba Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.85. Realisasi APBD Kabupaten Musi Banyuasin

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	**PENDAPATAN**	3.540.659.694.225,82	3.510.691.709.632,75	3.221.260.445.686,84	3.807.807.962.928,72	3.712.349.876.045,60
	A. Pendapatan Asli Daerah	353.989.261.395,82	377.346.398.574,74	352.504.682.841,06	369.450.573.693,72	352.305.467.400,20
	B. Pendapatan Transfer	3.053.945.103.250,00	3.025.394.578.711,01	2.758.120.796.365,78	3.436.298.411.805,00	3.360.044.408.645,40
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	132.725.329.580,00	107.950.732.347,00	110.634.966.480,00	2.058.977.430,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	3.540.659.694.225,82	3.510.691.709.632,75	3.221.260.445.686,84	3.807.807.962.928,72	3.712.349.876.045,60
2	**BELANJA**	3.377.578.658.990,74	3.836.457.605.910,48	3.259.813.882.099,83	3.623.039.910.364,02	3.751.112.025.949,13
	A. Belanja Operasi	2.130.974.496.837,73	2.271.258.011.014,17	2.173.313.722.360,86	2.368.483.329.746,10	2.447.310.375.659,95
	B. Belanja Modal	790.704.925.338,91	1.097.177.454.587,31	619.786.347.959,97	756.123.871.417,92	799.922.267.073,18
	C. Belanja Tak Terduga	1.355.789.200,00	1.018.853.800,00	2.347.728.430,00	21.000.000,00	2.155.951.800,00
	D. Belanja Transfer	454.543.447.614,10	467.003.286.509,00	464.366.083.349,00	498.411.709.200,00	501.723.431.416,00
	JUMLAH BELANJA	3.377.578.658.990,74	3.836.457.605.910,48	3.259.813.882.099,83	3.623.039.910.364,02	3.751.112.025.949,13
	SURPLUS/DEFISIT	163.081.035.235,08	(325.765.896.277,73)	(38.553.436.412,99)	184.768.052.564,70	(38.762.149.903,53)
3	**PEMBIAYAAN**	870.970.784.728,40	1.041.126.592.453,48	486.755.332.061,75	190.027.102.126,88	30.032.416.867,90
	A. Penerimaan Pembiayaan	691.747.536.094,40	819.314.146.595,48	294.340.224.015,75	62.401.787.597,88	17.757.416.867,90
	B. Pengeluaran Pembiayaan	179.223.248.634,00	221.812.445.858,00	192.415.108.046,00	127.625.314.529,00	12.275.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	870.970.784.728,40	1.041.126.592.453,48	486.755.332.061,75	190.027.102.126,88	30.032.416.867,90
	PEMBIAYAAN NETTO	512.524.287.460,40	597.501.700.737,48	101.925.115.969,75	(65.223.526.931,12)	5.482.416.867,90
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	675.605.322.695,48	271.735.804.459,75	63.371.679.556,76	119.544.525.633,58	(33.279.733.035,63)

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

1) Perkembangan Pendapatan Daerah

Penerimaan Daerah dalam APBD terdiri atas pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Dalam sub bab ini akan dianalisis kinerja realisasi penerimaan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapat informasi tentang kinerja pemerintah dalam mengelola penerimaan sehingga dalam proses membaca potensi penerimaan daerah ke depan juga akan komprehensif. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah dikelompokkan atas tiga komponen pendapatan diantaranya: a) Pendapatan Asli Daerah; b) Pendapatan Transfer; dan c) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel berikut.

Tabel 2.86. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Musi Banyuasin selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	353.989.261.395,82	377.346.398.574,74	352.504.682.841,06	369.450.573.693,72	352.305.467.400,20	-0,12%
	B. Pendapatan Transfer	3.053.945.103.250,00	3.025.394.578.711,01	2.758.120.796.365,78	3.436.298.411.805,00	3.360.044.408.645,40	2,42%
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	132.725.329.580,00	107.950.732.347,00	110.634.966.480,00	2.058.977.430,00	-	-75,06%
	JUMLAH PENDAPATAN	3.540.659.694.225,82	3.510.691.709.632,75	3.221.260.445.686,84	3.807.807.962.928,72	3.712.349.876.045,60	1,19%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data di atas, selama periode 2020 hingga 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 353.989.261.396,82. PAD sempat meningkat pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 24.841.715.733. Tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan dan 2024 kembali terjadi penurunan. Secara keseluruhan, PAD mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,12%, yang menunjukkan perlunya penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, Pendapatan Transfer menunjukkan tren yang relatif stabil dan positif. Pada tahun 2020, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp. 3.059.345.103.250,00 dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 3.360.044.408.645,40 di tahun 2024. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,42%, kategori ini tetap menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah, mencerminkan keberhasilan dalam mengakses dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari Rp. 132.725.329.580,00 di tahun 2020, angka ini terus menurun hingga hanya Rp2.058.977.430,00 di tahun 2023, dan tidak tercatat sama sekali pada tahun 2024. Penurunan ini tercermin dalam rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -75,06%, yang menandakan perlunya evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan sah lainnya, termasuk potensi retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan dari kerja sama antar daerah.

Secara keseluruhan, Jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin meningkat dari Rp. 3.540.659.694.225,82 di tahun 2020 menjadi Rp. 3.712.349.876.045,60 di tahun 2024, dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 1,19%. Meskipun terdapat fluktuasi pada komponen PAD dan pendapatan lain-lain, tren total pendapatan menunjukkan arah yang positif dan relatif stabil. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil menjaga pertumbuhan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan transfer. Namun, perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan PAD dan pemulihan kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah, agar struktur pendapatan menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan di masa mendatang.

2) Perkembangan Belanja Daerah

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah, bersama penerimaan pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Berikut analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Musi Banyuasin dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024.

a. Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah

adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Sama halnya dengan pertumbuhan pendapatan yang fluktuatif, jika dilihat pertumbuhan per jenis belanja nilai rata-rata, jika dilihat per tahunnya pertumbuhannya juga mengalami fluktuatif. Oleh karena itu, dengan tetap berpegang pada prinsip konservatif, perlu adanya penyesuaian nilai rata-rata pertumbuhan pada saat akan melakukan perhitungan proyeksi anggaran belanja daerah. Di masa mendatang perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, terutama oleh Bappeda dan BPKAD, untuk memantau kinerja keuangan dan anggaran Pemerintah Kabupaten agar tidak terlalu fluktuatif sehingga dapat memberikan informasi peramalan untuk perencanaan keuangan di masa mendatang dengan lebih baik. Begitu juga, sama dengan yang dilakukan pada proyeksi pendapatan yang perlu juga menjadi perhatian oleh BPPRD, perhitungan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Tahun 2020. Apalagi, adanya penyesuaian akibat dampak wabah Covid-19 sesuai dengan

kebijakan dari Pemerintah Pusat. Untuk melihat gambaran kinerja belanja daerah, disajikan pada Tabel 2.86.

Tabel 2.87. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2019-2023

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	2.130.974.496.837,73	2.271.258.011.014,17	2.173.313.722.360,86	2.368.483.329.746,10	2.447.310.375.659,95	3,52%
	B. Belanja Modal	790.704.925.338,91	1.097.177.454.587,31	619.786.347.959,97	756.123.871.417,92	799.922.267.073,18	0,29%
	C. Belanja Tak Terduga	1.355.789.200,00	1.018.853.800,00	2.347.728.430,00	21.000.000,00	2.155.951.800,00	12,30 %
	D. Belanja Transfer	454.543.447.614,10	467.003.286.509,00	464.366.083.349,00	498.411.709.200,00	501.723.431.416,00	2,50%
	JUMLAH BELANJA	3.377.578.658.990,74	3.836.457.605.910,48	3.259.813.882.099,83	3.623.039.910.364,02	3.751.112.025.949,13	2,66%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Tabel 2.86, selama periode 2020 hingga 2024, belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami dinamika yang mencerminkan penyesuaian fiskal dan arah kebijakan pembangunan daerah. Komponen utama dalam struktur belanja, yaitu Belanja Operasi, menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,52%. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan efisiensi operasional, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Belanja Modal, yang mencerminkan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan aset tetap, mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,29%. Fluktuasi tajam terjadi pada tahun 2022, di mana alokasi belanja modal menurun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun, tren pemulihan pada tahun 2023 dan 2024

menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk tetap menjaga kapasitas pembangunan fisik daerah.

Belanja Tak Terduga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 12,30%. Meskipun nominalnya relatif kecil dan sempat menurun drastis pada tahun 2023, lonjakan pada tahun 2022 dan pemulihan di 2024 menunjukkan fleksibilitas fiskal dalam menghadapi kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Belanja Transfer menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,50% selama lima tahun terakhir. Stabilitas dan peningkatan alokasi transfer ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendanaan bagi pemerintah desa dan lembaga lain yang menerima dana transfer. Secara keseluruhan, Jumlah Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meningkat dari Rp. 3.377.578.658.990,74 di tahun 2020 menjadi Rp. 3.751.112.025.949,13 di tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,66%. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, tren belanja daerah menunjukkan arah yang stabil dan adaptif terhadap tantangan fiskal.

Dari segi kebijakan alokasi anggaran, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap memprioritaskan Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagai dua komponen utama dalam struktur belanja. Proporsi kedua jenis belanja ini secara konsisten menempati porsi terbesar, mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan ekonomi daerah. Ke depan, diharapkan alokasi terhadap kedua jenis belanja ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan, sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran daerah. Tabel berikut merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2.88. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2019-2023

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	691.747.536.094,40	819.314.146.595,48	294.340.224.015,75	62.401.787.597,88	17.757.416.867,90	-59,97%
	B. Pengeluaran Pembiayaan	179.223.248.634,00	221.812.445.858,00	192.415.108.046,00	127.625.314.529,00	12.275.000.000,00	-48,84%
	JUMLAH PEMBIAYAAN	870.970.784.728,40	1.041.126.592.453,48	486.755.332.061,75	190.027.102.126,88	30.032.416.867,90	-56,91%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Dari tabel di atas memperlihatkan, selama periode 2020 hingga 2024, tren pembiayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan penyesuaian fiskal yang signifikan menuju arah yang lebih efisien dan terkendali. Pada tahun 2020, total pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp. 870.970.784.728,40, terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 691.747.536.094,40 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp179.223.248.634,00. Nilai ini mengalami penurunan bertahap hingga pada tahun 2024 total pembiayaan hanya sebesar Rp. 30.032.416.867,90, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 17.757.416.867,90 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 12.275.000.000,00. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah selama lima tahun terakhir tercatat sebesar -56,91 persen. Penurunan paling tajam

terjadi pada penerimaan pembiayaan, yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -59,97 persen. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -48,84 persen. Meskipun tren pembiayaan menunjukkan penurunan, hal ini mencerminkan arah kebijakan fiskal yang lebih sehat dan mandiri. Penurunan penerimaan pembiayaan menunjukkan berkurangnya ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal, sementara penurunan pengeluaran pembiayaan mengindikasikan penyelesaian kewajiban pembiayaan dan penguatan efisiensi fiskal. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dinilai berhasil menjaga disiplin anggaran dan mengarahkan sumber daya secara lebih selektif untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah salah satu laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan ini sangat krusial bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang mencakup aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut disusun. Informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas memberikan wawasan kepada manajemen pemerintahan daerah tentang likuiditas keuangan serta fleksibilitas keuangan. Penyajian informasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai bentuk akuntabilitas atas kekayaan daerah yang

dikelola. Berikut ini tabel perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Tabel 2.89. Neraca Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**ASET**	8.136.627.143.180,89	7.910.166.085.202,40	1.658.355.134.237,77	7.607.439.799.219,06	8.156.859.734.116,66
	A. Aset Lancar	1.084.016.216.891,04	394.702.801.363,57	244.842.707.785,53	265.637.145.266,82	750.273.153.101,22
	B. Investasi Jangka Panjang	604.375.681.486,63	647.632.470.042,35	709.805.700.565,24	719.851.501.784,85	703.954.597.087,50
	C. Aset Tetap	6.228.463.863.931,18	6.724.408.472.599,27	6.360.617.108,18	6.075.517.949.934,17	6.386.355.238.402,99
	D. Aset Lainnya	219.771.380.872,04	143.422.341.197,21	697.346.108.778,82	546.433.202.233,22	316.276.745.524,95
	JUMLAH ASET	8.136.627.143.180,89	7.910.166.085.202,40	1.658.355.134.237,77	7.607.439.799.219,06	8.156.859.734.116,66
2	**KEWAJIBAN**	240.777.874.175,32	332.199.079.157	133.292.609.340,23	57.276.230.240,46	567.066.086.582,40
	A. Kewajiban Jangka Pendek	144.911.528.129,32	332.199.079.157	133.292.609.340,23	57.276.230.240,46	488.266.570.677,40
	B. Kewajiban Jangka Panjang	95.866.346.046	-	-	-	78.799.515.905
	JUMLAH KEWAJIBAN	240.777.874.175,32	332.199.079.157	133.292.609.340,23	57.276.230.240,46	567.066.086.582,40
3	**EKUITAS**	7.895.849.269.005,57	7.519.589.848.651,72	7.879.319.015.972,47	7.686.534.601.891,04	7.725.119.912.124,70
	A. Ekuitas	7.895.849.269.005,57	7.519.589.848.651,72	7.879.319.015.972,47	7.686.534.601.891,04	7.725.119.912.124,70
	JUMLAH EKUITAS	7.895.849.269.005,57	7.519.589.848.651,72	7.879.319.015.972,47	7.686.534.601.891,04	7.725.119.912.124,70
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.136.627.143.180,89	7.851.788.927.808,72	8.012.611.625.312,70	7.743.810.832.131,50	8.292.185.998.707,10

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Aset-aset tersebut terdiri dari berbagai jenis, termasuk aset lancar seperti kas, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka. Selain itu, terdapat pula investasi jangka panjang, baik yang bersifat non permanen maupun permanen, serta aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Dana cadangan dan aset lainnya seperti tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, dan aset lainnya juga merupakan bagian penting dari total aset. Semua aset ini digunakan untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan. Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, mencerminkan utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban ini biasanya timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa mendatang. Informasi mengenai kewajiban memberikan gambaran tentang likuiditas keuangan dan fleksibilitas keuangan pemerintah daerah.

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), keuangan daerah dikelola dengan tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah setiap tahun dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan analisis lebih lanjut atas kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah diterapkan selama 5 tahun terakhir dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut ini akan dijelaskan analisis kedua kebijakan tersebut.

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran yang dimaksud berkaitan dengan realisasi dan proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk memahami seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk operasional aparatur, serta kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih bijaksana dan hemat. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017 hingga 2020. Data ini akan memaparkan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah, dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi alokasi anggaran tersebut selama beberapa tahun terakhir. Tabel berikut juga akan memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan di masa mendatang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan belanja aparatur yang lebih baik.

Tabel 2.90. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama 2017 – 2020

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**731.960.850.151**	**747.101.665.726**	**788.191.890.874**	**805.848.433.633**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	467.330.761.910	581.741.206.972	601.108.905.251	589.038.146.494
2	Belanja Tambahan Penghasilan	258.141.722.764	156.636.538.242	178.450.805.623	208.282.657.139
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.891.902.854	8.533.943.132	8.632.180.000	8.527.630.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	596.462.623	189.977.380	-	-
B.	**Belanja Langsung**	**1.002.350.621.405**	**1.184.016.429.031**	**1.453.008.858.780**	**1.105.629.015.483**
1	Belanja Honorarium PNS	41.590.635.550	40.189.465.000	38.946.430.800	16.642.942.683
2	Belanja Uang Lembur	10.585.584.602	10.696.636.800	11.923.654.850	11.148.086.000
3	Belanja Premi Asuransi	4.115.278.570	4.297.193.187	4.521.570.253	4.668.410.653
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.214.720.195	19.165.496.921	24.248.364.785	22.437.052.706
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudan g/Parkir	1.001.535.000	1.889.325.497	1.663.595.000	495.690.000

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.657.675.514	3.426.410.916	3.072.608.880	396.624.000
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.282.029.800	1.787.774.000	2.823.632.000	713.506.000
8	Belanja Makanan dan Minuman	30.806.917.838	29.644.645.860	32.948.021.297	24.909.335.452
9	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.293.627.000	1.462.790.500	3.171.660.300	1.708.761.300
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari tertentu	1.015.570.000	1.055.516.732	2.820.311.050	1.998.096.160
11	Belanja Perjalanan Dinas	169.631.082.529	174.682.646.864	200.628.483.084	169.070.899.132
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.695.565.000	1.686.724.000	1.656.164.000	1.536.645.000
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.027.807.000	946.946.000	3.832.650.000	183.955.000
14	Belanja Pemeliharaan	15.903.575.433	21.132.045.781	18.332.478.120	59.014.086.058
15	Belanja Modal	699.529.017.374	871.952.810.973	1.102.419.234.361	790.704.925.339
	TOTAL	**1.734.311.471.556**	**1.931.118.094.757**	**2.241.200.749.654**	**1.911.477.449.116**

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Menurut data pada Tabel diatas selama periode 2017-2020, alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa persentase belanja untuk aparatur cukup dominan selama periode tersebut. Diharapkan bahwa belanja untuk pelayanan publik akan meningkat di tahun-tahun mendatang untuk kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah perlu dioptimalkan guna mencapai tujuan tersebut. Pada tahun 2021, total alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp 1.045.912.595.891,00, dengan realisasi sebesar Rp 953.392.507.260,00 atau sekitar 91,15%. Berdasarkan data pada Tabel 2.88, diperoleh proporsi penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama periode 2017-2020, yang kemudian dirangkum dalam Tabel 2.88 berikut ini.

Tabel 2.91. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase 3/4 x 100%
		(Rp)	(Rp)	
1	2017	**1.734.311.471.556**	2.648.480.025.846	65,48%
2	2018	**1.931.118.094.757**	2.993.521.994.846	64,51%
3	2019	**2.241.200.749.654**	3.843.353.170.302	58,31%
4	2020	**1.911.477.449.116**	3.556.801.907.625	53,74%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

2. Kebijakan Belanja Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah saat terjadi defisit anggaran. Analisis pembiayaan daerah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dampak kebijakan pembiayaan daerah selama tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Analisis ini akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembiayaan di masa mendatang, guna menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, pada tabel 2.92 menyajikan perkembangan kondisi defisit riil anggaran dan upaya penutupannya di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2019-2023. Tabel ini memberikan analisis mengenai perhitungan surplus atau defisit riil dan pengaruhnya terhadap kebijakan pembiayaan daerah. Hasil dari analisis ini menunjukkan bagaimana kebijakan pembiayaan sebelumnya telah mempengaruhi keseimbangan keuangan daerah dan memberikan panduan bagi kebijakan pembiayaan di masa mendatang untuk memastikan kapasitas pendanaan yang optimal untuk pembangunan daerah.

Tabel 2.92. Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama 2019-2023

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN	3.540.659.694.225,82	3.510.691.709.632,75	3.221.260.445.686,84	3.807.807.962.928,72	3.712.349.876.045,60
2	BELANJA	3.377.578.658.990,74	3.836.457.605.910,48	3.259.813.882.099,83	3.623.039.910.364,02	3.751.112.025.949,13
	SURPLUS/ DEFISIT	163.081.035.235,08	(325.765.896.277,73)	-38.553.436.412,99	184.768.052.564,70	-38.762.149.903,53
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	691.747.536.094,40	819.314.146.595,48	294.340.224.015,75	62.401.787.597,88	17.757.416.867,90
	B. Pengeluaran Pembiayaan	179.223.248.634,00	221.812.445.858,00	192.415.108.046,00	127.625.314.529,00	12.275.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	870.970.784.728,40	1.041.126.592.453,48	486.755.332.061,75	190.027.102.126,88	30.032.416.867,90

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam periode 2020 hingga 2024, pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika fiskal dan respons terhadap kondisi ekonomi nasional maupun lokal. Pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.807.807.962.928,72, sementara pendapatan terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.221.260.445.686,84. Tahun 2020 mencatat pendapatan sebesar Rp. 3.540.659.694.225,82, kemudian sedikit menurun di tahun 2021 menjadi Rp. 3.510.691.709.632,75, sebelum kembali meningkat di tahun 2023 dan sedikit menurun di tahun 2024 menjadi Rp. 3.712.349.876.045,60.

Belanja daerah juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Belanja tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.836.457.605.910,48, sedangkan belanja terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.377.578.658.990,74. Pada tahun 2022, belanja daerah menurun menjadi Rp. 3.259.813.882.099,83, namun kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 3.623.039.910.364,02 dan Rp3.751.112.025.949,13. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan surplus atau defisit anggaran. Kabupaten Musi Banyuasin mengalami surplus anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 163.081.035.235,08 dan kembali mencatat surplus pada tahun 2023 sebesar Rp. 184.768.052.564,70. Sebaliknya, defisit terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 325.765.896.277,73, tahun 2022 sebesar Rp. 38.553.436.412,99, dan tahun 2024 sebesar Rp. 38.762.149.903,53. Fluktuasi ini menunjukkan adanya penyesuaian fiskal yang dinamis, dengan upaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.

Pembiayaan daerah selama periode ini juga mengalami penurunan yang signifikan. Penerimaan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 819.314.146.595,48, sementara nilai terendah tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp. 17.757.416.867,90. Pengeluaran pembiayaan tertinggi juga terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 221.812.445.858,00, dan terendah pada tahun 2024 sebesar Rp. 12.275.000.000,00. Penurunan pembiayaan ini mencerminkan arah kebijakan fiskal yang lebih konservatif dan efisien, dengan fokus pada penguatan pendapatan asli daerah dan pengendalian belanja langsung.

2.2.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk mengukur kapasitas total keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja wajib dan mengikat, serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Analisis ini juga mencakup alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran lainnya. Kapasitas keuangan daerah diartikan sebagai total pendapatan daerah setelah dikurangi kewajiban yang belum terselesaikan kepada pihak ketiga hingga akhir tahun dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan analisis ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan tersedia dan dikelola dengan efisien dan efektif untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan, sekaligus memenuhi kewajiban yang ada. Hasil dari analisis ini sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam

pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah di masa mendatang.

1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

1) Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Untuk mendapatkan proyeksi pendanaan lima tahun ke depan, dilakukan analisis proyeksi data masa lalu berdasarkan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir. Analisis menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Musi Banyuasin bersifat fluktuatif atau dinamis, dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama pendapatan dana perimbangan. Untuk proyeksi pendapatan dan belanja lima tahun ke depan, selain melihat rata-rata pertumbuhan, perlu mengantisipasi perubahan kebijakan di sektor keuangan. Oleh karena itu, perlu penyesuaian dalam menentukan angka proyeksi agar lebih realistis dan tidak terlalu optimistik, dengan tujuan mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahun masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan cenderung negatif. Oleh karena itu, penetapan angka pertumbuhan dilakukan dengan hanya mengakui angka pertumbuhan sebesar 50%, serta mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 membawa optimisme dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. UU HKPD bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan yang transparan,

akuntabel, dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh NKRI, dengan empat pilar utama: penguatan *local taxing power*, penurunan ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja di daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Selama 20 tahun terakhir, desentralisasi fiskal telah menunjukkan kinerja positif dan berkontribusi dalam pemerataan kemampuan keuangan daerah serta perbaikan layanan publik daerah. Namun, masih terdapat tantangan seperti pemanfaatan TKDD yang belum optimal, struktur belanja daerah yang belum memuaskan, rasio pajak lokal yang masih rendah, pemanfaatan pembiayaan yang terbatas, dan sinergi fiskal pusat-daerah yang belum optimal. UU HKPD dirancang untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan, serta menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui penurunan ketimpangan vertikal dan horizontal, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. UU HKPD mengedepankan transfer berbasis kinerja, perbaikan pengelolaan belanja daerah melalui disiplin yang ketat, serta upaya penguatan sinergi fiskal nasional, untuk memperbaiki kualitas desentralisasi fiskal dan menempatkan tanggung jawab yang lebih kuat kepada daerah dalam meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, proyeksi pendapatan dan belanja daerah diasumsikan tumbuh sekitar 1,61% per tahun. Untuk Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2025-2029, asumsi pertumbuhan yang sama sebesar 1,61% akan digunakan. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.93. Analisis Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	REALISASI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	3.754.951.994.832	4.596.138.760.641	4.878.362.595.199	5.184.959.817.731	5.513.479.440.938	5.513.479.440.938
	A. Pendapatan Asli Daerah	393.335.955.743	575.937.988.523	626.778.043.961	682.950.321.533	745.064.751.142	745.064.751.142
	B. Pendapatan Transfer	3.361.616.039.089	4.020.200.772.118	4.251.584.551.238	4.502.009.496.198	4.768.414.689.796	4.768.414.689.796
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	3.754.951.994.832	4.596.138.760.641	4.878.362.595.199	5.184.959.817.731	5.513.479.440.938	5.513.479.440.938
2	BELANJA	3.811.674.048.170,16	4.616.138.760.640,55	4.898.362.595.198,95	5.204.959.817.730,55	5.533.479.440.937,65	5.533.479.440.937,65
	A. Belanja Operasi	2.507.575.128.568,16	2.850.627.923.344,55	2.935.295.073.711,95	3.027.274.240.471,55	3.125.830.127.433,65	3.125.830.127.433,65
	B. Belanja Modal	814.583.797.586	1.170.029.206.457	1.367.585.890.648	1.580.270.352.558	1.810.234.088.803	1.810.234.088.803
	C. Belanja Tak Terduga	2.155.951.800	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	D. Belanja Transfer	487.359.170.216	590.481.630.839	590.481.630.839	592.415.224.701	592.415.224.701	592.415.224.701
	JUMLAH BELANJA	3.811.674.048.170,16	4.616.138.760.640,55	4.898.362.595.198,95	5.204.959.817.730,55	5.533.479.440.937,65	5.533.479.440.937,65
	SURPLUS/DEFISIT	(56.722.053.338,16)	(19.999.999.999,55)	(19.999.999.999,95)	(19.999.999.999,55)	(19.999.999.999,65)	(19.999.999.999,65)

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	REALISASI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
3	PEMBIAYAAN	156.626.045.111	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
	A. Penerimaan	131.676.045.111	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
	B. Pengeluaran	24.950.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN	156.626.045.111	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	106.726.045.111	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000

Proyeksi pendapatan dan belanja ini terdiri dari serangkaian angka perkiraan yang dapat berubah, selama asumsinya tidak mengalami perubahan. Pertumbuhan proyeksi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Selain sumber-sumber pendapatan yang telah dikelola, masih terdapat sumber-sumber pendapatan potensial yang tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari:

a. Pajak Daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C)
b. Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu)
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank Sumsel, PDPDE)
d. Lain-lain PAD yang sah (penjualan aset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain, dan BLUD).

Langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengoptimalkan target PAD antara lain:

a. Meningkatkan administrasi perpajakan, pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan, serta penerapan sanksi bagi wajib pajak dan aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah.

b. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah.
c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
d. Meninjau ulang Perda yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, terutama yang terkait retribusi daerah dan pajak daerah.
e. Memantapkan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
f. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD.
g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan lembaga keuangan terkait dana perimbangan.
h. Meningkatkan keaktifan dalam pengajuan dana alokasi khusus.
i. Meningkatkan kinerja BUMD melalui penyertaan modal yang terkait dengan penerimaan dividen yang akan diperoleh.

Dana Perimbangan (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA) diharapkan meningkat setiap tahunnya dengan melakukan upaya berikut:

a. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, BPHTB, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi.
b. Mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.
c. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2023-2026 diupayakan meningkat setiap tahunnya dengan meningkatkan perolehan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan bantuan keuangan provinsi melalui koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat.

2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan periode tahun 2025-2029, Perkiraan kapasitas riil kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dari penganggaran setiap tahunnya, Selengkapnya secara indikatif tersaji pada tabel 2.93 berikut ini.

Tabel 2.94. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025-2029

NO	URAIAN	BASELINE	PROYEKSI				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	PENDAPATAN	3.437.599.205.635,00	3.492.944.552.846	3.549.180.960.147	3.606.322.773.605	3.664.384.570.260	3.723.381.161.841
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran sebelumnya	45.000.000.000,00	45.724.500.000	46.460.664.450	47.208.681.148	47.968.740.914	48.741.037.643
	Total Penerimaan	3.482.599.205.635,00	3.538.669.052.845,72	3.595.641.624.596,54	3.653.531.454.752,54	3.712.353.311.174,06	3.772.122.199.483,96
	Dikurangi						
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.200.000.000,00	17.476.920.000	17.758.298.412	18.044.207.016	18.334.718.749	18.629.907.721
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUDA		**3.465.399.205.635,00**	**3.521.192.132.845,72**	**3.577.883.326.184,54**	**3.635.487.247.736,11**	**3.694.018.592.424,66**	**3.753.492.291.762,70**

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, pengeluaran daerah dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai visi tersebut. Pengelolaan pengeluaran dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengeluaran daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), di mana hasil dari pengeluaran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia demi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam berbagai kelompok prioritas. Perencanaan anggaran yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan anggaran harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan para ahli, untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang sebenarnya. Setiap tahap dalam proses perencanaan anggaran harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat untuk menjamin bahwa pengeluaran daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang telah

dialokasikan digunakan sesuai dengan tujuan dan mencapai hasil yang diinginkan. Pelaporan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bagian ini membahas permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2025-2029. Identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis ini menjadi landasan untuk menyelaraskan dengan Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan sintesis dari permasalahan yang ada, yang diperoleh melalui analisis terhadap kondisi eksisting dan pengkajian terhadap isu-isu strategis baik di tingkat global, nasional, maupun regional. Selain itu, analisis isu strategis ini juga merupakan komponen penting dalam dokumen RPJMD karena menjadi dasar dalam penyusunan program prioritas pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin menghadapi beragam tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa isu utama dapat dirangkum dan diprioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

a) *Permasalahan SDM dan IPM Rendah*, Kabupaten Musi Banyuasin menghadapi tantangan serius dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tergolong rendah dibandingkan target nasional. Komponen utama IPM seperti harapan lama sekolah dan angka melek huruf belum menunjukkan tren signifikan. Kualitas pendidikan dasar dan menengah belum merata, ditambah akses

terhadap layanan kesehatan dasar yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Isu strategis internal dalam hal ini mencakup rendahnya kompetensi tenaga pendidik, fasilitas sekolah yang belum memadai di daerah perdesaan, serta belum maksimalnya program kesehatan preventif seperti penurunan angka stunting. Arahan kebijakan diarahkan pada transformasi pendidikan dan kesehatan berbasis digital dan keterjangkauan, sejalan dengan RPJMN 2025–2029 Prioritas Nasional (PN) 4 tentang penguatan SDM, serta Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Todaro (2020), bahwa pembangunan manusia adalah kunci terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Todaro & Smith (2020) menekankan bahwa investasi pada pendidikan dasar dan kesehatan merupakan instrumen utama dalam pembangunan jangka panjang. Hal tersebut, juga disampaikan Amartya Sen (1999) bahwa pembangunan manusia adalah fondasi bagi kebebasan ekonomi dan sosial.

b) *Sektor Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah*, Tingkat kemiskinan di Kabupaten Muba masih berada di atas rata-rata provinsi, khususnya di desa-desa tertinggal dan daerah perbatasan. Meskipun terjadi penurunan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Muba masih cukup tinggi terutama di daerah pinggiran dan perdesaan. Ketimpangan pembangunan wilayah menjadi isu strategis, ditandai dengan ketimpangan infrastruktur, rendahnya mobilitas ekonomi, dan keterbatasan pelayanan dasar di kawasan tertentu. Isu strategis internal mencakup lemahnya sinergi lintas sektor dan belum optimalnya pemanfaatan dana

desa untuk mengurangi kemiskinan struktural. Arahan kebijakan diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah tertinggal dan pengembangan kawasan produktif desa. Langkah ini mendukung Arah Kebijakan dalam ASTA CITA ke-5 tentang keadilan ekonomi dan PN 6 RPJMN 2025–2029 tentang pembangunan dari desa. Menurut Chambers (1983), pendekatan pembangunan partisipatif desa adalah landasan penting untuk mengatasi ketimpangan spasial dan sosial. Ravallion (2016) menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan efektif ketika dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur dan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh World Bank pada Tahun 2020 menegaskan bahwa pembangunan konektivitas di wilayah pedesaan dapat menurunkan kemiskinan hingga 25%.

c) *Infrastruktur Dasar yang Belum Merata*, Permasalahan lainnya adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan desa, air bersih, sanitasi, serta listrik desa yang masih terbatas. Hal ini menyebabkan keterisolasian beberapa wilayah dan rendahnya produktivitas ekonomi lokal. Isu strategis internal mencakup keterbatasan pembiayaan, lemahnya tata kelola aset, serta rendahnya partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Arahan kebijakan diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas berbasis kawasan, kerja sama kemitraan pemerintah-swasta (KPBU), dan penggunaan dana desa secara produktif. Kebijakan juga diarahkan pada integrasi pembangunan infrastruktur desa, dengan pendekatan kawasan dan prioritas pada kawasan strategis pertanian dan UMKM. Hal

ini didukung oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Calderón & Servén (2010) menggarisbawahi bahwa kualitas infrastruktur merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama pada daerah yang berbasis produksi. Konektivitas yang kuat berdampak langsung pada penurunan biaya logistik dan peningkatan daya saing.

d) *Ekonomi Daerah Terkonsentrasi pada Sektor Primer*, Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih didominasi oleh sektor ekstraktif seperti migas, pertambangan, kelapa sawit, dan karet, namun belum diiringi dengan industrialisasi atau hilirisasi. Nilai tambah ekonomi daerah masih rendah, sehingga rawan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Isu strategis internal meliputi belum optimalnya kebijakan industri hilir, rendahnya peran UMKM, serta minimnya kolaborasi dengan sektor pendidikan tinggi dalam pengembangan teknologi lokal. Arahan kebijakan diarahkan pada hilirisasi SDA berbasis kawasan agropolitan dan peningkatan kapasitas UMKM. Perlu pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian, penguatan rantai nilai lokal, serta peningkatan akses pasar bagi pelaku UMKM dan koperasi. Kebijakan ini sejalan dengan ASTA CITA ke-4 dan PN 5 RPJMN 2025–2029 tentang penguatan industri pengolahan dan UMKM. Menurut Porter (1998), keunggulan kompetitif daerah terletak pada kemampuannya menciptakan rantai nilai dari potensi lokalnya.

e) *Pengangguran dan Ketidaksesuaian Kompetensi SDM.* Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin ditandai dengan fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sempat naik dari 3,29% (2018) menjadi 4,40% (2022), meskipun turun pada 2023 menjadi 1,58%. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dalam menciptakan lapangan kerja, ditambah dengan rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal yang belum sesuai dengan kebutuhan industri dan sektor jasa. Isu strategis internal mencakup lemahnya pendidikan vokasi, keterbatasan pelatihan kerja, minimnya dukungan terhadap kewirausahaan muda, serta masih adanya kasus perselisihan hubungan industrial. Arah kebijakan diarahkan pada penguatan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (*link-and-match*), peningkatan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi, serta pengembangan inkubator usaha digital dan UMKM. Kebijakan ini didukung oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan visi SDGs tujuan 8 ("*Decent Work and Economic Growth*"), dengan indikator capaian yang lebih jelas, yaitu proyeksi penurunan TPT dari 5,3% pada 2025 menjadi 3,5% pada 2029, peningkatan serapan lulusan vokasi, bertambahnya jumlah UMKM/startup digital terinkubasi, dan tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Dengan formulasi ini, kebijakan tidak hanya berorientasi pada *output* program, tetapi juga *outcome* nyata berupa penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya wirausaha muda, dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

f) *Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal*, Pelayanan publik dan sistem birokrasi di Musi Banyuasin masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan responsivitas, serta rendahnya adopsi teknologi digital dalam pelayanan publik. Isu strategis internal mencakup belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbatasan kapasitas SDM aparatur. Arahan kebijakan diarahkan pada reformasi birokrasi, penerapan SPBE, pelayanan digital terpadu, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Ini selaras dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, serta ASTA CITA ke-6 dan PN 7 RPJMN 2025–2029. Menurut Osborne & Gaebler (1992), birokrasi yang responsif dan digital akan meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi tata kelola. Hal tersebut dikuatkan juga oleh Grindle (2004) menekankan pentingnya kapasitas institusional dan akuntabilitas dalam mencapai tata kelola yang baik. Digitalisasi pemerintahan memperkuat efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas layanan publik.

g) *Kerusakan Lingkungan dan Risiko Bencana*, Tantangan ekologis seperti kerusakan hutan, banjir, dan kebakaran lahan gambut semakin mengkhawatirkan, ditambah belum tertibnya pelaksanaan tata ruang dan pengendalian lingkungan. Isu strategis internal adalah lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antar sektor dalam perlindungan lingkungan. Arahan kebijakan meliputi penataan kembali RTRW, restorasi lahan kritis, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), serta peningkatan mitigasi bencana melalui penataan ruang yang berbasis spasial.

Hal ini konsisten dengan ASTA CITA ke-7 dan PN 2 dan PN 8 RPJMN 2025–2029. Sachs et al. (2020) menyatakan bahwa keberlanjutan ekologi adalah komponen integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Jika tidak dikendalikan, kerusakan ekologis akan berdampak langsung pada kualitas hidup dan produktivitas.

Berikut ini disajikan tabel Permasalahan, Isu Strategis, Arah Kebijakan pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025– 2029, yang disusun secara sistematis.

Tabel 2.95. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin

Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan / Tindakan Strategis
Tingginya pengangguran terbuka; *mismatch* keterampilan tenaga kerja; rendahnya serapan lulusan vokasi; terbatasnya dukungan kewirausahaan muda	Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal	**Ketenagakerjaan & Daya Saing SDM**	- Penguatan pendidikan vokasi dan *link-and-match* dengan DUDI - Revitalisasi BLK dan sertifikasi kompetensi - Inkubator usaha digital & UMKM - Dukungan kewirausahaan muda dan *startup*
Kesenjangan ekonomi kota–desa; ketergantungan pada sektor pertanian & tambang yang fluktuatif; terbatasnya akses permodalan & teknologi UMKM	Ketimpangan ekonomi dan rendahnya daya saing lokal	**Pembangunan Kewilayahan & Ekonomi Lokal Berkelanjutan**	- Pemberdayaan UMKM berbasis digital - Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan/ pertanian - Akses pembiayaan dan pasar bagi usaha kecil - Peningkatan infrastruktur ekonomi pedesaan

Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan / Tindakan Strategis
Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang & perkebunan; keterbatasan akses air bersih; tingginya timbulan sampah; ancaman perubahan iklim dan banjir	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan & ketahanan SDA	**Lingkungan Hidup & Ketahanan SDA**	- Penguatan pengelolaan sampah & daur ulang - Penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak - Transisi energi terbarukan (biomassa, surya) - Mitigasi & adaptasi perubahan iklim - Rehabilitasi lahan dan pengendalian banjir
Keterbatasan fasilitas kesehatan & pendidikan, IPM yang belum optimal, serta kesenjangan pelayanan publik	Kualitas layanan dasar (pendidikan & kesehatan)	**(Integrasi lintas prioritas)** → mendukung prioritas ketenagakerjaan & kewilayahan	- Pemerataan fasilitas pendidikan & kesehatan - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan medis - Pemanfaatan ICT untuk pendidikan & pelayanan publik inklusif

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dalam upaya menyusun RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029, tantangan pembangunan yang paling mendesak berada di bidang ketenagakerjaan, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup. Ketiganya menjadi prioritas utama, karena langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Ketenagakerjaan harus menjadi fokus utama karena banyaknya angkatan kerja muda yang belum terampil untuk bersaing di dunia kerja modern. Dengan pelatihan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang besar untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul, siap beradaptasi dengan kebutuhan

industri. Peningkatan kualitas SDM akan mempercepat transformasi ekonomi lokal, memperkecil angka pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor strategis.

Ketahanan pangan menjadi aspek yang tak kalah penting, mengingat ketergantungan pada impor pangan dan rentannya sektor pertanian terhadap perubahan iklim. Muba memiliki potensi besar dalam sektor pertanian yang bisa dikembangkan dengan teknologi tepat guna, misalnya lumbung padi. Melalui pendekatan berbasis teknologi, kita dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien, serta mengurangi angka stunting, yang menjadi tantangan besar bagi generasi mendatang. Ini adalah langkah penting menuju ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, lingkungan hidup menjadi perhatian serius karena kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, seperti polusi dan bencana alam akibat praktik pertambangan rakyat dan degradasi hutan. Dengan memperkuat pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam, serta melibatkan masyarakat dalam upaya rehabilitasi lingkungan, Muba bisa menjaga keberlanjutan alam dan meningkatkan daya tarik investasi yang berbasis pada keberlanjutan.

Menghadapi tantangan ini dengan semangat optimisme, Muba berpeluang untuk melangkah maju dengan solusi-solusi yang inovatif dan berbasis pada kolaborasi lintas sektor. Dengan perhatian serius terhadap ketenagakerjaan, ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan, kita dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Muba. Ini

bukan sekadar tantangan, tetapi peluang emas untuk menjadikan Kabupaten Muba sebagai daerah yang unggul di masa depan.

1. Identifikasi Masalah untuk Penetapan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah -Urusan Pemerintahan Pilihan

Pada sektor perikanan, masih banyak ditemukan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan alat tangkap ilegal yang mengancam keseimbangan ekosistem sungai dan perairan. Selain itu, kebijakan yang diterapkan di sektor ini belum merata, yang menyebabkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di wilayah sungai. Pengelolaan yang kurang optimal juga dipengaruhi oleh tantangan lingkungan dan kondisi geografis perairan yang luas, yang menyulitkan pengawasan dan pemantauan. Masalah lainnya adalah pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan, serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam sektor ini.

Dalam sektor pariwisata, pengelolaan yang belum optimal masih menjadi masalah besar. Banyak destinasi wisata yang belum dikelola secara profesional, dan fasilitas yang ada tidak memadai. Infrastruktur menuju destinasi juga terbatas, menghambat potensi perkembangan industri pariwisata. Selain itu, potensi daya tarik wisata di beberapa daerah belum dikembangkan secara maksimal, sementara kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat masih minim. Hal ini memperlambat kemajuan sektor pariwisata yang seharusnya dapat menjadi pilar penting ekonomi daerah. Banyak warga yang masih lebih memilih untuk menghabiskan uang di Palembang atau luar kota lainnya untuk belanja dan wisata,

yang menunjukkan kurangnya daya tarik wisata lokal. Ke depan, penting untuk mendorong generasi muda agar berpikir jauh ke depan dan tidak bergantung pada sektor-sektor ekonomi yang rentan, seperti sumber daya alam dan perkebunan. Dengan menggali potensi pariwisata lokal yang lebih maksimal, generasi muda bisa menciptakan peluang usaha baru dalam sektor ekonomi kreatif, mengurangi ketergantungan pada sektor yang terbatas, dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan.

Di sektor pertanian, banyak masalah yang muncul, seperti pembudidayaan yang belum optimal, penurunan produksi akibat serangan hama dan keterbatasan sumber daya, serta produktivitas tanaman pangan dan peternakan yang masih rendah. Lemahnya peran kelompok tani dan lembaga pertanian dalam distribusi dan pemasaran hasil juga menghambat sektor ini. Selain itu, pemanfaatan sarana produksi yang ada belum maksimal, dan penerapan teknologi tepat guna masih rendah di kalangan petani dan peternak, sehingga potensi pertanian belum dapat dipenuhi secara optimal. Permasalahan lainnya adalah vaksinasi dan pengobatan hewan ternak yang belum merata, serta kurangnya penerapan teknologi dalam budidaya ternak.

Dalam sektor perdagangan, produk usaha skala besar belum berkembang secara optimal, yang mengakibatkan sektor pertanian dan perkebunan belum dapat menciptakan produk dengan kapasitas besar untuk memenuhi pasar domestik maupun internasional. Kualitas produk ekspor, seperti karet dan sawit, juga mengalami masalah dalam mempertahankan standar yang diperlukan. Selain itu, banyak pelaku usaha yang kesulitan mengakses modal dan

memahami pasar global, serta masih adanya dominasi tengkulak dalam rantai perdagangan yang membatasi perkembangan usaha secara mandiri.

Pada sektor perindustrian, kewenangan pengembangan industri besar masih terpusat di pemerintah pusat, yang membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mendorong investasi industri besar. Selain itu, belum adanya rencana induk untuk pengembangan industri menyebabkan kawasan industri tidak berkembang sesuai harapan. Kurangnya koordinasi antara OPD dan stakeholder terkait, serta belum berinvestasinya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam industri pengolahan, memperburuk keadaan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di sektor perindustrian juga menjadi kendala, ditambah dengan kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha di bidang industri.

Terakhir, dalam transmigrasi, persepsi negatif terhadap program transmigrasi masih menghambat partisipasi masyarakat, sehingga program ini belum dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa banyak sektor pembangunan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan pengelolaan, kolaborasi, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal.

2. Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah - Sekretariat Daerah

Meskipun beberapa perangkat daerah menghadapi tantangan dalam merencanakan kinerja berbasis hasil (*outcome*) yang sesuai dengan prinsip SMART, hal ini membuka kesempatan untuk

meningkatkan kualitas perencanaan di masa depan. Penyusunan pohon kinerja yang lebih berbasis kerangka logis dan faktor keberhasilan kritis akan memperkuat pencapaian tujuan. Dengan penetapan target tahunan yang lebih realistis, yang mempertimbangkan capaian dari periode sebelumnya, kinerja di tahun berikutnya dapat lebih terarah.

Dokumen indikator kinerja utama (IKU) yang lebih jelas dan lengkap dapat memperbaiki evaluasi kinerja dan memastikan pencapaian yang lebih akurat. Sistem *e-Office* yang sedang dalam tahap pengembangan dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk memantau capaian kinerja secara *real-time*, yang akan mendukung pengambilan keputusan lebih tepat. Dengan memanfaatkan data kinerja lebih optimal, perangkat daerah dapat merancang perubahan strategi dan pengembangan kompetensi pegawai yang lebih efisien.

Penyusunan laporan kinerja yang lebih terstandarisasi dan akurat akan membawa keseimbangan dalam pelaporan antar perangkat daerah, memfasilitasi pemantauan dan perbaikan kinerja yang lebih baik. Sistem penghargaan dan sanksi yang jelas dapat memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Evaluasi yang lebih menyeluruh akan mendorong terwujudnya perbaikan dalam pencapaian target kinerja.

Dalam hal pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana yang terus berlanjut akan meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik. Meskipun evaluasi pelayanan publik saat ini terfokus pada beberapa perangkat daerah tertentu, hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan layanan yang lebih luas dan efektif di

masa depan. Kehadiran Mall Pelayanan Publik yang lebih optimal dan sistem informasi pelayanan publik yang lebih terkelola akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.

Struktur organisasi yang lebih terorganisir dan penyusunan tugas yang lebih jelas akan meningkatkan efektivitas kerja, dan koordinasi yang lebih baik antar perangkat daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan yang semakin berkembang akan mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Sistem pelayanan publik yang responsif dan integrasi pengaduan masyarakat akan menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi publik.

Pemanfaatan data yang lebih optimal dalam perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*) akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan peningkatan pelatihan serta pengembangan SDM aparatur akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang sedang berjalan, meskipun memiliki tantangan, akan terus berinovasi untuk menciptakan layanan yang lebih efisien dan transparan. Dengan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi yang relevan mengenai kinerja perangkat daerah.

3. Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah - Sekretariat DPRD

Tingkat profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan, mengingat kompetensi dan keterampilan pegawai sekretariat DPRD masih perlu diperbaiki untuk mendukung tugas legislatif secara lebih efektif. Lambatnya proses penyampaian informasi mengakibatkan terjadinya

kesalahpahaman dalam koordinasi antara Sekretariat dan DPRD. Selain itu, adanya perbedaan pemahaman mengenai regulasi juga menyebabkan interpretasi yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung tugas legislatif dengan lebih efektif, peningkatan kompetensi dan keterampilan pegawai sekretariat DPRD menjadi fokus utama, yang akan membawa profesionalisme lebih tinggi dalam setiap aspek tugas mereka. Dengan perbaikan sistem distribusi informasi, kita dapat mempercepat penyampaian data dan meningkatkan koordinasi antara Sekretariat dan DPRD, mengurangi potensi kesalahpahaman yang sebelumnya terjadi. Selain itu, dengan meningkatkan pemahaman bersama terhadap regulasi, kita dapat menciptakan harmonisasi yang lebih baik antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD, memastikan penerapan peraturan yang lebih konsisten dan efektif.

4. Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah - Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Untuk memastikan keberhasilan implementasi program RPJMD dalam RKPD, perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan prioritas pembangunan yang lebih terarah, mencerminkan secara jelas kebutuhan daerah. Dengan meningkatkan sistem akuntabilitas, kita dapat memperkuat efektivitas dan transparansi dalam kinerja instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pengukuran kinerja untuk evaluasi yang lebih tepat dan akurat. Penelitian dan pengembangan, yang selama ini belum dimanfaatkan sepenuhnya, akan semakin diberdayakan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

Peningkatan pemahaman dalam perencanaan dan penganggaran akan mengatasi kendala yang ada, sehingga penyusunan anggaran menjadi lebih efisien. Dengan memperbaiki prognosis penganggaran dana transfer, kita bisa lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi makro yang terjadi, seperti fluktuasi inflasi dan harga minyak. Di sisi lain, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan agar lebih mendukung efektivitas pengelolaan anggaran.

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang lebih optimal akan mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, sementara pencatatan dan pengamanan aset dapat diperbaiki untuk menciptakan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Dalam bidang pajak daerah, peningkatan kompetensi tenaga ahli, pemutakhiran data, serta koordinasi antar instansi akan memperkuat pendapatan daerah secara signifikan.

Untuk pengembangan ASN, peningkatan kompetensi yang lebih merata di seluruh perangkat daerah akan membuka lebih banyak kesempatan bagi pegawai untuk berkembang. Program diklat yang lebih terstruktur dan sistematis akan membantu ASN mencapai target minimal Jam Pelajaran (JP) per tahun, memaksimalkan potensi ASN di setiap jenjang jabatan, dan memberikan jalan bagi karier ASN yang lebih jelas dan terarah. Dengan mengimplementasikan sistem *reward* dan *punishment* yang lebih terstruktur, motivasi dan profesionalisme ASN akan semakin meningkat, berkontribusi pada kinerja organisasi yang lebih optimal.

5. Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah - Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat

Untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan analisis kinerja organisasi, sistem yang lebih terstruktur perlu diterapkan, yang memungkinkan evaluasi lebih mendalam dan akurat terhadap pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja organisasi yang lebih baik akan membantu menunjukkan hasil yang lebih signifikan dalam peningkatan efektivitas kerja.

Meskipun sistem monitoring dan evaluasi (*Monev*) masih dalam tahap pengembangan, potensi pengawasan yang lebih efektif di setiap tingkat manajemen dapat diwujudkan dengan perbaikan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus dimanfaatkan sepenuhnya sebagai alat untuk merencanakan strategi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan memperkuat pemahaman manajemen terhadap evaluasi kinerja internal, proses perencanaan dan evaluasi dapat dilakukan lebih optimal. Begitu pula dengan pengelolaan aset dan inventaris di OPD, yang akan lebih terorganisir dan transparan melalui pencatatan yang lebih akurat dan akuntabel.

Tata kelola dana BOS dan keuangan desa dapat ditingkatkan melalui perencanaan yang lebih matang dan transparansi anggaran yang lebih baik. Meningkatkan responsivitas terhadap temuan audit akan memperkuat upaya perbaikan sistem yang lebih cepat dan lebih tepat.

Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi akan

meningkatkan efektivitas kerja, sementara sertifikasi keahlian khusus untuk auditor akan memperkuat kualitas pengawasan. Integrasi sistem TI pengawasan dan peningkatan kompetensi pegawai dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pengawasan akan mengoptimalkan pemantauan yang lebih efisien dan efektif.

Komitmen untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) dapat diperkuat dengan intensifikasi pemantauan dan evaluasi, yang memungkinkan hasil reformasi yang lebih maksimal. Strategi peningkatan efektivitas PMPRB perlu disempurnakan lebih lanjut untuk memberikan dampak yang lebih besar.

Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan juga menjadi langkah penting untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan evaluasi yang lebih optimal di masa depan.

6. Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah - Unsur Pengawasan Urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan

   1) Pentingnya Peningkatan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

      Kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan sangat menentukan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya perbaikan yang signifikan guna memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang cepat dan tepat.

   2) Kesadaran Masyarakat tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar PBB adalah langkah krusial untuk memastikan penerimaan pajak daerah yang optimal. Saat ini, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kewajiban ini, sehingga pengumpulan pajak daerah masih terhambat. Mengurangi ketergantungan pada pajak dari perusahaan dan memperkuat kontribusi masyarakat perorangan adalah kunci utama.

3) Inovasi dalam Penagihan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan

Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam sistem penagihan pajak akan memberikan efisiensi yang lebih baik dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ini akan mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi kebocoran pajak.

4) Pentingnya Sinkronisasi Data Wajib Pajak dan Objek Pajak

Ketidaksesuaian antara data wajib pajak dan objek pajak saat ini masih menjadi salah satu kendala besar dalam administrasi pajak daerah. Menyelaraskan data ini adalah langkah penting untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan memastikan keakuratan data yang digunakan dalam pengelolaan pajak.

5) Kesadaran Legalitas Kepemilikan Tanah

Masyarakat harus lebih menyadari pentingnya legalisasi kepemilikan tanah untuk menghindari sengketa lahan. Sertifikasi tanah yang belum merata meningkatkan risiko sengketa yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperburuk ketidakpastian sosial. Penyelesaian

sengketa melalui jalur pemerintahan desa atau kecamatan harus diprioritaskan.

6) Peningkatan Kapasitas dalam Menangani Konflik Agraria

Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dalam menangani konflik agraria akan sangat mempercepat penyelesaian sengketa tanah dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Hal ini juga mengurangi potensi konflik yang dapat berlarut-larut.

7) Optimalisasi Pemanfaatan Tanah

Banyak lahan yang masih terbengkalai dan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menciptakan potensi konflik baru yang dapat memperlambat pembangunan ekonomi. Meningkatkan pemanfaatan tanah menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat kemajuan ekonomi daerah.

8) Pentingnya Kesadaran Administrasi Kependudukan

Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya administrasi kependudukan, seperti memiliki KTP, KK, dan akta kelahiran. Edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya dokumen kependudukan sangat diperlukan agar semua warga tercatat dengan baik, dan hal ini akan memperkuat pemerintahan dan pembangunan.

9) Akses dan Fasilitas Pengurusan Dokumen Kependudukan

Terutama di daerah terpencil, akses ke layanan pembuatan dokumen kependudukan harus diperluas. Proses yang lebih mudah dan cepat akan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melengkapi dokumen yang diperlukan, mengurangi potensi masalah administratif di masa depan.

10) Pemahaman Aparatur Desa dalam Melayani Masyarakat

Aparatur desa yang baru terpilih perlu diberikan pelatihan mendalam mengenai tugas dan fungsi mereka. Pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab mereka akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.

11) Pemberian Wewenang yang Lebih Luas untuk Penegakan Aturan

Kecamatan perlu diberikan kewenangan lebih untuk menindak pelanggaran peraturan daerah. Hal ini akan memperkuat penegakan aturan dan menciptakan ketertiban di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat.

12) Pendistribusian Bantuan Pemerintah yang Tepat Sasaran

Bantuan pemerintah harus lebih tepat sasaran. Menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah memberikan dampak positif yang maksimal dan efektif.

7. Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah - Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Umum

1) Pentingnya Peningkatan Wawasan Kebangsaan untuk Masyarakat

Peningkatan wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun rasa cinta tanah air dan mempererat persatuan. Saat ini, masih banyak kelompok masyarakat yang belum mendapatkan edukasi yang memadai tentang nilai-nilai kebangsaan, yang menghambat terciptanya kesadaran nasional yang kuat.

2) Legalitas Organisasi Masyarakat dan LSM yang Belum Terdaftar Resmi

Banyak organisasi masyarakat dan LSM yang belum memiliki legalitas resmi. Hal ini dapat menghambat peran mereka dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menjamin bahwa seluruh ormas dan LSM terdaftar secara sah akan memperkuat legitimasi mereka dalam mengimplementasikan program-program sosial dan politik yang produktif.

3) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu yang Masih Rendah

Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu sangat penting untuk kelangsungan demokrasi. Peningkatan partisipasi dalam pemilu harus menjadi fokus utama dengan memberikan edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya hak suara setiap warga negara.

4) Pengelolaan Data Puskomin yang Masih Manual

Saat ini, pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini (Puskomin) masih berbasis hardcopy, yang menghambat kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Digitalisasi data menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi kewaspadaan dini.

5) Perlunya Sistem Informasi Pengelolaan Puskomin yang Tersedia

Data kewaspadaan dini yang belum terdigitalisasi menyebabkan terbatasnya akses dan analisis informasi secara real-time. Pengembangan sistem informasi pengelolaan Puskomin akan

sangat mempermudah proses pemantauan dan tindakan cepat terhadap isu-isu yang berkembang.

6) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila

Pembinaan ideologi Pancasila yang merupakan landasan negara harus dilakukan secara lebih intensif. Namun, jumlah aparatur yang bertugas dalam pembinaan ideologi Pancasila masih terbatas, sehingga penyebaran nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat belum optimal.

7) Kekurangan Personel di Tim Puskomin Kesbangpol

Tim Puskomin Kesbangpol yang bertugas dalam kewaspadaan dini dan pemantauan masih kekurangan personel. Penambahan tenaga ahli yang berkompeten akan meningkatkan efektivitas kerja tim dalam menangani isu-isu penting yang mempengaruhi stabilitas sosial dan politik.

8) Keterbatasan Kemampuan Intelijen Tim Puskomin

Tim Puskomin juga mengalami keterbatasan dalam hal keterampilan intelijen. Kemampuan untuk mendeteksi dan menganalisis isu-isu kewaspadaan dini harus ditingkatkan untuk merespons dengan cepat terhadap potensi ancaman yang bisa mengganggu ketertiban dan stabilitas nasional.

9) Pentingnya Edukasi Masyarakat tentang Politik dan Demokrasi

Edukasi mengenai hak dan kewajiban politik di kalangan masyarakat masih sangat rendah. Meningkatkan pemahaman politik dan demokrasi akan memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

10) Menurunnya Rasa Cinta Tanah Air

Kurangnya rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat dapat menurunkan semangat persatuan nasional. Peningkatan kegiatan yang mendorong kecintaan terhadap negara, seperti program edukasi dan pengenalan sejarah kebangsaan, sangat penting untuk menjaga integritas bangsa.

11) Pentingnya Pembelajaran Pancasila di Sekolah

Materi pembelajaran Pancasila di sekolah semakin minim, padahal ideologi ini harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan. Pancasila harus kembali menjadi fokus utama dalam kurikulum pendidikan.

12) Menghidupkan Kembali Program Penataran P4

Program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dulu menjadi landasan pengajaran nilai-nilai Pancasila sudah tidak diterapkan lagi. Menghidupkan kembali program ini akan sangat membantu dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang ideologi negara.

13) Mengatasi Terpaparnya Generasi Muda oleh Radikalisme

Kurangnya pemahaman mengenai ideologi Pancasila dan rendahnya edukasi kebangsaan menjadikan generasi muda rentan terhadap pengaruh paham radikal. Edukasi yang lebih intensif tentang kebangsaan, ideologi negara, dan pluralisme akan membekali generasi muda dengan pemahaman yang kokoh terhadap negara dan kebhinekaan.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

1. Isu Strategis Internal

Dalam menghadapi isu-isu strategis yang ada di daerah, beberapa tantangan utama perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, ekonomi lokal, infrastruktur, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu masalah terbesar yang harus diatasi adalah rendahnya daya saing sumber daya manusia, yang tercermin dalam keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pengajar, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat. Ketidakmampuan dalam mendidik dan mengedukasi masyarakat dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, masih adanya ketidakseimbangan antara kualitas dan keterampilan tenaga kerja lokal membuat banyak orang kesulitan dalam bersaing di pasar kerja, berimbas pada rendahnya potensi pertumbuhan ekonomi. Tidak kalah pentingnya, pemberdayaan perempuan dan pemuda, yang sering terhambat oleh budaya patriarki dan minimnya investasi dalam sektor ini, menjadi faktor penghambat dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan produktif.

Dalam aspek ekonomi, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya adalah fluktuasi harga dan produktivitas komoditas utama seperti kelapa sawit dan karet yang sangat mempengaruhi pendapatan petani dan nelayan. Selain itu, keterbatasan investasi dalam hilirisasi produk pertanian, seperti pengolahan karet dan CPO, turut

memperlambat nilai tambah produk lokal, yang seharusnya dapat meningkatkan daya saing produk daerah di pasar global. Kelemahan dalam pengelolaan koperasi, UMKM, dan BUMDes juga masih menjadi hambatan besar, mengingat peran penting sektor ini dalam menopang perekonomian lokal. Kualitas produk yang tidak stabil dan terbatasnya akses pasar digital, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum optimal, menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi daerah masih jauh dari potensi maksimalnya.

Sementara itu, kualitas infrastruktur wilayah yang masih rendah, baik dalam hal penyebaran maupun kapasitasnya, merupakan hambatan signifikan dalam mendorong mobilitas dan konektivitas antarwilayah. Ketergantungan pada transportasi yang terbatas serta kurangnya pengembangan infrastruktur digital juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan akses layanan publik. Salah satu masalah utama adalah kurangnya investasi dalam sektor infrastruktur yang mengakibatkan rendahnya kualitas jaringan transportasi serta akses internet yang terbatas. Dalam hal ini, penting untuk fokus pada pemerataan dan perbaikan infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pemerataan pembangunan.

Tantangan dalam pembangunan berkelanjutan juga menjadi sorotan penting. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, alih fungsi lahan yang meluas, serta kerusakan lingkungan akibat industri kelapa sawit, menunjukkan perlunya upaya yang lebih terstruktur dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Dampak negatif dari kegiatan industri ini, seperti deforestasi dan degradasi tanah, harus segera dihentikan untuk mencegah bencana lingkungan yang

lebih parah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam, serta mencegah risiko bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.

Terakhir, kualitas tata kelola pemerintahan yang masih rendah menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan dan pelayanan publik. Pelayanan yang belum optimal, rendahnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, serta adanya kasus fraud yang mencoreng integritas pemerintahan, memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, untuk mendorong perkembangan yang lebih baik, penting untuk memperbaiki sistem organisasi dan pengelolaan pemerintahan dengan pendekatan berbasis kinerja, serta meningkatkan koordinasi antar instansi guna menciptakan kebijakan yang lebih efektif. Penerapan sistem *reward and punishment* yang adil juga sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah agar dapat memenuhi harapan masyarakat.

Dengan demikian, untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut, kolaborasi antar berbagai sektor—baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta—sangat diperlukan. Fokus pada pengembangan SDM, ekonomi lokal yang inklusif, penguatan infrastruktur, serta pembangunan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di masa depan

2. Potensi Daerah

Komitmen Pemerintah Daerah pada Pengembangan SDM Tinggi. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia

(SDM) dengan menjadikan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Fokus ini tercermin dalam peningkatan akses pendidikan yang merata, di mana pemerintah berusaha menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Infrastruktur kesehatan juga terus diperbaiki, dengan adanya fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah, seperti puskesmas, poskesdes, dan polindes, guna memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi warga. Selain itu, pemerintah aktif berupaya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama dengan semakin tingginya angka angkatan kerja yang menjadi salah satu potensi besar daerah ini. Dengan perhatian yang mendalam terhadap kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok rentan, pemerintah berusaha mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan produktif.

Letak Geografis yang Strategis dan Potensial. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki letak geografis yang sangat strategis, dikelilingi oleh sungai besar seperti Sungai Musi dan Sungai Banyuasin, yang membuka peluang besar untuk memanfaatkan perairan ini dalam berbagai sektor. Sungai tidak hanya berfungsi untuk penyediaan air bersih dan irigasi pertanian, tetapi juga mendukung aktivitas perikanan dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif. Keberadaan perairan ini juga sangat mendukung distribusi barang dan komoditas, mempermudah aliran hasil pertanian dan perkebunan ke berbagai daerah. Selain itu, dengan luasnya wilayah pertanian dan perkebunan, terutama dalam komoditas kelapa sawit dan karet, Musi Banyuasin memiliki potensi besar untuk memperkuat sektor agribisnis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan provinsi lain

memberikan keuntungan dalam perdagangan antar provinsi, mempermudah distribusi dan memperluas pasar.

Bonus Demografi Kabupaten Musi Banyuasin. Bonus demografi menjadi salah satu potensi ekonomi yang sangat menjanjikan bagi Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif, daerah ini memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Bonus demografi ini membuka kesempatan untuk menciptakan tenaga kerja produktif yang dapat mengisi sektor-sektor utama seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perdagangan. Peningkatan jumlah tenaga kerja produktif ini tidak hanya memperbesar kesempatan untuk peningkatan pendapatan, tetapi juga mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru, yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Populasi usia kerja yang besar dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Musi Banyuasin, mendorong kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Potensi Sumber Daya Alam (SDA). Kabupaten Musi Banyuasin kaya akan sumber daya alam (SDA), dengan luasnya lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta kekayaan sektor perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Salah satu komoditas unggulan yang sangat potensial adalah kelapa sawit, yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk produksi energi terbarukan seperti biodiesel. Potensi ini juga membuka peluang untuk diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta menarik investasi di sektor energi hijau. Pengolahan SDA ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga merangsang pertumbuhan sektor industri

lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Keunggulan di sektor perikanan, kehutanan, dan pertambangan memberikan peluang besar bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen Pada Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu langkah yang diambil adalah penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD 2025-2030, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan seiring dengan konservasi lingkungan. Pemerintah daerah juga menangani isu-isu lingkungan secara terarah, dengan fokus pada perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan dampak aktivitas ekonomi terhadap ekosistem. Selain itu, komitmen ini mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat.

Komitmen Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin aktif menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerja sama ini berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar yang mencakup lampu jalan, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan preservasi jalan, yang akan memperbaiki pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, mempermudah distribusi barang, serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Kemitraan ini bertujuan

untuk membangun masa depan yang lebih baik, yang lebih inklusif dan berdaya saing. Sistem Penyediaan Air Minum merupakan salah satu prioritas pembangunan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, dengan target capaian 100% akses air minum yang aman pada tahun 2030. Menyikapi target tersebut, kondisi capaian akses air minum di Kabupaten Musi Banyuasin pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 42,07%. Capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kriteria akses air minum yang aman. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan upaya yang lebih besar serta keseriusan dari pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kondisi topografi Kabupaten Musi Banyuasin secara umum terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu dataran rendah, bergelombang, dan berbukit. Di sebelah timur Kecamatan Sungai Lilin dan sebelah barat Kecamatan Bayung Lencir, wilayah pinggiran aliran Sungai Musi memperlihatkan tanah yang terdiri dari rawa-rawa dan payau, yang dipengaruhi oleh pasang surut, dengan ketinggian berkisar antara 14 hingga 37 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, daerah lainnya didominasi oleh dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian yang mencapai 37 meter di atas permukaan laut. Sebagai sumber air untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan irigasi, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 25 sungai dan 75 embung. Selain itu, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki sejumlah mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sumber air bersih, baik secara individu maupun melalui pengelolaan SPAM perdesaan. Menurut data Dinas Kesehatan

pada tahun 2023, terdapat 94.103 sumur gali,23.764 sumur bor, 7 terminal air, 3 mata air terlindungi dan 8.055 Penampungan Air Hujan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Luas Kabupaten Musi Banyuasin 14.265,96 KM3 atau 1.426.596 Ha.

Adapun lahan digunakan antara lain untuk permukiman dengan luas 36.059 Ha (2,53.%), diperuntukkan perkebunan dengan luas 396.063 Ha (18,05%) dan tanaman pangan dengan luas 81.059 Ha (5,68%). Berdasarkan data sosial ekonomi, kelompok lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar Rp15,11 milyar terhadap PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Meskipun demikian, angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan air di Kabupaten Musi Banyuasin yang terus meningkat. Oleh karena itu, perkembangan kawasan strategis diharapkan dapat mendongkrak nilai PDRB dari kelompok lapangan usaha ini.

Infrastruktur penyediaan air minum yang dikelola oleh PERUMDA Air Minum Tirta Randik saat ini memiliki 50 unit dan cabang wilayah pelayanan, di antaranya Pusat Sekayu, Unit Soak Baru (Seberang), Unit Kayuara, Unit Lumpatan, Unit Muara Teladan, Unit Sukarami, Unit Bailangu, Unit Sungai Medak, Cabang Babat Toman, Unit Mangunjaya, Cabang Ngulak, Unit Air Balui, Unit Keban I, Unit Keban II, Cabang Bayung Lencir, Unit Mangsang, Cabang Sungai Lilin, Unit Sukadamai Baru, Cabang Keluang, Unit Sridamai, Unit Tanjung Dalam, Unit Lokajaya, Cabang Tanah Abang, Unit Pinggap-Pengaturan, Unit Sungai Napal, Unit Bukit Pangkuasan,

Cabang Lais, Unit Epil, Unit Teluk Kijing, Unit Petaling, Unit Tanjung Agung Barat, Unit Danau Cala, Cabang Tebing Bulang, Unit Kramat Jaya, Cabang Bandar Agung, Cabang Sidorahayu, Unit Air Putih Ulu, Unit Bukit Indah, Unit Warga Mulya, Unit Air Putih Ilir, Unit Sukajaya, Unit Sukadamai, Unit Talang Tinggi (Supat), Unit Langkap, Cabang Ulak Paceh Jaya, Unit Pandan Dulang, Unit Karang Ringin, Cabang Peninggalan, Unit Jirak, dan Unit Sinar Jaya. Total kapasitas sumber terpasang sebesar 1.325 l/detik, dengan kapasitas yang belum dimanfaatkan sebesar 45 l/detik dan kapasitas produksi 1.280 l/detik. Sumber air yang digunakan berasal dari Sungai Musi, Sungai Lalan, Sungai Air Dawas, Sungai Batanghari Leko, Sungai Tungkal, Danau Konger, serta beberapa unit yang menggunakan sumber air dari Embung. Infrastruktur ini melayani 296.930 jiwa pelanggan dengan cakupan pelayanan sebesar 42,07%. Total panjang pipa distribusi di PDAM Tirta Randik adalah 985.353 meter. Persentase kebocoran produksi mencapai 26,20%, yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan standar kehilangan air yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 18-20%. Cakupan pelayanan SPAM oleh SPAM Perdesaan pada tahun 2023 adalah 168.579 Jiwa atau 23,88.%, dari total jumlah penduduk yang berjumlah 705.855 jiwa. Sumber air yang digunakan oleh SPAM Perdesaan (SPAMDes) pada umumnya berasal dari sungai, embung dan danau. SPAM Perdesaan dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Randik umumnya menggunakan pemompaan.

Secara umum, kinerja Perumda Air Minum Tirta Randik cukup baik. Kondisi tersebut terlihat dari penilaian kinerja berdasarkan indikator Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR sebesar 2,91 tahun

2023 dengan kategori “Sehat”terjadi peningkat dari 2,84 pada tahun 2022 sedangkan menurut indikator Kepmendagri No 47 Tahun 1999 sebesar 5,11 tahun 2023 dengan kategori “Cukup”. Permasalahan teknis yang muncul pada pengelolaan SPAM Perumda Tirta Randik adalah: Tingginya biaya operasional terutama pada biaya listrik yaitu sebesar Rp 1.032/ M^3, Rendahnya Pemakaian air Rata-rata Tingkat Domestik yaitu sebesar 14,7 M^3, Tingginya Kehilangan Air yaitu sebesar 56,24%, dikarenakan banyaknya meter air yang rusak dan Meter Air Pelanggan tidak pernah dikalibrasi. Kesadaran Pelanggan untuk membayar sangat rendah, sehingga banyak pelanggan yang pembayarannya menunggak pada setiap bulannya. Tarif air yang berlaku masih sangat rendah, belum memenuhi target Full Cost Recovery (FCR). Sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan. Perhitungan kebutuhan air di Kabupaten Musi Banyuasin didapatkan dari proyeksi penduduk hingga tahun 2045, perhitungan kebutuhan non-domestik (15% x kebutuhan domestik), serta kebutuhan air untuk kawasan strategis dan kehilangan air yang direncanakan sesuai dengan kriteria perencanaan, yaitu sekitar 18-20%.

Berdasarkan pertimbangan topografi wilayah layanan, sebaran penduduk, peruntukan wilayah, dan sumber air, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi 15 zona pelayanan. Skenario pengembangan wilayah SPAM di Kabupaten Musi Banyuasin memperhatikan target pemerintah untuk mencapai akses air aman 100% pada tahun 2030. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan sebesar 100% di tahun 2045 sedangkan akses rumah tangga perdesaan terhadap air minum perpipaan sebesar 77,05% pada tahun 2045. Analisis kelayakan ekonomi bagi PDAM

menunjukkan bahwa nilai NPV dari rencana pengembangan selama 20 tahun ke depan bernilai positif. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2002 Kabupaten Musi Banyuasin dimekarkan menjadi dua kabupaten sehingga pada tahun 2005 Perda tersebut diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tanggal 25 Juli 2005. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 bentuk badan usaha berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Randik. Bentuk hukum tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Jumlah karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 adalah 368 orang yang melayani sebanyak 38.270 unit sambungan langganan (SL). Rasio jumlah pegawai per 1.000 pelanggan pada tahun 2023 adalah 9,61 pegawai, idealnya maksimal 8 pegawai untuk 1.000 pelanggan.

Ketersediaan Dukungan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Digitalisasi dalam administrasi pemerintahan, seperti *e-office*, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa, telah diterapkan hingga tingkat desa. Selain itu, beberapa sektor, termasuk kependudukan, catatan sipil, dan investasi, telah

mengimplementasikan layanan berbasis digital. Tersedianya akses internet melalui *Wi-Fi* publik di perkotaan dan internet satelit di kecamatan mendukung akses informasi bagi masyarakat. Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan berbasis digital yang lebih transparan dan efisien. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah serta kerja sama dengan sektor swasta dan perguruan tinggi, tata kelola pemerintahan semakin kuat dan mendukung pembangunan yang lebih baik.

3. Isu Strategis Eksternal:

1) Isu Strategis Provinsi

Visi pembangunan jangka panjang provinsi Sumatera Selatan yaitu pada periode 2025-2045 yakni "Sumatera Selatan Maju, Terdepan dan Berkelanjutan". Pada dua puluh tahun ke depan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengembangkan arah, program, dan kegiatan yang tepat untuk pembangunan daerah sehingga mendukung dan selaras dengan kebijakan provinsi.
Berkomitmen menjadi provinsi terdepan dan terbaik di Indonesia dari sisi ekonomi dan sosial, serta berkomitmen dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat mendukung isu strategis tersebut dengan merancang program pembangunan yang selaras dengan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan
Misi pembangunan yang akan dilakukan yaitu: 1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai pusat pertumbuhan regional; 2) mewujudkan sumber daya energi	Dengan Potensi Sumber daya alam yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi penyokong Misi Pembagunan Jangka Panjang

dan ketahanan pangan berkelanjutan; 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 4) meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; serta 5) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Provinsi Sumatera Selatan terutama dari sisi lokasi yang strategis yang dapat menjadi magnet pertumbuhan regional dan tersedianya sumber daya energy dan kondisi tofografi yang cocok untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan

a. Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045

Arah kebijakan perekonomian untuk dua puluh tahun yang akan datang yakni berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	Kabupaten Musi Banyuasin menyelaraskan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan RPJPD Sumatera Selatan dengan penekanan pada pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan
Mengembangkan arah kebijakan pembangunan di sektor pertanian, pertambangan, industri, dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (*green growth*).	Arah kebijakan pembangunan di sektor pertanian, pertambangan, industri, dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dalam konteks penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dapat dijelaskan sebagai upaya untuk merancang strategi pembangunan yang tidak hanya

	fokus pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga mempertimbangkan kualitas hidup masyarakat serta kelestarian sumber daya alam.

b. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah, Sarana, dan Prasarana Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045

Arah kebijakan pengembangan wilayah, sarana, dan prasarana Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, menetapkan tujuh arah utama yang menjadi landasan dalam pembangunan wilayah. Pertama, pengembangan sistem pusat permukiman yang berhirarki, terpadu, dan berkualitas, dengan fokus pada penyediaan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas sistem jaringan prasarana wilayah yang berkualitas secara terpadu, yang mencakup perbaikan transportasi, sistem telekomunikasi, dan pengembangan fasilitas publik. Ketiga, pemantapan kawasan berfungsi lindung secara berkelanjutan, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem. Keempat, pengembangan fungsi budidaya secara produktif, terpadu, dan berkelanjutan, berbasis potensi wilayah, yang memaksimalkan penggunaan lahan untuk sektor pertanian, perkebunan, dan industri dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kelima, pengembangan kawasan strategis berbasis potensi wilayah, yang berfokus pada kawasan yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Keenam,

pemanfaatan ruang secara produktif, harmonis, dan berkelanjutan, yang berusaha menyelaraskan pembangunan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Ketujuh, pengendalian fungsi lindung dan fungsi budidaya secara berkelanjutan, yang memastikan bahwa penggunaan lahan dan ruang diatur secara seimbang antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.

Arah kebijakan ini menjadi peluang besar bagi Kabupaten Musi Banyuasin, yang dapat memanfaatkan potensi yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas wilayah secara signifikan. Dalam hal ini, interkonektivitas wilayah menjadi sangat penting. Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengoptimalkan posisi geografisnya yang strategis, dengan memanfaatkan konektivitas antarwilayah yang semakin terbuka berkat berbagai proyek infrastruktur besar. Selain itu, peningkatan konektivitas antara kabupaten, provinsi, dan daerah lain akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, meningkatkan distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang kerja baru.

Pengembangan sektor infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu fokus utama dalam rencana pembangunan ini. Di antaranya adalah rencana pengembangan Tol Trans Sumatera Selatan-Jambi, yang akan memberikan akses transportasi lebih mudah dan efisien, mempercepat pergerakan barang, serta meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut. Selain itu, Pelabuhan Samudera Tanjung Carat juga akan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang dapat mendukung perdagangan lokal dan internasional, serta membuka peluang baru dalam sektor perikanan, industri, dan logistik.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas konektivitas, ada juga rencana untuk perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, yang akan memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat. Tidak kalah pentingnya, rencana pembangunan infrastruktur teknologi seperti pengembangan internet desa dan pemasangan *Fiber Optic* Gantung Antar-Kawasan akan memperkuat konektivitas digital, memberikan akses informasi yang lebih cepat dan merata, serta mendukung kegiatan ekonomi berbasis teknologi.

Rencana pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kecamatan Sungai Lilin juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan lokal. Kehadiran fasilitas ini dapat menjadi pusat distribusi produk-produk lokal, meningkatkan kualitas layanan dan mendorong perekonomian yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, kebijakan pengembangan wilayah ini, bersama dengan pengembangan infrastruktur dan konektivitas yang lebih baik, memberikan peluang strategis bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk bertransformasi menjadi daerah yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan. Keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana akan memperkuat daya saing daerah ini di tingkat nasional dan internasional.

c. RPJMD Sumatera Selatan 2025-2029

a) Angka kemiskinan dan *stunting* yang masih tinggi

Kemiskinan dan stunting adalah dua isu besar yang saling berkaitan di Provinsi Sumatera Selatan. Kemiskinan yang masih tinggi di beberapa wilayah kabupaten/ kota menyebabkan akses terbatas

terhadap kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan anak-anak, menyebabkan stunting atau kekurangan gizi kronis yang menghambat perkembangan fisik dan mental mereka. Sehingga perlunya fokus pada program pengentasan kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, akses ke kredit mikro, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, intervensi khusus untuk mengatasi stunting sangat diperlukan. Program-program seperti pemberian makanan tambahan bergizi, edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta peningkatan layanan kesehatan bagi anak-anak harus ditingkatkan. Hal penting untuk membantu menyelesaikan problem kemiskinan dan stunting ini adalah dengan mendekatkan layanan kesehatan di wilayah-wilayah pedesaan dan perbatasan serta memastikan ketersedian tenaga kesehatan yang profesional yang yang terpenting dukungan semua stakeholder untuk mensosialisasikan pola hidup sehat dan bergizi dari awal masa kehamilan sampai anak-anak dewasa. Mengintegrasikan upaya kesehatan dengan program kesejahteraan sosial dapat memastikan bahwa keluarga miskin mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan stunting. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kedua isu ini secara efektif.

b) Belum optimalnya produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan

Sektor pertanian di Sumatera Selatan memiliki potensi besar namun produktivitasnya belum optimal. Banyak petani masih menggunakan teknik-teknik tradisional yang kurang efisien dan

tergantung pada kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan adopsi teknologi pertanian modern, pelatihan bagi petani, dan akses yang lebih baik ke pasar. Pemerintah daerah dapat berperan dengan menyediakan fasilitas irigasi, subsidi benih dan pupuk, serta membangun infrastruktur pertanian yang memadai. Di samping itu, hilirisasi komoditas unggulan juga perlu diperkuat. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan kopi bisa diolah lebih lanjut untuk pasar domestik dan ekspor. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi dalam industri pengolahan dan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan hilirisasi. Dengan demikian, sektor pertanian dapat menjadi lebih produktif dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah.

c) Belum optimalnya akses pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan besar di Sumatera Selatan. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga masyarakat di daerah tersebut kesulitan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan distribusi guru dan tenaga kesehatan ke daerah-daerah yang kekurangan, serta membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang layak. Selain itu, kualitas layanan yang diberikan juga harus ditingkatkan. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga kesehatan

sangat penting untuk memastikan mereka mampu memberikan layanan yang berkualitas. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan dan kesehatan, seperti *e-learning* dan *telemedicine*, juga dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan. Dengan demikian, semua masyarakat di Sumatera Selatan dapat menikmati layanan pendidikan dan kesehatan yang setara dan berkualitas.

d) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas yang merata antarwilayah

Pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih masih belum merata di Sumatera Selatan. Banyak wilayah yang masih terisolasi dan tidak memiliki akses yang memadai ke infrastruktur dasar ini, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dengan fokus pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan terutama wilayah perbatasan dan desa-desa yang jauh dari pusat layanan publik. Selain infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah juga harus ditingkatkan. Jalan raya yang menghubungkan antarwilayah, jaringan transportasi yang efisien, dan akses internet yang cepat dan stabil adalah beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan. Peningkatan konektivitas ini tidak hanya akan mempermudah pergerakan barang dan orang, tetapi juga akan membuka peluang baru bagi perkembangan ekonomi lokal sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal. Dengan infrastruktur dan konektivitas yang baik, wilayah-wilayah di Sumatera Selatan dapat berkembang lebih merata dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian daerah yang pada akhirnya dapat mengurangi

tuntutan pemekaran wilayah jika persoalan layanan dan pemerataan infrastruktur sudah terpenuhi.

e) Belum optimalnya mitigasi bencana (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan)

Sumatera Selatan sering menghadapi berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Upaya mitigasi bencana ini masih belum optimal, yang terlihat dari kerusakan yang signifikan dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh bencana-bencana tersebut. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem peringatan dini, membangun infrastruktur yang tahan bencana, dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tindakan yang harus diambil saat terjadi bencana. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam upaya mitigasi bencana. Program reboisasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengendalian aliran sungai, serta pengaturan tata ruang yang baik dapat mengurangi risiko bencana. Penggunaan teknologi untuk pemantauan dan penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan. Dengan langkah-langkah ini, dampak bencana alam dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

f) Belum optimalnya daya saing dan realisasi investasi

Daya saing Sumatera Selatan dalam menarik investasi masih rendah, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti regulasi yang kurang mendukung, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya promosi potensi daerah. Untuk meningkatkan daya saing,

pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memperbaiki regulasi, memberikan insentif kepada investor, dan membangun infrastruktur penunjang seperti kawasan industri dan pusat logistik. Realisasi investasi juga perlu ditingkatkan melalui promosi yang efektif dan dukungan yang berkelanjutan bagi investor. Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang peluang investasi, serta mendampingi investor selama proses investasi dapat meningkatkan kepercayaan dan minat mereka. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing juga penting untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor yang menjadi prioritas investasi. Dengan langkah-langkah ini. Sumatera Selatan dapat meningkatkan daya saingnya dan menarik lebih banyak investasi yang berdampak positif bagi perekonomian daerah.

g). Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah untuk pengembangan wilayah

Kapasitas fiskal daerah yang rendah menjadi hambatan utama dalam pembiayaan program-program pembangunan di Sumatera Selatan. Pendapatan asli daerah yang terbatas dan ketergantungan pada dana transfer dari pusat mengakibatkan keterbatasan anggaran untuk mengembangkan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan. Pemerintah daerah perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru, seperti melalui optimalisasi pajak dan retribusi, serta mengelola aset daerah secara lebih efisien. Peningkatan kapasitas fiskal juga memerlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan dana yang tersedia

digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, perencanaan anggaran yang tepat dan prioritas yang jelas dalam pengeluaran dapat membantu pemerintah daerah mencapai tujuan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, Sumatera Selatan dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya dan membiayai program-program yang penting untuk pembangunan daerah.

h) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Sumatera Selatan mengalami penurunan, salah satunya di area sekitar bekas tambang. Penurunan kualitas lingkungan hidup terjadi akibat perubahan iklim yang kemudian menimbulkan terjadinya polusi udara, peningkatan lahan kritis, peningkatan laju deforestasi, dan area gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin buruk di Sumatera Selatan menjadi ancaman yang harus dicegah sebelum memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian, sosial, keamanan, maupun lingkungan. Isu penurunan kualitas lingkungan hidup tentu juga akan menjadi ancaman bagi Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga penting untuk melihat arah pembangunan khususnya sektor lingkungan hidup. Salah satu ancaman yang memengaruhi turunnya kualitas lingkungan hidup di Musi Banyuasin adalah adanya eksploitasi lingkungan oleh industri pertambangan batubara. Kegiatan ini dapat merusak ekosistem alam dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Terjadinya kerusakan di hulu DAS Musi dan Batanghari Leko, perambahan kawasan suaka margasatwa, dan kawasan hutan menjadi isu strategis yang memerlukan mitigasi serius. Selain itu terdapat gangguan 327 dari

wilayah tambang yang mana penggunaan jalan angkutan tambang batubara antarwilayah juga menjadi ancaman karena dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan serta berdampak negatif terhadap lingkungan.

Adanya ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup harus dikelola Kabupaten Musi Banyuasin sebelum menimbulkan hambatan bagi sektor lainnya. Dalam konteks lingkungan hidup, Kabupaten Musi Banyuasin sudah memiliki beberapa upaya seperti adanya bantuan dari provinsi dalam pemadaman kebakaran sumur minyak ilegal, perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, dan kajian risiko bencana, sebagai peluang peningkatan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu adanya ancaman dan peluang dalam mengelola lingkungan hidup harus dapat diselaraskan oleh Kabupaten Musi Banyuasin guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

i). Adanya Transformasi Ekonomi dan Energi Berkeadilan

Sumatera Selatan memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang dimiliki daerah untuk menopang perekonomian daerah dan pembangunan yang merata antarwilayah. Oleh karena kekayaan SDA daerah yang besar, Sumatera Selatan ditetapkan menjadi lumbung pangan dan lumbung energi nasional dengan kekayaan SDA yang dimiliki. Hal tersebut tentu menjadi peluang daerah untuk mencapai transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dengan peningkatan nilai tambah dari SDA yang dimiliki. Kondisi tersebut juga menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengembangkan SDA yang ada guna

mencapai transformasi ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan yang didukung sumber daya alam harus direncanakan secara baik untuk memastikan nilai ekonomis pembangunan antarwilayah dalam kabupaten Musi Banyuasin tidak terjadi ketimpangan. Pemerintah perlu membangun konektivitas wilayah kecamatan terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga akses layanan publik tidak terganggu. Selain infrastruktur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik baik kesehatan, pendidikan, pencatatan sipil, dan perizinan di wilayah yang jauh dari Ibu kota Kabupaten.

4) Isu Strategis Nasional:

a. RPJPN 2025-2045: Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas adalah visi pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berpengaruh di dunia pada tahun 2045. Tujuan Indonesia Emas 2045 telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2025-2045. Visi yang dibawa Indonesia selama dua puluh tahun yang akan datang mengarah pada pembangunan dan pemerataan daerah di berbagai bidang, seperti pemerataan pembangunan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemantapan tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, terdapat 8 misi dan 17 arah pembangunan yang harus dicapai secara kolaboratif dengan seluruh actor baik di pusat maupun daerah. Adanya visi Indonesia Emas 2045 menjadi

peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus mendorong potensi daerah melalui SDA dan SDM yang dimiliki. Pengembangan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin dan berbagai sistem yang sudah ada sebelumnya juga dapat terdorong lebih baik lagi sehingga mampu memajukan daerah secara berkelanjutan.

b. Prioritas Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin

Berikut adalah usulan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan skala dampak, pentingnya, dan keterkaitannya dengan visi Indonesia Emas 2045:

1. Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur merupakan kunci dalam mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar dalam bidang transportasi, energi, dan aksesibilitas yang dapat diperkuat dengan infrastruktur yang memadai. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pusat ekonomi akan mempercepat transformasi ekonomi, memudahkan akses pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Infrastruktur berkelanjutan berperan penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan, yang menjadi bagian dari 17 arah pembangunan RPJMN 2025-2045.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara Berkelanjutan. SDA Kabupaten Musi Banyuasin, seperti pertanian, perkebunan, dan sektor energi, jika dikelola secara efektif, dapat mendorong kemajuan ekonomi daerah. Pengelolaan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi dapat menciptakan peluang ekonomi tanpa

merusak lingkungan. Ini akan mendukung Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang. Pemanfaatan SDA dengan prinsip keberlanjutan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam visi Indonesia Emas 2045.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar sangat penting untuk mendukung kemajuan daerah. Program-program pelatihan keterampilan dan pendidikan tinggi yang mengarah pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) akan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal. SDM yang unggul akan memaksimalkan potensi daerah dan mendorong perkembangan sektor-sektor yang lebih inovatif. Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJMN yang menekankan pada pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengembangan Ekonomi Digital dan Industri Kreatif. Memasuki era digital, pengembangan sektor ekonomi digital dan industri kreatif menjadi sangat penting. Kabupaten Musi Banyuasin dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat transformasi ekonomi dan membuka peluang pasar baru. Ekonomi digital juga dapat menjadi katalis bagi pembangunan sektor lainnya seperti pariwisata, perdagangan, dan UMKM. Arah pembangunan Indonesia Emas 2045 juga mendorong penguasaan teknologi dan digitalisasi untuk memperkuat ekonomi dan pemerintahan. Ini mendukung pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan dan modernisasi ekonomi daerah.

5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan perkembangan masyarakat. Dalam era Indonesia Emas 2045, pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan dengan efisien, akuntabel, dan transparan agar dapat mendukung pencapaian pembangunan secara inklusif. Hal ini juga akan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mempercepat penyelesaian masalah sosial-ekonomi. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan RPJMN yang menekankan pada pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat. Pembangunan sosial yang fokus pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan akan membawa dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Meningkatkan kualitas kesehatan juga berperan penting dalam mewujudkan SDM yang produktif dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Misi Indonesia Emas 2045 menekankan pada pembangunan manusia yang sehat, berpendidikan, dan memiliki kualitas hidup yang baik, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial.
7. Pengembangan Energi Terbarukan dan Infrastruktur Hijau. Pengembangan energi terbarukan di Musi Banyuasin dapat meningkatkan kemandirian energi dan mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan sumber energi lokal yang berkelanjutan seperti energi matahari dan biomassa dari

kelapa sawit, daerah ini dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan dampak perubahan iklim. Salah satu arah pembangunan dalam RPJMN adalah menuju energi berkelanjutan, yang merupakan bagian integral dari visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan negara yang ramah lingkungan dan maju.

Dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur, pengelolaan SDA yang berkelanjutan, peningkatan SDM, dan digitalisasi ekonomi, Kabupaten Musi Banyuasin akan dapat berkontribusi secara signifikan pada pencapaian Indonesia Emas 2045. Misi pembangunan yang berkelanjutan, berbasis teknologi, dan pemerintahan yang efisien menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta dan masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi jangka panjang ini.

5) Isu Strategis Internasional

a. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

SDGs telah ditetapkan PBB sebagai komitmen pembangunan Bersama hingga tahun 2030. SDGs bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global yang dihadapi dunia saat ini, seperti kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidakadilan sosial. Tujuannya adalah menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua orang. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan panduan global untuk aksi kolektif dalam mengatasi tantangan global dan mencapai

pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs terdiri dari 4 Pilar pembangunan, yaitu Pembangunan Sosial, Pembagunan Ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan Pembangunan Hukum dan Tata kelola, yang diturunkan menjadi 17 tujuan, untuk mencapai tujuan SDGs ini memerlukan koordinasi, kerja sama, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah. Kabupaten Musi Banyuasin menjadikan SDGs sebagai peluang dalam menyusun rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan

b. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di dunia semakin cepat dan tidak dapat dihindari. Teknologi yang semakin canggih harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dalam mendukung terlaksananya aktivitas dengan mudah. Teknologi yang semakin berkembang pun menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung perekonomian, pendidikan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan tata kelola yang lebih baik. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan dalam melakukan pembenahan regulasi, data dan informasi, serta infrastruktur daerah. Namun perkembangan teknologi yang semakin cepat juga dapat menjadi ancaman apabila sulit mengimbangi kemajuan teknologi. Ancaman dapat terjadi terhadap keamanan data dan informasi, menghambat persaingan. pasar secara global, hingga terjadi ketidakpuasan pelayanan publik. Oleh karena itu Kabupaten Musi Banyuasin juga harus memperbaiki system informasi dan komunikasi daerah, salah satunya infrastruktur digital guna menghambat terjadinya ancaman akibat kemajuan teknologi yang semakin cepat

c. Bonus demografi global

Fenomena bonus demografi global sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dapat memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas, yang memberikan dampak lanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kehidupan sosial. Adanya fenomena bonus demografi global juga akan menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendorong pembangunan daerah. Pemanfaatan peluang tersebut tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan pelatihan bagi para angkatan kerja sehingga lebih unggul dan berdaya saing dari tenaga kerja lainnya. Namun demikian apabila bonus demografi global tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, maka akan menjadi beban perekonomian dan memicu terjadinya angka pengangguran yang tinggi. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk memanfaatkan potensi daerah dalam membangun lapangan kerja, sehingga membantu kapasitas tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan dan berdampak lanjut terhadap peningkatan pendapatan daerah. Peran Kabupaten Musi Banyuasin juga penting untuk memperhatikan angkatan kerja usia produktif dengan memberikan pengembangan, sarana, atau bentuk dorongan lainnya sehingga mampu memanfaatkan peluang dan meminimalisir terjadinya ancaman.

d. Geopolitik dan geoekonomi

Geopolitik dan geoekonomi menjadi peluang dan tantangan untuk mencapai salah satu target pembangunan Indonesia 2045, yakni menjadi bagian dari negara maju yang berdaya saing global.

Perkembangan geopolitik memberikan dampak yang sangat luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Geopolitik dapat menjadi peluang dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional melalui daya tarik investasi dan perdagangan global, nasional, dan regional. Namun geopolitik dapat menjadi ancaman persaingan antar-negara yang semakin kuat hingga munculnya kekuatan baru. Oleh karena itu Kabupaten Musi Banyuasin harus mendorong pembangunan daerah, baik itu infrastruktur, perekonomian, hingga pertahanan dan keamanan untuk meningkatkan daya saing serta menghindari berbagai ancaman geopolitik dan geoekonomi ke depannya.

e. Perubahan konstalasi perdagangan global

Terjadi pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global dimana perdagangan internasional akan berpusat di Kawasan Asia-Afrika. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara ASEAN termasuk Indonesia. Hal ini tentu akan menjadi peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia terutama Indo-Pasifik. Fenomena tersebut akan menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendorong perekonomian daerah yang berdaya saing global hingga mampu menjadi sumber kekuatan ekonomi negara.

f. Tata kelola keuangan Global

Perkembangan sektor keuangan global saat ini menjadi perhatian penting bagi seluruh negara. Sebuah transformasi keuangan dengan teknologi finansial menjadi tujuan arah keuangan

komersial yang berkelanjutan dan berdampak. Perubahan tata kelola keuangan ini menandai dimulainya standar baru dalam sektor keuangan ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan bagi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam skala global. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk membangun pondasi keuangan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi keuangan dan pengintegrasian kebijakan keuangan daerah. Selain itu, kondisi tersebut juga peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan melalui pengembangan teknologi informasi keuangan. Perubahan tata kelola keuangan yang lebih modern akan membantu integritas pengelolaan keuangan sehingga berdampak bagi pembangunan di masa yang akan datang.

g. Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Ketersediaan Sumber Daya Alam semakin terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Ketersediaan yang semakin terbatas bukan hanya disebabkan oleh semakin banyaknya populasi manusia, namun juga dipengaruhi oleh terjadinya krisis global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan penurunan keanekaragaman hayati. Terjadinya krisis iklim global tersebut menjadi masalah penting yang harus diperhatikan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari krisis iklim tersebut akan mengganggu fungsi, kapasitas, dan efisiensi lingkungan, sumber daya alam, maupun infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan seluruh negara untuk menangani masalah iklim global yang mengarah pada praktik pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular dan ekonomi hijau, serta

pembangunan rendah karbon. Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Climate Action* oleh PBB di tahun 2019, disepakati pula *roadmap* global untuk memulai proses dekarbonisasi di tahun 2020. Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen melalui *Paris Agreement* tahun 2015 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Oleh karena itu dengan adanya upaya global dalam menghadapi krisis lingkungan, menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengembangkan arah perencanaan pembangunan daerah sehingga mampu meminimalisir ancaman kerugian ekonomi dan sosial.

h. Urbanisasi dunia

Fenomena urbanisasi dunia semakin meningkat di abad 20-an mengingat terjadinya peningkatan di sektor industri. Di tahun 2023, tingkat urbanisasi di seluruh dunia terjadi sebesar 57 persen. Hal ini menandakan bahwasanya semakin banyak penduduk desa yang masuk dan tinggal di wilayah perkotaan. Isu ini memengaruhi kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin dengan memberikan peluang untuk mengembangkan kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkotaan. Untuk itu, diperlukan pembangunan SDM yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam lingkungan perkotaan yang dinamis, kompetitif, dan beragam. Selanjutnya, diperlukan pula pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, seperti transportasi, perumahan, fasilitas umum, dan ruang terbuka. Pembangunan infrastruktur perkotaan juga harus memperhatikan

aspek lingkungan hidup agar tidak menimbulkan masalah lingkungan, seperti polusi, kemacetan, banjir, dan sampah.

i. Pertumbuhan kelas menengah

Isu pertumbuhan kelas menengah di dunia mengalami perkembangan pesat sejak tahun 2003, khususnya di Benua Asia. Di tahun 2030, diperkirakan sebanyak 700 juta orang akan bergabung dalam kelas menengah global. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah total populasi dunia mengalami peningkatan ekonomi kelas menengah. Isu pertumbuhan tersebut tentu menjadi peluang bagi Indonesia untuk\ mendorong produktivitas penduduk guna mencapai peningkatan pendapatan. Bank Dunia juga mencatat bahwa selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami kenaikan kelas menengah sebesar 20 persen dari total penduduk. Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi pemerintah, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendukung pertumbuhan kelas menengah melalui kebijakan atau pun penyediaan fasilitas yang sesuai. Isu pertumbuhan kelas menengah akan memengaruhi kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menjadikannya peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi dan investasi penduduk kelas menengah, serta menciptakan pasar yang luas dan potensial. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan dan harapan penduduk kelas menengah, seperti mobilitas, konektivitas, dan gaya hidup. Pembangunan infrastruktur kelas menengah juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti konsumsi berlebihan, limbah, dan emisi. Pemanfaatan peluang isu pertumbuhan kelas menengah juga harus

dibarengi dengan kebijakan yang tepat untuk memperluas kelas menengah dan membuka potensi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin. Melalui kebijakan yang tepat, pengelolaan SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan kelas menengah lebih terjamin pelaksanaannya.

j. Persaingan sumber daya alam (SDA)

Persaingan dalam pemanfaatan SDA menjadi isu yang kompleks di seluruh negara. Persaingan SDA semakin meningkat karena terjadi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing negara hingga menyebabkan perebutan, konflik, hingga perang antar negara untuk mendapatkan kekuasaan atas SDA. Isu ini tentu menjadi tantangan bagi Indonesia, khususnya masing-masing daerah yang memiliki SDA berlimpah, untuk menemukan upaya menjaga kuantitas dan kualitas SDA yang dimiliki. Dalam konteks ini, Kabupaten Musi Banyuasin harus berupaya memperbaiki kebijakan dan sistem pengelolaan SDA-nya guna melindungi penggunaan SDA untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya kebijakan pengelolaan SDA yang tepat akan mendorong inovasi pemanfaatan SDA dengan prinsip berkelanjutan.

Tabel 2.96. Integrasi Isu KLHS RPJMD

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan Sektor Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Desa	Masih terdapat kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Akses masyarakat miskin terhadap peluang ekonomi, seperti permodalan usaha dan pelatihan keterampilan, masih terbatas. Tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata, terutama di daerah terpencil	Masih terdapat masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang hidup di bawah garis kemiskinan	Kemiskinan global	Ketimpangan ekonomi antar negara	Ketergantungan pada sektor pertanian, perkebunan, dan tambang yang tidak berkelanjutan juga mempengaruhi daya dukung lingkungan dan ekonomi, menyebabkan kesenjangan sosial dan kemiskinan	Kemiskinan dan kesenjangan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan rumah sakit dan puskesmas yang lebih merata di wilayah pedesaan dan perkotaan	Keterbatasan Fasilitas Kesehatan, Peningkatan jumlah peserta JKN perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan untuk memastikan akses dan kualitas pelayanan yang memadai.	Perlunya peningkatan SDM dan Fasilitas bidang Kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan pekerja	Munculnya Penyakit Endemik Global (covid 19)	perlunya program kesehatan yang lebih inklusif untuk pekerja non-formal	Pemerataan pengguna BPJS Kesehatan	Kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar
Kemajuan teknologi informasi untuk pendidikan jarak jauh (online) dan meningkatkan fasilitas transportasi untuk memudahkan siswa menuju	sarana pendidikan, rendahnya kesadaran pendidikan, keterbatasan akses dan infrastruktur sekolah terutama di daerah	Masih terdapat anak putus sekolah,nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran	Kesenjangan akses terbatas terhadap fasilitas belajar yang memadai	Kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan anggaran daerah untuk fasilitas pendidikan	Infrastruktur dan literasi digital untuk peningkatan akses pendidikan yang inklusif	Kesenjangan akses dan sarana pendidikan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
sekolah. potensi dalam pemberdayaan masyarakat lokal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran pendidikan melalui program-program edukasi berbasis komunitas	terpencil, kurangnya tenaga pendidik serta fasilitas belajar yang memadai, rendahnya kualitas pembelajaran akibat metode yang kurang inovatif, serta minimnya intervensi pemerintah yang tepat sasaran seperti beasiswa dan program pendidikan alternative					
Potensi biomassa dari sektor pertanian dan perkebunan, serta potensi tenaga surya yang dapat dimanfaatkan	keterbatasan infrastruktur dan investasi dalam energi terbarukan, rendahnya kesadaran masyarakat	Masih tingginya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi dengan sumber bahan baku energi yang tidak terbarukan Belum	Transisi menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan	Terbatasnya infrastruktur dan investasi untuk mengembangkan energi terbarukan,	Belum kuatnya dalam infrastruktur, kebijakan, dan investasi untuk mendukung transisi energi	Belum dimanfaatkanya potensi biomasa dan tenaga surya di daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
mengingat iklim tropis	dan industri terhadap penggunaan energi ramah lingkungan, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan seperti biomassa, tenaga surya. Selain itu, kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung transisi energi, biaya awal yang tinggi untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan, serta kurangnya	maksimalnya pengelolaan sumber daya energi terbarukan			yang lebih ramah lingkungan	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	insentif bagi pelaku usaha energi hijau					
Potensi besar dalam mengembangkan industri pengolahan produk-produk lokal berbasis pertanian, seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya, yang dapat membuka banyak lapangan kerja formal dengan keterampilan yang lebih relevan	Keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta minimnya akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan sektor informal yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian adanya ketergantungan ekonomi pada sektor perkebunan	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja Terpuruknya bidang pekerjaan sektor informal selama pandemi COVID 19	Tingginya tingkat pengangguran global, ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi	Terpuruknya bidang pekerjaan sektor informal selama pandemic dan tingginya tingkat pengangguran di beberapa wilayah	Penurunan pendapatan sektor informal, serta tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang inklusif dan berkelanjutan	Rendahnya daya saing tenaga kerja Dan Belum optimalnya riset dan inovasi pengelolaan produk lokal

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan pertambangan yang fluktuatif menyebabkan ketidakstabilan lapangan kerja.					
Tersedianya lembaga keuangan mikro dan sektor swasta untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan fasilitas pendukung seperti teknologi yang efisien	Rendahnya keterampilan manajerial dan inovasi produk, keterbatasan modal dan teknologi produksi, serta kurangnya standar kualitas dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, akses pasar masih terbatas akibat minimnya infrastruktur pendukung, jaringan distribusi yang	Masih diperlukannya peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dan Kualitas Produk serta perlunya peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha	Investasi dalam teknologi, pelatihan, dan infrastruktur yang mendukung agar produk dan kapasitas usaha dapat bersaing di pasar internasional	Tantangan dalam meningkatkan daya saing usaha, terutama di negara-negara berkembang, keterbatasan pelaku usaha dalam mengakses pasar global,	Rendahnya daya saing lokal	Pertumbuhan investasi dan daya saing ekonomi Lokal

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	belum optimal, serta kurangnya promosi dan pemanfaatan platform digital					
Potensi penguatan dan pengembangan infrastruktur sistem informasi dan teknologi (ICT)	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi, keterbatasan sistem dan infrastruktur pengelolaan data, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam ketersediaan data sektoral	Masih perlunya peningkatan kerjasama antar pihak dalam pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah	Kesenjangan dalam infrastruktur data dan kapasitas analisis di banyak negara, terutama negara berkembang.	Keterbatasan sistem data yang ada di tingkat daerah, yang menghambat efektivitas perencanaan dan evaluasi pembangunan regional	Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mengumpulkan serta berbagi data yang akurat	Kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	yang akurat dan terintegrasi, sehingga menghambat proses perencanaan dan evaluasi pembangunan					
Potensi sumber daya air yang melimpah dari Sungai Musi dan anak sungainya, didukung oleh program pemerintah, teknologi pengolahan air, serta peluang investasi dalam infrastruktur air bersih. Selain itu, penguatan kemitraan dengan swasta, optimalisasi peran BUMD	Terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan air baku meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan air bersih, rendahnya cakupan layanan air perpipaan, serta keterbatasan sumber daya air baku yang layak akibat	Masih terdapat warga kabupaten Musi Banyuasin yang belum memperoleh layanan air bersih masih terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan air baku	Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.	Kurangnya investasi dan koordinasi antar pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem penyediaan air bersih di tingkat regional	Kurangnya infrastruktur yang memadai, serta tantangan dalam mendistribusikan dan pendanaan secara merata	Pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur air bersih

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pencemaran dan degradasi lingkungan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan investasi dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan turut menghambat pemerataan akses.					
Potensi lahan lahan yang belum optimal untuk mendorong pembangunan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.	Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan hunian layak, minimnya perencanaan tata ruang yang	Masih terdapat permukiman kumuh dan warga yang tidak memiliki rumah. Masih terjadinya banjir di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Adanya	Perubahan iklim yang memperburuk bencana alam seperti banjir, serta pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan	Kurangnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat daerah, serta dampak dari perubahan penggunaan	Keterbatasan dana dan kebijakan yang belum efektif untuk mengatasi permukiman kumuh, pengelolaan lahan yang	Akses terhadap pemukiman yang layak dan pemantau lingkungan hidup

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	terintegrasi, serta kurangnya infrastruktur drainase dan pengelolaan air. Selain itu, pembukaan lahan yang tidak terkontrol mengakibatkan degradasi lingkungan, peningkatan risiko banjir, dan berkurangnya daerah resapan air.	pembukaan/pengupas an lahan yang tidak terpantau		lahan yang tidak terkontrol	kurang terkontrol, serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan bencana alam seperti banjir, yang membutuhkan upaya mitigasi yang lebih komprehensif di tingkat nasional.	
Potensi sampah organik untuk produksi kompos dan sampah non-organik untuk daur ulang dapat menjadi alternatif solusi yang ramah lingkungan	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, terbatasnya fasilitas	Masih tingginya produksi timbulan sampah domestik warga	Peningkatan volume sampah yang dihasilkan akibat pola konsumsi yang tidak berkelanjutan, kurangnya sistem pengelolaan	Kesenjangan dalam pengelolaan sampah di berbagai wilayah	Keterbatasan dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien, rendahnya tingkat daur ulang, serta kurangnya	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pengelolaan sampah yang efisien, serta pengelolaan sampah yang belum terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, kurangnya inovasi dalam pengolahan sampah		sampah yang efektif		kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah.	
Potensi lahan dan wilayah hutan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi perubahan iklim	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung kesiapsiagaan bencana, serta ketidaksiapan dalam	Masih perlunya peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim	Frekuensi dan intensitas bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, serta kurangnya kerjasama internasional yang efektif dalam mitigasi dan adaptasi bencana	Koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim mencakup ketidakmerataan kapasitas berbagai wilayah dalam memitigasi bencana	Tantangan dalam memperkuat sistem tanggap bencana yang masih belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana alam	Kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif mengenai perubahan iklim

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin kompleks.					
Potensi sumber daya lokal, seperti bekerja sama dengan lembaga pendidikan, universitas, dan organisasi profesi untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum	Keterbatasan pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia dalam aparat penegak hukum juga mempengaruhi kualitas penegakan hukum yang optimal	Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum	Tantangan dalam memastikan akses keadilan yang merata, memperkuat sistem peradilan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di berbagai negara.	Tantangan dalam mengatasi ketidakadilan, korupsi, dan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan di berbagai negara, terutama di negara berkembang	Terbatasnya sarana dan prasarana di lembaga penegak hukum, seperti kekurangan fasilitas di pengadilan, kantor polisi, serta lembaga-lembaga hukum lainnya	Sarana dan cakupan pelayanan penegakan hukum
Potensi pendukung pembangunan kewilayahan, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan.	Permasalahan infrastruktur, dan tantangan terkait pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, kemiskinan masih menjadi	Isu Lingkungan yang mencakup pencemaran air, limbah padat, pemanfaatan sumber daya alam, dan penurunan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang	Ketimpangan antar negara, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, dan tantangan yang muncul dari ketimpangan	Ketimpangan wilayah timur barat, ketimpangan insfrastruktur dan sumber daya alam, kondisi geografis yang menantang	Program pembangunan nasional di bidang infrastruktur jalan, bendungan untuk mencapai pemerataan pembangunan	Pembangunan kewilayahan antar kecamatan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Selain itu, Muba juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	isu krusial, dipengaruhi oleh harga kebutuhan pokok yang mahal dan kerusakan infrastruktur jalan	pesat di beberapa wilayah serta perbedaan sumber daya alam dan manusia. Permasalahan ini membutuhkan upaya pengelolaan yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk menjaga daya dukung lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.	pertumbuhan kota dan desa di banyak negara. disebabkan oleh perbedaan infrastruktur, sumber daya alam, dan sumber daya manusia antar daerah.	juga menjadi hambatan, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman.		

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini menguraikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2025-2029. Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen ini berlandaskan pada gagasan dan arah kebijakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih**, H. M. Toha** dan **Rohman**. Sebagai dokumen strategis, RPJMD disusun dengan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017, yang mengatur Tata Cara dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Prosedur Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, termasuk Mekanisme Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, RPJMD ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan sektoral yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan program Pembangunan Provinsi dan Nasional. Oleh karena itu, Visi, Misi, serta Tujuan dan Sasaran yang telah dirancang dalam bagian ini harus diimplementasikan secara berkelanjutan dalam lima tahun ke depan agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran yang mempertimbangkan berbagai tantangan serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam penyusunannya, dilakukan kajian mendalam terhadap data dan kondisi aktual daerah guna memastikan bahwa strategi serta arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD ini mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara efektif. Dengan pendekatan yang berbasis pada data serta partisipasi publik, pemerintah daerah berharap RPJMD ini menjadi pondasi utama dalam mewujudkan Kabupaten Musi Banyuasin yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi dalam berbagai sektor.

3.1.1. Visi dan Misi

Sebagai upaya untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, langkah awal yang dilakukan adalah menelaah visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diemban Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 20 tahun yaitu **MUBA SERASAN 2045: Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan**. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045 dirancang untuk mencerminkan cita-cita daerah dalam mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang. Seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi, maka penyusunan visi jangka menengah dalam RPJMD 2025-2029 tidak hanya berlandaskan pada RPJPD, tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual serta proyeksi kebutuhan masyarakat ke depan.

Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Musi Banyuasin, dengan tetap berpegang pada Visi RPJPD 2025-2045, maka disusunlah arah pembangunan daerah yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Cita-cita ini menjadi gambaran tentang bagaimana pembangunan daerah harus dijalankan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui pendekatan yang inklusif, demokratis, serta berbasis pada data dan partisipasi publik.

Proses perencanaan, Visi dan Misi, serta Tujuan dan Sasaran didalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 disusun berdasarkan gagasan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, H. M. Toha dan Rohman. Dengan perumusan yang matang dan berbasis pada kajian empiris, diharapkan RPJMD ini dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin di berbagai sektor. Sebagai bentuk komitmen dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, visi yang diusung dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 juga berpedoman pada Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045, serta Visi RPJMN dan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029, yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin, RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMN

Visi RPJPD	Visi RPJMD		
Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045	**Visi RPJMN 2025-2029**	**Visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029**	**Visi RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029**
MUBA SERASAN 2045: Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas	Sumsel Maju Terus Untuk Semua	Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin

Sumber: SIPD Kab. Muba, diolah.

Tagline **"Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin"** mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk memastikan bahwa rumusan Visi di atas dapat diterapkan secara lebih operasional, diperlukan penjabaran dalam pokok-pokok visi beserta penjelasannya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pokok-pokok Visi Kabupaten Musi Banyuasin

Visi	Pokok-Pokok Visi	Keterangan
Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin	Maju Lebih Cepat	Penguatan SDM melalui transformasi pendidikan dan kesehatan harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan melayani agar pembangunan dapat lebih cepat. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan membutuhkan sistem pemerintahan efisien, transparan, dan berbasis teknologi, yang memungkinkan layanan publik lebih cepat dan merata. Digitalisasi di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti sistem informasi manajemen terintegrasi, akan mempercepat pemetaan kebutuhan tenaga pendidik dan medis, serta meningkatkan kualitas layanan. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan juga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan penyederhanaan birokrasi. Dengan pemerintahan modern dan responsif, dukungan terhadap pengembangan SDM akan lebih efektif, memberikan akses lebih baik pada pendidikan dan layanan kesehatan. Sinergi antara transformasi SDM dan inovasi tata kelola pemerintahan akan mendorong Musi Banyuasin maju lebih cepat, meningkatkan daya saing, dan menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.
	Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin	Rekonstruksi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung oleh moderasi beragama dan ekonomi keumatan untuk menciptakan masyarakat yang kuat secara sosial dan ekonomi. Hal ini tercipta melalui nilai toleransi, kebersamaan, dan gotong royong, serta penguatan perlindungan sosial dan ketahanan budaya, yang perlu diiringi dengan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Keterangan
		harmoni antar umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal harus mengutamakan keadilan dan keberpihakan pada ekonomi keumatan untuk meratakan kesejahteraan. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas keagamaan, dan pelaku usaha berbasis keumatan akan menciptakan ekosistem ekonomi inklusif yang fokus pada kesejahteraan bersama. Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan peran dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, merupakan pilar utama dalam upaya Menyejahterakan Musi Banyuasin. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membuka akses layanan dasar serta peluang ekonomi. Pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan penguatan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem ekonomi inovatif. Kolaborasi antara sektor swasta, akademisi, dan pemerintah akan meningkatkan daya saing daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Keberlanjutan pembangunan juga bergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang bijak, dengan penerapan konservasi lingkungan. Dengan mengintegrasikan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan, Musi Banyuasin dapat berkembang menjadi daerah yang maju, kompetitif, dan berkelanjutan, serta menciptakan kesejahteraan yang merata.

Sumber: SIPD RI Kab. Muba, diolah

Dua pokok Visi di atas akan diuraikan lebih lanjut ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029. Misi ini berfungsi untuk memperjelas serta menegaskan arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang. Selanjutnya, berdasarkan perincian Visi ke dalam pokok-pokok utama di atas, berikut disajikan keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk lima tahun mendatang. Hubungan antara keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.
Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025-2029

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin	Maju lebih cepat	Misi 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, dan Melayani. Misi 2: Penguatan SDM melalui transformasi bidang Pendidikan dan Kesehatan.
	Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin	Misi 3: Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera. Misi 4: Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keumatan. Misi 5: Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas. Misi 6: Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Perguruan Tinggi. Misi 7: Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Sumber: SIPD RI Kab. Muba, diolah

Tabel di atas menggambarkan pemetaan yang digunakan sebagai pendekatan logis untuk menunjukkan keterkaitan antara Visi dan Misi. Secara lebih mendalam, keterkaitan tersebut mencakup berbagai aspek yang luas, di mana setiap visi dapat didukung oleh lebih dari satu misi, sementara masing-masing pokok Visi juga memiliki hubungan serta hierarki tertentu dengan yang lainnya. Pada akhirnya, seluruh rangkaian kebijakan dan strategi yang dirumuskan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Berdasarkan hasil pemetaan Misi yang mengacu pada pokok-pokok Visi di atas, telah ditetapkan tujuh Misi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2025-2029 sebagai berikut.

Misi 1: *Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, dan Melayani.*

Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik, terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bebas dari KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan berbasis elektronik mempercepat proses administrasi dan memudahkan akses informasi, sementara pemerintahan yang transparan dan akuntabel membangun kepercayaan publik dengan memastikan pengelolaan sumber daya yang jujur dan tepat. Peningkatan kualitas pelayanan publik memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan efisien, menciptakan pemerintahan yang responsif dan mampu memberikan layanan terbaik kepada warganya, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga faktor ini saling

mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan berfokus pada kepentingan publik.

Misi 2: *Penguatan SDM melalui transformasi bidang Pendidikan dan Kesehatan.*

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menjadi tujuan utama dalam misi ini. Dalam sektor pendidikan, peningkatan akses dan mutu layanan menjadi prioritas agar setiap individu, termasuk di daerah terpencil, dapat memperoleh pendidikan berkualitas. Di sektor kesehatan, upaya dilakukan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis yang lebih merata, serta pemanfaatan teknologi kesehatan seperti telemedicine (Sumsel Tanggap 119) untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Misi 3: *Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera.*

Misi ini berfokus pada meningkatkan pendapatan masyarakat, produktivitas sektor unggulan, dan terjaganya stabilitas harga bahan pokok, yang berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan ekonomi daerah. Dengan pendapatan yang meningkat, masyarakat memiliki daya beli yang lebih kuat, yang mendukung perekonomian lokal. Sektor unggulan yang produktif menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah, memperkuat basis ekonomi daerah, sementara stabilitas harga bahan pokok menjaga daya beli masyarakat dan mencegah

inflasi yang dapat merugikan perekonomian. Ketiga faktor ini saling mendukung untuk menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan mampu mengurangi kemiskinan secara efektif.

Misi 4: *Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keumatan.*

Terciptanya kerukunan umat beragama, meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat, serta meningkatnya usaha atau industri yang menerapkan standar halal memiliki peran besar dalam mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, dan harmonis, didukung oleh sumber daya ekonomi keumatan ~~matan.Keum~~ Kerukunan antar umat beragama menciptakan suasana damai dan saling menghargai, yang memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam zakat tidak hanya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi. Sementara itu, semakin banyaknya usaha dan industri yang menerapkan standar halal memastikan keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian umat. Ketiga faktor ini bekerja bersama untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya harmonis, tetapi juga memiliki fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.

Misi 5: *Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas.*

Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya, meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman, serta meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak berperan penting dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas. Kondisi jalan yang lebih baik mendukung mobilitas yang

lancar, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mempercepat akses ke berbagai layanan publik. Pelayanan infrastruktur permukiman yang lebih baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas dasar yang memadai, sementara meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki hunian layak memastikan adanya tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi setiap keluarga. Ketiga faktor ini saling mendukung untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkualitas, yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat mendorong model pembiayaan alternatif, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), guna mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD.

Misi 6: *Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Perguruan Tinggi.*

Meningkatnya inovasi daerah, kewirausahaan, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, serta meningkatnya pembangunan desa berperan penting dalam mewujudkan Musi Banyuasin yang inovatif dan berdaya saing. Inovasi daerah yang terus berkembang mendorong terciptanya solusi-solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor-sektor lokal. Kewirausahaan yang tumbuh pesat, didukung oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, membuka peluang usaha baru dan memperkuat perekonomian daerah. Sementara itu, pembangunan desa yang merata memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, menciptakan desa yang lebih maju dan berdaya saing. Ketiga faktor ini bekerja bersama untuk menjadikan Musi Banyuasin

daerah yang lebih inovatif, mandiri, dan siap bersaing di tingkat yang lebih luas.

Misi 7: *Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.*

Turunnya ~~intensitas~~ emisi gas rumah kaca (GRK) dan turunnya potensi risiko bencana berperan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pengurangan emisi GRK mengurangi dampak perubahan iklim yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia, sekaligus mendukung upaya global untuk mengatasi pemanasan global. Sementara itu, menurunnya potensi risiko bencana melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti mitigasi bencana alam dan perbaikan infrastruktur, membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Kedua faktor ini saling mendukung untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat, aman, dan lebih tahan terhadap dampak negatif perubahan iklim dan bencana alam.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Mengacu pada ketentuan dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017, rumusan Misi Kepala Daerah di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Secara rinci, perumusan Tujuan dan Sasaran berdasarkan misi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3.
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran

No	Misi (RPJMN Tahun 2025-2029)	Misi (RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029)	Misi (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)	Tujuan (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)	Sasaran (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)				
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing	Penguatan SDM melalui transformasi bidang Pendidikan dan Kesehatan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi,	Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta perlindungan sosial yang	Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera	Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat 2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

No	Misi (RPJMN Tahun 2025-2029)	Misi (RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029)	Misi (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)	Tujuan (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)	Sasaran (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)
	dan pemberantasan kemiskinan	terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan			3. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat 2. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan 3. Terjaganya stabilitas harga bahan pokok
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal	Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keumatan	Terwujudnya Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keumatan	1. Terciptanya kerukunan umat beragama 1. Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat 2. Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, dan Melayani	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien,	1. Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik

No	Misi (RPJMN Tahun 2025-2029)	Misi (RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029)	Misi (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)	Tujuan (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)	Sasaran (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)
	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	baik dan berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas		Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.	2. Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
6.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten.kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	1. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten) 2. Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman 3. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak
	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan	Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Perguruan Tinggi	Terwujudnya Musi Banyuasin yang	1. Meningkatnya Inovasi Daerah

No	Misi (RPJMN Tahun 2025-2029)	Misi (RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029)	Misi (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)	Tujuan (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)	Sasaran (RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029)
	daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat		Inovatif dan Berdaya Saing	2. Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital 3. Meningkatnya Pembangunan Desa
6.	Memantapkan Sistem Pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Turunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2. Turunnya Potensi Risiko Bencana

Sumber: SIPD RI Kab. Muba, diolah

Setelah itu tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan arah pembangunan yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi Indikator Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan selama periode perencanaan RPJMD, yaitu hingga tahun 2029. Target capaian dari indikator tujuan menjadi acuan dalam menentukan target indikator sasaran yang akan dicapai di akhir periode perencanaan. Selain itu, indikator tujuan juga menjadi dasar dalam perumusan program-program pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan, beserta target capaian yang ingin diwujudkan. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, efektivitas serta konsistensi pembangunan dapat lebih terarah, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan selaras dengan visi pembangunan daerah.

Indikator Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 disajikan dalam tabel 3.4 berfungsi untuk menggambarkan target tahunan serta tujuan akhir pembangunan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029. Target akhir dari periode RPJMD ini juga mencerminkan tingkat ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah yang disusun berdasarkan potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin, dengan tetap mempertimbangkan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi. Capaian tahunan dari indikator tujuan akan dituangkan dalam target Indikator Kinerja Utama (IKU). Keterkaitan logis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran sangat penting karena menjadi dasar dalam menyusun arsitektur utama perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin

tahun 2025-2029. Struktur perencanaan ini dirancang secara sistematis untuk memastikan setiap sasaran yang ditetapkan memiliki hubungan yang erat dengan visi dan misi yang telah ditentukan. Untuk menjamin keterkaitan yang logis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka penjabaran sasaran akan disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2030

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterahkan Musi Banyuasin - Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani - Penguatan SDM Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan - Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi Menuju Musi Banyuasin Sejahtera - Penguatan Moderasi Beragama dan	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.		Indeks Reformasi Birokrasi	73,69	74,02	74,7	74,9	75,3	75,59

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
Ekonomi Keummatan - Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas - Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi - Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan									
		Meningkatknya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,7	-	-	-	-	-

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
		berbasis elektronik							
			Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	-	2,2	2,8	3,0	3,2	3,4
		Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN	Survey Penilaian Integritas (Nilai)	65,41	66,41	67,41	68,41	69,41	70,41
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,6	4,63	4,66	4,69	4,72	4,77
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	72,67	73,07	73,10	73,33	73,50	74,00
		Meningkatnya Kualitas	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,95	8,09	8,22	8,32	8,42	8,5

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
		Pendidikan Masyarakat							
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,51	12,69	12,9	13,1	13,3	13,5
			Angka Literasi/Numerasi (%)	75,77	76,83	77,88	78,94	80	80,06
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,52	74,55	75,25	75,55	76,00	76,25
			Prevalensi Stunting (%) (%)	13	12	11	10	9	8,5
	Menurunnya Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan ((%))	12,33	11,78	11,23	10,69	10,14	9,59
		Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Rasio Gini (Indeks)	0,310	0,308	0,305	0,304	0,302	0,300
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,08	2,03	1,98	1,94	1,9	1,89
		Meningkatnya Kesejahteraa	Indeks Pembangunan	63,3	63,97	64,5	64,99	65,41	65,8

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
		n Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat	Keluarga (Indeks)						
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	80,97	82,04	83,11	84,18	85,26	86,33
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,52	0,50	0,46	0,42	0,38	0,32
	Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.50-5.00	5.00-5.20	5.02-5.25	5.04-5.30	5.08-5.35	5.10-5.40
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita (Rp. Juta Per Tahun)	145	160	175	180	186	191
		Meningkatnya produktivitas sektor unggulan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (%)	12,56	12,86	13,15	13,45	13,74	14,04
			Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) (%)	12,26	12,45	12,64	12,84	13,03	13,23
		Terjaganya Tingkat Inflasi	Indeks Perkembangan Harga (%)	2,5	2,5	2	2	1,5	1,5
	Terwujudnya Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	100	100	100	100	100	100
		Terciptanya kerukunan umat beragama	Penyelesaian Konflik antar umat	70	75	80	85	85	90

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
			beragama (%) (%)						
		Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,58	0,61	0,64	0,67	0,7	0,73
		Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal	Persentase Usaha Mikro yang bersertifikasi Halal (%)	1,5	2,74	4,18	5,68	7,22	8,76
			Persentase IKM yang bersertifikasi Halal (%)	37	58	75	95	100	100
	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas		Indeks Pelayanan Infrastruktur (Indeks)	82,5	85	86,67	90	93,33	93,33
		Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	62,11	63,18	65,28	67,52	68,94	70,12

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
		dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten)							
		Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)	97,5	100	100	100	100	100
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	2	2,5	3	4	5	7,5
		Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) (%)	72,72	72,98	73,24	73,5	73,76	74,00
	Terwujudnya Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,51	3,6	3,71	3,82	3,93	4
		Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	40,01	45,02	46,55	50,12	54,7	60,01

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
		Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital	Rasio Kewirausahaan (Persentase)	5,48	5,70	5,92	6,16	6,40	6,65
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)	42,70	45,27	49,84	54,41	58,98	63,55
		Meningkatnya Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	32,75	33,62	33,62	34,50	34,93	35,50
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	64,44	64,69	64,94	65,2	65,45	65,7
		Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Penurunan Emisi GRK (TonCO2e)	1.828.335, 80	2.012.452, 45	2.224.591, 60	2.460.414, 98	2.688.752, 02	2.943.543, 17

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
		Turunnya Potensi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	109,25	108,39	107,53	106,67	105,81	104,95

Sumber: SIPD RI Kab. Muba, diolah

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Sub bab ini berisikan strategi dan arah kebijakan serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan strategi umum dan arah kebijakan, berikut adalah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.5. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Tata Kelola Pemerintahaan yang Bersih, Inovatif, dan Melayani	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.	1. Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik.	Pengembangan Digitalisasi Layanan Publik untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
			2. Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN	Membangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbasis teknologi untuk mengukur kinerja pemerintahan
			3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
2	Penguatan SDM melalui transformasi bidang Pendidikan dan Kesehatan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.
				Pengembangan kurikulum pendidikan berbasis inovasi teknologi, kearifan lokal dan kebutuhan global.
				Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan peserta didik di sekolah formal dan informal.
			2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di tingkat primer dan sekunder.
				Penguatan program kesehatan masyarakat berbasis pencegahan.
3	Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera	Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Penguatan program bantuan sosial tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi keluarga rentan dan miskin, pendampingan sosial dan ekonomi
			2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan program pelatihan dan sertifikasi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, Peningkatan akses informasi lowongan kerja
			3. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Keluarga melalui Pelatihan, Pemberdayaan dan Pemanfaatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				Pangan Bergizi dan Aman Bagi Keluarga"
		Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat	Mendorong peningkatan PDRB pada setiap sektor usaha
			2. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan untuk meningkatkan hasil produksi dan efisiensi, meningkatkan penerapan penyediaan akomodasi makan dan minum, industri pengolahan
			3. Terjaganya tingkat inflasi	Melakukan strategi pengendalian inflasi dengan 4K yaitu: Keterjangkauan dan Stabilitas Harga, Ketersediaan dan Stabilitas pasokan bahan pangan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi yang efektif
4	Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keumatan	Terwujudnya Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keumatan	1. Terciptanya kerukunan umat beragama	Menciptakan ruang interaksi sosial yang aman, termasuk ruang terbuka hijau.
			2. Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat	Peningkatan dialog lintas agama. Mendorong terbentuknya bank zakat.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			3. Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal	Pemberian insentif pelaku usaha halal.
5.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	1. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten).	Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur.
			2. Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman	Peningkatan akses layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur permukiman
			3. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak	Penguatan program perumahan rakyat.
6.	Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Perguruan Tinggi	Terwujudnya Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Inovasi Daerah	Mengembangkan kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan pertanian dan bio-industri.
			2. Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital	Penyelenggaraan riset dan kompetisi inovasi
			3. Meningkatnya Pembangunan Desa	Pengembangan infrastruktur ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				masyarakat, dan kolaborasi antar desa
				Pengembangan ekowisata dan agroforestri berbasis masyarakat di kawasan hutan warga.
7.	Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Turunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Penguatan regulasi bagi industri hijau.
				Konservasi dan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan, termasuk agroforestri dan rehabilitasi lahan krisis.
			2. Turunnya Potensi Risiko Bencana	Penataan kawasan risiko bencana dan penguatan sistem mitigasi bencana berbasis teknologi.

Sumber: SIPD RI Kab. Muba, diolah

Kemudian, arah kebijakan merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, yang berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan program berdasarkan bidang, sub-bidang, atau sub-sub-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama lima tahun. Implementasi arah kebijakan dapat dilakukan dalam periode satu tahun, namun dalam beberapa kasus, diperlukan lebih dari satu tahun untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang terpenting, arah kebijakan harus menjadi prioritas utama dan sejalan dengan sasaran pembangunan daerah,

dengan tetap memperhitungkan potensi daerah, kapasitas pemerintah daerah, serta peluang yang tersedia.

Untuk memastikan arah kebijakan lebih terfokus dan terarah, dilakukan pemetaan waktu dalam perencanaan pembangunan. Pemetaan ini memungkinkan identifikasi waktu yang tepat untuk menjalankan suatu kebijakan, baik sebagai langkah awal maupun sebagai prasyarat bagi kebijakan lainnya. Berdasarkan analisis strategi dalam mencapai tujuan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin untuk lima tahun ke depan, maka ditetapkan tema atau fokus pembangunan tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Berikut adalah tabel fokus pembangunan tahunan:

Tabel 3.6.
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2030

NO	MISI / TEMA PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN						SINKRONISASI RPJPD SINKRONISASI RPJPD	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Keberlanjutan Kebijakan Pembangunan untuk Musi Banyuasin Maju dan Sejahtera	ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (TAHAP I)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani	Membangun dan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berorientasi kinerja dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;	Penerapan dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan berorientasi kinerja dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis data dan teknologi;	Peningkatan kualitas sistem Tata Kelola Pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik berbasis data dan teknologi yang terintegrasi secara efektif dan efisien	Optimalisasi Sistem Tata Kelola Pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik berbasis data dan teknologi yang terintegrasi secara efektif dan efisien	Transformasi dan Inovasi Sistem Tata Kelola Pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik berbasis data dan teknologi yang terintegrasi secara efektif dan efisien	Keberlanjutan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani	Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel melalui penguatan kebijakan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas

NO	MISI / TEMA PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN						SINKRONISASI RPJPD SINKRONISASI RPJPD	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (TAHAP I)
		Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Keberlanjutan Kebijakan Pembangunan untuk Musi Banyuasin Maju dan Sejahtera		
									Aparatur Sipil Negara (ASN)
2	Penguatan SDM Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Menyiapkan Pondasi Transformasi melalui Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Implementasi dan Penguatan Dasar Transformasi dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Akselerasi menuju Transformasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan melalui Bantuan Peserta Didik, Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Fasilitas Kesehatan	Optimalisasi Pelayanan Sektor Pendidikan dan Kesehatan dengan Memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjangkau seluruh wilayah secara Inklusif	Transformasi dan Inovasi Sektor pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan inklusif	Keberlanjutan Kebijakan Upaya Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dengan membangun aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan

NO	MISI / TEMA PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN						SINKRONISASI RPJPD SINKRONISASI RPJPD	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (TAHAP I)
		Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Keberlanjutan Kebijakan Pembangunan untuk Musi Banyuasin Maju dan Sejahtera		
									yang inklusif dan merata
3	Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi Menuju Musi Banyuasin Sejahtera	Menyiapkan Pondasi Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi yang Fokus pada Penanggulangan Kemiskinan serta Membentuk Kemandirian dan	Penguatan Upaya Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi dengan optimalisasi pensasaran bantuan sosial, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan menyiapkan dasar ekonomi digital	Akselerasi Upaya Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi dengan Memperluas program pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan serta mengembangkan ekonomi digital	Optimalisasi produktivitas sektor unggulan untuk membentuk kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah	Memantapkan Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi melalui Transformasi dan Inovasi	Keberlanjutan Kebijakan Upaya Pembangunan Sosial dan Ekonomi	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi	Mengembangkan ekonomi lokal melalui penguatan sektor primer dan kapasitas kelembagaan ekonomi serta iklim usaha yang kondusif

NO	MISI / TEMA PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN						SINKRONISASI RPJPD SINKRONISASI RPJPD	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (TAHAP I)
		Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Keberlanjutan Kebijakan Pembangunan untuk Musi Banyuasin Maju dan Sejahtera		
		Ketahanan Ekonomi Daerah							
4	Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keumatan	Menyiapkan Pondasi Kebijakan dan Kelembagaan untuk menciptakan Kerukunan Umat, Ekosistem Usaha Halal dan Pengelolaan Dana Umat	Menciptakan Kerukunan Umat, Membangun Ekosistem Usaha Halal serta Penguatan Dukungan untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Umat yang berfokus	Menjaga Kerukunan Umat, Perluasan Ekosistem Usaha Halal, Membangun Sinergi/Kolaborasi antara Dana Umat dan Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi termasuk	Menjaga Kerukunan Umat, Perluasan Ekosistem Usaha Halal, Optimalisasi Sinergi/Kolaborasi antara Dana Umat dan Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi termasuk pada Sektor	Menjaga Kerukunan Umat, Pemantapan Ekosistem Usaha Halal, Sinergi/Kolaborasi Dana Umat dan Pemerintah dalam misi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat	Keberlanjutan Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keumatan	Misi 4: Meningkatkan stabilitas ekonomi dan keamanan daerah yang tangguh	mendorong investasi dengan menguatkan kebijakan makro ekonomi dan stabilitas keamanan daerah

NO	MISI / TEMA PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN						SINKRONISASI RPJPD SINKRONISASI RPJPD	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (TAHAP I)
		Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Keberlanjutan Kebijakan Pembangunan untuk Musi Banyuasin Maju dan Sejahtera		
			pada pemberdayaan ekonomi	pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan				
5	Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas	Menyiapkan data untuk membuat prioritas pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong terjadinya konektivitas antar wilayah	Melakukan pembangunan dengan melibatkan pemerintah pusat atau pihak swasta apabila dana daerah tidak mencukupi	Melanjutkan lagi pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong konektivitas antar wilayah dan ibukota kabupaten	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas dan kesejahteraan masyarakat	Keberlanjutan pembangunan infrastruktur berdampak yang mendorong konektivitas dan kesejahteraan masyarakat	Keberlanjutan pemanfaatan hasil pembangunan infrastuktur untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas	Misi 5: Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Konektivitas.	Terwujudnya konektivitas yang lancar antar wilayah dalam dan luar Kabupaten Musi Banyuasin melalui pembangunan infrastruktur

NO	MISI / TEMA PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN						SINKRONISASI RPJPD SINKRONISASI RPJPD	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (TAHAP I)
		Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Keberlanjutan Kebijakan Pembangunan untuk Musi Banyuasin Maju dan Sejahtera		
6	Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi	Menyiapkan sinergi/kolaborasi Pemerintah dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan Daya Saing Daerah	Menjalin kolaborasi Pemerintah dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan Daya Saing Daerah melalui CSR, memperluas Kesempatan Kerja, membangun kewirausahaan, Pemberdayaan	Membangun Sinergi Pemerintah dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan Daya Saing Daerah melalui CSR, memperluas Kesempatan Kerja, membangun kewirausahaan, Pemberdayaan	mengoptimalkan sinergi/kolaborasi Pemerintah dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan Daya Saing Daerah melalui CSR, memperluas Kesempatan Kerja, membangun kewirausahaan,	memantapkan sinergi/kolaborasi Pemerintah dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan Daya Saing Daerah melalui CSR, memperluas Kesempatan Kerja, membangun kewirausahaan, Pemberdayaan Ekonomi	Keberlanjutan Kebijakan Upaya Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi	Misi 8: Mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi dan berkesinambungan	Mendorong kebijakan perencanaan yang terpadu dan kolaboratif untuk mendukung visi pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan

NO	MISI / TEMA PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN						SINKRONISASI RPJPD SINKRONISASI RPJPD	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (TAHAP I)
		Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Keberlanjutan Kebijakan Pembangunan untuk Musi Banyuasin Maju dan Sejahtera		
			Ekonomi Masyarakat dan Inovasi termasuk Kolaborasi untuk Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Ekonomi Masyarakat dan Inovasi termasuk Kolaborasi untuk Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Inovasi termasuk Kolaborasi untuk Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat dan Inovasi termasuk Kolaborasi untuk Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan			

NO	MISI / TEMA PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN						SINKRONISASI RPJPD SINKRONISASI RPJPD	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (TAHAP I)
		Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Keberlanjutan Kebijakan Pembangunan untuk Musi Banyuasin Maju dan Sejahtera		
7	Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Menyusun Peta Jalan Pengelolaan SDA berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Penurunan Risiko Bencana, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Rencana	Penguatan Kebijakan Pengelolaan SDA berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Penurunan Risiko Bencana dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup termasuk Mengupayakan Kolaborasi dengan	Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan SDA berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Penurunan Risiko Bencana dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup termasuk Mengupayakan Kolaborasi dengan	Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Konservasi SDA, Penurunan Risiko Bencana dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Inovasi dalam Pengelolaan dan Konservasi SDA serta Inovasi Penurunan Risiko Bencana untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Keberlanjutan Upaya Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, ekologi yang adaptif dan berkelanjutan Misi 7: Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang adaptif dan fleksibel dengan perubahan lingkungan Penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan

NO	MISI / TEMA PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN						SINKRONISASI RPJPD SINKRONISASI RPJPD	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (TAHAP I)
		Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera	Keberlanjutan Kebijakan Pembangunan untuk Musi Banyuasin Maju dan Sejahtera		
		Perluasan Jaringan Gas Rumah Tangga	Pemerintah Pusat untuk Perluasan Jaringan Gas Rumah Tangga	Pemerintah Pusat untuk Perluasan Jaringan Gas Rumah Tangga					lingkungan yang berkelanjutan

3.2.2.Arah Pembangunan Kewilayahan

1. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin 2016-2036, tepatnya pada Bab I mengenai Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah, Pasal 1 halaman 6 ayat 21, dijelaskan bahwa: "Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan".

Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang dan pola ruang.

(1) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

(2) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis dialokasikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan. Kerjasama pendanaan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun. Pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

(2) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(3) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

(1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pengolahan, Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.

1) Kebijakan Tata Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

a. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
c. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

a. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
b. Karakteristik wilayah kabupaten;
b. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruang; dan
c. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

a. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
b. Jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;

c. Mampu menjawab isu – isu strategis, baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang adalah garis besar tindakan yang harus diambil untuk mencapai atau mewujudkan tujuan penataan ruang. Mengingat bahwa tujuan penataan ruang disusun berdasarkan isu strategis tata ruang wilayah yang dihadapi sekarang maka kebijakan penataan ruang pun berangkat dari atau dikaitkan dengan penyelesaian berbagai isu strategis tata ruang wilayah yang dihadapi sekarang.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten kedalam langkah - langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
c. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;

a. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
b. Ketentuan peraturan perundang - undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

a. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
b. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi;
c. Jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
d. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dirumuskan sebagai berikut :

Kebijakan I	:	**Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan**

Strategi pencapaian Kebijakan I, meliputi;

a. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pertambangan yang berkelanjutan dan pemanfaatan energi non migas sebagai alternatif energi di masa yang akan datang;
b. Meningkatkan peranan perusahaan pertambangan dalam pengelola sumber daya alam untuk lebih berperan terhadap lingkungan disekitarnya terutama lingkungan masyarakat.

Kebijakan II	:	**Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna dan terpadu**

Strategi pencapaian Kebijakan II, meliputi;

a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
b. Mengembangkan sentra - sentra kegiatan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; dan
c. Mengembangkan pusat perdagangan yang didukung kegiatan jasa dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing dan memperkuat basis perekonomian wilayah.

Kebijakan III : **Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian**

Strategi pencapaian Kebijakan III, meliputi;

a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan; dan
b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan IV : **Pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional serta terintegrasi.**

Strategi pencapaian Kebijakan IV, meliputi;

a. Merevitalisasi dan meningkatkan fungsi pusat-pusat perkotaan untuk pelayanan kedalam dan keluar wilayah kabupaten; dan
b. Meningkatkan keterkaitan fungsi pusat-pusat kegiatan dengan kawasan belakangnya.

Kebijakan V : **Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang.**

Strategi pencapaian Kebijakan V, meliputi;

a. Membangun sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah;
b. Mengembangkan dan membangun jaringan jalan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin;

c. Mengembangkan dan membangun prasarana energi dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan energi listrik secara berkelanjutan;
d. Membangun sistem prasarana pengolahan air bersih dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas sediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
e. Membangun dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi (terestrial dan satelit) di kawasan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

Kebijakan VI : **Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya.**

Strategi pencapaian Kebijakan VI, meliputi;

a. Memantapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
b. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan

d. Penyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti longsor, banjir, dan kebakaran hutan.

Tabel 3.7.
Arahan Fungsi Kawasan

No	Uraian	Lokasi	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Sanga Desa	16.369.07
2	Kawasan Suaka Alam		
	a. Suaka Margasatwa	Batanghari Leko	19.625,52
		Kecamatan Lalan	1.943,55
		Kecamatan Keluang	2.208,11
		Kecamatan Bayung Lencir	10.329,28
		Kecamatan Tungkal Jaya	21.570,75
	b. Taman Nasional	Kecamatan Lalan	2.683,67
3	Kawasan Budidaya		
	a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang meliputi:		
	1. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir.	94.099,17
	2. Hutan Produksi Tetap (HP)	Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan	421.185,89

No	Uraian	Lokasi	Luas (Ha)
		Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, dan Kecamatan Tungkal Jaya	
	3. Hutan Produksi Konversi (HPK)	Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lalan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya	59.259,40
	b. Kawasan Peruntukan Pertanian		
	1. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan	Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya.	40.298,63
	2. Kawasan Budidaya Tanaman Hortikultura	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin,	3.031

No	Uraian	Lokasi	Luas (Ha)
		Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan	
	c. Kawasan Peruntukan Perkebunan	Seluruh wilayah Kecamatan	643.529,54
	d. Kawasan Peruntukan Peternakan	Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai Lilin. Sedangkan peternakan kecil terletak di Kecamatan Bayung Lencir.	-
	e. Kawasan Peruntukan Perikanan		
	1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan umum	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Lalan.	-
	2. Kawasan peruntukan perikanan budidaya yang meliputi perikanan budidaya air tawar	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin	-
	3. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan	Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.	-

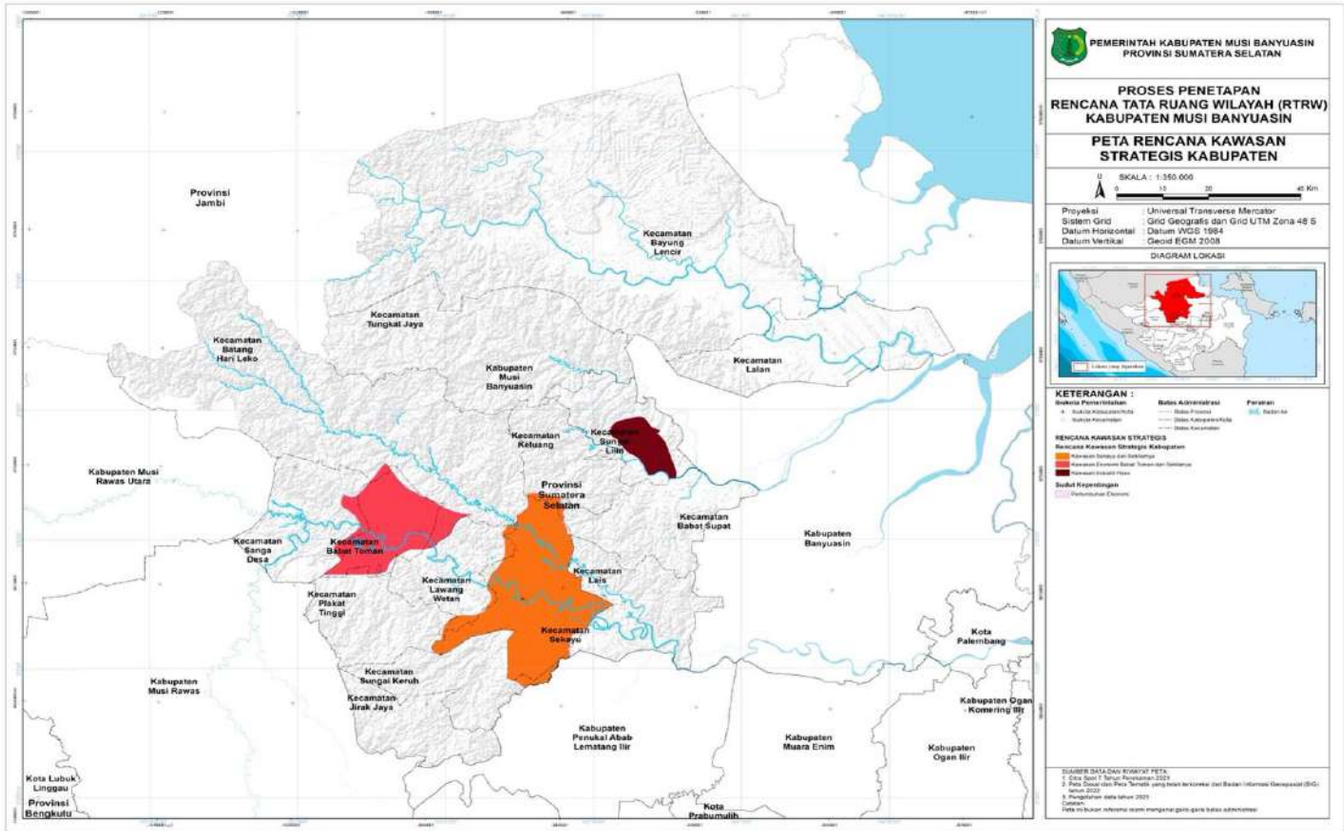
No	Uraian	Lokasi	Luas (Ha)
	f. Kawasan Peruntukan Pertambangan minyak dan gas bumi	Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada di wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha	1.273,60
	g. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batubara	Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sungai Lilin, dan Kecamatan Tungkal Jaya	905,21
	h. Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Sungai Lilin.	432,67
	i. Kawasan Peruntukan Pariwisata	Danau Ulak Lia di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu; Danau Kongar di Desa Sungai Dua, Kecamatan Sungai Keruh; Pulau Pandang dan Pulau Panjang di Kecamatan Sanga Desa; Sungai Kubu di Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan; Agro Wisata Perkebunan Gambir di Desa Toman, Kecamatan Babat Toman; Tambang Minyak Tradisional di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman; Tambang Minyak Modern di Desa Bonot Kecamatan Lais; Kebudayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Bayung Lencir;	-

No	Uraian	Lokasi	Luas (Ha)
		Goa Jepang di Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa; dan Candi Sereka di Desa Sereka, Kecamatan Babat Toman.	
	j. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa serta Pusat Pemerintahan	Kecamatan Sekayu; Kecamatan Sungai Lilin; Kecamatan Bayung Lencir; Kecamatan Babat Toman	-
	k. Kawasan Peruntukan Permukiman	Terbagi menjadi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan	32.797,27
4	Kawasan Perlindungan Setempat	Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sungai Lilin, dan Kecamatan Tungkal Jaya	14.631,20
5	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan di Bawahnya		
	- Kawasan Sempadan Sungai	Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas	
	- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		

No	Uraian	Lokasi	Luas (Ha)
5.	Kawasan Lindung Gambut	Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Sanga Desa	16.369,07
6	Wilayah Rawan Bencana		
	Wilayah Rawan Bencana Banjir	Kecamatan :	
		Babat Supat	29.440
		Babat Toman	22.212
		Batanghari Leko	54.576
		Bayung Lencir	280.317
		Jirak Jaya	11.556
		Keluang	12.957
		Lais	33.817
		Lalan	83.326
		Lawang Wetan	26.569
		Plakat Tinggi	18.698
		Sanga Desa	33.835
		Sekayu	52.095
		Sungai Keruh	19.207
		Sungai Lilin	16.669
		Tungkal Jaya	24.436
		Kab. Musi Banyuasin	719.716
	Kawasan Rawan Bencana Karhutla	Babat Supat	53.379
		Babat Toman	38.347
		Batanghari Leko	212.659
		Bayung Lencir	468.773
		Jirak Jaya	39.995
		Keluang	42.491
		Lais	56.544
		Lalan	82.225
		Lawang Wetan	37.647

No	Uraian	Lokasi	Luas (Ha)
		Plakat Tinggi	46.432
		Sanga Desa	56.253
		Sekayu	73.363
		Sungai Keruh	45.624
		Sungai Lilin	35.550
		Tungkal Jaya	92.320
		Kab. Musi Banyuasin	1.381.609

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045



Gambar 3.2. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin

2) Struktur Tata Ruang

Dasar pertimbangan penetapan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti yang telah dilakukan pada analisis, meliputi: Berdasarkan rencana struktur tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan, Kebijakan Spasial (Perwilayahan) Kabupaten Musi Banyuasin, dan hasil analisis mengenai analisis sistem kota-kota, aksesibilitas, dan analisis hubungan antar wilayah.

Rencana pengembangan sistem Perkotaan di Kabupaten Musi Banyuasin disusun Dengan mempertimbangkan kepada:

a. Kebijakan sistem perkotaan dalam RTRW Nasional;
b. Hasil-hasil analisis yang menggambarkan sistem kota-kota saat ini dan evaluasi persoalan yang diakibatkannya;
c. Rumusan sistem perkotaan yang dikemukakan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota; Optimasi sistem kota-kota untuk mewujudkan sistem perkotaan yang hirarkis dan seimbang

Sistem kota-kota kabupaten merupakan gambaran kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan keadaan (linkage) pada saat ini dan rencana antar kota yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. Dalam menetapkan hirarki pusat pelayanan di Kabupaten Musi Banyuasin selain telah diuji dengan menggunakan metoda skalogram, juga melihat fungsi dan peran kota terhadap kawasan disekitarnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode skalogram dan konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, maka rencana

pengembangan sistem pusat-pusat permukiman di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

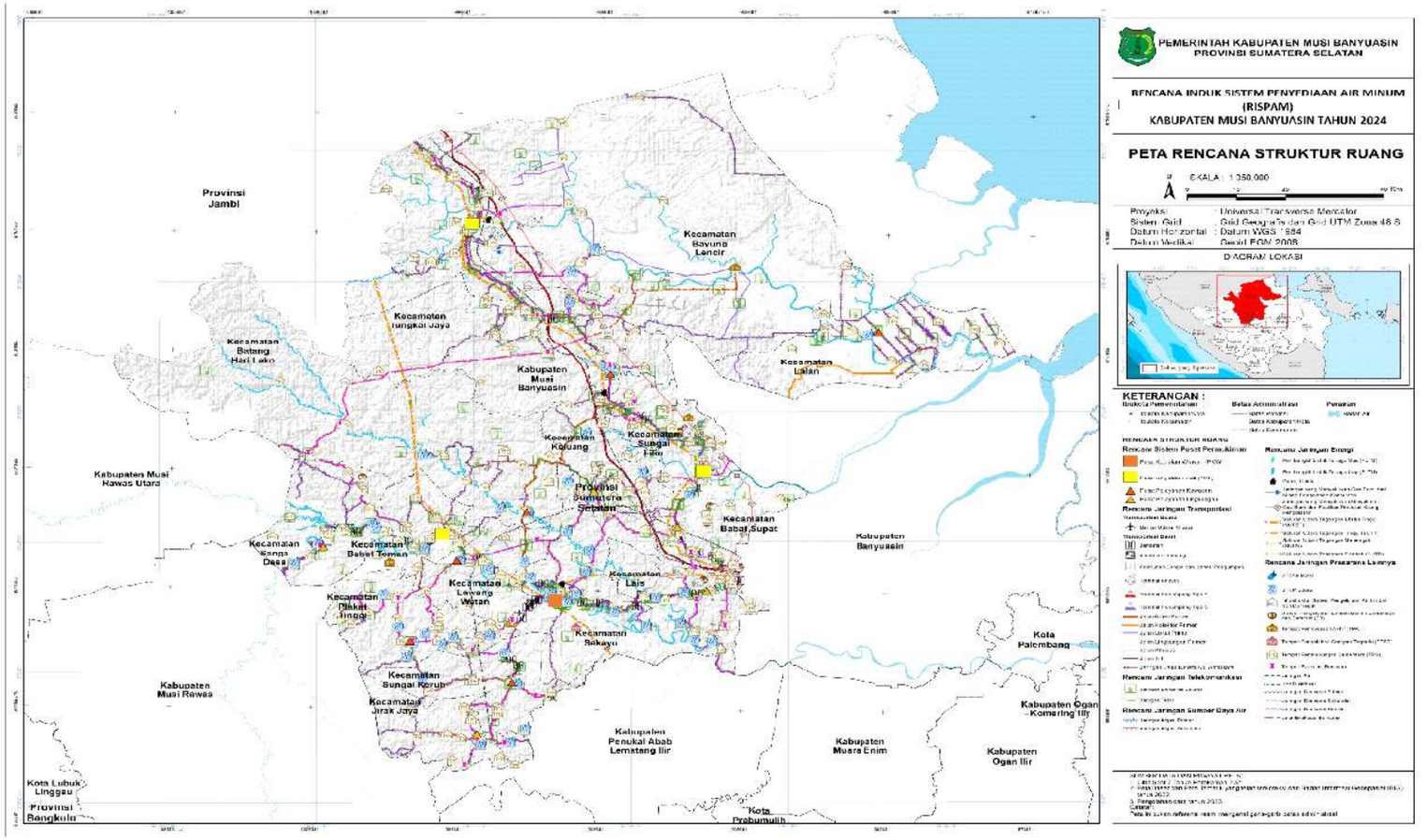
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan kabupaten yang fungsinya melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Salah satu kawasan perkotaan di Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk kedalam PKW yaitu Kecamatan Sekayu;
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan kabupaten yang fungsinya melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan. Terdapat 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan sebagai PKL yaitu Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Bayung Lencir, dan Kecamatan Babat Toman;
c. Pusat Pelayanan Kawasan selanjutnya disebut (PPK) meliputi PPK PKL Batanghari Leko, PKL Lalan, PKL Lawang Wetan, PKL Plakat Tinggi, PPK Sungai Keruh dan PPK Tungkal Jaya, memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa kecamatan;
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL): PPL Babat Supat, PPL Jirak Jaya, PPL Keluang, PPL Lais dan PPL Sanga Desa yang memiliki fungsi sebagai pusat permukiman untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Secara rinci Struktur Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8.
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

No	Ibukota/ Kecamatan	Hirarki Fungsi	Keterangan
1	Sekayu	PKW	Kawasan kabupaten yang fungsinya melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
2	Sungai Lilin	PKL	Kawasan kabupaten yang fungsinya melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan
3	Bayung Lencir	PKL	Kawasan kabupaten yang fungsinya melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan
4	Babat Toman	PKL	Kawasan kabupaten yang fungsinya melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan
5	Plakat Tinggi	PPK	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
6	Lalan	PPK	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
7	Lais	PPL	Pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa
8	Sanga Desa	PPL	Pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa
9	Sungai Keruh	PPK	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
10	Batanghari Leko	PPK	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
11	Keluang	PPL	Pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa
12	Lawang Wetan	PPK	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
13	Tungkal Jaya	PPK	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
14	Babat Supat	PPL	Pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa
15	Jirak Jaya	PPL	Pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045



Gambar 3.3. Peta Rencana Struktur Tata Ruang

3) Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin 2016-2036, khususnya Bab IV Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, dijelaskan bahwa: Pola ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin disusun dan direncanakan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin sebelumnya serta rencana - rencana lainnya yang terkait dengan kondisi dan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pola Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin secara garis besar diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

a. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan untuk fungsi lindung mempunyai status yang amat penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penetapan kawasan lindung berpedoman kepada Keppres No.32/1990 yang pengidentifikasiannya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ketinggian, kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi serta kawasan - kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bahaya alamiah maupun kawasan-kawasan berupa cagar alam dan taman nasional.

Tabel 3.9.
Identifikasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Kawasan	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
A	Suaka Margasatwa		790.625,19	9,09
1	Gunung Raya	OKU Selatan		
2	Padang Sugihan	OKI dan Banyuasin		
3	Isau-isau Pasemah	Muara Enim dan Lahat		
4	Gumai Pasemah	Lahat, Empat Lawang		
5	Dangku	Musi Banyuasin		
6	Bentayan	Musi Banyuasin, Banyuasin		
B	Taman Nasiona			
1	Taman Nasional Kerinci Seblat	Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau		
2	Taman Nasional Sembilang	Banyuasin dan Musi Banyuasin		
C	Taman Wisata Alam Punti Kayu	Palembang		
D	Taman Wisata Alam Serelo	Lahat		
E	Cagar Budaya			
1	Bukit Siguntang dan Taman Purbakala Sriwijaya	Palembang		
2	Megalith	Pagar Alam dan Lahat		
3	Situs Candi Bumiayu	Penukal Abab Lematang Ilir		
F	Taman Nasional Laut/Perairan (TN Sembilang)	Banyuasin dan Musi Banyuasin	48.707	0,53
G	Perlindungan Buaya Senyulong*	Musi Banyuasin	13.871	0,15

Sumber: RTRW Provinsi Sumsel 2016 - 2036

Keterangan: *) Berada pada kawasan hutan produksi sehingga luasan tidak termasuk dalam luas total.

Kawasan lindung yang akan dimantapkan diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang dinyatakan sebagai kawasan non-budidaya adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu daerah - daerah yang memiliki kendala fisik tertentu seperti lereng curam, rawan banjir, rawan longsor dan erosi. Selain itu juga dimaksudkan untuk melindungi kelestarian wilayah bawahannya berupa kawasan budidaya yang keberadaannya sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat. Di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 3 (tiga) jenis kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan lindung, yaitu: (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, (2) Kawasan perlindungan setempat, dan (3) Kawasan rawan bencana alam.

a) Kawasan Hutan Lindung (Hutan Berfungsi Lindung)

Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 16.369,07 ha yaitu Hutan Lindung Kademba dan Hutan Lindung Sungai Jernih yang secara administrasi berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Sanga Desa. Pelestarian fungsi ekologis kawasan ini sangat penting untuk dipertahankan, untuk itu perlu dilakukan pengendalian ketat terhadap aktivitas pembangunan. Kawasan hutan yang masih lestari perlu dijaga dari perambahan masyarakat. Sedangkan kawasan yang sudah terbuka agar dilakukan reboisasi dengan berbagai jenis tanaman hutan, seperti: Merbau (Intsia biyuga), Bintangur (Calophyllum inophyllum), Mersawa (Anoisoptera polyandra), Nyatoh (Palaquium gutta), Terentang (Campnosperma auriculata), Medang (Litsea firma), Terap (Artocarpus spp), atau tanaman lainnya sesuai dengan ketentuan kehutanan.

b) Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Lindung Gambut yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dengan luas 74.358,23 Ha. Kawasan lindung gambut yang terluas di Kabupaten Musi Banyuasin berada di Kecamatan Bayung Lencir yang mencapai 34.507,14 Ha.

c) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Musi Banyuasin adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk. Tujuan dari kawasan perlindungan setempat yaitu menjaga kelestarian fungsi waduk, danau, embung dan sungai menjaga kawasan dari aktivitas manusia. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari:

Tabel 3.10.
Luas Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Luas (Ha)
Kecamatan Babat Supat	287,14
Kecamatan Babat Toman	468,60
Kecamatan Batanghari Leko	1.731,22
Kecamatan Bayung lencir	4.027,62
Kecamatan Kecamatan Keluang	46,56
Kecamatan Lais	1.986,53
Kecamatan Lalan	1.329
Kecamatan Lawang Wetan	532,39
Kecamatan Sanga Desa	1.598,14
Kecamatan Sekayu	1.949,89
Kecamatan Sungai Keruh	38,27
Kecamatan Sungai Lilin	127,08
Kecamatan Tungkal Jaya	508,75

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin

d) Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kategori kawasan perkotaan di beberapa wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai lilin, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Babat Toman. Dari luasan perkotaan di masing masing Kecamatan tersebut di rencanakan kebutuhan ruang terbuka hijau, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta untuk menghindari kepadatan bangunan yang kedepannya akan semakin padat.

Luas minimal ruang terbuka hijau adalah 30% dari luas kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari kawasan perkotaan. Sedangkan untuk Kawasan Hutan Kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau. Adapun rencana kebutuhan ruang terbuka hijau di masing - masing kawasan perkotaan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11.
Rencana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036

Kecamatan	Luas Perkotaan (Ha)	Rencana RTH (Ha)
Sekayu	10.524,00	3.157,20
Sungai Lilin	13.279,20	3.983,76
Bayung lencir	5.668,19	1.700,46
Babat Toman	3.046,00	913,80
Total	32.517,39	9.755,22

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin

1. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

1) Kawasan Suaka Alam

Kawasan Suaka Margasatwa

Syarat suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Suaka Margasatwa apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- Merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;
- Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan atau
- Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Kawasan Lindung Suaka Margasatwa yang ditetapkan seluas 55.677,21 Ha yang berada di Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lalan, dan Kecamatan Tungkal Jaya

Arahan pengelolaan Suaka Margasatwa tersebut antara lain:

- Pelestarian ekosistem yang masih berkembang;
- Memperketat patroli untuk menghindari adanya penebangan pohon liar serta membatasi merambahnya kawasan budidaya ke kawasan lindung;
- Penerapan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan tersebut, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan kawasan lindung.

2) Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Kawasan Taman Nasional seluas + 2.683,67 Ha berada di Kecamatan Lalan.

Kawasan Rawan Bencana

Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut : pencegahan, pengurangan dampak bahaya, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan pembangunan berkelanjutan yang mengurangi risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana adalah kerangka kerja konseptual yang terdiri dari elemen-elemen yang dipandang mempunyai kemungkinan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat, untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak merugikan yang ditimbulkan oleh bahaya dalam konteks luas pembangunan berkelanjutan. Kerangka kerja pengurangan risiko bencana terdiri dari bidang aksi sebagai berikut : Kesadaran dan pengkajian risiko, termasuk analisis bahaya dan analisis kerentanan atau kapasitas pengembangan pengetahuan, termasuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan informasi komitmen publik dan kerangka kerja institusional, termasuk aksi kelembagaan, kebijakan, perundangan dan komunitas penerapan langkah-langkah, termasuk pengelolaan lingkungan, perencanaan penggunaan lahan dan tata kota, perlindungan fasilitas penting, penerapan sains dan teknologi,

kemitraan, jejaring serta instrumen finansial. Sistem peringatan dini termasuk peramalan, penyebaran peringatan, tindakan-tindakan kesiapsiagaan dan kapasitas untuk memberikan reaksi.

Peristiwa bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin seperti bencana banjir, kebakaran hutan, erosi dan angin topan/puting beliung. Bencana banjir terjadi karena meluapnya permukaan air sungai selain itu juga karena kondisi bentang alam dan siklus musiman, kawasan yang sering terjadi banjir ini seperti kawasan disepanjang Sungai Musi dan Batanghari Leko. Bencana kebakaran hutan disebabkan oleh terbakarnya lahan – lahan perkebunan dan kawasan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun oleh manusia, kawasan yang sering terjadi kebakaran seperti misalnya di Kecamatan Bayung Lencir dan Batanghari Leko. Bencana erosi atau tanah longsor biasanya terjadi di sempadan Sungai Musi seperti misalnya yang pernah terjadi di Kecamatan Lais, Sanga Desa serta Kota Sekayu. Sedangkan peristiwa angin topan atau puting beliung sulit diprediksi lokasi dan waktunya, namun pernah terjadi di Kota Sekayu. Peristiwa bencana di Kabupaten Musi Banyuasin bisa saja terjadi akibat dari dinamisasi karakteristik alam maupun pengaruh kelalaian manusia. Oleh karena itu pengelolaan serta perencanaan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya. Untuk keperluan perencanaan dan pengelolaan kawasan bencana diperlukan data dan informasi sehingga menghasilkan prediksi dan analisa secara signifikan. Data dan Informasi tersebut dapat digali dari informasi geologi dan hidrologi atau dari kejadian bencana yang selama ini terjadi

Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam mengurangi resiko rawan bencana dengan mengurangi kerentanan dan memperkuat ketahanan mereka adalah sangat penting. Melalui program pengelolaan bencana berbasis masyarakat, sasaran penataan ruang dalam penanggulangan bencana adalah untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana di Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama - sama bekerja mengurangi dampak dari bencana yang dapat berpengaruh kepada mereka. Diharapkan melalui pengaturan penataan ruang, stakeholder akan lebih memperkuat mekanisme mereka terhadap bahaya bencana.

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi ancaman. Berikut beberapa tindakan pencegahan dalam penanggulangan bencana :

1. Pembuatan hujan buatan untuk mencegah terjadinya kekeringan di suatu wilayah;
2. Melarang atau menghentikan penebangan hutan;
3. Menanam tanaman bahan pangan pokok alternatif;
4. Menanam pepohonan di kawasan – kawasan kategori kritis;
5. Melibatkan peran aktif semua pihak dalam upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan

Mitigasi atau pengurangan adalah upaya untuk mengurangi atau meredam risiko. Kegiatan mitigasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non fisik. Tindakan mitigasi atau peredaman dampak ancaman dapat berupa:

1. Membuat bendungan, tanggul, kanal untuk mengendalikan banjir; pembangunan tanggul sungai dan lainnya;
2. Penetapan dan pelaksanaan peraturan, sanksi; pemberian penghargaan mengenai penggunaan lahan, tempat membangun rumah, aturan bangunan;
3. Penyediaan informasi, penyuluhan, pelatihan, penyusunan kurikulum pendidikan penanggulangan bencana.

Tindakan Kesiagaan dalam meminimalisir dampak bencana adalah :

1. Pembuatan sistem peringatan dini;
2. Membuat sistem pemantauan ancaman;
3. Membuat sistem penyebaran peringatan ancaman;
4. Pembuatan rencana evakuasi;
5. Membuat tempat dan sarana evakuasi;
6. Penyusunan rencana darurat, rencana siaga;
7. Pelatihan, gladi dan simulasi atau ujicoba;
8. Memasang rambu evakuasi dan peringatan dini.

Tindakan tanggap darurat dalam meminimalisir dampak bencana:

1. Evakuasi;
2. Pencarian dan penyelamatan;
3. Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD);
4. Pengkajian cepat kerusakan dan kebutuhan;
5. Penyediaan kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi, pangan, sandang, papan, kesehatan, konseling;
6. Pemulihan segera fasilitas dasar seperti telekomunikasi, transportasi, listrik, pasokan air;
7. untuk mendukung kelancaran kegiatan tanggap darurat.

Konsep mitigasi bencana kawasan rawan bencana pada Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Bencana Banjir

Di Kabupaten Musi Banyuasin beberapa daerah yang dikhawatirkan akan mengalami banjir merupakan daerah yang berada di sekitar sepanjang aliran Sungai Musi seperti Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman. Lawang Wetan, Sekayu dan Lais. Selain itu Wilayah lainnya mencakup sebagian Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Lalan dan Kecamatan Batanghari Leko dengan potensi luasan keseluruhan cakupan wilayah 719.716,87 hektar.

Pengelolaan daerah yang sering mengalami banjir adalah dengan membatasi kegiatan pembangunan khususnya perumahan dan permukiman pada daerah tersebut. Pada beberapa daerah tertentu perlu diarahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau. Untuk mengurangi dampak kerugian dari bencana banjir serta antisipasinya, Pemerintah Daerah perlu merencanakan beberapa kegiatan antara lain :

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rusaknya daya dukung lingkungan diakibatkan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah resapan air, pembabatan hutan menjadi lahan pertanian dan bangunan serta pertambangan dapat mengakibatkan cepatnya aliran air menuju hilir. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai di lain pihak menghambat dan menyumbat aliran. Kombinasi antara kedua keadaan tersebut dapat menimbulkan banjir serta genangan. Banjir semakin sering terutama jika terjadi

hujan lebat, hal ini disebabkan pula karena sistem drainase yang tidak memadai. Pengelolaan daya dukung lingkungan tergantung perilaku serta kebiasaan manusia dalam mengelola lingkungannya, diperlukan kesadaran serta inisiatif yang tinggi dari masyarakat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, peningkatan kesadaran perlu ditunjang oleh kegiatan yang terprogram melalui sosialisasi dan pelatihan masyarakat mengenai pengelolaan baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana banjir.

Dalam upaya menahan aliran air, direncanakan juga pembangunan bendung pada tiap anak sungai yang pengaruh debit air lepasannya signifikan menyumbang banjir. Selain itu bendung ini dapat berfungsi pula sebagai penahan sedimentasi serta dengan menerapkan konsep ekohidrologi sehingga diperoleh bangunan-bangunan air yang ramah lingkungan serta genangan. Banjir semakin sering terutama jika terjadi hujan lebat, hal ini disebabkan pula karena sistem drainase yang tidak memadai. Pengelolaan daya dukung lingkungan tergantung perilaku serta kebiasaan manusia dalam mengelola lingkungannya, diperlukan kesadaran serta inisiatif yang tinggi dari masyarakat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, peningkatan kesadaran perlu ditunjang oleh kegiatan yang terprogram melalui sosialisasi dan pelatihan masyarakat mengenai pengelolaan baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana banjir. Dalam upaya menahan aliran air, direncanakan juga pembangunan bendung pada tiap anak sungai yang pengaruh debit air lepasannya signifikan menyumbang banjir. Selain itu bendung

ini dapat berfungsi pula sebagai penahan sedimentasi serta dengan menerapkan konsep ekohidrologi sehingga diperoleh bangunan-bangunan air yang ramah lingkungan.

b. Pembangunan Fasilitas Peringatan Dini (early warning) dan mekanisme tanggap darurat bencana banjir. Sistem peringatan dini ini akan sangat efektif jika disertai dengan pelaksanaan mekanisme tanggap darurat. Mekanisme ini berkaitan dengan penyusunan petunjuk teknis operasional dan aturan, termasuk sistem mobilisasi, penanganan bidang kesehatan serta sekolah darurat, yang harus dilakukan ketika dan setelah terjadi bencana banjir. Oleh karena itu perlu direncanakan juga pusat penanganan bencana dan pembangunan rumah singgah di daerah aman tidak jauh dari wilayah yang sering terkena banjir. Mekanisme tanggap darurat ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah langganan banjir

c. Normalisasi Sungai dan Anak Sungai. Normalisasi sungai dimaksudkan agar air yang mengalir lancar dan dapat dikendalikan.

d. Penempatan Jalur Pengungsian Yang Aman. Tiap lingkungan pemukiman yang rawan banjir harus punya rute penyelamatan yang aman, serta penampungan sementara dilokasi yang letaknya lebih tinggi dari permukaan air banjir

2. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas

dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda.

Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernapasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan, tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca.

Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang rawan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan ini umumnya wilayah yang banyak terdapat kawasan hutan dan perkebunan seperti Kecamatan Bayung Lencir, Tungkal Jaya, Lalan, Batanghari Leko Kecamatan Lais, Babat Supat dan Sungai Keruh dengan luas keseluruhan wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan + 218.608,803 ha.

Untuk pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan cara antara lain :

a. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran;
b. Peningkatan penegakan hukum;
c. Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini;
d. Pembuatan waduk-waduk Kecil, bak penampungan air dan hydrant untuk pemadaman api;
e. Pembuatan barrier penghalang api terutama antara lahan perkebunan dengan hutan;
f. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran;
g. Pembakaran lahan bisa dilakukan jika selalu dalam pengawasan dan segera dimatikan jika sudah terlalu besar;

h. Hindarkan pembakaran lahan secara serentak sehingga membakar wilayah yang luas yang akan berpotensi menjadi kebakaran yang tak terkendali;
i. Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang Iuas;
j. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat;
k. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen;
l. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya.

3. Bencana Longsor

Bencana longsor di Kabupaten Musi Banyuasin umumnya disebabkan oleh longsornya dinding tebing sempadan sungai akibat tergerus oleh aliran air sungai. Beberapa kawasan yang pernah terjadi dan rawan terjadinya longsor dinding sungai ini seperti Kecamatan Sekayu, Lais dan Sanga Desa. Longsor di beberapa kawasan tersebut seringkali menimbulkan korban harta benda, mengingat pada kawasan tersebut terdapat permukiman – permukiman penduduk.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang diarahkan pada kawasan – kawasan rawan bencana longsor tersebut seperti misalnya : Pemasangan atau pembuatan tanggul/dinding tebing pada bagian – bagian yang rawan longsor serta relokasi atau penataan kembali kawasan permukiman di sepanjang kawasan yang rawan terjadi longsor.

4. Bencana Angin Topan/Puting Beliung

Bencana Angin Puting Beliung terjadi sewaktu – waktu dan tidak dapat diprediksi. Di Kabupaten Musi Banyuasin pernah terjadi beberapa kali seperti misalnya di Kecamatan Sekayu yang menimbulkan korban harta benda (rumah roboh), namun demikian kejadian bencana Angin Puting Beliung ini relatif jarang terjadi. Oleh karena bencana Angin Puting Beliung ini sulit diprediksi, maka perlu kewaspadaan terhadap gejala – gejala yang ada.

3) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya ini antara lain Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan, Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Permukiman. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan maupun perkotaan.

Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, rencana pengembangan kawasan budidaya ini diarahkan kepada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Prinsip penetapan kawasan ini adalah berdasarkan dominasi fungsi atau kegiatan utama yang ada dan yang akan dikembangkan pada kawasan tersebut. Analisis spasial arahan pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan luas kawasan budidaya sebesar 1.293.348,71 Ha. Arahan pola ruang

kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari: Kawasan Budidaya Kehutanan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pertanian, Kawasan Pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman; serta Kawasan lainnya.

Peruntukan Kawasan Hutan Produksi

Potensi kawasan Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi memiliki peluang besar bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat sekitar, namun potensi tersebut harus dikelola secara baik, berkelanjutan dan tentunya menjaga kelestarian hutan produksi dengan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat. Luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Musi Banyuasin + 571.107 ha tersebar hampir diseluruh Kecamatan Kecuali Kecamatan Sekayu dan Lawang Wetan.

Berikut rencana Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan peruntukannya.

Tabel 3.13.
Rencana Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2016 – 2036

No	Peruntukan Kawasan Hutan	Lokasi	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi Terbatas	Kec. Batanghari Leko dan Kec. Bayung Lencir	94.099,17
2	Hutan Produksi Tetap	Kec. Babat Supat, Kec. Babat Toman, Kec. Batanghari Leko, Kec. Bayung Lencir, Kec. Jirak Jaya, Kec Lais, kec. Lalan, Kec,. Plakat Tinggi, Kec. Sanga Desa, Kec. Sungai Keruh, dan Kec. Tungkal Jaya	421.185,89
3	Hutan Produksi Konversi	Kec. Babat Supat, Kec. Batanghari Leko, Kec. Bayung Lencir, Kec. Keluang, Kec. Lalan, Kec. Sanga Desa, Kec. Sekayu, Kec Sungai Lilin, dan Kecamatan Tungkal Jaya	59.259,40
	Jumlah		574.544,46

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Pengembangan Potensi Pertanian

1. Pertanian Tanaman Pangan

   Kawasan tanaman pangan ditetapkan berdasarkan dari lahan baku sawah dari SK Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 688/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 dengan luas lahan tanaman pangan yang ditetapkan sebesar 40.298,63 Ha.

Tabel 3.14.
Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Luas
Kecamatan Babat Supat	1.117,73
Kecamatan Babat Toman	811,78
Kecamatan Bayung Lencir	50,30
Kecamatan Jirak Jaya	223,63
Kecamatan Lais	5.210,51
Kecamatan Lalan	24.509,94
Kecamatan Lawang Wetan	1.308,55
Kecamatan Sanga Desa	1.916,76
Kecamatan Sekayu	5.030,12
Kecamatan Sungai Lilin	77,25
Kecamatan Tungkal Jaya	42,08

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Keterangan :

Kawasan peruntukan pertanian pangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan dimana pengairannya dapat diperoleh secara alami maupun teknis. Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan adalah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan perairan yang memiliki :

- Ketinggian < 1.000 m.
- Kelerengan <15%.
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm.

Berdasarkan data pertanian tanaman pangan tersebut, maka komoditas pertanian tanaman pangan padi, palawija dan jagung memiliki potensi terbesar. Untuk pertanian tanaman pangan padi diarahkan pengembangannya di Kecamatan Lalan, Sungai Lilin, Lais, Lawang Wetan dan Babat Toman. Tanaman Palawija diarahkan pengembangan di Kecamatan Lalan, Sungai Lilin dan Plakat Tinggi. Sedangkan untuk pertanian tanaman pangan lainnya dapat dikembangkan di seluruh Kecamatan. Pengembangan potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan pada pengembangan secara intensifikasi serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Berdasarkan analisa potensi dan kondisi yang ada, maka pengembangan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan akhir tahun perencanaan 2036 direncanakan seluas + 125.062 ha.

2. Pertanian Tanaman Hortikultura

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan seperti tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan. Rencana peruntukan kawasan pertanian lahan kering dilakukan pada kawasan yang tidak mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan serta memiliki :

- Ketinggian < 1.000 Meter.
- Kelerengan <15 %.
- Kedalaman efektif lapisan tanah lapisan tanah atas > 30 cm.

Pertanian Tanaman Hortikultura di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan menjadi tanaman sayur-sayuran dan tanaman buah - buahan. Tanaman Hortikultura berupa tanaman sayuran yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari kacang panjang, cabai, tomat, terong, timun, kangkung, bayam dan buncis. Total luasan untuk pertanian holtikultura mencapai + 3.031 Ha.

Lokasi untuk pertanian tanaman holtikultura terbesar terdapat di Kecamatan Babat Toman dengan lahan 895 Ha dengan jenis tanaman terbanyak berupa pertanian kacang panjang, Kecamatan Sungai Lilin dengan luasan terbesar untuk pertanian tanaman terong seluas 148 ha dan Kecamatan Bayung Lencir dengan luasan pertanian terbesar berupa tanaman cabai seluas 153 ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15.
Rencana Luas dan Sebaran Lahan Pertanian Tanaman Hortikultura Tanaman Sayur – sayuran (Ha) Kabupaten Musi Banyuasin

Komoditas	Kecamatan											Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kacang Panjang	165	24	18	22	8	29	10	138	23	142	35	614
Cabai	132	47	31	23	4	20	23	136	20	153	23	612
Tomat	155		25	16		15	4	15	19	26		275
Terong	71	23	15	17	5	21	5	148	30	41	11	387
Ketimun	114	13	8	19	5	28	7	126	25	116	10	471
Kangkung	141	13	3	12	-	9	-	70	11	54	-	313
Bayam	117	8	3	14	-	10	-	55	12	47	-	266
Buncis	-	-	2	-	-	15	-	22	15	39	-	93
Total	895	128	105	123	22	147	49	710	155	618	79	3.031

Sumber : Hasil Rencana 2011, 2015

Catatan : Data Kec. Babat Supat, Tungkal Jaya dan Lawang Wetan masih tergabung dalam Kecamatan induk.

Keterangan :

1 Babat Toman
2 Plakat Tinggi
3 Batanghari Leko
4 Sanga Desa
5 Sungai Keruh
6 Sekayu
7 Lais
8 Sungai Lilin
9 Keluang
10 Bayung Lencir
11 Lalan

Tabel 3.16.
Rencana Luas dan Sebaran Lahan Pertanian Tanaman Hortikultura Tanaman Buah-buahan (Ha) Kabupaten Musi Banyuasin

Komoditas	Kecamatan											Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Mangga	53	4	8,5	17	27,5	59	27,5	25	27,5	-	2,5	251,5
Jeruk	21,25	-	2,88	10,25	38,93	9,19	7,5	118,75	38,07	21	8,75	276,57
Pepaya	4,1	1	3,33	6,15	0,28	1	-	2,1	6,42	6,92	0,25	31,55
Sawo	10	4	3,6	15,85	-	40	13,6	11,5	16,6			115,15
Durian	195,52	15,5	18,71	88	42,75	47,61	14,63	39	85,97	79,4	11,5	638,59
Duku	192	8,5	5	40	18,75	17,95	0,39	5	13,34	5,2	-	306,13
Rambutan	20	8,5	9,9	24	20,7	39,81	29,08	500	160	27,22	3,5	842,71
Pisang	3,5	1,2	6,02	4,5	2,48	2,5	6,15	105	20,43	14,2	1,3	167,28
Nangka	140	7	8,6	22,5	10,3	5,8	4,3	100	49,3	24	4,5	376,3
Jambu biji	0,5	8,3	1,9	3,3	3,3	1,2	0,5	10,5	18,5	9	8,2	65,2
Nanas	0,16	0,14	0,28	0,64	0,011	0,007	-	2,9	1,54	-	-	5,678
Semangka	28	4	7	22	-	22	53	-	4	47	-	187
Total	668,03	62,14	75,72	254,19	165,00	246,07	156,65	75	441,67	233,94	40,50	3.263,66

Sumber : Hasil Rencana 2011, 2015
Catatan : Data Kec. Babat Supat, Tungkal Jaya dan Lawang Wetan masih tergabung dalam Kecamatan induk.

Keterangan :

1 Babat Toman
2 Plakat Tinggi
3 Batanghari Leko
4 Sanga Desa
5 Sungai Keruh
6 Sekayu
7 Lais
8 Sungai Lilin
9 Keluang
10 Bayung Lencir
11 Lalan

Pengembangan potensi pertanian tanaman hortikultura di Kabupaten Musi Banyuasin juga diarahkan pada pengembangan secara intensifikasi serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Luas lahan pertanian tanaman hortikultura yang ada saat ini minimal dapat tetap dipertahankan.

Pengembangan Potensi Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin secara rinci didasarkan atas keberadaan lahan perkebunan dan berdasarkan analisis kesesuaian lahan peruntukan perkebunan, sehingga didapat luas Kawasan perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 643.529,54 Ha yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan. Kecamatan yang dikembangkan sebagai peruntukan kawasan perkebunan terluas berada di Kecamatan Bayung Lencir yang mencapai sekitar 95.133,54 Ha.

1. Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit

Potensi produksi kelapa sawit rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin tersebar merata di seluruh Kecamatan dengan luasan 316.760 Ha dengan produksi mencapai 1.755.236,818 ton. Identifikasi luasan dan produksi tanaman kelapa sawit rakyat terbesar berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bayung Lencir dengan luasan terbesar mencapai 14.411 ha, dengan produksi mencapai 212.529 ton, kedua Kecamatan Sungai Lilin dengan luasan 4.155 ha dengan produksi mencapai 37.848 ton, ketiga Kecamatan Keluang dengan luasan mencapai 933 ha dan produksi mencapai 2.663 ton.

2. Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit

Berdasarkan potensi dan Kecenderungan perkembangan, maka untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di arahkan pada Kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Bayung Lencir (mencakup Kecamatan Tungkal Jaya);
- Kecamatan Sungai Lilin (mencakup Kecamatan Babat Supat); dan

- Kecamatan Keluang.

Kelapa sawit merupakan salah satu perkebunan yang memiliki nilai sangat tinggi hal ini dikarenakan kebutuhan kelapa sawit di pasaran dunia sangat dibutuhkan sekali, dan Kabupaten Musi Banyuasin memiliki lahan kelapa sawit yang sangat besar sekali, dengan adanya pengembangan kelapa sawit yang dilakukan secara profesional akan memberikan efek besar dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan peningkatan ekonomi wilayah, untuk mempersiapkan wilayah ini menjadi salah satu pengekspor kelapa sawit terbesar diperlukan tahapan arahan pengembangan sebagai berikut :

- Mempertangguh bisnis pengembangan agribisnis kegiatan hulu dengan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat;
- Pengembangan kemitraan antara pihak swasta dan rakyat;
- Pengembangan jaringan infrastruktur di wilayah perkebunan kelapa sawit;
- Pengembangan industri hilir berbahan baku minyak sawit dan pemanfaatan berbagai hasil samping dan limbah lainnya;
- Pengembangan kelapa sawit kedepannya harus bercirikan pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian terintegrasi dari pemecahan berbagai permasalahan spesifik seperti pengurangan penduduk miskin di pedesaan di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit, para perambah hutan, pemanfaatan lahan tidak produktif.

3. Tanaman Perkebunan Karet

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki perkebunan karet seluas 208.919 Ha dengan produksi mencapai 211.844,04 ton yang secara

nilai jual memiliki nilai ekonomi tinggi. Di lihat hasil identifikasi luasan terbesar dimiliki oleh perkebunan rakyat dengan total luasan mencapai 162.741,5 ha dengan produksi mencapai 104.708 ton.

Berdasarkan kondisi dan potensi perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, maka arahan dan strategi pengembangan yang dapat dilakukan antara lain :

- Penggunaan klon unggul dengan produktivitas tinggi;
- Percepatan peremajaan tanaman tua;
- Diversifikasi usaha tani karet dengan tanaman pangan sebagai tanaman sela dan ternak;
- Peningkatan efisiensi usaha tani;
- Peningkatan kualitas bokar berdasarkan SNI;
- Peningkatan efisiensi pemasaran untuk meningkatkan marjin harga petani;
- Penyediaan kredit untuk peremajaan, pengolahan dan pemasaran bersama;
- Pengembangan infrastruktur;
- Peningkatan pengembagan industri hilir;
- Peningkatan pendapatan petani melalui perbaikan sistem pemasaran.

Arahan pengembangan peruntukan perkebunan baik tanaman karet, sawit maupun kopi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan pertimbangan :

- Ketinggian <1.000 Meter.
- Kelerengan <40 %.
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm.

Tanaman Karet

- Bukan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi
- Bukan Hutan Produksi Tetap
- Bukan areal bergambut

Tanaman Kelapa Sawit

- Bukan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi
- Bukan Hutan Produksi Tetap
- Bukan areal bergambut dan rawa/lahan basah
- Berada di lahan tidak produktif

Tanaman Kopi

- Berada di luar kawasan hutan

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin direncanakan tersebar di 15 Kecamatan dengan luas + 581.811 Ha atau 40,8 % dari total luas wilayah kabupaten.

Pengembangan Potensi Peternakan

Potensi peternakan yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin dikelompokan menjadi dua jenis peternakan yaitu peternakan Kecil dan peternakan besar dengan luasan + 298 ha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab di bawah ini.

1. Peternakan Kecil

Potensi peternakan di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 3 jenis peternakan yaitu ayam daging, ayam buras dan itik. Peternakan terbesar berada di Kecamatan Bayung Lencir dengan rincian ayam daging sebanyak 168.000 ekor, ayam buras 126.580 ekor dan itik 29.706 ekor, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17.
Potensi Peternakan Kecil Kabupaten Musi Banyuasin

NO	KECAMATAN	AYAM PEDAGING	AYAM BURAS	ITIK
1	Sanga Desa	74.000	16.150	1.200
2	Babat Toman	180.000	5.482	700
3	Batang Hari Leko		13.500	800
4	Plakat Tinggi		25.205	410
5	Lawang Wetan	200.000	35.650	400
6	Sungai Keruh		16.435	280
7	Sekayu	585.000	16.500	850
8	Lais	175.000	21.650	4.850
9	Sungai Lilin	230.000	18.320	350
10	Keluang	125.000	34.278	440
11	Babat Supat	30.000	39.900	150
12	Bayung Lencir	100.000	42.795	180
13	Lalan	100.000	26.900	950
14	Tungkal Jaya		39.850	550
15	Jirak Jaya		10.500	650
	Total	**1.799.000**	**363.115**	**12.760**

Sumber : Dinas TPHP Kab Musi Banyuasin 2025

2. Peternakan Besar

Potensi peternakan besar di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 4 jenis peternakan yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dimana peternakan terbesar berada di jenis peternakan sapi dengan jumlah mencapai 34.089 ekor, kemudian yang kedua peternakan kambing dengan jumlah 25.547 ekor. Peternakan domba mencapai 2.100 ekor dan yang terakhir kerbau dengan 892 ekor untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18.

Potensi Peternakan Besar Kabupaten Musi Banyuasin

NO	KECAMATAN	SAPI	KERBAU	KAMBING	DOMBA
1	Sanga Desa	729	5	704	6
2	Babat Toman	1.050	188	776	374
3	Batang Hari Leko	923	21	1.693	62
4	Plakat Tinggi	3.258		1.325	
5	Lawang Wetan	1.150	6	325	59
6	Sungai Keruh	885		756	19
7	Sekayu	1.335	7	1.677	
8	Lais	2.080		1.779	69
9	Sungai Lilin	2.542		2.065	
10	Keluang	2.121		1.267	
11	Babat Supat	3.950	116	2.058	15
12	bayung Lencir	1.743	39	2.540	18
13	Lalan	1.543		2.468	8
14	Tungkal Jaya	1.520		893	
15	Jirak Jaya	536	1	812	64
	Total	**25.365**	**383**	**21.138**	**694**

Sumber : Dinas TPHP Kab Musi Banyuasin 2010

Arahan pengembangan peternakan baik peternakan Kecil maupun peternakan besar di rencanakan dengan lingkup rencana sebagai berikut :

1. Pengembangan Sektor Pembibitan

Ruang lingkup kegiatan di sektor pembibitan mulai dari hulu hingga hilir meliputi :

a. Perlindungan, pelestarian dan pengelolaan plasma nutfah secara berkelanjutan, termasuk kedalamnya penanganan berbagai hal yang terkait dengan pembinaan masyarakat petani peternak sehingga ada jaminan ketersediaan plasma nutfah ternak yang sudah terdomestikasi dan atau plasma nutfah ternak baru menjadi terdomestikasi. Hal tersebut terkait dengan implementasi program

yang digulirkan oleh lembaga internasional seperti FAO dan lain sebagainya;

b. Pengadaan dan pengembangan bibit/benih ternak termasuk kedalamnya penanganan berbagai hal yang terkait dengan pengadaan dan pengembangan bibit dari luar negeri atau produk domestik;
c. Pemilihan ternak untuk menghasilkan bibit yang baik. Hal tersebut terkait dengan upaya pemerintah untuk ikut berperan serta dalam penyediaan bibit ternak untuk masyarakat luas sehingga di masa yang akan datang dapat dihasilkan populasi ternak yang lebih berkualitas secara berkelanjutan;
d. Pengawasan dan standarisasi mutu bibit. Hal tersebut berhubungan dengan pelaksanaan fungsi evaluasi dan akreditasi khusus perbibitan ternak baik yang dihasilkan oleh pemerintah maupun non-pemerintah

2. Arahan Pengembangan Produktivitas Peternakan

Selanjutnya dalam pengembangan peternakan ada beberapa hal yang memerlukan perhatian dan upaya peningkatannya antara lain :

a. Inovasi teknologi dan upaya pengembangannya,
b. peningkatan kualitas SDM yang bekerja dalam bidang perbibitan/perbenihan,
c. Diseminasi dan komunikasi alih teknologi, serta
d. Peningkatan peluang pasar yang lebih luas

Pengembangan Potensi Perikanan

1. Perikanan Tangkap

Jenis perikanan tangkap yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari sungai besar dan sungai Kecil dalam wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin, dengan rincian produksi dari masing masing Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.19.

Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kecamatan	Produksi (ton)
1	Babat Toman	1,589.13
2	Batanghari Leko	1,961.56
3	Bayung Lencir	1,057.46
4	Keluang	696.94
5	Lais	2,361.67
6	Lalan	1,200.29
7	Plakat Tinggi	854.14
8	Sanga Desa	2,572.21
9	Sekayu	4,666.04
10	Sungai Keruh	1,023.39
11	Sungai Lilin	2,868.47
12	Lawang Wetan	1,206.89
13	Tungkal Jaya	895.45
14	Babat Supat	1,557.64
Total		**24,511.28**

Sumber : Dinas Perikanan Kab Musi Banyuasin 2025

2. Potensi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin berupa perikanan darat, dimana total produksi pada tahun 2010 sebesar 5.300 ton dengan produksi terbesar berada di Sungai Keruh, Sungai Lilin dan Bayung Lencir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20.
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kecamatan	Produksi (ton)
1	Babat Toman	777,00
2	Plakat Tinggi	399,45
3	Batanghari Leko	527,81
4	Sungai Keruh	364,04
5	Sanga Desa	1.053,51
6	Sekayu	1.373,92
7	Sungai Lilin	1.248,66
8	Lais	3.386,34
9	Keluang	250,98
10	Bayung Lencir	733,39
11	Lalan	563,82
12	Lawang Wetan	438,92
13	Jirak Jaya	37,63
14	Tungkal Jaya	568,12
15	Babat Supat	365,25
Total		**12.088,84**

Sumber : Dinas Perikanan Kab Musi Banyuasin 2025

Melihat dari potensi perikanan di Kabupaten Musi Banyuasin, baik tangkap maupun budidaya tersebut memberikan harapan besar akan peluang untuk meningkatkan produksi perikanan, untuk itu di perlukan arahan pengembangan dengan empat Grand Strategi sebagai berikut :

- Memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi;
- Mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;

- Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan; serta
- Memperluas akses pasar domestik

3. Pengembangan Potensi Pengolahan Perikanan

Potensi besar pada produksi perikanan di Kabupaten Musi Banyuasin di perlukan perhatian khusus dengan memberikan sarana prasarana pendukung sehingga produksi dan pemasaran perikanan di kabupaten Musi Banyuasin semakin meningkat, untuk itu diperlukan arahan pengolahan perikanan, yang direncanakan pengembangan adalah dengan membuat rencana pengolahan perikanan yang ditempatkan di kawasan strategis terutama kawasan yang memiliki produksi perikanan yang tinggi, dan berdasarkan hasil analisa, rencana pengembangan kawasan pengolahan kawasan perikanan berupa pasar ikan di rencanakan penempatannya sebagai berikut:

- Kecamatan Sekayu
- Kecamatan Sungai Lilin
- Kecamatan Lais

Dengan adanya pasar ikan serta prasarana pendukung lainnya secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada nelayan untuk dapat mengelola perikanan dan memasarkan perikanan secara lebih baik lagi.

Pengembangan Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain pertambangan minyak dan gas bumi, batubara dan galian. Untuk lebih jelasnya mengenai arahan masing – masing kawasan pertambangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 adalah berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya mengenai azas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tercantum dalam Undang - undang No.22 Tahun 2001 pasal 3 bertujuan :

- Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan

mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;

- Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Potensi minyak dan gas bumi terdapat di beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Perusahaan yang pertama kali melakukan eksploitasi adalah DUCH, jenis minyaknya bervariasi mulai dari parafin ringan sampai sedang (45-540 API), parafin berat (35-370 API) dan ada juga yang bersifat aspal (22-250 API).

Luas pertambangan batubara di kabupaten Musi Banyuasin adalah 905,21 Ha yang tersebar di Kecamatan bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin, dan kecamatan Tungkal Jaya. Sedangkan kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi seluas 1.273,60 yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lais, kecamatan Sungai Lilin, dan Kecamatan Tungkal Jaya. Terakhir adalah kawasan pembangkitan Tenaga Listrik seluas 72,84 Ha.

Arah Pengembangan Potensi Pertambangan Migas Untuk Status Operasi Produksi

Dengan telah berjalannya operasi produksi untuk kawasan pertambangan maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian baik dalam hal sisi administrasi, pengelolaan produksi, pengawasan terhadap lingkungan fisik sekitar kawasan pertambangan hingga manfaat kawasan pertambangan bagi masyarkat sekitar. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut di arah sebagai berikut:

a) Aspek Administrasi

Aspek administrasi yang perlu dilengkapi di antaranya sebagai berikut

- Perizinan: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Selain itu juga ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan IUP Khusus (IUPK) dengan kelengkapan administrasi meliputi :
  1) Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis
  2) Lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem
  3) Informasi geografi yang berlaku secara nasional;
  4) Laporan lengkap eksplorasi;
  5) Laporan studi kelayakan;
  6) Rencana reklamasi dan pasca tambang;
  7) Rencana kerja dan anggaran biaya;
  8) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang
  9) Kegiatan operasi produksi; dan
  10) Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi
- Penetapan IUP melalui lelang. IUPK diberikan oleh menteri di ex-WPN (WUPK)
- Penambangan, pengolahan dan pemurnian oleh pemegang IUP/IUPK
- Pemegang IUPK wajib untuk membagikan keuntungan bersih setelah produksi: 4% kepada Pemerintah 6% kepada Pemda.
- Kesepakatan Perjanjian/kontrak sesuai dengan ketentuan yang disepakati

b) Pengelolaan Produksi Potensi Pertambangan

- Perizinan (tahapan perizinan, jenis perizinan)

- Teknik Pertambangan (penetapan cadangan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan)
- Perlindungan Lingkungan Pertambangan (dokumen Amdal: Andal/RKL/RPL dan RTPKL)
- K 3 (pengawasan administrasi struktural dan operasional fungsional, pembinaan *zero accident* dan pemberian *Safety Award*)
- Konservasi (optimalisasi produksi, pengolahan, kadar marjinal, mineral ikutan)
- Nilai Tambah (pengembangan teknologi, peningkatan hubungan kerja, pemakaian produk dalam negeri)
- Penutupan dan Pasca Tambang (legalitas dokumen, penanggung jawab lapangan, kriteria keberhasilan, penjamin penutupan tambang dan pengawasan)
- Standarisasi Pertambangan (sistem SNI, standarisasi pertambangan, akreditasi/sertifikasi)

c) Aspek lingkungan

- Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuifer sehingga tidakakan mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya.
- Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari pemukiman penduduk sehingga suara bising ataupun debu yang timbul akibat kegiatan penambangan tidak akan mengganggu penduduk.
- Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air dari mata air tersebut, juga untuk menghindari hilangnya mata air.

- Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah aliran sungai bagian hulu (terutama tambang batuan) untuk menghindari terjadinya pelumpuran sungai yang dampaknya bisa sampai ke daerah hilir yang akhirnya dapat menyebabkan banjir akibat pendangkalan sungai. Hal ini harus lebih diperhatikan terutama di kota-kota besar dimana banyak sungai yang mengalir dan bermuara di wilayah kota besar tersebut.
- Lokasi penambangan tidak terletak di kawasan lindung (cagar alam, taman nasional, dsb.).
- Lokasi penambangan hendaknya dekat dengan konsumen untuk menghindari biaya transportasi yang tinggi sehingga harga jual material tidak menjadi mahal.
- Lokasi penambangan tidak terletak dekat dengan bangunan infrastruktur penting, misalnya jembatan dan menara listrik tegangan tinggi. Juga sedapat mungkin letaknya tidak dekat dengan gedung sekolah sehingga tidak akan mengganggu proses belajar dan mengajar.

2. Pertambangan Batubara

Berdasarkan Undang - undang RI No 4 tahun 2009, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (izin pertambangan Rakyat) serta IUPK (izin usaha pertambangan khusus). Sampai akhir tahun 2009 di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 70 IUP yang perizinannya di terbitkan oleh Bupati dan 4 izin PKP2B yang perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Baik IUP maupun PKP2B yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 2 jenis status kegiatan yaitu kawasan pertambangan berstatus operasi produksi dan kawasan

pertambangan berstatus eksplorasi. Namun seiring dengan perkembangan kegiatan pertambangan batubara, maka pada tahun 2014 izin pertambangan batubara di Kabupaten Musi Banyuasin yang masih berlaku tinggal 46 IUP (izin pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati), dengan rincian 12 IUP berstatus Eksplorasi dan 34 IUP yang berstatus Operasi Produksi. Adapun rincian data perusahaan yang sudah berstatus Operasi Produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Kebijakan kegiatan pertambangan batubara kedepan di arahkan sebagai berikut:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara yang masuk kedalam arahan kawasan pertambangan pada pola ruang Kabupaten Musi Banyuasin adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara yang telah berstatus Operasi Produksi;
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara yang berstatus eksplorasi dalam arahan pola ruang masih masuk kedalam kategori usulan kawasan pertambangan, sehingga untuk dapat di tingkatkan menjadi produksi wajib mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Dalam rangka peningkatan perizinan kegiatan harus seizin Bupati, Gubernur dan/atau Pemerintah Pusat dengan mekanisme administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pertambangan batubara di perkirakan akan berdampak luas baik fisik, sosial ekonomi maupun lingkungan, untuk itulah perlu dikelola dan dikendalikan sedini mungkin sehingga tidak berdampak negatif. Berdasarkan data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara sebagaimana diatas, di Kabupaten Musi Banyuasin saat ini

terdapat 34 IUP yang sudah berstatus Operasi Produksi. Sehubungan dengan itu maka diperlukan pengawasan serta pengendalian kawasan pertambangan yang berbasis lingkungan dari Pemerintah Daerah agar tidak timbul dampak negatif dari kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu kegiatan pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin di arahkan sebagai berikut :

a) Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi

Berdasarkan ketentuan pasal 25 UU nomor 4 tahun 2009 tentang kawasan pertambangan yang berstatus operasi produksi di wajibkan memiliki persyaratan teknis yang meliputi :

- Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- Laporan lengkap eksplorasi;
- Laporan studi kelayakan;
- Rencana reklamasi dan pasca tambang;
- Rencana kerja dan anggaran biaya;
- Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

b) Pembangunan Jalan Khusus Tambang

Kegiatan pertambangan memiliki potensi negatif besar terhadap dampak lingkungan seperti masih banyak perusahaan perusahaan pertambangan yang mengabaikan faktor lingkungan dalam aktivitas pengangkutan hasil tambang, yang tidak disadari mempercepat kerusakan jalan pemerintah daerah dikarenakan besaran

pengangkutan hasil tambang yang berlebihan sehingga memberikan kerugian besar bagi masyarakat sekitar dan tentunya adalah pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, perusahaan yang telah mendapatkan izin produksi tambang maupun yang masih eksplorasi diwajibkan membuat perencanaan jaringan jalan khusus pengangkutan hasil tambang dengan arahan sebagai berikut :

- Bagi perusahaan tambang yang telah mendapatkan izin produksi tambang diwajibkan segera untuk merencanakan dan membangun jaringan jalan khusus pengangkutan hasil tambang dengan biaya dari perusahaan pertambangan;
- Bagi perusahaan tambang yang masih bersifat eksplorasi tambang dan ingin meningkatkan ke perizinan eksploitasi diwajibkan merencanakan jaringan khusus pengangkutan tambang dan telah membangun jaringan jalan khusus pengangkutan hasil tambang sebelum aktivitas eksploitasi berjalan, dengan biaya dari perusahaan pertambangan;
- Hasil rencana dan pembangunan jaringan jalan khusus pengangkutan hasil tambang dari tahap awal hingga akhir di haruskan selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dengan tujuan agar jaringan jalan yang di usulkan sinergi dengan perencanaan pemerintah daerah.

c) Pengelolaan Kawasan Pertambangan

Kegiatan pertambangan dapat diartikan sebagai suatu tahapan kegiatan yang diawali dengan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan (termasuk bila ada pengolahan dan pemurnian), pengangkutan/penjualan dan diakhiri dengan rehabilitasi lahan pasca tambang. Pengelolaan pertambangan adalah suatu upaya yang dilakukan baik secara teknis maupun non teknis, agar kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan permasalahan, baik terhadap kegiatan pertambangan itu sendiri maupun terhadap lingkungan. Pengelolaan pertambangan sering hanya dilakukan pada saat penambangan saja. Hal ini dapat dimengerti, karena pada tahap inilah dinilai paling banyak atau sering menimbulkan permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan pertambangan sebaiknya dilakukan sejak awal hingga akhir tahapan seperti tersebut di atas. Bahkan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan, maka sebelum suatu deposit bahan tambang ditambang, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu apakah deposit tersebut layak untuk ditambang ditinjau dari berbagai aspek. Dengan demikian pengelolaan pertambangan secara garis besar perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenis tahapan kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan awal berupa penentuan kelayakan penambangan, Aspek-aspek yang perlu dikaji adalah:
   - Aspek penggunaan lahan pada lokasi deposit bahan tambang.
   - Aspek geologi: kajian aspek geologi dilakukan setelah selesai kegiatan eksplorasi bahan tambang dimana jenis, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sudah diketahui. Kajian aspek

geologi mencakup topografi, tanah penutup, ketebalan tanah penutup, sifat fisik dan keteknikan tanah/batuan, Hidrogeologi, kebencanaan geologi,kawasan lindung eologi serta aspek sosekbud.

- Aspek Lingkungan

2) Kegiatan Penambangan

Setelah suatu deposit bahan tambang dinyatakan layak untuk ditambang, maka selanjutnya bahan tambang tersebut akan ditambang (dieksploitasi). Dalam eksploitasi ini juga diperlukan suatu pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Hal ini berkaitan erat dengan teknik penambangan yang akan dipergunakan, termasuk pembuatan dan penempatan infrastruktur tambang. Dalam suatu kegiatan penambangan biasanya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap eksploitasi dan terakhir, yang merupakan bagian tak terpisahkan, adalah tahap reklamasi/rehabilitasi lahan

3) Pasca Penambangan

Kegiatan reklamasi tidak harus menunggu sampai seluruh kegiatan penambangan berakhir, terutama pada lahan penambangan yang luas. Reklamasi sebaiknya dilakukan secepat mungkin pada lahan bekas penambangan yang telah selesai dieksploitasi, walaupun kegiatan penambangan tersebut secara keseluruhan belum selesai karena masih terdapat deposit bahan tambang yang belum ditambang. Sasaran akhir dari reklamasi adalah untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan pada tahap reklamasi adalah sebagai berikut :

- Rencana reklamasi sebaiknya dipersiapkan sebelum pelaksanaan penambangan;
- Luas areal yang direklamasi sama dengan luas areal penambangan;
- Memindahkan dan menempatkan tanah pucuk pada tempat tertentu dan mengatur sedemikian rupa untuk keperluan revegetasi;
- Mengembalikan/memperbaiki pola drainase alam yang rusak;
- Menghilangkan/memperkecil kandungan (kadar) bahan beracun (jika ada) sampai ke tingkat yang aman sebelum dibuang ke suatu tempat pembuangan;
- Mengembalikan lahan seperti semula atau sesuai dengan tujuan penggunaan;
- Memperkecil erosi selama dan setelah proses reklamasi
- Memindahkan seluruh peralatan yang sudah tidak digunakan lagi ke tempat yang dianggap aman;
- Permukaan tanah yang padat harus digemburkan, atau ditanami dengan tanaman pionir yang akarnya mampu menembus tanah yang keras;
- Jenis tanaman yang akan dipergunakan untuk revegetasi harus sesuai dengan rencana rehabilitasi
- Mencegah masuknya hama dan gulma yang berbahaya;
- Memantau dan mengelola areal reklamasi sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

3. Pertambangan Galian C (Pasir dan Tanah Urug)

Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2010 di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 26 Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), yang terdiri dari 21 SPID untuk jenis pertambangan pasir sungai dan 5 SPID untuk pertambangan tanah urug. Pertambangan pasir sungai tersebut umumnya berada di sepanjang aliran Sungai Musi mulai dari Kecamatan Sanga Desa sampai dengan Kecamatan Sekayu. Sedangkan untuk pertambangan tanah urug berada di Kecamatan Lais dan Sungai Keruh. Adapun arahan pola ruang sehubungan dengan kegiatan pertambangan Galian C (Pasir Sungai dan Tanah Urug) tersebut adalah sebagai berikut :

- Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan dengan surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
- SIPD meliputi :
  a) Izin eksplorasi
  b) Eksploitasi
  c) Pengolahan dan pemurnian
  d) Pengangkutan
  e) Penjualan

Persyaratan SIPD

- Prinsip SIPD, pemberian wewenang pengusahaan sumberdaya mineral kepada perorangan, badan usaha, koperasi, BUMD, BUMN yang berkemampuan dan dapat dipercaya.
- Bahan galian tidak terbaharui, menyangkut kepentingan umum, sensitif berdampak lingkungan.

- Diperlukan syarat :

  a) KTP, Akte Badan Hukum Usaha

  b) Referensi Bank

  c) Memiliki NPWP

  d) PETA Situasi

  e) Rencana Kerja Eksplorasi/Eksploitasi

  f) Dokumen AMDAL, UKL-UPL

  g) Tenaga Ahli/Kepala Teknik

  h) Kesanggupan Reklamasi, Jaminan Eksplorasi, Jaminan Reklamasi

Penetapan SIPD

- SIPD seluas 50 s/d 1.000 Ha oleh GUBERNUR;
- SIPD seluas sampai dengan 50 Ha oleh KEPALA DISTAMBEN
- SIPD kurang dari 1 Ha tanpa menggunakan alat berat untuk jenis bahan galian konstruksi dan kerajinan oleh BUPATI/WALIKOTA
- SIPD kurang dari 1 Ha untuk bahan galian Industri diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kepala DISTAMBEN
- SIPD Pengolahan/Pemurnian tanpa alat berat dan SIPD Pengangkutan dan SIPD Penjualan diberikan oleh BUPATI/WALIKOTA.

4. Pengembangan Potensi Industri

Dalam Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin, peruntukan kawasan industri direncanakan berada di Kecamatan Sungai Lilin dengan luas sekitar 432,67 Ha. Kegiatan industri di Kabupaten Musi Banyuasin tersebar hampir di seluruh wilayah Kecamatan, umumnya berupa industri Kecil dan rumah tangga.

Potensi industri di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21.

Potensi Industri Kabupaten Musi Banyuasin

No	Jenis Industri	Kecamatan						
		Sekayu	Babat Toman	Lais	Sungai Lilin	Bayung Lencir	Sanga Desa	Keluang
1	Industri Pangan							
	Kerupuk kemplang	22		11				
	Ikan asin	8		18				
	Tempe tahu		15	9	15			
	Keripik Tempe		23					
	Ikan Salai		9					
	Emping melinjo					29		
2	Industri sandang							
	Pakaian jadi,konveksi	12					11	
	Batik							31
3	Industri Kimia, bahan bagunan							
	Meubel	20		17				
	Getah Gambir		88					
	Pertukangan kayu			8			15	
4	Industri Logam, aneka jasa							
	Teralis,las	16			29			
	Pandai besi	29						
5	Kerajinan umum							
	Anyaman	14						
	Kerajinan kulit telor	14						

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010

Potensi industri di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar merupakan industri Kecil dan menengah yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal, dari hasil analisa terdapat jenis – jenis industri yang bisa dikelompokkan menjadi ciri khas produk dari masing - masing Kecamatan.

Dalam rangka pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut di arahkan pengembangannya sebagai berikut :

a) Potensi Industri Pangan

Industri Pangan Kerupuk kemplang di arahkan di Sekayu. Industri tempe dan tahu di arahkan pengembangannya di Kecamatan Babat Toman. Industri Emping Melinjo berada di Kecamatan Bayung Lencir.

b) Potensi Industri Sandang

Industri pakaian jadi di arahkan pengembangannya di Kecamatan sekayu dan Sanga Desa. Industri pakaian batik di arahkan di Kecamatan Keluang.

c) Potensi Industri Kimia dan Bahan Bangunan

Industri meubel di arahkan di Kecamatan Sekayu dan Lais. Industri Getah Gambir di arahkan di Kecamatan Babat Toman. Industri logam dan aneka jasa di Kecamatan Sekayu dan Sungai Lilin. Industri kerajinan di Kecamatan Sekayu.

Dengan adanya arahan pembagian kelompok industri maka akan mempermudah bagaimana dapat menciptakan suatu produk dari bahan baku lokal yang menghasilkan produk kreatif yang laku di pasaran namun produk tersebut memiliki ciri khas produk asli budaya Kabupaten Musi Banyuasin, untuk mencapai industri kreatif diarahkan sebagai berikut :

a) Meningkatkan sumber daya manusia yang kreatif dan berkualitas melalui pelatihan yang berkesinambungan;
b) Membuat lembaga khusus pelatihan untuk menciptakan pelaku usaha industri Kecil yang kreatif;
c) Memberikan fasilitasi teknologi untuk menunjang proses pembuatan produk kreatif;
d) Menciptakan produk bersumber bahan baku lokal;

e) Membuat suatu brand tersendiri yang merupakan khas Kabupaten Musi Banyuasin;
f) Pemasaran yang terpusat di satu wilayah dengan membuat pembangunan Muba Expo;
g) Membuat langkah strategis pemasaran melalui berbagai media informasi.

Arahan pemanfaatan ruang pengembangan industri menengah adalah sebagai berikut :

a) Pembangunan Industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan radius/jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan serta upaya - upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan di sekitarnya;
b) Pada pembangunan industri, perusahaan pembangunan industri wajib menyiapkan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan perumahan untuk pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
c) Pembangunan industri harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, jenis-jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia (parkir, ruang terbuka hijau, ruang pedagang kaki lima, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran), kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi;
d) Pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus disertai dengan upaya-upaya terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari penyusunan AMDAL, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL

dan UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan disertai dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan;

e) Dalam setiap unit kegiatan industri, pengusaha harus menyediakan lahan dikavling industrinya untuk penghijauan sebagai filter udara dan peneduh;

f) Lokasi - lokasi industri terpisah (individual) yang masih berada di luar kawasan industri dan terindikasi atau berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan akan direlokasi secara bertahap ke kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri, sedangkan lokasi Industri Kecil dan Rumah tangga dapat berada di kawasan perumahan sejauh tidak mengganggu fungsi lingkungan hunian.

5. Pengembangan Potensi Pariwisata

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi wisata yang cukup banyak dan bervariasi, antara lain Danau di Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Keruh, Goa Jepang dan Makam Keramat di Kecamatan Sanga Desa dan Sekayu, Candi Serekeh di Kecamatan Babat Toman, Tambang Minyak Tradisional di Kecamatan Babat Toman, tambang minyak modern di Kecamatan Lais dan Wisata Alam Agrowisata Perkebunan Gambir di Kecamatan Babat Toman. Jarak tempat-tempat wisata tadi dari ibukota Kabupaten Musi Banyuasin antara 10 sampai 41 km.

Tabel 3.22.

Potensi Pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Objek Wisata	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Danau Ulak Lia/ Ulak Lia Lake	Balai Agung	Sekayu
2	Danau Konger / Konger Lake	Sungai Dua	Sungai Keruh
3	Pulau Pandak, Pulau Panjang	Sanga Desa	Sanga Desa
4	Sungai Kubu / Kubu River	Karang Agung	Lalan
5	Agro Wisata Perkebunan Gambir/ Gambir Estate	Toman	Babat toman
6	Tambang Minyak Tradisionil	Sungai Angit	Babat Toman
7	Tambang Minyak Modern	Bonot, Ramba	Lais, Sungai Lilin
8	Kebudayaan Suku Anak Dalam	-	Sungai Lilin, Bayung Lencir
9	Makam Keramat	Sekayu	Sekayu
10	Goa Jepang	Kemang	Sanga Desa
11	Peninggalan Sriwijaya	Ngulak, Gajah Mati	Batanghari Leko, Sanga Desa, Sungai Keruh
12	Candi Sereka	Sereka	Babat Toman

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036

Rencana Pengembangan

- Rencana pengembangan kawasan pariwisata terpadu;
- Pembangunan infrastruktur penunjang wisata;
- Pembangunan fasilitas sarana prasarana wisata;
- Melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui media, web pemerintah daerah, serta promosi dalam event event tertentu;
- Melakukan kerjasama dengan biro perjalanan untuk menginformasikan kawasan wisata;
- Membuat masterplan pengembangan kawasan wisata.

6. Kawasan Peruntukan Pengembangan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman akan sangat terkait dengan sektor - sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk permukiman memiliki beberapa syarat, antara lain :

- Memiliki sumber air yang terjamin kontinuitasnya;
- Aksesibilitas (keterjangkauan transportasi) mudah;
- Dekat dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi – sosial;
- Mudah dalam pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi/ telepon, air bersih dan sebagainya;
- Risiko bencana alam Kecil;
- Sedapat mungkin menghindari alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan sebagai upaya ketahanan pangan dan hutan lindung.

Pola pengembangan perumahan/permukiman diselaraskan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjadi alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan permukiman, terlebih dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan semakin tingginya tingkat kesejahteraan penduduk.

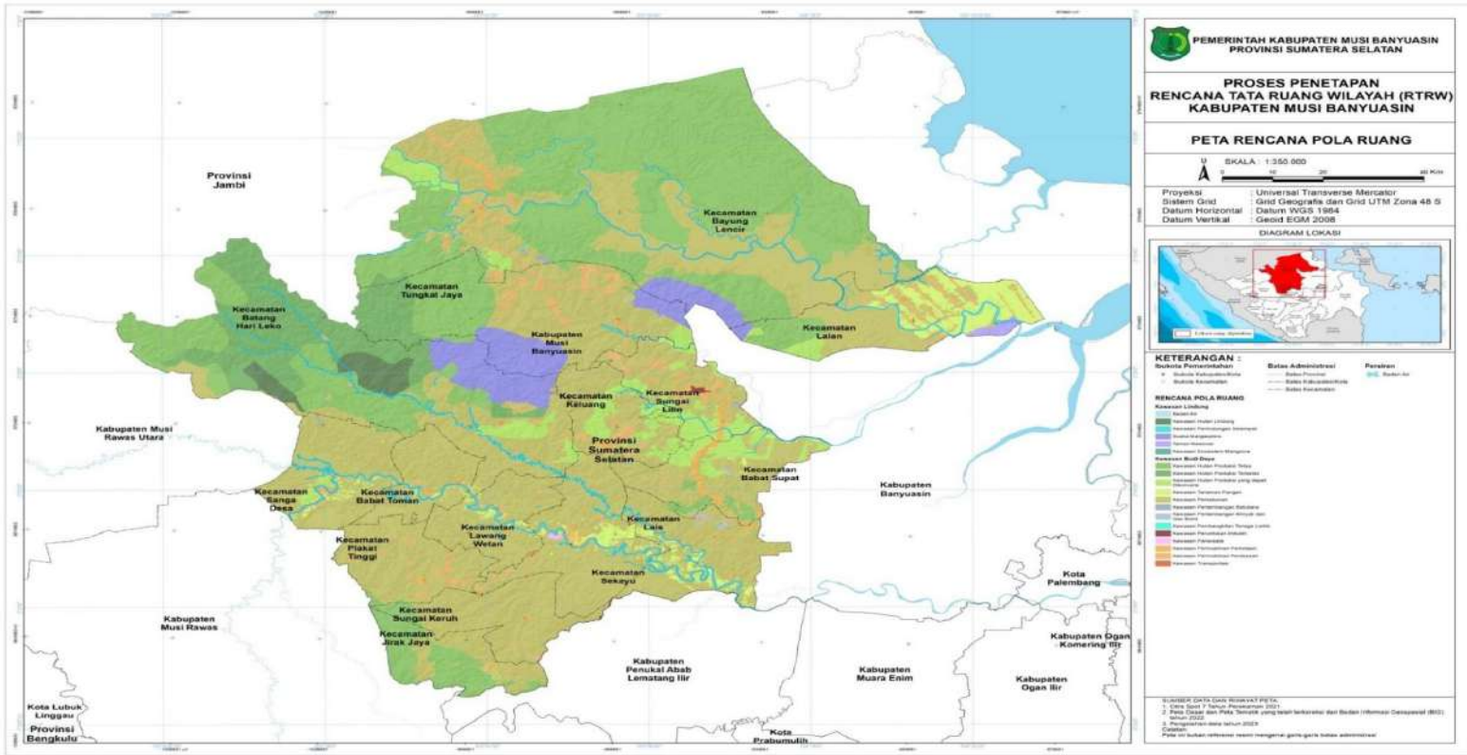
Pengembangan kawasan permukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk permukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan permukiman. Identifikasi kawasan dilakukan untuk mendata kawasan - kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan permukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan permukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk - bentuk pelanggaran penggunaan ruang.

Dari hasil analisa kebutuhan ruang Kabupaten Musi Banyuasin yang dilihat dari kebutuhan berbagai aspek, maka kebutuhan dan rencana luasan peruntukan ruang kawasan budidaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23.
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2016- 2036

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	574.544,46
2	Kawasan Pertanian	40.298,63
3	Kawasan Perkebunan	643.529,54
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	2.178,81
5	Kawasan Peruntukan Industri	432,67
6	Kawasan Permukiman	32.797,27

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045



Gambar 3.4. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga memuat Rencana Penyelenggaraan Wilayah/Daerah Pelayanan (zonasi) SPAM dalam penyusunan RISPAM Kabupaten Musi Banyuasin. Sistem pelayanan penyediaan air minum di Kabupaten Musi Banyuasin direncanakan dengan sistem zonasi berupa blok-blok pelayanan yang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin, topografi, sebaran penduduk, serta peruntukan kawasan. Wilayah pengembangan SPAM Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi 15 zonasi pelayanan.

Zonasi wilayah bertujuan untuk mempermudah pemeliharaan jaringan dan pengendalian kebocoran. Volume air yang sampai ke jaringan distribusi bagi dan layanan dapat terpantau melalui water meter yang terpasang di setiap zonasi wilayah. Pembagian rencana zonasi pelayanan SPAM ditentukan berdasarkan aspek teknis wilayah yaitu batas wilayah, Berikut ini rencana zonasi wilayah pelayanan SPAM PDAM Kabupaten Musi Banyuasin:

Tabel 3.24.
Rencana Zonasi Wilayah Pengembangan SPAM PDAM Kabupaten Musi Banyuasin

Zona Pelayanan	Kecamatan	Lokasi / Unit Kerja	No	No	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan Existing		Wilayah Pelayanan Pengembangan	
						PDAM	PAMSIMAS	PDAM	PAMSIMAS
ZONA I	Sekayu	Pusat Sekayu	1	1	Soak Baru	1			
			2	2	Balai Agung	1			
			3	3	Serasan Jaya	1			
		Unit Kayuara	4	4	Kayuara	1			
			5	5	Rimbah Ukur		1	1	
		Unit Sungai Medak	6	6	Sungai Medak	1			
		Unit Sungai Medak	7	7	Sungai Batang	1			
		Unit Sukarami	8	8	Sukarami	1			
		Unit Lumpatan	9	9	Lumpatan I	1			
			10	10	Lumpatan II	1	1		
		Unit Bailangu	11	11	Bailangu	1	1		
			12	12	Bailangu Timur	1	1		
		Unit Muara Teladan	13	13	Muara Teladan	1	1		

Zona Pelayanan	Kecamatan	Lokasi / Unit Kerja	No	No	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan Existing		Wilayah Pelayanan Pengembangan	
						PDAM	PAMSIMAS	PDAM	PAMSIMAS
		Cabang Keluang	14	14	Bandar Jaya	1			
ZONA II	Babat Toman	Cabang Babat Toman	15	1	Kasmaran	1			
			16	2	Toman	1	1		
			17	3	Babat	1			
			18	4	Srimulyo	1			
			19	5	Sungai Angit	1			
			20	6	Bangun Sari	1			
		Unit Mangunjaya	21	7	Mangunjaya	1			
			22	8	Muara Punjung	1	1		
			23	9	Beruga	1	1		
			24	10	Pangkalan Jaya	1			
		Unit Keban II	25	11	Sugi waras	1			
			26	12	Sugiraya	1			
			27	13	Sereka	1	1		
ZONA III	Sanga Desa	Cabang Ngulak	28	1	Penggage	1	1		
			29	2	Ngulak III	1	1		
			30	3	Ngunang	1	1		
			31	4	Ngulak I	1	1		
			32	5	Ngulak II	1			
			33	6	Ngulak	1			
		Unit Air Balui	34	7	Air Balui	1	1		
			35	8	Nganti	1			
			36	9	Jud II	1			
			37	10	Panai	1			
			38	11	Jud I		1	1	
			39	12	Ulak Embacang		1	1	
		Unit Keban II	40	13	Terusan	1	1		
			41	14	Kemang	1			
			42	15	Tanjung Raya	1			
			43	16	Air Itam	1			
			44	17	Keban II	1			
		Unit Keban I	45	18	Keban I	1	1		
			46	19	Macang Sakti		1	1	
ZONA IV	Bayung Lencir	Cabang Bayung Lencir	92	1	Telang	1	1		
			93	2	Mendis	1	1		
			94	3	Simpang Bayat	1	1		
			95	4	Bayat Ilir	1	1		
			96	5	Bayung Lencir	1			
			97	6	Senawar jaya	1			
			98	7	Suka jaya	1			
			99	8	Mekar jaya	1			
			100	9	Bayung Lencir Indah	1			
			101	10	Wonorejo	1	1		
			102	11	Lubuk Harjo	1			
			103	12	Muara Merang			1	
		Unit Mangsang	104	13	Mangsang	1	1		
			105	14	Tampang Baru		1	1	
			106	15	Pulai Gading		1	1	
			107	16	Muara medak		1	1	
			108	17	Kali Berau		1	1	
			109	18	Sindang Marga			1	
			110	19	Pangkalan Bayat		1	1	

Zona Pelayanan	Kecamatan	Lokasi / Unit Kerja	No	No	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan Existing		Wilayah Pelayanan Pengembangan	
						PDAM	PAMSIMAS	PDAM	PAMSIMAS
			111	20	Pagar Desa		1	1	
			112	21	Muara Bahar		1		1
			113	22	Kepayang		1	1	
			114	23	Mendis Jaya		1		
ZONA V	Sungai Lilin	Cabang Sungai Lilin	61	1	Sungai Lilin	1			
			62	2	Sumber Rezeki (B1)	1	1		
			63	3	Pinang Banjar	1	1		
			64	4	Mekar Jadi (B2)	1	1		
			65	5	Sungai Lilin Jaya	1			
		Unit Sukadamai Baru	66	6	Suka damai Baru	1	1		
			67	7	Sri Gunung	1			
			68	8	Mulyo Rejo (B4)	1	1		
			69	9	Linggo Sari (B3)	1	1		
		Cabang Peninggalan	70	10	Berlian Makmur	1	1		
			71	11	Bukit Jaya	1	1		
			72	12	Cinta Damai		1		1
			73	13	Bumi Kencana (C4)		1		1
			74	14	Panca Tunggal		1		1
			75	15	Nusa Serasan		1		1
ZONA VI	Keluang	Cabang Keluang	47	1	Keluang	1			
			48	2	Sumber Agung	1	1		
			49	3	Mekar Jaya (A6)	1	1		
			50	4	Mekar Sari / SP.6	1	1		
			51	5	Sidorejo (A3)	1	1		
			52	6	Cipta Praja	1	1		
		Unit Sridamai	53	7	Tenggaro	1	1		
			54	8	Karya Maju (A.1)	1	1		
			55	9	Tegal Mulya	1	1		
			56	10	Mulyo Asih	1	1		
			57	11	Sridamai	1	1		
		Unit Tanjung Dalam	58	12	Dawas	1	1		
			59	13	Tanjung Dalam	1			
		Unit Lokajaya	60	14	Lokajaya	1	1		
ZONA VII	Batanghari Leko	Cabang Tanah Abang	130	1	Tanah Abang	1			
			131	2	Talang Leban	1			
			132	3	Saud	1			
			133	4	Bukit Selabu	1	1		
		Unit Pinggap-Pengaturan	134	5	Pengaturan	1			
			135	6	Pinggap	1	1		
		Unit Sungai Napal	136	7	Talang Buluh	1			
			137	8	Sungai Napal	1	1		
		Unit Bukit Pangkuasan	138	9	Bukit Sejahtera	1			
			141	10	Bukit Pangkuasan	1	1		
			139	11	Tanjung Bali		1	1	
			140	12	Lubuk Buah			1	
			142	13	Pangkalan Bulian		1	1	

Zona Pelayanan	Kecamatan	Lokasi / Unit Kerja	No	No	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan Existing		Wilayah Pelayanan Pengembangan	
						PDAM	PAMSIMAS	PDAM	PAMSIMAS
			143	14	Lubuk Bintialo		1		
			144	15	Sako Suban		1	1	
			145	16	Ulak Kembang		1	1	
ZONA VIII	Lais	Cabang Lais	146	1	Teluk Kijing III	1			
			147	2	Lais	1			
			148	3	Lais Utara	1	1		
		Unit Danau Cala	149	4	Danau Cala	1			
		Unit Teluk Kijing (Sipas)	150	5	Teluk Kijing I	1			
			151	6	Teluk Kijing II	1			
		Unit Tanjung Agung Barat	152	7	Tanjung Agung Barat	1			
			153	8	Tanjung Agung Timur	1	1		
			154	9	Tanjung Agung Utara	1			
		Unit Petaling	155	10	Petaling	1			
		Unit Epil	156	11	Teluk	1			
			157	12	Epil	1	1		
			158	13	Rantau Keroya	1			
			159	14	Purwosari		1	1	
			160	15	Tanjung Agung Selatan			1	
ZONA IX	Sungai Keruh	Cabang Tebing Bulang	161	1	Sungai Dua	1			
			162	2	Pagar Kaya	1			
			163	3	Suka Lali	1			
			164	4	Kertayu	1			
			165	5	Sindang Marga	1	1		
			166	6	Tebing Bulang	1	1		
			167	7	Kerta jaya	1	1		
		Unit Soak Baru (Seberang)	168	8	Rantau Sialang	1	1		
		Unit Kramat Jaya	169	9	Keramat Jaya	1	1		
			170	10	Gajah Mati	1			
ZONA X	Lalan		171	1	Karang Agung		1		
			172	2	Galih Sari P11/P12		1	1	
			173	3	Perumpung Raya		1	1	
			174	4	Karang Makmur P8		1	1	
			175	5	Karang rejo		1	1	
			176	6	Karya Mukti (P.10)		1	1	
			177	7	Mulya Agung P9B		1	1	
			178	8	Madya Mulya		1	1	
			179	9	Karang Tirta P2		1		

Zona Pelayanan	Kecamatan	Lokasi / Unit Kerja	No	No	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan Existing		Wilayah Pelayanan Pengembangan	
						PDAM	PAMSIMAS	PDAM	PAMSIMAS
			180	10	Purwa Agung		1		
			181	11	Trimulya Agung		1		
			182	12	Ringin Agung		1		
			183	13	Mekar sari		1		
			184	14	Karang Rejo Ilir		1		
			185	15	Karang Mukti		1		
			186	16	Karang sari P4		1	1	
		Cabang Bandar Agung	187	17	Mulya jaya	1	1		
			188	18	Sari Agung	1	1		
			189	19	Suka Jadi	1		1	
			190	20	Bandar Agung	1			
			191	21	Mandala Sari P16A	1		1	
			192	22	Srigading		1	1	
			193	23	Bumi Agung		1		
			194	24	Agung Jaya		1	1	
			195	25	Jaya Agung		1		
			196	26	Suka Makmur		1		
			197	27	Mekar Jaya		1		
ZONA XI	Plakat Tinggi	Unit Sukadamai	115	1	Suka Damai	1	1		
			128	2	Sido Mukti	1	1		
		Unit Sukajaya	116	3	Suka Jaya	1	1		
			117	4	Sumber Rezeki	1			
		Cabang Sido rahayu	118	5	Sido rahayu	1	1		
		Unit Bukit Indah	119	6	Bukit Indah	1	1		
		Unit Air Putih Ulu	120	7	Air Putih Ulu (C1)	1			
		Unit Air Putih Ilir	121	8	Cinta Karya	1			
			122	9	Air Putih Ilir	1			
		Unit Warga Mulya	123	10	Warga Mulya	1			
			124	11	Tanjung Kaputran	1			
			125	12	Bangun Harjo		1	1	
			126	13	Suka maju		1	1	
			127	14	Suka Makmur		1	1	
			129	15	Sialang Agung				1
ZONA XII	Babat Supat	Cabang Sungai Lilin	76	1	Letang	1			
			77	2	Suka Maju		1	1	
			78	3	Gajah mati		1	1	
			79	4	Tanjung Kerang	1	1		
		Cabang Lais	80	5	Babat Banyuasin	1			
			81	6	Supat	1	1		

Zona Pelayanan	Kecamatan	Lokasi / Unit Kerja	No	No	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan Existing		Wilayah Pelayanan Pengembangan	
						PDAM	PAMSIMAS	PDAM	PAMSIMAS
		Unit Talang Tinggi (Supat)	82	7	Supat Barat	1	1		
			83	8	Supat Timur	1	1		
			84	7	Langkap	1	1		
			85	8	Tenggulang Jaya / Nilam Sari		1		1
			86	9	Bandar Tenggulang		1		1
			87	10	Sumber Jaya (SP4)		1		1
			88	11	Tenggulang Baru		1		1
			89	12	Seratus Lapan		1	1	
			90	13	Babat Ramba Jaya		1	1	
			91	14	Gajah Muda		1		1
ZONA XIII	Lawang Wetan	Unit Sukarami	214	1	Rantau Panjang	1			
			215	2	Karang Anyar	1			
		Cabang Ulak paceh jaya	216	3	Karang Waru	1			
			217	4	Bumi Ayu	1			
			218	5	Ulak Paceh	1	1		
			219	6	Tanjung Durian	1			
			220	7	Ulak Paceh Jaya	1			
		Unit Karang Ringin	221	8	Napal	1			
			222	9	Rantau Kasih	1			
			223	10	Karang Ringin II	1			
			224	11	Karang Ringin I	1			
			225	12	Ulak Teberau	1	1		
		Unit Pandan Dulang	226	13	Simpang Sari	1			
			227	14	Pandan Dulang	1	1		
		Unit Sungai Medak	228	14	Talang Piaseh	1			
ZONA XIV	Tungkal Jaya		198	1	Berojaya Timur		1		
			199	2	Beji Mulyo (B1)		1	1	
			200	3	Margo Mulyo (B3)		1		
			201	4	Pandan Sari (B4)		1	1	
		Cabang Peninggalan	202	5	Simpang Tungkal	1	1	1	
			203	6	Peninggalan	1	1		
			204	7	Suka Damai		1		
			205	8	Pangkalan Tungkal				1
			206	9	Berlian Jaya UPT A2		1		
			207	10	Sumber Harum		1		
			208	11	Sumber Sari		1		
			209	12	Srimulyo (D1)		1		
			210	13	Banjar Jaya (D8)		1		

Zona Pelayanan	Kecamatan	Lokasi / Unit Kerja	No	No	Desa/Kelurahan	Wilayah Pelayanan Existing		Wilayah Pelayanan Pengembangan	
						PDAM	PAMSIMAS	PDAM	PAMSIMAS
			211	14	Sinar Harapan		1		
			212	15	Sinar Tungkal		1		
			213	16	Sido Mulyo		1		
ZONA XV	Jirak Jaya	Unit Jirak (Sipas)	229	1	Jirak	1	1		
			230	2	Rejo Sari	1			
		Unit Sinar Jaya	231	3	Setia Jaya	1	1		
			232	4	Baru Jaya	1	1		
			233	5	Sinar Jaya	1	1		
			234	6	Talang Mandung			1	
			235	7	Mekar Jaya		1	1	
			236	8	Rukun Rahayu		1	1	
			237	9	Layan		1		
			238	10	Jembatan Gantung		1	1	
			239	11	Talang Simpang		1		
			240	12	Bangkit Jaya		1	1	
Jumlah						157	150	47	12

Sumber : Hasil Analisis, 2024
Keterangan :
Desa Terlayani (Eksisting)
Rencana Pelayanan

1. **Zona I** pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang meliputi Wilayah Pelayanan Kecamatan Sekayu,

   Wilayah Pelayanan SPAM Kecamatan Sekayu Mempunyai Kapasitas sebesar 315 Liter/Detik. Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 320 Liter/Detik tersebar kedalam 6 Area Pelayanan.

1) Pelayanan Kantor Pusat Sekayu, Pelayanan Kantor Pusat Sekayu mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 120 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
2) Pelayanan Cabang Soak Baru Sekayu, Pelayanan Unit Soak Baru Sekayu mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 40 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
3) Pelayanan Unit Kayuara, Pelayanan Unit Kayuara mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 85 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
4) Pelayanan Unit Lumpatan, Pelayanan Unit Lumpatan mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 30 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
5) Pelayanan Unit Muara Teladan, Pelayanan Unit Muara Teladan mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 10 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko.
6) Pelayanan Unit Sukarami, Pelayanan Unit Sukarami mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 20 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.

SPAM Kecamatan sekayu pada akhir tahun 2013 telah melayani 13 kelurahan dan desa hingga Desember 2023. zona ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat. Untuk Ke depan wilayah pelayanan direncanakan mencakup 14 desa dan Kelurahan.

2. **Zona II** pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencakup wilayah Kecamatan Babat Toman.

Wilayah Pelayanan SPAM Kecamatan Babat Toman mempunyai Kapasitas sebesar 70 Liter/Detik. Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 70 Liter/Detik tersebar kedalam 2 Area Pelayanan.

Sumber Air Baku yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Babat Toman yaitu berasal dari Sungai Musi. Unit Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Babat Toman dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Babat Toman, Pelayanan Cabang Babat Toman mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 40 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
2) Pelayanan Unit Mangunjaya, Pelayanan Unit Mangunjaya mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 30 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.

Hingga Desember tahun 2023 SPAM Kecamatan Babat Toman telah melayani 10 kelurahan/desa, Dengan dukungan 2 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA), zona ini berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat. Meskipun saat ini belum ada rencana pengembangan wilayah pelayanan di zona ini, Perumda Tirta Randik terus berupaya menjaga kualitas dan distribusi air bersih bagi pelanggan yang sudah dilayani.

3. **Zona III** pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah Kecamatan Sanga Desa.

Wilayah Pelayanan SPAM Kecamatan Sanga mempunyai Kapasitas sebesar 75 Liter/Detik. Kapasitas yang dimanfaatkan

oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 75 Liter/Detik tersebar kedalam 4 Area Pelayanan. Sumber Air Baku yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Babat Toman yaitu berasal dari Sungai Musi. Area Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Sanga Desa dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Ngulak Pelayanan Cabang Ngulak mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 30 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
2) Pelayanan Unit Air Balui, Pelayanan Unit Air Balui mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 20 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
3) Pelayanan Unit Keban I, Pelayanan Unit Keban I mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
4) Pelayanan Unit Keban II, Pelayanan Unit Keban II mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 20 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.

Hingga Desember 2023 SPAM Kecamatan Sanga Desa telah melayani 17 kelurahan/desa hingga. Dengan dukungan 4 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA), Melihat potensi pertumbuhan, ke depan wilayah pelayanan akan berkembang untuk mencakup 19 desa, memastikan semakin banyak warga yang mendapatkan akses air bersih yang berkualitas.

4. **Zona IV** pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah Kecamatan Bayung Lencir.

Wilayah Pelayanan SPAM Kecamatan Bayung Lencir mempunyai Kapasitas sebesar 140 Liter/Detik. Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 140 Liter/Detik tersebar kedalam 4 Area Pelayanan. Sumber air baku berasal dari Sungai Musi. Area Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Bayung Lencir dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Bayung Lencir Pelayanan Bayung Lencir mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 130 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
2) Pelayanan Unit Mangsang Pelayanan Unit Mangsang mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 10 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.

SPAM Kecamatan Bayung Lencir hingga Desember 2023 telah melayani 12 kelurahan/desa. Dengan dukungan 2 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA). Melihat potensi pertumbuhan, ke depan wilayah pelayanan akan berkembang untuk mencakup 21 desa, memastikan semakin banyak warga yang mendapatkan akses air bersih yang berkualitas.

5. **Zona V** pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencakup wilayah Kecamatan Sungai Lilin.

Wilayah Pelayanan SPAM Kecamatan Sungai Lilin adalah Wilayah Pelayanan Air Bersih yang melayani 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Babat Supat. Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 120 Liter/Detik tersebar kedalam 2 Area

Pelayanan. Sumber Air Baku yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Sungai Lilin yaitu berasal dari Sungai Air Dawas dan Sungai Lalan. Area Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Sungai Lilin dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Sungai Lilin, Pelayanan Cabang Sungai Lilin mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 70 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Air Dawas.
2) Unit Pelayanan Suka Damai Baru, Pelayanan Unit Suka Damai Baru mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 50 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Lalan.

Hingga Desember 2023 SPAM Kecamatan Sungai Lilin telah memberikan layanan kepada 11 kelurahan/desa. Dengan dukungan 2 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA, zona ini berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Meskipun saat ini belum ada rencana pengembangan wilayah pelayanan baru, Perumda Tirta Randik terus berupaya mengoptimalkan dengan cara menambah jaringan dan sambungan rumah (SR) baru dan memanfaatkan *idle cavasity* .

6. **Zona VI** Pelayanan Perumda Air Minum Tirta randik Kabupaten Musi Banyuasin

Zona VI pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencakup Wilayah Pelayanan Kecamatan Keluang adalah Wilayah Pelayanan Air Bersih yang melayani 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Kecamatan Keluang dan Kecamatan Sekayu. Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 160 Liter/Detik

tersebar kedalam 4 Area Pelayanan. Wilayah Pelayanan Kecamatan Keluang yaitu berasal dari Sungai Air Dawas, Sungai Batanghari Leko dan berasal dari Sumber Air Baku Embung. Area Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Keluang dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Keluang Pelayanan Cabang Keluang mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 80 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Air Dawas.
2) Pelayanan Unit Sri Damai Tenggaro Pelayanan Unit Sri Damai Tenggaro mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 40 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko
3) Pelayanan Unit Tanjung Dalam Pelayanan Unit Tanjung Dalam mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 30 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Air Dawas
4) Pelayanan Unit Loka Jaya, Pelayanan Unit Loka Jaya mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.

SPAM wilayah Kecamatan Keluang, telah memberikan layanan kepada 14 kelurahan/desa hingga Desember 2023. Dengan dukungan 4 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Untuk pengembangan kedepan SPAM Kecamatan keluang akan mengoptimalkan kapasitas idle dengan meningkatkan dan menambah jumlah Sambungan Rumah (SR).

7. **Zona VII** Pelayanan Perumda Air Minum Tirta randik Kabupaten Musi Banyuasin

Zona VII pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah Kecamatan Batang Hari Leko, Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 50 Liter/Detik tersebar kedalam 4 Area Pelayanan. Kebutuhan air untuk Wilayah Pelayanan Kecamatan Batanghari Leko berasal dari Sungai Batanghari Leko dan berasal dari Sumber Air Baku Embung. Area Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Batanghari Leko dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Tanah Abang Pelayanan Cabang Tanah Abang mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 30 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko.
2) Pelayanan Unit Pengaturan Pinggap Pelayanan Unit Pengaturan Pringgap mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko.
3) Pelayanan Unit Sungai Napal, Pelayanan Unit Sungai Napal mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko
4) Pelayanan Unit Bukit Pangkuasan, Pelayanan Unit Bukit Pangkuasan mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 10 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.

SPAM Batanghari Leko telah melayani 10 kelurahan/desa hingga Desember 2023. Dengan dukungan 4 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA). Untuk pengembangan ke depan selain

mengoptimalkan sistem jaringan yang telah ada, direncanakan penambahan cakupan layanan sebanyak 15 desa, sehingga akan semakin banyak warga yang mendapatkan akses air bersih yang berkualitas.

8. **Zona VIII** Pelayanan Perumda Air Minum Tirta randik Kabupaten Musi Banyuasin

Zona VIII pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah Kecamatan Lais, Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 85 Liter/Detik yang dilayani oleh 6 Area Pelayanan. Wilayah Pelayanan Kecamatan Lais dilayani dari Sumber Musi dan Sungai Batanghari Leko. Area Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Lais dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Lais, Pelayanan Cabang Lais mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 40 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko
2) Pelayanan Unit Epil, Pelayanan Unit Epil mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 10 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko
3) Pelayanan Unit Teluk Kijing (Sipas), Pelayanan Unit Teluk Kijing (Sipas) mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 15 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko.
4) Pelayanan Unit Petaling, Pelayanan Unit Petaling mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko

5) Pelayanan Unit Tanjung Agung Barat, Pelayanan Unit Tanjung Agung Barat mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 10 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
6) Pelayanan Unit Danau Cala mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.

SPAM Kecamatan telah memberikan layanan kepada 13 kelurahan/desa hingga Desember 2023. Didukung oleh 6 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA). Perumda Tirta Randik berencana memperluas layanan untuk mencakup 15 desa, memastikan semakin banyak warga yang dapat menikmati akses air bersih yang berkualitas.

9. **Zona IX** Pelayanan Perumda Air Minum Tirta randik Kabupaten Musi Banyuasin

Zona IX pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah Kecamatan Sungai Keruh, Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 65 Liter/Detik yang dilayani oleh 2 Area Pelayanan. Wilayah Pelayanan Kecamatan Sungai Keruh dilayani dari Sumber Sungai Lalan. Area Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Sungai Keruh dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Sungai Keruh, Pelayanan Cabang Sungai Keruh mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 60 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung

2) Pelayanan Unit Keramat Jaya, Pelayanan Unit Keramat Jaya mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.

SPAM Kecamatan Sungai Keruh telah memberikan layanan kepada 10 kelurahan/desa hingga Desember 2023. Dengan dukungan 2 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA), Perumda Tirta Randik tetap berfokus pada upaya menjaga kualitas air dan memastikan distribusi air bersih tetap lancar bagi pelanggan yang sudah terlayani. Sebagai bagian dari komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan warga, kualitas pelayanan air bersih di Zona IX menjadi prioritas utama yang terus dijaga dengan profesionalisme dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

10. **Zona X** Pelayanan Perumda Air Minum Tirta randik Kabupaten Musi Banyuasin

Zona X pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencakup wilayah Kecamatan Lalan, Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 40 Liter/Detik, Wilayah Pelayanan Kecamatan Lalan dilayani dari Sumber Sungai Lalan. SPAM Kecamatan Lalan telah memberikan layanan kepada 5 desa hingga Desember 2023. Didukung oleh 1 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas terpasang mencapai 40 liter per detik, zona ini terus berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat. Menyadari potensi pertumbuhan wilayah yang pesat, Perumda Tirta Randik berencana memperluas

layanan untuk mencakup 14 desa, sehingga semakin banyak warga yang dapat menikmati akses air bersih berkualitas.

11. **Zona XI** Pelayanan Perumda Air Minum Tirta randik Kabupaten Musi Banyuasin

Zona XI pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah Kecamatan Plakat Tinggi, Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 35 Liter/Detik yang dilayani oleh 7 Area Pelayanan. Wilayah Pelayanan Kecamatan Plakat Tinggi dilayani dari Sumber Musi dan Sungai Batanghari Leko. Area Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Lais dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Plakat Tinggi Pelayanan Plakat Cabang Tinggi mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.
2) Pelayanan Unit Air Putih Ulu (Sipas) Pelayanan Unit Air Putih Ulu (Sipas) mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.
3) Pelayanan Unit Bukit Indah (Sipas) Pelayanan Unit Bukit Indah (Sipas) mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.
4) Pelayanan Unit Warga Mulya, Pelayanan Unit Warga Mulya mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.

5) Pelayanan Unit Air Putih Ilir, Pelayanan Unit Air Putih Ilir mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.
6) Pelayanan Unit Sukajaya, Pelayanan Unit Sukajaya mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.
7) Pelayanan Unit Suka Damai, Pelayanan Unit Suka Damai mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.

SPAM Kecamatan Plakat Tinggi telah memberikan layanan kepada 11 desa hingga Desember 2023. Dilengkapi dengan 7 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) Menyadari pesatnya perkembangan wilayah, Perumda Tirta Randik merencanakan perluasan layanan untuk mencakup 14 desa, sehingga semakin banyak warga yang dapat menikmati akses air bersih yang berkualitas. Komitmen ini tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar yang sangat vital bagi kawasan ini.

12. **Zona XII** Pelayanan Perumda Air Minum Tirta randik Kabupaten Musi Banyuasin

Zona XII pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencakup wilayah Kecamatan Babat Supat, Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 50 Liter/Detik yang dilayani oleh 2 Area Pelayanan. Wilayah Pelayanan Kecamatan Babat Supat dilayani dari Sumber Sungai Batanghari Leko dan Sungai Air Dawas. Area

Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Babat Supat dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Babat Supat, Pelayanan Cabang Babat Supat mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 20 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko.
2) Pelayanan Unit Langkap Babat Supat, Pelayanan Unit Langkap Babat Supat mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 30 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Air Dawas.

SPAM Kecamatan Babat Supat telah memberikan layanan kepada 7 desa hingga Desember 2023. Dengan 2 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas terpasang mencapai 20 liter per detik, zona ini terus berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat. Mengingat pesatnya perkembangan wilayah, Perumda Tirta Randik berencana memperluas jangkauan layanan hingga mencakup 11 desa, sehingga semakin banyak warga yang dapat menikmati akses air bersih yang berkualitas. Komitmen ini tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar yang sangat vital di kawasan ini. Dengan langkah-langkah strategis yang terus dijalankan, Zona XII siap menjadi teladan dalam memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat langsung bagi seluruh warga di wilayahnya.

13. **Zona XIII** Pelayanan Perumda Air Minum Tirta randik Kabupaten Musi Banyuasin

Zona XIII pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencakup wilayah Kecamatan Lawang Wetan, Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 75 Liter/Detik yang dilayani oleh 3 Area Pelayanan. Wilayah Pelayanan Kecamatan Lawang Wetan dilayani dari Sumber Sungai Musi dan Sungai Batanghari Leko. Area Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Lawang Wetan dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Cabang Ulak Paceh Jaya, Pelayanan Cabang Ulak Paceh Jaya mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 30 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi.
2) Pelayanan Unit Pandang Dulang Pelayanan Unit Pandang Dulang mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Batanghari Leko.
3) Pelayanan Unit Karang Ringin, Pelayanan Unit Karang Ringin mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 40 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Musi

SPAM Kecamatan Lawang Wetan telah memberikan layanan kepada 14 kelurahan/desa hingga Desember 2023. dengan 3 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA. Perumda Tirta Randik tetap fokus pada upaya menjaga kualitas air dan memastikan distribusi air bersih berjalan lancar bagi pelanggan yang telah terlayani. Sebagai bagian dari komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan air bersih di Zona

XIII menjadi prioritas utama yang terus dijaga dengan profesionalisme dan berkelanjutan, demi kesejahteraan warga yang terus berkembang.

14. **Zona XIV** pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah Kecamatan Tungkal Jaya.

    Wilayah Pelayanan Kecamatan Tungkal Jaya melayani 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Kecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Sungai Lilin. Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 30 Liter/Detik yang dilayani oleh Pelayanan Cabang Peninggalan. Wilayah Pelayanan Kecamatan Tungkal Jaya dilayani dari Sumber Sungai Tungkal. SPAM Kecamatan Jirak jaya telah memberikan layanan kepada 2 kelurahan/desa hingga Desember 2023. Dengan 1 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA). Perumda Tirta Randik berencana memperluas layanan hingga mencakup 5 desa, sehingga lebih banyak warga dapat menikmati akses air bersih yang berkualitas.

15. **Zona XV** pelayanan Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah Kecamatan Jirak Jaya.

    Kapasitas yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 15 Liter/Detik yang dilayani oleh 2 Area Pelayanan. Wilayah Pelayanan Kecamatan Jirak Jaya dilayani dari Sumber Embung. Area Pelayanan yang melayani Wilayah Pelayanan Kecamatan Jirak Jaya dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Pelayanan Unit Jirak, Pelayanan Unit Jirak mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 10 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung.
2) Pelayanan Unit Sinar Jaya, Pelayanan Unit Sinar Jaya mempunyai Kapasitas Terpasang sebesar 5 Liter/Detik yang sumber air bakunya berasal dari Embung

SPAM Jirak Jaya telah memberikan layanan kepada 5 desa hingga Desember 2023. Dengan 2 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA). Menyadari pesatnya perkembangan wilayah, Perumda Tirta Randik merencanakan perluasan layanan hingga mencakup 10 desa, memastikan semakin banyak warga yang dapat menikmati akses air bersih yang berkualitas. Komitmen ini tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar yang sangat vital bagi kawasan ini. Tingkat pelayanan PDAM di Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar 42,07% dari jumlah penduduk administratif Kabupaten Musi Banyuasin. Penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air PDAM saat ini memenuhi kebutuhan air dari non PDAM baik berupa jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan diantaranya sumur dangkal, sumur bor dan terminal air. Pelayanan air bersih melalui program PAMSIMAS sebesar 13,48%, sedangkan kategori bukan jaringan perpipaan sebesar 45,82%. Jumlah pelanggan PDAM sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 38.270 SR atau sekitar 296.930 jiwa atau setara dengan 42,07 %. Tercatat tingkat pelayanan tertinggi berada di Kecamatan Sekayu dengan jumlah pelanggan sebanyak 12.406 SR yang melayani 96.410 jiwa, atau

setara dengan 96,81 % penduduk di wilayah tersebut. Sedangkan tingkat pelayanan terendah berada di Kecamatan Lalan. Pada wilayah tersebut PDAM baru melayani sebanyak 3.945 jiwa pada 419 SR, atau setara dengan 8,72 % penduduk di wilayah tersebut. Dalam penentuan tingkat pelayanan air minum di masing-masing Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah pelayanan, diproyeksikan berdasarkan persentase tingkat pelayanan eksisting. Direncanakan untuk 20 tahun mendatang tingkat pelayanan mencapai angka 100%, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.25.
Rencana Tingkat Pelayanan Masing-masing Zonasi SPAM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 – 2034

NO.	ZONA PELAYANAN	WILAYAH PELAYANAN	Eksisting	TINGKAT PELAYANAN (%)-TAHUN										
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	ZONA I	KEC. SEKAYU	96,81%	97,27 %	97,72 %	98,18 %	98,63 %	99,09 %	99,54 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	ZONA II	KEC. BABAT TOMAN	50,46%	52,71 %	54,96 %	57,22 %	59,47 %	61,72 %	63,97 %	66,22%	68,47%	70,73%	72,98%	75,23%
3	ZONA III	KEC. SANGA DESA	65,76%	67,32 %	68,87 %	70,43 %	71,99 %	73,54 %	75,10 %	76,65%	78,21%	79,77%	81,32%	82,88%
4	ZONA IV	KEC. BAYUNG LENCIR	22,40%	25,93 %	29,45 %	32,98 %	36,51 %	40,04 %	43,56 %	47,09%	50,62%	54,15%	57,67%	61,20%
5	ZONA V	KEC. SUNGAI LILIN	36,04%	38,95 %	41,85 %	44,76 %	47,67 %	50,58 %	53,48 %	56,39%	59,30%	62,21%	65,11%	68,02%
6	ZONA VI	KEC. KELUANG	64,85%	66,45 %	68,05 %	69,64 %	71,24 %	72,84 %	74,44 %	76,03%	77,63%	79,23%	80,83%	82,42%
7	ZONA VII	KEC. BATANG HARI LEKO	34,73%	37,70 %	40,66 %	43,63 %	46,60 %	49,56 %	52,53 %	55,50%	58,46%	61,43%	64,40%	67,37%

NO.	ZONA PELAYANAN	WILAYAH PELAYANAN	Eksisting	TINGKAT PELAYANAN (%)-TAHUN										
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8	ZONA VIII	KEC. LAIS	42,37%	44,99 %	47,61 %	50,23 %	52,85 %	55,47 %	58,09 %	60,71%	63,33%	65,95%	68,57%	71,19%
9	ZONA IX	KEC. SUNGAI KERUH	36,59%	39,47 %	42,35 %	45,24 %	48,12 %	51,00 %	53,88 %	56,77%	59,65%	62,53%	65,41%	68,30%
10	ZONA X	KEC. LALAN	8,72%	12,87 %	17,02 %	21,17 %	25,32 %	29,47 %	33,61 %	37,76%	41,91%	46,06%	50,21%	54,36%
11	ZONA XI	KEC. PLAKAT TINGGI	40,66%	43,36 %	46,05 %	48,75 %	51,45 %	54,15 %	56,84 %	59,54%	62,24%	64,94%	67,63%	70,33%
12	ZONA XII	KEC. BABAT SUPAT	14,40%	18,29 %	22,18 %	26,07 %	29,96 %	33,85 %	37,75 %	41,64%	45,53%	49,42%	53,31%	57,20%
13	ZONA XIII	KEC. LAWANG WETAN	47,99%	50,35 %	52,72 %	55,08 %	57,45 %	59,81 %	62,17 %	64,54%	66,90%	69,27%	71,63%	74,00%
14	ZONA XIV	KEC. TUNGKAL JAYA	10,02%	14,11 %	18,20 %	22,29 %	26,38 %	30,47 %	34,56 %	38,65%	42,74%	46,83%	50,92%	55,01%
15	ZONA XV	KEC. JIRAK JAYA	13,94%	17,85 %	21,76 %	25,68 %	29,59 %	33,50 %	37,41 %	41,32%	45,23%	49,15%	53,06%	56,97%

Tabel 3.26.
Rencana Tingkat Pelayanan Masing-masing Zonasi SPAM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2035 – 2045

NO.	ZONA PELAYANAN	WILAYAH PELAYANAN	TINGKAT PELAYANAN (%)-TAHUN										
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	ZONA I	KEC. SEKAYU	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	ZONA II	KEC. BABAT TOMAN	77,48 %	79,73 %	81,99 %	84,24 %	86,49 %	88,74 %	90,99 %	93,24 %	95,50 %	97,75 %	100,00 %
3	ZONA III	KEC. SANGA DESA	84,44 %	85,99 %	87,55 %	89,11 %	90,66 %	92,22 %	93,77 %	95,33 %	96,89 %	98,44 %	100,00 %
4	ZONA IV	KEC. BAYUNG LENCIR	64,73 %	68,25 %	71,78 %	75,31 %	78,84 %	82,36 %	85,89 %	89,42 %	92,95 %	96,47 %	100,00 %
5	ZONA V	KEC. SUNGAI LILIN	70,93 %	73,83 %	76,74 %	79,65 %	82,56 %	85,46 %	88,37 %	91,28 %	94,19 %	97,09 %	100,00 %
6	ZONA VI	KEC. KELUANG	84,02 %	85,62 %	87,22 %	88,82 %	90,41 %	92,01 %	93,61 %	95,21 %	96,80 %	98,40 %	100,00 %

NO.	ZONA PELAYANAN	WILAYAH PELAYANAN	TINGKAT PELAYANAN (%)-TAHUN										
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
7	ZONA VII	KEC. BATANG HARI LEKO	70,33 %	73,30 %	76,27 %	79,23 %	82,20 %	85,17 %	88,13 %	91,10 %	94,07 %	97,03 %	100,00 %
8	ZONA VIII	KEC. LAIS	73,80 %	76,42 %	79,04 %	81,66 %	84,28 %	86,90 %	89,52 %	92,14 %	94,76 %	97,38 %	100,00 %
9	ZONA IX	KEC. SUNGAI KERUH	71,18 %	74,06 %	76,94 %	79,82 %	82,71 %	85,59 %	88,47 %	91,35 %	94,24 %	97,12 %	100,00 %
10	ZONA X	KEC. LALAN	58,51 %	62,66 %	66,81 %	70,96 %	75,11 %	79,25 %	83,40 %	87,55 %	91,70 %	95,85 %	100,00 %
11	ZONA XI	KEC. PLAKAT TINGGI	73,03 %	75,72 %	78,42 %	81,12 %	83,82 %	86,51 %	89,21 %	91,91 %	94,61 %	97,30 %	100,00 %
12	ZONA XII	KEC. BABAT SUPAT	61,09 %	64,98 %	68,87 %	72,76 %	76,65 %	80,55 %	84,44 %	88,33 %	92,22 %	96,11 %	100,00 %
13	ZONA XIII	KEC. LAWANG WETAN	76,36 %	78,72 %	81,09 %	83,45 %	85,82 %	88,18 %	90,54 %	92,91 %	95,27 %	97,64 %	100,00 %

NO.	ZONA PELAYANAN	WILAYAH PELAYANAN	TINGKAT PELAYANAN (%)-TAHUN										
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
14	ZONA XIV	KEC. TUNGKAL JAYA	59,10 %	63,19 %	67,28 %	71,37 %	75,46 %	79,55 %	83,64 %	87,73 %	91,82 %	95,91 %	100,00 %
15	ZONA XV	KEC. JIRAK JAYA	60,88 %	64,79 %	68,71 %	72,62 %	76,53 %	80,44 %	84,35 %	88,26 %	92,18 %	96,09 %	100,00 %

3.2.3 Program-program Prioritas Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Perumusan program pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2025–2029 didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Perencanaan ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga merupakan kompas pembangunan yang menjamin keterpaduan antara kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional serta provinsi. Setiap kebijakan yang dirumuskan berupaya menjawab tantangan nyata di lapangan, termasuk kebutuhan dasar masyarakat, ketimpangan wilayah, hingga dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang.

Langkah-langkah strategis ini diwujudkan melalui penyusunan program prioritas daerah yang bersifat lintas sektor dan berbasis data. Program tersebut disusun dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, pemerataan, inklusivitas, serta akuntabilitas. Selain itu, pendekatan partisipatif juga diterapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Muba.

Dengan arah kebijakan yang terstruktur dan pelaksanaan program yang terukur, akan mampu menciptakan transformasi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta ketahanan sosial dan lingkungan yang lebih kuat. Gambaran program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27.
Program Prioritas untuk Mencapai Tujuan RPJMD

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
20252029 - Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterahkan Musi Banyuasin - Penguatan SDM Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan - Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi Menuju Musi Banyuasin Sejahtera - Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keummatan - Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani - Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas - Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi - Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)	
		Meningkatknya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik		Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Meningkatnya keamanan siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN		Survey Penilaian Integritas (Nilai)	
			1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Terisinya jabatan pimpinan tinggi pratama, administrasi dan jabatan fungsional (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				Persentase capaian kinerja ASN (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				persentase pengisian ASN berdasarkan formasi Kebutuhan (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan 2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			1) Meningkatnya tata kelola anggaran 2) Meningkatnya tata kelola perbendaharaan 3) Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Pelayanan Publik (Persentase)	
				Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan 2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan 3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnnya kinerja pengelolaan arsip, perlindungan arsip dan penyelamatan arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
			Meningkatnya akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan serta kinerja instansi pemerintah melalui pencegahan, efektivitas tindak lanjut pengawasan dan perbaikan tata kelola yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas KKN	Persentase audit kepatuhan terhadap perangkat daerah (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
				Opini BPK RI terhadap LKPD (Predikat)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
				Perangkat Daerah yang memeroleh nilai SAKIP minimal BB (Predikat)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Masyarakat dan Kader Partai Politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
			Meningkatnya kualitas kebijakan dan kapasitas aparatur	Perangkat daerah yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM (Predikat)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			pemerintah melalui pendampingan dan asistensi yang efektif, efisien dan akuntabel		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kabupaten/Kota Zakat (IKKZ) (Indeks)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Persentase Pasangan Isbat Nikah masyarakat kurang mampu yang difasilitasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Persentase Juara kafilah STQ/MTQ Tingkat Provinsi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Persentase Partisipasi Peserta STQ/MTQ Kafilah Kecamatan di Tingkat Kabupaten (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah	Persentase batas wilayah daerah bermasalah yang terfasilitasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Persentase kesepakatan kerjasama dalam negeri yang aktif diimplementasikan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Persentase perkara yang difasilitasi bantuan hukum (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga yang Terpasang (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Persentase BUMD/BLUD berpredikat sehat (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Indeks Perkembangan Harga (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Inspektorat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan (Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan (Pengelolaan Pendapatan Daerah)	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Evaluasi Pelayanan Publik (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
					DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase tersusunnya dokumen ketatalaksanaan yang berkualitas (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat DPRD	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	
			Efektifnya pelaksanaan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sanga Desa) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya) (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
			Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Sarana Prasarana ASDP dalam kondisi baik (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	PersentaseTerpeliharanya Sarana Prasarana Bandar Udara (%)	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Babat Supat)	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Babat Toman)	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Batanghari Leko)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			(Kecamatan Bayung Lencir)		
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Jirak Jaya)	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Keluang)	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				administrasi perkantoran (%)	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lais)	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lalan)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
					DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lawang Wetan)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Plakat Tinggi)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sanga Desa)	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sekayu)	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sungai Keruh)	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sungai Lilin)	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Tungkal Jaya)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
				Angka Literasi/Numerasi (%)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
			Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			Terpeliharanya warisan budaya dan sejarah bangsa Indonesia dalam bentuk naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
					DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perpustakaan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Tersalurnya Bantuan Keuangan Sektor Pendidikan		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Prevalensi Stunting (%) (%)	
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	
			Meningkatnya efektifitas pelayanan BLUD FKTP dan FKTL	Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL (UPT)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP (UPT)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun. ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Indeks Pencapaian SPM Kesehatan (Indeks)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				total berbasis masyarakat (%)	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
					DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Persentase penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk (Rasio)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
				Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Menurunnya Angka Kemiskinan			Tingkat Kemiskinan((%))	
		Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat		Rasio Gini (Indeks)	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis Terlantas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sosial	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
			Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
				Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Penyelesaian Lahan Transmigrasi yang Bersertifikat (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat		Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	
				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketahanan Pangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	
		Meningkatnya pendapatan masyarakat		PDRB per kapita (Rp. Juta Per Tahun)	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berminat Sesuai Ketentuan (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pertumbuhan volume penjualan produk lokal berorientasi ekspor (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal		DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Meningkatnya produktivitas sektor unggulan		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (%)	
				Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) (%)	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah objek wisata (Unit)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
				Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku usaha pariwisata (Orang)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
				Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha industri yang terkendali (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
			Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan atas izin usaha perkebunan yang diterbitkan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan atas Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Pertumbuhan UMKM/IKM yang memasarkan produk melalui kemitraan dengan retail,	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi (%)	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
					DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perdagangan	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pertanian (Perkebunan)	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan)	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Terjaganya Tingkat Inflasi		Indeks Perkembangan Harga (%)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga yang Terpasang (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Persentase BUMD/BLUD berpredikat sehat (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Indeks Perkembangan Harga (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	Terwujudnya Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban(Angka)	
		Terciptanya kerukunan umat beragama		Penyelesaian Konflik antar umat beragama (%) (%)	
			1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada 2. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Efektifnya penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat) (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir) (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Persentase Penyelesaian Konflik (Persentase)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec.Jirak Jaya) (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais) (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Penyelesaian Konflik Umat Beragama (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak Jaya (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Babat Supat (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Bayung Lencir (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase penyelenggaraan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%)	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sekayu (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
		Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat		Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kabupaten/Kota Zakat (IKKZ) (Indeks)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Persentase Pasangan Isbat Nikah masyarakat kurang mampu yang difasilitasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Persentase Juara kafilah STQ/MTQ Tingkat Provinsi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Persentase Partisipasi Peserta STQ/MTQ Kafilah Kecamatan di Tingkat Kabupaten (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal		Persentase Usaha Mikro yang bersertifikasi Halal (%)	
				Persentase IKM yang bersertifikasi Halal (%)	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
				Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas			Indeks Pelayanan Infrastruktur(Indeks)	
		Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten)		Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kecamatan yang Terlayani Angkutan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Persentase Penurunan Daerah Rawan Kecelakaan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Persentase Transportasi Yang Nyaman dan Laik Jalan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Persentase Pelayanan Penerangan Lampu Jalan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman		Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)	
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal) (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) (%)	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			Tertatanya Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Terwujudnya Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing			Indeks Daya Saing Daerah(Angka)	
		Meningkatnya Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	
			1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Menimngkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			1. Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah 3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
		Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital		Rasio Kewirausahaan (Persentase)	
				Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang bebas narkoba (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
				Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi	Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			publik pemerintah daerah		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		Meningkatnya Pembangunan Desa		Persentase Desa Mandiri (%)	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang memiliki Bumdes (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sungai Lilin (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Persentase Pemberdayaan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Masyarakat Kelurahan Kec. Bayung Lencir (%)	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Terbinanya Pemerintahan Desa	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Persentase Penegakan Perda (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase penyediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah(Indeks)	
		Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		Penurunan Emisi GRK (TonCO2e)	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Luasan RTH yang dikelola (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
				Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Penanganan sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Turunnya Potensi Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	
			1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat 3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%) (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			1) Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran 2) Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketentraman dan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana Daerah)		
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Berikut ini merupakan matriks program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (2025-2029), sebanyak 22 Program Unggulan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

Tabel 3.28.
Program Unggulan Kepala Daerah untuk Mencapai Tujuan RPJMD

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab	OPD Pendukung	Estimasi Pendanaan Indikatif	Indikator Kinerja	Target Outcome	Lokasi Prioritas
1	Sikat Korupsi Menuju Pemerintahan Bersih	Inspektorat	BKPSDM, Bappeda	200 M	Persentase OPD ZI WBK	80% OPD WBK	Seluruh OPD
2	Akte, KK, dan KTP Gratis sampai ke rumah	Dinas Dukcapil	Dinas PMD, Kominfo	300 M	Persentase desa cakupan layanan	100% desa terlayani	Seluruh desa
3	Bantuan Sayang Anak (BASANAK)	DPPPA	Dinsos, disdukcapil	400 M	Cakupan anak penerima bantuan	15.000 anak terlindungi	Kecamatan miskin perkotaan
4	Revitalisasi Posyandu, Posbindu, UKS, Poskesdes, Poskestren	Dinas Kesehatan	DPPKB, Kesra, DPMD	600 M	Jumlah pos layanan direvitalisasi	1000 unit	Perdesaan, daerah stunting tinggi
5	Gratis Sekolah Negeri & Swasta,	Dinas Pendidikan	Kesra, BPKAD	1.500 M	Persentase siswa penerima BOS dan bantuan	100% siswa miskin	Kecamatan Sekayu, Batang Hari Leko, Sanga Desa, Babat, Toman, Lawang Wetan, Bayung Lencir dan Tungkal Jaya
6	Beasiswa Prestasi sampai Sarjana	Bagian Kesra, Dikbud	Dinas Pendidikan, Bappeda	400 M	Jumlah penerima beasiswa	2.000 mahasiswa	Seluruh kecamatan
7	One Student One Sport	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan	180 M	Jumlah siswa aktif olahraga	20.000 siswa	Kecamatan Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Lalan, dan Jirak Jaya

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab	OPD Pendukung	Estimasi Pendanaan Indikatif	Indikator Kinerja	Target Outcome	Lokasi Prioritas
8	Program Keluarga Maju untuk Pengentasan Kemiskinan (Bantuan untuk Modal Usaha Produktif sesuai Potensi Keluarga, Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan)	Dinas Sosial, Dinkop UKM, Disnakertrans, Dispopar, Dikbud	DPMD, Bappeda, Diskominfo	700 M	Penurunan tingkat kemiskinan	< 9%	Kecamatan termiskin
9	Santunan Kematian dan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Disdukcapil, BPKAD	400 M	Jumlah penerima manfaat	10.000 keluarga	Seluruh kecamatan
10	Bantuan Guru Mengaji (BAJIG)	Bagian Kesra	Kemenag, Dinsos	200 M	Jumlah guru penerima insentif	1.500 orang	Kecamatan Sekayu, Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Jirak Jaya, Bayung Lencir dan Tungkal Jaya
11	Bantuan Operasional Rumah Ibadah	Bagian Kesra	Bappeda, BPKAD	250 M	Jumlah rumah ibadah dibantu	800 unit	Kecamatan Sekayu, Batang Hari Leko, Sanga Desa, Babat, Toman, Lawang Wetan, Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Jirak Jaya, Lalan, Bayung Lencir dan Tungkal Jaya
12	Ekosistem Industri Halal	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperasi & UKM, Dinas perikanan	300 M	Jumlah UMKM bersertifikasi halal	2.000 usaha	Kawasan industri, pasar
13	Infrastruktur sentra produksi & pusat pertumbuhan	Dinas PUPR	Dinas TPHP, Perkebunan	2.500 M	Panjang jalan produksi dibangun	300 Km	Perkebunan sawit dan karet
14	Penyediaan Infrastruktur & pemberdayaan disabilitas	Dinas Sosial	Dinas Perkim, Disdukcapil	300 M	Jumlah fasilitas akses disabilitas	250 unit	Kecamatan padat penduduk
15	Satu Desa Rp. 1,5 M (Pembentukan Desa Mandiri termasuk bantuan kendaraan operasional kegiatan kemasyarakatan desa)	Dinas PMD	Bappeda, BPKAD, PUPR	2.000 M	Jumlah desa mandiri terbentuk	229 desa dan 13 kelurahan	Seluruh desa dan kelurahan

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab	OPD Pendukung	Estimasi Pendanaan Indikatif	Indikator Kinerja	Target Outcome	Lokasi Prioritas
16	Bantuan Modal Usaha UMK, Petani, Nelayan	Dinas Koperasi & UMKM	Dinas TPHP, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan	800 M	Jumlah penerima modal	5.000 pelaku usaha	Kecamatan pesisir dan agro
17	Iklim usaha aman, nyaman, sehat	DPMPTSP	Satpol PP, Disdagprin	300 M	Jumlah izin usaha terbit	10.000 izin	Sentra perdagangan dan wisata
18	Bantuan Bibit Pertanian, Perkebunan & Perikanan	Dinas TPHP	Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan	600 M	Luas lahan terbantu bibit	20.000 ha	Kecamatan Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Jirak Jaya, Bayung Lencir dan Tungkal Jaya
19	Digitalisasi dan Klinik Usaha	Dinas Koperasi & UMKM	Kominfo, Disdagprin, Dinas TPHP	250 M	Jumlah UMKM masuk platform digital	3.000 UMKM	Kecamatan kota dan pinggiran
20	Legalisasi Lahan di Kawasan Hutan	DLH, Dinas Perkebunan	BPN/ATR, Kehutanan Provinsi	200 M	Luas lahan tersertifikasi	5.000 ha	Kawasan hutan desa
21	Memperluas Jaringan Gas Rumah Tangga	Dinas PUPR	Bagian Perekonomian, SDA, DLH, BUMD Energi	850 M	Jumlah rumah tersambung gas	15.000 rumah	Kecamatan dekat jaringan migas
22	Peningkatan Gaji Guru Swasta (Madrasah dan Pesantren)	Dinas Pendidikan, Kemenag	BPKAD		Jumlah guru swasta (madrasah dan pesantren)	15 kecamatan	Kabupaten secara menyeluruh

Sumber Ranwal RPJMD Kab. Muba, diolah

Berikut ini merupakan Tabel sandingan visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan subkegiatan, astacita dan 17 program prioritas RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029:

Tabel 3.29.

Tabel Sandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Astacita, 17 Program Prioritas RPJMD Kab. Muba

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
20252029 - Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterahkan Musi Banyuasin								
Penguatan SDM Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan								
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.0.00.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.0.00.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.14.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	2.14.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	2.19.3.26.0.00.21.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	2.19.3.26.0.00.21.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	2.19.3.26.0.00.21.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi Menuju Musi Banyuasin Sejahtera								

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat						
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka						
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.3.32.5.06.10.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.3.32.5.06.10.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	2.07.3.32.5.06.10.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.0.00.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.0.00.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.09.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2.14.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
	Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah	Meningkatnya pendapatan masyarakat						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.4.01.0.00.20.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	2.18.4.01.0.00.20.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3.30.3.31.0.00.26.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	3.30.3.31.0.00.26.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	3.30.3.31.0.00.26.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	2.17.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2.17.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.17.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.17.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.25.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	3.25.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3.25.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.19.3.26.0.00.21.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.0.00.0.00.24.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.0.00.0.00.25.0000 - Dinas Perkebunan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	3.27.0.00.0.00.24.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.0.00.0.00.24.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.0.00.0.00.25.0000 - Dinas Perkebunan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	3.27.0.00.0.00.24.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.30.3.31.0.00.26.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.30.3.31.0.00.26.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	3.30.3.31.0.00.26.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
	Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah	Terjaganya Tingkat Inflasi						
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Ketahanan Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.0.00.0.00.24.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.0.00.0.00.25.0000 - Dinas Perkebunan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	3.27.0.00.0.00.24.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keummatan								
	Terwujudnya Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan	Terciptanya kerukunan umat beragama						
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.05.1.04.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.05.1.04.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.1.04.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.1.04.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
	Terwujudnya Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan	Meningkatnya usaha / industri yang menerapkan standar halal						
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.17.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.17.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.30.3.31.0.00.26.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani								

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatknya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik						
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.	Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.05.8.01.0.00.06.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.05.8.01.0.00.06.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.05.8.01.0.00.06.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.05.8.01.0.00.06.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.05.8.01.0.00.06.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.05.8.01.0.00.06.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2.15.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2.15.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas								
	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten)						
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.03.2.15.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.03.2.15.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman						
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak						
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi								

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
	Terwujudnya Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital						
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.17.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.17.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	2.19.3.26.0.00.21.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
	Terwujudnya Musi Banyuasin yang Inovatif	Meningkatnya Pembangunan Desa						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
	dan Berdaya Saing							
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan								
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	2.11.1.03.0.00.13.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	2.11.1.03.0.00.13.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.1.03.0.00.13.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.1.03.0.00.13.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Turunnya Potensi Risiko Bencana						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.0.00.0.00.08.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.0.00.0.00.08.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.1.04.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.1.04.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.0.00.0.00.08.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.0.00.0.00.08.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur .

3.2.3.1 Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun untuk menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2020 sebesar Rp. 65.943,88 miliar, tahun 2021 sebesar Rp. 72.640,74 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp. 82.736,54 miliar. Sementara itu PDRB dengan migas atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) tahun 2020 sebesar Rp. 44.604,66 miliar, tahun 2021 sebesar Rp. 46.129,29 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp. 48.097,66 miliar. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas tahun 2023 rata-rata sebesar 4,51 persen. Angka ini menunjukkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dimana pada tahun 2022 sebesar 4,27 persen. Pertumbuhan ekonomi non-migas menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan migas. Angka ini mengirimkan pesan bahwa Musi Banyuasin memiliki potensi lokal yang cukup baik. Potensi ini menjadi landasan untuk penguatan ekonomi lokal dan “menjauh” dari ketergantungan terhadap migas, yang realitasnya kurang memiliki *multiplier effect* dalam masyarakat Musi Banyuasin. Adapun target pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.00-5.20	5.02-5.25	5.04-5.30	5.08-5.35	5.10-5.40

SIPD RI Kab. Muba, diolah

2. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk, dengan demikian angka ini merupakan indikator makro yang menunjukkan rata rata tingkat kesejahteraan per penduduk. Tabel berikut menyajikan PDRB per kapita Musi Banyuasin. Dari tabel dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita harga konstan sekitar 30 persen di bawah harga berlaku. Angka ini mengirimkan pesan bahwa terdapat angka inflasi yang cukup tinggi di Musi Banyuasin.

Tabel di bawah merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan data tersebut, pendapatan per kapita Kabupaten Musi Banyuasin relatif mengalami peningkatan sejak tahun 2018. Hal ini sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan di daerah yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.30
PDRB Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018-2023

PDRB Perkapita	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Musi Banyuasin (ADHB) ribu Rupiah	95.300,78	101.390,41	106.213,95	116.007,34	103.679,83	85.771,07
Kabupaten Musi Banyuasin (ADHK 2010) ribu Rupiah	66.815,75	68.743,54	71.843,46	73.563,22	75.958,78	50.268,35

Sumber: BPS Kab. Muba, 2024

Adapun target PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	PDRB Per Kapita	(Rp Juta)	160	175	180	186	191

Beberapa rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan sektor PDRB per kapita di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam implementasi program Pembangunan ekonomi;
- Memperkuat program hilirisasi produk unggulan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.
- Mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer daerah untuk pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi.
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi.

3. Kontribusi PDRB Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Provinsi Sumatera Selatan

Pada Tahun 2024, Kontribusi PDRB Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 13,69% terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan termasuk urutan k-3 dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan Kota Palembang yang tertinggi sebesar 30,75% dan Kabupaten Muara Enim sebesar 17,24%. Berikut akan disampaikan kontribusi PDRB Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Provinsi Sumatera Selatan pada 5 tahun terakhir:

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi PDRB Kab. Muba terhadap Provinsi Sumatera Selatan	%	14,31	14,55	13,73	13,35	13,69

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, serta industry pengolahan, yang secara nyata menjadi salah satu pilar utama PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Kontribusi PDRB Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Sumatera Selatan sangat signifikan secara volume, tetapi belum optimal secara kualitas dan keberlanjutan. Hilirisasi dan diversifikasi ekonomi adalah Solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor perdagangan, pariwisata dan jasa.

4. Angka Kemiskinan

masalah kemiskinan merupakan masalah khas lokal *(local specific)* sehingga setiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda. Dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Musi Banyuasin, ada beberapa isu strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

a. Isu Strategis Bidang Pendidikan

Meningkatnya akses, kualitas dan kemerataan layanan pendidikan bagi penduduk miskin ekstrem dan miskin, melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan, tenaga kependidikan dengan memprioritaskan daerah yang sulit dijangkau dan daerah-daerah pelosok dan terpencil.

b. Isu Strategis Bidang Kesehatan

Meningkatnya akses, kualitas dan kemerataan layanan kesehatan bagi penduduk miskin ekstrem dan miskin, melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk perluasan akses layanan dengan prioritas pada peningkatan pelayanan ibu dan bayi, pencegahan stunting, balita gizi kurang, gizi buruk serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

c. Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar

Meningkatnya akses, kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, melalui peningkatan cakupan rumah layak huni, sanitasi layak, air minum layak, sarana dan prasarana jalan lingkungan dengan memprioritaskan rumah tangga miskin ekstrem, miskin, rentan miskin, kelompok marginal, disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

d. Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka melalui penyediaan dan perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan investasi, peningkatan keterampilan sumberdaya manusia dan produktivitas kerja yang memprioritaskan pertumbuhan wirausaha baru secara khusus bagi penduduk miskin ekstrem, miskin, rentan miskin dan kelompok marginal lainnya.

e. Isu Strategis Bidang Ekonomi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan sarana dan prasarana dasar kegiatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, industri pengolahan dan kemudahan berinvestasi dengan memprioritaskan pada pertumbuhan inklusif yang melibatsertakan penduduk miskin ekstrem, miskin, rentan miskin dan kelompok marginal lainnya serta pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut maka strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem dan miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin ekstrem dan miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil
4. Mengsinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin maka dilakukan program-program:

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis individu dan keluarga
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan kecil; dan
4. Program lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dan miskin.
5. Pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

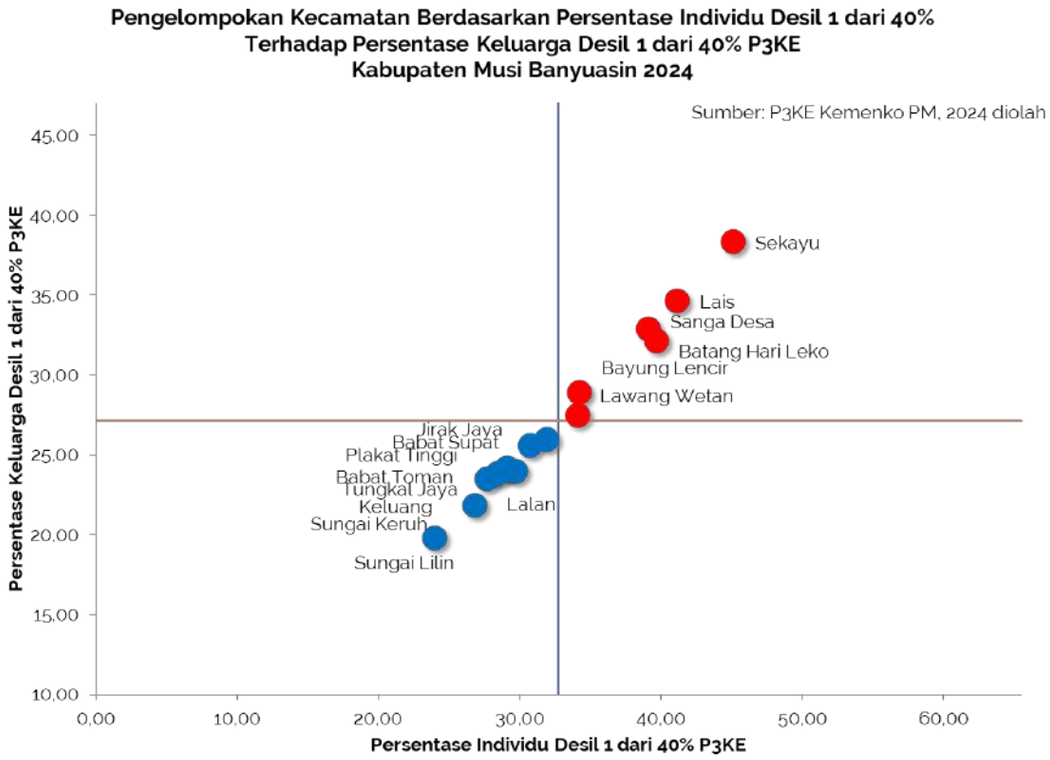
Berikut ini, akan disampaikan analisis kuadran prioritas wilayah sebagai analisis bagi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Analisis Kuadran Prioritas Wilayah

Penentuan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan data capaian tujuan (*goal*) pada *Theory of Change* (ToC) masing-masing bidang dengan data capaian salah satu *intermediate outcome* atau prakondisi yang di rasa memiliki pengaruh terhadap tujuan dimaksud kedalam sebuah kuadran. Dari kuadran prioritas wilayah tersebut, dapat dilihat wilayah kecamatan-kecamatan mana yang capaian kedua indikatornya relatif buruk dibandingkan dengan capaian antar kecamatan lainnya sehingga harus menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pelaksanaan intervensi program dan kegiatan.

Wilayah Prioritas Intervensi Kemiskinan/Ekstrem

1. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase individu desil 1 dari 40 P3KE dan persentase keluarga desil 1 dari 40% P3KE



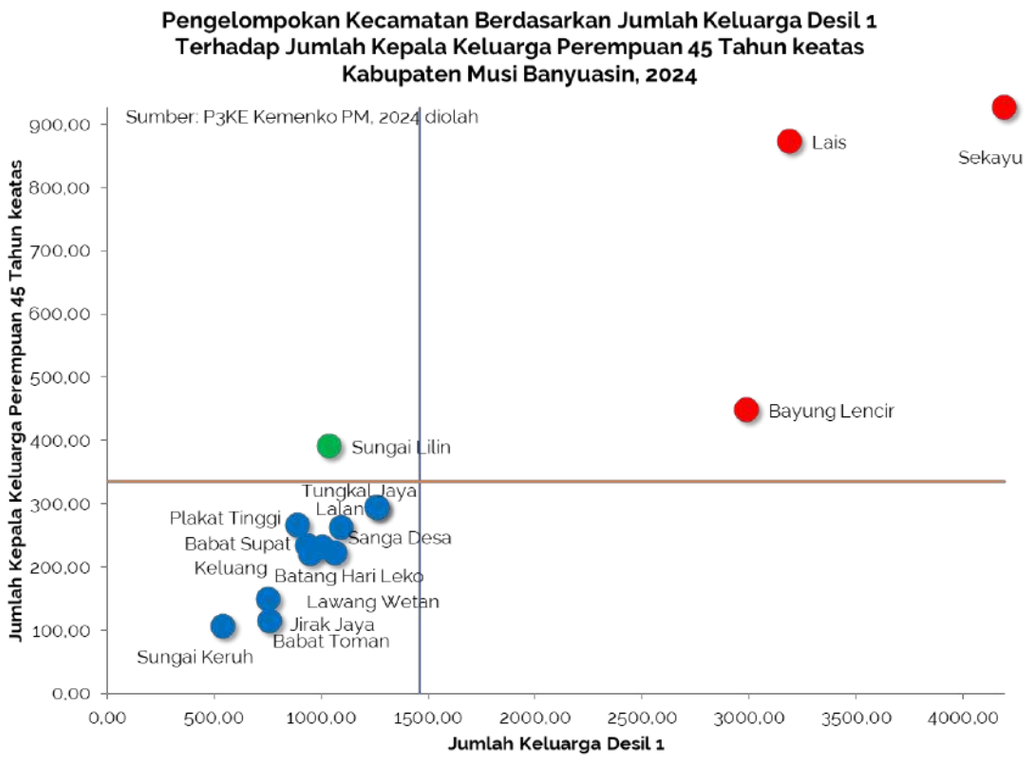
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase individu desil 1 dari 40 P3KE dan persentase keluarga desil 1 dari 40% P3KE didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Lawang Wetan
Prioritas 2	Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Lalan, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh dan Kecamatan Sungai Lilin

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

2. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah keluarga desil 1 dan jumlah kepala keluarga perempuan usia 45 tahun ke atas



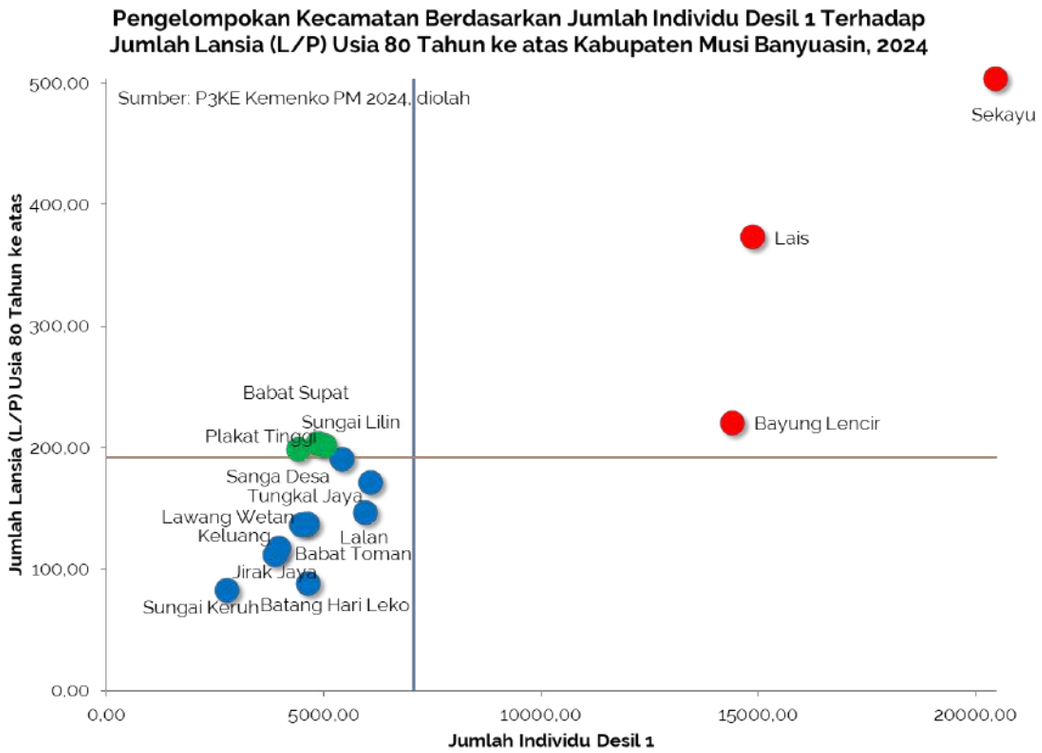
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah keluarga desil 1 dengan jumlah kepala keluarga perempuan usia 45 tahun ke atas didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais dan Kecamatan Bayung Lencir
Prioritas 2	Kecamatan Sungai Lilin
Prioritas 3	Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Lalan, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Lawang Wetan

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

3. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah penduduk desil 1 dan jumlah penduduk lanjut usia (L/P) 80 tahun ke atas



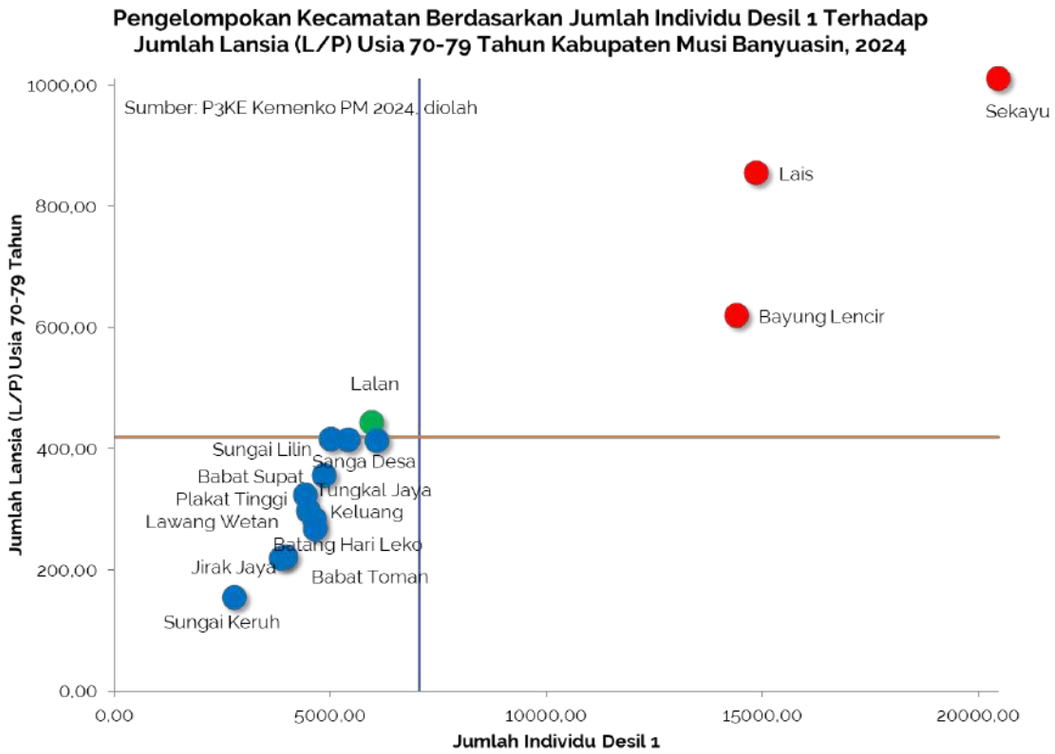
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah penduduk desil 1 dan jumlah penduduk lanjut usia (L/P) 80 tahun ke atas didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais dan Kecamatan Bayung Lencir
Prioritas 2	Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Plakat Tinggi
Prioritas 3	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Lalan, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Lawang Wetan

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

4. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah penduduk desil 1 dan jumlah penduduk lanjut usia (L/P) 70-79 tahun



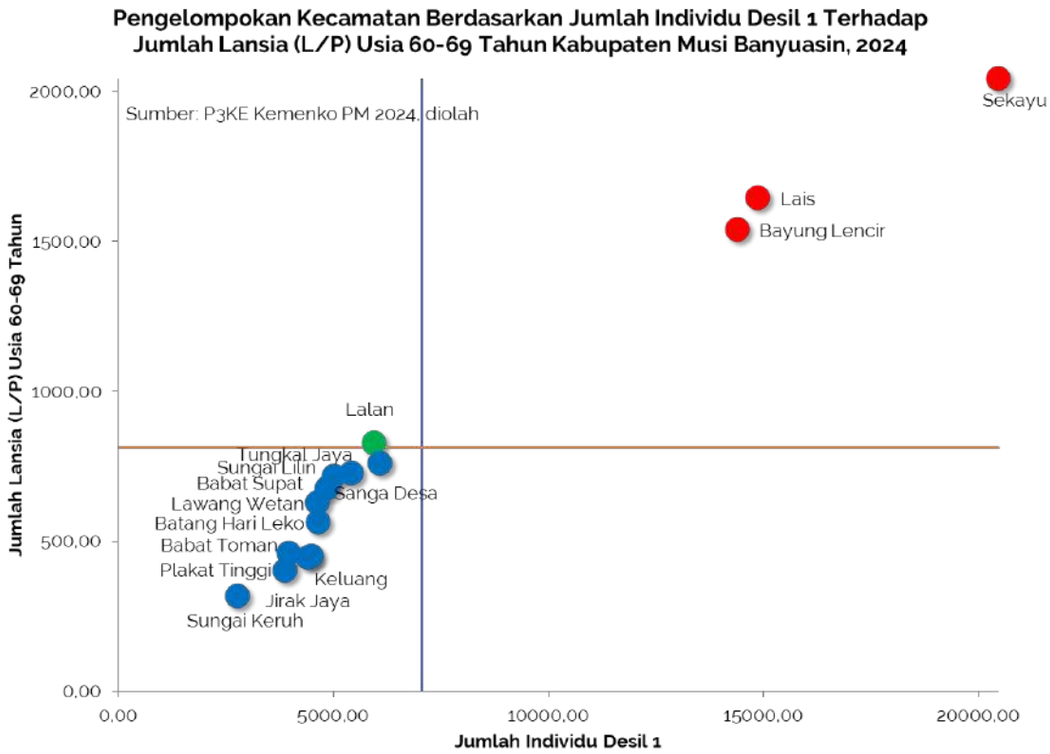
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah penduduk desil 1 dan jumlah penduduk lanjut usia (L/P) 70-79 tahun didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais dan Kecamatan Bayung Lencir
Prioritas 2	Kecamatan Lalan
Prioritas 3	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Plakat Tinggi

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

5. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah penduduk desil 1 dan jumlah penduduk lanjut usia (L/P) 60-69 tahun



Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah penduduk desil 1 dan jumlah penduduk lanjut usia (L/P) 60-69 tahun didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

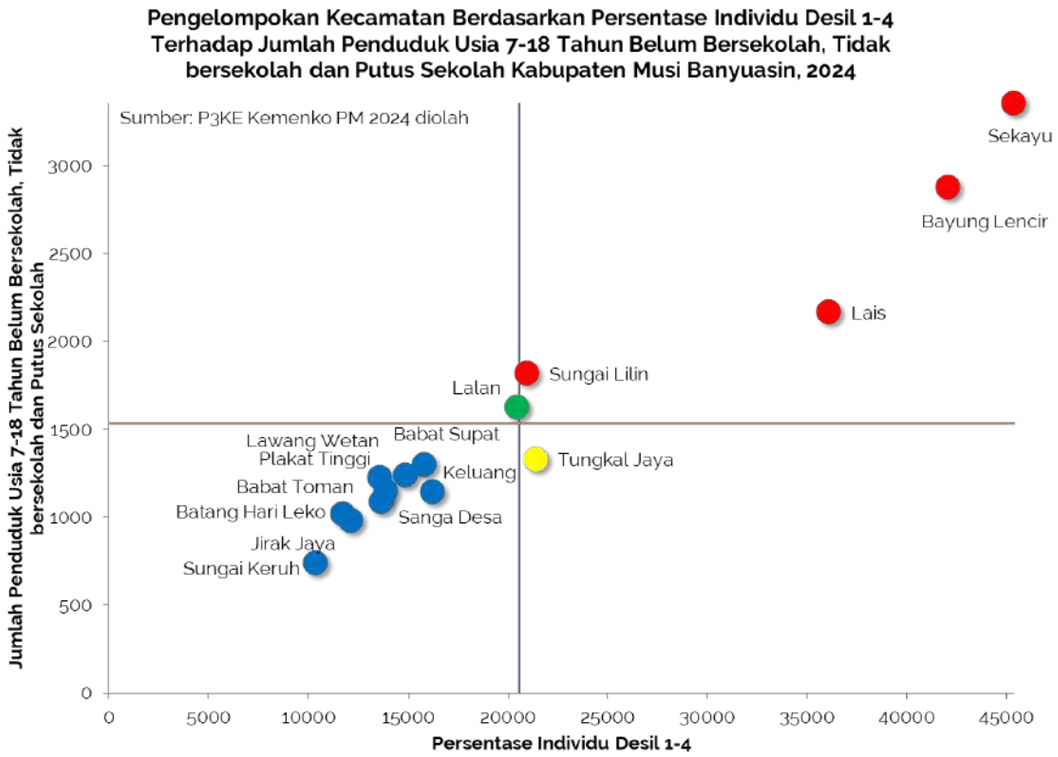
Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais dan Kecamatan Bayung Lencir
Prioritas 2	Kecamatan Lalan
Prioritas 3	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Plakat Tinggi

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Wilayah Prioritas Berdasarkan Bidang-Bidang

Wilayah Prioritas Intervensi Pendidikan

1. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah penduduk desil 1-4 dan jumlah penduduk usia 7-18 tahun tidak bersekolah dan atau putus sekolah



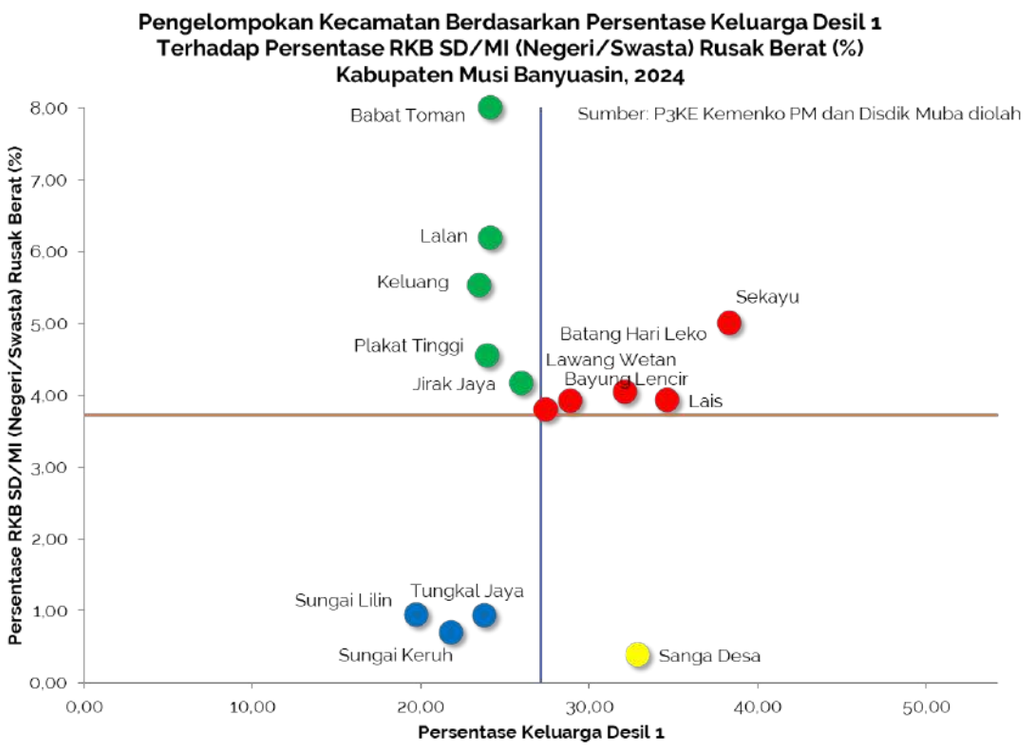
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah penduduk desil 1-4 dan jumlah penduduk usia 7-18 tahun belum bersekolah, tidak bersekolah dan atau putus sekolah didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Sungai Lilin
Prioritas 2	Kecamatan Tungkal Jaya
Prioritas 3	Kecamatan Lalan
Prioritas 4	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Plakat Tinggi

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

2. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk 1 dan persentase RKB SD/MI (Negeri/Swasta) rusak berat



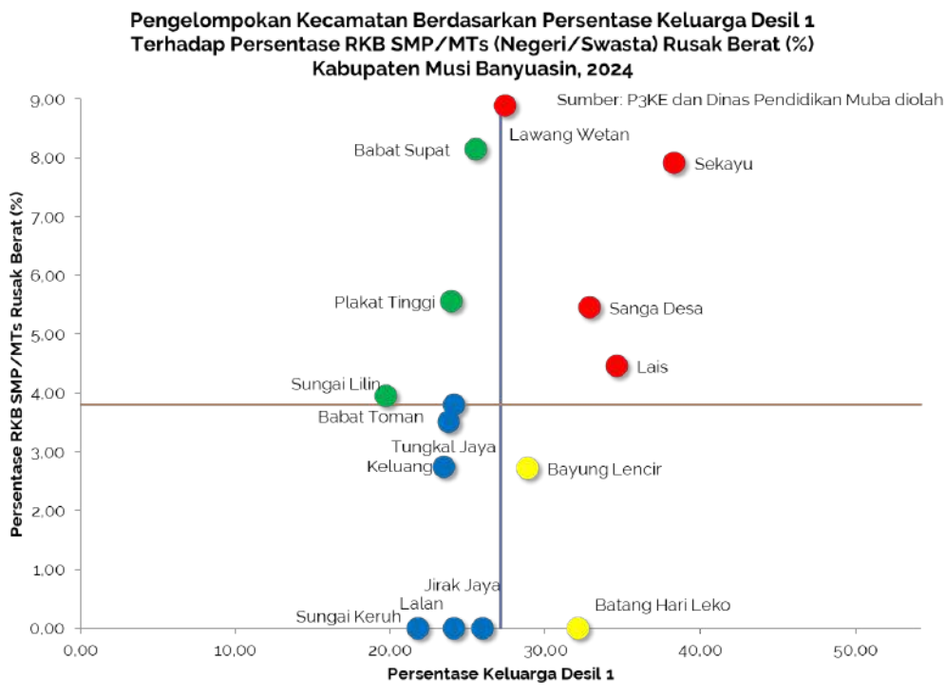
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk 1 dan persentase RKB SD/MI (Negeri/Swasta) rusak berat didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Lawang Wetan
Prioritas 2	Kecamatan Sanga Desa
Prioritas 3	Kecamatan Lalan, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Tungkal Jaya
Prioritas 4	Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Sungai Lilin

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

3. Kecamatan prioritas berdasarkan persentase penduduk 1 dan persentase RKB SMP/MTs (Negeri/Swasta) rusak berat



Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

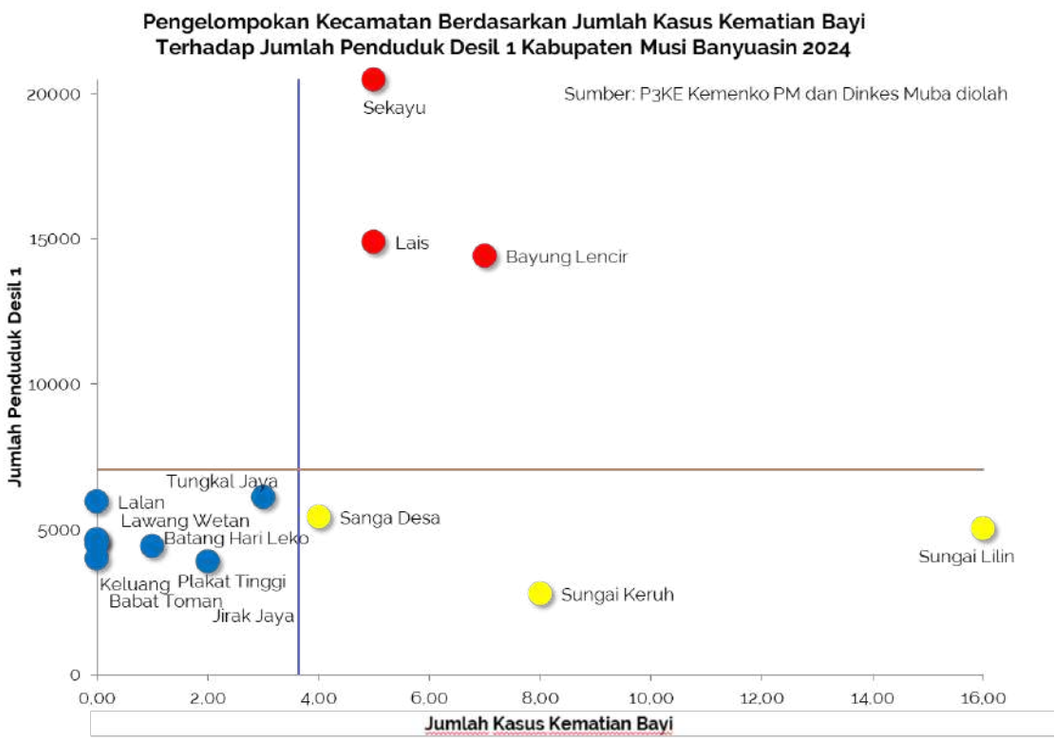
Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan persentase penduduk 1 dan persentase RKB SMP/MTs (Negeri/Swasta) rusak berat didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Lawang Wetan
Prioritas 2	Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir
Prioritas 3	Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Sungai Lilin
Prioritas 4	Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lalan, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Tungkal Jaya

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Wilayah Prioritas Intervensi Kesehatan

1. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah keluarga desil 1 dan jumlah kasus kematian bayi



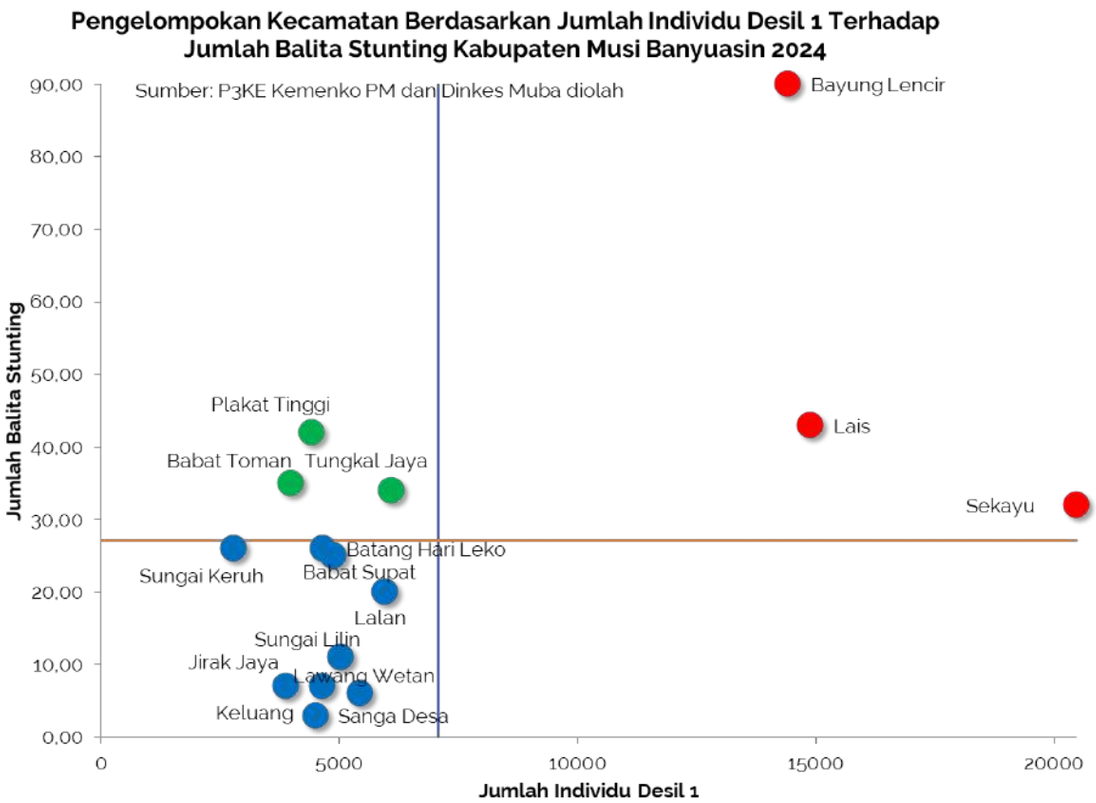
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah keluarga desil 1 dan jumlah kasus kematian bayi didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais dan Kecamatan Bayung Lencir
Prioritas 2	Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Sungai Lilin
Prioritas 3	Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lalan, Kecamatan Keluang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Jirak Jaya dan Kecamatan Babat Supat

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

2. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah keluarga desil 1 dan jumlah balita stunting



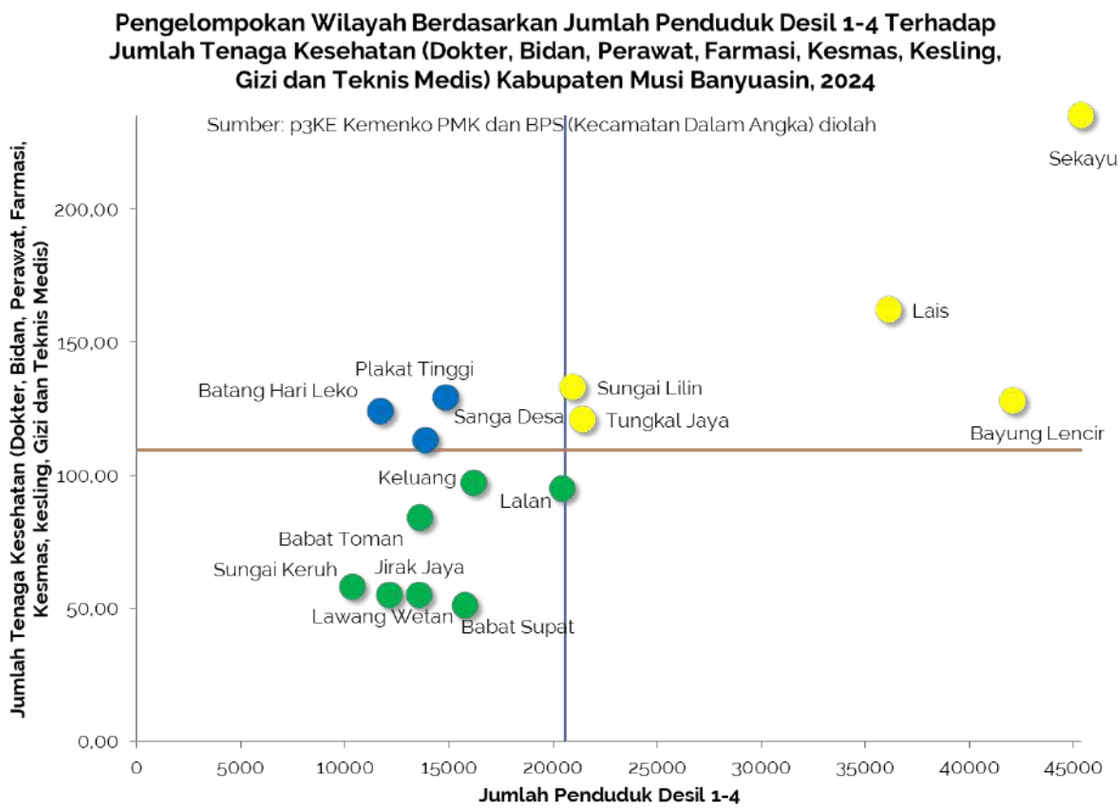
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah keluarga desil 1 dan jumlah balita stunting didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais dan Kecamatan Bayung Lencir
Prioritas 2	Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Plakat Tinggi
Prioritas 3	Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Lalan, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Jirak Jaya dan Kecamatan Babat Supat

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

3. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah penduduk desil 1-4 dan jumlah tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, kesmas, kesling, gizi dan teknis medis)



Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

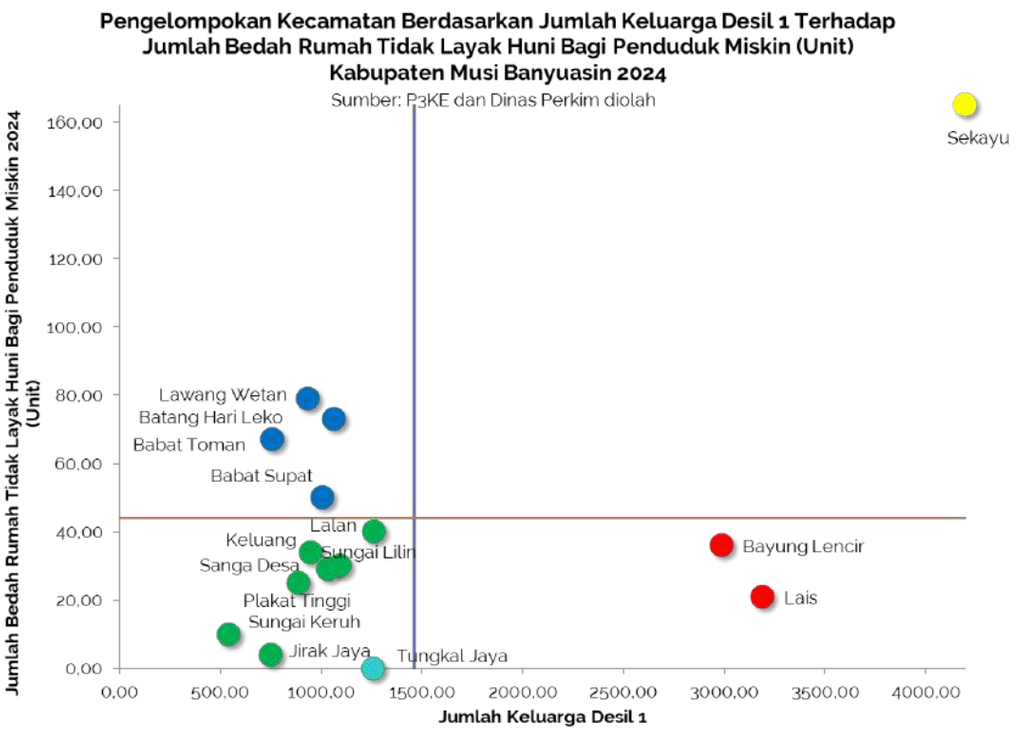
Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah penduduk desil 1-4 dan jumlah tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, kesmas, kesling, gizi dan teknis medis) didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais dan Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Sungai Lilin
Prioritas 2	Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Sanga Desa
Prioritas 3	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lalan, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Jirak Jaya dan Kecamatan Babat Supat

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Wilayah Prioritas Intervensi Infrastruktur Dasar

1. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah keluarga desil 1 dan jumlah bedah rumah bagi penduduk miskin 2024



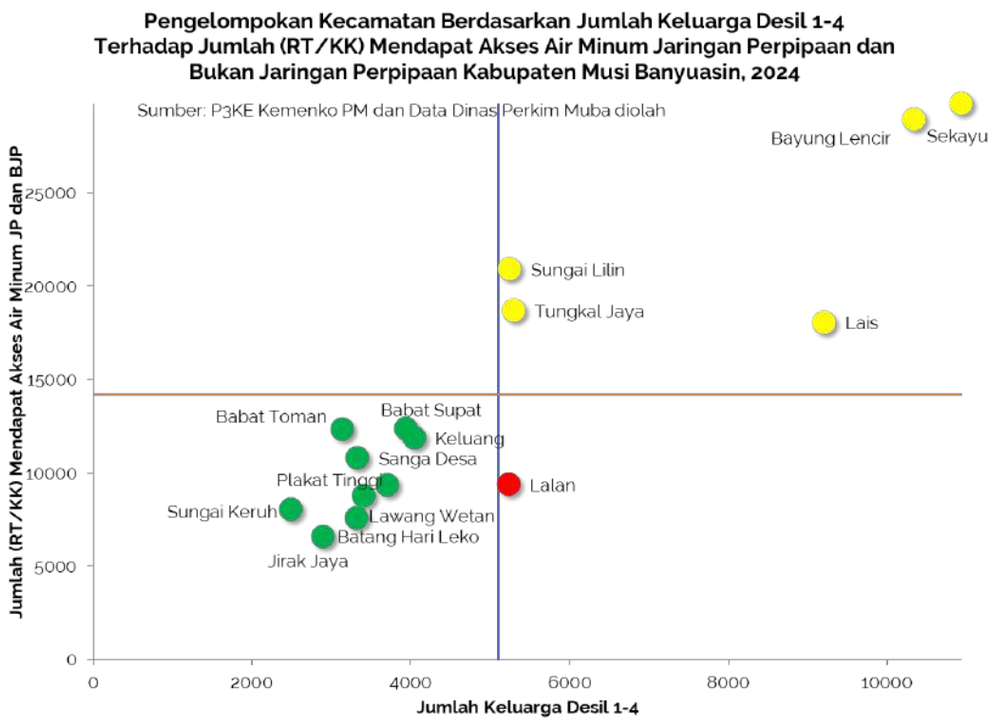
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah keluarga desil 1 dan jumlah bedah rumah bagi penduduk miskin 2024 didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Lais dan Kecamatan Bayung Lencir
Prioritas 2	Kecamatan Sekayu, ***Kecamatan Tungkal Jaya (tidak ada bedah rumah 2024)***
Prioritas 3	Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Babat Supat
Prioritas 4	Kecamatan Lalan, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Jirak Jaya dan Kecamatan Plakat Tinggi

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

2. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah keluarga desil 1-4 dan jumlah (RT/KK) yang mendapat akses air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan



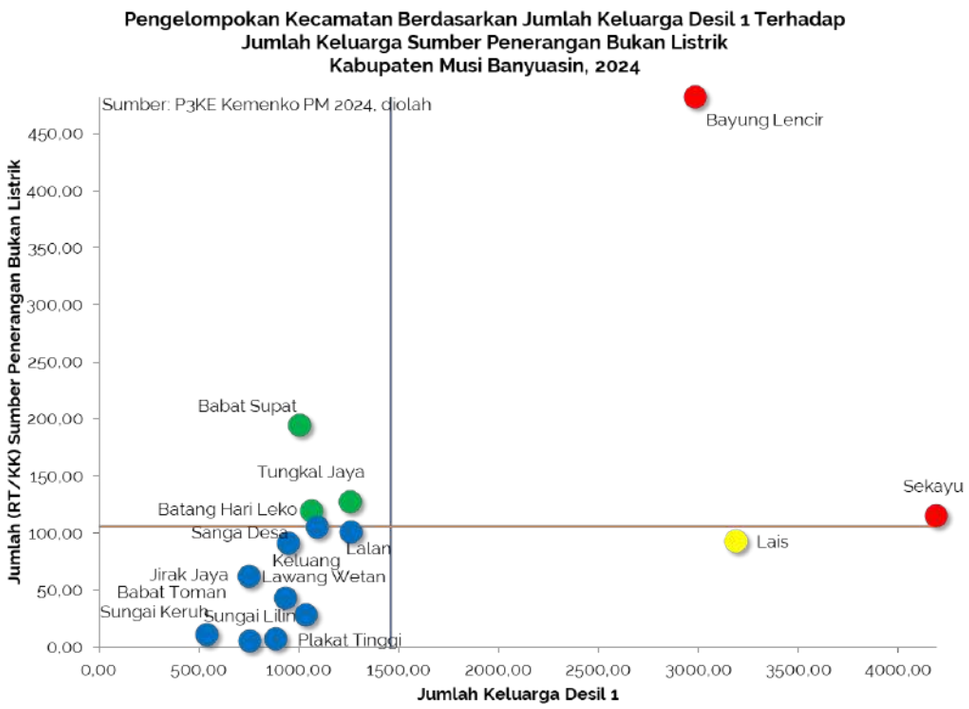
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan keluarga desil 1-4 dan jumlah (RT/KK) yang mendapat akses air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Lalan
Prioritas 2	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Sungai Lilin
Prioritas 3	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Plakat Tinggi

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

3. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah keluarga desil 1 dan jumlah keluarga sumber penerangan utama bukan listrik



Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

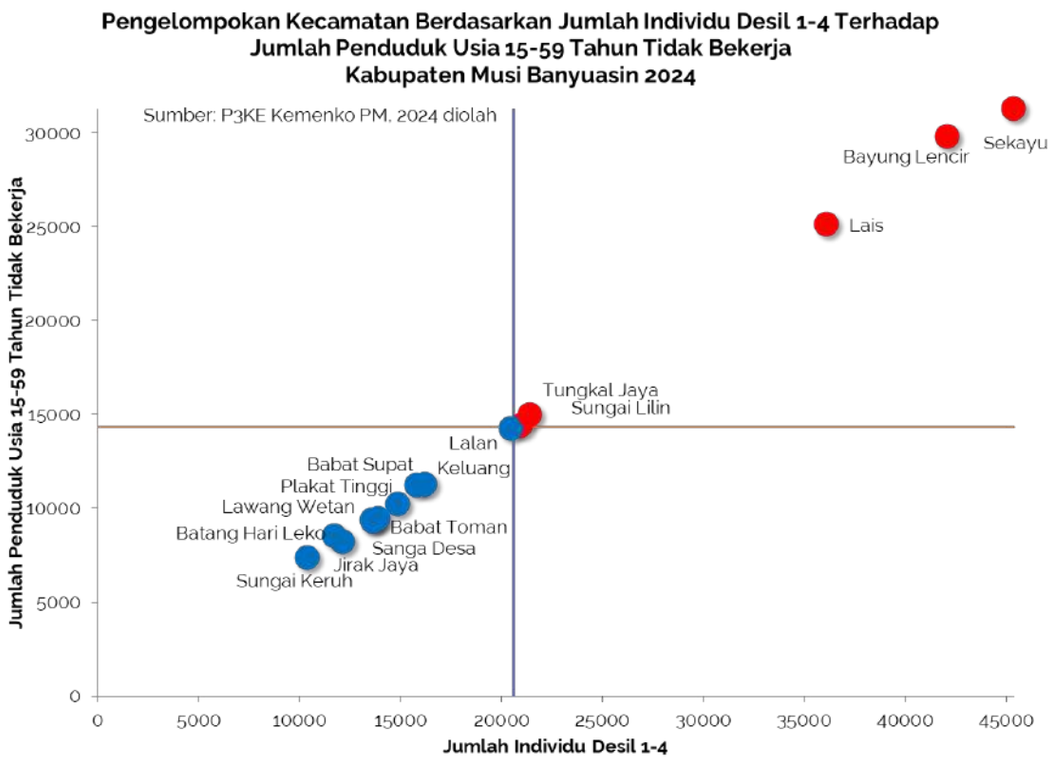
Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah keluarga desil 1 dan jumlah keluarga sumber penerangan utama bukan listrik didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Bayung Lencir
Prioritas 2	Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Batang Hari Leko
Prioritas 3	Kecamatan Lais
Prioritas 4	Kecamatan Lalan, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Jirak Jaya dan Kecamatan Plakat Tinggi

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Wilayah Prioritas Intervensi Ketenagakerjaan

1. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah penduduk desil 1-4 dan jumlah penduduk usia 15-59 tahun tidak bekerja



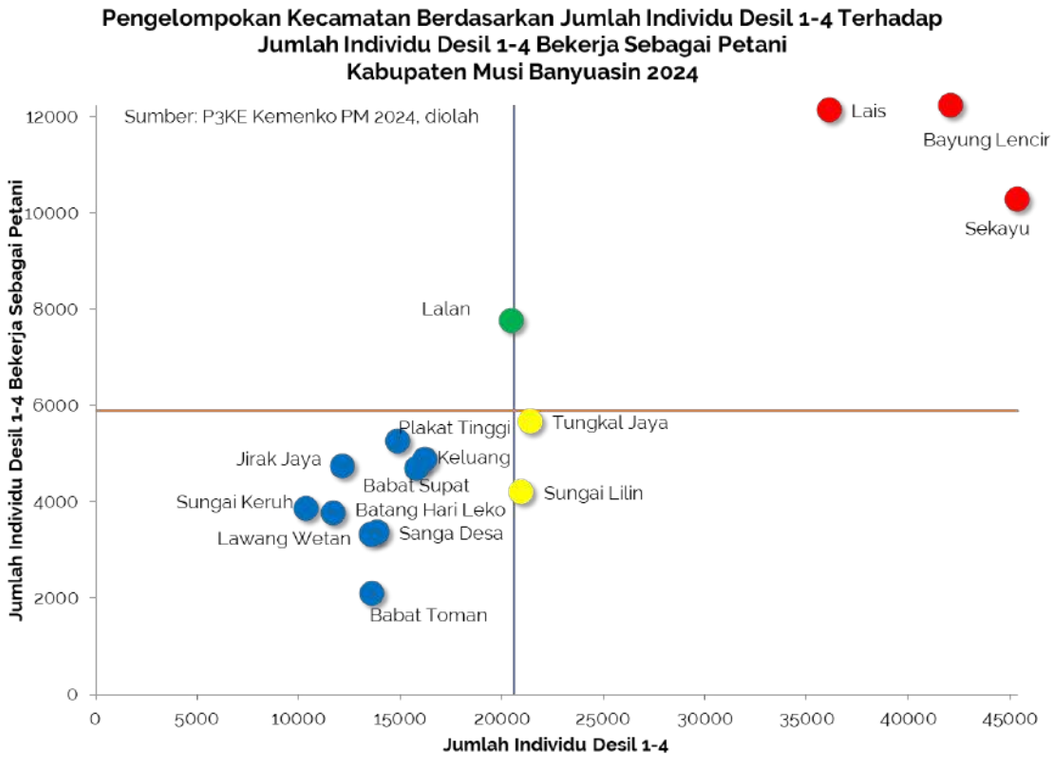
Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah penduduk desil 1-4 dan jumlah penduduk usia 15-59 tahun tidak bekerja didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya
Prioritas 2	Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Lalan, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Jirak Jaya dan Kecamatan Plakat Tinggi

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

2. Kecamatan prioritas berdasarkan jumlah penduduk desil 1-4 dan jumlah penduduk (L/P) bekerja sebagai petani



Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan jumlah penduduk desil 1 dan jumlah penduduk (L/P) bekerja sebagai pekerja lepas didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Sekayu, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Lais
Prioritas 2	Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya
Prioritas 3	Kecamatan Lalan
Prioritas 4	Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Jirak Jaya dan Kecamatan Plakat Tinggi

Sumber: RPKD Kab. Muba, diolah

Adapun target capaian untuk Tingkat Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	11,78	11,23	10,69	10,14	9,59

SIPD RI Kab. Muba, diolah

5. Rasio Gini

Berdasarkan hasil capaian indikator Rasio Gini di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 (pada bab II) cenderung mengalami fluktuatif per tahunnya dan cenderung mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir. Hal ini bisa saja disebabkan karena ketergantungan Kabupaten Musi Banyuasin yang tinggi terhadap sektor ekstraktif (migas dan tambang) sebagaimana yang diketahui bahwa PDRB per kapita Kabupaten Musi Banyuasin tergantung dari lapangan usaha pertambangan/migas (Kecamatan Bayung Lencit, Tungkal Jaya) dan tambang tetapi serapan tenaga kerja lokal yang kecil. Dampak dari hal

tersebut, pendapatan yang tinggi akan terkonsentrasi pada kelompok tertentu (investor, pekerja terampil dari luar) dan menyebabkan distribusi pendapatan yang makin timpang, akan mendorong naiknya Rasio Gini. Dapat saja rasio gini meningkat dikarenakan Keterbatasan Program Pemerataan Program bantuan sosial, pelatihan, dan pemberdayaan belum merata atau konsisten. Basis data kemiskinan (DTKS) belum mutakhir sehingga program tidak tepat sasaran, sehingga berdampak pada Bantuan hanya menjangkau sebagian kecil kelompok miskin dan Banyak masyarakat miskin produktif tertinggal, sehingga ketimpangan masih belum dapat ditekan. Data Gini Ratio Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren kenaikan ketimpangan pendapatan dari 0,266 pada tahun 2017 menjadi 0,339 pada tahun 2022. Nilai ini menyamai rata-rataprovinsi yang mengindikasikan bahwa ketimpangan di Muba semakin mengkhawatirkan. Ketimpangan ini disebabkan oleh struktur ekonomi yang belum inklusif, dominasi sektor ekstraktif, distribusi program bantuan yang belum merata, dan pertumbuhan wilayah yang timpang. Adapun target capaian untuk Rasio Gini Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Rasio Gini	Angka	0,308	0,305	0,304	0,302	0,300

SIPD RI Kab. Muba, diolah

Adapun target yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Musi Banyuasin ini sedikit berbeda dengan hasil kesepakatan dengan Provinsi Sumatera Selatan karena telah disesuaikan dengan kondisi di

lapangan dan hasil capaian rasio gini Kabupaten Musi Banyuasin terakhir (tahun 2024).

Beberapa saran rekomendasi kebijakan dari Provinsi Sumatera Selatan untuk penurunan Rasio Gini di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

a. Diversifikasi ekonomi daerah ke sektor pertanian modern dan UMKM Desa;
b. Perluasan program pelatihan vokasi, BLT Produktif, dan inkubasi UMKM bagi kelompok miskin produktif;
c. Pemerataan layanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, dan internet di wilayah 3T;
d. Memutakhirkan basis data kemiskinan agar program lebih tepat sasaran;
e. Bentuk Tim Teknis Penurunan Ketimpangan untuk monitoring dan pengendalian lintas OPD;
f. Penguatan UMKM dan ekonomi lokal berbasis desa;
g. Reformasi program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran;
h. Pemberdayaan ekonomi Perempuan dan kelompok rentan;
i. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan eprikanan, yang merupakan basis ekonomi lokal.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Banyuasin sangat tergantung pada peningkatan kedua indikator utama Pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Pemerintah menetapkan program Wajib Belajar 13 Tahun, yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran

2025/2026. Kebijakan ini menandai bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) kini bukan sekadar pilihan, melainkan menjadi bagian integral dari wajib belajar nasional.Penambahan durasi wajib belajar dari 12 menjadi 13 tahun bukanlah sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat pondasi awal pendidikan anak-anak Indonesia.

Program wajib belajar di Indonesia selama ini hanya mencakup pendidikan dasar dan menengah, yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA/SMK sederajat. Pendidikan anak usia dini (PAUD)termasuk TK, kelompok bermain, dan sejenisnya sering kali dianggap sebagai "opsional" oleh sebagian masyarakat, terutama dari kalangan prasejahtera. Padahal, penelitian internasional menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti PAUD berkualitas memiliki peluang lebih tinggi untuk sukses secara akademik dan sosial di jenjang pendidikan berikutnya. Langkah pemerintah ini sekaligus menjawab kesenjangan akses dan kualitas yang selama ini terjadi.

Dengan menjadikan PAUD sebagai bagian dari wajib belajar, negara berkewajiban memastikan semua anak Indonesia tanpa terkecuali mendapat pendidikan sejak usia dini, tanpa terkendala biaya maupun keterbatasan fasilitas. Selain itu, masih diperlukan intervensi terpadu yang fokus pada penguatan kualitas guru, aksesibilitas Pendidikan menyeluruh. Melalui perencanaan dan implementasi kebijakan yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor sehingga Kabupaten Musi Banyuasin dapat meraih

kemajuan signifikan dalam Pembangunan sumber daya manusia menuju masa depan yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Untuk menuju Generasi yang berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Penting mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas agar memiliki daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional. Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan Program Prioritas (PP) pada tahun 2025 – 2029. Pada sasaran prioritas nasional 4, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN akan berkontribusi utamanya untuk pencapaian Program Prioritas Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; dan Program Prioritas Peningkatan Ketangguhan Keluarga.

Program Pembangunan Keluarga bertujuan untuk memperkuat peran keluarga dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang dimulai dari proses perencanaan keluarga yang baik. Salah satu aspekutama dari program ini adalah peningkatan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang berkualitas. Untuk mewujudkan pencapaian program ini, Kemendugbangga/BKKBN mencanagkan "*Quick Win*" sebagai

wujud implementasi Program Pembangunan Keluarga untuk masyarakat.

Program *Quick Win* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga/BKKBN terdiri dari:

a. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)

b. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)

c. Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)

d. Lanjut Usia Berdaya (SIDAYA)

e. AI Super APP tentang Keluarga

Kelima program ini sedang digencarkan oleh pemerintah melalui Kemendugbangga/BKKBN sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Adapun target capaian untuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,07	73,1	73,33	73,5	74,00

SIPD RI Kab. Muba, diolah

7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Turunnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan turunnya potensi risiko bencana berperan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pengurangan emisi GRK mengurangi dampak perubahan iklim yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia, sekaligus mendukung upaya global untuk mengatasi pemanasan global. Sementara itu, menurunnya potensi

risiko bencana melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti mitigasi bencana alam dan perbaikan infrastruktur, membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Kedua faktor ini saling mendukung untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat, aman, dan lebih tahan terhadap dampak negatif perubahan iklim dan bencana alam.

Adapun target capaian untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Penurunan Emisi GRK	TonCO2e	2.012.452,45	2.224.591,60	2.460.414,98	2.688.752,02	2.943.543,17

SIPD RI Kab. Muba, diolah

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan secara makro. Indikator utama yang digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) beserta komponen pendukungnya, yang mencakup kualitas dari udara, air, dan tutupan lahan. Selain itu, kondisi Indeks Kerentanan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan bahwa perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memperhatikan aspek resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam lampiran peraturan tersebut, aspek ini masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar, khususnya pada sub urusan kebencanaan, perlindungan sosial, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Pemerintah daerah diharapkan untuk melaksanakan pendampingan tanggap darurat dan pasca bencana.

Aspek lingkungan hidup juga mencakup pengelolaan sampah yang efektif dan pengendalian dampak industri terhadap lingkungan. Keberadaan industri yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan tekanan terhadap kualitas udara, air, dan tanah, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya.

Adapun target capaian untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

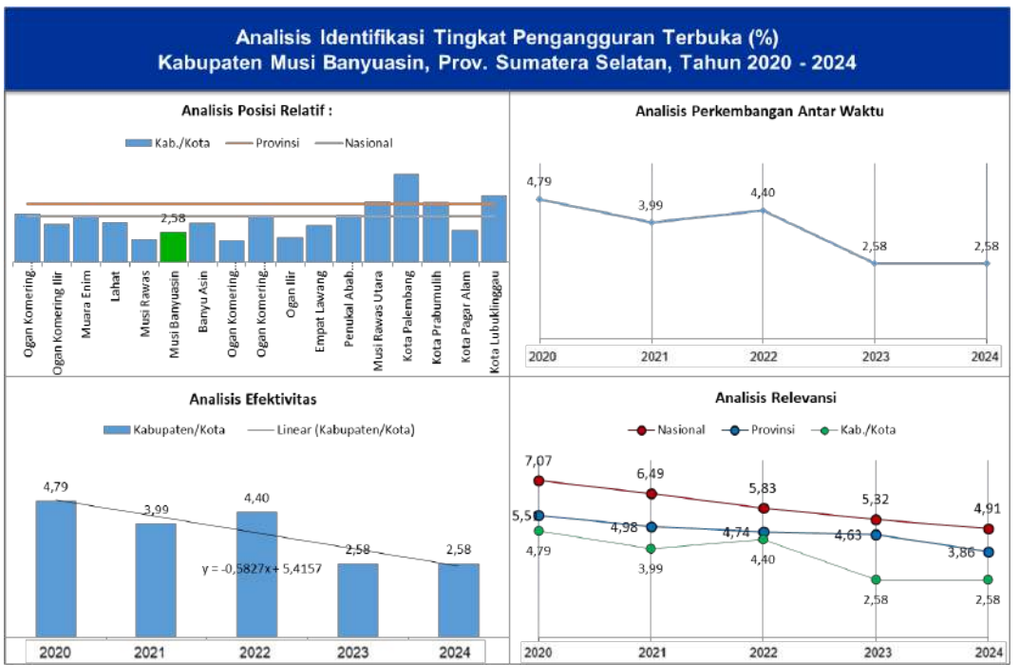
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	IKLH	Angka	64,69	64,94	65,2	65,45	65,7

SIPD RI Kab. Muba, diolah

9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, semakin besar kesempatan dan partisipasi angkatan kerja di sebuah daerah, demikian juga dengan Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2024, berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa TPT sebesar 2,58% capaian ini lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Selatan (3,86%) dan juga lebih baik dari capaian Nasional (4,91%), sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Banyuasin konsisten menurun, walaupun sempat meningkat pada tahun 2022 (4,40%), namun kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024. Rata-rata

penurunan TPT Kabupaten Musi Banyuasin sebesar -0,58 setiap tahunnya.



Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan, BPS 2024

Selain data makro BPS terkait informasi tingkat pengangguran terbuka, data P3KE Kemenko PM juga memberikan informasi penduduk bekerja dan tidak bekerja berdasarkan kelompok usia dan berdasarkan kecamatan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terrendah (Desil 1-4) di Kabupaten Musi Banyuasin dengan agregasi sebagai berikut:

40% Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah (Desil 1-4) Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Kecamatan, Informasi Bekerja dan Tidak Bekerja serta Berdasarkan Usia, Tahun 2024

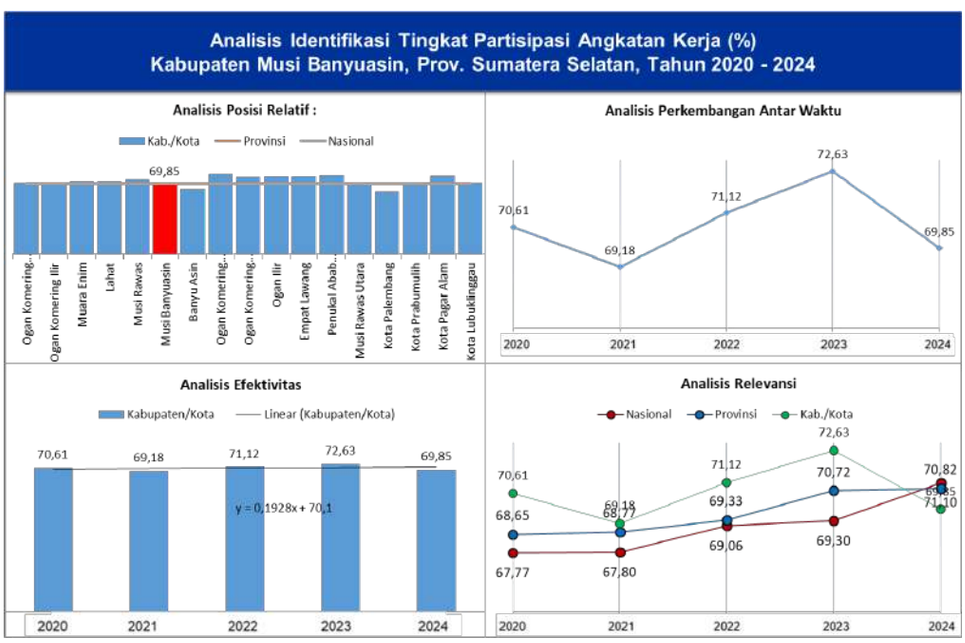
No	Kecamatan	Usia 5-14 tahun			Usia 15-59 tahun			Usia diatas 60 tahun		
		Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah
1	Sekayu	9.589	29	**9.618**	17.196	14.095	**31.291**	1.274	2.279	**3.553**
2	Lais	7.473	20	**7.493**	11.380	13.767	**25.147**	858	2.011	**2.869**
3	Sungai Keruh	2.350	8	**2.358**	2.985	4.356	**7.341**	174	378	**552**
4	Batang Hari Leko	2.158	4	**2.162**	3.971	4.565	**8.536**	197	720	**917**
5	Sanga Desa	2.933	8	**2.941**	4.769	4.669	**9.438**	465	865	**1.330**
6	Babat Toman	3.339	6	**3.345**	5.409	3.882	**9.291**	338	458	**796**
7	Sungai Lilin	4.834	19	**4.853**	7.576	6.828	**14.404**	589	742	**1.331**
8	Keluang	3.609	16	**3.625**	5.673	5.591	**11.264**	333	549	**882**
9	Bayung Lencir	9.030	40	**9.070**	14.504	15.291	**29.795**	751	1.625	**2.376**
10	Plakat Tinggi	3.424	20	**3.444**	4.478	5.754	**10.232**	357	607	**964**
11	Lalan	4.299	30	**4.329**	5.957	8.300	**14.257**	328	1.087	**1.415**
12	Tungkal Jaya	4.627	14	**4.641**	8.283	6.698	**14.981**	549	794	**1.343**
13	Lawang Wetan	2.960	20	**2.980**	4.772	4.612	**9.384**	304	744	**1.048**
14	Babat Supat	3.195	15	**3.210**	5.832	5.393	**11.225**	401	832	**1.233**
15	Jirak Jaya	2.886	16	**2.902**	3.143	5.051	**8.194**	212	520	**732**
		66.706	**265**	**66.971**	**105.928**	**108.852**	**214.780**	**7.130**	**14.211**	**21.341**

Sumber: P3KE Kemenko PM, 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia 5-14 tahun adalah penduduk usia sekolah, jumlah total penduduk bekerja dan tidak bekerja adalah 66.971 jiwa, dengan rincian 66.706 anak tidak bekerja *yang idealnya memang tidak bekerja karena dalam usia sekolah* serta 265 anak usia sekolah yang bekerja. Sedangkan dalam usia 15-59 tahun, terdapat penduduk usia 15-18 tahun yang juga usia sekolah level SMP/MTs dan SMA/MA, selebihnya adalah usia produktif. Berdasarkan informasi tersebut, jumlah total yang bekerja dan tidak bekerja adalah 214.780 jiwa, dengan rincian yang bekerja sebanyak 108.852 jiwa dan yang tidak bekerja sebesar 105.928 jiwa. Sedangkan usia 60 tahun ke atas, data menunjukkan bahwa jumlah total yang bekerja dan tidak bekerja sebesar 21.341 jiwa dengan rincian 14.211 jiwa bekerja dan 7.130 jiwa dalam usia 60 tahun ke atas tidak bekerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Selain TPT, indikator yang sama pentingnya dalam bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar peluang penduduk usia kerja mendapatkan pekerjaan dan atau bekerja di sebuah daerah, demikian juga dengan Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2024, berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 69,85%, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 (72,63%). Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Selatan (70,82%) dan capaian Nasional (69,85%). Sepanjang tahun 2020 sampai 2024, rata-rata perbaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,19 pertahunnya



Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan, BPS 2023

Berdasarkan data P3KE Kemenko PM 2024, data 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terrendah (Desil 1-4) Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan kecamatan, informasi bekerja dan tidak bekerja serta berdasarkan usia, dengan harapan informasi ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka meningkatkan partisipasi angkatan kerja, kesempatan kerja maupun upaya untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan memberikan dan melibatsertakan penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang tidak bekerja dalam program-program pemberdayaan, padat karya dan pembukaan lapangan kerja di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari analisis data makro dan mikro dalam bidang ketenagakerjaan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan yang masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Masih tingginya penduduk 40% dengan tingkat kesejahteraan terendah tidak bekerja;
2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja secara khusus penduduk miskin ekstrem dan miskin;
3. Minimnya tenaga kerja terampil dan rendahnya pendidikan dan ketrampilan pencari kerja lokal khususnya penduduk miskin ekstrem dan miskin;
4. Terbatasnya lapangan kerja dengan tingginya angkatan kerja.

Adapun target capaian untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	2,03	1,98	1,94	1,9	1,89

SIPD RI Kab. Muba, diolah

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta dengan memperhatikan arah kebijakan yang telah ditetapkan, disusunlah program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. Program-program ini disusun dengan berpedoman pada visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin periode 2025-2029, dan dengan mempertimbangkan kapasitas riil fiskal yang tersedia. Program Perangkat Daerah adalah serangkaian kegiatan atau inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Program-program ini bersifat spesifik dan terfokus pada sektor atau area tertentu dalam pemerintahan dan pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan Perangkat Daerah, program ini menjabarkan upaya-upaya yang mencakup sejumlah kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikasi rencana program prioritas yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kumpulan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh perangkat daerah dapat terlaksana secara efektif

dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Setiap program yang disusun tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Program-program tersebut dirancang agar dapat memberikan dampak yang nyata, baik dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat maupun dalam penguatan kapasitas pemerintahan daerah itu sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, dirancanglah pagu Indikatif sebagai bentuk gambaran mengenai kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan tahunan. Pagu indikatifini tidak hanya berfungsi sebagai indikator jumlah dana yang tersedia, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat mencakup seluruh kebutuhan prioritas dalam setiap program yang akan dijalankan. Dengan adanya pagu indikatif, perangkat daerah dapat merencanakan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan mereka dengan kapasitas keuangan yang ada, serta menghindari kekurangan anggaran di tengah pelaksanaan program, serta sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rancangan strategi (renstra). Dalam proses penyusunan renstra, perangkat daerah tidak hanya akan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tetapi juga memperhatikan alokasi anggaran yang ada agar dapat merencanakan kegiatan-kegiatan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dengan APBD. Sebagaimana amanat

pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan *absolute* adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Adapun Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Adapun Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi :

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian
16. Kebudayaan;
17. Kearsipan.

Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian;
6. Transmigrasi.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintah berupa:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD.

Adapun Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi :

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian;
4. Penelitian dan Pengembangan.

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah berupa:

1. Inspektorat Daerah.

Unsur Kewilayahan berupa:

1. Kecamatan.

Unsur Pemerintahan Umum berupa:

1. Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penetapan program prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi didasarkan pada program dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Prioritas Program Pembangunan Daerah dibuat berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2024-2029 meliputi :

1) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani;
2) Penguatan SDM Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
3) Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi Menuju Musi Banyuasin Sejahtera;
4) Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keummatan;
5) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas;
6) Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi;
7) Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

4.1.1. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

1. Program Pembangunan Daerah terkait dengan Urusan Wajib Layanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Program-program Urusan Pendidikan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan;
b. Program Pengembangan Kurikulum;
c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

2) Urusan Kesehatan

Program-program Urusan Kesehatan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

3) Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang

Program-program Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
e. Program Penataan Bangunan Gedung;
f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
g. Program Penyelenggaraan Jalan;
h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4) Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Program-program Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan;
b. Program Kawasan Permukiman;
c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

5) Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Program-program Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. Program Penanggulangan Bencana;
c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

6) Urusan Sosial

Program-program Urusan Sosial yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial;
b. Program Rehabilitasi Sosial;
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

d. Program Penanganan Bencana;

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2. Program Pembangunan Daerah terkait dengan Urusan Wajib Non-Layanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Program-program Urusan Tenaga kerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;

c. Program Penempatan Tenaga Kerja;

d. Program Hubungan Industrial.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Program-program Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;

b. Program Perlindungan Perempuan;

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

f. Program Perlindungan Khusus Anak.

3) Urusan Pangan

Program-program Urusan Pangan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4) Urusan Pertanahan

Program-program Urusan Pertanahan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
c. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

5) Urusan Lingkungan hidup

Program-program Urusan Lingkungan hidup yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
h. Program Pengelolaan Persampahan.

6) Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Program-program Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk;
b. Program Pencatatan Sipil;
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa;
b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Program-program Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk;

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

9) Urusan Perhubungan

Program-program Urusan Perhubungan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

b. Program Pengelolaan Pelayaran;

c. Program Pengelolaan Penerbangan.

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Program-program Urusan Komunikasi dan Informatika yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

11) Urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Program-program Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
g. Program Pengembangan UMKM.

12) Urusan Penanaman Modal

Program-program Urusan Penanaman modal yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. Program Promosi Penanaman Modal;
c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program-program Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

14) Urusan Statistik

Program-program Urusan Statistik yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

15) Urusan Persandian

Program-program Urusan Persandian yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

16) Urusan Kebudayaan

Program-program Urusan Kebudayaan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan;
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
c. Program Pembinaan Sejarah;

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

e. Program Pengelolaan Permuseuman.

17) Urusan Perpustakaan

Program-program Urusan Perpustakaan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan;

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

18) Urusan Kearsipan

Program-program Urusan Kearsipan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip;

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

3. Program Pembangunan Daerah terkait dengan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah

1) Urusan Kelautan dan perikanan

Program-program Urusan Kelautan dan perikanan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2) Urusan Pariwisata

Program-program Urusan Pariwisata yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
b. Program Pemasaran Pariwisata;
c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3) Urusan Pertanian

Program-program Urusan Pertanian yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
e. Program Perizinan Usaha Pertanian;
f. Program Penyuluhan Pertanian.

4) Urusan Perdagangan

Program-program Urusan Perdagangan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
d. Program Pengembangan Ekspor;
e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

5) Urusan Perindustrian

Program-program Urusan Perindustrian yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

6) Urusan Transmigrasi

Program-program Urusan Transmigrasi yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

4. Program Pembangunan Daerah terkait dengan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Program-program pendukung Urusan Pemerintah Daerah oleh Sekretariat Daerah pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 sebagai berikut :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Program Perekonomian dan Pembangunan.

2) Sekretariat DPRD

Program-program pendukung Urusan Pemerintah Daerah oleh Sekretariat DPRD pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 sebagai berikut :

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

5. Program Pembangunan Daerah terkait dengan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Program-program penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa Program-program Penunjang Urusan Perencanaan pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 sebagai berikut :

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2) Keuangan

Program-program penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa Program-program Penunjang Urusan Perencanaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3) Kepegawaian

Program-program penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa Program-program Penunjang Urusan Kepegawaian pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 sebagai berikut :

a. Program Kepegawaian Daerah

4) Penelitian dan Pengembangan

Program-program penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa Program-program Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 sebagai berikut :

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

6. Program Pembangunan Daerah terkait dengan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Program-program Inspektorat Pemerintah Daerah berupa Program-program Inspektorat Daerah yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

7. Program Pembangunan Daerah terkait dengan Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Program-program Kewilayahan berupa Program-program Kewilayahan oleh Kecamatan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

8. Program Pembangunan Daerah terkait dengan Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program Pemerintahan Umum berupa Program-program unsur pemerintahan umum oleh Kesatuan Bangsa dan Politik yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

4.1.2 Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Non Layanan Dasar, Urusan Pilihan, Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum, disusun Program Perangkat Daerah dan indikator sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Adapun kerangka pendanaan program tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tabel Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.212.819.872.521,00		1.225.019.872.521,00		1.255.019.872.521,00		1.285.019.872.521,00		1.285.019.872.521,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					992.819.872.521,00		992.819.872.521,00		992.819.872.521,00		992.819.872.521,00		992.819.872.521,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100	992.819.872.521,00	100	992.819.872.521,00	100	992.819.872.521,00	100	992.819.872.521,00	100	992.819.872.521,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	0	70,01	70,01		70,01		70,01		70,01		70,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					220.000.000.000,00		230.000.000.000,00		260.000.000.000,00		290.000.000.000,00		290.000.000.000,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	96,89	97,23	97,56	220.000.000.000,00	97,90	230.000.000.000,00	98,24	260.000.000.000,00	98,58	290.000.000.000,00	98,92	290.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					0,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Maningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	0	0,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	0	0	0,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	0	0	0		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	0	0	0	0,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlestarinya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	0	0	0,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					741.804.031.911,00		790.096.077.851,00		833.082.728.623,00		881.339.542.779,00		881.339.542.779,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					600.454.031.911,00		638.746.077.851,00		681.732.728.623,00		729.989.542.779,00		729.989.542.779,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	78,43	78,75	79	354.393.598.911,00	79,30	354.393.598.911,00	79,40	354.393.598.911,00	79,50	354.393.598.911,00	79,75	354.393.598.911,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya efektifitas pelayanan BLUD FKTP dan FKTL	Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL (UPT)	87,71	87,5	88	246.060.433.000,00	88,5	284.352.478.940,00	89	327.339.129.712,00	90	375.595.943.868,00	91	375.595.943.868,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP (UPT)	87,71	87,5	88		88,5		89		90		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					140.000.000.000,00		150.000.000.000,00		150.000.000.000,00		150.000.000.000,00		150.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	74,42	76	75	140.000.000.000,00	74	150.000.000.000,00	73	150.000.000.000,00	72	150.000.000.000,00	70	150.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	14	8	7		6		6		5		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	69,61	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan (Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	12.574	12.662	12.789		12.916		13.043		13.170		13.295		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	6	43		50		57		64		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) (%)	100	100-	100-		100-		100-		100-		100-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun. ((%))	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	86,53	87	87,50		88		88,50		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	65	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	65,5	65,5	65,5		65,5		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	70	75	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	0	0,35	0,4		0,50		0,60		0,7		0,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					623.628.781.143,00		816.359.757.726,00		1.021.318.730.399,00		1.244.124.860.409,00		1.244.324.860.409,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.209.268.788,00		36.209.268.788,00		36.209.268.788,00		36.209.268.788,00		36.209.268.788,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100	36.209.268.788,00	100	36.209.268.788,00	100	36.209.268.788,00	100	36.209.268.788,00	100	36.209.268.788,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	77,80	78,34	78,88		79,42		79,96		80,50		81,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					15.000.000.000,00		17.000.000.000,00		19.000.000.000,00		21.000.000.000,00		21.000.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	67,73	67,73	69,12	15.000.000.000,00	71,49	17.000.000.000,00	73,85	19.000.000.000,00	75,76	21.000.000.000,00	77,50	21.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					6.000.000.000,00		8.000.000.000,00		10.000.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)	94,67	97,5	100	6.000.000.000,00	100	8.000.000.000,00	100	10.000.000.000,00	100	12.000.000.000,00	100	12.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					8.000.000.000,00		10.000.000.000,00		12.000.000.000,00		14.000.000.000,00		14.000.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1,2	2	2,5	8.000.000.000,00	3	10.000.000.000,00	4	12.000.000.000,00	5	14.000.000.000,00	7,5	14.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal) (%)	83,67	85,2	86,42		88,15		89,62		91,05		92,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					10.000.000.000,00		15.000.000.000,00		20.000.000.000,00		25.000.000.000,00		25.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	25	25	26	10.000.000.000,00	27	15.000.000.000,00	28	20.000.000.000,00	29	25.000.000.000,00	29	25.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					100.000.000.000,00		100.000.000.000,00		100.000.000.000,00		100.000.000.000,00		100.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	75	75	77	100.000.000.000,00	79	100.000.000.000,00	81	100.000.000.000,00	83	100.000.000.000,00	83	100.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	60	60	65	1.000.000.000,00	70	1.000.000.000,00	78	1.000.000.000,00	80	1.000.000.000,00	80	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					441.419.512.355,00		623.150.488.938,00		817.109.461.611,00		1.028.915.591.621,00		1.029.115.591.621,00	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	61,16	62,11	63,18	441.419.512.355,00	65,28	623.150.488.938,00	67,52	817.109.461.611,00	68,94	1.028.915.591.621,00	70,12	1.029.115.591.621,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat (%)	28,57	28,57	30	1.000.000.000,00	35	1.000.000.000,00	40	1.000.000.000,00	45	1.000.000.000,00	50	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	84,17	84,17	85,33	5.000.000.000,00	86,67	5.000.000.000,00	88	5.000.000.000,00	88,67	5.000.000.000,00	90	5.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					95.130.995.751,00		106.130.995.751,00		117.130.995.751,00		128.130.995.751,00		128.130.995.751,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.130.995.751,00		15.130.995.751,00		15.130.995.751,00		15.130.995.751,00		15.130.995.751,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100	15.130.995.751,00	100	15.130.995.751,00	100	15.130.995.751,00	100	15.130.995.751,00	100	15.130.995.751,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					3.000.000.000,00		4.000.000.000,00		5.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	3.000.000.000,00	100	4.000.000.000,00	100	5.000.000.000,00	100	6.000.000.000,00	100	6.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00	
Meningkatnya kawasan kumuh yang tertangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	8	9	11	7.000.000.000,00	14	7.000.000.000,00	16	7.000.000.000,00	20	7.000.000.000,00	22	7.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00	
Tertatanya Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki (%)	11,7	22	33	20.000.000.000,00	44	20.000.000.000,00	55	20.000.000.000,00	66	20.000.000.000,00	66	20.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					50.000.000.000,00		60.000.000.000,00		70.000.000.000,00		80.000.000.000,00		80.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	80	80	85	50.000.000.000,00	90	60.000.000.000,00	95	70.000.000.000,00	100	80.000.000.000,00	100	80.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					54.090.148.378,00		54.636.929.413,00		54.538.528.500,00		54.645.207.541,00		54.645.207.541,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.272.467.678,00		38.272.467.678,00		38.272.467.678,00		38.272.467.678,00		38.272.467.678,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana Daerah)	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100	10.816.905.525,00	100	10.816.905.525,00	100	10.816.905.525,00	100	10.816.905.525,00	100	10.816.905.525,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Masyarakat
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	76,60	77,05	77,50		77,95		78,40		78,85		79,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum)	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100	27.455.562.153,00	100	27.455.562.153,00	100	27.455.562.153,00	100	27.455.562.153,00	100	27.455.562.153,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	71,90	72,00	72,10		72,20		72,30		72,40		72,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.000.000.000,00		2.450.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00	
1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada 2. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten (%)	100	100	100	2.000.000.000,00	100	2.450.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					8.917.680.700,00		9.014.461.735,00		9.116.060.822,00		9.222.739.863,00		9.222.739.863,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat 3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	0,52	0,69	0,90	8.917.680.700,00	1,16	9.014.461.735,00	1,46	9.116.060.822,00	1,80	9.222.739.863,00	2,19	9.222.739.863,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					4.900.000.000,00		4.900.000.000,00		4.900.000.000,00		4.900.000.000,00		4.900.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1) Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran 2) Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	4.900.000.000,00	100	4.900.000.000,00	100	4.900.000.000,00	100	4.900.000.000,00	100	4.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					145.056.639.864,00		145.056.639.864,00		145.056.639.864,00		145.056.639.864,00		145.056.639.864,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.756.639.864,00		10.756.639.864,00		10.756.639.864,00		10.756.639.864,00		10.756.639.864,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sosial	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	10.756.639.864,00	100	10.756.639.864,00	100	10.756.639.864,00	100	10.756.639.864,00	100	10.756.639.864,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	75,80	75,82	75,85		75,87		75,90		75,92		75,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					3.006.155.800,00		3.006.155.800,00		3.006.155.800,00		3.006.155.800,00		3.006.155.800,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%)	100	100	100	3.006.155.800,00	100	3.006.155.800,00	100	3.006.155.800,00	100	3.006.155.800,00	100	3.006.155.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis Terlantas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					128.093.844.200,00		128.093.844.200,00		128.093.844.200,00		128.093.844.200,00		128.093.844.200,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100	128.093.844.200,00	100	128.093.844.200,00	100	128.093.844.200,00	100	128.093.844.200,00	100	128.093.844.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	58,82	70	72	1.150.000.000,00	75	1.150.000.000,00	80	1.150.000.000,00	82	1.150.000.000,00	84	1.150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	0	0	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					17.270.735.973,00		18.270.735.973,00		19.270.735.973,00		20.270.735.973,00		20.270.735.973,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.520.735.973,00		9.520.735.973,00		9.520.735.973,00		9.520.735.973,00		9.520.735.973,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	9.520.735.973,00	100	9.520.735.973,00	100	9.520.735.973,00	100	9.520.735.973,00	100	9.520.735.973,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	71,60	72	73		74		75		76		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (%)	50	55	60	400.000.000,00	70	400.000.000,00	80	400.000.000,00	90	400.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					6.000.000.000,00		7.000.000.000,00		8.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	5	10	15	6.000.000.000,00	20	7.000.000.000,00	25	8.000.000.000,00	30	9.000.000.000,00	35	9.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	68,04	69	70	750.000.000,00	70,5	750.000.000,00	71	750.000.000,00	71,5	750.000.000,00	72	750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	64.766	64.860	64.885	600.000.000,00	64.900	600.000.000,00	64.910	600.000.000,00	64.930	600.000.000,00	6.500	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)	41,65	52,53	53,53		54,53		55,53		56,53		57,53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.088.632.385,00		9.088.632.385,00		9.088.632.385,00		9.088.061.385,00		9.088.632.385,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.873.632.385,00		6.873.632.385,00		6.873.632.385,00		6.873.632.385,00		6.873.632.385,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	75,80	76,00	76,50	6.873.632.385,00	77,00	6.873.632.385,00	77,50	6.873.632.385,00	78,00	6.873.632.385,00	78,50	6.873.632.385,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	39,25	40,25	42,25	650.000.000,00	43,25	650.000.000,00	44,25	650.000.000,00	45,25	650.000.000,00	46,25	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	54,84	54,90	54,95		55,10		55,20		55,30		55,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaran gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	1	1	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59,86	60,36	60,86	450.000.000,00	61,36	450.000.000,00	61,86	450.000.000,00	62,36	450.000.000,00	62,86	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	700	700	720		740		760		780		800		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		599.429.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	76,97	78,47	79,97	600.000.000,00	81,47	600.000.000,00	82,97	600.000.000,00	84,47	599.429.000,00	85,97	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					13.890.691.561,00		14.140.691.561,00		14.390.691.561,00		14.640.691.561,00		14.640.691.561,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.840.691.561,00		8.840.691.561,00		8.840.691.561,00		8.840.691.561,00		8.840.691.561,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketahanan Pangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100	8.840.691.561,00	100	8.840.691.561,00	100	8.840.691.561,00	100	8.840.691.561,00	100	8.840.691.561,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	administrasi perkantoran (%)													
	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	74,90	75,08	75,64		75,20		76,19		77,30		77,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan (%)	0	50	50	1.000.000.000,00	50	1.000.000.000,00	50	1.000.000.000,00	50	1.000.000.000,00	50	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					3.750.000.000,00		4.000.000.000,00		4.250.000.000,00		4.500.000.000,00		4.500.000.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,8	92,84	92,86	3.750.000.000,00	92,88	4.000.000.000,00	93	4.250.000.000,00	93,02	4.500.000.000,00	93,04	4.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0,41	0,41	0,41	50.000.000,00	0,41	50.000.000,00	0,41	50.000.000,00	0,41	50.000.000,00	0,41	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	94,57	94,60	94,70	250.000.000,00	94,80	250.000.000,00	94,90	250.000.000,00	95,00	250.000.000,00	95,20	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	0	0	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	0	10	2.500.000.000,00	25	2.500.000.000,00	35	2.500.000.000,00	45	2.500.000.000,00	45	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	0	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					52.084.178.969,00		52.084.178.969,00		52.084.178.969,00		52.084.178.969,00		52.084.178.969,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.258.178.969,00		35.258.178.969,00		35.258.178.969,00		35.258.178.969,00		35.258.178.969,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	74,90	74,90	74,90	35.258.178.969,00	74,90	35.258.178.969,00	74,90	35.258.178.969,00	74,90	35.258.178.969,00	74,90	35.258.178.969,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Lingkungan Hidup
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai (%)	68,17	64,44	64,69	1.000.000.000,00	64,94	1.000.000.000,00	65,20	1.000.000.000,00	65,45	1.000.000.000,00	65,70	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	41,80	67,93	68	4.000.000.000,00	68,07	4.000.000.000,00	68,14	4.000.000.000,00	68,21	4.000.000.000,00	68,28	4.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Luasan RTH yang dikelola (%)	20	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00	
pemberian Penghargaan Lingkungan Hiduptingkat daerahKabupaten/Kota	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai (%)	100	100	100	126.000.000,00	100	126.000.000,00	100	126.000.000,00	100	126.000.000,00	100	126.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					10.500.000.000,00		10.500.000.000,00		10.500.000.000,00		10.500.000.000,00		10.500.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Penanganan sampah (%)	43,1	44	45	10.500.000.000,00	46	10.500.000.000,00	47	10.500.000.000,00	47,5	10.500.000.000,00	48	10.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					23.193.887.045,00		23.193.887.045,00		23.193.887.045,00		23.193.887.045,00		23.193.887.045,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.593.887.045,00		14.593.887.045,00		14.593.887.045,00		14.593.887.045,00		14.593.887.045,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	14.593.887.045,00	100	14.593.887.045,00	100	14.593.887.045,00	100	14.593.887.045,00	100	14.593.887.045,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	74,80	77,80	77,80		77,80		77,80		77,80		77,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	100	100	100	1.900.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%)	60	62	64		66		68		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang	99	99	99		99		99		99		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)													Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					6.200.000.000,00		6.200.000.000,00		6.200.000.000,00		6.200.000.000,00		6.200.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	99	99,85	99,85	6.200.000.000,00	99,86	6.200.000.000,00	99,86	6.200.000.000,00	99,87	6.200.000.000,00	99,87	6.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	80	80	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					18.672.449.529,00		18.672.449.529,00		18.672.449.529,00		18.672.449.529,00		18.672.449.529,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.392.449.529,00		8.392.449.529,00		8.392.449.529,00		8.392.449.529,00		8.392.449.529,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100	8.392.449.529,00	100	8.392.449.529,00	100	8.392.449.529,00	100	8.392.449.529,00	100	8.392.449.529,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jumlah Desa yang dibina dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	82	85	87	130.000.000,00	89	130.000.000,00	91	130.000.000,00	93	130.000.000,00	95	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					6.500.000.000,00		6.500.000.000,00		6.500.000.000,00		6.500.000.000,00		6.500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	6.500.000.000,00	100	6.500.000.000,00	100	6.500.000.000,00	100	6.500.000.000,00	100	6.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase desa yang memiliki Bumdes (%)	0	68,32	71,43		74,53		77,64		80,74		80,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga (Persentase)	100	100	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					13.775.932.981,00		13.775.932.981,00		13.775.932.981,00		13.775.932.981,00		13.775.932.981,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.975.932.981,00		11.975.932.981,00		11.975.932.981,00		11.975.932.981,00		11.975.932.981,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100	11.975.932.981,00	100	11.975.932.981,00	100	11.975.932.981,00	100	11.975.932.981,00	100	11.975.932.981,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kepegawaian Tepat Waktu (%)													Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	74,20	74,30	74,50		74,60		75,00		75,20		75,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) (%)	71,60	72,00	72,10	1.250.000.000,00	73,50	1.250.000.000,00	73,60	1.250.000.000,00	73,70	1.250.000.000,00	73,80	1.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	6,89	6,85	6,83		6,80		6,77		6,75		6,72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	20	25	35		55		70		80		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	11,70	11,35	11,00		10,57		10,53		10,25		10,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	43,2	42.5-42	42-41.7		41.7-41.3		41.3-41		41-40.8		40.8-40.8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	18	19	19,5		20		20,5		21		21,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	83,10	83,50	83,90	400.000.000,00	84,20	400.000.000,00	84,50	400.000.000,00	84,70	400.000.000,00	84,90	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	57,50	57,80	58,00		58,10		58,30		58,50		58,70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					47.377.363.688,00		48.477.363.688,00		50.477.363.688,00		52.777.363.688,00		52.477.363.688,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.677.363.688,00		12.677.363.688,00		12.677.363.688,00		12.677.363.688,00		12.677.363.688,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100	12.677.363.688,00	100	12.677.363.688,00	100	12.677.363.688,00	100	12.677.363.688,00	100	12.677.363.688,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	70,01	70,01	70,01		70,01		70,01		70,01		70,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					32.000.000.000,00		34.000.000.000,00		36.000.000.000,00		38.000.000.000,00		38.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Pelayanan Penerangan Lampu Jalan (%)	88,01	88,01	89,01	32.000.000.000,00	90,01	34.000.000.000,00	91,01	36.000.000.000,00	92,01	38.000.000.000,00	93,01	38.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ (%)	41	41	53		64		76		88		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Transportasi Yang Nyaman dan Laik Jalan (%)	52	52	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Penurunan Daerah Rawan Kecelakaan (%)	-8	-8	-9		-10		-11		-13		-14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kecamatan yang Terlayani Angkutan (%)	6,67	6,67	13,33		20,00		26,67		33,34		40,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					2.600.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		2.000.000.000,00		1.700.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Sarana Prasarana ASDP dalam kondisi baik (%)	35	35	47	2.600.000.000,00	62	1.700.000.000,00	72	1.700.000.000,00	83	2.000.000.000,00	90	1.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	PersentaseTerpeliharanya Sarana Prasarana Bandar Udara (%)	50	50	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	75	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					26.395.740.031,00		26.895.740.031,00		27.395.740.031,00		27.895.740.031,00		27.895.740.031,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.895.740.031,00		10.895.740.031,00		10.895.740.031,00		10.895.740.031,00		10.895.740.031,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7,01	7,01	7,01	10.895.740.031,00	7,01	10.895.740.031,00	7,01	10.895.740.031,00	7,01	10.895.740.031,00	7,01	10.895.740.031,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					8.500.000.000,00		9.000.000.000,00		9.500.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik (%)	100	100	100	8.500.000.000,00	100	9.000.000.000,00	100	9.500.000.000,00	100	10.000.000.000,00	100	10.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten (%)	100	100	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					13.536.166.387,00		14.736.166.387,00		15.936.166.387,00		16.936.166.387,00		16.936.166.387,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.286.166.387,00		7.286.166.387,00		7.286.166.387,00		7.286.166.387,00		7.286.166.387,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	97	98	99	7.286.166.387,00	100	7.286.166.387,00	100	7.286.166.387,00	100	7.286.166.387,00	100	7.286.166.387,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	97	98	99		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	97	98	99		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	97	98	99		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	74,30	75,20	76,10		77,00		77,90		78,80		79,70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	-	-	-	0,00	8,93	100.000.000,00	10,34	100.000.000,00	11,73	100.000.000,00	13,10	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	28,57	18,13	19,52	400.000.000,00	20,86	400.000.000,00	22,16	400.000.000,00	23,39	400.000.000,00	24,75	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	51,43	33,35	34,18	250.000.000,00	34,82	250.000.000,00	36,93	250.000.000,00	38,86	250.000.000,00	40,76	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	14,29	10,57	11,99	300.000.000,00	13,39	300.000.000,00	14,77	300.000.000,00	16,13	300.000.000,00	17,47	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					685.000.000,00		885.000.000,00		1.085.000.000,00		1.085.000.000,00		1.085.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (Persentase)	50,16	50,50	51,00	685.000.000,00	51,50	885.000.000,00	52,00	1.085.000.000,00	52,50	1.085.000.000,00	53,00	1.085.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.115.000.000,00		1.515.000.000,00		2.015.000.000,00		2.515.000.000,00		2.515.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	10,58	12,32	13,92	1.115.000.000,00	15,35	1.515.000.000,00	16,61	2.015.000.000,00	17,69	2.515.000.000,00	18,60	2.515.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					3.500.000.000,00		4.000.000.000,00		4.500.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan (%)	-	0,0829	0,1216	3.500.000.000,00	0,1581	4.000.000.000,00	0,1918	4.500.000.000,00	0,2228	5.000.000.000,00	0,2510	5.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					18.600.237.222,00		18.600.237.222,00		18.600.237.222,00		18.600.237.222,00		18.600.237.222,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.550.237.222,00		15.550.237.222,00		15.550.237.222,00		15.550.237.222,00		15.550.237.222,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100	15.550.237.222,00	100	15.550.237.222,00	100	15.550.237.222,00	100	15.550.237.222,00	100	15.550.237.222,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	73,70	73,72	73,73		73,74		73,75		73,76		73,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	102,07	102,09	102,11	350.000.000,00	102,13	350.000.000,00	102,15	350.000.000,00	102,17	350.000.000,00	102,19	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berminat Sesuai Ketentuan (%)	15	15	30	600.000.000,00	35	600.000.000,00	40	600.000.000,00	45	600.000.000,00	50	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin (%)	99,36	99,40	99,43	1.600.000.000,00	99,45	1.600.000.000,00	99,48	1.600.000.000,00	99,50	1.600.000.000,00	99,55	1.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha (%)	62	62,50	65	400.000.000,00	70	400.000.000,00	80	400.000.000,00	90	400.000.000,00	95	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	30	30	30	100.000.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	50	100.000.000,00	55	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					59.560.606.464,00		59.560.606.464,00		59.560.606.464,00		59.560.606.464,00		59.560.606.464,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.360.606.464,00		15.360.606.464,00		15.360.606.464,00		15.360.606.464,00		15.360.606.464,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100	15.360.606.464,00	100	15.360.606.464,00	100	15.360.606.464,00	100	15.360.606.464,00	100	15.360.606.464,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	0	70,01	70,01		70,01		70,01		70,01		70,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina (%)	35,12	36,79	41,09	1.000.000.000,00	41,75	1.000.000.000,00	41,90	1.000.000.000,00	42,00	1.000.000.000,00	42,25	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase pemuda yang bebas narkoba (%)	99,95	99,95	99,96		99,97		99,98		99,98		99,98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					40.000.000.000,00		40.000.000.000,00		40.000.000.000,00		40.000.000.000,00		40.000.000.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata														
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga (%)	18,03	18,95	19,00	40.000.000.000,00	19,30	40.000.000.000,00	19,60	40.000.000.000,00	19,90	40.000.000.000,00	20,10	40.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk (Rasio)	0,29	0,29	0,30		0,31		0,32		0,33		0,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi (%)	21,27	30,52	39,77	3.200.000.000,00	49,32	3.200.000.000,00	58,87	3.200.000.000,00	68,42	3.200.000.000,00	77,07	3.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral (%)	100	100	100	1.300.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	
Meningkatnya keamanan siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.775.000.000,00		4.275.000.000,00		4.275.000.000,00		4.275.000.000,00		4.275.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	0	0	0	0,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	100	100	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	20	40	50	250.000.000,00	60	250.000.000,00	65	250.000.000,00	70	250.000.000,00	80	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					11.689.643.542,00		11.689.643.542,00		11.689.643.542,00		11.689.643.542,00		11.689.643.542,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.589.643.542,00		9.589.643.542,00		9.589.643.542,00		9.589.643.542,00		9.589.643.542,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perpustakaan	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	9.589.643.542,00	100	9.589.643.542,00	100	9.589.643.542,00	100	9.589.643.542,00	100	9.589.643.542,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	80	81	81,5		82		82,5		83		83,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	73,55	73,92	74,29		74,66		75,03		75,41		75,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	69,81	70,16	70,51	2.000.000.000,00	70,86	2.000.000.000,00	71,22	2.000.000.000,00	71,57	2.000.000.000,00	71,93	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terpeliharanya warisan budaya dan sejarah bangsa Indonesia dalam bentuk naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	1	2	100.000.000,00	3	100.000.000,00	4	100.000.000,00	5	100.000.000,00	6	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	67,55	67,89	68,23	750.000.000,00	68,57	750.000.000,00	68,91	750.000.000,00	69,26	750.000.000,00	69,60	750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Tingkat Digitalisasi Arsip (Nilai)	86,64	86,73	86,81		86,90		86,99		87,07		87,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnnya kinerja pengelolaan arsip, perlindungan arsip dan penyelamatan arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	0	10	100.000.000,00	15	100.000.000,00	20	100.000.000,00	25	100.000.000,00	30	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					18.786.748.254,00		19.986.748.254,00		21.186.748.254,00		21.886.748.254,00		21.886.748.254,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.336.748.254,00		10.336.748.254,00		10.336.748.254,00		10.336.748.254,00		10.336.748.254,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	10.336.748.254,00	100	10.336.748.254,00	100	10.336.748.254,00	100	10.336.748.254,00	100	10.336.748.254,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	76,10	78,00	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					3.000.000.000,00		3.500.000.000,00		4.000.000.000,00		4.500.000.000,00		4.500.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	25.244,31	24.370	24.379	3.000.000.000,00	24.388	3.500.000.000,00	24.397	4.000.000.000,00	24.406	4.500.000.000,00	24.415	4.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.500.000.000,00		3.000.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	12.094,86	12.119	12.143	2.500.000.000,00	12.168	3.000.000.000,00	12.192	3.500.000.000,00	12.216	3.500.000.000,00	12.240	3.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.200.000.000,00		1.400.000.000,00		1.600.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	0	15	30	1.200.000.000,00	45	1.400.000.000,00	60	1.600.000.000,00	75	1.800.000.000,00	100	1.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	40,27	40,67	41,08	1.750.000.000,00	41,49	1.750.000.000,00	41,90	1.750.000.000,00	42,32	1.750.000.000,00	42,74	1.750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan (%)	16,63	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.250.000.000,00		3.250.000.000,00		3.250.000.000,00		3.250.000.000,00		3.250.000.000,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah objek wisata (Unit)	67	69	70	1.250.000.000,00	71	1.250.000.000,00	72	1.250.000.000,00	73	1.250.000.000,00	74	1.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	39,407	42,184	43,798	1.700.000.000,00	45,412	1.700.000.000,00	47,026	1.700.000.000,00	48,640	1.700.000.000,00	50,254	1.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	0,021	0,022	0,023		0,024		0,025		0,026		0,027		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku usaha pariwisata (Orang)	460	540	620	300.000.000,00	700	300.000.000,00	780	300.000.000,00	860	300.000.000,00	940	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					96.827.323.273,00		101.377.323.273,00		105.927.323.273,00		110.477.323.273,00		110.527.323.273,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.392.323.273,00		45.392.323.273,00		45.392.323.273,00		45.392.323.273,00		45.392.323.273,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pertanian (Perkebunan)	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	11.600.750.952,00	100	11.600.750.952,00	100	11.600.750.952,00	100	11.600.750.952,00	100	11.600.750.952,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	75,40	77	78		79		80		81		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan)	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100	33.791.572.321,00	100	33.791.572.321,00	100	33.791.572.321,00	100	33.791.572.321,00	100	33.791.572.321,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	74,15	74,20	74,25		74,30		74,35		74,40		74,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					18.000.000.000,00		20.000.000.000,00		22.000.000.000,00		24.000.000.000,00		24.000.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (%)	-	-	1	18.000.000.000,00	1	20.000.000.000,00	1	22.000.000.000,00	1	24.000.000.000,00	1	24.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (%)	-	-	0,67		0,67		0,67		0,67		0,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan (%)	0	15	17		19		21		23		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					12.050.000.000,00		14.100.000.000,00		16.150.000.000,00		18.200.000.000,00		18.250.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) (%)	20	25	25	12.050.000.000,00	25	14.100.000.000,00	25	16.150.000.000,00	25	18.200.000.000,00	25	18.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan (%)	20	20	20		40		60		80		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	-	-	25	1.500.000.000,00	25	1.500.000.000,00	25	1.500.000.000,00	25	1.500.000.000,00	25	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	25	25	25	15.000.000.000,00	25	15.000.000.000,00	25	15.000.000.000,00	25	15.000.000.000,00	25	15.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan (%)	1,7	47	47		47		47		47		47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					385.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan atas izin usaha perkebunan yang diterbitkan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan atas Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan (%)	30	30	40	385.000.000,00	55	385.000.000,00	65	385.000.000,00	75	385.000.000,00	100	385.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4.500.000.000,00		5.000.000.000,00		5.500.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	0	20	4.500.000.000,00	22	5.000.000.000,00	25	5.500.000.000,00	28	6.000.000.000,00	30	6.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani (%)	14	9	12		14		14		14		14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					22.553.423.707,00		26.553.423.707,00		26.553.423.707,00		26.553.423.707,00		26.553.423.707,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.603.423.707,00		14.603.423.707,00		14.603.423.707,00		14.603.423.707,00		14.603.423.707,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perdagangan	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	14.603.423.707,00	100	14.603.423.707,00	100	14.603.423.707,00	100	14.603.423.707,00	100	14.603.423.707,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	77,40	77,80	78,20		78,60		79,00		79,40		79,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	49,26	55	60	650.000.000,00	65	650.000.000,00	70	650.000.000,00	75	650.000.000,00	80	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.500.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	9,45	10,8	10,8	1.500.000.000,00	10,8	5.000.000.000,00	12,1	5.000.000.000,00	12,1	5.000.000.000,00	12,1	5.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	98,84	98,89	98,94	1.400.000.000,00	98,99	1.400.000.000,00	99,03	1.400.000.000,00	99,07	1.400.000.000,00	99,11	1.400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00		4.050.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pertumbuhan volume penjualan produk lokal berorientasi ekspor (%)	-	3	3,25	4.050.000.000,00	3,50	4.050.000.000,00	3,75	4.050.000.000,00	4	4.050.000.000,00	4,25	4.050.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					250.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	26,02	31,02	36,02	250.000.000,00	41,02	450.000.000,00	46,02	450.000.000,00	51,02	450.000.000,00	56,02	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					100.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Pertumbuhan UMKM/IKM yang memasarkan produk melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi (%)	2,50	3	3,25	100.000.000,00	3,50	400.000.000,00	3,75	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4,25	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.350.000.000,00		2.925.000.000,00		2.925.000.000,00		2.925.000.000,00		2.925.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.100.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (%)	-	3,5	3,75	1.100.000.000,00	4	2.600.000.000,00	4,25	2.600.000.000,00	4,50	2.600.000.000,00	4,75	2.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					50.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha industri yang terkendali (%)	-	8	11	50.000.000,00	14	125.000.000,00	17	125.000.000,00	20	125.000.000,00	23	125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	50	60	70	200.000.000,00	75	200.000.000,00	80	200.000.000,00	85	200.000.000,00	90	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Penyelesaian Lahan Transmigrasi yang Bersertifikat (%)	19,7	32,95	43,39	150.000.000,00	51,84	150.000.000,00	61,28	150.000.000,00	70,72	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					111.121.998.284,00		111.121.998.284,00		111.121.998.284,00		111.121.998.284,00		111.121.998.284,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					95.831.998.284,00		95.831.998.284,00		95.831.998.284,00		95.831.998.284,00		95.831.998.284,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	79,10	79,25	79,50	95.831.998.284,00	79,75	95.831.998.284,00	79,85	95.831.998.284,00	79,95	95.831.998.284,00	80,00	95.831.998.284,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Sekretariat Daerah
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase tersusunnya dokumen ketatalaksanaan yang berkualitas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Laporan)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase tersusunnya laporan Evaluasi Pelayanan Publik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	73,49	73,69	74,02		74,7		74,9		75,3		75,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					11.790.000.000,00		11.790.000.000,00		11.790.000.000,00		11.790.000.000,00		11.790.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah	Persentase batas wilayah daerah bermasalah yang terfasilitasi (%)	100	100	100	11.000.000.000,00	100	11.000.000.000,00	100	11.000.000.000,00	100	11.000.000.000,00	100	11.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kesepakatan kerjasama dalam negeri yang aktif diimplementasikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase perkara yang difasilitasi bantuan hukum (%)	91,38	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Nilai)	-	3,01	3,01		3,02		3,03		3,03		3,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pasangan Isbat Nikah masyarakat kurang mampu yang difasilitasi (%)	100	100	100	790.000.000,00	100	790.000.000,00	100	790.000.000,00	100	790.000.000,00	100	790.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Juara kafilah STQ/MTQ Tingkat Provinsi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Partisipasi Peserta STQ/MTQ Kafilah Kecamatan di Tingkat Kabupaten (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Kabupaten/Kota Zakat (IKKZ) (Indeks)	0,67	0,67	0,7		0,72		0,74		0,78		0,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (%)	100	100	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase BUMD/BLUD berpredikat sehat (%)	66,66	66,66	66,66		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%)	86	88,75	89		90,50		92		93,50		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga yang Terpasang (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Perkembangan Harga (%)	1,59	2,50	2,50		2,00		2,00		1,50		1,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					92.506.210.364,00		92.506.210.364,00		92.506.210.364,00		92.506.210.364,00		92.506.210.364,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					57.506.210.364,00		57.506.210.364,00		57.506.210.364,00		57.506.210.364,00		57.506.210.364,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat DPRD	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	80	80	80	57.506.210.364,00	90	57.506.210.364,00	90	57.506.210.364,00	90	57.506.210.364,00	90	57.506.210.364,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai)	80	80	80		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	80	80	80		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	80	80	80		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	80	80	80		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00	
1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan 2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	80	80	80	35.000.000.000,00	90	35.000.000.000,00	90	35.000.000.000,00	90	35.000.000.000,00	90	35.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	80	80	80		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	80	80	80		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					24.963.065.452,00		24.963.065.452,00		24.963.065.452,00		24.963.065.452,00		24.963.065.452,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.263.065.452,00		19.263.065.452,00		19.263.065.452,00		19.263.065.452,00		19.263.065.452,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	19.263.065.452,00	100	19.263.065.452,00	100	19.263.065.452,00	100	19.263.065.452,00	100	19.263.065.452,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	78,50	79,30	79,40		79,50		79,60		79,70		79,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	3.200.000.000,00	100	3.200.000.000,00	100	3.200.000.000,00	100	3.200.000.000,00	100	3.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					848.349.736.550,00		848.349.736.550,00		848.349.736.550,00		848.349.736.550,00		848.349.736.550,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					43.885.402.550,00		43.885.402.550,00		43.885.402.550,00		43.885.402.550,00		43.885.402.550,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan (Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100	19.330.431.051,00	100	19.330.431.051,00	100	19.330.431.051,00	100	19.330.431.051,00	100	19.330.431.051,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	78,50	78,70	78,95		79,02		79,60		80		80,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan (Pengelolaan Pendapatan Daerah)					24.554.971.499,00		24.554.971.499,00		24.554.971.499,00		24.554.971.499,00		24.554.971.499,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	65,50	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	80,45	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	80,85	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	80,95	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	-		-		-		-		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					796.564.334.000,00		796.564.334.000,00		796.564.334.000,00		796.564.334.000,00		796.564.334.000,00	
1) Meningkatnya tata kelola anggaran 2) Meningkatnya tata kelola perbendaharaan 3) Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	30	796.564.334.000,00	30	796.564.334.000,00	30	796.564.334.000,00	30	796.564.334.000,00	30	796.564.334.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	41,04	40,47	40,50		40,60		40,65		40,70		40,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	77,62	91,63	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	58,13	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Tersalurnya Bantuan Keuangan Sektor Pendidikan														
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	10,20	10,30	10,40	2.100.000.000,00	10,50	2.100.000.000,00	10,60	2.100.000.000,00	10,70	2.100.000.000,00	10,80	2.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					5.800.000.000,00		5.800.000.000,00		5.800.000.000,00		5.800.000.000,00		5.800.000.000,00	
1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan 2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan 3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	10,57	12,23	12,53	5.800.000.000,00	12,85	5.800.000.000,00	13,17	5.800.000.000,00	13,51	5.800.000.000,00	14,05	5.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					20.807.513.215,00		20.807.513.215,00		20.807.513.215,00		20.807.513.215,00		20.807.513.215,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.507.513.215,00		13.507.513.215,00		13.507.513.215,00		13.507.513.215,00		13.507.513.215,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	13.507.513.215,00	100	13.507.513.215,00	100	13.507.513.215,00	100	13.507.513.215,00	100	13.507.513.215,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	77,78	78,00	79,00		80,00		81,00		82,00		83,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					7.300.000.000,00		7.300.000.000,00		7.300.000.000,00		7.300.000.000,00		7.300.000.000,00	
1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase capaian kinerja ASN (%)	88	90	91	7.300.000.000,00	92	7.300.000.000,00	93	7.300.000.000,00	94	7.300.000.000,00	95	7.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN (%)	0,40	0,38	0,38		0,37		0,36		0,35		0,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	60	62,5	65		68		70		72		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	persentase pengisian ASN berdasarkan formasi Kebutuhan (%)	70	73	75		76		78		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Terisinya jabatan pimpinan tinggi pratama, administrasi dan jabatan fungsional (%)	83	85	85		86		87		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi (%)	75	78	79		80		82		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Menimngkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	90	90	90	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
1. Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah 3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	90	90	90	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					46.979.658.556,00		47.979.658.556,00		49.979.658.556,00		50.979.658.556,00		50.979.658.556,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.979.658.556,00		22.979.658.556,00		22.979.658.556,00		22.979.658.556,00		22.979.658.556,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Inspektorat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100	22.979.658.556,00	100	22.979.658.556,00	100	22.979.658.556,00	100	22.979.658.556,00	100	22.979.658.556,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	-		-		-		-		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					20.000.000.000,00		21.000.000.000,00		23.000.000.000,00		24.000.000.000,00		24.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan serta kinerja instansi pemerintah melalui pencegahan, efektivitas tindak lanjut pengawasan dan perbaikan tata kelola yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas KKN	Perangkat Daerah yang memeroleh nilai SAKIP minimal BB (Predikat)	65	67	69	20.000.000.000,00	74	21.000.000.000,00	76	23.000.000.000,00	78	24.000.000.000,00	78	24.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Opini BPK RI terhadap LKPD (Predikat)	WDP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase audit kepatuhan terhadap perangkat daerah (%)	50	55	60		65		68		70		73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan dan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendampingan dan asistensi yang efektif, efisien dan akuntabel	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3	3	4.000.000.000,00	3	4.000.000.000,00	3	4.000.000.000,00	3	4.000.000.000,00	3	4.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3	3,05	3,10		3,12		3,15		3,17		3,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perangkat daerah yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM (Predikat)	WBK	WBK	WBK		WBK		WBK		WBK		WBK		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					67.181.548.276,00		67.796.848.276,00		68.394.948.276,00		68.698.548.276,00		69.063.548.276,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					67.181.548.276,00		67.796.848.276,00		68.394.948.276,00		68.698.548.276,00		69.063.548.276,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sekayu)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	10.393.197.271,00	100	10.393.197.271,00	100	10.393.197.271,00	100	10.393.197.271,00	100	10.393.197.271,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	-		-		-		-		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lais)	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100	4.662.812.602,00	100	4.662.812.602,00	100	4.662.812.602,00	100	4.662.812.602,00	100	4.662.812.602,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	66,80	66,81	66,82		66,83		66,84		66,85		66,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Babat Toman)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	5.508.364.359,00	100	5.508.364.359,00	100	5.508.364.359,00	100	5.508.364.359,00	100	5.508.364.359,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	65,30	65,50	66		67		68		69		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Keluang)	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100	100	100	4.399.715.357,00	100	4.399.715.357,00	100	4.399.715.357,00	100	4.399.715.357,00	100	4.399.715.357,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	-		-		-		-		70,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sanga Desa)	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100	5.357.329.434,00	100	5.357.329.434,00	100	5.357.329.434,00	100	5.357.329.434,00	100	5.357.329.434,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	64,55	65	66		67		68		69		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Plakat Tinggi)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	3.398.751.049,00	100	3.398.751.049,00	100	3.398.751.049,00	100	3.398.751.049,00	100	3.398.751.049,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	67,45	69,40	-		-		-		-		70,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Batanghari Leko)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	3.824.082.613,00	100	3.824.082.613,00	100	3.824.082.613,00	100	3.824.082.613,00	100	3.824.082.613,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sungai Keruh)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	3.403.917.330,00	100	3.403.917.330,00	100	3.403.917.330,00	100	3.403.917.330,00	100	3.403.917.330,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Sungai Lilin)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	4.976.341.020,00	100	4.976.341.020,00	100	4.976.341.020,00	100	4.976.341.020,00	100	4.976.341.020,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	-		-		-		-		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Bayung Lencir)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	4.847.287.099,00	100	4.847.287.099,00	100	4.847.287.099,00	100	4.847.287.099,00	100	4.847.287.099,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai)	63	64	65		66		67		68		69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lalan)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	3.970.000.000,00	100	3.985.000.000,00	100	4.000.000.000,00	100	4.015.000.000,00	100	4.030.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Tungkal Jaya)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	-	2.800.000.000,00	-	3.082.000.000,00	-	3.482.000.000,00	-	3.682.000.000,00	70,01	3.915.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Lawang Wetan)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	3.806.000.000,00	100	4.124.300.000,00	100	4.307.400.000,00	100	4.396.000.000,00	100	4.513.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	67,65	70	70,50		71		71,5		72		72,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Babat Supat)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	95	95	95	3.433.046.380,00	95	3.433.046.380,00	95	3.433.046.380,00	95	3.433.046.380,00	95	3.433.046.380,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	61,75	64	67		70		73		76		79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Jirak Jaya)	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	2.400.703.762,00	100	2.400.703.762,00	100	2.400.703.762,00	100	2.400.703.762,00	100	2.400.703.762,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten (Nilai)	80	90	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Efektifnya pelaksanaan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sanga Desa) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais (%)	90	92	95		96		97		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sungai Lilin (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Bayung Lencir (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sekayu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Bayung Lencir (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Babat Supat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak Jaya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Efektifnya penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	Persentase Penyelesaian Konflik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais) (%)	90	92	95		96		97		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec.Jirak Jaya) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Terbinanya Pemerintahan Desa	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais (%)	90	92	95		96		97		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi (%)	15	15	15		15		15		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					18.714.478.483,00		18.714.478.483,00		18.714.478.483,00		18.714.478.483,00		18.714.478.483,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.164.478.483,00		8.164.478.483,00		8.164.478.483,00		8.164.478.483,00		8.164.478.483,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	8.164.478.483,00	100	8.164.478.483,00	100	8.164.478.483,00	100	8.164.478.483,00	100	8.164.478.483,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	75,80	75,85	75,90		75,95		76,00		76,05		76,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					7.300.000.000,00		7.300.000.000,00		7.300.000.000,00		7.300.000.000,00		7.300.000.000,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Masyarakat dan Kader Partai Politik (%)	-	20	40	7.300.000.000,00	60	7.300.000.000,00	80	7.300.000.000,00	100	7.300.000.000,00	100	7.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	55	60	65	150.000.000,00	70	150.000.000,00	75	150.000.000,00	80	150.000.000,00	85	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Penyelesaian Konflik Umat Beragama (%)	-	70	75	400.000.000,00	80	400.000.000,00	85	400.000.000,00	90	400.000.000,00	90	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial (%)	100	100	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					**4.583.133.439.759**		**4.865.393.543.317**		**5.167.538.865.849**		**5.491.311.518.056**		**5.491.627.089.056**	

Sumber: SIPD RI Kab. Muba, diolah.

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah merupakan langkah strategis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian visi dan misi kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatannya. Tingkat keberhasilan tersebut diukur melalui akumulasi pencapaian indikator hasil (outcome) program pembangunan daerah secara tahunan maupun indikator capaian mandiri setiap tahunnya, sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terwujud.

Indikator Kinerja adalah alat pengukuran spesifik yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai dasar penilaian, indikator kinerja digunakan dalam keseluruhan proses manajemen pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator-indikator ini menjadi parameter utama dalam menentukan prioritas pembangunan serta alat pemantauan dan evaluasi keberhasilan RPJMD.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan untuk mengukur pencapaian visi-misi secara menyeluruh yang telah diamanatkan kepada pemerintah daerah. Selain itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait evaluasi kinerja dan RPJMD.

Dengan demikian, penetapan indikator kinerja daerah tidak hanya bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga untuk memberikan arah strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis serta menjaga kesinambungan pembangunan menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Instrumen ini juga menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data dan capaian, mendukung optimalisasi perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengukur kinerja pada hakikatnya merupakan upaya untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang telah direncanakan. Proses ini menjadi elemen penting dalam manajemen pemerintahan, terutama ketika hasil penilaian keberhasilan atau kegagalan tersebut dikaitkan dengan mekanisme reward dan punishment. Hal ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sistem Pengukuran Kinerja adalah sebuah mekanisme yang dirancang untuk menilai, membandingkan, dan memantau kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara sistematis dan berkesinambungan. Proses pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan rencana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi capaian yang diraih. Dengan demikian, instansi pemerintah dapat mengetahui sejauh

mana mereka memenuhi sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Terdapat dua pendekatan dalam pengukuran kinerja, yaitu:

1. Pengukuran Mandiri *(Self-Assessment):* Evaluasi ini dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, di mana penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukurannya ditentukan secara internal. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi instansi untuk menilai kinerjanya berdasarkan parameter yang telah mereka tetapkan.
2. Pengukuran Eksternal: Berbeda dengan pengukuran mandiri, evaluasi eksternal melibatkan pihak luar untuk menyusun rencana, melaksanakan, dan menentukan ukuran kinerja. Pendekatan ini biasanya dilakukan untuk memastikan objektivitas dan memberikan perspektif independen terhadap kinerja instansi.

Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicators, KPI)* merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam konteks pemerintahan, indikator ini menjadi parameter utama dalam mengukur keberhasilan visi, misi, dan strategi yang dijalankan instansi pemerintah. Sementara itu, Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja melibatkan kegiatan manajemen untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target yang telah ditentukan menggunakan indikator kinerja. Sebagai contoh, di Kabupaten Musi Banyuasin, pengukuran

kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator yang telah dirumuskan secara spesifik. Indikator-indikator ini memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi alat evaluasi untuk menentukan langkah perbaikan ke depan.

Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang efektif, pemerintah daerah tidak hanya dapat memastikan akuntabilitas tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sistem ini memfasilitasi perencanaan yang lebih baik, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta evaluasi yang mendalam sebagai dasar perbaikan dan inovasi.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Musi Banyuasin 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.00-5.20	5.02-5.25	5.04-5.30	5.08-5.35	5.10-5.40
2.	Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks	85	86,67	90	93,33	93,33
3.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	100	100	100	100	100
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	64,69	64,94	65,2	65,45	65,7
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,02	74,7	74,9	75,3	75,59
6.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,6	3,71	3,82	3,93	4
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,07	73,10	73,33	73,50	74,00
8.	Tingkat Kemiskinan	(%)	11,78	11,23	10,69	10,14	9,59

Sumber : SIPD Kab. Muba, diolah

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD), merupakan landasan penting dalam pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); serta Tata Cara Perubahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut.

Target capaian indikator kinerja daerah tidak hanya merefleksikan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan secara tahunan, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas strategi pembangunan secara keseluruhan. Dengan memadukan capaian tahunan dan evaluasi periodik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pembangunan selaras dengan arah kebijakan yang lebih besar.

Sebagai contoh, Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan indikator kinerja berdasarkan urusan pemerintahan yang dijalankan. Indikator ini mencakup berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Capaian dari indikator kinerja daerah tersebut menggambarkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dengan menetapkan Indikator Kinerja Daerah yang jelas, terukur, dan relevan, pemerintah daerah tidak hanya dapat mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Proses ini juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data *(evidence-based decision making),* sehingga kebijakan pembangunan dapat diadaptasi secara dinamis sesuai kebutuhan dan tantangan di lapangan. Adapun indikator yang dimaksud disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Musi Banyuasin 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	68,17	64,44	64,69	64,94	65,2	65,45	65,7	
2	Penurunan Emisi GRK	TonCO2e	-	1.828.335,80	2.012.452,45	2.224.591,60	2.460.414,98	2.688.752,02	2.943.543,17	
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	94,67	97,5	100	100	100	100	100	
4	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	115,65	109,25	108,39	107,53	106,67	105,81	104,95	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	1,2	2	2,5	3	4	5	7,5	
6	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79,48	80,97	82,04	83,11	84,18	85,26	86,33	
7	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	45,7	46,22	46,72	47,2	47,68	48,14	48,59	
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,43	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	
9	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120	1.160	1.200	
10	Persentase Penanganan sampah	%	43,1	44	45	46	47	47,5	48	
11	Rasio Penduduk	%	105,40	105,20	105	104,80	104,60	104,40	104,20	
12	Angka kriminalitas	Angka	861	861	855	849	843	837	831	
13	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	24	24	28	32	35	39	43	
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,174	1,128	1,085	1,042	1,006	0,969	0,934	
15	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	4,41	4,24	4,07	3,90	3,73	3,56	3,39	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	4.50-5.00	5.00-5.20	5.02-5.25	5.04-5.30	5.08-5.35	5.10-5.40	
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,27	72,67	73,07	73,10	73,33	73,50	74,00	
3	Tingkat Kemiskinan	(%)	12,88	12,33	11,78	11,23	10,69	10,14	9,59	
4	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,7	0,73	
5	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,57	63,3	63,97	64,5	64,99	65,41	65,8	
6	Penyelesaian Konflik antar umat beragama (%)	%	70	70	75	80	85	85	90	
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,42	74,52	74,55	75,25	75,55	76,00	76,25	
8	PDRB per kapita	Rp. Juta Per Tahun	133	145	160	175	180	186	191	
9	Rasio Gini	Indeks	0,314	0,310	0,308	0,305	0,304	0,302	0,300	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,95	7,95	8,09	8,22	8,32	8,42	8,5	
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,13	2,08	2,03	1,98	1,94	1,9	1,89	
12	Prevalensi Stunting (%)	%	16,5	13	12	11	10	9	8	
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,33	12,51	12,69	12,9	13,1	13,3	13,5	
14	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	40,70	42,70	45,27	49,84	54,41	58,98	63,55	
15	Angka Literasi/Numerasi	%	74,71	75,77	76,83	77,88	78,94	80	80,06	
16	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,54	0,52	0,50	0,46	0,42	0,38	0,32	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	6,2	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	
18	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	74,71	74,81	76,76	78,71	80,66	82,61	84,56	
19	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,47	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	41,65	52,53	53,53	54,53	55,53	56,53	57,53	
21	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)	%	1,04	2,6	6,25	8,85	11,45	14,06	16,66	
22	Indeks Entropy Theil	Indeks	8,415	8,415	8,410	8,400	8,395	8,390	8,385	
23	Persentase benda,bangunan,struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	1,21	4,26	7,31	10,36	13,41	16,46	19,51	
24	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,33	0,35	0,4	0,42	0,45	0,58	0,6	
25	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	53,32	53,33	53,34	53,35	53,36	53,36	
26	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: ii) Numerasi	%	34,56	59,53	60,50	61	61,50	62	62,70	
27	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca	%	36,15	56,24	56,80	57,50	58	58,50	59	
28	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	4	10	16	23	29	35	38	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
29	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	32	76	75	74	73	72	70	
30	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	4	8	7	6	6	5	4	
31	Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Predikat	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara Paripurna	Wistara Paripurna	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks	80,55	82,5	85	86,67	90	93,33	93,33	
2	Persentase Desa Mandiri	%	39,74	32,75	33,62	33,62	34,50	34,93	35,50	
3	Indeks Perkembangan Harga	%	1,59	2,5	2,5	2	2	1,5	1,5	
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	30,97	40,01	45,02	46,55	50,12	54,7	60,01	
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	%	72,72	72,72	72,98	73,24	73,5	73,76	74,00	
6	Rasio Kewirausahaan	Persentase	5,27	5,48	5,70	5,92	6,16	6,40	6,65	
7	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29	
8	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	11,92	12,56	12,86	13,15	13,45	13,74	14,04	
9	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	12,09	12,26	12,45	12,64	12,84	13,03	13,23	
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Miliar)	Rp	25.451,72	26.000	27.000	28.500	29.500	31.000	32.000	
11	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0,5	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	
12	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,3	3,37	3,4	3,44	3,47	3,5	3,52	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
13	Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	Nilai	69.071,93	69.071,93	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00	
14	Total Kredit/PDRB	(%)	2,4	2,4	2,8	3,5	3,9	4,0	4,5	
15	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	10,57	12,23	12,53	12,85	13,17	13,51	14,05	
16	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	3,80	3,80	4,00	4,40	4,70	4,90	5,30	
17	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	49.76:49.76	49.76:49.46	49.46:49.08	49.08:48.06	48.06:48.08	48.08:47.56	47.56:47.1	
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	
19	Net Ekspor Barang dan Jasa (Miliar)	Rp	-5.217,89	-5.095,50	-4.975,98	-4.859,27	-4.745,29	-4.633,98	-4.525,29	
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,85	70,85	71,85	72,6	73,1	73,6	74,1	
21	Proporsi PDRB Sektor Jasa (ADHB)	%	4,66	4,66	4,66	4,67	4,67	4,68	4,68	
22	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,3045	0,3055	0,3065	0,3075	0,3085	0,3095	0,3105	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,37	3,51	3,6	3,71	3,82	3,93	4	
3	Survey Penilaian Integritas	Nilai	64,41	65,41	66,41	67,41	68,41	69,41	70,41	
4	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,57	4,6	4,63	4,66	4,69	4,72	4,77	
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,62	3,7	-	-	-	-	-	
6	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	-	2,2	2,8	3,0	3,2	3,4	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86,08	86,5	86,7	86,8	86,9	87	87,01	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	78,2	78,98	80,23	81,58	82,90	84,23	87,25	

Sumber : SIPD Kab. Muba, diolah

4.2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Permendagri Nomor 19 Tahun 2024). Indikator Kinerja Kunci harus bersifat SMART, yaitu:

1. *Specific* : Jelas dan fokus pada hasil utama;
2. *Measurable*: Dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif;
3. *Achievable*: Dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia;
4. *Relevant*: Relevan dengan sasaran strategis yang diukur;
5. *Time bound*: Memiliki periode waktu yang jelas untuk pencapaian.

Adapun indikator kinerja kunci pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
2.	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	positif	%	79,57	82,54	85,50	88,47	91,44	93,99	96,54
3.	Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	positif	%	96,89	97,23	97,56	97,90	98,24	98,58	98,92
4.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	positif	%	66,95	71,71	72,46	73,21	73,96	74,71	75,46
5.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	positif	%	68,09	68,50	68,91	69,32	69,73	70,15	70,56
6.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	positif	Nilai	56,65	59.15 - 59.15	61.65-61.65	64.15-64.15	66.65-66.65	69.15-69.15	71.65-71.65
7.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	63,92	65,02	66,12	67,22	68,32	69,42	70,52

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	positif	Nilai	51,64	54,54	57,44	60,34	63,24	66,14	69,04
9.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	58,67	60,17	61,67	63,17	64,67	66,17	67,67
10.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
11.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	positif	%	87,80	88,90	91,90	92,90	93,90	94,90	95,50
12.	Iklim Kebinekaan SMP	positif	Nilai	68,70	69,70	70,70	71,70	72,70	73,70	74,70
13.	Iklim Inklusivitas SMP	positif	Nilai	55,93	58,33	60,73	63,13	65,53	67,93	70,33
14.	Iklim Kebhinekaan SD	positif	Nilai	70,62	71,79	72,69	73,62	74,62	75,62	76,62
15.	Iklim Inklusivitas SD	positif	Nilai	59,37	61,87	64,37	66,87	69,37	71,87	74,37
16.	Iklim Keamanan SMP	positif	Nilai	68,69	70,19	71,69	73,19	74,69	76,19	77,69
17.	Iklim Keamanan SD	positif	Nilai	75,16	76,06	76,96	77,86	78,76	79,66	80,56
18.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
19.	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	komulatif	%	69,61	90	90	90	90	90	90
20.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	komulatif	(%)	90	90	90	90	90	90	90
21.	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	komulatif	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
22.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
23.	Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	positif	%	84,17	84,17	85,33	86,67	88	88,67	90
24.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	positif	%	61,16	62,11	63,18	65,28	67,52	68,94	70,12
25.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	komulatif	%	94,67	97,5	100	100	100	100	100
26.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	komulatif	(%)	1,2	2	2,5	3	4	5	7,5
27.	Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi (air limbah) yang layak	komulatif	%	83,67	85,20	86,42	88,15	89,62	91,05	92,70
28.	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan (%)	positif	%	54,09	54,09	56,78	59,48	62,17	64,87	67,56
29.	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	positif	m3/detik	0,2000	0,2000	0,2275	0,2550	0,2825	0,3100	0,3375
30.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
31.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	komulatif	%	72,72	72,72	72,98	73,24	73,5	73,76	74
32.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
33.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	positif	Persentase	0,52	0,69	0,90	1,16	1,46	1,80	2,19

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
34.	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
35.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
36.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
37.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	negatif	%	62,02	78	80	82	84	86	86
38.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
39.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	negatif	%	95,76	100	100	100	100	100	100
40.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	negatif	Persentase	58,11	100	100	100	100	100	100
41.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
42.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	positif	%	69,85	70,85	71,85	72,60	73,10	73,60	74,10
43.	Persentase Sengketa Perusahaan yang diselesaikan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
44.	Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan		%	50	55	60	70	80	90	100
45.	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	positif	Orang	64.766	64.860	64.885	64.900	64.910	64.930	6.500
46.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	positif	%	5	10	15	20	25	30	35
47.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	positif	Persentase	68,04	69	70	70,5	71	71,5	72
48.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	positif	%	41,65	52,53	53,53	54,53	55,53	56,53	57,53
49.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	positif	%	24,34	25,34	26,36	27,36	28,36	29,36	30
50.	Persentase pekerja informal	negatif	%	59,93	58,93	57,93	56,93	55,93	54,93	53,93
51.	Persentase pekerja formal (%)	positif	%	40,07	42	42,30	43,07	44,07	45,07	46,06
52.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
53.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	negatif	Indeks	0,54	0,52	0,50	0,46	0,42	0,38	0,32
54.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	positif	Indeks	83,78	84,19	84,60	85,01	85,42	85,83	86,24
55.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	positif	Indeks	76,97	78,47	79,97	81,47	82,97	84,47	85,97
56.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
57.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	positif	Indeks	59,86	60,36	60,86	61,36	61,86	62,36	62,86

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
58.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	positif	%	54,84	54,90	54,95	55,10	55,20	55,30	55,40
59.	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	positif	Nilai	700	700	720	740	760	780	800
60.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
61.	Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS)	positif	Indeks	-	42,00	42,20	42,40	42,60	42,80	43,00
62.	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	positif	%	-	4	4	4	4	4	4
63.	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023		%	43.41:43.41	43.50:43.50	43.65:43.65	43.70:43.70	43.75:43.75	44.00:44.00	44.00:44.00
64.	Skor Pola Pangan Harapan	positif	Nilai	92,8	92,84	92,86	92,88	93	93,02	93,04
65.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	negatif	%	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
66.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	positif	Persentase	94,57	94,60	94,70	94,80	94,90	95,00	95,20
67.	Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	positif	%	0	50	50	50	50	50	50
68.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
69.	Persentase Pengawasan Izin Usaha Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
70.	Indeks Kualitas Air		Indeks	58,42	65,13	65,33	65,53	65,73	65,93	66,13
71.	Indeks Kualitas Lahan	positif	Indeks	67,51	67,93	68,00	68,07	68,14	68,21	68,28
72.	Indeks Kualitas Udara		Indeks	91,49	61,91	62,31	62,71	62,11	63,51	63,92
73.	Kontribusi Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2-e)	positif	TonCO2e	-	1.828.335,80	2.012.452,45	2.224.591,6	2.460.414,98	2.688.752,02	2.943.543,17
74.	Persentase Penanganan sampah	positif	%	43,1	44	45	46	47	47,5	48
75.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH		%	100	100	100	100	100	100	100
76.	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai		%	100	100	100	100	100	100	100
77.	Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan		%	100	100	100	100	100	100	100
78.	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
79.	Persentase Luasan RTH yang dikelola	positif	%	20	20	20	20	20	20	20
80.	Penurunan intensitas emisi GRK	positif	(%)	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00
81.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		Indeks	68,17	64,44	64,69	64,94	65,2	65,45	65,7
82.	Pengelolaan sampah (Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%)	positif	%	43,1	44	45	46	47	47,5	48

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
83.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
84.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	positif	Indeks	94,11	95	95	95	95	95	95
85.	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
86.	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
87.	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	99	99	99	99	99	99	99
88.	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan		%	60	62	64	66	68	70	80
89.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
90.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
91.	Persentase desa yang memiliki Bumdes	positif	%	0	68,32	71,43	74,53	77,64	80,74	80,74
92.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	komulatif	Persentase	82	85	87	89	91	93	95
93.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
94.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
95.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
96.	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
97.	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
98.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
99.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	positif	%	71,60	72,00	72,10	73,50	73,60	73,70	73,80
100.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	positif	Indeks	83,10	83,50	83,90	84,20	84,50	84,70	84,90
101.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	%	6,89	6,85	6,83	6,80	6,77	6,75	6,72
102.	Indeks Lansia Berdaya	positif	Indeks	57,50	57,80	58,00	58,10	58,30	58,50	58,70
103.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	positif	Persentase	20	25	35	55	70	80	100
104.	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	negatif	Persentase	11,70	11,35	11,00	10,57	10,53	10,25	10,00
105.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	43,2	42.5-42	42-41.7	41.7-41.3	41.3-41	41-40.8	40.8-40.8

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
106.	Persentase penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		%	18	19	19,5	20	20,5	21	21,5
107.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
108.	Rasio Prasarana Fasilitas LLAJ	positif	%	41	41	53	64	76	88	100
109.	Persentase Transportasi Yang Nyaman dan Laik Jalan	positif	%	77	52	60	65	70	75	80
110.	Persentase Penurunan Daerah Rawan Kecelakaan	negatif	%	-8	-8	-9	-10	-11	-13	-14
111.	Persentase Sarana Prasarana ASDP dalam kondisi baik	positif	%	35	35	47	62	72	83	90
112.	PersentaseTerpeliharanya Sarana Prasarana Bandar Udara	positif	%	50	50	50	50	50	50	75
113.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
114.	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	positif	%	-	25	35	45	55	65	75
115.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
116.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	positif	%	-	3	3,3	3,6	4	4,3	4,6
117.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	positif	Persentase	0,0138	1,3316	1,3416	1,3516	1,3616	1,3716	1,3816
118.	Persentase usaha mikro yang memanfaatkan teknologi digital	positif	%	0,80	1,30	2,10	2,90	3,80	5,00	6,30
119.	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan	positif	%	-	0,0829	0,1216	0,1581	0,1918	0,2228	0,2510
120.	Persentase Koperasi Aktif	positif	Persentase	51,43	33,35	34,18	34,82	36,93	38,86	40,76
121.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	positif	%	14,29	10,57	11,99	13,39	14,77	16,13	17,47
122.	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	positif	Persentase	-	-	-	8,93	10,34	11,73	13,10
123.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	positif	Persentase	28,57	18,13	19,52	20,86	22,16	23,39	24,75
124.	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	positif	%	10,58	12,32	13,92	15,35	16,61	17,69	18,60
125.	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	positif	Persentase	50,16	50,50	51,00	51,50	52,00	52,50	53,00
126.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/ Kota (%)	positif	%	1,4400	1,4400	1,5594	1,6788	1,7981	1,9175	2,0130
127.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (%)	positif	%	0,00892	0,00892	0,00893	0,00895	0,00896	0,00897	0,00898
128.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
129.	Persentase penerbitan izin dan non izin sesuai SOP	positif	%	89	90	91	92	93	94	95
130.	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha	positif	%	95,91	96,49	97,66	98,25	98,83	99,42	99,55
131.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha	positif	%	62	62,50	65	70	80	90	95
132.	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	positif	%	102,07	102,09	102,11	102,13	102,15	102,17	102,19

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
133.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	positif	%	99,36	99,40	99,43	99,45	99,48	99,50	99,55
134.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	positif	%	30	30	30	40	40	50	55
135.	Persentase Peningkatan Investor yang Berminat Sesuai Ketentuan	positif	%	15	15	30	35	40	45	50
136.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
137.	Persentase pemuda yang berwirausaha	positif	%	0,24	0,24	0,37	0,46	0,54	0,62	0,70
138.	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	positif	%	18,95	18,95	19,88	20,81	21,74	22,67	23,60
139.	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat provinsi	negatif	Peringkat	2	2	2	2	2	2	1
140.	Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi	positif	%	30,60	30,60	46,35	62,10	77,85	93,60	100
141.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
142.	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data	positif	%	-	20	40	60	80	100	100
143.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi	positif	%	-	100	100	100	100	100	100
144.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
145.	Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
146.	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	negatif	%	0	25	35	45	55	65	75
147.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
148.	Terlestarikannya cagar budaya	positif	%	34	65	85	105	125	145	187
149.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	positif	Persentase	4	9	15	20	25	30	35
150.	Persentase benda,bangunan,struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	komulatif	%	1,21	4,26	7,31	10,36	13,41	16,46	19,51
151.	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)	komulatif	%	1,04	2,6	6,25	8,85	11,45	14,06	16,66
152.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
153.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	positif	Nilai	81,61	83,30	84,99	86,67	88,36	90,05	91,74
154.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
155.	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	positif	Ton	37.339,17	36.489	36.522	36.556	36.589	36.622	36.655
156.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
157.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	positif	%	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29
158.	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih	positif	%	29,5	29,5	33,9	38,3	42,7	47,1	51,5

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
159.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	positif	Ribu Orang	0,021	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026
160.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
161.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	positif	Ton	6.513	6.546	6.579	6.612	6.645	6.678	6.678
162.	Jumlah Produksi Padi	positif	Ton	285.366	334.779	336.452	338.134	339.824	341.523	343.230
163.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	positif	Ton	177.670	177.670	179.447	181.241	181.241	183.053	183.053
164.	Jumlah Produksi Jagung	positif	Ton	40.136	41.109	41.314	41.520	41.727	41.935	42.144
165.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	positif	Ton	1.955,11	1.974,66	1.994,41	2.014,35	2.034,50	2.054,84	2.075,38
166.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit	positif	Ton	470.899	475.985	476.366	476.747	477.128	477.509	477.509
167.	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	positif	Ton	4.361	4.491	4.626	4.765	4.908	5.055	5.206
168.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Gambir		Ton	8,16	8,16	8,20	8,24	8,28	8,32	8,32
169.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		%	-	10	10	10	10	10	10
170.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		%	53,00	53,02	53,52	54,08	54,69	55,37	56,21
171.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani		%	14	21	24	27	30	33	33
172.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
173.	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tingkat Kabupaten	negatif	%	5,85	5,5	5,5	5,25	5,25	5	5
174.	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	positif	Persentase	26,02	31,02	36,02	41,02	46,02	51,02	56,02
175.	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	positif	%	92,7	93	94	95	96	97	98
176.	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	positif	%	26,25	32	38	48	57,5	67	76
177.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
178.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	positif	%	11,92	12,56	12,86	13,15	13,45	13,74	14,04
179.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	positif	%	50	60	70	75	80	85	90
180.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	positif	%	73,49	75	76	77	78	79	80
181.	Persentase data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kab/Kota dalam SIINas terhadap total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kab/Kota	positif	%	48,88	50	52	54	56	58	60
182.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
183.	Persentase Penyelesaian Lahan Transmigrasi yang Bersertifikat	positif	%	19,7	32,95	43,39	51,84	61,28	70,72	100

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
184.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
185.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten	positif	Nilai	69,07	70,5	71	71,5	72	72,5	73
186.	Indeks Reformasi Hukum	positif	Indeks	86,08	86,5	86,7	86,8	86,9	87	87,01
187.	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	positif	%	95	95	100	100	100	100	100
188.	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
189.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	positif	Indeks	80	80	80	85	90	95	100
190.	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	positif	%	80	80	80	90	90	90	90
191.	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	positif	%	80	80	80	90	90	90	90
192.	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	positif	Persentase	80	80	80	90	90	90	90
193.	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	positif	Persentase	80	80	80	90	90	90	90
194.	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	positif	%	80	80	80	90	90	90	90
195.	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	positif	Persentase	80	80	80	90	90	90	90
196.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten	positif	Nilai	80	80	80	90	90	90	90
197.	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	positif	%	80	80	80	90	90	90	90
198.	5.01 - PERENCANAAN									
199.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
200.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
201.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
202.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
203.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
204.	5.02 - KEUANGAN									
205.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	positif	Nilai	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
206.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	positif	%	10,57	12,23	12,53	12,85	13,17	13,51	14,05
207.	Persentase aset daerah yang tertib	positif	%	99,61	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85	99,90
208.	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP		%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
209.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	komulatif	%	10,57	12,23	12,53	12,85	13,17	13,51	14,05
210.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	negatif	%	11,67	8,73	8,70	8,65	8,60	8,55	8,50
211.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
212.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	negatif	%	7,78	7,73	7,23	6,73	6,23	5,73	5,23
213.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
214.	Manajemen Aset	positif	Kategori	4	4	4	4	4	4	4
215.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
216.	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	negatif	%	4,28	3,78	3,28	2,78	2,28	1,78	1,28
217.	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	negatif	%	61,83	41,89	41,00	40,90	40,75	40,00	39,55
218.	5.03 - KEPEGAWAIAN									
219.	Persentase capaian kinerja ASN	positif	%	88	90	91	92	93	94	95
220.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
221.	Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	positif	%	90	90	90	90	90	90	90
222.	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	positif	%	90	90	90	90	90	90	90
223.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
224.	Survey Penilaian Integritas	positif	Angka	64,41	65,41	66,41	67,41	68,41	69,41	70,41
225.	Perangkat daerah yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM	positif	Predikat	WBK	WBK	WBK	WBK	WBK	WBK	WBK
226.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Nilai	3	3,05	3,10	3,12	3,15	3,17	3,20
227.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	positif	Level	3	3	3	3	3	3	3
228.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	positif	Nilai	14,93	15,00	15,30	15,90	16,00	16,50	17,00
229.	Perangkat Daerah yang memeroleh nilai SAKIP minimal BB	positif	Predikat	65	67	69	74	76	78	78
230.	Opini BPK RI terhadap LKPD	positif	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
231.	Persentase audit kepatuhan terhadap perangkat daerah	positif	%	50	55	60	65	68	70	73
232.	7.01 - KECAMATAN									
233.	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
234.	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
235.	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Babat Supat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
236.	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
237.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
238.	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
239.	Persentase keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin	positif	%	80	80	80	80	80	85	85
240.	Persentase Ormas, LSM dan OKP yang lulus verifikasi	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100
241.	Persentase Pencegahan Potensi Konflik Sosial	positif	%	70	70	75	80	85	90	90
242.	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	komulatif	%	0	100	100	100	100	100	100
243	Indeks Harmoni Indonesia (IhaI)	Positif	Angka	NA	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20

Sumber : SIPD Kab. Muba, diolah

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahapan pertama dari RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2045 untuk terwujudnya Kabupaten Musi Banyuasin **"MUBA SERASAN 2045: Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan"** serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 mempunyai visi **"MUBA Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin"** juga menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan jangka pendek. Oleh karena itu, konsistensi, kerja sama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Prinsip perencanaan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), Ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time Bound*);
2. Prinsip pelaksanaan program menggunakan prinsip akuntabilitas yaitu, taat dan sesuai aturan, sesuai dengan norma profesionalisme, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas;

3. Prinsip pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan dengan cara pemantauan dan supervisi dengan melakukan desk monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi program, desk akuntabilitas dan transparansi agar pelaksanaan program terukur, efektif dan efisien serta berkeadilan;
4. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas (*Money Follow Program*).

5.1.1 Kerangka Pengendalian

Selain itu, salah satu tantangan dalam implementasi perencanaan pembangunan saat ini dalam bentuk *Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity* atau lebih dikenal sebagai VUCA. Kerugian atas unsur ketidakpastian ini (risiko) dapat berwujud dalam berbagai hal aktivitas. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam implementasi program unggulan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Dalam konteks RPJMD, manajemen risiko meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko. Untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi, maka implementasi RPJMD perlu didukung oleh: 1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; 2. konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; 3) keberpihakan pembangunan

kepada rakyat; dan 4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin.

Proses manajemen risiko dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) komunikasi dan konsultasi, dilakukan kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal; 2) identifikasi risiko, dilakukan dengan cara mengidentifikasikan kejadian, penyebab dan konsekuensi dari risiko yang dapat menghambat capaian RPJMD; 3) analisis risiko dengan menentukan tingkat kemungkinan terjadinya risiko; 4) evaluasi risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dan upaya untuk mengatasi risiko; 5) mitigasi risiko dilakukan dengan mencari alternatif mitigasi risiko yang terbaik, menyusun rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi risiko dan 6) pemantauan dan review terhadap seluruh aspek proses manajemen risiko.

RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan rencana kerja pemerintah tahunan (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Dalam proses penyusunan RPJMD, Kabupaten Musi Banyuasin juga melakukan koordinasi dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat guna penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di daerah.

5.1.2 Mekanisme Perubahan

Pada pelaksanaan RPJMD, melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan seluruh komponen masyarakat. Dalam pelaksanaannya juga perlu

dilakukan pengawasan, monitoring dan pengendalian secara berkala, dan apabila dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi apabila terjadinya bencana, gejolak eksternal dan internal, target RPJMD dapat dimutakhirkan. Perubahan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian dengan dinamika yang terjadi. Mekanisme evaluasi pengendalian terhadap perubahan dan penyesuaian tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan.

5.2. PEMBIAYAAN

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin ini diharapkan dapat didukung oleh sumber pendanaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pendanaan/pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBD Kabupaten Musi Banyuasin dan optimalisasi pembiayaan sektor keuangan non publik. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dan peningkatan kapasitas pembiayaan sekntor non publik melalui (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain dana pensiun, asuransi dan pasar modal), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah dan inovasi pembiayaan yang merespon perubahan iklim serta produk pembiayaan berbasis transaksi seperti bursa karbon, bursa

plastik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan daya tarik investasi daerah dapat dilakukan dengan memberikan insentif berupa kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan daya tarik investasi di Kabupaten Musi Banyuasin diupayakan untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta lapangan kerja di daerah.

Dokumen RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah penjabaran janji politik yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do"a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Metadata

RPJMD

LAMPIRAN

METADATA INDIKATOR RPJMD
KAB MUSI BANYUASIN TAHUN 2025–2030

A. Indikator Makro Pembangunan

1. Pertumbuhan ekonomi (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. BPS mengukur pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha selama 1 tahun; dan melalui pendekatan pengeluaran, yaitu semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).
Rumus Perhitungan	$r_{(t-1)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{t-1}}$ x 100% Keterangan: $r_{(t-1)}$ = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun yang dihitung $PDRB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4,94	4,50-5,00	5,00-5,20	5,02-5,25	5,04-5,30	5,08-5,35	5,10-5,40

2. Tingkat kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM)
Rumus Perhitungan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana: α = 0 z = garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Kab. Muba. Tingkat Kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Tahunan (Maret)
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12,88	12,33	11,78	11,23	10,69	10,14	9,59

3. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)
Definisi	**Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. **Pengangguran** yaitu: (1) penduduk aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK}$ x 100% Keterangan: *TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)* *PP = Jumlah pengangguran (orang)* *PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)*
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)
Sumber Data	SAKERNAS, BPS
Frekuensi	Tahunan Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2,13	2,08	2,03	1,98	1,94	1,9	1,89

4. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Definisi	United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan IPM sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, tingkat pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak.
Rumus Perhitungan	$indeksX_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - (X_{(i-min)})}{(X_{(i-maks)} - (X_{(i-min)})}$ Dimana: $X_{(i,j)}$: Komponen IPM ke-i dari daerah j $X_{(i\text{- min})}$: Nilai minimum komponen IPM ke-i $X_{(i\text{- maks})}$: Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i
Interpretasi	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, maka menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
72,27	72,67	73,07	73,1	73,33	73,5	74

5. Pendapatan per kapita (ADHB) (PDRB per Kapita)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$

Keterangan:
$PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
populasi = jumlah penduduk regional
t = periode</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Badan Pusat Statistik</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>133</td><td>145</td><td>160</td><td>175</td><td>180</td><td>186</td><td>191</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6. Rasio gini (indeks)

Nama Indikator	Rasio Gini (Indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Rasio Gini (Indeks)</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Rasio Gini = 1 $\sum_{i=1}^{n}(p - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$

Dimana:
p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i
Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i
n = jumlah observasi</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunya selang nilai antar 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:
1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang;
2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang;
3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.
Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan (Maret)</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>0,314</td><td>0,31</td><td>0,308</td><td>0,305</td><td>0,304</td><td>0,302</td><td>0,3</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan/Tutupan Lahan (IKL/IKTL)</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Keterangan:
IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA : Indeks Kualitas Air
IKU : Indeks Kualitas Udara
IKL/IKTL : Indeks Kualitas Lahan/Tutupan Lahan</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:

<table>
<tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x < 90</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x < 70</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x < 50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x < 25</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, lahan/tutupan lahan yang dilakukan perhitungannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>68,17</td><td>64,44</td><td>64,69</td><td>64,94</td><td>65,2</td><td>65,45</td><td>65,7</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

8. Penurunan Emisi GRK (Ton CO2-e)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Penurunan Emisi GRK (Ton CO2-e)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Penurunan emisi GRK daerah (kumulatif) adalah akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Penurunan Emisi GRK (tahun t) = akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun t.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Penurunan Emisi GRK kumulatif (ton CO2 ekuivalen)</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>0</td><td>1.828.335,8</td><td>2.012.452,45</td><td>2.224.591,6</td><td>2.460.414,98</td><td>2.688.752,02</td><td>2.943.543,17</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Lihat indikator makro pembangunan nomor 1

2. Indeks Pelayanan Infrastuktur

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Infrastuktur
Definisi	Indeks Pelayanan Infarastruktur menentukan komponen atau indikator yang relevan untuk dinilai.instrumen pengukuran pelayanan infrastruktur dalam Kabupaten yang merupakan nilai komposit dari persentase dari 3 indikator infrastuktur dasar yaitu 1. Jalan dalam Kondisi mantap 2. Indeks akses air minum dan 3. akses sanitasi layak peningkatan pelayanan infrastruktur yang baik akan menentukan tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan Ke depan
Rumus Perhitungan	$IPI = \frac{\%\ jalan\ dalam\ kondisi\ mantap + \%\ akses\ air\ minum + \%\ sanitasi\ layak\ (air\ limbah)}{3}$
Interpretasi	Indeks pelayanan infrastruktur menunjukkan kemampuan daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dalam wilayah kabupaten. IPI yang baik ditunjukkan dengan nilai yang meningkat di setiap tahunnya (positif). Sumber data berasal dari Perangkat Daerah terkait atau perangkat daerah yang membidangi Infrastruktur
Sumber Data	Bappeda Kab. Muba
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
80,55	82,5	85	86,67	90	93,33	93,33

3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Ketenteraman dan Ketertiban</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibumlinmas yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>IPT = (Wbencana X Ibencana) + (Wtrantibum X Itrantibum) + (Wsatlinmas X Isatlinmas) + (Wkebakaran X Ikebakaran)</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>sebuah penilaian untuk mengukur tingkat kesiapan dan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah, khususnya dalam bidang bencana seperti pelayanan kebencanaan, dan kualitas pengelolaan tata kelola kewilayahan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Lihat indikator makro pembangunan nomor 7

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Definisi	Merupakan sistem penilaian untuk mengukur kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah, yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Indeks ini bertujuan untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Reformasi Birokrasi</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Hasil Evaluasi oleh Kemenpan RB dengan klasifikasi hasil (predikat) sebagai berikut:
- Predikat AA untuk nilai > 90 - 100 Sangat Memuaskan
- Predikat A untuk nilai > 80 - 90 Memuaskan
- Predikat BB untuk nilai > 70 - 80 Sangat Baik
- Predikat B untuk nilai > 60 - 70 Baik
- Predikat CC untuk nilai > 50 - 60 Cukup (Memadai)
- Predikat C untuk nilai > 30 - 50 Kurang
- Predikat D untuk nilai > 0 - 30 Sangat Kurang</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>penilaian terhadap tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dari korupsi, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas tinggi. Semakin tinggi nilai atau predikat Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) suatu instansi, semakin baik pula kinerja reformasi birokrasinya. IRB dinilai berdasarkan berbagai komponen, termasuk akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, dan nilai persepsi korupsi.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian PAN-RB, Bag. Organisasi Setda Kab. Muba</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan dengan laporan setiap triwulan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>73,49</td><td>73,69</td><td>74,02</td><td>74,7</td><td>74,9</td><td>75,3</td><td>75,59</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Definisi	IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Pengukuran IDSD ini mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran *Global Competitivenes Indeks* (GCI) 2019

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
	dari *World Economic Forum* (WEF) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. 
Rumus Perhitungan	$Skor_{i,d} = (N_{i,d} - NR_i / NT_i - NR_i)$ X 5, dimana: Keterangan: $Skor_{i,d}$ adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d; NR_i adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NT_i adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).
Interpretasi	Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD distandarisasi dengan rumus min-max sehingga didapat skor 0-5 pada seluruh indikator. Skor pilar daya saing daerah merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. Skor akhir IDSD dihitung melalui agregasi skor pilar daya saing dengan menggunakan metode yang sama. Penting untuk dicatat bahwa skor di level indikator, pilar dan indeks tidak dapat dihitung apabila terdapat data yang tidak tersedia.
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3,37	3,51	3,6	3,71	3,82	3,93	4

7. Indeks Pembangunan Manusia

Lihat indikator makro pembangunan nomor 4

8. Tingkat kemiskinan

Lihat indikator makro pembangunan nomor 2

C. Indikator Kinerja Kinerja Daerah (IKD)

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Lihat indikator makro pembangunan nomor 7

b. Penurunan Emisi GRK (Ton CO2-e)

Lihat indikator makro pembangunan nomor 8

c. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>sedianya air minum yang bersih, sehat, cukup jumlahnya, terus menerus, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Air minum aman harus memenuhi kriteria kualitas mikrobiologis, kimiawi, fisika, dan radioaktif yang ditetapkan dalam peraturan kesehatan, serta berasal dari sumber yang bebas dari pencemaran.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$\frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ dengan\ akses\ air\ minum}{Total\ Rumah\ Tangga}\ x\ 100\%$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Persentase rumah tangga terhadap air minum merupakan nilai yang menggambarkan semakin tinggi persentase semakin baik layanan rumah tangga di wilayah tersebut</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,Dinas Kesehatan
- Perumdam Tirta Randik</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>94,67</td><td>97,5</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

d. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \text{ x } \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan: *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: – lndeks <13 adalah Rendah – lndeks 13 - 144 adalah Sedang

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Risiko Bencana (IRB)</td></tr>
<tr><td></td><td>– lndeks >144 adalah Tinggi</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>1. BNPB
2. BPBD Kab. Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>115,65</td><td>109,25</td><td>108,39</td><td>107,53</td><td>106,67</td><td>105,81</td><td>104,95</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

e. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Kondisi ketika sebuah rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi, termasuk kloset dengan leher angsa, yang terhubung dengan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah terpusat (SPALD-T) yang berfungsi dengan baik, serta pengelolaan lumpur tinjanya dilakukan secara aman dan tidak mencemari lingkungan. Kriteria utama dari sanitasi aman adalah pengelolaan air limbah domestik dan lumpur tinja yang amanKriteria utama dari sanitasi aman adalah pengelolaan air limbah domestik dan lumpur tinja yang aman, memastikan hasilnya dapat dikembalikan ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan
Rumus Perhitungan	$\frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ dengan\ sanitasi\ aman}{Total\ Rumah\ Tangga}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin besar persentase akses masyarakat dengan sanitasi aman menggambarkan semakin baik pengelolaan sanitasi masyarakat. Tinggi >90% Sedang 60%-89% Rendah <60%
Sumber Data	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan
Target	

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1,2	2	2,5	3	4	5	7,5

f. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Definisi	Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketesediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
Rumus Perhitungan	Mengkompositkan nilai indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang telah distandarisasi
Interpretasi	Indikator dalam penentuan Indeks Ketahanan Pangan adalah: 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih 2. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran 4. Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik 5. Rata-rata sekolah Perempuan diatas 15 tahun 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga Kesehatan terhadap Tingkat kepadatan penduduk 8. Persentase balita dengan tinggi badan dibawah standar (stunting) 9. Angka harapan hidup pada saat lahir
Sumber Data	Badan Pangan Nasional
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
79,48	80,97	82,04	83,11	84,18	85,26	86,33

g. Kepadatan Penduduk

Nama Indikator	Kepadatan Penduduk (Orang/km2)
Definisi	**Kepadatan penduduk** adalah ukuran yang menunjukkan **jumlah rata-rata penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu dalam satu satuan luas**. Biasanya dinyatakan dalam **jumlah jiwa per kilometer persegi (jiwa/km²)**. Kepadatan penduduk memberikan gambaran tentang bagaimana penyebaran penduduk dalam suatu wilayah — apakah wilayah tersebut tergolong padat, sedang, atau jarang penduduk. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya.
Rumus Perhitungan	$$Kepadatan\ penduduk = \frac{Jumlah\ penduduk}{luas\ wilayah\ (km2)}$$ • **Jumlah Penduduk** = total penduduk yang tinggal di suatu wilayah (jiwa) • **Luas Wilayah** = total luas geografis wilayah tersebut (km²) • **Satuan hasil** = jiwa/km²
Interpretasi	**Interpretasi Kepadatan Penduduk** 1. **Kepadatan Tinggi** (misalnya > 1.000 jiwa/km²) o Menunjukkan banyak orang tinggal di area yang relatif kecil. o Biasanya terjadi di kota-kota besar atau pusat ekonomi. o Dampak: risiko kemacetan, kekurangan perumahan, tekanan terhadap fasilitas umum (air, listrik, transportasi, kesehatan), dan lingkungan. 2. **Kepadatan Sedang** (sekitar 100 – 1.000 jiwa/km²) o Menunjukkan distribusi penduduk yang lebih seimbang. o Cocok untuk pengembangan wilayah urban-suburban. 3. **Kepadatan Rendah** (< 100 jiwa/km²) o Wilayah jarang penduduk, seperti daerah pedesaan, pegunungan, atau terpencil. o Dampak: mungkin sulit mengakses layanan publik, biaya infrastruktur lebih tinggi per kapita.

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Kepadatan Penduduk (Orang/km2)</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- BPS
- PDAK Dirjen Dukcapil Kemendagri
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muba</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>45,7</td><td>46,22</td><td>46,72</td><td>47,2</td><td>47,68</td><td>48,14</td><td>48,59</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

h. Indeks Ketahanan Daerah

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah
Definisi	Indeks Ketahanan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai Tingkat kemapuan suatu daerah dalam menghadapi, mengurangi risiko serta memulihkan diri dari bencana
Rumus Perhitungan	(50% kesiapsiagaan penanggulangan bencana + 30% evakuasi korban bencana dengan sarana dan prasarana tanggap darurat + 20% penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana) *) Keterangan:*) menunjukkan pembobotan yang dilakukan oleh OPD ybs mengingat tidak ada formula baku dari BNPB
Interpretasi	Perangkat pengukuran resiliensi pertama yang dikonversi melalui sistem ini adalah IKD yang memiliki struktur hirarki antara lain terdiri dari 7 prioritas, yaitu: 1. Prioritas 1 (6%): Perkuatan kebijakan dan kelembagaan 2. Prioritas 2 (6%): Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 3. Prioritas 3 (7,5%): Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 4. Prioritas 4 (10,5%): Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Prioritas 5 (21%): Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 6. Prioritas 6 (35%): Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 7. Prioritas 7 (14%): Pengembangan sistem pemulihan bencana
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Muba

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Ketahanan Daerah</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target *)

*) = target masih bersifat angka sementara karena tiap tahun akan diverifikasi oleh BNPB</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>0,43</td><td>0,5</td><td>0,51</td><td>0,52</td><td>0,53</td><td>0,54</td><td>0,55</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

i. Konsumsi Listrik per Kapita

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$$ Keterangan: KLpk: Konsumsi listrik per kapita KLpln: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PLN KLnonpln: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non-PLN P: Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non-PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS; 2. PT PLN

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.000	1.000	1.040	1.080	1.120	1.160	1.200

j. Persentase penanganan sampah

Nama Indikator	Persentase Penanganan Sampah
Definisi	Rasio terukur antara jumlah sampah yang berhasil ditangani dengan total timbulan sampah dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	*Persentase penanganan sampah:* $= \frac{Jumlah\ sampah\ yg\ ditangani\ TPA}{Jumlah\ Timbulan\ Sampah\ menurut\ SIPSN}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Indikator ini diperlukan utk mengukur kinerja pengelolaan sampah skala kabupaten dan ibukota kabupaten. 10. Tinggi (>80%): menunjukkan pengelolaan sampah sudah baik, sistem pengangkutan berjalan lancer, fasilitas TPS/TPA memadai, partisipasi Masyarakat tinggi 11. Sedang (50-80%): penanganan masih parsial; ada wilayah terlayani, tapi sebagian sampah belum tertangani optimal 12. Rendah (<50%): banyak sampah menumpuk atau dibuang sembarangan; infrastruktur dan kesadaran Masyarakat masih lemah
Sumber Data	SIPSN dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muba
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
43,1	44	45	46	47	47,5	48

k. Rasio Penduduk

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Rasio Penduduk</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin, atau disebut juga rasio jenis kelamin (sex ratio), adalah ukuran demografis yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
Biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan. Rasio ini penting untuk mengetahui keseimbangan gender dalam masyarakat, yang dapat berdampak pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$Rasio\ Jenis\ Kelamin = \left(\frac{Jumlah\ Penduduk\ Perempuan}{JUmlah\ Penduduk\ Laki-Laki}\right) x\ 100$

Keterangan:
Jumlah Penduduk Laki-laki = total penduduk laki-laki di suatu wilayah.
Jumlah Penduduk Perempuan = total penduduk perempuan di wilayah yang sama.
Hasil akhir menunjukkan jumlah laki-laki per 100 perempuan.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td><table><tr><th>Nilai Rasio</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>= 100</td><td>Komposisi gender seimbang: jumlah laki-laki dan perempuan sama.</td></tr><tr><td>> 100</td><td>Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Umum terjadi di banyak negara karena faktor biologis (laki-laki sedikit lebih banyak saat lahir) atau migrasi kerja.</td></tr><tr><td>< 100</td><td>Perempuan lebih banyak dari laki-laki. Bisa disebabkan oleh harapan hidup perempuan yang lebih tinggi, atau migrasi laki-laki keluar wilayah.</td></tr></table>
Faktor yang Mempengaruhi Rasio Jenis Kelamin
Kelahiran alami – Biasanya sedikit lebih banyak laki-laki lahir dibanding perempuan (sekitar 105:100).
Kematian – Perempuan cenderung memiliki harapan hidup lebih tinggi.
Migrasi – Misalnya, laki-laki lebih sering bermigrasi untuk bekerja ke wilayah tertentu.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Rasio Penduduk</td></tr>
<tr><td></td><td>4. Kebijakan populasi atau sosial – Seperti preferensi gender di beberapa negara (contoh: Tiongkok dan India masa lalu).
5. Perang atau konflik – Dapat menyebabkan jumlah laki-laki menurun drastis di wilayah tertentu.

Dampak Sosial dari Ketidakseimbangan Rasio Jenis Kelamin
• Rasio terlalu tinggi (laki-laki dominan):
o Potensi kesulitan dalam pembentukan keluarga.
o Ketimpangan sosial dan potensi konflik sosial akibat kompetisi antar laki-laki.
• Rasio terlalu rendah (perempuan dominan):
o Beban perawatan dan sosial bisa meningkat (terutama jika perempuan menjadi mayoritas lansia).
o Tantangan dalam pemenuhan tenaga kerja tertentu (jika sektor didominasi laki-laki).

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah indikator penting dalam studi kependudukan yang menggambarkan keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan.
Melalui analisis rasio ini, pemerintah dan perencana pembangunan dapat:
• Menyusun kebijakan sosial dan ekonomi berbasis gender.
• Merespons kebutuhan layanan publik yang berbeda antar gender.
• Mengantisipasi dampak jangka panjang dari ketimpangan gender dalam populasi.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- BPS
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>105,4</td><td>105,2</td><td>105</td><td>104,8</td><td>104,6</td><td>104,4</td><td>104,2</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

l. Angka Kriminalitas

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Angka Kriminalitas</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang.
Angka kriminalitas adalah jumlah kejahatan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun itu, lalu dikalikan 10.000</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Angka Kriminalitas (AK):

$AK = \frac{Jumlah\ kejahatan\ dalam\ satu\ tahun}{Jumlah\ penduduk\ tahun\ itu}$ x 10000</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi AK, maka semakin rendah tingkat keamanan suatu daerah, dan sebaliknya</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BPS</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>861</td><td>861</td><td>855</td><td>849</td><td>843</td><td>837</td><td>831</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

m. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td><u>Pengumpulan Sampah</u>
Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

<u>Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah</u> adalah rumah tangga yang:

• Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali</td></tr>
</table>

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
	dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. ***Catatan:*** Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara; (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga **Cara perhitungan:** $$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS}\ x\ 100\%$$ Keterangan: PRTLA: Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah</td></tr>
<tr><td></td><td>JRTS: Jumlah rumah tangga seluruhnya

Sumber: diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS;
2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muba.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>24</td><td>24</td><td>28</td><td>32</td><td>35</td><td>39</td><td>43</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

n. Laju Pertumbuhan Penduduk

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Penduduk
Definisi	Laju pertumbuhan penduduk adalah persentase kenaikan atau penurunan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu, biasanya dihitung per tahun. Pertumbuhan penduduk terjadi karena dua faktor utama: 1. Pertambahan alami (selisih antara kelahiran dan kematian). 2. Migrasi (selisih antara pendatang dan orang yang pindah keluar). Laju ini memberikan gambaran seberapa cepat populasi bertambah (atau berkurang), dan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, penyediaan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan), dan pengelolaan lingkungan.
Rumus Perhitungan	Laju Pertumbuhan Penduduk r $= \left(\frac{Pt-Po}{Po}\right) \quad x\ 100\ \%$ **Keterangan:** • Po = jumlah penduduk awal • Pt = jumlah penduduk pada akhir periode • r= laju pertumbuhan penduduk dalam persentase (%)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Laju Pertumbuhan Penduduk</td></tr>
<tr><td></td><td>• Periode waktu biasanya 1 tahun, namun bisa juga beberapa tahun (akan mempengaruhi interpretasi)</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Interpretasi Laju Pertumbuhan Penduduk
1. Laju Pertumbuhan Tinggi (> 2% per tahun)
o Indikasi populasi bertambah cepat.
o Dapat menyebabkan tekanan terhadap:
▪ Layanan publik (sekolah, rumah sakit).
▪ Lingkungan hidup.
▪ Ketersediaan lapangan kerja dan pangan.
o Diperlukan kebijakan pengendalian pertumbuhan seperti keluarga berencana.
2. Laju Pertumbuhan Sedang (1% – 2% per tahun)
o Cukup stabil.
o Umumnya dapat ditangani dengan infrastruktur dan layanan yang memadai.
o Masih perlu perencanaan jangka panjang.
3. Laju Pertumbuhan Rendah (< 1% per tahun)
o Populasi bertambah lambat, atau bahkan bisa berkurang.
o Di beberapa negara maju, ini bisa menimbulkan tantangan seperti:
▪ Populasi menua.
▪ Kekurangan tenaga kerja produktif.
o Diperlukan kebijakan insentif kelahiran atau imigrasi.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- BPS
- PDAK Dirjen Dukcapil Kemendagri
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muba</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>1,174</td><td>1,128</td><td>1,085</td><td>1,042</td><td>1,006</td><td>0,969</td><td>0,934</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

o. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalensi of Undernourishment)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)
Definisi	Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.
Rumus Perhitungan	$$PoU = \int_{x<MDER} f(x)\,dx$$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimun Dietery Energy Requirement*) F(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk uang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinyo
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4,41	4,24	4,07	3,9	3,73	3,56	3,39

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Lihat indikator makro pembangunan nomor 1

b. Indeks Pembangunan Manusia

Lihat indikator makro pembangunan nomor 4

c. Tingkat Kemiskinan

Lihat indikator makro pembangunan nomor 2

d. Indeks Zakat Nasional (IZN)

Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional (IZN)
Definisi	Sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan Gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan Masyarakat, serta dimensi makro yang berfokus pada kinerja Lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik.

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Zakat Nasional (IZN)</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>IZN = (0,30 x Indeks Dimensi Makro) + (0,70xIndeks Dimensi Makro)

Indeks Dimensi Makro (Bobot 30%). Indeks ini mengukur. kondisi eksternal dan ekosistem zakat di Tingkat nasional, yang terdiri dari tiga indikator utama:
- Regulasi : Bobot 40%
- Dukungan APBN/APBD: Bobot 20%
- Database lembaga zakat: Bobot 40%

Indeks Dimensi Mikro (Bobot 70%). Indeks ini mengukut kinerja pengelolaan zakat di Tingkat Lembaga, yang kemudian dipecah lagi berdasarkan beberapa variable:
- Pengumpulan zakat: komposisi 50% nilai pengumpulan dan 50% nilai pertambahan/pertumbuhan pengumpulan
- Penyaluran zakat: bobot 40% nilai penyaluran. Sisa bobot dibagi untuk nilai ACR (Awareness, Capacity, Responsibility), keterlambatan program sosial, keterlambatan program ekonomi, dan proporsi penyaluran di bidang dakwah.
- Indeks Dampak Zakat (Indeks Kesejahteraan BAZNAS): Bobot 50% dari Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB), dengan komponen yang terdiri dari:
a. Indeks kesejahteraan CIBEST: Bobot 50%
b. Modifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia): Bobot 20%
c. Indeks Kemandirian: Bobot 30%
Setiap indikator diukur menggunakan skala likert dan dihitung indeksnya, kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing hingga menghasilkan nilai IZN akhir.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Adapun nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0,00-1,00. Semakin rendah nilai indeks yang didapatkan berarti semakin buruk kinerja pengelolaan zakat pada variable/indikator/dimensi tersebut, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kinerja pengelolaan zakat pada variable/indikator dimensi tersebut. Berikut ini adalah kategori penilaian indeks zakat nasional yang dihasilkan:
<table>
<tr><td>Rentang Nilai</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>0,00-0,20</td><td>Beginner/Pemula</td></tr>
<tr><td>0,21-0,40</td><td>Developing/Berkembang</td></tr>
<tr><td>0,41-0,60</td><td>Stable/Stabil</td></tr>
<tr><td>0,61-0,80</td><td>Growth/Bertumbuh</td></tr>
<tr><td>0,81-1,00</td><td>Sustainde/Berkelanjutan</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BAZNAS</td></tr>
</table>

Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional (IZN)
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,7	0,73

e. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga
Definisi	Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan. Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga.
Rumus Perhitungan	Indeks Pembangunan Keluarga terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu: Kemandirian, Ketentraman dan Kebahagiaan keluarga. Dari 3 dimensi tersebut, terdiri dari 11 indikator dan 17 variabel. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: - iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40 - iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70 - iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. -
Interpretasi	iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan **keluarga tangguh, berkembang atau rentan.**

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga
Sumber Data	BKKBN dan Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB Kab. Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
62,57	63,3	63,97	64,5	64,99	65,41	65,8

f. Penyelesaian konflik antar umat beragama (%)

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Konflik Umat Beragama (%)
Definisi	Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah (*wikipedia*). Konflik dapat terjadi karena perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, struktur organisasi, tujuan, persepsi, dan lain-lain. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti: konflik antarsuku, konflik antar agama, konflik antar ras, konflik antar golongan, konflik ekonomi, konflik sosial, konflik politik, konflik budaya, konflik ideologi, konflik peran, dan sebagainya. Konflik sebagai suatu hal yang alamiah dan harus memahami bahwa konflik adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan beragama. Kita dapat mengembangkan moderasi beragam dan toleransi antar umat beragama, dan memperkenalkan budaya dan tradisi religi di Indonesia.
Rumus Perhitungan	$\%PKUB = \frac{PKUB\ yang\ dilakukan}{Jumlah\ Potensi\ KUB + Kejadian\ KUB} \text{x } 100\%$ Keterangan: PKUB : Penyelesaian Konflik Umat Beragama KUB. : Konflik Umat Beragama
Interpretasi	--

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Persentase Penyelesaian Konflik Umat Beragama (%)</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Badan Kesbangpol Kab. Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>70</td><td>70</td><td>75</td><td>80</td><td>85</td><td>85</td><td>90</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

g. Usia Harapan Hidup (UHH)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup/UHH (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	1. Sensus Penduduk (SP) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), BPS 2. Dinas Kesehatan
Frekuensi	SP : 10 tahunan SUPAS : 10 tahunan Dinkes : 1 tahunan

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup/UHH (tahun)
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
74,42	74,52	74,55	75,25	75,55	76	76,25

h. PDRB per kapita

Lihat indikator makro pembangunan nomor 5

i. Rasio Gini

Lihat indikator makro pembangunan nomor 6

j. Rata-rata lama sekolah

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)
Definisi	Rata-rata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun b. SD = 6 tahun c. SMP = 9 tahun d. SMA = 12 tahun e. D1/D2 = 14 tahun f. D3 = 15 tahun g. D4 = 16 tahun h. S1 = 17 tahun i. S2 = 19 tahun j. S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)</td></tr>
<tr><td></td><td>2. Masih sekolah di SD sampai dengna S1 = konversi ijazah terakhit + kelas terakhir – 1;
3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1;
4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir-1</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Rata – rata Lama Sekolah 15+ $= \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$

Keterangan:
P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas
x_i = Lama sekolah penduduk ke-i</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022=9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Susenas, BPS</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan (hasil survei bulan Maret pada setiap tahunnya)</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>7,95</td><td>7,95</td><td>8,09</td><td>8,22</td><td>8,32</td><td>8,42</td><td>8,5</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

k. Tingkat Pengangguran Terbuka

Lihat indikator makro pembangunan nomor 3

l. Prevalensi stunting

Nama Indikator	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: a. Sangat pendek: *Zscore* < -3,0 b. Pendek. :*Zscore* ≥-3,0 s/d *Zscore* < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara Perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%) PAB(5) P *stunting* $= \frac{JAB_{(5)P\ stunting}}{JAB_{(5)}}$ x 100% <u>Keterangan:</u> PAB(5) P *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita Pendek (*stunting*) JAB(5) *stunting.* : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) Pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara Perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%) PAB(5) SP *stunting* $= \frac{JAB_{(5)SP\ stunting}}{JAB_{(5)}}$ x 100% <u>Keterangan:</u> PAB(5) SP *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita Sangat pendek (*stunting*) JAB(5) SP *stunting.* : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) Pada waktu tertentu

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)</td></tr>
<tr><td></td><td>JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Cara Perhitungan (3)
Prevalensi stunting = PAB(5)P + PAB(5) SP</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Prevalensi stunting yang tinggi pada suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:
1. Kekurangan Gizi : stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.
2. Akses pelayanan kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
3. Kemiskinan: stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.
4. Pendidikan: tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
5. Faktor lingkungan: faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>SSGI
Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>SSGI : tahunan
Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>16,5</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

m. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut pada masa mendatang.
Rumus Perhitungan	*Harapan Lama Sekolah* $= FK \sum_{t=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t* P_i^t = Jumlah penduduk usia *t* pada tahun *t* i = Usia (7,8,...,*n*)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau secara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret pada setiap tahunnya)
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12,33	12,51	12,69	12,9	13,1	13,3	13,5

n. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun terkait pekerjaannya. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang turut dihasilkan pemerintah Indonesia pada forum Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Metodologi IMDI dilakukan secara kuantitatif dengan survei kepada responden individu dan industri secara tatap muka melalui kuisioner pada 514 kabupaten/kota. IMDI dihitung melalui 4 (empat) Pilar yaitu: Infrastruktur dan Ekosistem; Keterampilan Digital; Pemberdayaan; dan Pekerjaan.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>IMDI menggunakan skala 1-100.
Indeks ini dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memantau perkembangan masyarakat digital Indonesia dari tahun ke tahun. Hasil pengukuran indeks ini tidak ditujukan untuk membandingkan daya saing masyarakat digital antar daerah, melainkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fokus target berdasarkan indikator-indikator di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan di level kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia untuk merencanakan dan menetapkan program prioritas pembangunan SDM digital di wilayah masing-masing.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Informasi dan Komunikasi (https://imdi.sdmdigital.id/)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>40,70</td><td>42,70</td><td>45,27</td><td>49,84</td><td>54,41</td><td>58,98</td><td>63,55</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

o. Indeks pembangunan literasi masyarakat

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks pembangunan literasi masyarakat</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didefinisikan sebagai sebuah angka yang mencerminkan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan, yang ditunjukkan oleh rata-rata hasil pembagian antara Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dengan Aspek Masyarakat (AM) dibandingkan dengan masing-masing standar UPLM (UPLM 1, UPLM 2, UPLM 3, UPLM 4, UPLM 5, UPLM6, UPLM 7)</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:
$\frac{UPLM1+UPLM2+UPLM3+UPLM4+UPLM5+UPLM6+UPLM7)}{7}$ x 100</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini mengukur keberhasilan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai standar Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat lewat pengembangkan perpustakaan dan berbagai program terkait untuk menciptakan budaya membaca dan belajar sepanjang hayat, sehingga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>PERPUSNAS RI</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>74,71</td><td>74,81</td><td>76,76</td><td>78,71</td><td>80,66</td><td>82,61</td><td>84,56</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

p. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_p \times SE_p\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing-masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Ketimpangan Gender (IKG)</td></tr>
<tr><td></td><td>6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender
$$IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$$
Keterangan:
G_p = Indeks Perempuan
G_L = Indeks Laki-laki
MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan
MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun
PR_p = Persentase perempuan di legislatif
PR_L = Persentase laki-laki di legislatif
SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas
SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas
$TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja
$TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja
$HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik
IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi
IP = Indeks dimensi pemberdayaan
IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja
G_{PL} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik
IKG = Indeks Ketimpangan Gender</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretariat DPRD (Setwan)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>0,54</td><td>0,52</td><td>0,5</td><td>0,46</td><td>0,42</td><td>0,38</td><td>0,32</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

q. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>1) Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.
2) Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di kabupaten tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi).
3) Jenjang pendidikan tinggi mencakup:
a. Diploma I-IV
b. S1
c. S2
d. S2 Terapan
e. S3</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$$Proporsi\ penduduk\ berusia\ 15\ tahun\ ke\ atas\ yang\ berkualifikasi\ pendidikan\ tinggi = \frac{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas,\ yang\ lulus/berijazah\ pendidikan\ tinggi\ di\ Kabupaten\ X}{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas\ di\ Kabupaten\ X}\ X\ 100\%$$
Keterangan:
FK = Faktor koreksi pesantren
E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
P_i^t = Jumlah penduduk usia t pada tahun t
i = Usia (7,8,...,n)</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>- Positif
- Tingginya proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Susenas, Badan Pusat Statistik</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>6,2</td><td>6,2</td><td>6,3</td><td>6,4</td><td>6,5</td><td>6,6</td><td>6,7</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

r. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Perlindungan Anak (IPA)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks Perlindungan Anak (IPA)- yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$IPA = \sum_{j=1}^{5}(W_j \ x \ Indeks \ K_j)$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>terdiri dari 27 indikator yang mewakili 5 klaster KHA, yaitu: Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan); Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif); Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan); Klaster IV (Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang); dan Klaster V (Perlindungan Khusus). Penghitungan IPA dilakukan dengan tahapan proses seleksi indikator, normalisasi, penentuan bobot, tiap kluster dan tahapan penghitungan indeks, baik untuk setiap klaster maupun keseluruhannya. Nilai IPA berada pada rentang 0–100.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Klaster</th><th>Bobot Klaster IPA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hak Sipil dan Kebebasan</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</td><td>22%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Perlindungan Khusus</td><td>22%</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Bobot</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan BPS</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>63,47</td><td>65,5</td><td>66,5</td><td>67,5</td><td>68,5</td><td>69,5</td><td>70,5</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

s. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Cakupan Kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$\text{Cakupan Kepesertaan} = \frac{\text{Jumlah Peserta Aktif Jaminan Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja menggambarkan sejauh mana tenaga kerja (baik formal maupun informal) terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini menunjukkan proporsi pekerja yang sudah menjadi peserta dibandingkan dengan total angkatan kerja atau pekerja yang seharusnya terlindungi.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)
2. Badan Pusat Statistik (BPS)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunya dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>41,65</td><td>52,53</td><td>53,53</td><td>54,53</td><td>55,53</td><td>56,53</td><td>57,53</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

t. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)
Definisi	Warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage*, ICH) adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)
	keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya tak benda juga mencakup instrumen, objek, artefak, dan lingkungan budaya yang terkait dengan komunitas, kelompok, dan individu. Warisan budaya tak benda diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok untuk menanggapi lingkungan, interaksi manusia dengan alam dan sejarah, dan untuk memberikan rasa identitas yang berkelanjutan. Lima domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kabupaten Musi Banyuasin adalah: • Tradisi lisan dan ekspresi: seperti Bahasa: Melayu Musi • Seni pertunjukan seperti Tarian: Tari Setabik, Tari Burung Putih, Tari Mare-Mare, Tari Ulang-Ulang, Tari Sabung Ayam, Tari Mantang Parah, Tari Dana, Tari Nasib, Tari Lading, Tari Tinggan Due Belas, Tari Piring Lilin, Tari Babendi-bendi. • Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan: sedekah bumi • Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta: seperti Pengobatan: Besale (Pengobatan Tradisional di desa pulai gading kec.bayung lencir), tradisi pengobatan Duhut (Pengobatan Duhut dilakukan dengan cara pengurutan atau pemijitan dan memenfaatkan aneka racikan obat herbal alami yang berasal dari tumbuhan. Jenis- jenis penyakit yang biasa ditanggulangi dalam Pengobatan Duhut seperti patah tulang, nak anak (minta anak), nak anak lanang dan betine (minta anak laki-laki dan perempuan), tombong (peranakan keluar), kanker rahim, kedadak (sakit perut) dan lain-lain. Pewarisan pengobatan Duhut dapat diperoleh melalui dua cara; pertama diturunkan secara turun-temurun dengan melalui mimpi dan kedua dapat juga diperoleh melalui proses belajar di desa nganti Kec.Sanga Desa) • Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional seperti Jumputan Gambo: Jumputan Gambo adalah kain khas metode jumputan, diwarnai dengan dicelup getah gambir dan bakul tangkal
Rumus Perhitungan	$\%WBTB = \frac{WBTB\ yang\ ditetapkan}{Karya\ Budaya\ yang\ tercatat}$ x 100% Keterangan: WBTB : Warisan Budaya tak Benda

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)
Interpretasi	Semakin tinggi % Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan, semakin terkelolanya warisan budaya tak benda
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1,04	2,6	6,25	8,85	11,45	14,06	16,66

u. Indeks Entropy Theil

Nama Indikator	Indeks Entropy Theil
Definisi	Indeks Entropy Theil merupakan salah satu metode untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah. Penggunaan Indeks Entropy Theil sebagai ukuran ketimpangan ekonomi antar wilayah mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah (intra regional) dan antar daerah (inter regional) secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Kedua dengan menggunakan indeks ini dapat pula menghitung kontribusi 9dalam persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting. Data yang diperlukan untuk mengukur indeks ini yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah.
Rumus Perhitungan	$I_{intra} = \sum \frac{Y_i}{Y} . \log \ (\frac{Y_i}{Y}) / (\frac{X_i}{X})$ $I_{inter} = \sum \frac{Y_i}{Y} . Ti$ $T_i = \frac{Y_i}{Y} \text{Log} (\frac{Y_i}{Y})(\frac{X_i}{X})$ $\mathbf{I_{Theil} = I_{intra} + I_{inter}}$ Keterangan: $I_{intra.}$: Indeks Entropy Theil intra Region $I_{inter.}$: Indeks Entropy Theil inter Region

Nama Indikator	Indeks Entropy Theil
	$Y_{i.}$: PDRB per kapita di kecamatan i $Y_{.}$: PDRB per kapita Kabupaten Musi Banyuasin $X_{i.}$: Jumlah penduduk di kecamatan i X : Jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin
Interpretasi	Jika suatu wilayah atau kabupatem/kota memiliki Indeks Entropy Theil yang semakin besar berarti ketimpangan atau disparitas yang terjadi semakin besar pula. Sebaliknya apabila suatu wilayah kabupaten/kota memiliki Indeks Entropy Theil yang semakin kecil, maka ketimpangan akan semakin rendah pula atau dengan kata lain semakin merata.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8,415	8,415	8,410	8,400	8,395	8,390	8,385

v. Persentase benda,bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran

Nama Indikator	Persentase benda,bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran
Definisi	Benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang mencerminkan pemikiran dan perilaku. Obyek cagar budaya dapat dibagi menjadi lima jenis: 2) Benda cagar budaya: Benda alam atau buatan manusia, baik bergerak maupun tidak, yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Contoh benda cagar budaya antara lain gendang, meriam kuno, mahkota kerajaan, gong, parang, dan mangkok. 3) Bangunan cagar budaya: Susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap. Contoh bangunan cagar budaya antara lain benteng Marlborough, benteng Oranje, benteng Rotterdam, candi Borobudur, candi Prambanan, galeri nasional Indonesia, dan gedung kebangkitan nasional.

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Persentase benda,bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran</td></tr>
<tr><td></td><td>4) Struktur cagar budaya: Salah satu jenis objek cagar budaya.
5) Situs cagar budaya: Lokasi di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6) Kawasan cagar budaya: Salah satu jenis objek cagar budaya.

Agar dapat diusulkan sebagai cagar budaya, benda, bangunan, atau struktur harus memenuhi kriteria berikut:
• Berusia 50 tahun atau lebih;
• Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun;
• Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
• Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$\%CB = \frac{CB\ yang\ ditetapkan}{ODCB\ yang\ terdaftar}$ x 100%

Keterangan:
CB : benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya
ODCB : Obyek Diduga Cagar Budaya</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi % benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan, semakin terkelolanya Cagar Budaya</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>1,21</td><td>4,26</td><td>7,31</td><td>10,36</td><td>13,41</td><td>16,46</td><td>19,51</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

w. Indeks Keluarga Sehat

Nama Indikator	Indeks Keluarga Sehat
Definisi	Rumus untuk menghitung status keluarga berdasarkan 12 indikator kunci Kesehatan keluarga,Dimana IKS dihitung dwngan membagi jumlah indicator yang terpanuhi dengan jumlah total indicator, keluarga dikatagorikan sebagai keluarga sehat jika skor IKS>0.8.pra-sehat antara 0.5-0.8 dan tidak sehat jika skor<0.5
Rumus Perhitungan	(Total IKS Seluruh Puskesmas : Jmlh seluruh Puskesmas) X 100. Nilai indicator (1 jika ya.0 jika tidak) dibagi dengan jumlah total indicator dikurangi jumlah indicator yang tidak dinilai (N) atau bisa disederhanakan menjadi, jumlah indicator yang terpanuhi (Y)/(12-jumlah N)
Interpretasi	*Penilaian status Kesehatan keluarga yang dikelompokan menjadi tiga tingkatan: sehat (IKS>0.8) pra-sehat (IKS0.5-0.8) dan tidak sehaty (IKS<0.5).IKS dihitung dari 12 infikator Kemenkes RI.dengan nilai 1 jika keluarga memenuhi indicator tersebut dan 0 jika tidak*
Sumber Data	Data primer yang dikumpulkan melalui pelaksanaan Program Indonesia Sehat (PIS) dengan pendekatan keluarga (PIS-PK),ini dikumpulakn langsung melalui survei mengunakan kuesioner dari kementrian Kesehatan, yang diisi oleh kader Kesehatan atau petugas puskesmas saat melakukan kunjungan rumah untuk menilai 132 indikator keluarga sehat.
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0,33	0,35	0,4	0,42	0,45	0,58	0,6

x. Indeks Kesejahteraan Sosial

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Definisi	Untuk mengukur peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan perlu disusun Ikesos yang dapat menggambarkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan berdaya serta berjalannya peranan sosial. Hasil perhitungan Ikesos diharapkan dapat diterjemahkan oleh Kemensos dan

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Kesejahteraan Sosial</td></tr>
<tr><td></td><td>Pemerintah Daerah untuk menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan dan rencana strategis.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Nilai IKESOS Kabupaten/Kota sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbang atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP):

$IKESOS_{Kab/kota}=(Dimensi_1 x 0,27)+(Dimensi_2 x 0,3127)+(Dimensi_3 \times 0,42)$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKESOS, maka nilai IKESOS di atas dikonversikan dengan rentang nilai 0-100:

$IKESOS_{Kab/kota} \times 100$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0-100. Dengan interpretasi sebagai berikut:
- Nilai yang mendekati 100 menunjukkan Tingkat kesejahteraan sosial yang semakin baik
- Nilai yang mendekati 9 menunjukkan Tingkat kesejahteraan sosial yang semakin rendah</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Sosial Republik Indonesia</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>-</td><td>53,32</td><td>53,33</td><td>53,34</td><td>53,35</td><td>53,36</td><td>53,36</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

y. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: ii) Numerasi

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: ii) Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
ii) Numerasi</td></tr>
<tr><td></td><td>kelas V,VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:
1. Perlu intervensi khusus
2. Dasar
3. Cakap
4. Mahir
Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$$
Keterangan:
satdik min.SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi
n = Jumlah satuan pendidikan</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”)</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Dinas Pendidikan Prov. Sumsel
- Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>34,56</td><td>59,53</td><td>60,5</td><td>61</td><td>61,5</td><td>62</td><td>62,7</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

z. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V,VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 5. Perlu intervensi khusus 6. Dasar 7. Cakap 8. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".
Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan: *satdik min.SKM* = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
i) Literasi Membaca</td></tr>
<tr><td></td><td>membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”)</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Dinas Pendidikan Prov. Sumsel
- Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>36,15</td><td>56,24</td><td>56,8</td><td>57,5</td><td>58</td><td>58,5</td><td>59</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

aa. Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan

Nama Indikator	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan
Definisi	Warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage*, ICH) adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya tak benda juga mencakup instrumen, objek, artefak, dan lingkungan budaya yang terkait dengan komunitas, kelompok, dan individu. Warisan budaya tak benda diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok untuk menanggapi lingkungan, interaksi manusia dengan alam dan sejarah, dan untuk memberikan rasa identitas yang berkelanjutan. Lima domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kabupaten Musi Banyuasin adalah: • Tradisi lisan dan ekspresi: seperti Bahasa: Melayu Musi • Seni pertunjukan seperti Tarian: Tari Setabik, Tari Burung Putih, Tari Mare-Mare, Tari Ulang-Ulang, Tari Sabung Ayam, Tari Mantang Parah, Tari Dana, Tari Nasib, Tari Lading, Tari Tinggan Due Belas, Tari Piring Lilin, Tari Babendi-bendi.

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan</td></tr>
<tr><td></td><td>• Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan: sedekah bumi
• Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta: seperti Pengobatan: Besale (Pengobatan Tradisional di desa pulai gading kec.bayung lencir), tradisi pengobatan Duhut (Pengobatan Duhut dilakukan dengan cara pengurutan atau pemijitan dan memenfaatkan aneka racikan obat herbal alami yang berasal dari tumbuhan. Jenis- jenis penyakit yang biasa ditanggulangi dalam Pengobatan Duhut seperti patah tulang, nak anak (minta anak), nak anak lanang dan betine (minta anak laki-laki dan perempuan), tombong (peranakan keluar), kanker rahim, kedadak (sakit perut) dan lain-lain. Pewarisan pengobatan Duhut dapat diperoleh melalui dua cara; pertama diturunkan secara turun-temurun dengan melalui mimpi dan kedua dapat juga diperoleh melalui proses belajar di desa nganti Kec.Sanga Desa)
• Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional seperti Jumputan Gambo: Jumputan Gambo adalah kain khas metode jumputan, diwarnai dengan dicelup getah gambir dan bakul tangkal</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$\%WBTB = \frac{WBTB\ yang\ ditetapkan}{Karya\ Budaya\ yang\ tercatat}$ x 100%

Keterangan:
WBTB : Warisan Budaya tak Benda</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi % Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan, semakin terkelolanya warisan budaya tak benda</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>4</td><td>10</td><td>16</td><td>23</td><td>29</td><td>35</td><td>38</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ab. Jumlah Kematian Ibu (kasus/kejadian)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Jumlah Kematian Ibu (kasus/kejadian)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Banyaknya kasus/kejadian perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komlikasi kehamilan, persalinan dan masa nifas. Jumlah kematian ibu ini sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara/daerah/wilayah yang mencerminkan beberapa hal, yaitu: Kualitas pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, status gizi dan kesadaran masyarakat.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>3. Sensus Penduduk (SP) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), BPS
4. Dinas Kesehatan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>SP : 10 tahunan
SUPAS : 10 tahunan
Dinkes : 1 tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>4</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ac. Kabupaten/Kota Sehat

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Kabupaten/Kota Sehat</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Suatu kondisi daerah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati Masyarakat dan Pemerintah Daerah.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Kabupaten Kota Sehat mencakup 9 tatanan utama untuk penilaian, antara lain:
1. Kehidupan Masyarakat sehat mandiri
2. Permukiman dan fasilitas umum
3. Satuan Pendidikan
4. Pasar
5. Perkantoran dan Perindustrian
6. Pariwisata
7. Transportasi dan tertib lalu lintas
8. Perlindungan sosial
9. Penanggulangan bencana</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Kabupaten/Kota Sehat diberikan penghargaan Swasti Saba meliputi;
a. Padapa untuk Kabupaten/Kota Sehat klasifikasi pemantapan
b. Wiwerda untuk Kabupaten/Kota Sehat klasifikasi pembinaan
c. Wistara untuk Kabupaten/Kota Sehat klasifikasi pengembangan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Dinas Kesehatan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>Wistara</td><td>Wistara</td><td>Wistara</td><td>Wistara</td><td>Wistara</td><td>Wistara Paripurna</td><td>Wistara Paripurna</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3. Aspek Daya Saing Daerah

d. Indeks Pelayanan Infrastruktur

Lihat Indikator Kinerja Utama (IKU) nomor 2

b. Persentase Desa Mandiri (%)

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (%)
Definisi	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Desa: $ID = \sqrt[6]{D_1}\ X\ D_2\ X D_3\ X D_4\ X\ D_5\ X\ D_6$ Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa: - **Mandiri**: merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik; - **Maju**: merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik; - **Berkembang**: merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik; - **Tertinggal**: merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas; - **Sangat Tertinggal**: merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Persentase Desa Mandiri (%)</td></tr>
<tr><td></td><td>sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>39,74</td><td>32,75</td><td>33,62</td><td>33,62</td><td>34,5</td><td>34,93</td><td>35,5</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

c. Indeks Perkembangan Harga

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Perkembangan Harga</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks yang menggambarkan perkembangan harga pangan. Proksi inflasi khususnya inflai bahan pangan menggunakan perubahan IPH.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Setiap minggunya, disajikan CV (Coefficient of Variation) harga tertinggi diantara CV (Coefficient of Variation) harga 20 komoditas. CV (Coefficient of Variation) tertinggi menunjukkan komoditas yang paling bergejolak pada periode tersebut.

$IPH = \frac{Harga\ Rata{-}rata\ Komoditas\ Saat\ Ini}{Harga\ Rata{-}rata\ Komoditas\ Periode\ Dasar} \text{x } 100\%$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Jika Indeks Perkembangan Harga (IPH) semakin rendah, itu berarti terjadi perlambatan atau bahkan penurunan harga barang dan jasa, yang merupakan indikasi adanya deflasi atau disinflasi, serta berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat dan membuat ekonomi menjadi melambat atau stagnan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Badan Pusat Statistik</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Bulanan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>1,59</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2</td><td>2</td><td>1,5</td><td>1,5</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

d. Indeks Inovasi Daerah (IID)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Inovasi Daerah (IID)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke - i$

$Skor\ Jumlah\ Inovasi = Jumlah\ Inovasi\ x\ 0{,}38$

$SID = \frac{\sum_{j=1}^{n}(\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i)\ Inovasi\ ke\ j}{MAX\ (10,n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$

Keterangan :
n : Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah
i : nomor indikator
j : nomor inovasi
SPD adalah indikator Satuan Pemerintah Daerah
SID adalah indikator Satuan Inovasi Daerah

Penghitungan Indeks Inovasi Daerah (IID):

IID = $\frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}$ x 100</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>
<table>
<tr><td>Kategori</td><td>Skor</td></tr>
<tr><td>Sangat Inovatif</td><td>60,00 - 100,00</td></tr>
<tr><td>Inovatif</td><td>30,00 – 59,99</td></tr>
<tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0,01 – 29,99</td></tr>
<tr><td>Tidak Dapat Dinilai</td><td>0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>30,97</td><td>40,01</td><td>45,02</td><td>46,55</td><td>50,12</td><td>54,7</td><td>60,01</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

e. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (Kabupaten/kota) makan pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai per kapita ≥ 7,2 m^2 3. Memiliki anses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak.
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota **yang telah menerapkan PBG dan SLF** secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT\ x\ 100}$$ • PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTB: jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga.

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)</td></tr>
<tr><td></td><td>
2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak dan memiliki akses sanitasi layak)

$$PHLTB(proksi) = \frac{JRTHLTB\ (proksi)}{JRT\ x\ 100}$$

• PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
• JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
• JRT: Jumlah rumah tangga.

Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-pedesaan, dan desil pengeluaran.
</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kab. Muba dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Kab. Muba dari sektor perumahan.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Muba
- BPS</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>72,72</td><td>72,72</td><td>72,98</td><td>73,24</td><td>73,5</td><td>73,76</td><td>74</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

f. Rasio Kewirausahaan (%)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Rasio Kewirausahaan Daerah (%)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$Rasio\ Kewirausahaan\ Daerah = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ buruh}$ x 100%</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Banyuasin
- SAKERNAS, BPS</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan
Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>5,27</td><td>5,48</td><td>5,7</td><td>5,92</td><td>6,16</td><td>6,4</td><td>6,65</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

g. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan & Minum terhadap PDRB (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ PDRB\ Penyediaan\ Akmamin = \frac{Nilai\ Tambah\ Penyediaan\ Akmamin}{Nilai\ PDRB\ Kabupaten}$ x 100%
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, *ceteris paribus*. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29

h. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah Industri Pengolahan terhadap PDRB
Rumus Perhitungan	*Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan:* $= \frac{\text{nilai tambah sektor Industri Pengolahan}}{\text{nilai PDRB Kabupaten}}$ x 100%

Nama Indikator	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan (%)
Interpretasi	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor Industri Pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.*ceteris paribus*
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11,92	12,56	12,86	13,15	13,45	13,74	14,04

i. Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
Rumus Perhitungan	*Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan:* $= \frac{\text{nilai tambah sektor Pertanian,Kehutanan dan Perikanan}}{\text{nilai PDRB Kabupaten}}$ x 100%
Interpretasi	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.*ceteris paribus*
Sumber Data	Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12,09	12,26	12,45	12,64	12,84	13,03	13,23

j. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Milyar)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Milyar)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan share PMTB terhadap PDRB Kabupaten/Kota.
Rumus Perhitungan	*Pembentukan PMTB* $= \frac{PMTB}{PDRB\ ADHB}$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*finansial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*finansial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan
Target	

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Milyar)

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
25.451,72	26.000	27.000	28.500	29.500	31.000	32.000

k. *Return on Aset* (ROA) BUMD (%)

Nama Indikator	*Return on Asset* (ROA) BUMD(%)
Definisi	*Return on Asset* (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return on Aset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan
Rumus Perhitungan	$Return\ on\ Aset\ (ROA) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$ x 100%
Interpretasi	*Return on Aset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, Laporan Keuangan BUMD, BPS
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0,5	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5

l. Indeks Akses Keuangan Daerah

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Akses Keuangan Daerah</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman.
Nilai indeks berkisar antara 0-10.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$$IKAD_m = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$$
Di mana al merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>3,3</td><td>3,37</td><td>3,4</td><td>3,44</td><td>3,47</td><td>3,5</td><td>3,52</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

m. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rp juta)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Nilai transaksi saham per daerah adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (daerah). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Nilai transaksi saham ini berupa nilai rata-rata tahunan atau diperoleh total nilai transaksi saham selama 1 tahun dibagi 12.
Nilai transaksi saham per kapita diperoleh dari nilai transaksi saham disuatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$Nilai\ rata\text{-}rata\ transaksi\ saham\ tahunan = \frac{Nilai\ Transaksi\ saham\ selama\ 1\ tahun}{12}$

$Nilai\ rata\text{-}rata\ transaksi\ saham\ per\ kapita = \frac{Nilai\ rata-rata\ transaksi\ saham\ tahunan}{jumlah\ penduduk\ pertengahan\ tahun}$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudia akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>69.071,93</td><td>69.071,93</td><td>70.000</td><td>74.000</td><td>78.000</td><td>82.000</td><td>86.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

n. Total Kredit/PDRB (%)

Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (%)
Definisi	Total kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) dalam lingkup suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	*Total Kredit /PDRB (%)*$=\frac{Total\ Kredit}{PDRB\ (ADHB)}$x 100%
Interpretasi	Total Kredit/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian di daerah tersebut.
Sumber Data	- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - BPS
Frekuensi	Tahunan (PDRB)
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2,4	2,4	2,8	3,5	3,9	4,0	4,5

o. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indikator ini menghitung Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Daerah</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah PAD dengan total pendapatan daerah kemudian dikalikan 100%

$\%PAD = = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Menggambarkan Pencapaian Realisasi Pendapatan, pendapatan daerah merujuk pada analisis dan pemahaman terhadap jumlah, sumber, dan tren penerimaan daerah untuk mengetahui kemampuan finansial daerah dalam membiayai pembangunan serta melaksanakan program-programnya. Ini mencakup peninjauan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah, serta bagaimana pendapatan tersebut digunakan untuk memengaruhi kegiatan ekonomi daerah melalui realisasi belanja APBD.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- BPPRD
- BPKAD</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Bulanan, Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>10,57</td><td>12,23</td><td>12,53</td><td>12,85</td><td>13,17</td><td>13,51</td><td>14,05</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

p. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPRBPRS) di suatu daerah provinsi.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB kabupaten tersebut pada suatu waktu tertentu</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga/PDRB\ (\%) = \frac{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga}{PDRB} \times 100\%$

Keterangan:
Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di kabupaten)
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%) menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- BPS</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan (PDRB)</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>3,80</td><td>3,80</td><td>4,00</td><td>4,40</td><td>4,70</td><td>4,90</td><td>5,30</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

q. Rasio Ketergantungan Penduduk

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Rasio Ketergantungan Penduduk</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>adalah suatu indikator demografis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan kelompok usia non-produktif terhadap kelompok usia produktif dalam suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung kebutuhan hidup kelompok usia yang tidak bekerja, yaitu anak-anak dan lansia atau perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (biasanya usia 0–14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun), yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau rasio.
Rasio ini menggambarkan seberapa besar beban tanggungan ekonomi yang harus dipikul oleh kelompok usia produktif untuk membiayai kehidupan kelompok usia yang belum atau tidak lagi bekerja.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$$\textit{Depedency Ratio} = \frac{\textit{Jumlah Penduduk Usia } 0-14 + \textit{Jumlah Penduduk Usian } 65+}{\textit{Jumlah Penduduk Usia } 15-64} \text{ x } 100$$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>- Rasio < 50: Beban ketergantungan rendah, artinya penduduk usia produktif relatif lebih besar dan hanya menanggung sedikit penduduk non-produktif. Ini ideal untuk pembangunan ekonomi (bonus demografi).
- Rasio 50–100: Beban ketergantungan sedang. Kelompok usia produktif masih mampu menanggung kelompok non-produktif, tetapi tekanan ekonomi mulai terasa.
- Rasio > 100: Beban ketergantungan tinggi. Artinya, setiap 1 orang penduduk produktif harus menanggung lebih dari 1 orang non-produktif. Ini bisa menjadi tantangan ekonomi dan sosial.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- BPS
- PDAK Dirjen Kemendagri RI
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td></td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>49.76:49.76</td><td>49.76:49.46</td><td>49.46:49.08</td><td>49.08:48.06</td><td>48.06:48.08</td><td>48.08:47.56</td><td>47.56:47.1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

r. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen dimana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode perhitungan;
- Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$RPDRB_t = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Daerah_t}{PDRB_t}$ x 100%

Keterangan:
$RPDRB_t$: Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Muba
- BPS</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>0,04</td><td>0,04</td><td>0,04</td><td>0,05</td><td>0,05</td><td>0,05</td><td>0,05</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

s. Net Ekspor Barang dan Jasa (Milyar)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa (Milyar)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual dimana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Nilai net ekspor barang dan jasa merupakan nilai ekspor barang dan jasa setelah dikurangi nilai impor barang dan jasa dalam periode waktu tertentu.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Nilai net ekspor barang dan jasa merupakan nilai ekspor barang dan jasa setelah dikurangi nilai impor barang dan jasa dalam periode waktu tertentu.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam suatu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk di pasar internasional, meningkatkan penjualan dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan maka pendapatan negara/daerah juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BPS</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>-5.217,89</td><td>-5.095,5</td><td>-4.975,98</td><td>-4.859,27</td><td>-4.745,29</td><td>-4.633,98</td><td>-4.525,29</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

t. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) **adalah ukuran yang menunjukkan** persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) **dalam suatu wilayah dan periode tertentu**
Rumus Perhitungan	$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 + tahun)}} \times 100\%$
Interpretasi	**Menggambarkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja.** • Semakin tinggi TPAK → semakin banyak penduduk usia kerja yang berkontribusi pada kegiatan ekonomi. • Semakin rendah TPAK → ada potensi angkatan kerja yang tidak terserap (misalnya banyak yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau tidak mencari kerja).
Sumber Data	BPS Kabupaten Musi Banyuasin
Frekuensi	Perhitungan dan Publikasi data periode satu tahun
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
69,85	70,85	71,85	72,6	73,1	73,6	74,1

u. Proporsi PDRB Sektor Jasa (ADHB)

Nama Indikator	Proporsi PDRB Sektor Jasa (ADHB)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Jasa yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa terhadap total PDRB.

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Proporsi PDRB Sektor Jasa (ADHB)</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Proporsi PDRB Sektor Jasa:
$= \frac{\text{nilai tambah sektor Jasa}}{\text{nilai PDRB ADHB Kabupaten}}$ x 100%</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka ini menunjukkan seberapa besar PDRB daerah tersebut disumbangkan oleh berbagai kegiatan jasa. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor jasa, maka semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB per daerah. Sektor jasa yang dihitung pada dokumen ini ada 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BPS</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>4,66</td><td>4,66</td><td>4,66</td><td>4,67</td><td>4,67</td><td>4,68</td><td>4,68</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

v. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Rumus Perhitungan	*Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB* $= \frac{Volume\ Usaha\ Koperasi\ Daerah}{PDRB\ ADHB}$ x *100%*
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Musi Banyuasin - Kementerian Koperasi dan UMKM PDRB: PDRB Seri 2010, BPS
Frekuensi	Tahunan
Target	

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0,3045	0,3055	0,3065	0,3075	0,3085	0,3095	0,3105

4. Aspek Pelayanan Umum

a. Indeks Ketenteraman dan ketertiban

Lihat indikator kinerja utama nomor 3

b. Indeks daya saing daerah

Lihat indikator kinerja utama nomor 6

c. Survei Penilaian Integritas

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas (SPI)
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik K/L/PD.
Rumus Perhitungan	Penilaian SPI meliputi transparansi integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran dan sosialisasi anti korupsi. Metode SPI dilakukan dengan menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui survei terhadap pegawai K/L/PD, pengguna layanan K/L/PD tersebut dan ahli (ekspert). Selanjutnya data primer menjadi penyusun indeks integritas yang disesuaikan dengan faktor koreksi. Hasil survei berbentuk angka yang menunjukkan level integritas K/L/PD dengan skala 1 hingga 100.

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas (SPI)
Interpretasi	Semakin tinggi angka SPI sebuah institusi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut juga semakin baik.
Sumber Data	- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Inspektorat Kabupaten Muba
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
64,41	65,41	66,41	67,41	68,41	69,41	70,41

d. Indeks pelayanan publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator *Nilai per indikator*: $(\frac{nilai\ F01+nilai\ F02+nilai\ F03}{3})$ x bobot per indikator 2. Menentukan nilai setiap aspek *Nilai per aspek* : $\sum nilai\ per\ indikator$

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Pelayanan Publik</td></tr>
<tr><td></td><td>3. Menentukan indeks

$Nilai\ indeks : \sum nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyhektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Keadilan (Fairness);
2. Partisipasi (Participation);
3. Akuntabilitas (Accountability);
4. Transparansi (transparency);
5. Berdaya guna (useful);
6. Aksesibilitas (accessibility).

Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:

<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0-1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01-1,50</td><td>E</td><td>Sangat buruk</td></tr>
<tr><td>1,51-2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01-2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (dengan catatan)</td></tr>
<tr><td>2,51-3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3,01-3,50</td><td>B-</td><td>Baik (dengan catatan)</td></tr>
<tr><td>3,51-4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4,01-4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,51-5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</td></tr>
</table>

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4,57	4,6	4,63	4,66	4,69	4,72	4,77

e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBER dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij}\ x\ BA_{ij}$ Keterangan: NDj adalah nilai indeks domain ke-j; BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	- Kementerian PANRB - Dinas Komunikasi dan Informatika kab. Muba
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3,62	3,7	-	-	-	-	-

f. Indeks Pemerintah Digital

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Pemerintah Digital</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Pengembangan dari indeks SPBE dengan 9 aspek yaitu strategi dan rencana, tata kelola dan manajemen, teknologi digital, audit teknologi digital, ekamanan siber, kapabilitas dan budaya digital, pengelolaan dan pemanfataan data dan informasi, keterpaduan layanan digital pemerintahan, dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Pengukuran melalui tingkat kematangan (aspek 1-8)

<table>
<tr><th>Tingkat Kematangan</th><th>Kriteria</th><th>Penjelasan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rintisan</td><td>Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Terkelola</td><td>Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Terstandarisasi</td><td>Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Terintegrasi/Terpadu dan Terukur</td><td>Implementasi integrasi/keterpaduan nasional, dilakukan reviu/evaluasi berkala</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Optimum</td><td>Optimalisasi kapabilitas implementasi berdasarkan hasil reviu/evaluasi</td></tr>
</table>
Dan tingkat kepuasan melalui pembobotan pada aspek 9 dengan rumus
Nilai $Kepuasan\ Pengguna = \underline{n_k} - \underline{n_b}$
Keterangan:
$\underline{n_k}$ = nilai rata-rata pada persepsi keuntungan dan manfaat;
$\underline{n_b}$ = nilai rata-rata pada persepsi biaya dan risiko.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>
<table>
<tr><th>Rentang Indeks</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>1 s.d. < 1,8</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>1,8 s.d. < 2,6</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>2,6 s.d. < 3,5</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>3,5 s.d. < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,2 s.d. 5</td><td>Memuaskan</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kemenpan RB sesuai Surat KemenpanRB no B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan Kepada Instansi Pemerintah pada TAHUN 2025 dalam rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digitak sebagai Penguatan Kebijakan SPBE</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>2,2</td><td>2,8</td><td>3</td><td>3,2</td><td>3,4</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

g. Indeks Reformasi Hukum

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Reformasi Hukum (IRH)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Perhitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:
a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%;
b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%;

c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%;
d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Istimewa</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>B</td><td>>60-70</td><td>Cukup Baik</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>C</td><td>>30-50</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
</table>

Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara hasil Penilaian.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.</td></tr>
</table>

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum (IRH)
Sumber Data	- Kementerian Hukum dan HAM - Bagian Hukum Setda Kab. Muba
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
86,08	86,5	86,7	86,8	86,9	87	87,01

h. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Definisi	sebuah indikator untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berhasil diterapkan dan dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
Rumus Perhitungan	$\frac{JUMLAH\ KESELURUHAN\ PERDA\ DAN\ PERKARA\ YANG\ MEMUAT\ SANKSI}{JUMLAH\ KESELURUHAN\ PERDA\ DAN\ PERKADA\ YANG\ MEMUAT\ SANKSI} X100\%$
Interpretasi	Semakin Tinggi Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, maka semakin berhasil pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada oleh Lembaga yang bersangkutan
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan
Target	

2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
100	100	100	100	100	100	100

i. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Definisi	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibumlinmas yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>IPT = (Wbencana X Ibencana) + (Wtrantibum X Itrantibum) + (Wsatlinmas X Isatlinmas) + (Wkebakaran X Ikebakaran)</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>sebuah penilaian untuk mengukur tingkat kesiapan dan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah, khususnya dalam bidang bencana seperti pelayanan kebencanaan, dan kualitas pengelolaan tata kelola kewilayahan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Musi Banyuasin</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>2024 (baseline)</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>78,2</td><td>78,98</td><td>80,23</td><td>81,58</td><td>82,9</td><td>84,23</td><td>87,25</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Pohon Kinerja

RPJMD

POHON KINERJA RPJMD KAB. MUSI BANYUASIN TAHUN 2025-2029

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin	**1. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani**	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatknya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik							
		Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)	3,62	3,7	-	-	-	-	-
		BASELINE 2024 73,49	Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	-	-	2,20	2,80	3,00	3,20	3,40
		2026 74,02								
		2027 74,7	Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN							
		2028 74,9	Survey Penilaian Integritas (Angka)	64,41	65,41	66,41	67,41	68,41	69,41	70,41
		2029 75,3								
		2030 75,59	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
			Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,57	4,6	4,63	4,66	4,69	4,72	4,77
	2. Penguatan SDM Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat							
		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,95	7,95	8,09	8,22	8,32	8,42	8,5
		BASELINE 2024 72,27	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,33	12,51	12,69	12,9	13,1	13,3	13,5
		2025 72,67	Angka Literasi/Numerasi (%)	74,71	75,77	76,83	77,88	78,94	80	80,06
		2026 73,07								
		2027 73,1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat							
		2028 73,33	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,42	74,52	74.5	75.25	75.5	76.00	76,25
		2029 73,5	Prevalensi Stunting (%)	16,5	13	12	11	10	9	8
		2030 74,00								

3. Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi Menuju Musi Banyuasin Sejahtera

Menurunnya Angka Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (%)	
BASELINE 2024	12,88
2025	12,33
2026	11,78
2027	11,23
2028	10,69
2029	10.14
2030	9,59

Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

Rasio Gini (Angka)						
BASELINE 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0,314	0,310	0,308	0,305	0,304	0,302	0,300

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)						
BASELINE 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
2,13	2,08	2,03	1,98	1,94	1,9	1,89

Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pengan Masyarakat

	BASELINE 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	62,57	63,3	63,97	64,5	64,99	65,41	65,8
Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	79,48	80,97	82,04	83,11	84,18	85,26	86,33
Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	0,54	0,52	0,5	0,46	0,42	0,38	0,32

Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
BASELINE 2024	4,94
2025	4,50-5,00
2026	5,00-5,20

Meningkatnya pendapatan masyarakat

PDRB per kapita (Rp juta) (ADHB)						
BASELINE 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
133	145	160	175	180	186	191

Meningkatnya produktivitas sektor unggulan

BASELINE 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**

		2027	5,02-5,25	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29
		2028	5,04-5,30	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,92	12,56	12,86	13,15	13,45	13,74	14,04
		2029	5,08-5,35	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	12,8	13,07	13,34	13,61	13,88	14,05	14,32
		2030	5,10-5,40								
				Terjaganya Tingkat Inflasi	**BASELINE 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
				Indeks Perkembangan Harga (%)	1,59	2,5	2,5	2	2	1,5	1,5
4. Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keummatan	Terwujudnya Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan			Terciptanya kerukunan umat beragama	**BASELINE 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)			Penyelesaian Konflik antar umat beragama (%)	70	70	75	80	85	85	90
	BASELINE 2024	100									
	2025	100		Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat	**BASELINE 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	2026	100		Indeks Zakat Nasional (Poin)	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,7	0,73
	2027	100									
	2028	100		Meningkatnya Usaha Mikro / IKM yang menerapkan standar halal	**BASELINE 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	2029	100		Persentase Usaha Mikro yang bersertifikasi Halal (%)	0,17	1,5	2,74	4,18	5,68	7,22	8,76
	2030	100		Persentase IKM yang bersertifikasi Halal (%)	16,7	37	58	75	95	100	100

5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas

Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas

Indeks Pelayanan Infrastruktur (Angka)

BASELINE 2024	80,55
2025	82,5
2026	85
2027	86,67
2028	90
2029	93,33
2030	95

Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten)

Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)

BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
61,16	62,11	63,18	65,28	67,52	68,94	70,12

Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
94,67	97,5	100	100	100	100	100
1,2	2	2,5	3	4	5	7,5

Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)

BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
72,72	72,72	72.98	73.24	73.5	73.76	74,00

6. Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Perguruan Tinggi

Terwujudnya Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing

Indeks Daya Saing Daerah (Angka)

BASELINE 2024	3,37
2025	3,51
2026	3,6
2027	3,71
2028	3,82
2029	3,93

Meningkatnya Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (Angka)

BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
30,97	40,01	45,02	46,55	50,12	54,7	60,01

Meningkatnya Kewirausahaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital

Rasio Kewirausahaan (%)

Indeks Masyarakat Digital (Indeks)

BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5,27	5,48	5,7	5,92	6,16	6,4	6,65
40,7	42,7	45,27	49,84	54,41	58,98	63,55

2030	4

7. Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Angka)

BASELINE 2024	68,17
2025	64,44
2026	64,69
2027	64,94
2028	65,2
2029	65,45
2030	65,7

Meningkatnya Pembangunan Desa

Persentase Desa Mandiri (%)

BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
39,74	32,75	33,62	33,62	34,5	34,93	35,5

Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Penurunan Emisi GRK (TonCO2e)

BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
N/A	1.828.335,80	2.012.452,45	2.224.591,60	2.460.414,98	2.688.752,02	2.943.543,17

Turunnya Potensi Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (Angka)

BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
115,65	109,25	108,39	107,53	106,67	105,81	104,95

Sinkronisasi 45 IUP

RPJPD-RPJMD

Kab. Muba

KESELARASAN 45 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP) RPJPD DENGAN RPJMD

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA			IUP RPJMD KAB. MUBA						
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		Target Daerah						
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TRANSFORMASI SOSIAL	**Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Untuk Semua**	**IE.1. Kesehatan Untuk Semua**	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,09	79,65	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,52	79,03	74,52	74,55	75,25	75,55	76	76,25
			2. Kesehatan Ibu dan Anak			2. Kesehatan Ibu dan Anak:			2. Kesehatan Ibu dan Anak:								
			a. Angka kematian Ibu (pe 100.000 kelahiran hidup)	122	16	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	123	14	a.Jumlah kematian ibu (kasus	52	12	76	75	74	73	72	70
			b. Prevalensi*stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,0	b. Prevalensi*stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,0	5,3	b. Prevalensi*stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13	3	13	12	11	10	9	8
			3. Insidensi Turberkolis (per 100.000 penduduk)	272	76	3. Penanganan Tuberkulosis:			3. Penanganan Tuberkulosis:								
						a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	71	95	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	65	90	90	90	90	90	90	90
						b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	93,77	98,00	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	90	100	90	90	90	90	90	90
			4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	99,5	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	100	100	100	100	100	100

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA			IUP RPJMD KAB. MUBA						
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		Target Daerah						
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya Peningkatan Pendidikan Berkualitas	**IE.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata**	5.Hasil Pembelajaran			5.Hasil Pembelajaran			5.Hasil Pembelajaran									
			a. Rata-rata nilai PISA			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
			a-i Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	5,88-11,76	70,59-70,59	i) Literasi Membaca	-	-	-	-	-	-	-	-	
			a- ii Matematika	404	490	ii) Numerasi	0,00-5,88	58,82-64,7	ii) Numerasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
			a-iii Sains	416	487													
			b. Rata-rata nilai asesmen nasional			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
			b-i Literasi Membaca	62,89	75,73	i) Literasi Membaca	31,30-33,30	66,66-68,66	i) Literasi Membaca	60,5	72	56,24	56,8	57,5	58	58,5	59	
			b-ii) Numerasi	54,36	68,72	ii) Numerasi	25,14-27,14	59,46-61,46	ii) Numerasi	56,8	72	59,53	60,5	61	61,05	62	62,7	
			c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12,0	c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,19-9,20	11,66 - 11,72	c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,95	9,7-10	7,95	8,09	8,22	8,32	8,42	8,5	
			c. Harapan lama sekolah	13,32	14,81	d.Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,80 - 12,81	14,17 - 14,22	d.Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,51	13,74-14,15	12,51	12,69	12,9	13,1	13,3	13,5	
			6. Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60,00	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,88	8,88 - 10,14	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6,2	9-11	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	
			7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	66,78	75,00	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,46	85,00	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA			IUP RPJMD KAB. MUBA						
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		Target Daerah						
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif	IE.3. Perlindungan sosial yang adaptif	8.Tingkat kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	8. Tingkat Kemiskinan (%)	9,37-10,37	0,21-0,71	8. Tingkat Kemiskinan (%)	12,33	2,5-3,3	12,33	11,78	11,23	10,69	10,14	9,59
			9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26,00-29,83	95,19	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	52,53	70-90	52,53	53,53	54,53	55,53	56,53	57,53
			10. Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	23	55	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFORMASI EKONOMI	Terwujudnya Pengembangan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	IE.4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDB industri pengolahan (%)			11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)			11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)								
			a. Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28,0	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17,86-17,95	23,66 - 24,82	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,56	18,47-20,44	12,56	12,86	13,15	13,45	13,74	14,04
			b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,2-3,4	3,3-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12. Pengembangan Pariwisata:			12. Pengembangan Pariwisata:			12. Pengembangan Pariwisata:								
			a. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8,0	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum (%)	1,97	3,35	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum (%)	0,22	0,28-0,31	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29
			b. Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	22,10	100	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	12,90	42,40	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	49	68-74	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA			IUP RPJMD KAB. MUBA						
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		Target Daerah						
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			13 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	11,00	13. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Juta Rupiah)	3.030	9.000	13.Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN:			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:								
			a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi (%)	10,62	12,61	a. i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto(%)	0,008928	0,009107	0,0089280	0,0089390	0,0089500	0,0089620	0,0089730	0,0089840
						b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34	4,29	a. ii)Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada lev Kabupaten/Kota (%)	1,44	2,62-3,35	1,4400	1,5594	1,6788	1,7981	1,9175	2,0130
			b. Rasio kewirausahaan (%)	3,14	8,0	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,45	4,72	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,28	10,31-12,00	5,48	5,7	5,92	6,16	6,4	6,65
			c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0	d.Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,69	3,61	d.Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,561	0,576-0,578	0,3055	0,3065	0,3075	0,3085	0,3095	0,3105
			d. Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	*e. Return on Aset* (ROA) BUMD (%)	1,82	4,91	*e. Return on Aset* (ROA) BUMD (%)	0,5	2-2,5	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik								
			a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-5,00	4,00	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,82-3,93	1,74-2,75	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,08	1,45-1,3	2,08	2,03	1,98	1,94	1,9	1,89
			b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40	80	b.Persentase pekerja formal (%)	42	62	42	42,3	43,07	44,07	45,07	46,06
			16.Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	56,30	70,0	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,40	70,90	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55	70	54,9	54,95	55,1	55,2	55,3	55,4
			17. Tingkat penguasaan IPTEK			17. Tingkat Penguasan IPTEK			17. Tingkat Penguasan IPTEK								
			a. Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3	a. Indeks Inovasi Daerah	79,47	85	a. Indeks Inovasi Daerah	30,97	50,5-60,5	40,01	45,02	46,55	50,12	54,7	60,01
			b. Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar	b. Indeks Kapabilitas Inovasi	3,06	4,54	b. Indeks Kapabilitas Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	**IE.5. Penerapan Ekonomi Hijau**	18. Tingkat penerapan ekonomi hijau			18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	-	-	-	-	-	-	-	-
			a. Indeks ekonomi hijau (%)	70,8	90,65	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	62,22	89,66	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
			b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%	23,10	74,83	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terwujudnya Transformasi DIgital	**IE.6. Transformasi Digital**	19. Indeks daya saing digit ditingkat global (peringkat)	43	20 besar	19. Indeks Pembangunar Teknologi informasi dan Komunikasi	5,9	7,5	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	38,78	61,69-69,33	42,7	45,27	49,84	54,41	58,98	63,55
	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	**IE.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**	20. Biaya logistic (% PDB)	13,5	8,0	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	114275,00	4,72	20. Persentase disparitas harga barang kebutuhan pok dan barang penting tahunan Tingkat Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
			21. Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	30,1-30,2	27,2	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto (%)	30,54	23,62	21. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhada Produk Domestik Regional Bruto (%)	26,95	23,75-23,0	26	27	28,5	29,5	31	32

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA			IUP RPJMD KAB. MUBA						
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		Target Daerah						
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			22. Ekspor barang dan jasa (% PDB)	21,0-21,6	40,0	22. Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	21,26	27,56	22. Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	1,14	3,65	-5095,5	-4975,98	-4859,27	-4745,29	-4633,98	-4525,29
	Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan	**IE.8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**	23. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan									
			a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92	a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	1,41	1,8	a. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Nasional I (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
			b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00	100	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	65,01	100,00	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	72,72	76,0-77,0	72,72	72,98	73,24	73,5	73,76	74
			c. Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25	c. Persentase Desa Mandiri (%)	0,77	14,54	c.Persentase Desa Mandiri (%) (Indeks Desa Membangun)	66,68	91,70-96,00	32,75	33,62	33,62	34,50	34,93	35,50

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN		IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA			IUP RPJMD KAB. MUBA					
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		Target Daerah					
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TRANSFORMASI TATA KELOLA	Terwujudnya Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	IE.9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	24. Indeks materi hukum	0,51	0,71	24. Indeks Reformasi Hukum	70	100	24. Indeks Reformasi Hukum	50	60-65	86,5	86,7	86,8	86,9	87	87,01
			25. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,12	5,00	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,62	5,00	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,3	4,5	3,7	-	-	-	-	-
			26. Indeks pelayanan publik	3,68	5,00	26. Indeks Pelayanan Publik	4,42	5,00	26. Indeks Pelayanan Publik	4,6	4,85	4,6	4,63	4,66	4,69	4,72	4,77
			27. Anti Korupsi			27. Indeks Integritas Nasional	72,66	87,53	27. Survey Penilaian Integritas	65,41	85,41	65,41	66,41	67,41	68,41	69,41	70,41
			a. Indeks integritas nasional	74,52	96,98												
			b. Indeks persepsi korupsi	38	60												
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	Terwujudnya Keamanan daerah, dan Kualitas Demokrasi	IE.10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Indeks pembangunan hukum	0,69	0,89	28. Indeks Pembangunan Hukum a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70 70	100 90	28. Indeks Pembangunan Hukum: a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60 60	100 70	100 95	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
			29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5	80,0	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	70,82	88,20	29. Angka kriminalitas	153	50	861	855	849	843	837	831
			30. Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan	Tinggi (81,79-85,04)	Tinggi (90)	30. Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin								
									a. Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD (%)	50	85	80	80	80	80	80	90
									b.Persentase partisipasi pemilih dalam PEMILU terakhir (5 tahunan)	70,8	90	80	80	80	80	85	85
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro yang baik	IE.11. Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,70-11,20	18,0-20,0	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,25	2,00	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,12	0,15-0,16	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	NA
			32. Tingkat inflasi (%)	2,5± 1	2,0± 1	32. Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	0,9-2,7	32.Tingkat Inflasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
			33.Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan	-	-	33. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan	-	-	33. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
			a. Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,24	51,90	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	3,80	8,45	3,80	4,00	4,40	4,70	4,90	5,30
			b. Aset dana pensiun/PDB (%)	8,0	60	b. Aset dana pensiun/PDRB	0,73	6,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c. Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d. Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120	d. Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	12.796.305,07	113.978.098,81	d. Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	69.071,93	114.275	69.071,93	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00
			e. Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	e. Total Kredit/PDRB (%)	16,9	50,2	e. Total Kredit/PDRB (%)	2,4	11,2	2,4	2,80	3,5	3,9	4,00	4,5
			34. Inklusi keuangan (%)	91	98	34. Inklusi keuangan (%)	94,46	99,04	34. Inklusi keuangan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terwujudnya Ketangguhan	IE.12. Ketangguhan	35. Asia Power Index (*Diplomatic Influencer*)	61,54	75,0-80,0	35. Indeks Entropy Theil	1,32	0,5	35. Indeks Entropy Theil	8,415	7,395-7,200	8,415	8,410	8,400	8,395	8,390	8,385

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA			IUP RPJMD KAB. MUBA						
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		Target Daerah						
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Daerah	Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan	36. Asia Power Index (*Military Capability*)	16	45,0	36. Indeks Daya Saing Daerah	3,2	5,0	36. Indeks Daya Saing Daerah	3,51	4,5	3,51	3,6	3,71	3,82	3,93	4
	Terwujudnya Toleransi dan berkebudayaan maju	IE.13. Beragama Maslahat dan berkebudayaan maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,71 - 58,78	67,93-68,60	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)								
									a.Persentase benda,bangunan,struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	4,26	61	4,26	7,31	10,36	13,41	16,46	19,51
									b.Persentase warisan budaya tak benda yang tela ditetapkan terhadap total pencatatan (%)	2,6	52	2,6	6,25	8,85	11,45	14,06	16,66
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,01 - 78,08	84,82 - 85,64	38. Penyelesaian Konflik antar umat beragama (%)	70	90-100	70	75	80	85	85	90
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	Terwujudnya Keluarga berkualitas, kesetaraan	IE.14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80,0	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,16 - 69,17	74,08 - 74,15	39. Indeks Pembangunan Keluarga	63,3	73,25	63,3	63,97	64,5	64,99	65,41	65,8

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA			IUP RPJMD KAB. MUBA						
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		Target Daerah						
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	gender, dan masyarakat inklusif	**Masyarakat Inklusif**	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15	40. Indeks Ketimpanga Gender (IKG)	0,472-0,47	0,234 - 0,217	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,58	0,45-0,40	0,52	0,5	0,46	0,42	0,38	0,32
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	**IE.15. Lingkungan Hidup Berkualitas**	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	0,75	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,465	0,625	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-	-	-	-	-
			42. Kualitas Lingkungan Hidup			42. Kualitas Lingkungan Hidup			42. Kualitas Lingkungan Hidup								
			a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05	a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	68,19	73,26	a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	64,44	69,49	64,44	64,69	64,94	65,2	65,45	65,7
			a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02	88,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,54	60,00	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	82,31	100	2	2,5	3	4	5	7,5
			c. Timbulan sampah terola difasilitasi	24	90	c. Pengelolaan Sampah			c. Pengelolaan Sampah								
						i). Pengelolaan sampah (Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%)	10	75	i). Pengelolaan sampah (Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%)	19,56	52,14-63	44	45	46	47	47,5	48
			pengolahan sampah (%)			ii). Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29	70	ii). Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT	24	81-100	24	28	32	35	39	43
	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandiran Pangan	**IE.16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**	43. Ketahanan energi, air, dan kemandiran menuju kedaulatan pangan			43. Ketahanan energi, air, dan pangan			43. Ketahanan energi, air, dan pangan								
			i. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi								
			- Indeks ketahanan energi	6,77	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	783	3.400	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1000	2.000-2.500	1000	1040	1080	1120	1160	1200
						- Itensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	197	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA			IUP RPJMD KAB. MUBA						
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		Target Daerah						
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			ii. Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (%)	7,21	0,77	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	5,75	0,44	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan(%)	8	5,0-4,0	4,24	4,07	3,9	3,73	3,56	3,39
						Indeks Ketahanan Pangan	74,03	91,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			iii. Ketahanan air			c. Ketahanan Air			c. Ketahanan Air								
			- Kapasitas tampungan air per kapita (m/kapita)	65,18	200	- Kapasitas air baku (m³/detik)	1,72	11,44	- Kapasitas air baku (m³detik)	0,2	0,75-0,9	0,2000	0,2275	0,2550	0,2825	0,3100	0,3375
			- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39,20	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	42,25	80	-Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan (%)	54,09	100	54,09000	56.78	59,48	62,17	64,87	67,56
	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	**IE.17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**	44. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11	44. Indeks Risiko Bencana (IRB) akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	132,06	112,46 - 95,65	44. Indeks Risiko Bencana (IRB) akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	111,99	92,39-94,89	109,25	108,39	107,53	106,67	105,81	104,95
			45. Presentasi penurunan emisi GRK (%)			45.Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45.Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (Menjadi: Penurunan Emisi GRK (To CO2-e)								
			a. Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	18,50	41,98	a. Kumulatif	1.828.335,80	5.863.585,83-7.493.654,59	1.828.335,80	2.012.452,45	2.224.591,60	2.460.414,98	2.688.752,02	2.943.543,17
			b. Tahunan	36,65	80,89	b. Tahunan	31,02	80,57	b. Tahunan	-	-	-	-	-	-	-	-